INVENTARIS
ARSIP SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PERDANA MENTERI
TAHUN 1950 - 1959

DIREKTORAT PENGOLAHAN
DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Inventaris Arsip Sekretariat Negara pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 ini. Penyusunan inventaris ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) wajib melaksanakan pengolahan arsip statis berskala nasional. Inventaris tersebut digunakan sebagai jalan masuk atau *finding aids* yang digunakan oleh pengguna sebagai sarana penemuan kembali arsip yang dibutuhkan.

Penyusunan inventaris ini dilakukan oleh Retno Wulandari, Sutiasni, Tri Yekti Mufidati, Hery Purwondo, Achmad Sofyan, Eva Julianty, Tyanti Sudarani, Ida Ruspeni, Bakat Untoro, Arshanti Kurnianingrum, Widhi Setyo Putro, Sri Ristiningrum, Surti Widayati, Tri Artasari, Dedi Febri Martono, Andika Satriya Perdana, Suharti, Titik Kurniawati, Risma Anggiyani, Arum Esthu Domaz, Prasitio Utomo dan Diah Minarti Rahayu. Di samping itu, inventaris ini dapat tersusun juga karena kerjasama yang baik dengan Sekretariat Negara yang telah menugaskan pejabatnya yaitu Eko Harnowo dan Suripto untuk ikut melakukan pembahasan secara intensif. Untuk itu atas nama ANRI kami mengucapkan terimakasih.

Akhirnya, kami menyadari bahwa inventaris ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik kami harapkan untuk perbaikkan mutu inventaris lainnya dikemudian hari. Semoga inventaris arsip ini dapat dijadikan sebagai jalan masuk bagi pengguna sekaligus sebagai salah satu wujud pelayanan kepada publik yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian, kesejarahan atau kepentingan lainnya.

Jakarta, Desember 2011

Direktur Pengolahan

Imam Gunarto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN iv
A. Sejarah Sekretariat Negara iv
B. Organisasi Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri vii
C. Sejarah Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri viii
D. Pengaturan Arsip Sekretariat Negara Pada Masa Kabinet Perdana Menteri viii
DAFTAR PUSTAKA xiii
DAFTAR ARSIP STATIS 1
A. URUSAN UMUM 1
1. Administrasi 1
a. Agenda 1
b. Ekspedisi 2
2. Kepegawaian 4
a. Pengadaan Pegawai 4
b. Pengembangan Pegawai 6
c. Pengangkatan Pegawai 7
d. Mutasi dan Kenaikan Pangkat 9
e. Cuti dan Izin Pegawai 12
f. Perjalanan Dinas 13
g. Personal File 23
h. Pemberhentian Pegawai 25
i. Serikat Sekerja Pegawai 26
3. Keuangan 27
a. Perbendaharaan 27
1) Biaya/Ongkos 27
2) Otorisasi 37
3) Anggaran 44
4) Ganti Rugi dan Hutang 66
5) Gaji Pegawai 68
b. Pembukuan/Pemeriksaan 72
1) Pembukuan 72

2) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) 85
4. Peralatan dan Kendaraan 88
a. Peralatan 88
b. Kendaraan 98
5. Kesejahteraan Pegawai 102
a. Tunjangan 102
b. Koperasi 108
c. Dana Kesejahteraan 111
d. Perkumpulan Pegawai 113
e. Perumahan 113
f. Tanda Jasa/Penghargaan 120
6. Kehumasan/Keprotokolan 124

B. URUSAN KHUSUS 126
1. Urusan Keamanan 126
a. Gangguan Keamanan 126
b. Hukum 166
c. Peralatan Keamanan 184
d. Pertahanan 191
e. Anggota Kemiliteran 199
2. Urusan Politik 210
a. Pemerintah Pusat 210
b. Pemerintahan Daerah 228
c. Organisasi Sosial dan Politik 240
d. Pemilihan Umum 254
e. Irian Barat 257
f. Hubungan Luar Negeri 260
g. Pengaturan Bangsa Asing 316
h. Penerbitan 324
i. Hari Besar 332
3. Urusan Ekonomi dan Keuangan 336
a. Bea Cukai dan Perpajakan 336
b. Perdagangan dan Industri 340
c. Agraria (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan) 351

d. Perbankan 368
e. Hubungan Ekonomi Luar Negeri 372
f. Bantuan Luar Negeri 382
g. Kebijaksanaan Keuangan 387
h. Perhubungan & Telekomunikasi 393
4. Urusan Sosial 398
a. Perburuhan/Tenaga Kerja 398
b. Urusan Agama 412
c. Pendidikan, Teknologi dan Kebudayaan 417
d. Kesehatan 442
e. Bantuan Sosial 449
f. Transmigrasi dan Pembangunan Masyarakat Desa 454
5. Urusan Parlemen 459
a. Penyelesaian Perundang-undangan 459
b. Mosi dan Interpelasi 477
c. Risalah DPR dan Konstituante 489
INDEKS .....
DAFTAR SINGKATAN .....
CONCORDAN

BAB I
PENDAHULUAN

Pada awal kemerdekaan, pembentukan lembaga-lembaga negara untuk menjalankan roda pemerintahan sangatlah penting, salah satunya adalah Sekretariat Negara (Setneg). Lembaga ini menjadi bagian dalam struktur kabinet yang mempunyai fungsi membantu tugas sehari-hari presiden dan wakil presiden dalam hal administrasi pemerintahan. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia, Setneg mengalami banyak perubahan baik dari segi struktur kelembagaan maupun tugas dan fungsinya.

Perubahan yang terjadi dalam Setneg salah satunya dipengaruhi oleh konstelasi politik yang terjadi di tanah air, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Inventaris arsip ini berisi tentang daftar arsip yang tercipta dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan negara pada masa Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959.

A. SEJARAH ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA

1. Sekretariat Negara Periode Awal Kemerdekaan 1945-1949

Pada pembentukan kabinet pertama, Presiden Soekarno mengangkat Mr. Raden Mas Abdoel Gafar Pringgodigdo sebagai sekretaris negara pada tanggal 2 September 1945. Struktur organisasi Setneg pada masa itu masih sangat sederhana. Tugas pokok Setneg adalah membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di dalam menjalankan tugasnya sekretaris negara dibantu oleh 2 orang pembantu, yaitu wakil sekretaris negara I dan II. Tugas wakil sekretaris negara I adalah mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keprotokolan (rumah tangga istana-istana), menyiapkan rapat-rapat dan sidang-sidang kabinet. Wakil sekretaris negara II bertugas mengelola tata administrasi pemerintahan antara lain, menyiapkan rencana undang-undang serta menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.[1]

Pada 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlemanter. Presiden bertindak sebagai kepala negara, sementara itu perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Setneg mendapat tambahan tugas baru, yaitu menjadi penghubung antara presiden dengan perdana menteri. Selain itu, Setneg juga memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai penghubung/perantara bagi instansi, lembaga ataupun

[1]Wahid Salim, *et.al., Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009), hlm. 47.

perseorangan dalam menyampaikan aspirasi/saran ataupun hal penting lainnya yang ditujukan pada pemerintah. Kedua, mendokumentasikan serta mengumpulkan surat-surat penting serta menyebarluaskan informasi tentang penetapan, peraturan atau keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh presiden ataupun pejabat pemerintah lainnya.[2]

Struktur Sekretariat Negara RI pada awal kemerdekaan

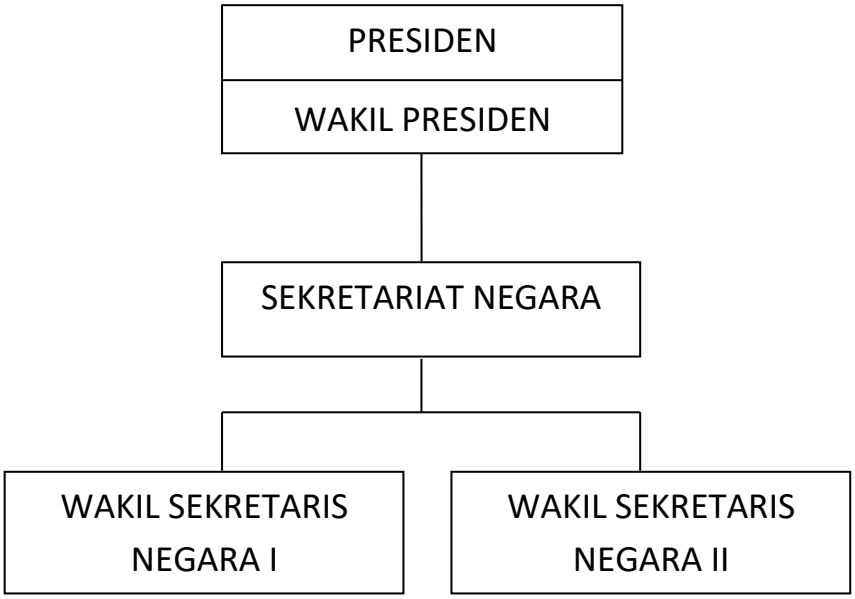

2. Sekretariat Negara Periode Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Pada 28 Desember 1949, presiden dan pejabat-pejabat lainnya pindah kembali ke Jakarta dari Yogyakarta. Mr. A.G. Pringgodigdo digantikan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo menjadi sekretaris negara (1950-1957). Pada periode ini nama Setneg diganti menjadi Kabinet Presiden yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Tugas-tugas yang dijalankan Kabinet Presiden sama dengan Setneg sebelumnya.[3]

Pada masa RIS, terjadi sedikit perubahan dalam struktur organisasi Sekretariat Negara dengan membentuk suatu unit yaitu Sekretariat Wakil Presiden yang berfungsi menunjang dan melancarkan tugas wakil presiden. Secara teknis operasional unit ini bertanggung jawab kepada wakil presiden, tetapi secara administratif berada di bawah koordinasi Kabinet Presiden. Adapun organisasi Sekretariat Wakil Presiden hanya terdiri atas bagian administrasi dan keuangan.[4]

---

[2]*Ibid*., hlm. 15
[3]Inventaris Arsip Kabinet Presiden tahun 1950-1959, No. 2352, ANRI.
[4]*Ibid*.

3. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pada masa ini Indonesia kembali ke dalam bentuk negara kesatuan dari sebelumnya negara serikat dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Di dalam UUDS 1950, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer dan juga dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Pada periode ini pemerintahan diwarnai dengan ketidakstabilan dalam bidang politik dan keamanan. Sistem politik liberal dengan multipartai yang menghadirkan sistem koalisi dan oposisi, membuat kabinet sulit untuk mempertahankan pemerintahannya. Berikut ini kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) [5] :

- Kabinet Natsir (21 September 1950 – 27 April 1951)
- Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 03 April 1952)
- Kabinet Wilopo (03 April 1952 – 01 Agustus 1953)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo I (01 Agustus 1953 – 12 Agustus 1955)
- Kabinet Burhanuddin harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956 – 09 April 1957)
- Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) (09 April 1957-10 Juli 1959).

Setneg pada periode ini tetap dengan nama Kabinet Presiden yang dipimpin oleh Direktur Kabinet Presiden. Adapun tugas-tugas dari Kabinet Presiden berhubungan dengan kegiatan presiden sebagai kepala negara, antara lain: menangani surat-surat presiden untuk urusan sipil, mengorganisir upacara-upacara kenegaraan, mengatur perjalanan dan keuangan presiden, mengatur hubungan presiden dengan pers, radio dan televisi, serta mengurus kebutuhan pribadi presiden dan keluarganya. Pada periode ini dibentuk organisasi baru yaitu Kabinet Perdana Menteri yang bertugas memberikan dukungan staf serta administrasi kepada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan**.** [6]

4. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Terpimpin (1960-1966)

Kegagalan Badan Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru untuk menggantikan UUDS 1950 serta meningkatnya gerakan separatisme di daerah, ‘memaksa’ Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. [7] Keputusan penting dari Dekrit itu adalah

---

[5]Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 251

[6]Salim, *op.cit*., hlm. 49

[7]Mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945” lihat *Lembaran-Negara Republik Indonesia*, No. 75, 1959

pembubaran Badan Konstituante dan diberlakukannya kembali UUD 1945. Dekrit tersebut juga menandakan babak baru dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin yang menggantikan Demokrasi Parlementer.

Perubahan ketatanegaraan tersebut berpengaruh pula terhadap perubahan Setneg. Di dalam perkembangan peralihan sistem pemerintahan ke UUD 1945 terjadi perubahan-perubahan status atas organisasi Kabinet Presiden dan Kabinet Perdana Menteri. Melalui Keputusan Presiden No. 221 tahun 1960 ditetapkan penghapusan Kabinet Presiden dan pengembalian nama Sekretariat Negara.[8] Sementara itu Kabinet Perdana Menteri diubah menjadi Kabinet Menteri Pertama.[9] Perubahan lainnya yaitu kedudukan Sekretariat Negara yang menjadi sejajar dengan kementerian dan berada langsung di bawah Presiden.[10]

5. Sekretariat Negara Periode Demokrasi Pancasila hingga Reformasi (1966-sekarang)

Pada 20 Februari 1967, Presiden Soekarno mengumumkan penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto yang selanjutnya dilantik sebagai Pejabat Presiden RI berdasarkan Ketetapan MPRS No: XXXIII/MPRS/1967. Pada 15 April 1967 Pejabat Presiden Soeharto menetapkan susunan organisasi Setneg berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 tahun 1967 tentang Susunan Organisasi dan Pembagian Kerja Sekretariat Negara, dinyatakan bahwa:[11]

1) Sekretariat Negara bertugas membantu Presiden RI/Pimpinan Tertinggi ABRI dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara dengan penyelenggaraan administrasi kenegaraan dan pemerintahan dalam arti luas;
2) Sekretaris Negara berada di bawah Presiden dan dalam menjalankan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Presiden;
3) Sekretaris Negara terdiri dari tiga Sekretariat yaitu: (a) Sekretariat Presidium Kabinet atau Sekretariat Kabinet, (b) Sekretariat Kepresidenan dan (c) Sekretariat Urusan Militer.

Selanjutnya terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi pada Setneg. Perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan peranan Setneg untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan

---

[8]*Lembaran-Negara Republik Indonesia*, 1960.

[9]Mengenai pengangkatan menteri pertama dan susunan kabinet lihat Keputusan Presiden RI No. 153 tahun 1959 lihat juga Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.140/M.P./1962 tentang Pembagian Kabinet Presiden, Sekretariat Militer Presiden dan Biro-Biro dalam Sekretariat Negara.

[10]Salim, *op.cit*., hlm. 52

[11]*Lembaran-Negara Republik Indonesia*, 1967.

pemerintahan. Perubahan yang terakhir didasarkan pada Keputusan Presiden No. 31 tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. [12]

Setneg dan Sekretariat Kabinet (Sekab) adalah lembaga pemerintah yang masing-masing dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setneg mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada presiden dan wakil presiden. Sedangkan Sekab mempunyai tugas memberikan dukungan dan administrasi, serta analisis kepada presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

B. ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA PADA MASA KABINET PERDANA MENTERI[13]

Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri dipimpin oleh seorang sekretaris dengan tugas menyelenggarakan segala hal-hal administratif yang diperlukan oleh perdana menteri/wakil perdana menteri dalam melaksanakan tugasnya. Tugas-tugas perdana menteri antara lain:

1) Perdana menteri/wakil perdana menteri sebagai pemimpin pemerintahan;
2) Perdana menteri/wakil perdana menteri sebagai menteri yang bertanggung jawab atas badan-badan, dewan-dewan dan panitia .
3) Perdana menteri sebagai ketua Dewan Menteri

Adapun badan-badan yang dimaksud dalam poin 2 di atas yaitu:

1) Kepolisian Negara
2) Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional
3) Biro Perancang Negara
4) Jawatan Sandi
5) Dewan dan Kantor Urusan Kerugian Perang
6) Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar negeri
7) Panitia-panitia negara:
    a. Peninjauan tarif Listrik
    b. Nasionalisasi Perusahaan Listrik dan Gas
    c. Urusan Irian
    d. Perbaikan Makanan

[12] *Online* www.depdagri.go.id/media/.../2005/04/19/Perpres-No.31-2005.doc ditelusuri pada 7 Agustus 2011.

[13]Inventaris Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No 41, ANRI.

e. Urusan Pertambangan
f. Untuk Menyelidiki Organisasi Pemerintah

8) Dewan Ekonomi-Keuangan
9) Dewan Pertahanan

Untuk menunjang tugas-tugas Perdana Menteri tersebut, Kabinet Perdana Menteri mempunyai bagian-bagian sebagai berikut:

1) Bagian Sekretariat, dengan seksi-seksi sebagai berikut:
   a. Seksi Arsip dan Agenda
   b. Seksi Tik dan Stensil
   c. Seksi Ekspedisi
2) Bagian Urusan Keamanan

   Menyelenggarakan penyelesaian soal keamanan pada umumnya termasuk dalam urusan Staf "K" Pusat, Kepolisian Negara, Biro Rekonstruksi Nasional dan Dewan Pertahanan.
3) Bagian Politik/dan Dokumentasi

   Bertugas menyelami keadaan politik yang menentukan pada kebijakan-kebijakan politik-polisionil Perdana Menteri pada khususnya.
4) Bagian Hubungan Luar Negeri dan Sosial

   Bertugas menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan urusan sosial, perburuhan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, kesehatan serta agama.
5) Bagian Urusan Ekonomi Keuangan

   Menyelenggarakan penyelesaian soal-soal yang berhubungan dengan ekonomi-keuangan serta Dewan dan Biro Perancang Negara.
6) Bagian Umum

   Bertugas mengurus soal kepegawaian, keuangan, rumah tangga (peralatan, tata-tertib dan kendaraan)
7) Bagian Urusan Parlemen

   Bertugas mengurus segala soal yang berkenaan dengan hubungan antara DPR dengan pemerintah pada umumnya dan dengan Perdana Menteri pada khususnya.
8) Bagian Urusan Persiapan & Perlengkapan

   Bertugas menyelenggarakan bahan-bahan sidang, yang dibutuhkan untuk kemudian menyelenggarakan secara administratif segala putusan sidang Dewan Menteri.
9) Bagian Risalah

   Bertugas menerbitkan hasil sidang dan keputusan rapat.

Struktur Kabinet Perdana Menteri

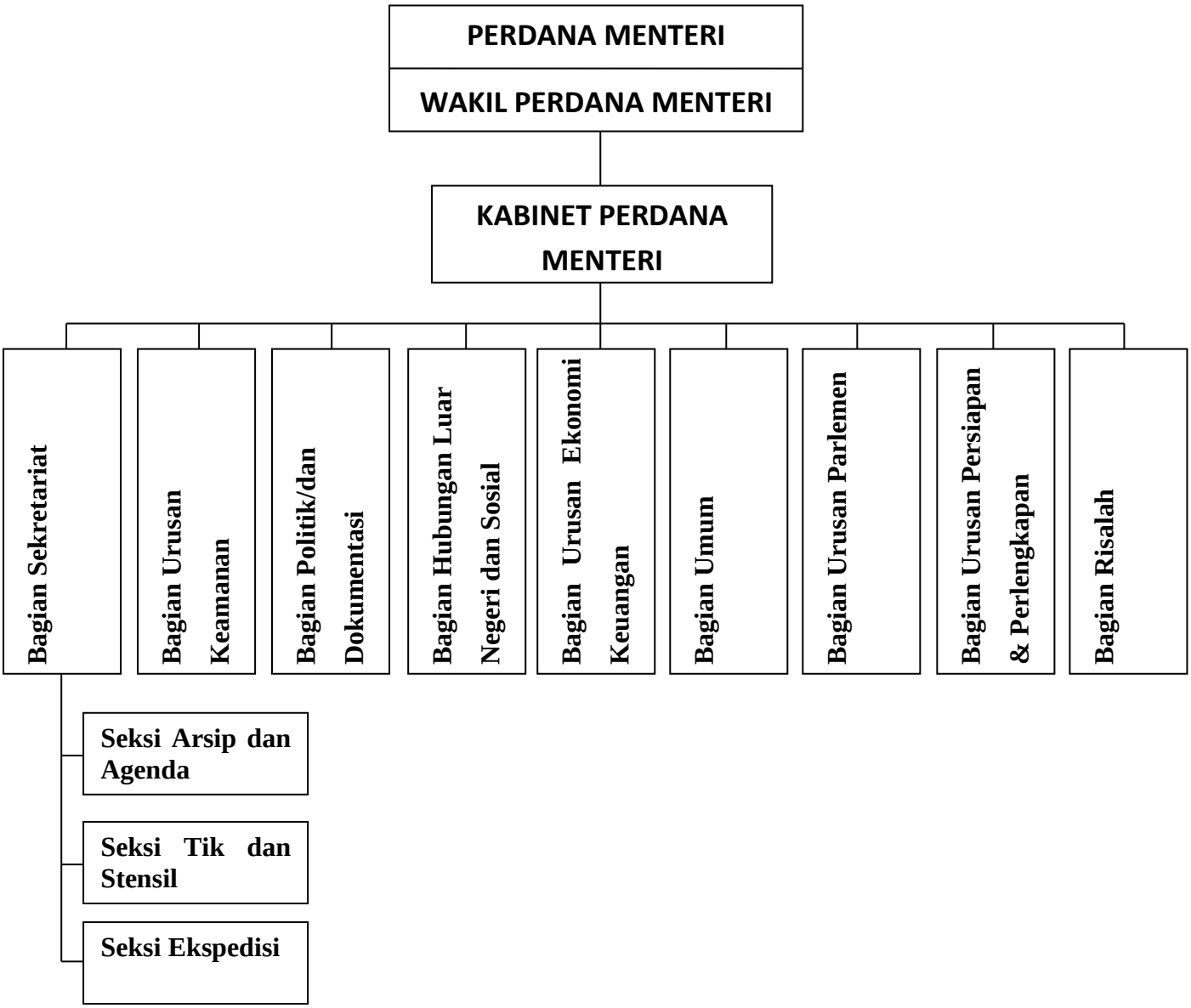

C. SEJARAH ARSIP SEKRETARIAT NEGARA PADA MASA KABINET PERDANA MENTERI

Arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri periode 1950-1959 diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) oleh Setneg pada tanggal 12 Pebruari 1973 dengan jumlah 330 boks. Pada waktu pertama kali diidentifikasi kondisi arsip dalam keadaan tidak teratur, bahkan banyak yang merupakan lembaran-lembaran lepas serta rusak. Pada saat diserahkan ke ANRI, arsip-arsip tersebut tanpa disertai dengan jalan masuk, bahkan sudah tidak ditemukan sistem penataannya pada saat arsip masih berstatus dinamis. Selain itu, arsip ini banyak yang tercampur dengan arsip Setneg Kabinet Presiden. Informasi yang terkandung di dalam arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri, antara lain terkait dengan masalah keamanan, Pemilu 1955, kerja sama ekonomi luar negeri, perburuhan, usaha merebut Irian Barat dan lain sebagainya.

D. PENGATURAN ARSIP SEKRETARIAT NEGARA PADA MASA KABINET PERDANA MENTERI

Penyusunan inventaris arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri telah dilakukan pada tahun 1988 oleh mahasiswa Diploma III Ilmu Kearsipan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Akan tetapi inventaris tersebut sudah beberapa tahun tidak bisa diakses lagi, karena tidak ada kesesuaian antara nomor inventaris dengan fisik arsip yang ada di depo. Jumlah keseluruhan arsip adalah 130 ml, yang terdiri dari 2009 nomor, tetapi pada saat dilakukan pendataan tidak semua boks-boks tersebut terisi arsip. Oleh karena itu pengolahan kali ini bertujuan merevisi inventaris sebelumnya, sehingga terwujud kesesuaian antara nomor inventaris dengan fisik arsip yang tersimpan.

Proses pengolahan arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Identifikasi arsip

   Identifikasi arsip untuk mengetahui tugas, pokok dan fungsi organisasi, jumlah dan kondisi fisik arsip dan sistem penataan serta pencipta (*provenance*) arsip.

b. Penyusunan Rencana teknis

   Berdasarkan hasil identifikasi tersebut di atas, tahapan berikutnya membuat rancangan kerja atau rencana teknis dengan menguraikan perkiraan rincian waktu, biaya dan pelaksana yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan arsip statis.

c. Penelusuran sumber dan referensi

   Tahapan selanjutnya dari pengolahan arsip adalah kegiatan penelusuran sumber dan referensi. Sumber primer berasal dari arsip Setneg Kebinet Perdana Menteri sendiri dan sumber sekunder berupa buku dari perpustakaan atau lembaga terkait.

d. Pengecekan arsip

   Pada tahapan ini dilakukan pengecekan arsip, baik dari segi fisik maupun informasinya dalam inventaris awal. Jika terdapat ketidaksesuaian antara deskripsi yang ada di inventaris dengan informasi arsip yang ada di depo maka dilakukan deskripsi ulang.

e. Pembuatan skema sementara

   Setelah memperoleh data yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi dari lembaga/organisasi pencipta arsip dan juga melihat inventaris Sekretariat Negara-Kabinet Perdana Menteri terdahulu, selanjutnya disusun gambaran untuk mengelompokkan arsip berupa skema pengaturan arsip sementara.

f. Rekonstruksi arsip

   Dalam tahap rekonstruksi arsip ini, arsip-arsip yang akan diolah dikelompokkan berdasarkan skema pengaturan arsip tersebut di atas.

g. Deskripsi arsip dan entri data

Kegiatan deskripsi dimulai dengan membaca keseluruhan informasi dalam arsip yang dituangkan dalam *fisches* (kartu deskripsi) yang terdiri atas 5 (lima) unsur deskripsi, yaitu: bentuk redaksi, isi informasi, kurun waktu, tingkat perkembangan dan bentuk luar, dengan mencantumkan nomor urut arsip sementara pada kartu deskripsi. Hasil deskripsi kemudian diketik ke dalam komputer dengan format excel.

h. Pembuatan skema definitif

Setelah memperoleh informasi dari deskripsi arsip, maka diperoleh gambaran kegiatan yang tercipta dari organisasi tersebut, gambaran tersebut akan merubah susunan skema pengaturan arsip sementara menjadi skema pengaturan arsip definitif.

i. Manuver data

Kegiatan manuver data dilakukan dengan mengelompokkan hasil deskripsi sesuaikan dengan skema definitif dan diurutkan secara kronologis.

j. Penomoran definitif

Setelah manuver data selesai maka dilakukan penyusunan urut definitif pada data tersebut.

k. Manuver fisik arsip

Kegiatan manuver fisik arsip dilakukan setelah penomoran definitif selesai, kemudian arsip disusun berdasarkan nomor definitif yang tertera pada sampul arsip.

l. Pemberian label

Setelah manuver fisik selesai dilakukan maka kegiatan selanjutnya adalah pemberian label pada bungkus arsip dan boks arsip. Label arsip terdiri atas nama pencipta dan nomor arsip sesuai dengan nomor definitifnya dan untuk label boks terdiri atas nama lembaga pencipta arsip, kurun waktu arsip, nomor urut arsip, dan nomor urut boks.

m. Penataan dalam boks

Kegiatan selanjutnya adalah penataan arsip dalam boks arsip, arsip yang sudah diberi label dimasukkan ke dalam boks disesuaikan dengan kapasitas boks besar. Setelah arsip masuk ke dalam boks maka kegiatan selanjutnya adalah menempel label boks yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

n. Penulisan inventaris

Setelah semua data dan informasi terkumpul maka perlu dilakukan kegiatan perumusan materi prosedur tetap inventaris arsip yang dituangkan dalam format inventaris arsip berdasarkan hasil identifikasi arsip, sistem penataan maupun *provenance* yang berlaku di lingkungan ANRI. Pada kegiatan penulisan ini dibuat skema isi inventaris arsip yang terdiri dari komponen: judul; kata pengantar; daftar isi; pendahuluan yang berisi: sejarah

organisasi, sejarah arsip, proses pengaturan arsip, daftar pustaka; dan lampiran yang berisi: daftar indeks, daftar singkatan, dan struktur organisasi.

o. Pengesahan

Tahap terakhir setelah penyusunan inventaris adalah pengesahan inventaris oleh pejabat yang berwenang yaitu direktur pengolahan, hal ini membuktikan bahwa penyusunan inventaris tersebut telah selesai dan siap untuk diserahkan kepada ruang baca dan ruang penyimpanan arsip.

Pengaturan arsip Setneg Kabinet Perdana Menteri menggunakan skema berdasarkan fungsi dari setiap unit organisasi. Skema tersebut terdiri dari :

A. URUSAN UMUM

1. Administrasi

a. Agenda
b. Ekspedisi

2. Kepegawaian

a. Pengadaan Pegawai
b. Pengembangan Pegawai
c. Pengangkatan Pegawai
d. Mutasi dan Kenaikan Pangkat
e. Cuti dan Izin Pegawai
f. Perjalanan Dinas
g. Personal File
h. Pemberhentian Pegawai
i. Serikat Sekerja Pegawai

3. Keuangan

a. Perbendaharaan:
1) Biaya/Ongkos
2) Otorisasi
3) Anggaran
4) Ganti Rugi dan Hutang
5) Gaji Pegawai
b. Pembukuan/Pemeriksaan :
1) Pembukuan
2) Uang untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)

4. **Peralatan dan Kendaraan**
   a. Peralatan & Gedung
   b. Kendaraan
5. **Kesejahteraan Pegawai**
   a. Tunjangan
   b. Koperasi
   c. Dana Kesejahteraan
   d. Perkumpulan Pegawai
   e. Perumahan
   f. Tanda Jasa/Penghargaan
6. **Kehumasan/keprotokolan**

B. URUSAN KHUSUS

1. **Urusan Keamanan dan Pertahanan**
   a. Gangguan Keamanan
   b. Hukum
   c. Peralatan Keamanan
   d. Pertahanan
   e. Anggota Kemiliteran
2. **Urusan Politik**
   a. Pemerintahan Pusat
   b. Pemerintahan Daerah
   c. Organisasi Sosial dan Politik
   d. Pemilihan Umum
   e. Perjuangan Merebut Irian Barat
   f. Hubungan Luar Negeri
   g. Pengaturan Bangsa Asing
   h. Penerbitan
   i. Hari Besar
3. **Urusan Ekonomi dan Keuangan**
   a. Bea Cukai dan Perpajakan
   b. Perdagangan dan Industri
   c. Agraria (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan)
   d. Perbankan

e. Hubungan Ekonomi Luar Negeri
f. Bantuan Luar Negeri
g. Kebijaksanaan Keuangan
h. Perhubungan & Telekomunikasi

4. Urusan Sosial

a. Perburuhan/Ketenagakerjaan
b. Urusan Agama
c. Pendidikan, Teknologi dan Kebudayaan
d. Kesehatan
e. Bantuan Sosial
f. Transmigrasi & Pembangunan Masyarakat Desa

5. Urusan Parlemen

a. Penyelesaian Perundang-undangan
b. Mosi & Interpelasi
c. Risalah DPR & Konstituante

Setelah dilakukan pengolahan, arsip Setneg pada masa Kabinet Perdana Menteri menjadi 3792 nomor berkas dan tersimpan dalam 163 boks (32,6 ml). Kemudian untuk nomor berkas yang masih sesuai dengan investaris awal (nomor lama), tetap dituangkan ke dalam lembar *concordan*.

Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Inventaris Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Tahun 1950-1959, No 41, ANRI.

Inventaris Kabinet Presiden tahun 1950-1959, No. 2352, ANRI

Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1959,1960 dan 1967

Buku dan Internet

Gonggong, Anhar, *Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia* (Jogjakarta: Ombak & Media Presindo, 2002).

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Tim Penyususun, *30 Tahun Indonesia Merdeka* (Jakarta: Departemen Penerangan, 1981).

Wahid Salim, *et.al*, *Sekretariat Negara Republik Indonesia dari Masa Pemerintahan Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009)

www.depdagri.go.id/media/.../2005/04/19/Perpres-No.31-2005.doc

BAB II
DAFTAR ARSIP STATIS

A. URUSAN UMUM

1. Administrasi

a. Agenda

1 Agenda mengenai catatan penerimaan Surat Putusan.

1 Januari 1950
asli
1 sampul

2 Agenda mengenai pencatatan surat- surat.

29 November 1950 - 13 Februari 1952
asli
1 sampul

3 Nomor-nomor agenda Sekretariat Uni Indonesia Jakarta, mengenai pegawai/personalia tahun 1951.

1951
fotokopi
1 sampul

4 Daftar surat masuk untuk administrasi urusan pegawai.

1953 - 1954
asli
1 sampul

5 Daftar surat masuk dari bagian umum kepada Sekretaris Perdana Menteri.

1954 - 1955
asli
1 sampul

6 Agenda surat masuk tahun 1957.

1957
asli
2 sampul

7 Agenda surat-surat dari Bagian Pengawasan No.157 - 356.

1957
asli
1 sampul

8 Agenda Surat Keputusan-Surat Keputusan Otoritasi tahun 1957.

1957

asli
1 sampul

9 Agenda pencatatan surat keluar Kabinet Perdana Menteri tahun 1957.
18 Juli - 28 Desember 1957
asli
1 sampul

10 Daftar pengantar surat-surat.
1958
asli
1 sampul

11 Daftar pengantar surat-surat Kabinet Perdana Menteri.
September 1958 - Januari 1959
asli
1 sampul

12 Agenda nomor urut dari kas dan memorial.
Oktober & Desember 1958
asli
1 sampul

13 Daftar catatan konsep surat dsb untuk dimintakan tanda tangan Perdana Menteri, Direktur Kabinet Perdana Menteri, Kepala Bagian Keuangan, dll.
1959
asli
1 sampul

b. Ekspedisi

14 Ekspedisi mengenai catatan surat penetapan yang dikirimkan pada tahun 1952.
1952
asli
1 sampul

15 Ekspedisi tahun 1954 - 1955.
1954 - 1955
asli
1 sampul

16 Ekspedisi mengenai penyampaian nota dinas, pengumuman dan surat keterangan.
1955
asli
1 sampul

17 Ekspedisi dari Bagian Umum untuk Sekretaris Perdana Menteri.

1955
asli
1 sampul

18 Buku ekspedisi dari Bagian Umum untuk Seksi Verifikasi.

1955
asli
1 sampul

19 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan kepada Bagian Arsip Kabinet Perdana Menteri.

1955 - 1956
asli
1 sampul

20 Buku ekspedisi dari Bagian Umum untuk Sub Bagian Keuangan.

1956
asli
1 sampul

21 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan untuk Sub. Seksi Keuangan (Padmasedhana).

1956
asli
1 sampul

22 Buku ekspedisi urusan pegawai tahun 1956.

1956
asli
1 sampul

23 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan untuk Seksi Verifikasi tahun 1956 - 1957.

1956 - 1957
asli
1 sampul

24 Buku ekspedisi dari Penghubung Parlemen kepada Bagian di Kementerian tahun 1956.

1956 - 1958
asli
1 sampul

25 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan untuk Seksi Otorisasi tahun 1956 - 1958.

1956 - 1959
asli
1 sampul

26 Buku ekspedisi dari Bagian Umum untuk Bagian Urusan (Rumah Tangga) Perlengkapan.

1957
asli
1 sampul

27 Buku pengiriman surat dari Bagian Keuangan untuk Seksi Keuangan (Rumah Tangga/Kas) tahun 1957 - 1959.

1957 - 1959
asli
1 jilid

28 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan untuk Seksi Pembukuan tahun 1958.

1958
asli
1 jilid

29 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan kepada Seksi UUDP tahun 1958.

1958
asli
1 jilid

30 Buku ekspedisi dari Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri Seksi Perbendaharaan Umum.

1958 - 1959
asli
1 jilid

2. Kepegawaian
a. Pengadaan Pegawai

31 Surat dari Perdana Menteri kepada Presiden RI mengenai perubahan nama Panitia Umum Pegawai, beserta lampiran.

2 Januari 1951
asli
1 sampul

32 Surat dari Ajun Sekretaris Jenderal Uni Indonesia Nederland kepada Kementerian Urusan Pegawai mengenai formasi pegawai Sekretariat Uni Indonesia Nederland.

25 Mei, 16 Juni 1951
asli
3 lembar

33 Berkas mengenai lamaran dan penerimaan pegawai di Sekretaris Perdana Menteri.

31 Oktober 1951 - 31 Oktober 1956
asli

1 sampul

34 Berkas mengenai lamaran pegawai ke Biro Perancang Negara.

28 Februari 1952 - 17 September 1958
asli
1 sampul

35 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai pengangkatan 1065 pegawai tambahan (pegawai-pegawai sipil baru) dan tambahan anggaran- anggaran belanja Kementerian Kehakiman 1952/1953 untuk Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan rumah-rumah penjara di Bali dan Sulawesi.

12 November 1952 - 16 Juli 1953
asli
1 sampul

36 Surat-surat dari Kabag Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penambahan pegawai pada Bagian Keuangan.

24 Mei 1956 - 29 Maret 1958
asli
1 sampul

37 Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 10/R.I./1957 mengenai pengangkatan pegawai baru.

22 Juni 1957
pertinggal
1 lembar

38 Surat Keputusan Perdana Menteri No.7/PM/KB/1958 tentang tenaga-tenaga ahli yang dipekerjakan untuk kepentingan keselamatan, pembangunan dan kesejahteraan negara.

Januari 1958
asli
1 sampul

39 Berkas mengenai pegawai-pegawai eks-Kementerian Pengerahan Tenaga Rakyat yang diusulkan menjadi pegawai Sekretariat Menteri Negara A.M.Hanafi.

Agustus & Nopember 1958
asli
1 lembar

40 Nota dinas dari Kepala Bagian Keuangan kepada Direktur mengenai penempatan dan penyaluran para sumber tenaga kerja yang berasal dari Veteran Pejuang Kemerdekaan.

20 Oktober 1959
asli
2 lembar

b. Pengembangan Pegawai

41 Berkas mengenai struktur organisasi (reorganisasi dan formasi) Kabinet Perdana Menteri.

1951 - 1959
salinan
1 sampul

42 Surat dari kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai pencalonan pegawai negeri sebagai pelajar kursus pendidikan pegawai perbendaharaan dan kas-kas negeri.

13 April 1954
salinan
1 lembar

43 Surat dari Sekretaris Kantor Urusan Pegawai kepada Kabinet Perdana Menteri, dll mengenai penyampaian tembusan surat tentang petunjuk penyelenggaraan administrasi bagi pekerja Pemerintah menurut pelaksanaan Peraturan tentang Pekerja Pemerintah (PP Nomor 31 tahun 1954).

22 Mei 1954
asli
1 sampul

44 Pedoman intern untuk menetapkan penghasilan pegawai bulanan Biro Perancang Negara.

12 Januari 1956
tembusan
3 lembar

45 Risalah rapat mengenai penyatuan pengurusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, arsip/ekspedisi dan perpustakaan Biro II pada Kabinet Perdana Menteri.

14 November & 17 November 1959
asli
6 lembar

46 Surat dari Bagian Umum/Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai permintaan nama pegawai untuk mengikuti latihan jabatan, beserta lampiran.

01 Januari 1960
pertinggal
1 sampul

c. Pengangkatan Pegawai

47 Surat-surat mengenai pengangkatan Maria Ulfah Santoso dan Mr. RMT. Soemardi Mangoenkoesoemo dari Bagian Urusan Kepegawaian Sekretariat Negara.

21 Juli 1949 - 6 Februari 1950
asli
1 sampul

48 Surat Keputusan Menteri Kemakmuran Nomor 3054/U.P. tentang pengangkatan sementara Drs.H.De Meel sebagai Kontrolir Kelas I Pamong Praja di Kementerian Kemakmuran RIS.

2 Mei 1950
salinan

4 lembar

49 Surat menyurat antara Sekretaris Perdana Menteri dengaan Kepala Urusan Pegawai Kementerian Pertahanan mengenai peraturan hak pengangkatan pegawai Kementerian Pertahanan.

1 November 1950 - 8 Juni 1961
asli
1 sampul

50 Surat-surat mengenai pengangkatan pegawai-pegawai Kabinet Perdana Menteri.

9 Agustus 1951 - 11 Maret 1959
asli
1 sampul

51 Surat Keputusan Sekjen Uni Indonesia Nederland No.5/S.D.U./51 tentang pengangkatan R.M.I. Soemardi Mangunkusumo sebagai pegawai tinggi yang diperbantukan pada Kabinet Perdana Menteri menjadi Ajun Sekretaris Jenderal pada Sekretariat Uni Indonesia Nederland di Jakarta.

24 April 1951
salinan
2 lembar

52 Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai No.P2/625 tentang pengangkatan pegawai dari luar negeri.

22 Mei 1951
pertinggal
2 lembar

53 Surat dari Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri kepada Kepala Jawatan Urusan Umum Pegawai mengenai pengangkatan (kenaikan pangkat) pegawai yang bertentangan dengan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang masih berlaku.

24 Juni 1951
asli
2 lembar

54 Berkas mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang sumpah jabatan buat pegawai negeri.

18 Juli - 21 Desember 1951
asli
1 sampul

55 Berkas mengenai petunjuk-petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 1951 tentang pengangkatan pegawai negeri tetap.

29 September - 6 Desember 1951
asli
1 sampul

56 Surat dari Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri Sidorejo kepada Kementerian Kehakiman dengan Perantara Jaksa Agung pada Mahkamah Agung mengenai usul pengangkatan pegawai-pegawai Kejaksaan Sidorejo. n.b: kondisi fisik sobek.

3 Maret 1952
tembusan
2 lembar

57 Surat dari Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-Kas Negeri kepada semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan mengenai penolakan atas pengangkatan sebagai pegawai negeri tetap.

10 November 1952
salinan
2 lembar

58 Berkas mengenai pengangkatan pegawai-pegawai baru pada Biro Perancang Negara tahun 1954.

2 Maret 1954
asli
1 sampul

59 Surat Edaran Kementerian Keuangan kepada seluruh menteri mengenai penunjukan bendaharawan khusus yang disebut Juru Penerima Uang Pendapatan Tertentu (JPUPT).

8 Oktober 1955
fotokopi
1 sampul

60 Berkas mengenai pengangkatan pegawai pada Kabinet Perdana Menteri tahun 1958 - 1959.

1958 - 1959
asli
1 sampul

61 Surat-surat mengenai usul pengangkatan beberapa pejabat tinggi di Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.

26 Maret - 3 Juli 1957
tembusan
1 sampul

62 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang pengangkatan pegawai bangsa asing.

25 April 1957
asli
1 sampul

63 Surat-surat mengenai pengangkatan Acting Sekretaris Jenderal Kementrian Pengerahan Tenaga Rakyat.

6 Juli - 3 Desember 1957

tembusan
1 sampul

64 Surat dari Kepala Bagian Teknik Biro Perancang Negara kepada Kepala Urusan Pegawai mengenai penyampaian daftar nama pegawai Bagian Teknik yang akan diangkat menjadi pegawai bulanan, beserta lampiran.

9 September 1958
tembusan
1 sampul

65 Surat-surat Keputusan Direktur Kabinet Perdana Menteri tentang pengangkatan pegawai Kabinet Perdana Menteri RI tahun 1959.

1959
asli
1 sampul

d. Mutasi dan Kenaikan Pangkat

66 Kumpulan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang pengangkatan Pejabat-Pejabat Perwakilan dan Atase pada beberapa Kedutaan di beberapa negara tahun 1950.

31 Juli - 12 Desember 1950
tembusan
1 sampul

67 Surat dari Perdana Menteri kepada Kementrian Keuangan dan lain-lain mengenai penyampaian ralat Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 12/P.M. Tahun 1953 tentang masa kerja Drs. Tan Tek Heng untuk perhitungan kenaikan pangkat, beserta lampiran.

4 Agustus 1953
pertinggal
1 sampul

68 Surat-surat mengenai pegawai yang diperbantukan di daerah.

15 Januari - 19 Juni 1951
tembusan
1 sampul

69 Berkas mengenai usulan kenaikan pangkat.

22 Januari 1951 - 1959
tembusan
4 lembar

70 Berkas mengenai mutasi dan pegawai yang diperbantukan di beberapa instansi pusat.

23 Mei 1951 - 21 Juli 1959
tembusan
1 sampul

71 Berkas mengenai pengangkatan Mr. Soetan Mohammad Rasjid, Moekarto Notowidigdo, Mr.Ali Sastroamidjojo, Dr. Alfian Yusuf Helmi sebagai pejabat perwakilan luar negeri.

1 September 1951 - 6 Oktober 1958
pertinggal
1 sampul

72 Berkas Rancangan Undang-Undang tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai dan tentang jabatan rangkap keanggotaan DPR (*incomptabiliteit*) bagi pegawai negeri.

25 September - 23 Oktober 1951
salinan
3 lembar

73 Berkas mengenai mutasi dan kenaikan pangkat Pegawai Polisi Negara.

20 Desember 1952 - 18 Februari 1959
tembusan
1 sampul

74 Surat dari pegawai tetap Bagian Umum Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Bagian Umum Kabinet Perdana Menteri mengenai persoalan mutasi yang tidak kunjung dilakukan.

5 Agustus 1954
salinan
2 lembar

75 Daftar kepangkatan menurut PGPN dan jabatan-jabatan pada Kementerian Sosial, nb.: arsip tidak lengkap.

1955
tembusan
1 sampul

76 Berkas mengenai penunjukan sebagai bendaharawan di berbagai instansi.

16 Januari 1956 - 14 Juli 1959
tembusan
1 sampul

77 Surat-surat mengenai pengangkatan beberapa dokter menjadi kepala dinas di lingkungan Kementrian Kesehatan.

20 Februari 1956 - 11 Oktober 1957
tembusan
1 sampul

78 Surat Edaran dari Kepala Muda Kantor Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri & para Menteri tentang syarat-syarat masa kerja minimum untuk kenaikan pangkat.

13 November 1956
salinan

1 sampul

79 Surat-surat mengenai usul pengangkatan beberapa pejabat pada jabatan Kepala Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

20 April - 24 Agustus 1957
tembusan
1 sampul

80 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian nama-nama calon untuk diangkat menjadi hakim anggota Mahkamah Agung Indonesia, beserta lampiran.

11 Juni 1957
salinan
4 lembar

81 Berkas tentang lamaran dan pengangkatan pegawai ke Biro Perancang Negara.

5 September 1957 - 1959
tembusan
1 sampul

82 Berkas tentang pengangkatan Mr. Ali Budiardjo sebagai Direktur Jenderal Biro Perancang Negara.

10 Oktober 1957
tembusan
1 sampul

83 Kumpulan nota dinas mengenai pernyataan kecakapan kenaikan pangkat.

22 Oktober - 16 Desember 1957
asli
1 sampul

84 Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1136/U.P/Bps/122 tentang pengangkatan R.Santang Tjakranata sebagai Ahli Perangkaan di Biro Pusat Statistik Jakarta. n.b: kondisi fisik sobek.

16 November 1957
asli
1 lembar

85 Surat-surat keputusan Kabinet Perdana Menteri tentang kenaikan pangkat pegawai.

Januari 1958 - Januari 1959
pertinggal
1 sampul

86 Surat Sekjen Kementrian Agraria tentang timbang terima pimpinan Kementrian Agraria kepada Ad Interm.

23 Mei 1959
asli
1 sampul

e. Cuti dan Izin Pegawai

87 Berkas mengenai peraturan istirahat untuk pegawai negeri.
14 Oktober 1950 - 1 Agustus 1951
asli
1 sampul

88 Berkas mengenai permintaan ijin tidak bekerja.
16 Januari 1952 - 7 November 1959
asli
1 sampul

89 Surat mengenai permohonan perubahan jam kerja karena alasan kesehatan.
26 Mei 1952
tembusan
1 lembar

90 Surat-surat mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang cuti luar negeri untuk naik haji.
12 Januari - 4 April 1953
asli
1 sampul

91 Salinan Surat Edaran dari Wakil Perdana Menteri II kepada para Menteri tentang beberapa petunjuk dalam hal pemberian istirahat dalam negeri.
12 Juli 1954
tembusan
4 lembar

92 Surat Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Sekretariat Konstituante tentang hak kekuasaan memberikan istirahat dalam negeri dan penggantian pengobatan kepada pegawai Sekretariat Konstituante.
20 April 1957
pertinggal
8 lembar

93 Surat dari Kepala Seksi Otorisasi mengenai keterangan melahirkan Ipah Hafifah, beserta lampiran.
9 Desember 1957
asli
1 sampul

94 Berita acara penyerahan tugas dari Kepala Seksi UUDP Bagian Keuangan kepada Moh.Joesoef Hasby (Pengatur Tata Usaha pada Seksi UUDP Bagian Keuangan) selama R. Pandu Basuki menjalankan cuti.
24 Desember 1958
salinan
2 lembar

f. Perjalanan Dinas

95 Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.19172/CI tentang penugasan H.S.A. Bachtiar ke Belanda dan Amerika.

23 September 1950
tembusan
2 lembar

96 Surat Edaran Jawatan Urusan Umum Pegawai tentang pembatasan istirahat ke luar negeri.

12 Oktober 1950
asli
1 sampul

97 Surat-surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI tentang perintah kunjungan ke beberapa negara.

28 Oktober 1950, 22 Desember 1951
tembusan
4 lembar

98 Berkas tentang perjalanan jabatan ke luar negeri.

26 Januari 1951 - 19 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

99 Surat Edaran dari Menteri Keuangan kepada sekalian Menteri tentang perjalanan jabatan ke luar negeri.

2 Juli 1951
salinan
2 lembar

100 Petikan daftar Surat Keptusuan Menteri Perburuhan RI No. 1716/Pg/I/51 tentang penugasan Mr. Han Tiauw Hing dan Kamil Oesman ke India, Ceylon, Perancis, Belanda dan Inggris.

18 September - 28 Desember 1951
salinan
2 lembar

101 Surat dari Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri Kementrian Pertanian kepada Sekretaris Kabinet Perdana Menteri mengenai penetapan keputusan perjalanan ke luar negeri.

20 Oktober - 12 November 1951
asli
2 lembar

102 Surat Keputusan Kepala Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon No. 45215/P/B tentang pemberangkatan beberapa pegawai Pos, Telegrap dan Telepon ke Swiss dan Belanda.

20 Oktober 1951

salinan
1 lembar

103 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang keberangkatan Ny. Nazir Datuk Pamontjak bersama suaminya ke Paris.

22 Oktober 1951
salinan
3 lembar

104 Surat Keputusan Menteri Perburuhan tentang pengutusan Soedarmo dan WT.Sembalangi untuk mengikuti seminar tentang statistik perburuhan di New Delhi.

12 November 1951
asli
3 lembar

105 Surat dari Ketua Tata Usaha Kabinet Perdana Menteri kepada Kantor Urusan Pegawai mengenai penyampaian surat tentang pengiriman utusan ke luar negeri untuk tugas belajar.

5 Desember 1951 - 3 Januari 1952
pertinggal
1 sampul

106 Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang penugasan Mayor R.M.S. Soeryo Soemarno, R.S. Dirjoatmojo dan Ir.J.J.A.Weikopf ke luar negeri.

6 Desember 1951
tembusan
2 lembar

107 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja tentang penugasan M.Yusuf ke Kolombo dalam rangka *Colombo Plan Exhibition* .

10 Desember 1951
asli
1 lembar

108 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang pengiriman A.Dachlan Raniwiharjo ke Edinburg dalam rangka "*Conference of International student* ".

24 Desember 1951
salinan
2 lembar

109 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penugasan Mr.Ichsan, c.s. ke Canbera.

27 Desember 1951
asli
1 sampul

110 Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang pengiriman Holland Tejokusumo, M Suharno Priyodiharjo, Bonjol Humala Siregar ke Kuala Lumpur untuk mengikuti sidang FAO.

29 Desember 1951
pertinggal
1 lembar

111 Berkas tentang penunjukan pegawai untuk mengikuti *Training Centre on Rice Breeding* di Cutac India.

1952 - 1953
asli
1 sampul

112 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.P11/1/4 tentang penugasan G.P.P.H.Hadinegoro dan Suhamir ke Philipina dan Australia.

15 Januari 1952
salinan
1 lembar

113 Surat dari Kementerian Perhubungan tentang pengiriman 2 orang DKA ke Amerika Serikat.

17 Januari 1952
asli
2 lembar

114 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No.SP 583/Del tentang penugasan Mr.Suyono Hadinoto ke Washington untuk mengadakan perundingan dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang penjualan timah.

25 Januari 1952
tembusan
2 lembar

115 Surat Keputusan Menteri Perburuhan No.737/52 tanggal tentang penunjukan Iskandar Purwasudirjo, Hasan Umar, Elia Soeriawinata untuk mengikuti latihan pengawasan perburuhan di Asia Timur.

26 Januari 1952
salinan
2 lembar

116 Nota dari Kepala kantor Urusan Pegawai kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai Perubahan Surat Edaran tentang perjalanan jawatan ke luar negeri.

28 Januari - 19 Februari 1952
pertinggal
1 sampul

117 Surat kepada Menteri Perhubungan mengenai perjalanan FJ. Matthieu dan H. Schaper.

31 Januari 1952
pertinggal
2 lembar

118 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No.SP/592/Del.tentang penugasan kepada R.Sukona dan Badris Alamsyah ke Singapura untuk melakukan tugas mengenai perekonomian.

5 Februari 1952
salinan
1 lembar

119 Surat dari Kantor Urusan Pegawai kepada Sekretaris Perdana Menteri tentang rencana surat keputusan perjalanan jawatan ke luar negeri.

7 Februari 1952
asli
1 sampul

120 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penugasan pegawai ke luar negeri, beserta lampiran.

14 Februari 1952
tembusan
1 sampul

121 Surat-surat Keputusan Menteri Penerangan tentang perjalanan Maladi ke luar negeri.

10 Maret -12 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

122 Berkas tentang kesempatan mengikuti *L abour Administrarion Course* di Inggris.

24 Mei - 17 Juni 1952
pertinggal
1 sampul

123 Surat Edaran tentang pemberian kuasa kepada Ibrahim Soeryaatmaja untuk menandatangani surat keputusan mengenai tugas belajar ke luar negeri, beserta

30 Juni 1952
pertinggal
1 sampul

124 Surat kawat dari Perdana Menteri kepada Gubernur Jawa Barat mengenai pengutusan Soemarjan untuk menghadiri pertemuan P.P di Bandung pada tanggal 1 Agustus 1952.

30 Juli 1952
asli
3 lembar

125 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri tentang pengiriman Ferdi Salim ke Australia, beserta lampiran.

20 Agustus 1952

asli
3 lembar

126 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan tentang kepergian anggota angkatan perang ke luar negeri.
25 Agustus 1952
pertinggal
2 lembar

127 Surat dari Perdana Menteri kepada menteri-menteri tentang batas waktu untuk mengajukan rencana surat keputusan perintah belajar ke luar negeri.
4 September 1952
salinan
2 lembar

128 Surat-surat dari Sekretaris Perdana Menteri RI kepada Acting Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengenai pengiriman tembusan kawat kepada Kuasa Usaha di Negeri Belanda tentang kepergian Ny. Tirtaamidjaja ke Belanda.
4 September 1952
pertinggal
1 sampul

129 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Perdana Menteri tentang pengiriman para pegawai Kementerian Dalam Negeri ke Amerika Serikat.
27 Oktober - 1 November 1952
pertinggal
2 lembar

130 Berkas mengenai perjalanan dinas Mr.R.P.Notohatyanto.
28 Oktober - 14 November 1952
Asli
5 lembar

131 Berkas mengenai perintah belajar ke luar negeri bagi pegawai negeri.
15 Desember 1952
fotokopi
1 sampul

132 Berkas mengenai ditundanya keberangkatan PIP. Pasaribu ke Banjarmasin, beserta lampiran.
1953
tembusan
1 sampul

133 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.P11/1/2 tentang pengutusan Ir.N.E.Van Beem ke Belanda, Jerman Barat dan Perancis.
7 Januari 1953
tembusan
3 lembar

134 Surat dari Menteri Perburuan kepada Perdana Menteri tentang pengutusan Mr.Soetikno ke Amerika Serikat dan Puerto Rico.

3 Maret 1953
asli
1 lembar

135 Surat-surat (kawat) mengenai perjalanan pegawai ke luar negeri.

22 April - 26 Mei 1953
salinan
1 sampul

136 Surat-menyurat antara Wakil Perdana Menteri I dan Kepala Kepolisian Negara (u/p Kepala Bagian DPKN) mengenai persetujuan untuk tidak memberikan *exit permit* dan *re-entry* kepada Kie Toan Seng.

28 September - 14 Desember 1953
pertinggal
3 lembar

137 Surat dari Menteri Agama kepada Perdana Menteri tentang pengiriman pegawai dan delegasi ke luar negeri.

10 Desember 1953
asli
3 lembar

138 Surat Edaran mengenai perjalanan dinas dalam negeri.

3 September 1954
pertinggal
2 lembar

139 Surat mengenai permohonan pengiriman Surat Keputusan Perdana Menteri tentang dinas Pegawai Negeri yang dikirim ke luar negeri.

8 Desember 1954 - 29 Oktober 1955
asli
4 lembar

140 Pengumuman No. 14/K-55 dari Acting Sekretaris Biro Perancang Negara tentang peraturan bekerja lembur.

6 Januari 1955
tembusan
4 lembar

141 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Komisi Pekabaran Injil di Indonesia mengenai ijin untuk kepergian Drs. Soedarmo dengan keluarga ke negara Belanda.

12 - 16 Maret 1955
pertinggal
4 lembar

142 Berkas mengenai kepergian Sdr. Let. Kol. R. Pirngadi ke luar negeri.

Juni - 13 Juli 1955
salinan
1 sampul

143 Surat dari Kementerian Perhubungan kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman pegawai ke luar negeri secara mendadak.

20 Juli 1955
asli
1 lembar

144 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengenai permohonan pengiriman ekspedisi surat tentang perjalanan pegawai.

12 September 1955
tembusan
3 lembar

145 Berkas mengenai peraturan perjalanan dinas dalam negeri.

1 Oktober 1955 - 23 April 1959
pertinggal
1 sampul

146 Berkas mengenai perjalanan P.J.M.Wakil Presiden ke luar negeri.

4 - 6 Oktober 1955
asli
1 sampul

147 Berkas mengenai lembur pegawai Kabinet Perdana Menteri RI.

1956 - 30 Oktober 1959
asli
1 sampul

148 Kartu pegawai dari berbagai Kementerian yang mendapat tugas ke luar negeri.

1956
asli
1 sampul

149 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Perjalanan tentang perjalanan ke luar negeri Sdr. R.I.Soeriaatmaja.

1 Februari 1957
pertinggal
1 sampul

150 Surat-surat mengenai perpanjangan waktu tugas belajar Soedarto dan kawan-kawan yang tugas belajar di Amerika Serikat

26 Agustus, 29 November 1957
asli
1 sampul

151 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pertimbangan pengiriman Komisaris Besar Polisi Enoch Danubrata dalam rombongan Presiden ke luar negeri.

2 November 1957
pertinggal
1 sampul

152 Berkas mengenai perjalanan tugas dinas keluar negeri a.n.: 1) Ir.Adnan Kusuma (Kepala Djawatan Balai-Balai Penyelidikan dan Pendidikan Kementerian Perindustrian) 2) Prof.Dr.R.H.J Bisanz (Guru Besar F.T Bandung) beserta peraturan perjalanan dinas ke luar negeri.

1958 - 1959
pertinggal
1 sampul

153 Surat dari Mr.Ratmoko tentang penyampaian *final report* perjalanan ke Amerika Serikat.

15 Januari 1958
asli
1 sampul

154 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai usul untuk meninjau kembali jumlah-jumlah yang berhubungan dengan perjalanan dinas dalam negeri.

22 Juli 1958
konsep
1 sampul

155 Berkas mengenai surat keterangan dan daftar lembur pegawai Kabinet Perdana Menteri.

30 Juli 1958 - 25 April 1962
pertinggal
1 sampul

156 Surat dari Perdana Menteri kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri mengenai permintaan untuk dapat memberikan paspor, *exit permit* dan *re-entry permit* kepada Dr. Lie Sing Kiem yang akan ke Republik Rakyat Cina pada tanggal 3 September 1958 untuk waktu 2 bulan.

19 Agustus 1958
pertinggal
1 lembar

157 Surat dari Seksi Pengetikan dan Stensil kepada Seksi Pemeriksaan Pengeluaran Beban Tetap tentang dasar permintaan izin lembur yang akan distensil.

4 Oktober 1958
asli
2 lembar

158 Surat Perintah atas nama Ali Hassan, Majoor Aerillerie TNI untuk mengadakan hubungan dan menemui para pimpinan direksi bank.

9 Oktober 1958
asli
1 lembar

159 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Perhubungan mengenai persetujuan usul pengiriman perutusan ke *Middle East/South East Asia Regional Air Navigation Meeting* di Roma, beserta lampiran.

2 Desember 1958
asli
1 sampul

160 Memo dari Kepala Bagian Keuangan kepada Kepala-kepala Seksi pada Bagian Keuangan mengenai penyampaian surat dari Kepala Bagian Rumah Tangga kepada Kepala Bagian/Seksi-seksi pada Kabinet Perdana Menteri tentang permintaan untuk memberikan surat tugas lembur kepada para pegawai Bagian Rumah Tangga.

1 Agustus 1959
asli
3 lembar

161 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 418/PM/1959 tentang penugasan Dr.Hadrianus Sinaga (Lektor Ilmu Bedah FKUI) ke Amerika Serikat.

27 Agustus 1959
konsep
4 lembar

162 Daftar permintaan izin kerja lembur dari pegawai Bagian Pembukuan Kabinet Perdana Menteri .

September 1959
pertinggal
1 sampul

163 Surat dari Kepala Jawatan Sandi kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penyerahan pimpinan Jawatan Sandi kepada Kapten Moenardjo selama R. Roebiono Kertopati (Kepala Jawatan Sandi) melakukan perjalanan ke luar negeri.

9 September 1959
tembusan
2 lembar

164 Surat-surat mengenai pembatalan keberangkatan Sdr.Harjoto ke sidang pleno Majelis Umum PBB.

2 - 9 Oktober 1959
asli
2 lembar

g. Personal File

165 Berkas kepegawaian a.n. Mr. Soebijakto pegawai Biro Perancang Negara.

1950 - 1958
asli
1 sampul

166 Surat Edaran Menteri Keuangan kepada semua Kementerian dan kantor-kantor yang tidak tergabung dalam suatu kementerian tentang rencana perhitungan statistik pegawai negeri.

21 Juli 1951
asli
1 lembar

167 Daftar pegawai-pegawai terkemuka dalam lingkungan Kabinet Perdana Menteri.

13 Oktober 1951
asli
5 lembar

168 Berkas mengenai pegawai a.n. R.S.Kusnowardojo, Penata Usaha (Vb) pada Biro Perancang Negara.

20 November 1951 - 1 Januari 1955
asli
1 sampul

169 Berkas mengenai pegawai-pegawai bulanan pada Biro Perancang Negara.

25 Januari 1952 - 4 Oktober 1957
asli
1 sampul

170 Berkas mengenai mengenai jumlah pegawai negeri warga negara dan bukan warga negara, dan jumlah pegawai negeri daerah otonom.

Februari & April 1952
asli
1 sampul

171 Daftar Riwayat Hidup 7 calon pekerja pada Biro Keamanan.

27 Juni 1954
asli
1 sampul

172 Daftar mengenai alamat rumah, kantor dan nomor telepon rumah/kantor para Menteri Kabinet Ali Sastroamidjojo dan Kabinet Djuanda.

1 Desember 1954 - 11 Agustus 1958
fotokopi
1 sampul

173 Surat-surat keterangan tentang riwayat diri dan pekerjaan dari pegawai Kabinet Perdana Menteri.

1955 -1958
asli
1 sampul

174 Daftar hadir pegawai Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri .

1957 - 1959
asli
1 sampul

175 Surat dari Kepala Bagian Keuangan kepada Kepala Seksi Pembukuan mengenai peraturan jam kerja.

16 Juli 1957
asli
2 lembar

176 Surat Nikah beberapa pegawai Kabinet Perdana Menteri.

18 - 30 Juli 1957
salinan
4 lembar

177 Surat-surat mengenai daftar pertanyaan jabatan pegawai-pegawai di kementerian/ jawatan-jawatan.

15 November - 21 Desember 1957
asli
1 lembar

178 Surat dari Kepala Seksi U.U.D.P. kepada Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian daftar tentang catatan masa kerja dari pegawai Seksi U.U.D.P. Bagian Keuangan per 1 Mei 1958, beserta lampiran.

3 - 8 Mei 1958
salinan
4 lembar

179 Surat dari Kantor Urusan Pegawai kepada Biro Perancang Negara mengenai daftar pegawai yang naik pangkat tahun 1958.

17 November 1958
salinan
1 sampul

180 Daftar nomor urut pegawai Kabinet Perdana Menteri.

1959
asli
1 sampul

181 Surat dari Kepala Bagian Umum/Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai pencatatan pegawai yang bertempat tinggal di daerah yang direncanakan untuk diselenggarakannya Asian Games.

15 Juli 1959
pertinggal
2 lembar

182 Daftar Nama Pegawai Biro II (Ekonomi & Keuangan) yang melakukan pekerjaan pelaksanaan *Economic Survey/Review* .

1963 dan 1964
salinan
1 sampul

183 Surat dari R.Ganda Sukma Wijaya tentang ultimatum mengenai jiwa dan ideologi pegawai-pegawai Kabinet Perdana Menteri.

tt
asli
2 lembar

h. Pemberhentian Pegawai

184 Berkas mengenai permohonan rehabilitasi M.T. Ritonga mantan pegawai Bea dan Cukai di Semarang.

23 Juli 1950 - 15 Agustus 1951
asli
5 lembar

185 Berkas mengenai pengunduran diri Sdr. Moenar Sastrohamijoyo sebagai Pengurus Gedung RI di Pegangsaan Timur No. 56.

24 Oktober 1950
asli
5 lembar

186 Berkas mengenai usul pemberhentian Mr. Wongsonegoro sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri R.I.S.

4 - 20 November 1950
asli
4 lembar

187 Surat Kantor Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri tentang status pegawai tetap/sementara sehubungan peraturan pensiun.

11 Juli 1951
asli
1 sampul

188 Surat Edaran tentang pemberhentian dari jabatan bagi pegawai negeri dengan hak pensiun.

7 Agustus 1951 - 22 Agustus 1958
asli
1 sampul

189 Berkas mengenai pemberian pensiun dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kabinet Perdana Menteri.

18 Oktober 1951 - 2 Juni 1959
asli
1 sampul

190 Berkas mengenai pemberhentian dengan hormat Drs.A.Oudt sebagai Penasehat Umum Kementrian Keuangan.

3 Juli - 14 Oktober 1952
asli
1 sampul

191 Berkas mengenai pemberhentian pegawai pada Biro Perancang Negara.
13 Juni 1955 - 26 Februari 1958
asli
1 sampul

192 Surat dari Wakil Perdana Menteri RI kepada Menteri Perhubungan mengenai kedudukan para pegawai di Sumatera Barat yang terlibat PRRI.
23 Januari 1959
asli
2 lembar

i. Serikat Sekerja Pegawai

193 Surat Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri kepada Moh.Said tentang penunjukan sebagai Pembantu Umum Serikat Sekerja.
20 September 1955
asli
1 lembar

194 Laporan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri.
27 September 1955
asli
1 sampul

195 Surat dari Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri kepada seluruh Anggota Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri mengenai pemberitahuan pengesahan rencana perubahan AD/ART Serikat Sekerja, beserta lampiran.
10 Oktober 1955
asli
1 sampul

196 Surat Edaran Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri tentang penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari untuk memperkuat Persatuan Serikat Sekerja .
30 April 1956
asli
1 lembar

197 Surat-surat mengenai pemberitahuan acara-acara pertemuan kepada Anggota Serikat Sekerja.
11 Mei 1956 - 19 Agustus 1957
asli
1 sampul

198 Surat dari Kabag Kesenian kepada Ketua Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri mengenai rencana kerja Bagian Kesenian.

21 Oktober 1959
pertinggal
2 lembar

3. Keuangan
a. Perbendaharaan
1) Biaya/Ongkos

199 Surat dari Menteri Keuangan kepada Kabinet Perdana Menteri tentang pembayaran pensiun mantan PNS yang bertempat tinggal di Irian.

28 April - 22 Agustus 1950
asli
6 lembar

200 Surat-surat mengenai permohonan devisen.

3 Agustus 1950 - 9 Desember 1959
asli
1 sampul

201 Surat-surat mengenai *vliegpassage* buat J.M. Perdana Menteri Demissionnair Dr.Halim dan J.M.Perdana Menteri Sultan Hamengkubuwono.

30 September & 10 Oktober 1950
pertinggal
2 lembar

202 Surat-surat mengenai peraturan perongkosan perjalanan dinas ke luar negeri.

26 Januari - 9 Februari 1951
konsep
1 sampul

203 Surat dari Kepala Urusan Umum Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala *PT. Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)* mengenai permohonan untuk membelikan tiket kapal dari Padang ke Jakarta kepada keluarga Saudara Arsjil pegawai Kabinet Perdana Menteri, beserta lampiran.

5 - 21 Februari 1951
tembusan
3 lembar

204 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Direktur Corps Tjadangan Nasional (CTN) mengenai pengiriman uang untuk CTN Jawa Timur, beserta lampiran.

26 Februari 1951
pertinggal
4 lembar

205 Surat dari Daliman kepada Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri mengenai permohonan uang lembur.

1 Maret - 4 April 1951
asli
2 lembar

206 Berkas mengenai pembiayaan surat-surat kawat luar negeri.
14 Maret - 13 Juni 1951
pertinggal
1 sampul

207 Surat dari DPRD Sementara Kota Besar Pekalongan mengenai pembebasan biaya bangunan umum.
7 April 1951
asli
2 lembar

208 Surat Edaran Kementrian Keuangan RI mengenai pembayaran uang muka untuk perjalanan jabatan ke luar negeri.
12 April 1951
asli
2 lembar

209 Berkas mengenai penjelasan dan peraturan tentang kerja lembur dan pemberian uang lembur kepada pegawai negeri.
18 Juni, September, & 18 Oktober 1951
tembusan
1 sampul

210 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Walikota Jakarta mengenai uang sewa rumah milik Kota Praja Jakarta Raya yang ditempati oleh Sdr. Soewirjo sebagai Wakil Perdana Menteri.
27 Juli 1951
pertinggal
2 lembar

211 Berkas mengenai biaya ex ARTP yang telah dikeluarkan.
15 Oktober - 20 Desember 1951
pertinggal, konsep
5 lembar

212 Surat-surat mengenai biaya/ongkos tahanan dan pengawalnya.
30 November 1951 dan 12 Januari 1959
asli
5 lembar

213 Telegram dari Pemimpin Staf "K" Propinsi Sumatera Selatan atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Selatan kepada Staf "K: Pusat Jakarta mengenai permohonan pengiriman uang untuk pembayaran Chevloret setelah tiba di Palembang.
17 Januari 1952
asli
2 lembar

214 Surat-surat mengenai permohonan penggantian uang atas nama Overste Sutoko, Markas Besar Angkatan Darat.

11 Mei - 15 September 1952
pertinggal
1 sampul

215 Surat dari Ketua Keuangan Staf Operasi Inspeksi Mobile Brigade Pusat tentang permintaan pembayaran untuk gerakan pembersihan pasukan pengejar dari Mobile Brigade Pusat.

16 Juni 1952
asli
1 lembar

216 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Ketua Staf "K" Pusat di Jakarta mengenai perongkosan operasi.

10 Juli 1952
tembusan
4 lembar

217 Surat Perintah pembayaran kepada Wed, Heer A.J.J. M. Lindner, De Javanshe Bank untuk pembayaran *afschrift meetbrief* dan *verklaring* pendaftaran tanah. n.b: arsip berbahasa Belanda.

10 Juli 1952
asli
1 lembar

218 Surat-surat mengenai penagihan atas nama Jawatan Kepolisian tahun 1952 - 1959.

12 Desember 1952 - 11 Agustus 1959
tembusan
1 sampul

219 Surat permohonan restitusi dari Mr.Moh.Roem sebagai Wakil Perdana Menteri RI.

25 Desember 1952
salinan
3 lembar

220 Berkas mengenai permintaan penggantian ongkos perjalanan dinas.

4 Mei - 17 Juli 1953
tembusan
1 sampul

221 Berkas mengenai pengeluaran biaya untuk penerimaan tamu agung.

10 Oktober 1953 - 23 Januari 1956
asli
1 sampul

222 Surat dari a.n. Menteri Luar Negeri, Sekretaris Jenderal u.b. Kepala Seksi Perbendaharaan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian notulen rapat interkementerian yang diadakan di Kementerian Luar Negeri tentang urusan keuangan terkait pengiriman uang harian dan sebagainya ke luar negeri, beserta lampiran.

15 Desember 1953
asli
1 sampul

223 Surat dari Menteri Keuangan mengenai penyelesaian pengeluaran terkait dengan adanya perubahan pada *Indonesische Comptabiliteitswet* (ICW).

15 Februari 1954
tembusan
1 sampul

224 Surat dari Menteri Keuangan mengenai penghitungan jumlah ongkos penyelenggaraan konferensi dinas.

30 April 1954
salinan
4 lembar

225 Surat-surat mengenai penetapan restitusi dari Direktur Biro Perancang Negara (BPN).

10 Nopember 1954 - 29 Januari 1955
fotokopi
1 sampul

226 Berkas mengenai permintaan biaya penyelenggaraan Konferensi Keamanan seluruh Indonesia tanggal 30 Desember 1954.

27 Desember 1954 - 3 Januari 1955
asli
1 sampul

227 Berkas mengenai permohonan biaya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan perlengkapan/perbaikan berat dan ringan dalam tahun 1955 yang diusulkan oleh Kementrian/Jawatan.

4 Januari - 7 Februari 1955
asli
1 sampul

228 Surat kepada Menteri Keuangan mengenai permintaan uang untuk keperluan komisi istilah, beserta lampiran.

29 Juni 1955
pertinggal
1 sampul

229 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai permintaan uang untuk pembelian alat-alat, beserta lampiran.

31 Agustus 1955

pertinggal
1 sampul

230 Surat dari atas nama Gubernur Nusa Tenggara kepada Perdana Menteri mengenai permohonan kabar ongkos pengangkutan lukisan kain bagi Perdana Menteri.
25 September - 30 Mei 1956
asli
11 lembar

231 Berkas mengenai penerimaan uang dari kas Bendaharawan Kabinet Perdana Menteri atas Surat-surat Perintah Membayar Uang tahun 1955.
13 - 29 Desember 1955
asli
1 sampul

232 Surat dari Perdana Menteri kepada Dewan Nasional RI tentang permintaan kredit mata anggaran 1.4.1.2.12 (ongkos) keperluan pegawai dan untuk pembayaran harga obat-obatan, beserta lampiran.
13 November 1957
pertinggal
1 sampul

233 Surat kepada Ketua Kooordinasi Keamanan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai persoalan biaya usaha keamanan di Sumatera Utara.
14 Maret 1956
tembusan
5 lembar

234 Surat-surat mengenai pemberian uang duka untuk keluarga petugas Pemilu tahun 1955.
23 April - 5 November 1956
tembusan
1 sampul

235 Surat dari Ketua Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai permohonan bantuan pembangunan gedung kantor sementara buat D.F.S, beserta lampiran.
18 Juni - 24 Juli 1956
asli
1 sampul

236 Berkas mengenai penggantian biaya persekot pengobatan/perawatan tahun 1956 - 1958.
17 Juli 1956 - 29 Desember 1958
asli
1 sampul

237 Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang pemberian kuasa kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Jakarta untuk membayar uang kepada Kepala Tata Usaha Keuangan.

21 Juli 1956
pertinggal
1 sampul

238 Surat dari Inspeksi Bagian I kepada Kepala Bagian Inspeksi Thesauri Negara mengenai pengiriman *travel cheque* untuk keperluan perjalanan J.M. Presiden ke Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok.

29 Agustus & 9 Oktober 1956
asli
2 lembar

239 Surat dari Kepala Urusan Pegawai Direktur Djenderal Biro Perancang Negara kepada Konsulat Jenderal RI di Singapore mengenai pembayaran uang persekot perjalanan ke Singapura a.n. J.M. Menteri Ir. Djuanda, beserta lampiran.

25 Oktober 1956
pertinggal
1 sampul

240 Berkas mengenai penggantian biaya penginapan.

14 Januari - 21 September 1957
asli
1 sampul

241 Surat-surat mengenai daftar pembelian hadiah kepada negara asing yang berkunjung ke Indonesia dan perjalanan Presiden ke luar negeri, beserta lampiran.

21 Januari - 18 Februari 1957
asli, tembusan
1 sampul

242 Surat-surat mengenai ongkos perjalanan ke luar negeri.

18 Februari - 2 Oktober 1957
tembusan
1 sampul

243 Surat dari Menteri Keuangan mengenai petunjuk perhitungan (regularisasi) mengenai ongkos inklaring.

4 April 1957
asli
6 lembar

244 Surat dari Thesauri Jenderal Kementerian Keuangan kepada Kantor-Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia mengenai pengeluaran untuk pembelian barang-barang rutin.

15 April 1957
asli
2 lembar

245 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Dalam Negeri tentang penggantian biaya kunjungan Perdana Menteri ke Surabaya tanggal 20 April s.d 23 April 1953.

16 April 1957
pertinggal
2 lembar

246 Berkas mengenai permohonan biaya komisi Soetardjo untuk peninjauan di Aceh.

25 Mei - 25 September 1957
asli
1 sampul

247 Surat perintah regularisasi dari Kabinet Perdana Menteri Bagian Keuangan kepada Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharan Seksi Regulasi untuk memperhitungkan uang sebesar Rp. 628.935, 99 dengan pihak Kementerian Pertanian Bagian Keuangan.

Juni 1957
salinan
2 lembar

248 Surat kepada Menteri Keuangan tentang persetujuan permohonan dana untuk pengembalian gerombolan di Jawa Barat.

6 Juni 1957
asli
1 sampul

249 Daftar pengeluaran uang pada Mobile Brigade Polisi Kompi 5483 di Pare-Pare.

Oktober 1957
asli
1 sampul

250 Surat dari Menteri Keuangan kepada Kabinet Perdana Menteri, dll mengenai pembayaran tunjangan belajar kepada para pelajar/pegawai pelajar di Amerika Serikat.

4 Oktober 1957
asli
2 lembar

251 Daftar permintaan barang - barang dari Bagian Keuangan (Seksi Otorisasi).

5 Oktober - 17 Desember 1957
asli
1 sampul

252 Surat-surat dari Kementerian Keuangan mengenai pemasukkan Tata Usaha Pensiun Wilayah Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan dalam daerah yang dimekanisasikan.

31 Oktober 1957 - 2 Juni 1958
tembusan
4 lembar

253 Surat dari Kepala Urusan Keuangan DPR RI kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai permohonan pembayaran tagihan atas untuk Rumah Penjara Cipinang.

22 Januari 1958
asli
1 lembar

254 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementrian Kehakiman kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1958 tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan presiden sebagai yang dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1957, beserta lampiran.

30 Januari 1958
asli
1 sampul

255 Berkas tentang daftar permintaan biaya pemondokan bagi J.Silalahi buat bulan Januari/Februari 1958, beserta lampiran.

31 Januari - 30 September 1958
tembusan
1 sampul

256 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. G/30/1958 tentang pemberian penggantian biaya pengobatan/perawatan kepada pegawai polisi daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk tahun 1958.

3 Maret 1958
salinan
1 lembar

257 Surat dari Perdana Menteri RI selaku Ketua Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pemberian honorarium kepada para pejabat Pembangunan Masyarakat Desa di daerah-daerah.

4 Maret 1958
pertinggal
1 lembar

258 Berkas mengenai perincian penggantian biaya dari Biro Perancang Negara.

7 Maret - 8 November 1958
tembusan
1 sampul

259 Surat-surat dari Biro Perancang Negara mengenai pengajuan regularisasi perongkosan bagi para *expert* dalam rangka bantuan luar negeri.

31 Maret - 19 September 1958
asli
1 sampul

260 Berkas mengenai biaya perbaikan instalasi listrik di Gedung Asrama Dewan Nasional.

3 - 24 Mei 1958
asli
1 sampul

261 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Controller "USOM" mengenai permohonan biaya untuk para tenaga ahli pada *Tuskegee Project* dan lain-lain.

8 Agustus 1958
tembusan
3 lembar

262 Surat-menyurat antara Bupati Klaten dengan Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penyetoran sisa uang.

15 Agustus - 12 September 1958
asli
4 lembar

263 Surat Edaran dari Kementerian Keuangan Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tentang pemberian uang lepas.

19 September 1958
salinan
1 lembar

264 Surat kepada Menteri Pertahanan tentang biaya penggunaan pesawat dari perlengkapan Garuda Indonesia Airways dalam operasi oleh Angkatan Udara RI.

24 September 1958
tembusan
1 lembar

265 Surat dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Biro Perancang Negara mengenai biaya perjalanan dinas untuk Daerah Sumatera Barat dan Sulawesi Utara/Tengah.

1 Oktober 1958
pertinggal
2 lembar

266 Surat-surat Keputusan Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi mengenai pemberian honorarium kepada Anggota Staf Ahli dan Pembantu Staf Ahli Menteri Urusan Stabilisasi Ekonomi.

21 Oktober 1958 - 13 Maret 1959
salinan
1 sampul

267 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pemberitahuan perhitungan/pembayaran/penagihan pengambilan air untuk kapal-kapal Jawatan Kepolisian yang diurus oleh Kementrian Pelayaran.

28 November 1958
tembusan
1 lembar

268 Surat-surat mengenai permohonan Menteri Penerangan untuk subsidi eenmalig bagi Pesawat Saluran Radio Rakyat (PESARRA).

4 Desember - 9 Januari 1958
asli
6 lembar

269 Berkas mengenai biaya-biaya perjalanan dinas dalam negeri tahun 1959.

1959
asli
1 sampul

270 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang pembayaran restitusi biaya kesehatan Pegawai Kabinet Perdana Menteri RI.

16 April - 18 Juni 1959
asli
1 sampul

271 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Direktur Lembaga Administrasi Negara tentang pemberian honorarium kepada panitia ujian penghabisan pada latihan jabatan pelatih jabatan I/1959.

12 Mei - 5 Agustus 1959
pertinggal
3 lembar

272 Surat-surat keputusan tentang pengajuan pembiayaan.

15 Juli - 4 Nopember 1959
tembusan
1 sampul

273 Surat dari kepala Inspeksi Thesauri Negara Departemen Keuangan kepada Direktur Lembaga Tenaga Atom mengenai pembelian beberapa barang-barang kebutuhan lembaga.

3 Februari 1960
2 lembar
tembusan

2) Otorisasi

274 Berkas mengenai permohonan otorisasi uang tunjangan untuk para pejabat dan staf Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Maluku, Bone, Palopo, Makassar, Sulawesi, Jawa Barat, Jakarta Raya.

1950, 1957 & 1959
asli
1 sampul

275 Surat-surat mengenai permohonan otorisasi kredit dari Biro Rekonstruksi Nasional.

5 Januari - 28 September 1953
tembusan
1 sampul

276 Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan tentang otorisasi pemberian kredit atas anggaran tahun 1953 dan 1955.

1953 - 1955
salinan
1 sampul

277 Surat-surat mengenai permohonan keluarnya otorisasi untuk keperluan DOB dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

18 Agustus - 1 September 1953
asli
1 sampul

278 Berkas mengenai otorisasi pengeluaran biaya militaire bystand di Aceh.

November 1954 - 11 Januari 1955
pertinggal
1 sampul

279 Surat dari Kementrian Keuangan RI kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian daftar anggaran yang telah diotorisasi dari Biro Rekonstruksi Nasional tahun 1954, beserta lampiran.

8 Maret 1955
asli
1 sampul

280 Surat dari Menteri Keuangan mengenai pemberitahuan perubahan Surat Edaran tentang pemberian persetujuan atas otorisasi.

9 April1955
tembusan
1 lembar

281 Surat-surat keputusan mengenai otorisasi anggaran Kepolisian Negara.

1 November 1955 - 18 November 1958
tembusan
1 sampul

282 Surat dari Kepala Biro Keamanan kepada Menteri Keuangan mengenai otorisasi penambahan anggaran operasi mobbrig di Bali dalam tahun 1955.

25 November 1955
pertinggal
1 lembar

283 Surat-surat dari Biro Perancang Negara mengenai otorisasi permohonan uang yang harus diperhitungkan .

29 Desember 1955

asli
1 sampul

284 Surat-surat keputusan Perdana Menteri tentang otorisasi pemberian kredit atas anggaran tahun 1956-1959.

1956-1959
pertinggal
1 sampul

285 Surat-surat keputusan Perdana Menteri RI tentang otorisasi pemberian kredit atas anggaran tahun 1957.

1 Januari 1957
pertinggal
1 sampul

286 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai daftar catatan uang yang telah di otorisasi dalam tahun 1956.

23 Maret 1957
asli
2 lembar

287 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai otorisasi biaya Terusan Sampit untuk pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

3 April 1957
pertinggal
4 lembar

288 Surat dari Kepala Seksi Keuangan kepada Kepala Bagian Keuangan mengenai permohonan otorisasi biaya untuk keperluan Panitia Negara Pertimbangan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas, beserta lampiran.

5 Juni 1957
asli
2 lembar

289 Nota dinas dari Kepala Seksi Keuangan kepada Kepala Bagian Keuangan tentang permohonan otorisasi persediaan uang.

5 Juli 1957
asli
1 lembar

290 Surat dari Thesaurir Jendral Kementerian Keuangan kepada para Inspektur Thesaurir Negara mengenai instruksi otorisasi pembayaran/pengiriman uang ke luar negeri.

12 Juli 1957
tembusan
2 lembar

291 Surat kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang otorisasi biaya-biaya bangunan yang merupakan beban anggaran Bagian I.

22 Juli 1957
tembusan
2 lembar

292 Surat dari Perdana Menteri Keuangan RI mengenai specimen tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani surat keputusan otorisasi dan surat kuasa.

26 Agustus 1957
pertinggal
1 lembar

293 Surat kuasa anggaran dari Perdana Menteri kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melanjutkan pekerjaan membangun berupa beberapa rumah dan gedung di berbagai tempat.

11 - 30 September 1957
pertinggal
1 sampul

294 Surat dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat kepada Perdana Menteri RI tentang permohonan otorisasi biaya daerah kerja baru Pembangunan Masyarakat Desa, beserta lampiran.

25 September 1957
asli
1 sampul

295 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara mengenai daftar angka-angka anggaran studi *opdracht* dalam negeri/luar negeri yang diotorisasi.

26 Nopember 1957
asli
3 lembar

296 Berkas mengenai otorisasi anggaran ongkos keperluan kantor Kabinet Perdana Menteri tahun 1958.

1958
asli
1 sampul

297 Surat-surat keputusan Perdana Menteri RI tentang otorisasi pemberian kredit atas anggaran tahun 1958.

Februari - Juli 1958
pertinggal
1 sampul

298 Surat-surat Kuasa dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melakukan pembangunan perubahan dan perluasan *quest house* di Tampak Siring Bali.

29 Maret 1958 - 15 Juli 1959
tembusan

1 sampul

299 Seri Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tahun 1958 tentang otorisasi pembayaran yang diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

6 Mei - 23 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

300 Daftar surat keputusan penunjukan bendaharawan.

Agustus 1958
asli
1 sampul

301 Surat dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Kementrian Dewan Pemerintahan Agung mengenai permohonan surat kuasa untuk pekerjaan yang telah dimulai dalam tahun yang lalu dan perlu diselesaikan dalam tahun ini, beserta lampiran.

16 Agustus 1958
asli
3 lembar

302 Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian pertanggungjawaban Surat Keputusan Otorisasi Perdana Menteri No. 382.57/Keu.OT tanggal 16 September 1957. n.b: lampiran tidak ada.

1 September 1958
asli
1 lembar

303 Surat dari Ajun Komisaris Besar Polisi Kepolisian Negara Kantor Provinsi Jawa Timur kepada Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian pemberitahuan tentang penerbitan otorisasi persediaan uang dari Kepolisian Karesidenan.

29 September 1958
asli
1 lembar

304 Berkas mengenai otorisasi Menteri Negara sebagai pelaksana penyelesaian Kementerian Pengerahan Tenaga Rakyat untuk pembangunan.

2 - 22 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

305 Berkas mengenai otorisasi pengajuan kredit untuk keperluan pembelian dan pembiayaan di Kantor Urusan Pegawai dari anggaran tambahan tahun 1958.

22 November 1958
salinan
1 sampul

306 Surat menyurat antara Direktur Kabinet Perdana Menteri dengan Kepala Jawatan Gedung-Gedung Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai pemberian kuasa perbaikan dan pembangunan rumah beberapa pejabat.

26 November 1958 - 26 September 1959
tembusan
1 sampul

307 Serie Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Transmigrasi Tahun 1958 - 1959 mengenai pemberian kuasa pengeluaran biaya untuk usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan (SOB).

15 Desember 1958 - 8 Oktober 1959
tembusan
1 sampul

308 Berkas mengenai otorisasi kebutuhan anggaran untuk keperluan pemeliharaan/pemulihan keamanan di beberapa daerah di Indonesia.

1959
asli
1 sampul

309 Berkas mengenai permohonan otorisasi untuk pengeluaran biaya atas anggaran tahun 1959.

1959
tembusan
1 sampul

310 Surat-surat keputusan Menteri Pertama RI tentang otorisasi pemberian kredit atas anggaran tahun 1959.

1959
tembusan
1 sampul

311 Kutipan-kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pemberian kuasa kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta untuk melakukan pembayaran berdasarkan anggaran belanja tahun 1959.

2 Januari - 7 Nopember 1959
tembusan
1 sampul

312 Surat dari Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Purbolinggo kepada Perdana Menteri RI mengenai otorisasi pemberian tunjangan pembangunan jembatan di Daerah Rembang.

21 April 1959
asli
2 lembar

313 Surat dari Kementrian Keuangan kepada Kepala Seksi Otorisasi mengenai permohonan surat keputusan otorisasi pengeluaran dari Jawatan Kereta Api.

26 Mei 1959
asli
1 lembar

314 Surat-surat dari Kepala Bagian Keuangan Kepolisian Negara mengenai penyampaian ralat Surat Keputusan Perdana Menteri No. Pol. 066, 156, 161, 169, 138, dan 136 tentang pemberian kuasa penggunaan uang n.b.: arsip robek.

5 - 27 Juni 1959
tembusan
6 lembar

315 Memo dari Kepala Bagian Keuangan kepada semua Kepala Seksi Bagian Keuangan mengenai penyampaian surat Kabinet Perdana Menteri tentang otorisasi penandatanganan surat-surat keputusan Perdana Menteri.

15 Juli 1959
tembusan
2 lembar

316 Surat-surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang pemberian persetujuan dan kuasa atas beberapa pengeluaran anggaran.

15 Juli -14 Oktober 1959
asli
1 sampul

317 Surat Edaran Kementrian Keuangan tentang pembentukan surat keputusan otorisasi yang menjadi lampiran dari surat Menteri Keuangan Tgl 4-8-1957 No.141604/GT/1957

3 September 1957
asli
1 lembar

318 Surat dari Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada semua KPKAS dan KKN (kecuali Tanjung Pinang dan Jakarta) mengenai pembayaran beban sementara yang diterbitkan atas otorisasi dan diberi persetujuan Bagian Inspeksi Anggaran.

16 September 1959
pertinggal
1 sampul

319 Surat dari Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara mengenai otorisasi pembayaran SPMU beban sementara.

23 September - 9 Oktober 1959
pertinggal
1 sampul

320 Kutipan Surat-surat Keputusan Menteri Muda Kepolisian tentang pemberian kuasa kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan untuk melakukan pembayaran beberapa pengeluaran.

3 - 25 November 1959
tembusan
1 sampul

3) Anggaran

321 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai undangan rapat seksi kehakiman DPR tentang pembahasan anggaran belanja 1959 Bagian I mengenai Kepolisian, beserta lampiran.

22 Oktober 1950
asli
3 lembar

322 Perhitungan anggaran belanja sementara untuk tahun dinas 1951 dan 1952 Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah Tertinggi.

1951, 1952
asli
5 lembar

323 Surat Edaran dari Menteri Penerangan mengenai keuangan negeri.

4 Januari 1951
tembusan
1 lembar

324 Berkas mengenai begroting (penggunaan dana dari sumber lain) dan notulen rapat mengenai begroting.

5 Januari 1951 - 8 Juli 1958
asli, tembusan
1 sampul

325 Berkas mengenai anggaran belanja tahun 1951.

25 Januari - 25 Oktober 1951
asli
1 sampul

326 Berkas mengenai rencana anggaran operasional dan penyelenggaraan keamanan di daerah seluruh Indonesia tahun 1951-1953.

1951 - 1953
fotokopi
1 sampul

327 Memori penjelasan II mengenai anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1950/1951 perusahaan-perusahaan IBW satuan 2.

Januari 1951
asli
1 jilid

328 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang anggaran belanja negeri untuk tahun dinas 1950 - 1953.

7 Februari - 29 Desember 1951

asli
1 sampul

329 Berkas mengenai pengurangan rancangan anggaran belanja Angkatan Darat tahun dinas 1951.

8 - 27 Februari 1951
tembusan
8 lembar

330 Berkas mengenai pembahasan point XI "Cara Membicarakan Rencana Anggaran Belanja Negara di Dewan Perwakilan Rakyat.

13 Februari - 13 Maret 1951
salinan
1 sampul

331 Surat-surat tentang Rancangan Anggaran Negara tahun 1957.

1 Maret 1951 - 18 Desember 1957
asli
1 sampul

332 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai permintaan naskah rencana anggaran belanja.

15 Maret 1951
asli
1 lembar

333 Berkas mengenai anggaran belanja tambahan tahun 1951 untuk kredit-kredit kertas koran.

19 Maret - 9 April 1951
asli
1 sampul

334 Surat dari Panitia Teknis Irian Kepada Sekretaris Perdana Menteri Tentang pengeluaran uang untuk Panitia Teknis Irian.

17 - 19 April 1951
asli
2 lembar

335 Surat dari Duta Indonesia di Mesir kepada Menteri Luar Negeri mengenai kekurangan budget Kedutaan Cairo.

2 Mei 1951
pertinggal
3 lembar

336 Berkas mengenai ralat anggaran dan nota keuangan negara tahun 1950 - 1951.

15 - 24 Mei 1951
asli
1 sampul

337 Surat dari Menteri Keuangan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai permohonan anggaran untuk keperluan usaha kepolisian.

21 Juni 1951
asli
1 lembar

338 Berkas mengenai anggaran induk tahun 1950/1951 dan 1955.

7 Agustus 1951 - 29 Mei 1957
asli
1 sampul

339 Surat dari Thesaurie negara bagian penyelesaian Kementerian RI kepada semua kementerian mengenai belanja pegawai tahun anggaran 1950 dari RI Jogjakarta.

28 Agustus 1951
tembusan
1 lembar

340 Surat dari Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada semua Kantor Pusat Perbendaharaan mengenai pengiriman duplikat-duplikat Surat Perintah Membayar Uang (S.P.M.U) (Mandat) beserta daftar compt No.8.

29 Oktober 1951
fotokopi
3 lembar

341 Berkas mengenai Rancangan Undang-Undang anggaran tambahan tahun 1951 dan 1953.

31 Oktober 1951- 2 Maret 1955
asli
1 sampul

342 Laporan mengenai Anggaran Belanja Negara R.I Tahun 1950/1951.

1 November 1951 - 4 Maret 1953
asli
1 sampul

343 Surat dari Kepala Jawatan Kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai langkah anggaran pengeluaran dan penerimaan tahun 1952.

20 Desember 1951
asli
1 lembar

344 Berkas mengenai anggaran bagian sosial Daerah Jambi.

21 Desember 1951
asli
3 lembar

345 Berkas mengenai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) R.I. tahun 1952 - 1953.

1952 - 1953

tembusan
1 sampul

346 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum DPR RI mengenai anggaran belanja tahun 1952/1953 dan tahun 1950/1951.

10 Januari 1952 - 12 April 1954
asli
3 lembar

347 Telegram dari Gubernur/Ketua staf K Provinsi Jawa Tengah kepada Kementrian Dalam Negeri mengenai keadaan kas di Daerah-Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 1953.

4 Februari 1952
asli
2 lembar

348 Berkas mengenai anggaran pendaftaran pemilihan pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.

12 Februari 1952 - 6 Februari 1953
asli
1 sampul

349 Surat dari Perdana Menteri Dr. Sakiman kepada Menteri Keuangan tentang rencana anggaran Kepolisian dalam rangka operasi merdeka.

19 Februari 1952
pertinggal
2 lembar

350 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai pemeriksaan peninjauan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan terhadap pembukuan anggaran belanja kementerian-kementerian tahun 1950.

9 April 1952
pertinggal
1 sampul

351 Surat-surat keputusan tentang pemberian kuasa penggunaan/penggantian uang untuk menutup kekurangan anggaran tahun sebelumnya bagi Jawatan Kepolisian.

29 April 1952 - 28 Mei 1959
salinan
1 sampul

352 Pengumuman Sekretaris Dewan Menteri tentang prinsip yang digunakan dalam menjalankan kebijaksaan keuangan diantaranya penghematan dalam pengeluaran rutin yang konsumtif serta lebih perhatian terhadap pengeluaran yang produktif.

29 April 1952
fotokopi
2 lembar

353 Berkas mengenai laporan keadaan keuangan negara dan anggaran tahun 1952.

8 Juli - 16 Agustus 1952
asli
1 sampul

354 Surat dari Perdana Menteri, Sekretaris Staf "K" Pusat kepada Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dll mengenai penyampaian surat dari Menteri Keuangan tentang rencana biaya pelaksanaan D.O.B

16 September - 2 Oktober 1952
pertinggal
4 lembar

355 Surat dari Sekretaris Biro Penggantian Kerugian Perang kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai sumbangan anggaran tahun 1953.

30 September 1952
asli
1 sampul

356 Surat-surat mengenai anggaran belanja tahun 1953 untuk pos Presiden dan Wakil Presiden dan rancangan anggaran tambahan tahun 1953 Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon.

11 Desember 1952 - 3 Maret 1954
asli
1 sampul

357 Berkas mengenai permintaan anggaran devisen tahun 1953 untuk pembelian barang dari luar negeri.

15 Januari - 16 Juni 1953
asli
1 sampul

358 Berkas tentang anggaran penampungan bekas anggota Kahar Muzakar.

1953
asli
1 sampul

359 Berkas mengenai penjelasan sisa G.T.G.R Tahun 1950 dan permintaan tambahan kredit atas mata anggaran 1.3.2.12 tahun 1951.

11 Februari - 22 Maret 1953
pertinggal
1 sampul

360 Surat dari a.n. Menteri Luar Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian buku Rencana Pekerjaan dan Anggaran Belanja Yayasan ke Tanah Air, beserta lampiran.

26 Maret 1953
fotokopi
1 sampul

361 Surat-surat dari Menteri Keuangan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian pemberitahuan dasar perhitungan anggaran tahun 1950, 1951, 1952, 1953 berdasarkan perubahan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia.

21 April 1953 - 24 Februari 1955
pertinggal
1 sampul

362 Berkas mengenai surat keputusan untuk membersihkan administrasi bendaharawan.

16 Mei 1953 - 19 Februari 1955
pertinggal
3 lembar

363 Surat dari Menteri Keuangan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai Daftar Kepala Pembukuan anggaran sementara dan buku pedoman.

14 Juli 1953
fotokopi
3 lembar

364 Berkas mengenai Nota Keuangan Negara Anggaran tahun 1953 - 1959.

16 Oktober 1953 - 9 November 1959
asli
1 sampul

365 Berkas mengenai anggaran belanja RI tahun 1954 - 1955

1954 - 1955
fotokopi
1 sampul

366 Berkas mengenai Anggaran Belanja (RAB) R.I Tahun 1954 - 1956.

1954 - 1956
asli
1 sampul

367 Surat dari Kementerian Keuangan Jakarta kepada semua kementerian mengenai Surat Edaran penyelesaian pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan adanya perubahan pada "*Indonesische Comptabiliteitswet*"

15 Februari 1954
asli
3 lembar

368 Berkas mengenai tambahan anggaran belanja tahun1953 dan tahun 1954.

23 Februari - 23 September 1954
asli
1 sampul

369 Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan untuk menyediakan kredit sebesar setinggi-tingginya Rp.1.752,57 (seribu tujuh ratus lima puluh dua dan 57/100 rupiah) untuk kepentingan delegasi RI ke Jepang.

3 Maret 1954 - 13 Nopember 1959
asli
6 lembar

370 Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat R.I (Kepala Urusan Keuangan) kepada Sekretarariat Kabinet Perdana Menteri mengenai daftar pedoman anggaran dari anggaran belanja DPR tahun 1954.

16 Maret 1954
asli
3 lembar

371 Surat dari Kementerian Keuangan RI Jakarta tentang petunjuk-petunjuk tambahan tata pembukuan anggaran pada kementerian-kementerian berhubung dengan adanya perubahan dalam *"Indonesische Comptabiliteitswe* t" (I.C.W.).

17 Mei 1954
salinan
5 lembar

372 Berkas mengenai penerimaan dan pengeluaran anggaran Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi tahun 1953 dan 1954.

26 Juli - 11 Oktober 1954
salinan
1 sampul

373 Ikhtisar pengeluaran uang lembur tahun 1954 (Januari - Juli).

7 Agustus 1954
salinan
2 lembar

374 Surat dari Pemimpin Jawatan Gedung-Gedung Negeri Jakarta dan Tangerang kepada Kepala Jawatan Gedung-Gedung Pusat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai rencana biaya perluasan dan perbaikan pada Kantor Biro Perancang Negara, beserta lampiran.

16 Agustus 1954
tembusan
1 sampul

375 Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Kepala Jawatan Perjalanan mengenai penghematan anggaran perjalanan dinas dalam negeri.

24 Agustus 1954
salinan
2 lembar

376 Daftar usul mengenai pengurangan dan penambahan kredit yang termasuk dalam surat Direktur Biro Perancang Negara tanggal 4 Agustus 1954, No.784/K.54 untuk tahun anggaran 1954.

31 Agustus 1954

asli
2 lembar

377 Daftar usul pemindahan perbelanjaan rutin ke perbelanjaan modal anggaran tahun 1954, Bagian I, Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi, mengenai pengeluaran dari Kepolisian Negara.

November - Desember 1954
asli
1 sampul

378 Daftar mata anggaran Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi.

25 November 1954 - 1 Juli 1959
tembusan
1 sampul

379 Berkas mengenai Anggaran Belanja Tambahan tahun 1955 - 1956

1955 - 1956
tembusan
1 sampul

380 Surat dari ketua Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta (Dir. P3) kepada Perdana Menteri mengenai anggaran honorarium ketua dan anggota Dir. P3.

22 Januari 1955
asli
1 lembar

381 Surat dari Wakil Sekretaris Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai surat keterangan tentang pembelian rumah guna pendidikan sentral, dengan lampiran.

2 - 16 Februari 1955
salinan
6 lembar

382 Surat kepada seluruh menteri mengenai penghematan anggaran 1955.

7 Februari 1955
salinan
6 lembar

383 Berkas mengenai ralat anggaran belanja tahun 1955.

21 Februari 1955 - 10 Desember 1957
fotokopi
1 sampul

384 Berkas tentang penambahan anggaran untuk perluasan dan perbaikan Gedung Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri.

28 Maret - 20 Agustus 1955
pertinggal
1 sampul

385 Surat kepada seluruh menteri mengenai pembelian karangan bunga atas beban negara.
25 April 1955
fotokopi
2 lembar

386 Surat dari Wakil Sekretaris Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Kabinet Perdana Menteri u.p Bagian Anggaran mengenai anggaran pembuatan kamar mandi untuk ruangan Dir.P3, beserta lampiran.
13 Mei 1955 - 5 Mei 1956
tembusan
1 sampul

387 Anggaran belanja guna kepergian P.J.M. Presiden ke tanah suci.
29 Juni 1955
pertinggal
1 sampul

388 Surat dari Kepala Muda Jawatan Kepenjaraan kepada Perwira Intendans Territorium VIII/ "Wirabuana" mengenai anggaran biaya makan tahanan kriminal Sulawesi Selatan.
16 Juli 1955
tembusan
1 lembar

389 Surat kepada Jawatan Kepolisian Negara mengenai penambahan dan perbelanjaan.
15 September 1955
asli
1 sampul

390 Surat dari Kementerian.Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian salinan surat No 92241/G.T. mengenai pengajuan tunjangan untuk para anggota Sekretaris Panitia Industrialisasi, beserta lampiran.
9 Oktober 1955
asli
2 lembar

391 Surat dari Kepala Bagian Anggaran kepada Perdana Menteri dan semua Menteri mengenai Rancangan Penghasilan Negara untuk tahun 1956, beserta lampiran.
13 Oktober 1955
tembusan
1 sampul

392 Surat dari Panitia Pemilihan Umum mengenai permintaan penambahan anggaran belanja dan pembukaan kreditnya.
14 Oktober 1955
asli
3 lembar

393 Surat-surat dari Kementerian Keuangan mengenai prosedur dan aturan pembelian dan pembayaran barang-barang perlengkapan Kementerian Jawatan dan Instansi Pemerintah.

7 Desember 1955 - 29 Oktober 1959
asli
1 sampul

394 Berkas mengenai pemberian kredit untuk triwulan I, II tahun 1956 - 1957 di Kabinet Perdana Menteri.

20 Desember 1955 - 21 Januari 1957
tembusan
1 sampul

395 Berkas mengenai anggaran belanja RI tahun 1956.

1956
tembusan
1 sampul

396 Berkas mengenai anggaran belanja RI tahun 1957 .

1956 - 1957
asli
1 sampul

397 Berkas mengenai ralat Nota Keuangan Negara tahun anggaran 1956 - 1958 dari Kementerian Keuangan kepada Perdana Menteri RI.

1956 - 13 Februari 1958
asli
1 sampul

398 Berkas mengenai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) RI Tahun 1957.

1956 - 1957
asli
1 sampul

399 Surat dari Kabinet Perdana RI kepada Menteri Keuangan mengenai penyelesaian pekerjaan perundang-undangan kabinet yang lampau di bidang keuangan.

16 Juni 1956
asli
1 sampul

400 Berkas mengenai pertanggungjawaban anggaran tahun 1955 - 1958.

20 Juli 1956 - Desember 1958
asli
1 sampul

401 Series Surat Keputusan Perdana Menteri tentang pengesahan anggaran tahun 1956-1958.

21 Agustus 1956 - 1 November 1958
asli
1 sampul

402 Surat dari Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI kepada Kabinet Perdana Menteri U.p. Sdr. Kepala Bagian Keuangan mengenai pemberitahuan belum dapat disampaikannya satuan 3 B anggaran DPR tahun 1956 yang digunakan untuk melengkapi anggaran Bagian I tahun 1956.

25 Agustus 1956
tembusan
1 lembar

403 Berkas mengenai Anggaran Belanja Tambahan tahun 1957.

Oktober 1956 - Januari 1958
asli
1 sampul

404 Berkas mengenai Anggaran Belanja Biro Perancang Negara Tahun 1956, 1957, dan 1959.

10 Oktober 1956 - 4 Maret 1959
asli
1 sampul

405 Berkas mengenai anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 1957 - 1958.

7 November 1956 - 20 Desember 1958
tembusan, asli
1 sampul

406 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai perubahan surat keputusan Perdana Menteri tanggal 5 Oktober 1956 Nomor KU.149/Pol.56/KAPP tentang ralat nominal pada mata anggaran 1.10.5.13.

7 November 1956
asli
2 lembar

407 Nota perubahan kedua dengan memori penjelasan tentang anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1957 Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi.

1957
pertinggal
5 lembar

408 Rancangan undang-undang mengenai pengubahan dan penambahan Undang-undang Penetapan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas1957 dan Rancangan Undang-undang tentang penetapan bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1958.

1957 - 1958
asli
1 sampul

409 Kartu Pengawasan Kredit tahun 1957 dan 1958 Bagian I.

1957 - 1958
asli
3 lembar

410 Berkas mengenai anggaran belanja RI tahun 1958.

1957 - 1958
asli
3 sampul

411 Berkas mengenai Rancangan Anggaran Belanja (R.A.B) R.I tahun 1958.

1957 - 1958
asli
3 sampul

412 Berkas mengenai perhitungan anggaran sementara tahun 1957 - 1959.

1957 - 1959
tembusan
1 sampul

413 Surat-surat keputusan tentang persetujuan pemberian kredit untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri untuk Kabinet Perdana Menteri.

1957 - 1959
asli
1 sampul

414 Surat dari Sekretaris Panitia Kerja Sementara Pembangunan Masyarakat Desa kepada Perdana Menteri tentang anggaran RI untuk tahun 1957 Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.

2 Januari 1957 - 1959
asli
1 sampul

415 Berkas mengenai penyusunan anggaran biaya perjalanan dinas dalam negeri.

10 Januari - 13 Desember 1957
fotokopi
1 sampul

416 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan mengenai permintaan uang kerja untuk triwulan ke- I tahun 1957 (m.a. 1.6.1.11 s/d m.a. 1.6.2.39)

14 Januari 1957
pertinggal
9 lembar

417 Surat permintaan Gubernur Nusa Tenggara tentang anggaran untuk pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara.

28 Januari 1957
fotokopi
5 lembar

418 Berkas mengenai Anggaran Belanja Tambahan tahun 1958.

30 Januari 1957 - 11 Maret 1959
asli
1 sampul

419 Berkas mengenai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 1959.

30 Januari 1957 - 1959
asli
1 sampul

420 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai Kepada Menteri Keuangan mengenai pemindahan anggaran belanja tahun 1957 untuk Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta kepada Anggaran Belanja tahun 1957 untuk Kantor Urusan Pegawai.

20 Februari - 23 April 1957
asli
1 sampul

421 Berkas mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Tambahan untuk tahun dinas 1954.

22 Februari 1957
asli
1 sampul

422 Kumpulan Surat Keputusan Perdana Menteri RI tentang pemberian kredit Tahun 1956 - 1957.

28 Februari - 26 Desember 1957
asli
1 sampul

423 Daftar pengeluaran dari sejumlah Kantor Kas Negara.

Maret 1957
fotokopi
1 lembar

424 Memorandum Menteri keuangan mengenai rancangan anggaran belanja tahun 1957.

4 Maret 1957
asli
1 sampul

425 Surat dari Kementerian Keuangan R.I kepada Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri mengenai penyelesaian anggaran negara tahun 1957 dan 1958.

11 Maret - 14 November 1957

pertinggal
1 sampul

426 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai angka-angka belanja pegawai yang akan dibayarkan.

15 Maret 1957
asli
1 lembar

427 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Luar Negeri mengenai penagihan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) sebanyak Rp. 826/50 atau Rp. 1.983,60 atas nama saudara R. Achmad, beserta lampiran.

19 - 20 Maret 1957
asli
4 lembar

428 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Perbendaharaan Kas Negara mengenai pembebanan pada mata anggaran bagian I tahun 1957.

27 Maret 1957
konsep
10 lembar

429 Daftar Kesimpulan dari Penerimaan dan Pengeluaran Uang untuk diperhitungkan guna keperluan Pembangunan Masyarakat Desa atas m.a. 1.9.2.11 dan m.a. 1.9.2.14 bulan januari s/d Maret 1957 Provinsi Kalimantan.

31 Maret - 30 April 1957
asli
1 sampul

430 Surat dari Kementerian Keuangan kepada semua menteri tentang biaya perjalanan dan penerimaan tamu agung RI dan tamu-tamu dari luar negeri.

16 April 1957
tembusan
3 lembar

431 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri RI mengenai penyampaian Nota Keuangan Negara tahun 1957.

28 Juni 1957
asli
1 sampul

432 Berkas Surat Edaran mengenai pengiriman anggaran belanja kepada segenap Instansi tahun 1958.

3 Juli 1957
pertinggal
1 sampul

433 Berkas Perdana Menteri mengenai penggeseran kredit anggaran/pemindahan kredit anggaran tahun 1954 - 1958

1 Agustus - 28 November 1957
tembusan
1 sampul

434 Daftar perhitungan uang-uang yang telah diterima untuk diperhitungkan biaya untuk bangunan-bangunan atas beban mata anggaran 1.9.1.2.1 tahun anggaran 1957 bulan Agustus - September.

Agustus - September 1957
asli
2 lembar

435 Petikan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI mengenai penaikan kredit "Jakarta 39/1957" yang telah dibuka pada Bank Indonesia di Jakarta selama tahun 1957 guna Biro Keamanan (Angkatan Darat).

2 Agustus 1957
tembusan
1 lembar

436 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Perdana Menteri mengenai ikhtisar rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960 dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, beserta lampiran.

6 Agustus 1957
fotokopi
1 sampul

437 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri mengenai pembebanan anggaran ongkos perjalanan dinas Kepolisian Negara tahun 1957. .

6 September 1957
asli
1 lembar

438 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Biro Pembangunan Masyarakat Desa mengenai penyampaian contoh daftar rencana pembelian barang-barang modal yang sangat penting dalam tahun 1958, beserta lampiran.

10 September 1957
pertinggal
5 lembar

439 Surat dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri RI kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Padang mengenai kesalahan-kesalahan dalam daftar P.8 beban tetap bulan Mei 1957 Bagian I/1957.

11 September 1957
pertinggal
1 lembar

440 Berkas mengenai rencana pengeluaran anggaran untuk keperluan anggota *Fact Finding Comitte*.

26 - 28 September 1957
asli
1 sampul

441 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian surat-surat anggaran belanja tahun 1958, beserta lampiran.

11 Oktober 1957
asli
1 sampul

442 Surat dari Kabinet Perdana Menteri Direktorium Pengukuran dan Pengambaran Peta kepada Kabinet Perdana Menteri u.p. Kepala Anggaran mengenai penyampaian daftar pengeluaran uang untuk gaji Pegawai Negeri bulanan/ sementara tahun 1956.

11 Oktober 1957
asli
5 lembar

443 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Hubungan Antar Daerah tentang anggaran belanja desa.

31 Oktober 1957
asli
2 lembar

444 Surat dari panitia pembantu teknis P.M.D Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogja mengenai S.P.D bulan Oktober, Nopember 1957 untuk m.a 1.9.2.11, m..a.1.9.2.14 (Bendel surat bukti & kwitansi).

Oktober - 13 Desember 1957
fotokopi
5 lembar

445 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai persetujuan pembiayaan musyawarah nasional pembangunan yang dibebankan pada anggaran Kabinet Perdana Menteri, disertai lampiran.

6 November 1957
asli
1 sampul

446 Surat dari Wakil Perdana Menteri III kepada Ketua DPR mengenai memori jawaban pemerintah atas laporan Seksi H DPR mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Penetapan Bagian I, Mata Anggaran 1.8 (Kepolisian Negara) dan Anggaran RI tahun Dinas 1957, disertai lampiran.

9 - 11 November 1957
asli
4 lembar

447 Surat Sekretaris I Presiden kepada Menteri Kehakiman tentang pengundangan Undang-undang penetapan bagian-bagian dan Undang-undang penetapan bagian-bagian IBW dari anggaran RI tahun 1954.

12 November 1957
tembusan
2 lembar

448 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan umum babak I, II DPR R.I. mengenai anggaran belanja tahun anggaran 1957 - 1958.

21 November 1957 - 26 Agustus 1958
asli
1 sampul

449 Surat-surat mengenai anggaran belanja biaya perjalanan dinas dalam negeri.

4 - 20 Desember 1957
asli
4 lembar

450 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja Jawatan Gedung Pusat kepada Thesaurier Jenderal (Kementerian Keuangan) mengenai penyelesaian pengeluaran beban tetap dalam anggaran tahun 1958 untuk jawatan gedung negeri di Jakarta.

10 Desember 1957
tembusan
1 lembar

451 Surat dari Kabag Keuangan Perdana Menteri kepada Thesaurie Negara (Kementerian Keuangan) mengenai daftar hasil pembayaran (perlengkapan kantor dan pembuatan gedung-gedung).

11 Desember 1957
fotokopi
3 lembar

452 Surat dari Kantor Urusan Pegawai kepada Bagian Anggaran Kabinet Perdana Menteri mengenai Perobahan Tambahan R.A.B. t19ahun 58 (Surat Kabinet Perdana Menteri tanggal 9 Desember 1957 No. 37231/57)

16 Desember 1957
asli
5 lembar

453 Surat dari Kepala Biro Pusat Statistik mengenai penyesuaian anggaran menurut instruksi Kementrian Keuangan.

20 Desember 1957
asli
1 sampul

454 Berkas mengenai Rancangan Undang-undang mengenai Anggaran Tambahan tahun 1958.

1958
tembusan

5 sampul

455 Berkas mengenai Anggaran Belanja Tahun 1959.

1958 - 1959
fotokopi
3 sampul

456 Berkas mengenai Rancangan Anggaran Belanja (R.A.B) R.I Tahun 1959.

1958 -1959
asli
1 sampul

457 Surat dari Direktur Jenderal Biro Perancang Negara Kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai permintaan kredit untuk m.a. 1.6.1.22.

14 Januari - 25 Maret 1958
asli
1 sampul

458 Berkas mengenai Anggaran Belanja tahun 1958 dengan aftrek post dari Biro Perancang Negara, Konstituante RI, Kepolisian Negara, Jawatan Sandi, Biro Pembangunan Masyarakat Desa, DPR-RI, Kabinet Presiden, dll, beserta lampiran.

25 Januari - 19 Juni 1958
tembusan
1 sampul

459 Daftar mengenai perhitungan uang yang diterima untuk keperluan biaya-biaya Kantor Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Negara atas anggaran Januari 1958.

1 Februari 1958
tembusan
4 lembar

460 Berkas mengenai rancangan anggaran pembangunan pelabuhan coaster di Semarang.

8 Maret - 3 Mei 1958
asli
1 sampul

461 Berkas mengenai permintaan dan pengiriman buku "Pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan Tahun 1956".

24 Maret - 16 Juli 1958
asli
1 sampul

462 Nota Dinas mengenai permintaan Anggaran Belanja Tambahan.

16 Mei 1958
asli
5 lembar

463 Berkas mengenai Surat Edaran tentang pembaharuan Rancangan Anggaran Belanja 1958.

23 Mei - 3 Juni 1958

pertinggal
1 sampul

464 Surat dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kantor Pengawas Kas Negara di Palembang mengenai anggaran tahun 1958.
14 Juli 1958
asli
1 sampul

465 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai penetapan keputusan tentang penyerahan sebagian hasil PPE.
14 -19 Juli 1958
fotokopi
1 sampul

466 Surat dari Pd. Kepala Bagian Urusan DPR kepada Perdana Menteri mengenai rancangan anggaran Undang-Undang Dewan Perancang Nasional.
8 - 15 September 1958
fotokopi
1 sampul

467 Surat kepada Jawatan Kepolisian Negara mengenai usul penggeseran anggaran tahun 1958.
28 Agustus 1958
asli
1 lembar

468 Surat kepada KPPN mengenai mata anggaran baru 1958.
11 Oktober 1958
asli
1 lembar

469 Berkas mengenai laporan anggaran sementara Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintahan Tertinggi) tahun dinas 1958.
29 Oktober 1958
pertinggal
1 sampul

470 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai transfer laba bagi perusahaan-perusahaan asing kecuali perusahaan Belanda.
30 Oktober 1958
asli
2 lembar

471 Surat dari Kepala Bagian Inspeksi Anggaran kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai usul tambahan anggaran belanja tahun 1958 Bagian I, beserta lampiran.
14 November 1958
fotokopi

1 sampul

472 Surat-surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Direktur Lembaga Administrasi Negara dan Direktur Jenderal Biro Perancang Negara mengenai penyesuaian anggaran 3B dengan pangkat-pangkat yang ditentukan dalam PGPN Tahun 1955. n.b: kondisi fisik sobek.

14 November - 11 Desember 1958
asli
3 lembar

473 Berkas mengenai Nota Perubahan Anggaran Ke I,II,III tahun 1958.

27 Februari - 17 September 1958
fotokopi, pertingal
1 sampul

474 Surat dari Sekretaris Dewan Ekonomi dan Pembangunan kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang nota tambahan daftar proyek dari Buku Rencana Pembangunan 5 Tahun.

11 Desember 1958
asli
1 sampul

475 Surat dari BPMD mengenai permintaan otorisasi biaya pembelian alat dan pemasangan telepon (Pembangunan Masyarakat Desa).

20 Desember 1958
asli
1 sampul

476 Nota dari Kepala Biro Keamanan kepada Perdana Menteri tentang tambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan pemulihan keamanan tahun 1959.

1959
asli
2 lembar

477 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pembagian kredit untuk Panitia Pemilihan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I dan II di Jawa Tengah.

1 Agustus 1959
tembusan
2 lembar

478 Surat mengenai pembuatan surat perjalanan dinas Bulan Agustus 1959 sehubungan dengan penurunan nilai uang kertas Rp. 500 dan Rp. 1000.

5 - 8 September 1959
pertinggal
4 lembar

479 Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku No:3218/7A/59 tentang bendaharawan yang bertanggung jawab atas betulnya pemakaian dan perhitungan uang yang disediakan untuk melakukan pekerjaan mendirikan asrama mobile brigade di Amahai.

20 Oktober 1959
tembusan
1 lembar

480 Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Kepala Daerah Swatantra Tk.II Purbolinggo mengenai Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 13 Januari 1959 No.49.59/Keu.O.T.

6 Januari 1960
tembusan
1 lembar

481 Laporan singkat tentang pertemuan Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah.

4 Maret 1960
tembusan
1 sampul

482 Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. CH-277.65/Keu.OT.PM tentang pemberian persetujuan penyediaan uang untuk triwulan ke-3 tahun 1965, beserta lampiran.

12 Agustus 1965
pertinggal
2 lembar

484 Penjelasan tiap mata anggaran pos 1.10 Kepolisian Negara.

tt
fotokopi
1 sampul

4) Ganti Rugi dan Hutang

485 Berkas mengenai daftar perhitungan jumlah hutang tetap dan hutang sementara R.I. pada Tahun 1949 - 1955.

1949 - 1955
asli
1 sampul

486 Berkas mengenai Panitia Penyelesaian Hutang Negara pada Kementerian Keuangan mengenai penyelesaian hutang negara.

15 April 1950 - 5 Maret 1958
asli
1 sampul

487 Berkas mengenai putusan Pengadilan Negeri di Jakarta tentang hukuman pada pemerintah untuk membayar kerugian kepada penggugat Ong Khay Tong sebesar Rp. 29.450,-

17 Desember 1951 - 16 Januari 1952
asli
1 sampul

488 Surat-surat mengenai pembebasan hutang kepada almarhum Ismail Banda orang yang pernah berjasa di Kementerian Luar Negeri terutama dalam penyiaran dari R.R.I New Delhi.

29 Januari - 5 Agustus 1952
pertinggal
5 lembar

489 Berkas Kabinet Perdana Menteri mengenai uang pemulihan/persediaan biaya pemulihan Tahun 1953 - 1957.

7 April 1953 - 10 Mei 1957
asli
1 sampul

490 Berkas mengenai kerugian negara akibat penggelapan dana/kerugian yang di timbulkan pada negara.

16 Mei 1953 - 22 Oktober 1958
asli
1 sampul

491 Surat-surat mengenai Proyek Asahan dan hubungannya dengan pembayaran kerugian perang oleh Jepang, beserta lampiran.

15 - 23 Desember 1953
pertinggal
3 lembar

492 Surat dari Kepala Bagian Urusan Pegawai Jawatan Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri RI, Biro Keamanan mengenai pembebasan kelebihan penerimaan gaji a.n. Pembantu Inspektur Polisi Kelas I Moh. Halil.

27 Oktober 1954
asli
4 lembar

493 Tuntutan tagihan Sdr. Chaidir Sutan Mentari Bukit Tinggi terhadap pemerintah.

24 Februari 1955
asli
1 sampul

494 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara mengenai penggantian kerugian Alg. Landbouw Syndicaat.

15 Juni 1955
asli
1 sampul

495 Surat-surat keputusan Kepala Polisi Provinsi Jawa Timur tentang pemberian penggantian uang kepada para pegawai.

8 Mei - 8 Desember 1957
tembusan

1 sampul

496 Surat dari a.n. Sekretaris Dirjen Biro Perancang Negara kepada Kepala Jawatan Perjalanan Negeri mengenai hutang kepada negara lain a.n. Sdr. Sakidjan Atmosudigdo (perencana pada Biro Perancang Negara) yang mengikuti kursus dari I.B.R.D di Washington, beserta lampiran.

26 Agustus - 5 September 1957
tembusan
7 lembar

497 Surat kepada Menteri Keuangan tentang pinjaman pemerintah kepada Kotapraja Semarang guna membiayai pembangunan penjernihan air Kali Garang.

7 Oktober 1957
fotokopi
1 sampul

498 Berkas mengenai penagihan hutang kepada negara dan penggantian kerugian.

1958 - 1959
asli
1 sampul

499 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementrian Keuangan kepada Wakil Perdana Menteri II RI tentang pertanyaan anggota DPR Asraroedin sekitar berita bahwa pihak Indonesia masih mempunyai hutang pada salah satu perusahaan kapal di Hamburg.

24 Pebruari 1958
tembusan
5 lembar

500 Surat-surat mengenai permohonan ganti kerugian Pegawai Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952.

14 Juni 1958 - 18 Maret 1959
salinan
1 sampul

501 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Komisi Penyelesaian Hutang Negara d/a Kementrian Keuangan mengenai ganti kerugian atas barang-barang yang dipergunakan TNI.

1 Agustus - 18 Desember 1958
asli
1 sampul

502 Surat kepada Menteri Keuangan mengenai hutang Kabinet Perdana Menteri.

9 Oktober 1958
asli
5 lembar

503 Berkas Kabinet Perdana Menteri mengenai surat-surat penagihan.

6 Juni 1958 - 31 Desember 1959

asli
1 sampul

504 Daftar ongkos cukur/pangkas rambut tahun 1964.

3 September 1964 - 18 Februari 1965
asli
1 sampul

5) Gaji Pegawai

505 Surat dari Koordinator Kehakiman Jawa Barat kepada Menteri Kehakiman tentang kenaikan gaji berkala atas nama R. Dewi Kasawijah, Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, beserta lampiran.

27 September 1950
asli
3 lembar

506 Berkas mengenai kenaikan gaji berkala pegawai tahun 1951-1956.

1951-1956
asli
1 sampul

507 Surat Edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang penetapan gaji pegawai yang belum disesuaikan dengan P.G.P 1948 (phase I dan phase II).

18 Januari 1951
asli
1 sampul

508 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kantor Dana Pensiun tentang kenaikan gaji berkala Sdr.Salim, juru ketik pada Kabinet Perdana Menteri yang diperbantukan pada Kantor Dana Pensiun.

1 Agustus 1951
tembusan
1 sampul

509 Berkas mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri tentang skala gaji baru.

12 November 1951
tembusan
1 sampul

510 Pengumuman Sekretaris Dewan Menteri tentang persetujuan rencana Peraturan Pemerintah mengenai Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bukan warga negara.

25 Januari 1952
tembusan
1 sampul

511 Daftar gaji dari Jawatan Kepolisian Negara tahun 1953.

1953
tembusan
1 sampul

512 Surat dari Ketua Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri kepada Perdana Menteri Republik Indonesia mengenai peninjauan rencana peraturan gaji baru yang telah diubah oleh Dewan Urusan Pegawai.

8 - 12 Maret 1955
asli
4 lembar

513 Surat dari Sekretaris Jenderal kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil RI, beserta lampiran penjelasan.

12 Agustus 1955
tembusan
1 sampul

514 Berkas mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah untuk mengubah Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1954 tentang hak kekuasaan untuk memberikan gaji yang tertentu.

9 November 1956 - 10 Februari 1958
tembusan
1 lembar

515 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan kepada Perdana Menteri RI mengenai penyampaian surat Menteri Keuangan tentang gaji dan tunjangan para menteri, beserta lampiran.

11 Maret 1957
asli
1 sampul

516 Surat Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.19/1957 tentang pemberian gaji menurut *parallelschaal.*

3 Juli 1957
tembusan
1 sampul

517 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri tentang permohonan pesuruh kepala Alliusin agar ia dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kembali kelebihan gajinya sejak 1 September 1951 s/d 1 Agustus 1954.

9 Agustus 1957
asli
2 lembar

518 Kumpulan surat keputusan tentang pemberhentian pembayaran gaji dengan lampiran.

10 Agustus 1957
tembusan
7 lembar

519 Berkas mengenai penetapan sementara gaji dan tunjangan (tetap) dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.

November - Desember 1957
tembusan
1 sampul

520 Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Pembuat Daftar Gaji Wilayah KPPN Jakarta mengenai daftar permintaan uang lembur.

11 Desember 1957
salinan
1 lembar

521 Kumpulan daftar dari Kepala Seksi Urusan Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai persetujuan kenaikan gaji bagi pegawai yang bekerja dibawah pengawasannya.

17 Desember 1957
asli
1 sampul

522 Daftar penerimaan gaji pegawai Kabinet Perdana Menteri RI tahun 1958.

11 Mei 1958
asli
1 sampul

523 Daftar gaji pegawai Kabinet Perdana Menteri Tahun 1958.

1958
asli
1 sampul

524 Surat-surat Keputusan Perdana Menteri tentang penyesuaian pemberian gaji kepada para pegawai yang namanya terlampir di daftar sesuai dengan yang ditetapkan.

1959
salinan
1 sampul

525 Berkas mengenai daftar potongan pajak peralihan/upah dari para pegawai Kabinet Perdana Menteri.

12 Juli 1959
pertinggal
1 sampul

526 Instruksi pelaksanaan Peraturan Menteri Pertama No.559/MP/1959 tanggal 14 November 1959 tentang gaji pegawai pada badan/panitia penampung dan semua perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi.

14 November 1959
salinan
1 sampul

527 Surat keterangan dari Pembuat Daftar Gaji Kabinet Perdana Menteri mengenai keterangan perincian gaji atas nama Teguh Jososaputro.

23 November 1959
salinan
1 lembar

b. Pembukuan/Pemeriksaan
1) Pembukuan

528 Berkas mengenai penyampaian ketidaksenpurnaan dalam hal penyelesaian laporan dan surat menyurat atas pemeriksaan Dewan Pengawas Keuangan pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

7 September 1949 - 4 Juni 1951
asli
1 sampul

529 Surat Keputusan Menteri Muda Kesehatan R.I. No. 206354/U..K./I tentang pemberian kuasa Kepada Bagian Perbendaharaan (Seksi BI) dari Departemen Keuangan di Jakarta untuk melakukan pemindahan pembukuan uang untuk keperluan pembiayaan Proyek Pembasmian Malaria dalam rangka bantuan luar negeri (*Counterpart Fund*) dalam tahun 1959.

21 November 1950
salinan
4 lembar

530 Daftar rincian biaya dan tiket penerbangan perjalanan dinas Harsono Tjokroaminoto.

23 November 1950 - 2 Maret 1951
pertinggal
1 sampul

531 Berkas mengenai pengembalian ongkos asuransi perjalanan dinas dengan pesawat terbang pada Dewan Pengawas Keuangan.

12 Desember 1950 - 9 Mei 1951
tembusan
1 sampul

532 Berkas Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri mengenai pemakaian daftar perintah pemindah pembukuan (P.P.P)

12 Desember 1950 - 20 Maret 1951
tembusan
4 lembar

533 Daftar realisasi/ikhtisar pengeluaran dan penerimaan tahun 1951.

1951
asli
1 sampul

534 Berkas mengenai daftar Kepala-kepala Pembukuan Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi.

1951 - 1967
fotokopi
1 sampul

535 Nota *Betreffende De Toestand Van's Lands Financien* atau nota keuangan. n.b: arsip berbahasa Belanda.

19 Juni 1951
asli
1 sampul

536 Daftar mengenai pengeluaran biaya dari panitia penyelengggara perayaan 17 Agusutus 1945 di Istana Negara.

17 Agustus 1951
tembusan
4 lembar

537 Berkas mengenai pertanggungjawaban uang staf "K" tahun 1950 - 1951 Daerah Sumatera dan Kalimantan.

20 Desember 1951 - 21 Juli 1952
tembusan
1 sampul

538 Berkas mengenai bukti pembayaran, kwitansi dan tanda bukti transaksi keuangan.

1952 - 1959
asli
1 sampul

539 Berkas mengenai permintaan hoofdenlijst/daftar mata pembukuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat R.I. kepada Kabinet Perdana Menteri.

14 Februari - 31 Maret 1952
asli
1 lembar

540 Berkas mengenai laporan pemeriksaan mengenai penyetoran uang Jawatan Distribusi Pusat Jogjakarta pada Kementerian Perekonomian yang disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan.

7 Juni 1952
asli
1 sampul

541 Berkas mengenai pertanggungjawaban keuangan Sekolah Kepolisian Dinas Security (Pathook Jogjakarta).

11 Agustus 1952 - 11 September 1957
tembusan
1 sampul

542 Berkas mengenai statistik hasil usaha PBH, KPU, KKOD, dll triwulan III/1952 pada Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan.

19 Desember 1952
asli
1 sampul

543 Daftar uang muka (uang yang disediakan untuk dinas) pengeluaran sementara tahun 1953 - 1954 Wilayah Jawa Tengah.

1953 - 1954
asli
1 sampul

544 Daftar pengeluaran belanja Dewan Perwakilan Rakrat R.I. untuk penginapan dan rumah ketua tahun 1950/1951.

11 Maret 1953 - 10 Desember 1955
asli
6 lembar

545 Surat-surat mengenai penyampaian surat keterangan uang simpanan atas nama Nn. L.J. Kits van Heijningen tahun 1952.

18 Juni - 17 Juli 1953
asli
4 lembar

546 Daftar mengenai pengeluaran/rancangan ongkos perjalanan dalam dan luar negeri untuk Perdana Menteri yang telah dibukukan tahun anggaran 1951/1953.

10 Juli 1953
asli
1 lembar

547 Daftar ikhtisar belanja barang Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 1950/1951/1952.
November 1953
asli
1 lembar

548 Berkas mengenai inspeksi keuangan pada jawatan-jawatan dan kantor-kantor.
11 Januari - 2 Februari 1954
konsep, asli
1 sampul

549 Berkas mengenai Neraca Pembayaran Indonesia bulan Mei s/d September 1954.
12 Juli - 16 Desember 1954
salinan
1 sampul

550 Laporan keuangan mengenai penjagaan keamananan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955.
2 Februari - 8 Juni 1955
asli
1 sampul

551 Pemeriksaan kas pada pemegang kas Jawatan Kepolisian Negara.
29 Juni 1955
fotokopi
7 lembar

552 Daftar ikhtisar penerimaan/pengeluaran Kabinet Perdana Menteri dalam bulan Januari - Juni atas beban mata anggaran 1.2.2.15/59.
15 Juli 1955
asli
2 lembar

553 Berkas mengenai laporan belanja pegawai dari Kantor Urusan Pegawai tahun 1955.
20 Oktober - 23 November 1955
asli
1 sampul

554 Surat pengantar Pertanggungjawaban Pembukuan Kabinet Perdana Menteri.
1956 - 1959
asli
1 sampul

555 Berkas mengenai pertanggungjawaban pengeluaran ongkos Kantor Koordinasi Keamanan Daerah Jawa Barat bulan Agustus - Desember 1955.

14 - 25 Januari 1956
asli
7 lembar

556 Laporan mengenai pemeriksaan kas yang dilakukan pada Kantor Koordinasi Keamanan Daerah Jawa Timur di Surabaya.

13 - 26 Maret 1956
asli
1 sampul

557 Laporan Tahunan 1954/1955 Tahun Buku ke I N.V. Bank Merdeka.

7 Juni 1956
salinan
1 jilid

558 Daftar ikhtisar keuangan bulan Agustus 1956.

Agustus 1956
asli
1 sampul

559 Berkas Surat Perintah Membayar (S.P.M.) Tahun 1956 - 1958

9 Agustus 1956 - 31 Desember 1959
asli
1 sampul

560 Daftar pengeluaran biaya perjalanan dinas dalam negeri Pemerintah Agung dan Dewan-Dewan Agung tahun anggaran 1954/1955 yang telah dibukukan.

11 Agustus 1956
asli
1 sampul

561 Daftar pengeluaran (ongkos) dari sejumlah Kompi Brigade Polisi Negara tahun 1957.

1957
asli
1 sampul

562 Daftar Pengantar Kiriman Surat Kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) di Makassar, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Tomohon, Ambon, Singaraja, Tanjung Pinang.

1957
asli
1 lembar

563 Daftar jumlah penerimaan uang lembur pegawai Kabinet Perdana Menteri RI.

1957-1958
asli
1 sampul

564 Konsep surat pada bagian seksi pembukuan.

1957 - 1958
asli
1 sampul

565 Daftar pembukuan penerimaan dari Kantor Pengawas Kas Negara di seluruh Indonesia selama Januari - Desember 1957.

1957
asli
1 sampul

566 Daftar C8 dari KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara) di seluruh Indonesia selama Januari - Desember tahun 1957 - 1959.

1957 - 1959
tembusan
2 sampul

567 Daftar Pertelaan dari P.8. (SPMU) dari Kantor Pemeriksaan Tata Usaha Negeri di seluruh Indonesia selama Januari-Desember 1957-1959.

1957 - 1959
asli
1 sampul

568 Permintaan daftar S.P.M.U Tahun 1957 - 1959.

1957 - 1959
asli
1 sampul

569 Daftar pembukuan pengeluaran tahun 1957 - 1959.

Januari 1957 - 25 Februari 1958
asli
2 sampul

570 Daftar alat-alat tulis menulis yang digunakan oleh Seksi Pembukuan pengeluaran tahun 1957 - 1959.

1957 - 1959
asli
1 sampul

571 Berkas mengenai bukti pengeluaran kas pada Sekretariat Konstituante Republik Indonesia tahun 1957 - 1958.

1957 - 1958
asli
1 sampul

572 Berkas Surat Pertanggung Jawaban (S.P.J.) tahun 1957 - 1958.

1957 - 1958
asli
1 sampul

573 Daftar Pertanggung Jawaban Sekretariat Konstituante Republik Indonesia tahun 1957 - 1958.

1957 - 1958
asli
1 sampul

574 Daftar mengenai perubahan atau pembatalan pembukuan Kabinet Perdanan Menteri RI Bulan Januari - Desember tahun 1957.

Januari - Desember 1957
tembusan
1 sampul

575 Daftar/Ikhtisar Pengeluaran tahun 1957.

1957
asli
2 sampul

576 Daftar Regulasi (pengeluaran) dari sejumlah kementrian dalam tahun 1957.

1957
tembusan
1 sampul

577 Daftar *Controlestaat* beban tetap tahun 1957 dan 1959.

1957 - 1959
asli
1 sampul

578 Surat dari Kepala Jawatan Gedung-Gedung Negeri Daerah Yogyakarta mengenai penyampaian daftar biaya dan pekerjaan-pekerjaan tertentu (*overloopwerken*) dalam tahun 1956 dari Jawatan Gedung-Gedung Negeri Daerah Jogjakarta yang harus diselesaikan dalam tahun 1957, beserta lampiran.

9 Januari 1957
salinan
1 sampul

579 Daftar penyimpulan pengembalian/ikhtisar pengembalian Bulan Februari - Desember 1957 pada Kabinet Perdana Menteri.

Februari - Desember 1957
tembusan
1 sampul

580 Surat dari Biro Irian kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri (u.p. Kepala Bagian Keuangan) mengenai Ppenyampaian daftar hasil pemakaian anggaran belanja yang berhubungan dengan belanja pegawai selama tahun 1956.

21 Maret 1957
asli
2 lembar

581 Surat-surat dari Menteri Dalam Negeri tentang pengeluaran untuk Daerah Banten tahun 1957.

9 Mei 1957
tembusan
1 sampul

582 Berkas mengenai pembukuan rincian kas Sekretariat Konstituante RI untuk pengeluaran pembayaran uang makan bagi para pegawai.

10 Mei 1957
asli
1 sampul

583 Berkas mengenai laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dari Biro Perancang Negara ke Amerika Serikat.

7 Juni - 9 November 1957
tembusan
1 sampul

584 Surat-surat mengenai koreksi SPD Kantor Urusan Pegawai Bandung.

Juli - Oktober 1957
tembusan
1 sampul

585 Berkas mengenai perintah pemindahan pembukuan.

27 September - 25 November 1957
asli
1 sampul

586 Surat kepada Kepala Kantor Pengawas Kas Negara tentang kesalahan pengoperan angka-angka dalam rekap hijau.

24 Oktober 1957
asli
4 lembar

587 Daftar mengenai perhitungan uang yang telah diterima untuk diperhitungkan oleh Direktur Sekolah Polisi Negara cabang Tanjung Kassau untuk keperluan ongkos pegawai central (jaminan makan siswa agen polisi) Bulan Oktober anggaran belanja tahun 1957.

31 Oktober - 30 November 1957
asli
1 sampul

588 Daftar pertanggungan jawab mengenai uang untuk diperhitungkan dari Bulan November tahun dinas 1957 mata anggaran 1.8.5.24 Jawatan Gedung-Gedung Daerah Bandung.

1 November 1957
asli
1 sampul

589 Surat dari Kabinet Perdana Menteri RI kepada Kementerian Keuangan mengenai penyampaian ikhtisar pengeluaran Bagian I tahun anggaran 1957 s/d triwulan II tahun 1957.

3 Desember 1957
salinan

3 lembar

590 Laporan tahunan tahun 1957-1958 mengenai kepegawaian, hasil-hasil pekerjaan yang dicapai dll dan yang menjadi tugas tanggung jawab tersebut.

Januari 1958, September 1959
salinan
1 lembar

591 Daftar tentang tugas-tugas pokok pada Seksi Pembukuan Pengeluaran.

1958
konsep
1 sampul

592 Surat dari Kepala Bagian Keuangan kepada Kabinet Presiden dll mengenai pembukuan tunjangan kejuruan, beserta lampiran.

1958
asli
5 lembar

593 Berkas mengenai Undang-Undang Pembendaharan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet) Staatsblad* 1925 (peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan Indonesia.

1958
fotokopi
1 sampul

594 Daftar penerimaan dan pengeluaran perhitungan uang sajian Bulan Januari - Desember 1958 pada Kepolisian Negara.

1958
salinan
1 sampul

595 Berkas mengenai pemindahan uang dari rekening Biro Perancang Negara tahun 1958.

9 Januari - 10 Desember 1958
asli

1 sampul

596 Berkas mengenai daftar permintaan pemindahan pembukuan.

21 Januari - 3 September 1958
asli
1 sampul

597 Laporan pemeriksaan tata buku semester pertama tahun 1957 dan 1958 dari Yayasan Dana Bantuan oleh Akuntan E.F. Jahn.

23 Januari - 30 Oktober 1958
asli
1 sampul

598 Surat dari Kepala Seksi Pembukuan kepada Kepala Seksi Peralatan mengenai permintaan buku himpunan pengeluaran.

12 Februari 1958
konsep
1 lembar

599 Daftar mengenai susunan organisasi dari Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan pada Kementrian Keuangan tahun 1958.

18 Februari 1958
tembusan
2 lembar

600 Berkas mengenai perubahan pembebanan dan pemindahan dari beban tetap ke beban sementara Kabinet Perdana Menteri.

Maret 1958
draft
1 sampul

601 Daftar perbendaharaan dari Kantor Pengawas Kas Negara Bandung.

20 Maret 1958
asli
1 lembar

602 Daftar Ongkos Perjalanan (DOP) Polisi Negara Kantor Karesidenan/Kota Besar Surabaya tahun 1958.

9 April - 30 Oktober 1958
asli
1 sampul

603 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Kementerian Keuangan tentang penyampaian SPD pemeliharaan dan pemulihan keamanan PUK Cianjur bulan Desember 1956.

21 Mei 1958
asli
1 sampul

604 Surat dari Direktur Jenderal Biro Perancang negara kepada Dewan Pengawas Keuangan mengenai pemalsuan tanda tangan pada kuitansi No. 336/10 tanggal 26 Oktober 1957 a.n. Mr. W.J. Treasure.

9 Juni - 24 Juli 1958
pertinggal
2 lembar

605 Surat dari Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta mengenai kelebihan penerimaan gaji.

17 Juli 1958
asli
1 sampul

606 Nota Dinas mengenai pembukuan dan pemeriksaan.

21 Juli - 21 Oktober 1958
asli
1 sampul

607 Surat dari Biro Perancang Negara (BPN) kepada Kementerian Keuangan mengenai permintaan uang kerja (Surat Peintah Membayar/SPM).

22 Juli 1958
tembusan
1 sampul

608 Laporan keuangan dari Bagian Pembukuan mengenai keuntungan koperasi pegawai Kabinet Perdana Menteri yang didapat sejak Agustus 1958 s/d Desember 1959.

Agustus 1958 - Desember 1959
pertinggal
1 sampul

609 Daftar mengenai pembagian uang sajian pertengahan kedua tahun 1958 berdasarkan atas surat keputusan Perdana Menteri tanggal 19 Juni 1958 No. Pol.154/KU/SUL.

13 Agustus 1958
salinan
3 lembar

610 Daftar mengenai permohonan tunjangan pejabat taraf provinsi dan kabupaten daerah kerja Jakarta Raya tahun 1957 - 1958.

15 Desember 1958
salinan
1 sampul

611 Surat mengenai begroting/anggaran belanja Kantor Panitia tahun 1959 dari Bagian Pembukuan dan Kontrol.

16 Desember 1958
salinan
5 lembar

612 Berkas mengenai perincian penerimaan dan pengeluaran dari acara pertunjukan beberapa film.

21 Desember 1958 - 30 Juni 1959
asli
1 sampul

613 Surat dari Direktur Lembaga Administrasi Negara kepada Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan Sub Bagian BI Kementrian Keuangan mengenai pembukuan sisa giro.
31 Desember 1958 - 30 Januari 1959
salinan
2 lembar

614 Berkas mengenai pengawasan kredit anggaran belanja utnuk tahun 1959.
1 Januari1959
asli
1 sampul

615 Berkas mengenai laporan pengeluaran biaya atas anggaran Kabinet Perdana Menteri RI tahun dinas 1959.
1 Januari 1959
asli
1 sampul

616 Tanda bukti penerimaan Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.
1959
tembusan
1 berkas

617 Surat dari Kementerian Keuangan kepada semua kementerian mengenai penyampaian contoh-contoh formulir untuk menyelenggarakan pembelian- pembelian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1958, beserta lampiran.
3 Februari 1959
pertinggal
1 sampul

618 Berkas mengenai pengeluaran ongkos perjalanan dinas dari beberapa Kantor Kepolisian Ressort Bulan Apri l- November 1959.
April - Oktober 1959
asli
1 sampul

619 Berkas mengenai petunjuk tata usaha keuangan pada kementerian - kementerian.
9 Desember 1953 & 14 Mei 1959
fotokopi
1 sampul

620 Daftar pembukuan beban tetap dari KPPN beberapa daerah di Indonesia Bulan Januari - September 1959.
Juli - September 1959
asli

1 sampul

621 Surat mengenai petunjuk kepada pegawai-pegawai Kementerian Kepolisian tentang pekerjaan Seksi Pembukuan dalam rangka persiapan ambil alih tata usaha keuangan anggaran belanja Kepolisian.

29 Juli - 9 November 1959
tembusan
1 sampul

622 Petikan dari daftar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara no.31/Ku/1959 tentang penunjukan bendaharawan yang harus bertanggung jawab atas pemakaian & perhitungan jumlah uang yang telah ditetapkan dengan surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara tahun dinas 1959.

22 Agustus 1959
fotokopi
1 sampul

623 Surat Edaran Menteri Keuangan kepada semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara dan Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Menado di Gorontalo dan Palu mengenai pembuatan S.P.D. bulan agustus 1959 terkait dengan penurunan nilai uang kertas 500 dan 1000 rupiah.

31 Agustus 1959
tembusan
1 sampul

624 Surat dari Kepala Perwakilan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Departemen Kepolisian mengenai pemberitahuan penyelesaian penghitungan saldo-saldo untung akhir tahun 1956 dan 1957 dan surat pertanggungjawaban SPMU dan UUDP dari Kepolisian Resort Donggala.

4 Maret 1960
fotokopi
1 lembar

625 Laporan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara tentang pemeriksaan tata usaha keuangan Kotapraja Surabaya.

1961
asli
1 sampul

2) Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)

626 Berkas mengenai pertanggungjawaban keuangan Operasi Merdeka Staf 'K' Pusat tahun 1951 - 1955.

16 November 1950 - 25 Februari 1955
pertinggal

1 sampul

627 Berkas mengenai pertanggungan jawab uang belanja barang Sekretariat Menteri Pertahanan Koordinator Keamanan bulan Desember 1949.

1 Desember 1950
asli
1 sampul

628 Berkas staf "K" mengenai tanggung jawab keuangan khususnya keuangan staf "K" Jawa Tengah, beserta lampiran.

28 April 1951 - 31 Agustus 1961
asli
1 sampul

629 Surat dari Inspeksi Keuangan Pontianak kepada Kepala Jawatan Pajak mengenai balasan terhadap laporan inspeksi keuangan Pontianak.

1 - 9 Agustus 1951
tembusan
1 sampul

630 Surat dari Ketua Staf "K" Provinsi Jawa Barat kepada Staf "K" Pusat Jakarta mengenai permohonan persetujuan penambahan persediaan uang untuk Staf "K" Provinsi Jawa Barat di Javase Bank.

30 Oktober - 13 November 1951
asli
2 lembar

631 Berkas mengenai *verantwoording* uang Staf "K".

17 November - 12 Desember 1951
tembusan
1 sampul

632 Laporan pemberitaan tahunan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1952 dan 1954 mengenai hasil pengawasan dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

1952, 1954
asli
2 jilid

633 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian mengenai penyampaian surat pemberitahuan pengembalian uang panjar pekerjaan, beserta lampiran.

11 Februari 1952
pertingal
6 lembar

634 Surat dari Dewan Pengawas Keuangan Kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai pertanggungjawaban perbendaharaan dan pengurus keuangan.

6 Januari 1953

fotokopi

4 lembar

635 Berkas mengenai penyetoran sisa U.U.D.P.

7 Maret 1953 - 8 Januari 1954
tembusan
4 lembar

636 Surat dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (Institut Devisen) kepada Perdana Menteri mengenai permintaan transfer sebagai ganti rugi uang oleh pemilik tanah pertikulir "Karah Ketintang" di Surabaya.

29 April - 16 Juni 1953
asli
5 lembar

637 Kartu U.U.D.P tahun 1955 - 1959.

1955 - 1959
asli
1 sampul

638 Berkas mengenai Pertanggungjawaban U.U.D.P tahun anggaran 1956 - 1958.

1956 - 1958
asli
3 sampul

639 Lembar kedua surat pertanggungjawaban keuangan Bagian Keuangan/Seksi U.U.D.P. Kabinet Perdana Menteri R.I.

1956 - 1959
asli
1 sampul

640 Daftar kelengkapan berkas surat pertanggungjawaban keuangan pada Seksi UUDP.

1957-1959
fotokopi
1 sampul

641 Berkas mengenai bukti pengeluaran biaya atas kegiatan Sekretariat Konstituante tahun 1957.

Januari - April 1957
asli
3 sampul

642 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian Surat Edaran Kementrian Keuangan Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara tentang pertanggungjawaban Sub Bagian Pengawas Kas, beserta lampiran.

6 Februari 1958
pertinggal
1 lembar

643 Surat dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jakarta mengenai pertanggungjawaban UUDP dari Biro Irian.

24 Februari 1958
asli
1 sampul

644 Surat dari Panitia Ad Hoc Pemilu kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian pertangungjawaban penerimaan dan pengeluaran untuk keperluan biaya Panitia Kerja I bulan April 1958, beserta lampiran.

5 Mei 1958
salinan
1 lembar

645 Berita Acara Perhitungan Selingan Tata Usaha Keuangan Kepolisian Negara Provinsi Sumatera Utara.

Juni 1958
pertinggal
1 sampul

646 Berkas mengenai masalah pertanggungjawaban keuangan Drs. Tjiong Joe Lian (perencana Biro Perancang Negara) yang diberi tugas ke Luar Negeri Amerika Serikat terkait dengan Proyek Fertilizer.

11 Juli 1958 - 21 Juli 1960
salinan
1 sampul

647 Uraian tugas dan tata kerja Seksi UUDP pada Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri, beserta lampiran daftar nama-nama bendaharawan seluruh Indonesia.

1 Agustus 1958
asli, konsep
1 sampul

648 Berkas Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan Biro Perancang Negara Tahun 1957 - 1958.

19 November 1958
asli
1 sampul

649 Laporan pertanggungjawaban keuangan Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau Menteri Negara Urusan Kerja Sama Sipil Militer mengenai pengeluaran uang dari bulan Juli s/d Desember tahun 1958 (beserta lampiran).

15 Desember 1958
asli
1 sampul

650 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala-Kepala Bagian Keuangan dan Bendaharawan pada instansi di lingkungan dan di bawah pengawasan Perdana Menteri RI mengenai pertanggungjawaban penerimaan ongkos untuk keperluan prive.

31 Desember 1958
salinan
5 lembar

651 Surat dari Panitia Kerja Persiapan Pencacahan Jiwa kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian setoran sisa uang persediaan tahun anggaran 1958.

24 September 1959
asli
2 lembar

652 Surat pemberitahuan mengenai surat kawat Menteri Keuangan tertanggal 18 Desember 1952 yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembayaran Uang Untuk Dipertanggungjawabakan (UUDP).

31 Desember 1953
salinan
1 lembar

653 Daftar kontra pos beban sementara, kontra pos beban tetap dan penghasilan negara dari Kantor Pemeriksaan Tata Usaha Negeri di seluruh Indonesia tahun 1957-1959.

1957 - 1959
asli
12 boks

4. PERALATAN DAN KENDARAAN

a. Peralatan

654 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Menteri Sosial mengenai permintaan gedung untuk embassy.

11 Februari 1950
tembusan
1 sampul

655 Berkas mengenai permintaan gedung untuk presiden kantor Indian *Assosiation* di Bogor.

27 Juli - 26 September 1950
asli
1 sampul

656 Surat dari Kementerian Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai pengosongan ruangan-ruangan pada bekas gedung *Algemeene Secretarie.*

12 - 20 September 1950
asli
3 lembar

657 Surat dari Kementerian Perdagangan dan Industri kepada Kementerian Sosial mengenai kebutuhan gedung untuk Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, beserta lampiran.

03 Oktober 1950
asli

2 lembar

658 Surat-surat mengenai permintaan pemasangan telepon anggota DPR dan beberapa kantor pemerintah.

23 Oktober 1950 - 30 Oktober 1951
asli
1 sampul

659 Surat dari Kepala Jawatan Sandi kepada KSAD mengenai Ruangan untuk Kamar Sandi Angkatan Darat.

28 November 1950
asli
1 lembar

660 Surat dari Kementerian Pertahanan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai Rumah di Jalan Kebun Sirih No 54 dan No 56.

14 Februari - 24 April 1951
asli
5 lembar

661 Berkas surat mengenai kebutuhan perabot rumah tangga untuk para Menteri, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri.

22 Februari 1951 - 8 Mei 1956
asli
1 sampul

662 Berkas mengenai pesanan dan pembetulan alat-alat radio untuk Kabinet Perdana Menteri.

26 Februari - 11 Mei 1951
asli
7 lembar

663 Berkas mengenai perbaikan jalan di halaman gedung Kabinet Perdana Menteri Jalan Dewan Rakyat No.2 Jakarta.

27 februari - 26 Juli 1951
asli
1 sampul

664 Surat dari Kesatuan Tehnik Ukur Gambar Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri mengenai status kantor Kadaster Karesidenan Surakarta, beserta lampiran.

22 Maret 1951 - 9 April 1952
asli
1 sampul

665 Berkas mengenai bantuan bagi gedung-gedung partikelir yang dikembalikan oleh pemerintah setelah dipakai.

8 Mei - 28 November 1951
asli

1 sampul

666 Berkas mengenai pemesanan lemari besi untuk menyimpan uang.
26 Mei - 25 Juni 1951
asli
7 lembar

667 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada Perdana Menteri mengenai permintaan gedung-gedung untuk Kantor Pemerintahan Pusat Negara Kesatuan RI.
12 Juli 1951
asli
2 lembar

668 Surat-surat mengenai gedung-gedung milik pemerintah yang disewa oleh pihak partikelir.
5 Juni 1951 - 9 September 1952
pertinggal
1 sampul

669 Berkas mengenai pengiriman barang-barang kepunyaan Pemerintah atau badan-badan setengah resmi dan tembusan konosemen Pemerintah.
20 Juni 1951 - 08 September 1954
asli
1 sampul

670 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Perdana Menteri mengenai pendirian bangunan untuk jawatan-jawatan.
14 - 21 September 1951
asli
1 sampul

671 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai perintah pembuatan proyek gedung kementerian.
03 Desember 1951
tembusan
4 lembar

672 Berkas mengenai pengembalian gedung di Jalan Sekolah 8 kepada Kantor Pusat Statistik.
7 - 19 Mei 1952
asli
4 lembar

673 Surat dari Menteri Agama kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai gedung-gedung untuk pegawai negeri dengan kantor-kantornya di daerah-daerah.
01 November 1952
asli
2 lembar

674 Surat dari Kepala Jawatan Gedung-gedung Pusat kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan untuk kepentingan kementerian/jawatan.

02 Desember 1952
salinan
4 lembar

675 Surat dari Menteri Agama kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai pembinaan gedung-gedung untuk keperluan Kementerian Agama beserta instansinya di daerah.

14 Januari 1953
asli
2 lembar

676 Surat dari S. Moejono kepada bapak Gubernur Jawa Tengah mengenai tidak lancarnya pekerjaannya dari Kantor Urusan Perumahan (KUP).

22 Maret 1953
asli
1 lembar

677 Daftar alat listrik dan air leideng yang dibutuhkan Biro Perancang Negara, beserta bukti pembayaran.

15 October 1953
asli
1 sampul

678 Berkas mengenai penjualan barang-barang pangkalan milik Kementerian Perhubungan kepada semua kementerian.

11 Desember 1953
asli
5 lembar

679 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Gedung-Gedung mengenai penyelesaian pembuatan gedung di samping kantor Kabinet Perdana Menteri.

05 Februari 1954
asli
3 lembar

680 Surat-surat mengenai proses verbaal timbang terima penyerahan rumah di Jalan Pejambon No.3.

10 Februari 1954 - 26 Februari 1955
pertinggal
1 sampul

681 Surat-surat mengenai pembelian Hotel Tjikini oleh Kementerian Kehakiman yang akan digunakan oleh Jawatan Imigrasi sebagai Biro Pengawasan Orang Asing.

11 Agustus 1954 - 7 Juli 1955

asli
7 lembar

682 Berkas mengenai daftar alat tulis menulis yang digunakan di lingkungan Kantor Kabinet Perdana Menteri serta Kantor Biro Irian Barat dari tahun 1953-1955.

21 Oktober 1954 - 28 November 1955
asli
1 sampul

683 Surat kepada Sekretariat Perdana Menteri dari Bagian Arsip mengenai kebutuhan perlengkapan mebel di Bagian Arsip.

9 Desember 1954
pertinggal
1 lembar

684 Surat dari Sekretaris KPM kepada Menteri Keuangan mengenai pembangunan gedung baru dan tambahan di Kementerian Kehakiman Jl.Segara 17 Jakarta, beserta lampiran.

9 februari - 4 agustus 1955
asli
6 lembar

685 Surat dari Menteri Keuangan kepada semua Kepala Jawatan mengenai pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi pemerintah, beserta lampiran.

23 Maret 1955
fotokopi
4 lembar

686 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai penghapusan barang-barang inventaris dan kekuasaan untuk menjualnya.

03 Juni 1955
salinan
3 lembar

687 Surat dari Kabag. Kabinet Perdana Menteri kepada Jawatan Gedung Negeri mengenai permohonan pembuatan tempat air (reservoir) di Kabinet Perdana Menteri.

16 Juli 1955
asli
1 lembar

688 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Perdana Menteri mengenai rencana bangunan gedung (u*rgensiplan*) dari kementerian dan jawatan-jawatan tahun 1956.

28 November 1955
tembusan
1 lembar

689 Berkas mengenai pemberitahuan untuk melanjutkan langganan Lembaran Negara, tambahan Lembaran Negara dan Berita Negara tahun 1956.

18 Januari - 21 Februari 1956
asli
3 lembar

690 Surat dari Kepala Seksi Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Visser & CO mengenai permintaan untuk dibuatkan kertas berkepala.

28 Maret 1956
asli
2 lembar

691 Surat dari Ketua Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Direktur Biro Perancang Negara mengenai kebutuhan memperluas kantor DFS.

26 Oktober - 22 Desember 1956
asli
2 lembar

692 Surat Edaran Perdana Menteri mengenai penyederhanaan prosedur pembelian pemerintah.

19 Februari 1957
fotokopi
1 sampul

693 Daftar permintaan barang dari Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

1957
asli
5 lembar

694 Berkas mengenai pembelian, pemesanan, alat tulis kantor dan mebeleir

3 Januari - 25 Juli 1957
asli
1 sampul

695 Daftar permintaan barang Bagian Keuangan Seksi Otorisasi Kabinet Perdana Menteri tahun 1957-1959.

30 Januari 1957 - 26 Juni 1959
asli
1 sampul

696 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Kesehatan mengenai penyerahan pemakaian *telefoonlijn* Gambir kepada Kabinet Perdana Menteri.

1 Februari 1957
asli
2 lembar

697 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Perusahaan Listrik Negara mengenai penyambungan kembali listrik untuk kantor Menteri Negara Urusan Veteran dan Umum.

Februari 1957
salinan
1 lembar

698 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kantor Telepon Besar K1. I Jakarta mengenai pembatalan telepon OP 1206 Jl.Flores 19.

Februari 1957
asli
1 lembar

699 Berkas mengenai hasil rapat Interdepartemental mengenai pembelian alat-alat untuk keperluan keamanan.

19 Februari - 9 Mei 1957
asli
1 sampul

700 Surat Edaran Perdana Menteri tentang pemberian surat kuasa untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan, beserta lampiran.

8 Maret - 8 Mei 1957
asli
4 lembar

701 Surat dari Kepala Bagian Keuangan UUDP kepada Kepala Seksi Peralatan KPM mengenai inventaris kantor yang dibutuhkan oleh seksi UUDP sebagai bahan penyusunan anggaran belanja.

9 Maret 1957
asli
1 sampul

702 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai pendirian gedung untuk tamu agung di Bukittinggi ditarik kembali karena masalah tanah belum diselesaikan

24 Agustus 1957
asli
1 lembar

703 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Urusan Pengesahan Tenaga Rakyat untuk pembangunan mengenai mesin tulis dan roneo.

7 September 1957
asli
3 lembar

704 Surat keterangan Sdr. N. Lawalata (pegawai Biro Perancang Negara yang dalam menjalankan tugasnya sehari-hari memerlukan kacamata.

01 Januari 1958

asli
1 lembar

705 Surat dari BNI kepada Perdana Menteri mengenai nota pembelian buku-buku ke *Midland Bank* .

2 April 1958
asli
1 sampul

706 Berkas rumah tangga mengenai daftar barang-barang inventaris Biro Perancang Negara bulan Agustus - Desember 1958.

Agustus - Desember 1958
asli
1 sampul

707 Surat dari R.E Siswoto kepada Sekretaris Biro Perancang Negara mengenai permohonan untuk mengadakan kantin bagi Pegawai Biro Perancang Negara.

20 Agustus 1958
asli
2 lembar

708 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Sandi mengenai pembelian pompa air dan *compressor* .

10 - 23 September 1958
asli
6 lembar

709 Surat peringatan dari Kepala Jawatan Gedung-gedung Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai perlengkapan installatic air dan saluran air panas pada perumahan para tenaga ahli di Jalan Progo Bandung.

23 September 1958
pertinggal
1 lembar

710 Surat kepada Sekjen Konstituante mengenai penolakan pembelian foto toestel.

15 Oktober 1958
asli
1 lembar

711 Berkas Biro Pembangunan Masyarakat Desa mengenai pemasangan instalasi telepon.

27 Desember 1958 - 23 Maret 1959
asli
1 sampul

712 Berkas mengenai permohonan tempat dan alat untuk pemintahan TU Keuangan bagian I dan Kementerian Keuangan ke Kabinet Perdana menteri.

1 Januari - 19 Februari 1957
asli
1 sampul

713 Daftar barang-barang inventaris dari Kepala Seksi Rumah Tangga, Biro Perancang Negara.

2 Januari 1959
asli
6 lembar

714 Berkas mengenai bantuan traktor bibit tebu untuk pembangunan pabrik gula di Brastagi, Sumatera Utara.

5 Januari - 25 Juni 1959
asli
1 sampul

715 Berkas mengenai inventarisasi barang milik negara.

21 Januari - 1 Juli 1959

pertinggal
1 sampul

716 Surat mengenai permohonan penyampaian berita acara penghapusan barang-barang rusak dari Biro Statistik, risalah dan daftar penyetoran lelang No.59 dan No.81.

27 Mei - 26 Juni 1959
asli
1 sampul

717 Surat dari Kabinet Perdana Menteri Bagian Keuangan Seksi Pemeriksaan pengeluaran beban tetap kepada Seksi Peralatan Bagian Perlengkapan mengenai penambahan inventaris dan mengganti meja-meja 1/2 biro.

6 Juli 1959
asli
2 lembar

718 Nota dari Kepala Bagian Rumah Tangga kepada semua bagian pada Kabinet Perdana Menteri mengenai permintaan untuk membuat daftar pemakaian alat tulis menulis.

29 Agustus - 21 September 1959

asli
1 sampul

719 Berkas milik Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai daftar penerimaan barang-barang dan pembayarannya.

1959

asli
1 sampul

b. Kendaraan

720 Surat Keputusan Kepala Jawatan Perjalanan Negeri tentang pemberian kuasa kepada jawatan perjalanan negeri untuk membeli mobil.

13 April 1950
salinan
2 lembar

721 Surat menyurat antara Staf "K" Pusat Jakarta dengan Menteri Sosial mengenai pembelian dan pengiriman truk untuk menampung tenaga pejuang ARTP, beserta lampiran.

30 Desember 1950 - 24 Juli 1951
asli
1 sampul

722 Berkas mengenai sepeda para pegawai kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan pemerintah.

26 Februari - 10 September 1951
asli
1 sampul

723 Surat Kepala Jawatan Angkutan Darat dan Sungai kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pemasrahan kendaraan bermotor.

24 Februari 1951 - 16 Maret 1961
asli
2 lembar

724 Surat dari Ketua Staf "K" Propinsi Jawa Barat kepada Staf "K" Pusat mengenai pembelian kendaraan untuk Staf "K" Propinsi Jawa Barat.

23 Agustus 1951
asli
2 lembar

725 Berkas putusan dalam bandingan perijinan truk.

11 Oktober 1951 - 22 Austus 1958
asli
1 sampul

726 Surat dari Staf "K" Pusat kepada Gubernur Provinsi Sulawesi mengenai pembelian statinear untuk Staf "K", beserta lampiran.

10 Januari 1952
asli
3 lembar

727 Surat kepada Kabag Kendaraan Kabinet Perdana Menteri mengenai permohonan penggantian kendaraan jemputan.

15 Maret 1952
asli
4 lembar

728 Surat kepada Perdana Menteri dari Menteri Perhubungan mengenai kekurangan kendaraan untuk disewabelikan.

31 Agustus 1953
pertinggal
1 lembar

729 Berkas mengenai permintaan tambahan kendaraan bermotor.

15 Oktober 1952 - 15 Februari 1957
asli
1 sampul

730 Surat dari Kepala Bagian Keuangan kepada semua Bendaharawan mengenai penyamaan penyelenggaraan tata usaha kendaraan bermotor.

27 November 1952 - 30 September 1959
asli
1 sampul

731 Surat kepada Panitia Pembagi Sepeda Pemerintah pada KPM RI mengenai permintaan membeli sepeda dari kelebihan persedia dengan dibayar kontan.

9 April 1953
pertinggal
1 lembar

732 Berkas penjualan sepeda kepada para pegawai.

23 Januari 1954
pertinggal
1 sampul

733 Keputusan-keputusan Menteri Keuangan tentang biaya dan sewa mobil/kendaraan untuk perjalanan dinas.

1 Juni - 21 Desember 1955
fotokopi
1 sampul

734 Berkas biaya operasi mobring dalam triwulan II tahun 1955.

4 Agustus 1954 - 22 Juni 1955
asli

1 sampul

735 Surat-surat mengenai kendaraan bagi Wakil Perdana Menteri.

20 Juni - 20 Oktober 1955
asli
2 lembar

736 Surat dari Sekretaris KPM kepada Ketua Panitia Pemilihan Indonesia di Jakarta usul pembangunan garasi untuk *pick up* milik Kantor Panitia Pemilihan NTB, beserta lampiran.

27 Juni 1955
asli
7 lembar

737 Surat dari Kementerian Keuangan mengenai pembayaran angsuran sewa - beli kendaraan bermotor.

19 Juli 1955 - 15 Februari 1958
pertinggal
1 sampul

738 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai penjualan kendaraan bermotor kepada Nyonya R.A. Suratno Sastroamidjojo.

06 October 1955
salinan
3 lembar

739 Berkas surat mengenai Panitia Pembagi Sepeda untuk penjualan sepeda kepada para pegawai sehingga memudahkan pembagian oleh juru pembagi kantor.

01 - 09 Maret 1956
salinan
4 lembar

740 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai peraturan pemakaian kendaraan untuk penjemputan pegawai.

26 September 1956
pertinggal
1 lembar

741 Laporan dari Seksi Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Jawatan Perjalanan mengenai kerusakan kendaraan bermotor.

26 September - 20 Oktober 1956
asli
1 sampul

742 Surat menyurat mengenai pemesanan 3 pesawat *Lockheed Electra* .

8 Maret 1957 - 27 Mei 1958
fotokopi
1 sampul

743 Berkas mengenai kendaraan bermotor/mobil dinas.

9 Mei 1957 - 24 September 1958
tembusan

1 sampul

744 Berkas mengenai usul penggantian bendaharawan eksploitasi kendaraan bermotor dinas yang dipakai oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa.
26 Maret 1958 - 23 Maret 1959
pertinggal
6 lembar

745 Berkas mengenai kendaraan (pembelian kendaraan, penyerahan kendaraan, anggaran untuk perawatan kendaraan dan biaya exploitasi dan alat-alat pengangkutan lainnya).
11 Oktober 1958 - 26 Juni 1959
fotokopi
2 lembar

746 Nota Kepala Cabang Urusan Dalam kepada Kabag Pembukuan/Pemeriksaan mengenai biaya reparasi mobil-mobil kantor.
25 - 27 November 1958
fotokopi
3 lembar

747 Surat dari KSAD kepada Perdana Menteri mengenai pembelian helikopter Bell 47 J"Ranger" untuk pemerintah, beserta lampiran.
25 Februari 1959
asli
1 sampul

748 Laporan dari Kabinet Perdana Menteri (Bagian Pembuat Daftar Gaji) mengenai permintaan kembali potongan-potongan sepeda yang terlanjur di potong.
05 Oktober 1959
salinan
1 lembar

749 Surat Edaran Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri Surat tentang kewajiban membuat berita acara terhadap kerusakan-kerusakan kendaraan bermotor milik pemerintah.
11 Juni 1959
salinan
3 lembar

750 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai ralat Rancangan Perpres tentang pengurusan kendaraan bermotor milik negara.
27 Februari - 10 Maret 1961
asli
2 lembar

5. Kesejahteraan Pegawai

a. Tunjangan

751 Berkas mengenai pemberian tunjangan sebagai bekas wakil menteri a.n. Mr. R. Hadi.
1951
asli

1 sampul

752 Berkas mengenai pembagian beras untuk Pegawai Negeri & Pegawai Sekretariat Uni Indonesia - Nederland.

September - Desember 1951
salinan
1 sampul

753 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada kementerian-kementerian mengenai pembayaran uang muka atas pensiun dan tunjangan yang disamakan dengan pensiun.

10 April 1951
asli
4 lembar

754 Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang pencabutan kembali surat keterangan pemberian tunjangan sementara kepada janda Alm. Soepeno (mantan Menteri Pembangunan dan Pemuda RI).

14 April 1951
salinan
3 lembar

755 Surat dari Perdana Menteri kepada segenap kementerian mengenai tunjangan bulanan bagi para menteri/membayar upah para pekerja di rumah.

24 April 1951
asli
2 sampul

756 SK Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai pemberian tunjangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan mantan Menteri Agama RI.

16 Juni 1951
salinan
2 lembar

757 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Presidium/Wakil Presiden Menteri mengenai penjelasan pemberhentian tunjangan sebagai pensiun menurut persetujuan KMB.

29 Juni 1951
salinan
2 lembar

758 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Urusan Pegawai mengenai tunjangan bagi bekas anggota BPKNIP menurut PP RI No.22 tahun 1950.

03 Juli 1951
asli
1 lembar

759 Berkas mengenai "Permintaan Tunjangan " untuk bekas menteri a.n. Drs. M. Hatta, dkk.

18 Juli - 3 Agustus 1951
salinan
1 sampul

760 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Menteri mengenai tunjangan untuk pindahan pegawai ke luar Jawa.

7 - 17 November 1951
asli
2 lembar

761 SK Kepala Kantor Urusan Pegawai tentang pemberian tunjangan pensiun kepada A.M.Van der Fis, L.Flikkenschild dan A.W Eramus yang merupakan bangsa Eropa.

23 November - 01 Desember 1951
salinan
2 lembar

762 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Menteri Urusan Pegawai dan Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai tunjangan belajar bagi pegawai negeri, beserta lampiran.

19 - 31 Desember 1951
asli
5 lembar

763 Berkas mengenai kenaikan pensiun/tunjangan bekas pegawai negeri sipil dan janda serta anak yatim piatu.

29 Mei - 24 Desember 1952
salinan
1 sampul

764 Surat mengenai pemberian tunjangan kepada keluarga Pangeran Diponegoro dan tunjangan politik kepada turaunan raja, pembesar negeri dan bangsawan.

23 Januari 1952 - 12 Agustus 1959
asli
1 sampul

765 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Ketua Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri mengenai jawaban untuk pembayaran uang *voorschot* lebaran dan uang lembur.

29 April - 04 Mei 1953
tembusan
3 lembar

766 Berkas mengenai permohonan penempatan kembali atau pemberian pensiun/tunjangan dari para bekas pemogok kereta api tahun 1923.

4 Januari 1954 - 5 Juli 1956
asli
1 sampul

767 Berkas mengenai pemberian tunjangan kepada penanggung jawab keuangan, beserta lampiran dalam bahasa Belanda.

7 - 12 Januari 1954
pertinggal
7 lembar

768 Surat Pengumuman Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri kepada pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai akan dibagikan bahan pakaian kepada segenap pegawai.

21 Mei 1955
tembusan
1 lembar

769 Surat dari Kepala Jawatan Perjalanan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penetapan baru jumlah uang kilometer.

19 Juli - 24 September 1955
salinan
4 lembar

770 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Dokter penguji kesehatan Pegawai Negeri mengenai pengujian kesehatan bagi pegawai Kabinet Perdana Menteri.

16 Januari 1956
asli
1 lembar

771 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai bagian pensiun dan tunjangan mengenai pengesahan masa kerja untuk perhitungan pensiun serta pembayaran iuran bagi Sdr.Rachmat, juru tik kepala pada Kabinet Perdana Menteri, beserta lampiran.

23 Maret 1956
asli
2 lembar

772 Surat Keterangan dari Kabinet Perdana Menteri menerangkan bahwa "Iuran Nikah" Sdr. Arsjil yang harus dibayarkan pada Kantor Dana Pensiun Yogyakarta.

29 September 1956
pertinggal
1 sampul

773 Surat dari Menteri Keuangan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai potongan alimentasi atas pembayaran pensiun dari J.W. Haring.

22 Oktober 1956 -11 Desember 1957
pertinggal
1 lembar

774 Nota Dinas dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Perdana Menteri mengenai tunjangan perwakilan kepada Wakil Ketua Konstituante.

1957
asli

1 sampul

775 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepala seksi Urusan Kesejahteraan Pegawai mengenai pengembalian pas pelapuhan Tanjung Priok a.n. Qamaruddin Ajudan Wakil Perdana Menteri II No. AC. No. 0075.

Januari 1957
asli
1 sampul

776 Surat tanda bukti pengiriman kartu percuama Jawatan Kereta Api kepada Kementerian Perhubungan dari Bagian Urusan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

1957
salinan
1 sampul

777 PP No.10 Tahun 1957 dan pelaksanaan PP.10/1957 Jo.P.P.25.1957, terkait dengan pemberian tunjangan keahlian.

12 Maret - 29 Agustus 1957
asli
7 lembar

778 PP No. 14 Tahun 1957 tentang Perubahan PP No. 4 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 15) dan PP No. 27 Tahun 1950 (lembaran Negara Tahun 1950 No. 69) mengenai gaji dan tunjangan jabatan Presiden dan Para Menteri R.I.

12 - 28 Maret 1957
asli
10 lembar

779 Surat dari Kantor Urusan Pegawai kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai rencana Surat Keputuan Presiden beserta perhitungan tentang pemberian tunjangan mantan menteri.

16 Mei 1957
asli
1 sampul

780 Surat Edaran dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada semua Menteri mengenai peninjauan kembali batas 5 (lima) tahun untuk mengajukan permintaan tunjangan.

16 Mei 1957
fotokopi
1 sampul

781 Surat-surat mengenai PP No.25 Tahun 1957 tentang Perubahan PP No.10 Tahun 1957 tentang tunjangan kejuruan.

24 Juni - 4 September 1957
fotokopi
1 sampul

782 Surat dari Kantor Urusan Pegawai kepada Bagian Anggaran Kabinet Perdana Menteri mengenai kursus sementara pensiun dan tunjangan di Bandung.

18 Juli 1957
asli
1 lembar

783 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai pemberian tunjangan kejuruan kepada mualim pelajaran besar, ahli mesin kapal dan markonis pelajaran negara.

09 Agustus 1957 - 16 Januari 1958
asli
7 lembar

784 Surat Keputusan Direktur Kabinet Perdana Menteri No.292/Perdana Menteri/UP/57, tentang penetapan pemberian gaji kepada pegawai yang namanya terdaftar dalam daftar dengan lampiran.

29 Oktober 1957
asli
1 sampul

785 Surat dari Konstituante kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai Penetapan Sementara Gaji dan Tunjangan (tetap) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.

12 November - 19 Desember 1957
asli
1 sampul

786 Surat keterangan mengenai keadaan keuangan Sdr. Moh. Saleh dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri.

18 Januari 1958
asli
1 lembar

787 Surat dari Ketua Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri mengenai permohonan untuk mendapat perbaikan nasib.

22 Januari 1958
asli
2 lembar

788 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Bagian Hukum dan Desentralisasi DPD Provinsi Jawa Timur mengenai tunjangan keahlian bagi PNS.

2 & 9 April 1958
asli
3 lembar

789 Surat dari Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pembayaran uang muka pensiunan Pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Daerah Otonom.

14 Mei - 6 Agustus 1958

asli
6 lembar

790 Surat Keputuan Perdana Menteri tentang pemberian restitusi kepada para pegawai.
15 Juli 1958 - 1959
asli
3 lembar

791 Surat-surat mengenai penerimaan delegasi tentang penjelasan pelaksanaan Surat Edaran Perdana Menteri No.14 / RI / 1958 tanggal 24 Agustus 1957.
20 September 1958
asli
3 lembar

792 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan kepada ibu dari almarhum Jendral Sudirman.
17 Desember 1958 - 27 April 1959
asli
1 sampul

793 Kartu PPBT mengenai tunjangan umum.
1959
asli
3 lembar

794 Surat dari Badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai pemberian bantuan kepada pegawai Kabinet Perdana Menteri berhubung dengan peristiwa kematian.
1959
salinan
2 lembar

795 Daftar mengenai banyaknya pegawai dengan keluarganya menurut daftar gaji untuk pembagian beras pada Kabinet Perdana Menteri.
tt
asli
1 sampul

796 Berkas mengenai tambahan uang menginap dan uang transportasi.
tt
asli
4 lembar

b. Koperasi

797 Kwitansi dari koperasi pegawai Kabinet Perdana Menteri, selama tahun 1951 s/d 1959.
1951 - 1959
Fotokopi
3 lembar

798 Berkas mengenai Rancangan Penetapan UU Koperasi Tahun 1951.

3 Juni 1951 - 21 September 1953
asli
1 sampul

799 Surat edaran dari Perdana Menteri kepada para menteri mengenai pendirian Koperasi Pegawai Negeri.
22 November 1954
salinan
1 lembar

800 Laporan Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri selama tahun 1955 dan 1957.
1955 - 1957
asli
1 sampul

801 Daftar pengambilan barang dari koperasi dalam bulan April s/d November 1956.
April - November 1956

salinan
1 lembar

802 Daftar potongan gaji bulan Maret tahun 1957-1959 dari Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.
1957
asli
1 sampul

803 Neraca lajur per 31 Desember 1957 dan Jurnal 1957 Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.
1957
asli
1 sampul

804 Surat permohonan menjadi anggota Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.
20 Maret - 1 April 1957
asli
1 sampul

805 Berkas mengenai pemeriksaan pembukuan koperasi tahun 1957 Koperasi Kabinet Perdana Menteri.
1957
asli
1 sampul

806 Berkas mengenai pembagian beras dari Koperasi KPM.
31 Oktober 1957 - 27 Februari 1958
asli

4 lembar

807 Ikhtisar buku kas Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

1958
asli
1 lembar

808 Surat dan pengumuman Koperasi Kabinet Perdana Menteri mengenai akan berlangsungnya rapat anggota, pembagian beras, dll.

30 Juli - 9 Agustus 1958
asli
4 lembar

809 Surat dari Panitia Koperasi pertanian/Perikanan Modern Indonesia mengenai tujuan Koperasi Pertanian/Perikanan Modern Indonesia.

17 Agustus 1958
asli
3 lembar

810 Surat-surat mengenai pembayaran dan pengambilan uang simpanan sukarela pada Koperasi Kabinet Perdana Menteri.

20 - 28 Agustus 1958
tembusan
3 lembar

811 Catatan dari Abdul Hakim mengenai rapat ke-2 Pengurus Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri tanggal 22 Agustus 1958.

27 Agustus 1958
asli
2 lembar

812 Surat-surat dari Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri mengenai pengumuman penerimaan barang-barang koperasi.

22 Oktober 1958 - 27 Mei 1959
asli
3 lembar

813 Surat Keterangan tentang serah terima barang dari pengurus lama dari pengurus baru Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri

15 Januari - 1 Juli 1959
asli
1 sampul

814 Berkas mengenai UU Nomor 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi KPM.

03 Maret 1959
asli
1 sampul

815 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden dan lain-lain mengenai penyampaian Rancangan PP tentang koperasi, beserta lampiran.

4 - 16 November 1959
asli
1 sampul

816 Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi.

9 Desember 1959
asli
1 sampul

817 Daftar pembagian pekerjaan Pengurus Koperasi Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

tt
asli
2 lembar

c. Dana Kesejahteraan

818 Peraturan Menteri Keuangan No. 1/DDP tahun 1950 tentang pembentukan Jawatan Dana Pensiun.

26 Juli 1950
asli
3 lembar

819 Surat dari menteri dalam negeri kepada menteri urusan pegawai mengenai nasib bekas kepala-kepala swapraja dan kerabatnya.

17 Juli 1952
asli
2 lembar

820 Berkas mengenai pemberian tunjangan dan persekot lebaran hari raya lebaran dan natal.

9 Mei 1953 - 24 Februari 1959
salinan
1 sampul

821 Berkas mengenai penunjukkan sebagai Anggota Panitia Penyusun Peraturan Dana Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

07 - 09 Desember 1953
fotokopi
3 lembar

822 Berkas mengenai dana sosial/dana kesejahteraan pegawai KPM.

18 Januari 1954 - 3 November 1961
asli
1 sampul

823 Pengumuman Pemimpin Dana Kesejahteraan Pegawai mengenai penetapan dalam rapat Pengurus Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri tanggal 10 Juni 1955.

14 Juni 1955
asli
1 lembar

824 Surat pengantar dari Kepala Seksi Urusan Pegawai Kabinet Perdana Menteri kepada Kementerian Keuangan bagian restitusi mengenai permohonan restitusi.

18 Oktober 1956 - 23 September 1959
asli
1 sampul

825 Surat-surat mengenai penghitungan untuk menetapkan gaji bulanan bagi pegawai-pegawai Biro Perancang Negara yang disetujui oleh Kantor Urusan Pegawai

12 - 21 Januari 1956
asli
1 sampul

826 Surat dari Mr. Ali Sastroamidjojo kepada Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan mengenai pembayaran uang pensiun sebagai bekas menteri.

14 April 1956
asli
1 lembar

827 Surat tanda terima dari Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri mengenai uang potongan dana kesejahteraan pegawai.

07 November 1958
asli
1 sampul

828 Rancangan surat pengumuman Badan Kesejahteraan Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

1959
Fotokopi
1 lembar

829 Surat dari Ajun Komisaris Besar Polisi Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai ralat SK Perdana Menteri tanggal 5 Mei 1959 No. Pol. 037/KU59/Kesejahteraan.

05 Mei 1959
asli
1 lembar

830 Surat dari B. Suhadji kepada Kepala Seksi dari Bagian Keuangan KPM mengenai permohonan sumbangan atas pernikahan Sdr. Herry Bisono.

15 November 1959

asli
1 sampul

831 Tanda terima dari Ketua Tata Usaha Dana Kesejahteraan Pegawai Serikat Pekerja KPM kepada Namin dan Amsi untuk pembayaran pinjaman uang.

05 January 1960
asli
1 lembar

d. Perkumpulan Pegawai

832 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai Bondopensiun Negeri Surakarta, beserta lampiran.

2 November 1951
asli
2 lembar

833 Surat dari Ketua Ikatan Pegawai Negeri Rendah (IPNR) kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai perubahan nama IPNR, n.b. beserta lampiran.

30 November - 27 Desember 1955
asli
1 sampul

834 Anggaran dasar Persatuan Pemuda Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

12 Desember 1959
salinan
2 lembar

e. Perumahan

835 Berkas mengenai rumah Negeri di Pedjambon 2A dalam Kotapradja Jakarta Raja.

16 Mei 1950 - 14 Februari 1951
asli
1 sampul

836 Keputusan Kepala Daerah Kalimantan Timur mengenai Pencabutan Peraturan Residen Kalimantan Timur tanggal 21 Januari 1947 No. 18/G-7/1947 tentang "Perumahan " untuk Samarinda.

03 Agustus 1950
fotokopi
2 lembar

837 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Urusan Perumahan Jakarta Raya mengenai *controle* atas perumahan di Kebayoran.

7 - 18 Oktober 1950
asli
2 lembar

838 Berkas mengenai makanan dan pemondokan yang disediakan oleh pemerintah dan pemungutan pajak pembangunan I di rumah penginapan.
15 Januari - 17 april 1951
asli
3 lembar

839 Berkas mengenai permohonan untuk rumah pegawai negeri.
19 Januari - 6 Juni 1951
asli
1 sampul

840 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Jawatan Gedung-Gedung Negeri mengenai sewa perumahan pemerintah.
15 Februari - 19 April 1951
pertinggal
2 lembar

841 Berkas mengenai perbaikan rumah-rumah pejabat negara.
7 Maret 1951 - 24 Feburari 1959
asli
1 sampul

842 Berkas mengenai sewa rumah mantan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.
24 September - 03 Desember 1951
asli
1 sampul

843 Surat dari Ong Ah Tie kepada Perdana Menteri mengenai rumah di Jalan Wahidin no. 7 Medan.
12 - 20 Oktober 1951
asli
6 lembar

844 Berkas mengenai perumahan untuk Sekretaris Dewan Menteri.
30 Oktober 1951 - 11 Desember 1952
asli
1 sampul

845 Berkas mengenai perumahan untuk pegawai Kabinet Perdana Menteri.
22 Desember 1951 - 31 Juli 1952
asli
1 sampul

846 Berkas mengenai rumah-rumah yang diserahkan kepada Kabinet Perdana Menteri.
2 Januari 1952
asli
1 sampul

847 Surat dari Kantor Pusat Perbendaharaan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai Penagihan Tunggakan Persewaan Rumah Negeri a.n. Bekas Perdana Menteri Moh. Natsir.
10 April 1952 - 17 Januari 1953
asli
1 sampul

848 Berkas mengenai *Symposium on "Scientific Principles and Their Application in Tropical Building Design and Contruction* di New Delhi India (terkait kondisi perumahan di Indonesia).
09 Agustus - 29 November 1952
asli
1 sampul

849 Berkas mengenai pembelian tanah dan perumahan untuk perwakilan asing di Indonesia.
12 Agustus 1952
asli
1 sampul

850 Berkas mengenai penetapan UU Darurat tentang urusan perumahan sebagai UU.
26 Februari - 7 Oktober 1959
pertinggal
1 sampul

851 Rancangan PP tentang perubahan beberapa pasal dari *Reglemen* Dewan-dewan Perumahan yang tercantum dalam *Staatsblad* 1948 No. 33.
2 Maret 1953
fotokopi
1 sampul

852 Berkas mengenai rencana PP tentang pembiayaan perumahan rakyat dan pembentukan bank dan kas-kas pembangunan dan Rancangan PP tentang pembentukan Bank Pembangunan.
16 Desember 1953 - 11 Januari 1954
tembusan
1 sampul

853 Berkas mengenai rumah - rumah yang dulu ditempati Misi Militer Belanda.
04 - 19 Februari 1954
asli
1 sampul

854 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai tanah konsesi yang dipakai menjadi perumahan rakyat di kampung Badiri/Lumut, beserta lampiran.

3 Juli 1954
asli
3 lembar

855 Surat dari Kementerian Sosial kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai penyampaian 50 buku laporan Panitia Pemeriksa Perumahan, n.b. tidak ada lampiran.

22 - 24 Januari 1955
asli
2 lembar

856 Surat dari Kepala Urusan Perumahan Pusat kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai penyampaian masalah persil Jalan Mampang No. 70.

29 Januari 1955
asli
2 lembar

857 Surat dari Biro Perancang Negara kepada *The J.G.White Engineering Corporation mengenai* biaya alat-alat rumah tangga untuk perumahan staf *white Engineering Corporation* .

07 Februari 1955
asli
1 lembar

858 Surat dari Panitia Kesejahteraan Rakyat kepada DPDS Kab. Jember mengenai pemindahan rumah di Jl. Kepatihan Jember.

02 April 1955
asli
1 lembar

859 Berkas mengenai permohonan pengosongan rumah dinas.

30 Agustus - 3 Oktober 1955
asli
1 sampul

860 Surat dari Direktur KPM kepada Nj.S.Sukonto mengenai ijin menempati rumah pavilioen No.6 Merdeka Selatan.

30 Agustus 1955
asli
1 lembar

861 Surat dari Direktur Kabinet Ampera kepada Walikota Jakarta Raya mengenai rumah di Jalan Salemba I No.15 Jakarta, beserta lampiran.

3 - 9 September 1955
asli
2 lembar

862 Kumpulan foto mengenai keadaan perumahan anggota kepolisian di daerah-daerah.

1956
asli
1 sampul

863 Surat-surat mengenai Rancangan Keppres tentang pencabutan hak-hak atas tanah yang oleh umum dikenal sebagai daerah Krekot Dalam dan Karanganyar (Jakarta Raya)
4 - 23 Februari 1956
pertinggal
1 sampul

864 Laporan "Rapat Panitia Rumah Tangga DPR" mengenai: persiapan 20 rumah baru di Grogol untuk 80 anggota DPR dan usul pembuatan gedung parlemen baru.
14 Juni 1956 - 7 September 1957
asli
3 lembar

865 Surat kuasa dari Kepala Bagian Umum/Pegawai kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah di Tanjung Grogol.
18 Juni 1956 - 30 September 1957
asli
1 sampul

866 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Panitia Pembagi Tenaga Listrik tentang penambahan aliran listrik untuk rumah Jl. Halimun 23.
12 Januari 1957
asli
1 lembar

867 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Sdr.Usep Renawijaya ahli praja Tk.I pada Kementerian Dalam Negeri tentang pemberian izin menginap di hotel.
14 Januari 1957
pertinggal
1 lembar

868 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Gedung-Gedung Pusat tentang rumah-rumah bekas mess parlemen.
9 April 1957
asli
1 lembar

869 Surat dari Bagian Pemberantasan Pes. Kem. Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai laporan tinjauan perumahan rakyat di luar negeri.
12 April 1957
asli
1 sampul

870 Laporan pembicaraan Dirjen mengenai perumahan & *social security.*
6 Juni 1957

salinan
1 lembar

871 Surat dari Dewan Pengawas Keuangan kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai Pendirian rumah guna pegawai Dewan Pengawas Keuangan di Bogor dan Yogyakarta.

11 Juli - 20 Agustus 1957
asli
1 sampul

872 Berkas mengenai usul mempergunakan uang hasil penjualan rumah-rumah Negara Gol. III.

31 Juli 1957 - 13 September 1958
asli
1 sampul

873 Surat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penyampaian peraturan pemakaian gedung/rumah.

28 November 1957
asli
1 sampul

874 Surat dari Menteri PU dan Tenaga kepada Ketua DPR mengenai keterangan mengenai putusan rapat para calon pembeli rumah negri di Bandung.

21 Desember 1957
asli
4 lembar

875 Rancangan PP No. Tahun 1957 tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I.

10 - 21 Januari 1958
pertinggal
1 sampul

876 Surat dari Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara kepada Kabinet Presiden mengenai pemasukkan Tata Usaha Pensiun Wilayah Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan dalam daerah yang di mekanisasikan.

8 Mei - 2 Juni 1958
salinan
2 lembar

877 Resolusi mengenai tanah bekas pabrik gula Kementerian Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

1 Juli 1958
asli
1 lembar

878 Surat-surat mengenai tanah Bengkok Penghulu dan Merbot yang masih dikuasai oleh Pegawai Masjid Kota Besar Semarang untuk dikembalikan kepada desa guna sumber penghasilan rakyat.

16 Juni, 1 Juli 1958
asli
1 sampul

879 Surat dari Panitia Peluasan Perumahan Rakyat Kampung Beringin Kel. Padang Matinggi kepada Kepala Kampung Padang Matinggi mengenai permohonan pembatalan surat-surat panjang dan grant dari atas tanah yang menjadi hutan belukar.

30 Juni 1958
asli
2 lembar

880 Surat-surat mengenai permohonan pengajuan Rancangan PP untuk mewajibkan para pemilik rumah untuk mengasuransikan rumahnya.

17 Juli 1958 - 14 April 1959
asli
1 sampul

881 Surat-surat kepada Perdana Menteri mengenai permohonan perumahan bagi pegawai.

6 September 1958 - 16 Januari 1959
asli
1 lembar

882 Surat-surat mengenai hak untuk menjadi ahli waris dari tanah milik Sdr. Tubagus Muhamad Djamil.

20 Oktober - 22 November 1958
asli
1 sampul

883 Surat dari BNI kepada Biro Perancang Negara mengenai bahan-bahan keterangan perumahan, beserta lampiran.

12 - 15 Desember 1958
asli
1 sampul

884 Berkas mengenai daftar perumahan dan diesel agregaat yang dipelihara oleh Biro Perancang Negara.

17 Januari 1959
tembusan
1 sampul

885 Laporan mengenai upacara penyerahan resmi perumahan pegawai negeri Pejompongan.

16 September 1959

asli
4 lembar

886 Surat dari anggota Panitia Perumahan Kabinet Perdana Menteri kepada seluruh anggota tentang rencana pedoman mengenai pemberian/penunjukkan perumahan kepada Pegawai Kabinet Perdana Menteri.

2 November 1959
salinan
1 sampul

887 Berkas mengenai sidang pleno Panitia Perumahan Kabinet Perdana Menteri.

14 November - 7 Desember 1959
salinan
2 lembar

f. Tanda Jasa / Penghargaan

888 Surat-surat mengenai pemberian hadiah kepada Mr. R. Samsudin alm. mantan Dubes RI di Pakistan.

29 September 1951 - 5 Agustus 1952
asli
1 sampul

889 Surat-surat mengenai pemberian surat tanda jasa kepada Sultan Hamengkubuwono IX dan Prof Dr.Sardjito, beserta lampiran.

12 Desember 1951 - 7 Januari 1954
asli
1 sampul

890 Surat-surat mengenai pemberian bintang *Gran Crose dell* kepada Sukardjo Wirjopranoto, Dubes RI di Italia.

29 Februari - 23 April 1952
tembusan
1 sampul

891 Surat dari Menteri Luar Negeri RI kepada semua Perwakilan RI mengenai penerimaan bintang *Gran Croce dell'Ordine* di Gregorio Magno

29 Februari - 3 Maret 1952
salinan
2 lembar

892 Berkas mengenai penghargaan atas jasa-jasa almarhum Surharto Direktur Jenderal PTT.

14 April 1952 - 23 Oktober 1953
asli
2 lembar

893 Surat-surat mengenai pemberian bintang *Royal Danish Order of Knight of the Dannebrog* kepada Letnan 1 ALRI Ali Jusran.

20 Mei 1952 - 28 Februari 1955
pertinggal
1 sampul

894 Surat-surat mengenai penghormatan terhadap almarhum Oto Iskandar Dinata.

21 November - 27 Desember 1952
asli
3 lembar

895 Surat mengenai penganugerahan bintang "*Groot Kruis van Gregorius de Grote*" kepada Djumhana Wiraatmadja, Duta RI di Veteran.

22 - 30 Januari 1954
asli
3 lembar

896 Surat-surat mengenai pemberian penghargaan kepada Maj.Young Satlar Q., Komandan Putera Asia.

21 April 1954 - 21 Juni 1955
asli
1 sampul

897 Surat menyurat antara Sekretaris Dewan Menteri dan Menteri Luar Negeri mengenai pemberian Bintang *Grand Croix D'Orde De Christ* oleh Pemerintah Portugal kepada Anak Agung Gede Agung, Dubes di Paris.

1 - 18 Desember 1954
asli
3 lembar

898 Surat-surat mengenai pemberian tanda penghargaan Pemerintah Belanda kepada A.Corputty.

6 Juni 1955 - 27 Juni 1956
asli
1 sampul

899 Surat-surat mengenai RUU tentang bintang jasa militer untuk perjuangan Kemerdekaan RI.

10 Desember 1955 - 12 Juni 1956
asli
1 sampul

900 Surat-surat mengenai pemberian bintang *Grosskrevz des Verdienstordens den Bundes Republik Deutschland* kepada AA Marami, Dubes RI di Jerman.

23 Februari - 5 April 1956
asli
1 sampul

901 Surat-surat mengenai pemberian tunjangan Perintis Pergerakan Kemerdekaan kepada Sdr.Alimin.

31 Agustus - 15 Desember 1956
asli
4 lembar

902 Berkas mengenai RUU tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma kepada anggota Angkatan Perang.

1958 - 21 Januari 1959
asli
1 sampul

903 Surat-surat mengenai RPP tentang Satyalantjana Gerakan Operasi Militer.

1 September - 10 Oktober 1958
asli
1 sampul

904 Surat-surat mengenai RPP tentang perubahan PP No.31 tahun 1958 tentang Satyalantjana Saptamarga.

17 September - 10 Oktober 1958
asli
1 sampul

905 Surat-surat mengenai pemberian Satyalantjana Bhakti dan Peristiwa kepada Anggota Kepolisian Negara.

7 November 1958 - 18 Februari 1959
asli
1 sampul

906 Surat menyurat antara Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Dewan Menteri mengenai pemberian bintang *Gold Medal of the Order of the Crown* kepada Ong Hwa Pok & Abdul Djalil Harahap dari Pemerintah Kerajaan Belgia.

19 November 1958 - 27 Februari 1959
asli
1 sampul

907 Surat menyurat Sekretaris Dewan Menteri dan Menteri Luar Negeri mengenai pemberian bintang *Gran Croce di S.Cregorie* oleh Sri Paus Jouannes XXIII kepada Dubes RI di Vatikan Sdr.Bambang Sugeng.

25 Februari - 10 Maret 1959
tembusan
4 lembar

908 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pemberian Bintang kepada pembesar-pembesar sipil dan militer RI oleh Presiden Yugoslavia.

25 Februari 1959
tembusan

1 sampul

909 Berkas mengenai RUU Darurat No.2 Tahun1959 tentang pemberian Tanda Kehormatan Bintang Garuda (lembaran Negara tahun 1959 No.19) sebagai UU.

19 April - 4 Juli 1959
tembusan
1 sampul

910 Surat-surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pemberian bintang dari Pemerintah Malaysia kepada Ir.H.Djuanda, Prof.Dr.Prijono, Nj. Soepeni, & Mr. Soedjono.

03 Juni 1959
tembusan
3 lembar

911 Berkas mengenai pemberian bintang oleh Pemerintah Italia kepada KSAL Komodor Martadinata & Letkol C.B Tauran.

13 Agustus - 21 Oktober 1959
tembusan
1 sampul

912 Surat-surat mengenai pemberian izin untuk menerima bintang dari Pemerintah Muangthai kepada Letkol Imam Sukarto.

10 Oktober - 17 November 1959
salinan
5 lembar

913 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Rancangan PP tentang Satyalancana Bhakti.

28 Juni 1961
asli
1 sampul

7. Kehumasan/ Keprotokolan

914 Berkas mengenai pemakaian bahasa resmi Bahasa Indonesia dalam surat menyurat dan penetapan jam bekerja.

09 September 1950 - 30 April 1952
asli
1 sampul

915 Surat dari Sekjen Kementerian Agama kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai ralat penyampaian daftar alamat para Menteri Kabinet Natsir.

04 - 19 Desember 1950
asli
1 sampul

916 Berkas mengenai sesebutan dalam hal surat - menyurat dan percakapan.

16 Oktober 1950 - 26 April 1951
asli
1 sampul

917 Berkas mengenai ucapan selamat atas pengangkatan Saudara dr. Sukiman Wirjosandjojo menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet RI.

26 April - 09 Agustus 1951
asli
1 sampul

918 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Ketua *Industrieele Bond* mengenai penyampaian terima kasih atas ucapan selamat pengangkatan sebagai Perdana Menteri.

10 - 23 Mei 1951
asli
2 lembar

919 Daftar Susunan Acara Pelantikan Kepala Staf Angkatan Perang pada Selasa, 17 Juli 1951.

14 July 1951
salinan
1 lembar

920 Berkas mengenai pengiriman kembali surat - surat yang telah dipinjam ke Bagian Arsip.

08 November 1951 - 12 Februari 1952
asli
1 sampul

921 Nota dari Kepala Bagian Administrasi kepada Sekretaris Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tentang pekerjaan pengetikan yang mempunyai sifat agak luar biasa.

12 - 15 Februari 1952

tembusan
2 lembar

922 Berkas mengenai hasil rapat panitia negara urusan protokol ke-45 beserta lampiran Rancangan Keppres RI tentang peraturan tata tempat yang digunakan pada upacara-upacara/kesempatan-kesempatan resmi.

15 April 1955
salinan
1 sampul

923 Memo dari Suhartini kepada Sdr. Soedijono mengenai pembagian Surat - surat Edaran Perdana Menteri.

24 Mei 1957
asli
2 lembar

924 Surat dari Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai tanggapan tentang tarif makanan untuk "Weekend - pavillions" di Istana - istana Bogor dan

22 Maret - 02 Juli 1958
asli
2 lembar

925 Surat-surat mengenai undangan untuk menghadiri acara pada kunjungan General Sir Fancis Festing. n.b: Arsip berbahasa Inggris.

5 - 9 Juni 1958
asli
2 lembar

926 Berkas mengenai ucapan terima kasih dari Perdana Menteri Djuanda atas kiriman oleh - oleh, bantuan selama perjalanan, pengiriman buku, dan lain - lain.

12 Juni - 11 Desember 1958
asli
1 sampul

927 Surat dari Kepala Rumah Tangga Presiden kepada Ir. H. Djuanda tentang ijin menginap di Istana Presiden Cipanas.

20 Juni 1958
asli
1 lembar

928 Berkas telegram mengenai ucapan selamat atas pengangkatan Ir. H. Djuanda sebagai Menteri Pertama.

13 - 17 Juli 1959
asli
1 sampul

B. URUSAN KHUSUS

1. Urusan Keamanan

a. Gangguan Keamanan

929 Surat dari Gubernur Jawa Barat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai selebaran dari pasukan Gabungan Pasukan III Tjitarum.

24 Agustus - 26 Oktober 1950
asli
3 lembar

930 Berkas mengenai perbuatan-perbuatan K.L. Ambon di Malang dan Surabaya.

4 September - 20 November 1950
salinan

1 sampul

931 Resolusi dari Konferensi Front Nasional ke IV di Medan dan Resolusi Front Nasional Daerah Kalimantan Timur di Samarinda.

19 - 27 September 1950
asli
1 sampul

932 Surat dari Kepala Bagian Keamanan kepada Kepala Kepolisian Negara Bagian Dinas Reserse Kriminil tentang peredaran uang perak Belanda di Daerah Bali.

20 September 1950 -20 Januari 1953
asli
1 sampul

933 Berkas mengenai gangguan keamanan yang terjadi di perusahaan tenun India "Muallim & Sons" di Cerme Surabaya, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.

29 September -16 November 1950
asli
1 sampul

934 Laporan dari Staf Tentara dan Territorium Sumsel mengenai gerakan minoriteiten.

2 Oktober 1950
asli
1 sampul

935 Berkas mengenai organisasi bersenjata Persatuan Korban Rasionalisasi dan Gerakan Pengacau di Kediri akibat rasionalisasi angkatan perang.

6 Oktober 1950 - 8 Juli 1952
asli
1 sampul

936 Laporan dari Residen Jakarta di Purwakarta mengenai pembukaan tanah P dan T oleh rakyat secara besar besaran dengan cara yang tidak sah.

14 Oktober 1950
salinan
1 sampul

937 Laporan dari Kejaksaan Agung mengenai R. Moch. Mochsin Dandawijaya pemimpin Perikemanusian, yang ditahan sehubungan dengan peristiwa Westerling.

16 Oktober 1950
salinan
1 sampul

938 Berkas mengenai kemungkinan adanya pengacau dari golongan kiri.

23 Oktober 1950 - 3 Maret 1951
salinan

1 sampul

939 Berkas mengenai riwayat hidup Kahar Muzakkar.
28 Oktober - 20 November 1950
salinan
7 lembar

940 Surat-surat mengenai keterlibatan Raja Areng Malusetasi dari Pare-Pare dalam pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan.
3 November 1950
asli
1 sampul

941 Berkas mengenai gangguan keamanan yang dialami para pekerja dari Jawatan Pekerjaan Umum di Daerah Karawang.
3 November 1950 -19 April 1951
asli
1 sampul

942 Laporan dari Residen Jakarta di Purwakarta mengenai penyerobotan tanah dan pencurian kayu.
6 November 1950
salinan
1 sampul

943 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Jaksa Agung mengenai pendaratan kapal terbang yang tidak dikenal, dengan lampiran.
7 November 1950
pertinggal
4 lembar

944 Berkas mengenai ancaman TII untuk menghentikan semua pekerjaan di dalam hutan Kabupaten Indramayu.
10 - 30 November 1950
asli
3 lembar

945 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai kejahatan yang dilakukan pemimpin-pemimpin Jawatan Kehutanan Kadipaten.
13 November 1950
asli
2 lembar

946 Laporan dari Jawatan Resersi Pusat kepada Perdana Menteri mengenai keadaan di Pangkal Pinang .
16 November 1950
asli
1 sampul

947 Surat dari Seksi Pertahanan DPR kepada Perdana Menteri mengenai tindakan sewenang-wenang tentara di Daerah Cianjur.

20 November 1950
asli
4 lembar

948 Surat dari Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat mengenai Wakil Perdana Menteri mengenai perampokan yang dilakukan oleh anggota TNI di Desa Rawakalong (Tangerang).

22 November 1950
asli
6 lembar

949 Laporan Kementerian Dalam Negeri Bagian Politik mengenai perkembangan politik umum Bulan Oktober- Desember, salah satunya mengenai peristiwa APRA.

22 November 1950

fotokopi
1 sampul

950 Surat dari kepala Kepolisian Provinsi Sumatra Utara Tengah kepada Wakil Perdana Menteri mengenai kapal terbang yang jatuh di Rimba Sialang Toek Adjo di perbatasan wilayah Siak dengan Kampar.

4 Desember 1950
asli
2 lembar

951 Berkas mengenai perundingan gerombolan DI/TII di Gunung Tjakrabuwana dan sejumlah kegiatan di Jawa Barat (proklamasi NII dan perintah penyerangan).

5 Desember 1950 - 10 April 1951
salinan
1 sampul

952 Berkas mengenai kapal-kapal asing yang terlihat di daerah perairan Karesidenan Banten.

5 Desember 1950 - 26 April 1952
salinan
1 sampul

953 Berkas mengenai serangan-serangan gerombolan pengacau terhadap Kota Tasikmalaya, Manenjaya, dan Ciawi.

13 Desember 1950 - Juni 1951
asli
1 sampul

954 Surat dari Kabinet Bagian Politik/Keamanan Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian Pusat mengenai plakat-plakat dari Kongres Gerilya Indonesia yang ada di Jawa Barat.

14 Desember 1950
pertinggal
2 lembar

955 Surat-surat mengenai penyelidikan terhadap kapal Van Den Bosch yang tidak melakukan tindakan penghormatan terhadap kapal yang ditumpangi Wakil Presiden di

16 Desember 1950 - 11 Januari 1951
asli
5 lembar

956 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai kapal terbang *British Overseas Airways Co.* yang batal mendarat karena aksi militer, beserta lampiran.

16 Desember 1950
asli
1 sampul

957 Berkas mengenai keadaan keamanan di Aceh.

18 Desember 1950
asli
1 sampul

958 Berkas mengenai pembakaran rumah-rumah di Pamanukan.

18 Desember 1950
asli
1 sampul

959 Berkas mengenai keamanan di Daerah Istimewa Jogjakarta.

19 Desember 1950 - 1 Ferbuari 1951
asli
1 sampul

960 Berkas mengenai peristiwa perampokan pada tanggal 27/28 oktober 1948 di N.V. Import dan eksport Indonesia di Bojenegoro.

19 Desember 1950 - 21 November 1952
asli
1 sampul

961 Laporan mengenai Abbas gelar Datuk Radjodilangit, Wedana pada Pangreh Praja Kota di Tanah Abang, Jakarta yang dituduh sebagai mata-mata Belanda.

20 Desember 1950 - 25 Juli 1951
asli
7 lembar

962 Surat dari Kepala Jawatan Kehutanan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah keamanan (pembunuhan, pencurian) di kawasan hutan.

27 Desember 1950
asli
1 sampul

963 Ikhtisar mengenai kriminaliteit (kejahatan) dalam waktu triwulan III tahun 1951.

1951
asli
1 sampul

964 Berkas mengenai pemberontakan Batalyon Munawar (Bn. 426) di Jawa Tengah.

1951 - 1952
asli
1 sampul

965 Surat dari Pengurus Fa. Siasat Baru kepada Kepala bagian Politik dan Keamanan KPM mengenai masalah pengosongan ruangan kerja oleh tentara.

04 Januari 1951
asli
5 lembar

966 Surat dari Gubernur Jawa Barat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai dokumentasi Darul Islam.

24 Januari 1951
asli
6 lembar

967 Berkas mengenai Gerakan Igama Imam Hak (IIH) atau Hidup Betul (HB).

9 Januari - 31 Desember 1953
asli
1 sampul

968 Surat dari Kepolisian Karesidenan Kediri mengenai organisasi pengacau bernama "Tengkorak Hitam".

10 Januari - 6 Maret 1951
asli
4 lembar

969 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Bagian Politik/Keamanan KPM mengenai keadaan di Madura.

11 Januari 1951
asli
1 sampul

970 Berkas mengenai kapal selam yang muncul di pantai Girian.

20 Januari - 28 Maret1951
asli
5 lembar

971 Surat dari kepala Kepolisian kepada Wakil Perdana Menteri mengenai Peristiwa Amurang.

22 Januari 1951
tembusan
1 lembar

972 Berkas mengenai keadaan (keamanan) di Pelabuhan Tanjung Perak.

30 Januari - 12 April 1951
salinan
6 lembar

973 Berkas mengenai tinjauan Komisaris Partai Rakyat Nasional terkait penyebab kekacauan di dalam negeri.

30 Januari - 19 Februari 1951
asli
1 sampul

974 Berkas mengenai keamanan di sepanjang Sungai Mahakam.

06 Februari - 26 April 1951
asli
5 lembar

975 Berkas mengenai penyerobotan dan penculikan hakim-hakim dan jaksa di Jawa Timur.

06 Februari - 9 Maret 1951
asli
5 lembar

976 Berkas mengenai penerbangan kapal-kapal udara asing di atas Kepulauan Riau.

08 Februari - 7 Mei 1951
asli
8 lembar

977 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Koordinator Keamanan mengenai gerombolan Darul Islam di Kawedanan Leles, Garut.

10 Februari - 11 April 1951
pertinggal
5 lembar

978 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf Angkatan Perang mengenai kapal selam yang terlihat di Teluk Kakale.

12 Februari - 1 Maret 1951
pertinggal

3 lembar

979 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pencurian karet Perusahaan Jasinga Estates (Bogor).

13 Februari - 25 April 1951
pertinggal
5 lembar

980 Surat dari Residen Jakarta kepada Gubernur Jawa Barat mengenai berbagai laporan kejadian di Kab. Karawang dan Tangerang.

15 Februari 1951
salinan
2 lembar

981 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai gerombolan bersenjata antara Balongan dan Jatisari.

15 Februari - 14 Maret 1951
asli
4 lembar

982 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Kepala Staf AD mengenai gerakan pengacau di Daerah Salatiga.

19 Februari 1951 - 19 Maret 1951
asli
7 lembar

983 Surat-surat mengenai ledakan sabotase pada kereta api cepat no.19 Surabaya-Madiun dan mengenai perampokan di Probolinggo.

19 Februari - 16 April 1951
tembusan
9 lembar

984 Surat dari Kantor Agama Surakarta kepada Menteri Agama mengenai kegentingan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Klaten dan Boyolali yang dilakukan oleh Geroyok Gedor Pasukan Merapi - Merbabu.

21 Februari 1951
salinan
2 lembar

985 Surat dari Jawatan Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penyelesaian *Javaasche Bank-roof* di Surabaya.

23 Februari - 10 Maret 1951
asli
3 lembar

986 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Jaksa Agung mengenai kejahatan-kejahatan yang besar dalam masyarakat.

27 Februari 1951

pertinggal
3 lembar

987 Surat-surat mengenai kejadian terkait Merbabu-Merapi Complex di Boyolali dan
27 Februari 1951
asli
1 sampul

988 Surat dari Gubernur Jawa Barat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai gerakan Darul Islam di Tasikmalaya.
3 Maret 1951
asli
1 sampul

989 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian mengenai penculikan A.W. Ngoro oleh gerombolan penjahat.
3 - 14 Maret 1951
pertinggal
3 lembar

990 Surat dari Kepala Jawatan Kehutanan kepada Kepala Koordinator Kemanan tentang pengrusakan hutan oleh orang-orang desa di Banyuwangi.
8 Maret 1951
asli
8 lembar

991 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Wakil Perdana Menteri (Koordinator Keamanan Jakarta) mengenai pencurian di kapal America *SS Luckonbach* .
9 - 14 Maret 1951
asli
2 lembar

992 Surat dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri tentang kekacauan di Daerah Probolinggo.
9 Maret 1951
tembusan
2 lembar

993 Surat dari Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat kepada Perdana Menteri tentang perampokan dalam kereta api No.515 di Raban, Kab. Batang.
10 Maret 1951
asli
1 lembar

994 Surat dari Kepala Kepolisian Pusat kepada Perdana Menteri mengenai laporan pencurian barang-barang perhiasaan dan pakaian dengan kekerasan (rampok) dan

14 Maret 1951
asli
1 lembar

995 Surat dari Kementerian Penerangan kepada Perdana Menteri mengenai pertempuran dengan gerombolan DI di sekitar Ujung Berung dan Paseh (Majalaya).

15 - 29 Maret 1951
asli
4 lembar

996 Surat-surat mengenai kapal selam yang muncul di Sibonte Bagian Pantai Ula Karang/Sumatra Tengah.

17 Maret 1951
asli
4 lembar

997 Surat (telegram) dari Jawatan Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri tentang 2 orang Belanda yang diculik di Daerah Karang Pindah telah diketemukan kembali dengan selamat.

17 Maret 1951
asli
3 lembar

998 Laporan kesan-kesan perjalanan sekeliling Merapi dan Merbabu Complex (Tinjauan pelaksanaan Operasi Merdeka Timur).

18 Maret 1951
asli
4 lembar

999 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Wakil Perdana Menteri mengenai laporan tahunan tentang kriminalitas di daerah Jawa Tengah dalam tahun 1950.

19 Maret 1951
asli
1 sampul

1000 Laporan dari kantor kepolisian kabupaten Simalungun Pematang Siantar mengenai persengketaan antara orang-orang tani di Sumatera Timur

20 Maret 1951
salinan
3 lembar

1001 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai kapal terbang asing yang mendarat di lapangan Ketiau (Palembang).

21 Maret - 2 Mei 1951
asli
8 lembar

1002 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf AD mengenai jalannya aksi Darul Islam yang semakin meningkat.

21 Maret - 12 April 1951
asli
7 lembar

1003 Surat dari Mendagri kepada Kepala Kepolisian mengenai pengaduan dan kesukaran yang dialami Maskapai Perkapalan *The Blue Funnel Line* untuk singgah di pelabuhan Indonesia.

22 Maret - 21 Mei 1951
asli
1 lembar

1004 Surat dari Mendagri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pesawat yang terbang diatas perkebunan Balaiyang (Siak Sri Indra Pura) Sumatra Tengah.

23 Maret & 3 April 1951
asli
2 lembar

1005 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pertahanan mengenai kapal yang tidak diketahui pemiliknya terlihat di laut Pacitan.

28 Maret 1951
tembusan
5 lembar

1006 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf AD mengenai gerakan bekas anggota KNIL.

28 March 1951
pertinggal
3 lembar

1007 Telegram dari Kepolisian Kalimantan Selatan mengenai serangan pos polisi oleh geromboloan dengan senjata otomatis.

29 Maret 1951
asli
1 lembar

1008 Surat dari Kepala Kepolisian kepada Wakil Perdana Menteri mengenai kejadian pengamukan di Poso.

1 April 1951
asli
2 lembar

1009 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengungsian orang-orang dari daerah Besuki ke daerah Madura.

2 April 1951
tembusan
5 lembar

1010 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Mendagri mengenai pengrusakan tembakau di daerah Wedi (Surakarta)

4 & 13 April 1951
pertinggal
3 lembar

1011 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai anggota DI yang terbunuh dikeroyok massa di desa Krisik, Sumedang.

4 April 1951
asli
1 lembar

1012 Surat dari Menteri Pertanian kepada Menteri Pertahanan mengenai penyerangan pabrik gula di Sidoharjo.

10 - 14 April 1951
tembusan
5 lembar

1013 Surat dari Jaksa Agung kepada Koordinator Keamanan mengenai Ikhtisar kejahatan dalam tahun 1950 di seluruh propinsi Jawa Barat.

11 April 1951
asli
4 lembar

1014 Radiogram dari kepala Kepolisian Provinsi Jawa Timur mengenai kapal perang Belanda M 824 berlabuh di Pasir Putih.

12 April 1951
asli
1 lembar

1015 Kumpulan Radiogram mengenai serangan DI/TII di daerah Jawa Barat.

14 - 19 April 1951
asli
1 sampul

1016 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Koordinator Keamanan mengenai sebuah pesawat yang terbang di atas kota Chairah Kab. Indragiri dan Perkebunan Balaikayang Kabupaten Bengkalis (Sumatera).

17 April 1951
asli
3 lembar

1017 Berkas mengenai dokumen-dokumen NII di wilayah Jawa Tengah.
16 Februari - 17 April 1951
asli
1 sampul

1018 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Indonesia mengenai enam orang polisi dari pos polisi Kalibakar, Malang yang diserang oleh 500 orang .
17 - 26 April 1951
asli
3 lembar

1019 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Mendagri mengenai tembak menembak antara polisi dan pengacau di Ambarawa.
19 April 1951
asli
2 lembar

1020 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Ketua Staf K Pusat mengenai pertempuran
21 April - 10 Mei 1951
asli
3 lembar

1021 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penembakan kereta api di Ciomas Bogor.
27 April - 10 Mei 1951
asli
1 sampul

1022 Berkas mengenai instruksi rahasia dari Partai Masjumi/*Head Quarter* s NII cabang Cilacap terkait gerakan dalam bidang politik, ekonomi dan militer.
30 April - 2 Juni 1951
tembusan
1 sampul

1023 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Kepala Staf AD mengenai *code* DI yang telah terungkap di daerah Banyumas.
2 & 11 Mei 1951
pertinggal
2 lembar

1024 Surat dari Kepala Kepolisian kepada Kepala Staf K mengenai cara DI memungut uang dan pemberian dari rakyat.
2 Mei 1951
asli
2 lembar

1025 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Sekretaris Staf "K" mengenai keadaan politik dan keamanan daerah Sumedang.

05 Mei 1951
pertinggal
1 sampul

1026 Berkas mengenai pengaduan Tunah Binti Naiun warga Kebayoran terkait pembunuhan saudaranya.

8 Mei 1951 - 11 Februari 1952
asli
7 lembar

1027 Surat dari Jaksa Agung kepada menteri Penerangan tentang organisasi-organisasi gerombolan terlarang.

10 Mei 1951
tembusan
2 lembar

1028 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai kapal perang Belanda yang berlabuh di Pulau Roti.

11 & 30 Mei 1951
asli
2 lembar

1029 Surat-surat mengenai serangan gerombolan "Citarum" tehadap pos Polisi Panitran Daerah Sukabumi.

11 Mei - 15 Juni 1951
asli
3 lembar

1030 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pertempuran dengan gerombolan di daerah Banjarmasin.

12 Mei 1951
asli
3 lembar

1031 Laporan dari Soehartono mengenai gambaran singkat sekitar aksi-aksi militer di Jawa Barat.

15 Mei 1951
salinan
3 lembar

1032 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Pertahanan mengenai pembajakan laut di Borneo Utara.

16 Mei 1951
tembusan
6 lembar

1033 Berkas mengenai perkebunan di Jawa Barat yang terpaksa ditutup karena adanya kekacauan.

21 - 30 Mei 1951
asli
1 sampul

1034 Surat dari Residen Pekalongan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai gerakan "Perhimpunan Rakyat Indonesia Kemanusiaan" (PRI Kemanusiaan).

21 Mei & 15 Juni 1951
tembusan
4 lembar

1035 Laporan dari Gubernur Jawa Barat mengenai keamanan tanggal 1-15 Mei 1951 di Provinsi Jawa Barat.

22 Mei 1951
fotokopi
5 lembar

1036 Surat dari Kepala Jawatan Kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai perampokan di *NV. Nederl Indisch Handels Bank* , Bandung.

22 & 31 Mei 1951
salinan
1 lembar

1037 Surat dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Kalimantan kepada Menteri Agama mengenai pemulihan kemanan yang dilakukan para alim ulama di Hulu Sungai Kalimantan.

25 Mei 1951
tembusan
3 lembar

1038 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai perampokan dan pembunuhan kasir percetakan "Boen Hoa".

26 Mei 1951
asli
5 lembar

1039 Surat Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai pengaduan dari Daeng Parani tentang komisaris Seno Sosro di Makasar yang diduga sebagai kaki tangan Belanda.

28 Mei 1951
asli
2 lembar

1040 Surat dari Kepala Jawatan Kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai penyerangan pos tentara di kampung Tatakanrantau, Banjarmasin.

28 Mei - 4 Juni 1951

asli
2 lembar

1041 Laporan mengenai reaksi terhadap pengangkatan Wan Umaruddin Bares menjadi Bupati Kabupaten Deli/ Serdang.

28 Mei - 5 Juni 1951
salinan
1 sampul

1042 Surat dari Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai penembakan 3 orang pager desa Sila Gambang, Majalaya oleh TII.

29 Mei 1951
asli
1 lembar

1043 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Perdana Menteri mengenai perampokan uang di Stasiun Jatiroto, Jogjakarta.

29 Mei 1951
asli
6 lembar

1044 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai perampokan di rumah H.L. Wennink (Pengurus Kebun Tlogoredjo) dan pencurian mobil di Karesidenan Malang.

29 Mei - 13 Juni 1951
asli
5 lembar

1045 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai 5 kapal selam yang tidak dikenal kebangsaannya berada di perairan Sulawesi Selatan.

31 Mei 1951
asli
2 lembar

1046 Surat dari Kepala Kepolisian Dinas Kriminal kepada Perdana Menteri mengenai serangan pengacau di desa Penjarang, Kecamatan Sidaredja (Cilacap) .

31 Mei 1951
asli
2 lembar

1047 Laporan mengenai tertembak matinya Aos oleh anggota BODM Ciawi.

27 Mei 1952
asli
9 lembar

1048 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai 'order darurat pada segenap pemimpin dari semua sektor Indonesia' dari organisasi atau partai yang bekerja dibawah tanah yang menentang pemerintah.

11 Juni & 6 Agustus 1951
asli
2 lembar

1049 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Perdana Menteri mengenai laporan tertembak matinya 2 orang pegawai polisi oleh gerombolan di Pelabuhan ratu.

11 Juni 1951
asli
1 sampul

1050 Surat dari Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri mengenai kekacauan-kekacauan di daerah Cibadak, Sukabumi

14 June 1951
asli
5 lembar

1051 Surat dari Kepala Kepolisian kepada Perdana Menteri mengenai penyerbuan pos polisi Pasrapen (Pasuruan) oleh gerombolan pengacau dan gerombolan Klowor.

14 June 1951
asli
2 lembar

1052 Surat dari Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai serangan gerombolan bersenjata terhadap pos polisi perkebunan Mariwati.

16 Juni 1951
asli
2 lembar

1053 Berkas mengenai organisasi Penggarongan Satuan Garong Sumatra Selatan (SGSS) atau nama samaran satuan Gerilya Sumsel.

21 Juni 1951 - 30 Januari 1952
asli
1 sampul

1054 Surat radiogram dari Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai kebakaran tebu di bangsal Kediri.

17 Juli 1951
asli
2 lembar

1055 Surat dari Kementerian Penerangan kepada Perdana Manteri mengenai sekitar peristiwa CTN dan sekitar pengangatan Gubernur Soediro di Sulawesi.

25 August 1951
asli
2 lembar

1056 Berkas mengenai Simedah bin Mapelendeng yang menurunkan dan menginjak bendera Belanda yang dipasang di halaman rumah komissaris Kerajaan Belanda di Palembang.

27 June 1951
asli
4 lembar

1057 Surat-surat dan plakat (seruan) dari gerakan DI/TII Jawa Barat yang ditemukan sampai Agustus 1951.

31 Agustus - 21 September 1951
salinan
1 sampul

1058 Laporan mengenai gerakan operasi yang dijalankan mulai tanggal 8 - 25 Oktober 1951 (order dari Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat).

10 September 1951
asli
1 sampul

1059 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Jaksa Agung mengenai penggeledahan dan razia di Aceh.

17 September 1951
asli
2 lembar

1060 Laporan dari Polisi Propinsi Sumatra Utara mengenai keadaan di Sumatra Utara.

06 Oktober 1953
salinan
1 sampul

1061 Surat dari Menteri dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Siaran 'Front Islam' DI

18 Oktober - 3 November 1951
asli
1 sampul

1062 Berkas mengenai pelaporan keamanan Provinsi Jateng (pembunuhan, penculikan, penemuan Jenazah, pembakaran/penggarongan, penganiayaan, perampokan, dll.)

02 November 1951 - 28 Mei 1952
asli
1 sampul

1063 Berkas mengenai protes dari PWI terhadap perlakuan polisi kepada wartawan.

07 November 1951 - 17 Januari 1952
asli
1 sampul

1064 Surat protes dari pimpinan cabang Pemuda Rakyat kabupaten Padang Pariaman kepada Perdana Menteri mengenai penggeledahan di kantor cabang Pemuda Rakyat Kabupaten Padang Pariaman.

16 November 1951
asli
1 lembar

1065 Berkas mengenai masalah keamanan di *Onderneming* wilayah Jawa Barat.

22 November 1951
asli
1 sampul

1066 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai masuknya barang-barang Jepang ke Sumatera Utara.

29 November 1951 - 21 Januari 1952
asli
3 lembar

1067 Surat dari Kepala bagian Politik/Keamanan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai gangguan Keamanan di Perusahaan Rami "Jengkol" (Kediri).

7 Desember 1951 - 25 Januari 1952
asli
3 lembar

1068 Surat edaran dari Jaksa Agung kepada semua Kepala Kejaksaan dan Kepolisian mengenai pencurian kawat telepon.

12 December 1951
fotokopi
1 lembar

1069 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai *Huizenbow* di Kota Medan akan membawa ketegangan antara penduduk bangsa Asing dan Indonesia.

13 December 1951
asli
5 lembar

1070 Berkas mengenai penyelundupan senjata api di Pulau Debora, Ambon.

13 Desember 1951 - 13 Juni 1952
asli
1 sampul

1071 Surat dari Kepala Bagian Politik Keamanan kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai pengaduan Habib Kosim Al Mahdely tentang penyebaran kebohongan oleh Syeh M.Kasim Al Jamany bahwa Daud Beureueh seorang pengacau.

20 Desember 1951
pertinggal
2 lembar

1072 Surat dari Bupati Aceh Utara kepada Perdana Menteri mengenai razia di Kab. Aceh Utara oleh CPM.

21 December 1951
asli
2 lembar

1073 Berkas mengenai penyelundupan Kopra dari daerah Sangihe/Talaud

31 Desember 1951 - 25 Januari 1952

asli
4 lembar

1074 Laporan -laporan mengenai kejadian-kejadian penting/gangguan keamanan di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Januari 1952 - November 1953
pertinggal
1 sampul

1075 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai hasil penyelidikan tanda/*code* TII di daerah Bogor.

4 Januari 1952 - 27 Maret 1952
asli
3 lembar

1076 *Verslag* dari Bagian Staff 'K' Propinsi Sumatra Tengah selama tahun 1951.

10 Januari 1952
asli
6 lembar

1077 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri mengenai usul pemberian bantuan kepada korban kekacauan di Kecamatan Karang Anyar.

12 Januari - 10 Maret 1952
asli
4 lembar

1078 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai perampokkan dengan tujuan politik di Sumatra Timur.

15 January 1952
asli
6 lembar

1079 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai ketegangan di Pelabuhan Belawan.

17 January 1952
asli
5 lembar

1080 Laporan dari Residen Besuki mengenai tinjauan sekitar kekacauan di daerah Karesidenan Besuki.

22 Januari 1952

asli
1 sampul

1081 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan mengenai surat kaleng terkait Inspektur J.Voll di Makasar yang merugikan keuangan negara.
23 January 1952
asli
2 lembar

1082 Surat dari Residen Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai penahanan anak yang mencurigakan dengan lencana GPPI di Ambarawa.
28 January 1952
salinan
5 lembar

1083 Surat dari panitia Perencana Usaha Keamanan kepada Perdana Menteri mengenai rencana usaha keamanan yang telah dijalankan.
28 January 1952
asli
1 sampul

1084 Berkas mengenai kegiatan gerombolan bersenjata di Sumatra Timur.
04 Februari - 14 Juli 1952
tembusan
6 lembar

1085 Berkas mengenai pendaratan darurat pesawat terbang milik *American Christian Missionary* di desa Babalan Kec.Wedung Kab. Demak.
5 Februari - 4 September 1952
asli
1 sampul

1086 Surat dari Residen Banyumas kepada Staf "K" Pusat mengenai penggarongan hewan ternak oleh gerombolan pengacau.
05 February 1952
tembusan
3 lembar

1087 Surat dari Gubenur Jawa Tengah bagian Keamanan kepada Staf "K" Pusat mengenai kelakuan Moelyadi, Camat Getas Salatiga.
07 February 1952
asli
5 lembar

1088 Berkas mengenai kecelakaan kapal terbang milik orang Italia di sungai Pakning
18 Februari - 23 April 1952
asli
6 lembar

1089 Berkas mengenai penembakan 6 orang yang di curigai sebagai anggota DI/TII di
22 Februari - 3 Juni 1952
asli
1 sampul

1090 Berkas mengenai penyelesaian perkara kriminal yang dijalankan oleh Gubernur Militer
22 Februari - 30 Agustus 1952
8 lembar
1 sampul

1091 Surat dari Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai kapal terbang dari perusahaan Caltex merekam wilayah sungai Rumbai, Pekanbaru.
27 February 1952
asli
3 lembar

1092 Surat dari Residen Pekalongan kepada Gubernur Jawa Tengah (Bagian Politik)
9 Maret - 31 Oktober 1952
tembusan
5 lembar

1093 Laporan dari Staf (K) Jawa Barat mengenai kondisi keamanan di Jawa Barat pada bulan Januari dan Mei 1952.
Maret & Juni 1952
asli
1 sampul

1094 Berkas mengenai bajak laut Filipina di Perairan Indonesia.
11 Maret - 4 Juni 1952
asli
6 lembar

1095 Berkas mengenai kapal terbang Inggris yang terbang di atas kepulauan Riau.
12 Maret - 12 Mei 1952
asli
1 sampul

1096 Berkas mengenai pencabutan larangan sementara demonstrasi dan rapat umum politik
17 Maret 1952 - 27 Maret 1954
asli
1 sampul

1097 Laporan dari Residen Semarang mengenai kejahatan daerah Semarang selama bulan Maret 1952.
18 March 1952

asli

1 sampul

1098 Laporan dari Residen Surakarta mengenai kejahatan di daerah Karesidenan Surakarta periode 1-15 Maret 1952

20 March 1952
asli
1 sampul

1099 Surat kawat dari Gubenur Jawa Timur mengenai benda seperti roket yang terbang di daerah Besuki.

21 March 1952
asli
2 lembar

1100 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Luar Negeri mengenai penembakan atas kapal Kian Peng oleh KNIL.

30 March 1952
asli
4 lembar

1101 Berkas mengenai kemunculan kapal selam di pantai Lombok.

8 April - 10 Desember 1952
asli
1 sampul

1102 Surat dari Kabinet Perdana Menteri bagian politik dan keamanan tentang penyelundupan slabs dari Sumatera Selatan.

09 April 1952
asli
4 lembar

1103 Laporan tentang kejahatan penting di Karesidenan Semarang.

15 April 1952
asli
1 sampul

1104 Surat dari Kepala Polisi Propinsi Sumatera Tengah kepada kepala Kepolisian Negara tentang pelarangan peredaran *strairs dollar* dalam Kabupaten Bengkalis.

24 April 1952
asli
2 lembar

1105 Surat dari Wakil Ketua Staf "K" Propinsi Sulawesi kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai laporan rahasia terkait kondisi keamanan di Sulawesi selama bulan Februari-Maret 1952.

25 April 1952

asli
1 sampul

1106 Surat dari Gubenur Jawa Tengah kepada Staf "K" Pusat mengenai berita acara beberapa pelaku pengacau keamanan.

12 May 1952
asli
1 sampul

1107 Surat dari wakil Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pencarian Zainudin sebagai kurir dalam clash ke-2 yang diperkirakan sedang sakit.

15 May 1952
asli
4 lembar

1108 Berkas mengenai laporan keamanan dari *Algemene Landbouw Syndicaat* .

Mei - Agustus 1952
asli
1 sampul

1109 Laporan mengenai gangguan keamanan di Jawa Tengah.

10 June 1952
salinan
1 sampul

1110 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Pernyataan Rukun Tani Indonesia menghendaki jaminan keamanan

13 Juni - 28 Agustus 1952
asli
5 lembar

1111 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai perampokan di lautan Kuala Parang Reteh, Sumatera Tengah.

18 June 1952
asli
3 lembar

1112 Surat dari Kepala Kepolisian Negara tentang perayaan peringatan kaum tani mengenai tanah *conversie* .

25 Juni 1952
asli
1 sampul

1113 Laporan mengenai keamanan dari Kepala Jawatan Kehutanan selama 1 Juni - 10 Juni 1952.

30 June 1952
asli
2 lembar

1114 Berkas mengenai perampokan di Ambarawa dan Salatiga.

23 Juli - 11 Desember 1952
tembusan
1 sampul

1115 Berkas mengenai permohonan persetujuan membantu penyelenggaraan keamanan negara dari Corps Penyelenggara Keamanan Negara (CPKN).

07 August 1952
asli
2 lembar

1116 Surat dari Sekretaris Staf "K" Pusat kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai masalah pertikaian antara pelajar-pelajar Sulawesi dengan pelajar-pelajar lain di Yogyakarta.

09 August 1952
asli
1 sampul

1117 Laporan mengenai S.Bone Inspektur Pertanian di Makasar yang dianggap sebagi mata-mata.

18 Agustus 1952
asli
4 lembar

1118 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai dugaan penyelundupan di Pulau Pejantan.

22 Agustus 1952
asli
1 sampul

1119 Berkas mengenai penembakan di mesjid Sangau Kalimantan Barat oleh Kopral CPM Pos Sanggau .

26 Agustus 1952 - 17 Juni 1953
asli
1 sampul

1120 Surat dari Residen Semarang kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai pembunuhan Wakil Lurah Desa Banyubiru, Kabupaten Ambarawa.

10 September - 18 Oktober 1952
tembusan
4 lembar

1121 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai serangan gerombolan bersenjata terhadap pekerja berkebangsaan Belanda perkebunan di Pasar Rebo.

24 September 1952
asli
2 lembar

1122 Laporan mengenai kejahatan penting dari periode 1-30 September dan Oktober 1952 dari kantor Karesiden Banyumas.

30 September - 30 Oktober 1952
asli
1 sampul

1123 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai pokok dari kesan pemeriksaan daerah operasi T T. III.

01 October 1952
asli
4 lembar

1124 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai keadaan keamanan bulan Agustus 1952 di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah sebelah Barat (GBN), Sulawesi Selatan dan Maluku.

01 October 1952
asli
1 sampul

1125 Laporan mengenai kejadian yang diterima dengan perantara radiogram oleh Jawatan Kepolisian Negara di propinsi seluruh Indonesia

02 Oktober 1952 - 1953
asli
1 sampul

1126 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Kehakiman mengenai Laporan Komisaris Polisi dan Jaksa tentang keadaan di Jawa Timur.

13 October 1952
asli
1 sampul

1127 Surat dari Residen Pekalongan kepada gubernur Jawa Tengah mengenai pembunuhan atas Masjhuri oleh pengacau di Sigentong.

25 October 1952
salinan
2 lembar

1128 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada staff "K" Pusat mengenai perampokan di rumah seorang Tionghoa di desa Kadomas, Banten.

27 October 1952
pertinggal
4 lembar

1129 Laporan Resident Pekalongan kepada Gubenur Jawa Tengah mengenai polisi Desa Kasiwen yang diculik dan ditembak mati oleh gerombolan pengacau.

28 October 1952
asli
2 lembar

1130 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai serangan atas perkebunan teh di Cisadaea/Cigombong

28 October 1952
asli
2 lembar

1131 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai kapal selam yang terlihat di sekitar Bulukumba (Sulawesi).

30 October 1952
asli
1 sampul

1132 Laporan singkat dari Bupati Klaten mengenai kejahatan besar perampokan di Prambanan.

30 October 1952
asli
2 lembar

1133 Surat dari Residen Semarang kepada Staf "K" Pusat mengenai laporan keamanan bulan Oktober sampai dengan November 1952.

01 November 1952
asli
1 sampul

1134 Laporan Insidental dari Bupati Cilacap mengenai kedatangan pengacau di R.O. Moncolimo.

06 November 1952
salinan
2 lembar

1135 Surat dari Residen Semarang kepada Gubenur Jawa Tengah mengenai beberapa kasus pembunuhan di Karesidenan Semarang.

08 November - 3 Desember 1952
tembusan
7 lembar

1136 surat dari Residen Banyumas kepada Staf "K" Pusat mengenai seorang warga yang dibunuh oleh gerombolan pengacau.

12 November 1952
asli
5 lembar

1137 Surat daru Residen Kedu kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai pembunuhan Mangkudiharjo, Lurah desa Wuwuharjo Assistonan Kajoran Kabupaten Magelang

15 November - 15 Desember 1952
tembusan
3 lembar

1138 Surat dari Residen Banyumas kepada Staf "K" Pusat mengenai pengacau di Kroya, Kec. Wangon.

25 November - 5 Desember 1952
asli
8 lembar

1139 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Staf "K" Pusat mengenai begal di jalan Balong (Sorogenen) Djebres Kota Solo.
25 November 1952
asli
1 lembar

1140 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai tindakan gerombolan di Sumatra Utara.
28 November 1952
asli
1 lembar

1141 Laporan mingguan tanggal 22 - 28 November 1952 dari *Algemeen Landbouw Syndicaat Ressort* Purwokerto, n.b. dalam bahasa Belanda.
29 November 1952
salinan
1 lembar

1142 Berkas mengenai daftar kejahatan-kejahatan seperti pencurian/perampokan yang terjadi di Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah.
30 November 1952
asli
1 sampul

1143 Surat dari Gubenur Jawa Tengah kepada ketua Staf "K" Pusat mengenai rumah Lurah Desa Kelangwetan, Klaten yang didatangi gerombolan bersenjata.
01 December 1952
asli
4 lembar

1144 Surat dari Gubenur Jawa Tengah kepada bagian Keamanan Staf "K" Pusat mengenai gugurnya Kapten Mulyadi Komandan CPM IV/R.4 di daerah Surakarta.
04 December 1952
asli
2 lembar

1145 Surat dari Ketua Staf "K" Propinsi Jateng kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai barang-barang berharga dari rumah gadai negeri di Margasari (Tegal) diungsikan ke rumah gadai Slawi.
06 Desember 1952
asli
2 lembar

1146 Surat dari Gubernur Jateng kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai keamanan setelah matinya Rasno cs. di daerah Bangsri (Jepara),
08 December 1952

tembusan
2 lembar

1147 Laporan dari Bupati Magelang kepada Residen Kedu mengenai kejahatan-kejahatan yang terjadi.
10 December 1952
asli
1 sampul

1148 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai pembegalan disertai pembunuhan seorang Tionghoa bernama Sie Ging Kwie.
13 Desember 1952
asli
1 sampul

1149 Surat Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai skema gerakan DI dalam daerah Kabupaten Majalengka dan sekitar Keresidenan Cirebon.
18 December 1952
asli
1 sampul

1150 Laporan mengenai keamanan di daerah Keresidenan Kedu dari tanggal 1-15 November 1952 .
20 December 1952
asli
1 sampul

1151 Laporan mengenai pernyataan PKI yang mengatakan bahwa pemerintah takut/khawatir dengan rakyatnya dan lebih curiga kepada bangsa sendiri dari pada bangsa asing.
27 Desember 1952
fotokopi
1 lembar

1152 Surat dari Kepolisian Negara mengenai tinjauan keamanan di Jawa Tengah.
12 Januari 1953
asli
1 sampul

1153 Surat dari Kepala Staf "K" Angkatan Darat kepada Perdana Menteri mengenai laporan keamanan terkait gerakan pengacau seperti DI Kartosuwiryo, APRA dan MMC.
14 Januari 1953
asli
1 sampul

1154 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Asrama Polisi Negara Airmadidi diserang oleh gerombolan bersenjata.
09 Februari 1953
asli
3 lembar

1155 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pengaduan Sam Aly dengan Radek Handoko terkait pengusiran oleh kantor Imigrasi California.

11 Februari 1953
asli
1 sampul

1156 Laporan mengenai keamanan daerah Propinsi Jawa Timur periode II bulan Maret 1953

01 Maret 1953
asli
1 sampul

1157 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyebaran pamflet gelap di Semarang.

05 Maret 1953
asli
4 lembar

1158 Berkas mengenai penangkapan kapal Jepang Shinpo Maru di perairan wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah.

23 Maret - 25 April 1953
asli
1 sampul

1159 Berkas mengenai kegiatan gerombolan DI/TII di Jawa Tengah.

26 Maret - 16 Agustus 1953
asli
1 sampul

1160 Laporan dari Kepolisian Negara Bagian Dinas Reserse Kriminal mengenai keadaan keamanan dari tanggal 1 - 15 April 1953.

15 April 1953
fotokopi
1 sampul

1161 Laporan Kepala Polisi Jakarta Raya mengenai suatu perkumpulan tukang rotan bangsa Tionghoa bernama Then Hoi Kong Hwee.

11 Mei 1953
salinan
2 lembar

1162 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai surat dari gerombolan DI yang disampaikan kepada Wedana Cililin.

12 Mei 1953
asli
2 lembar

1163 Surat dari Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai siaran juru bicara TII Divisi I Sunan Rachmat.

15 Mei 1953
asli
1 sampul

1164 Laporan Keamanan dari Residen Pekalongan bulan Juni - Agustus, 1953.

Juni - Agustus 1953
asli
1 sampul

1165 Berkas mengenai laporan atas gangguan keamanan di wilayah Jawa Tengah.

17 Juni 1953 - 27 Desember 1952
asli
1 sampul

1166 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai peristiwa Thio Eng Giok guru sekolah rakyat Tionghoa dengan Gereja Bethel.

07 Juli - 14 Agustus 1953
asli
5 lembar

1167 Surat-menyurat antara Menteri Luar Negeri dengan Perdana Menteri mengenai komplotan untuk membunuh Kepala Negara.

14 Juli - 24 Oktober 1953
asli
1 sampul

1168 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Menteri Pertahanan mengenai pembersihan ranjau-ranjau laut di Muara Bajar (Samarinda)

03 August 1953
tembusan
2 lembar

1169 Berkas mengenai demonstrasi petani-petani di sungai Belutu dan Tebing Tinggi.

08 Agustus 1953
fotokopi
4 lembar

1170 Berkas mengenai larangan mengadakan rapat umum untuk menyokong kabinet dan anti DI/TII Kartosuwiryo.

05 Oktober 1953
asli
7 lembar

1171 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada semua gubernur mengenai larangan permainan judi.

6 Oktober 1953
fotokopi

1 sampul

1172 Surat Kepala Kepolisian Negara tentang penyampaian salinan '*Dagboek*' diantaranya berisi tentang kecaman Pidato Soekarno dan gerakan NII.

19 Oktober 1953
asli
1 sampul

1173 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai menghilangnya M. Jahja Kepala Kantor Pos Enrekang dengan satu senjata mauser dan

5 Desember 1953 & 12 Oktober 1954
asli
2 lembar

1174 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai alamat "Sang Gurilla"/Timur Pane.

28 Desember 1953
asli
1 lembar

1175 Surat edaran dari Thesauri - Djenderal Menteri Keuangan kepada semua Menteri mengenai kerugian yang diderita oleh negara, karena penggelapan atau perbuatan lain.

9 Januari 1954
asli
1 sampul

1176 Surat pengantar dari Jawatan Kepolisian mengenai laporan keamanan perkebunan bulan oktober 1953, tanpa lampiran.

13 Januari 1954
asli
2 lembar

1177 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan rapat tentang kejahatan dan kesulitan dalam melakukan pekerjaan di perkebunan.

13 Februari 1954
salinan
5 lembar

1178 Surat dari Wakil Panglima Tentara dan Territorium VII Wirabuana kepada Gubernur Sulawesi mengenai jawaban atas permintaan pos tentara di Kawedanan Maliki Distrik Nuha untuk mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh gerombolan Kahar Muzakkar.

12 April - 19 Oktober 1954
asli
1 sampul

1179 Surat dari Gubernur Sumatera Tengah kepada Perdana Menteri mengenai temuan "*druckbom* " di Perairan Pulau Tudjuh.

14 April 1954
asli
5 lembar

1180 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai perselisihan Gerakan Gerilya Nederland dengan TII di Kabupaten Donggala.

30 April 1954
asli
1sampul

1181 Resolusi Dewan Pimpinan Cabang Barisan Tani Indonesia tentang pengutukan percobaan bom hydrogeen (H).

16 Mei 1954
salinan
1 sampul

1182 Surat dari Gubernur Propinsi Sulawesi kepada Menteri Dalam Negeri mengenai berita kematian Kahar Muzakkar di daerah Palopo yang belum dapat dibuktikan.

28 Mei 1954
salinan
1 lembar

1183 Laporan Bulan Mei 1954 mengenai masalah keamanan, politik dan ekonomi.

21 Juni 1954
asli
1 sampul

1184 Berkas mengenai pemeriksaan senjata yang dibawa oleh kapal SS. SOESTDYK.

29 Desember 1954 - 17 Februari 1955
asli
3 lembar

1185 Berkas mengenai gerombolan bersenjata yang menyerang Pulau Sailus, Sulawesi yang mengkibatkan penduduk Pulau Sailus mengungsi ke Lombok dan Madura.

15 November 1954
asli
1 sampul

1186 Surat dari Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penyelundupan senjata api dari Davao ke Indonesia oleh orang Belanda.

17 Januari 1955
asli
2 lembar

1187 Surat-surat mengenai kasus pembunuhan Moebahar oleh Lets. Sidi Amir Hosen dari Terr.IV Res. Inf.IV T & T I Bukit Barisan, beserta lampiran.

17 Januari dan 13 September 1955
asli
5 lembar

1188 Berkas mengenai penyitaan senjata api dari Pabrik Bromo di Pasuruan.

22 Februari - 7 April 1955
asli
1 sampul

1189 Berkas mengenai peristiwa penurunan Bendera Merah Putih dan Bendera Merah di percetakan milik J.C. Van Ingen di Surabaya.

12 Maret 1955
asli
1 sampul

1190 Berkas mengenai peristiwa Pulot Lebung dan Tjot Djeumpa (di daerah Aceh).

12 - 13 April 1955
fotokopi
1 sampul

1191 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai kejahatan yang terjadi di desa Mandalare (Kab Ciamis) yang dilakukan oleh gerombolan pengacau.

03 Mei 1955
asli
4 lembar

1192 Surat-surat mengenai pembunuhan seorang Tionghoa warga negara bernama Kong Goan Tan di Makasar.

3 Mei - 5 September 1955
asli
5 lembar

1193 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai penyelundupan ke

25 Mei 1955
asli
1 sampul

1194 Surat dari Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai masalah keamanan BPM di Kalimantan Timur.

28 Mei 1955 - 20 Januari 1956
asli
1 sampul

1195 Berkas mengenai Peristiwa Telogosari (penyerangan terhadap polisi) di Malang dan penyerbuan ke pabrik beras Wiroborang Kotapradja (Probolinggo)

29 Mei 1955
asli

1 sampul

1196 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Pertahanan mengenai mahasiswa Universitas Indonesia keturunan Tionghoa dan perwira militer yang telah membuat

06 Juni 1955
pertinggal
7 lembar

1197 Radiogram dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pengeroyokan seorang bernama Aliu Taipi oleh sekelompok transmigran di Gorontalo.

30 June 1955
asli
3 lembar

1198 Surat dari Gubernur Propinsi Sumatera Utara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan keamanan daerah Aceh selama bulan Mei tahun 1955.

12 Juli 1955
asli
5 lembar

1199 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Penerangan mengenai kegiatan jawatan penerangan gerombolan di Kab. Aceh Utara.

03 Agustus 1955
pertinggal
3 lembar

1200 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai peristiwa gangguan keamanan di daerah Sindjai , beserta lampiran.

25 Agustus 1955
tembusan
1 lembar

1201 Surat dari Kepala Polisi Propinsi Sulawesi kepada Kepolisian Negara Bahagian Dinas Security mengenai *Screening Committe* ex pelajar bersenjata Sulawesi Selatan.

16 September 1955
salinan
1 sampul

1202 Surat dari Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminil kepada Djaksa Agung dan Mahkamah Agung Indonesia Bagian Pemberantasan Uang Palsu.

24 Oktober 1955 - 28 Oktober 1959
asli
1 sampul

1203 Surat dari Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Propinsi Jawa Barat kepada Kepala Biro Keamanan mengenai pengibaran bendera DI diantaranya di alun-alun Kabupaten Cianjur.

5 November 1955
asli
2 lembar

1204 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyelundupan getah sheet, dengan lampiran.

19 Desember 1955
salinan
3 lembar

1205 Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua DPR mengenai barang-barang gadai gelap yang disita oleh Kepala Kepolisian Kecamatan Pagu/Kediri.

24 Januari 1956 - 1 Februari 1958
salinan
1 sampul

1206 Surat-surat mengenai aktivitas SBG untuk mempergunakan peristiwa Pembeslahan Peluru di pabrik gula Redjoagung Madiun guna menekan majikan dalam

30 April - 28 November 1956
asli
1 lembar

1207 Berkas mengenai masalah jaringan penyelundupan yang diorganisir kaum Komunis diseluruh Timur Tengah termasuk juga Indonesia.

21 September 1956 - 12 Juli 1957
asli
1 sampul

1208 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisisan Negara mengenai Gerakan Penentang Kolonialisme Indonesia (GPKI) disertai lampiran

13 - 15 Oktober 1956
pertinggal
7 lembar

1209 Berkas mengenai DI/TII yang mengajukan usul *case-fire* dan laporan mengenai tindakan-tindakan DI/TII terhadap rakyat terutama di Tasikmalaya.

16 November 1956
asli
1 sampul

1210 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai rancangan Keputusan Presiden tentang pernyataan darurat perang di daerah Aceh.

16 Januari 1957

salinan
1 sampul

1211 Laporan mengenai keadaan keamanan daerah propinsi Jawa Timur bulan November 1956.

19 Februari 1957
asli
1 sampul

1212 Surat dari Kepala Biro Keamanan Perdana Menteri kepada Ketua KKD tentang surat gelap Komando Revolusi Jawa Tengah.

19 Februari 1957
asli
1 sampul

1213 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian ralat naskah jawaban pemerintah atas pemandangan umum mengenai kejadian-kejadian di Sumatera bulan Desember 1956, beserta lampiran.

20 Februari 1957
salinan
1 sampul

1214 Surat-surat antara Perdana Menteri dengan Ketua DPR mengenai percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Tjikini.

4 Desember 1957 - 18 Februari 1958
asli
1 sampul

1215 Berkas mengenai peristiwa tanggal 22 Desember 1956 tentang pernyataan Kolonel Simbolon, Panglima TTI Bukit Barisan yang melepaskan hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta.

26 Januari 1957
asli
1 sampul

1216 Berkas mengenai UU No. 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaya dan No. 79 tahun 1957 tentang Pernyataan Keadaan Perang.

18 Desember 1957
tembusan
1 sampul

1217 Statement Perdana Menteri Djuanda mengenai serangan udara yang dilakukan oleh kaum pemberontak. N.b.: arsip dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

30 April 1958
asli
1 sampul

1218 Berkas mengenai Keputusan Sidang Pleno Dewan Nasional ke XI tahun 1958 mengenai masalah penyelesaian dan pemulihan keamanan sebagai lanjutan usul kepada Dewan Menteri tentang kewaspadaan nasional.

23 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

1219 Berkas mengenai penganiayaan polisi terhadap Kobir.

06 April 1957 - 26 Agustus 1958
asli
1 sampul

1220 Surat dari Mantan Kepala Jawatan Hubungan Perburuhan Resort Sibolga kepada Dewan Menteri mengenai pergolakan yang menimbulkan pertumpahan darah di daerah Tapanuli.

25 Oktober 1958
asli
1 sampul

1221 Surat dari Perdana Menteri kepada KSAL mengenai laporan palsu dan pamflet-pamflet gelap.

19 Januari 1959
asli
1 sampul

1222 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai kegiatan pemberontakan PRRI di Filipina

20 Juni 1959
asli
6 lembar

1223 Surat dari H. Ichsannoer Josotaruno (Anggota Parlemen RI) kepada Ketua Dewan Keamanan Pusat mengenai pencegahan 'perembesan' PRRI/Permesta dalam jamaah

25 Mei 1959
asli
2 lembar

1224 Surat Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah mengenai pesawat terbang tak dikenal yang melintas di atas Malinau (Kalimantan Timur).

10 September 1959
asli
2 lembar

1225 Surat dari Kejaksaan Agung mengenai penyelundupan senjata dari Filipina Selatan ke Sulawesi.

17 September 1959

salinan
1 lembar

1226 Surat dari Kepala Bagian Keamanan kepada Perdana Menteri mengenai pengacauan gerombolan DI/TII di daerah Jawa Barat.
21 September 1959
asli
1 lembar

1227 Surat Djaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai laporan sandi dari Singapura tentang kegiatan PRRI/Permesta.
22 September 1959
asli
2 lembar

1228 Laporan Jaksa Agung kepada Perdana Menteri tentang penyerangan gerombolan DI/TII dan Permesta di daerah Sakkoli, Sulawesi yang menewaskan 300 orang.
23 September 1959
asli
1 lembar

1229 Daftar ichtisar mengenai keamanan tahun 1952-1953 dari Jawatan Kepolisian Jepara.
1952-1953
asli
1 sampul

1230 Surat dari Kepala Kepolisian Negara mengenai penyerobotan tanah erfpacht oleh RTI
13 Oktober 1953

asli
1 lembar

b. Hukum

1231 Berkas mengenai permohonan ampun tahanan R. Hamdani.
12 Januari 1950
tembusan
1 sampul

1232 Laporan mengenai sekitar gerilya dan tawanan Belanda dari Suku Maluku, Sunda - Kecil, Sulawesi dan Kalimantan
19 Juni 1950
asli
2 lembar

1233 Surat dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Ogan dan Kemering Ulu Keresidenan Palembang kepada Presiden mengenai kesulitan untuk diangkat menjadi hakim.

7 Juli 1950, September - November 1950
asli
1 sampul

1234 Surat dari Kepala Kepolisian Polisi Ciamis mengenai penembakan mati Bi"in seorang tahanan di Ciawi yang telah melakukan pembunuhan, pembakaran di daerah Panombangan terutama di daerah Surakarta.

19 Juli 1950
tembusan
1 sampul

1235 Surat dari Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia mengenai mewakili pemerintah dalam perkara sipil.

31 Agustus 1950
salinan
2 lembar

1236 Laporan ringkas Kepala Bagian Ekspedisi Kementerian Agama kepada PT Sekretaris Dewan Menteri mengenai kunjungan di tempat tahanan Nusakambangan.

16 Oktober 1950
salinan
1 sampul

1237 Berkas mengenai korupsi oleh pembesar-pembesar di pusat Kementerian - kementerian.

17 Oktober - 28 Desember 1950
asli
8 lembar

1238 Berkas mengenai penahanan Mr. D. Duurama.

19 October 1950
tembusan
1 sampul

1239 Berkas mengenai penangkapan Jan Kroonenburg oleh Perdana Menteri Belanda.

21 Oktober 1950
pertinggal
2 lembar

1240 Surat dari Kementerian Luar Negeri mengenai orang-orang Indonesia yang ditahan dalam penjara Kotabaru (Irian) sebagai tahanan politik.

23 Oktober 1950
asli

1 sampul

1241 Surat dari Kepala Jawatan Resersi Pusat kepada Sekretaris Khusus Panitia Pemerintah Indonesia di Singapura mengenai pengiriman R.Rachmat Suwandi bin H.Usup disertai proses verbal pemeriksaan.

02 November 1950
asli
1 sampul

1242 Berkas mengenai pertanyaan anggota-anggota DPR dari Fraksi PNI tentang penahanan pemimpin PNI Kalekedelo (Sulawesi Tengah), Haji Daeng Pawindo dengan tuduhan

3 November 1950 - 30 Oktober 1951
tembusan
2 lembar

1243 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Jaksa Agung pada Mahkamah Agung Indonesia mengenai daftar orang Belanda yang ditahan, beserta lampiran

04 November 1950
tembusan
1 sampul

1244 Berkas mengenai permintaan ijin kembali ke Minahasa atas nama W.J.Ratulangi, bekas Menteri Penerangan NIT.

3 Oktober - 20 November 1950
asli
1 sampul

1245 Berkas mengenai tahanan S.M Kosasih

16 Oktober 1950
pertinggal
1 sampul

1246 Surat-surat mengenai usul penetapan suatu perubahan dalam "Rijstordonnantie" 1948.

2 Desember 1950 - 7 Agustus 1951
asli
1 sampul

1247 Surat kepada Paduka tuan Komandan markas besar CPM mengenai penangkapan orang-orang di Jawa Barat dan Brebes, beserta lampiran.

16 Desember 1950
asli
1 sampul

1248 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua DPR-RI mengenai pertanyaan anggota DPR sdr. Moh.Hasan mengenai pembebasan orang hukuman, beserta lampairan.

24 Januari 1951
tembusan
3 lembar

1249 Berkas mengenai daftar tawanan rumah penjara Nusakambangan.

12 Februari - 28 Juli 1951
asli
1 sampul

1250 Berkas mengenai perkara rumahTjoa Eng Kho yang terletak di Jln.Lurus No.7 Bukittinggi.

1951 - 1952
asli
1 sampul

1251 Kumpulan Keputusan Presiden RI tentang keputusan masa hukuman narapidana.

1951 -1953
asli
1 sampul

1252 Berkas mengenai penangkapan Ting Po Kiok alias Ting Sing Ing di Bandung.

22 Februari 1951
asli
1 sampul

1253 Surat-surat mengenai permohonan pembebasan Mochtar Tamin yang ditangkap pada waktu Operasi Merdeka .

26 Februari 1951 - 28 Agustus 1952
asli
6 lembar

1254 Surat edaran Kejaksaan Agung mengenai pedoman penahanan, pengangkutan, pemeriksaan dan penempatan orang-orang tahanan.

23 Maret 1951

asli
1 sampul

1255 Surat Keputusan Panglima Tentara dan Teritorium IV Divisi Diponegoro mengenai

4 April -30 Juni 1951

asli
1 sampul

1256 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri mengenai laporan tahanan-tahanan militer di daerah Divisi III Jawa Barat.

21 April 1951
asli
1 sampul

1257 Berkas mengenai pengiriman tawanan ke Nusakambangan.

26 April 1951 - 9 Januari 1952

asli
1 sampul

1258 Surat Keputusan Panglima Tentara dan Teritorial IV/Div. Diponegoro tentang pemasukkan orang-orang tawanan ke kamp Ambarawa.
30 April - 2 November 1951
salinan
2 lembar

1259 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Kehakiman mengenai permintaan keadilan dari para pengacara perkara beserta lampiran.
9 - 15 Mei 1951
tembusan
6 lembar

1260 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepenjaraan mengenai pertanyaan apakah di dalam rumah penjara Struiswijk diperbolehkan mengadakan hubungan dengan luar.
21 Mei 1951
asli
5 lembar

1261 Surat dari Kepala Bagian Dinas Pengawasan Keselamatan Negara Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat kepada Perdana Menteri mengenai pembebasan orang-orang tahanan.
10 Juni 1951
asli
1 sampul

1262 Surat Keputusan Panglima Tentara & Teritorium III Jawa Barat mengenai pembebasan tahanan dari penjara Nusakambangan.
25 Juni 1951
asli
3 lembar

1263 Surat dari Kantor Gubernur Jawa Tengah kepada Staf "K" Pusat mengenai bekas tawanan Nusakambangan.
12 Juli - 31 Oktober 1951
asli
1 sampul

1264 Surat dari Acting Kepala Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai reaksi dari partai-partai dan organisasi masyarakat mengenai pembebasan 950 tawanan dan berhentinya Menteri Kehakiman Mr.Moh.Yamin.
31 Juli 1951
asli

1 sampul

1265 Berkas mengenai penahanan Pembantu Inspektur Polisi Lahallo dan Inspektur Polisi Oerip Soetanto dari Karesidenan Basuki.

31 Juli 1951 - 24 Desember 1951
tembusann
1 sampul

1266 Berkas mengenai penahanan anggota BBM (Supardi Anang).

6 Agustus 1951 - 24 November 1951
asli
8 lembar

1267 Instruksi Tentara Nasional Indonesia Komando Tentara/Territorium VI No.57/TTK/Inst/51.- tentang pemindahan tahanan dari Tandjung ke Bandjarmasin.

11 Agustus 1951
salinan
4 lembar

1268 Surat Keputusan Jaksa Agung No. as/6600 s/d No. as/6604 tentang pembebasan orang-orang tahanan.

18 Agustus 1951
asli
8 lembar

1269 Surat Perintah Komando Tentara dan Terrritorium VII Indonesia Timur tentang pemberangkatan tawanan RMS ke Nusakambangan, beserta lampiran.

22 Agustus 1951
asli
4 lembar

1270 Surat mengenai suara rakyat tentang penangkapan-penangkapan.

28 Agustus 1951
asli
1 sampul

1271 Surat dari Chung Hua Tsung Hui Bandung kepada Perdana Menteri mengenai penangkapan beberapa pemimpin dan guru-guru sekolah Tionghoa di Bandung , beserta lampiran.

31 Agustus 1951
asli
2 lembar

1272 Surat - surat mengenai pelarian sejumlah tawanan dari Rumah Pendjara Boyolali, Surakarta, Batang, Sragen, Kendal dan Djeneponto (Sulawesi),Nusakambangan dan Serang.

20 September 1951 - 24 Agustus 1955
asli
1 sampul

1273 Surat dari Menteri Agama kepada Perdana Menteri mengenai permohonan keluarga tawanan Jember.

25 September 1951
tembusan
1 lembar

1274 Surat permohonan Sdr. Soerdjaya kepada Dewan Menteri mengenai penahanan Sdr. Abdurahman Tjakrawijaya yang terseret Darul Islam.

27 September 1951
asli
1 sampul

1275 Surat dari Kepala Staf "K" Pusat kepada staf AD mengenai pengangkatan 235 orang tawanan dari Nusakambangan ke Jawa Barat, beserta lampiran.

31 September 1951
fotokopi
3 lembar

1276 Surat dari Perdana Menteri kepada Jaksa Agung tentang penangkapan anggota Seksi Keuangan DPR sdr. Hutomo Supardan.

6 Oktober 1951 - 22 November 1958
asli
4 lembar

1277 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian mengenai pertanyaan Ny. Sardju dan Mahindra sehubungan dengan penangkapan suami mereka.

10 Oktober 1951
asli
1 Berkas

1278 Surat dari pimpinan GPII wilayah Sumatera Utara mengenai penahanan A. Buchari ketua II GPII.

20 Oktober 1951
asli
2 lembaran

1279 Surat dari Angkatan Darat Teritorial Jawa Tengah/Div. Diponegoro mengenai tawanan SOB yang berasal dari pegawai pemerintah.

1 November 1951

tembusan
1 sampul

1280 Surat dari Menteri Agama kepada Perdana Menteri mengenai penahanan K. Taifur.
6 November 1951
asli
7 lembar

1281 Surat - surat mengenai pakaian untuk tahanan/tawanan di penjara Nusakambangan Cilacap.
6 November 1951 - 3 Januari 1952
pertinggal
2 lembar

1282 Surat-surat mengenai keadaan tawanan dan tahanan-tahanan melarikan diri dari Nusakambangan.
8 November 1951 - 18 Maret 1952
pertinggal
1 sampul

1283 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Jaksa Agung mengenai permohonan dari
10 November & 15 November 1951
salinan
2 lembar

1284 Berkas mengenai pelarian 46 orang bekas tawanan SOB yang diserahkan kepada polisi.
11 November - 20 Desember 1951
tembusan
5 lembar

1285 Berkas mengenai penangkapan Tengku Hasan Hanafiah dan Tengku Nya. Tjoet
19 November 1951 - 19 Maret 1952
asli
1 berkas

1286 Berkas mengenai permohonan pembebasan K.H.Mohd Ghozali yang ditahan oleh Mobile Brigade Bondowoso.
23 November 1951
asli
6 lembar

1287 Laporan mengenai tawanan-tawanan SOB dalam Karesidenan Kedu.
26 November 1951
tembusan

2 lembar

1288 Berkas mengenai permintaan kredit KSAD kepada DPPKP untuk pembayaran biaya perawatan tawanan Operasi "M" di T.T. I

4 Desember 1951
asli
1 sampul

1289 Surat dari Perdana Menteri kepada Jaksa Agung mengenai penahanan anggota pengurus Tjabang PNI Kotapradja Pekalongan bernama Kromolawi, beserta lampiran.

5 Desember 1951
tembusan
2 lembar

1290 Surat dari Kepala Polisi Propinsi Jawa Tengah Bagian Reserse kepada Komandan Teritorial Kamp Tawanan IV Ambarawa mengenai penyerahan Ahmad Broto.

13 Desember 1951
tembusan
1 sampul

1291 Berkas mengenai cara petugas kepolisian memperlakukan wartawan dalam proses penangkapan dan pengusutan.

28 Desember 1951
asli
1 sampul

1292 Surat mengenai tuntutan dikeluarkannya Patih Abdullah cs dari tahanan.

29 Desember 1951
salinan
1 lembar

1293 Surat dari Ahmad Sartola mengenai korupsi di daerah Lombok.

29 December 1951
asli
3 lembar

1294 Instruksi Kementerian Pertahanan Staf Umum AD tentang penangkapan pegawai pemerintah maupun partikelir kepada jawatannya guna ketentuan status mereka.

1952
asli
2 lembar

1295 SK Menteri Pertahanan tentang pengutusan anggota Kementerian Pertahanan untuk mencari keterangan mengenai anggota Angkatan Perang yang menjadi tahanan pemerintah Inggris di Singapura.

18 Januari 1952
asli
2 lembar

1296 Surat dari staf "K" Pusat kepada Staf AD mengenai pemindahan 7 orang tahanan tentara di Sigli, beserta lampiran.

28 Januari 1952
salinan
3 lembar

1297 Surat - surat kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai pemberontakan di rumah penjara Tegal dan Pati, Jawa Tengah, beserta lampiran.

13 Februari - 11 Desember 1952
salinan
1 sampul

1298 Berkas mengenai penyelesaian kasus tahanan lama.

12 April 1952 - 9 Maret 1955
pertinggal
1 sampul

1299 Berkas mengenai penyelesaian masalah tawanan SOB.

28 April 1952 - 20 September 1955
asli tembusan
1 sampul

1300 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai peristiwa penahanan 2 orang dari *British American Tobbaco* Lampung.

6 Mei 1952
asli
1 sampul

1301 Berkas tahanan SOB atas nama Sunarto, Kepala Desa Delanggu (Klaten) yang menjadi anggota Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI).

10 Mei - 1 Desember 1952
tembusan
1 lembar

1302 Surat dari Gubernur Kalimantan kepada ketua staf "K" Pusat Jakarta tentang *Doorgangskamp* Tentara Territorium VI Banjarmasin.

5 Juni 1952
salinan
1 sampul

1303 Berkas mengenai tahanan razia Agustus.

19 Juni - 11 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

1304 Surat dari Gubernur Jawa Tengah mengenai perkara terhadap Rais Rambe dan R.Hutagaol, pengawas Badan Rahasia RI.

06 Agustus 1952
salinan
4 lembar

1305 Berkas mengenai beberapa tahanan dari anggota Partai Sjarikat Islam Indonesia.
13 Agustus - 12 November 1952
asli
9 lembar

1306 Surat kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai laporan singkat tentang korupsi di Pabean *Oosthaven* (Teluk Betung).
26 Agustus 1952
tembusan
7 lembar

1307 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Ketua Staf "K" Pusat di Jakarta mengenai proses verbal tertangkapnya Padmo Sukirno alias Sukir yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap Komandan Muda Polisi Djogo Prajitno.
25 September 1952
salinan
1 lembar

1308 Laporan peninjauan Sdr.Hassan T/T III terkait penampungan para mantan tahanan SOB.
25 September 1952
asli
3 lembar

1309 Berkas mengenai permintaan ganti rugi H. Moenawar karena ditahan.
27 September - 8 Oktober 1952
asli
7 lembar

1310 Surat - surat mengenai daftar tawanan SOB dan keadaan tawanan dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2 Oktober 1952 - 3 Februari 1954
asli
3 lembar

1311 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Kehakiman mengenai desakan vonis terhadap kawan-kawan Sukarnosubroto dan Mansur anggota Dewan Pimpinan Tjabang Serikat Buruh Gula Tersanabaru, beserta lampiran.
9 - 20 Oktober 1952
asli
6 lembar

1312 Berkas mengenai sikap pemerintah terhadap protes dari berbagai organisasi massa sehubungan pengusiran pemerintah Belanda utusan PKI yang menghadiri Kongres
29 November 1952 - 02 Januari 1953
asli
1 sampul

1313 Surat dari Kepala Kepolisian Negara mengenai pelanggaran tidak mencatatkan nikah.
02 Desember 1952
salinan
5 lembar

1314 Berkas mengenai pengangkatan para hakim perwira pada Mahkamah Tentara Agung.
10 Desember 1952 - 31 Oktober 1956
asli
1 sampul

1315 Pengesahan Rancangan UU No. 22 Tahun 1952 tentang peraturan untuk menghadapi kemungkinan hilangnya surat-surat keputusan dan surat-surat pemeriksaan pengadilan.

12 - 17 Desember 1952
tembusan
5 lembar

1316 Surat-surat Menteri Kehakiman mengenai perkara perceraian M.Kuhn/Th.T.Petersen.
22 Desember 1952 - 29 Juni 1953
asli
1 sampul

1317 Berkas mengenai perselisihan tali air antara petani dengan perkebunan di Sumatera
30 Desember 1952 - 21 Mei 1953
asli
1 sampul

1318 Berkas mengenai tahanan orang-orang Belanda F.V.Haarstert dan F.Frederiks.
6 Maret - 22 Juli 1953
asli
1 sampul

1319 Kumpulan Naskah Keputusan Presiden mengenai penolakan pengurangan hukuman.
April - Mei 1953
salinan
1 sampul

1320 RUU tentang Peradilan urusan Kepegawaian.
6 Mei 1953
asli

1 sampul

1321 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pembongkaran paksa rumah-rumah anggota BTI di Sidorejo, beserta lampiran.

19 Agustus - September 1953
asli
4 lembar

1322 Surat dari Kepala Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai laporan tahanan.

27 Oktober 1953 - 3 September 1954
salinan
2 lembar

1323 Berkas mengenai kasus hukum penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW oleh tersangka Parija al.Prajitnowidjojo.

3 Januari 1954 - 24 April 1955
asli
7 lembar

1324 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian Dinas Reserse Kriminal kepada Perdana Menteri mengenai "Penangkapan Sdr. Sumbada"

7 Januari - 21 September 1954
asli
1 sampul

1325 Surat kawat dari Gubernur Propinsi Jawa Timur kepada Perdana Menteri mengenai penahanan pemimpin Surat Kabar *De Vrije Pers* E Evenhuis.

19 Januari 1954
pertinggal
4 lembar

1326 Surat-surat mengenai sengketa tanah antara Rd. Male Wiranatakusuma (Bupati Bandung) dengan pemerintah.

27 Januari 1954 - 7 Mei 1956
asli
1 sampul

1327 Surat dari Gubernur Sumatera Utara kepada Perdana Menteri mengenai daftar tawanan anggota Angkatan Perang yang terlibat dalam peristiwa Daoed Beureuh.

1 Februari 1954
asli
1 sampul

1328 Surat dari Sekjen DPR kepada Perdana Menteri mengenai penangkapan dan penembakan terhadap Anggota Partai Murba di Ciledug, Kelurahan Tangerang.

20 Februari - 31 Desember 1954
asli
1 sampul

1329 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman mengenai mempercepat *procedure* pemeriksaan perkara - perkara kriminal sipil dan militer yang penting dan aktuil.

23 Februari - 23 Maret 1954
salinan
2 lembar

1330 Surat-surat mengenai penahanan Presiden Direktur Pembangunan Industri Nasional Indonesia Ltd (INI).

4 Maret - 26 Juli 1954
asli
6 lembar

1331 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Kepala Biro Keamanan mengenai penangkapan pencetak uang palsu di daerah Pasuruan Jawa Timur. Nb:ada arsip foto.

7 Maret - 13 Juli 1954
salinan
1 lembar

1332 Surat Edaran dari Kejaksaan Agung kepada semua Kepala Kejaksaan PN mengenai penuntutan anggota-anggota perkumpulan-perkumpulan terlarang.

22 Maret 1954
fotokopi
4 lembar

1333 Surat pernyataan protes para tehnisi seluruh Propinsi Sumatera Selatan tentang penahanan beberapa tehnisi di Sumatera Selatan.

10 April 1954
salinan
1 lembar

1334 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai berdirinya Biro Pembela dan Pengatjara di Jakarta.

28 April 1954
asli
1 bendel

1335 Surat dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah kepada Perdana Menteri mengenai Peristiwa Bantajan di Bagan Siapi-Api.

12 Juni - 4 September 1954
salinan
1 sampul

1336 Surat kawat mengenai penahanan Inspektur Polisi II Sjakirin Lubis.

17 Juni 1954
pertinggal
1 sampul

1337 Surat dari Sekretaris Kepala Biro Keamanan kepada Ketua KKD mengenai surat peringatan ke-2 penangkapan pengurus "Sakti" cabang Tjidaun oleh camat.
21 Juni - 12 Oktober 1954
tembusan
6 lembar

1338 Surat-surat mengenai aksi rakyat (demonstran) atas tanah kebun Penyelidikan Technik Pertanian, Bandung.
3 Juli - 27 November 1954
pertinggal
1 sampul

1339 Surat-surat mengenai penangkapan K.Achmadi Amirudin di Kepandjen, seorang promotor gerakan DI di Jawa Timur, disertai Arsip Fotonya.
3 Juli - 20 September 1954
asli
1 sampul

1340 Surat-surat mengenai penahanan Sulaeman yang tersangkut perkara dengan orang Belanda di Bandung.
10 Agustus - 22 September 1954
tembusan
1 lembar

1341 Berkas mengenai larinya Lts. Andi Tjambo, bekas Komandan Kie II Bn 710.
18 Agustus 1954 - 05 Januari 1955
asli
1 sampul

1342 Surat-surat mengenai penahanan K.H. Dhofir, anggota DPRDS Kabupaten Djember.
19 Agustus 1954 - 31 Desember 1955
asli
1 sampul

1343 Surat dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Tengah kepada Perdana Menteri mengenai Penahanan yang melampaui batas.
19 Agustus - 1 Oktober 1954
asli
1 sampul

1344 Surat dari Pengurus Organisasi Pedagang Kecil 7 Ulu-Palembang kepada Ketua Mahkamah Agung mengenai tindakan polisi yang telah membersihkan gubuk-gubuk pedagang.
27 Agustus 1954

salinan
1 sampul

1345 Berkas mengenai penahanan atas H.M. Sanusi dan Muchtar pengurus Nadhatul Ulama kecamatan Ciwaringin oleh militer Cirebon.
22 September 1954 - 5 Oktober 1955
asli
1 sampul

1346 Surat dari Kepala Bagian Dinas Reserse Kriminal kepada Perdana Menteri mengenai penangkapan Katjo Daeng Lao serta kawannya yang merupakan gerombolan pengacau.
18 Oktober 1954
asli
1 sampul

1347 Berkas mengenai resolusi pembatalan tuntutan terhadap D.N. Aidit.
17 Oktober - 16 November 1954
asli
1 sampul

1348 Surat dari Kepala Bagian Hukum Pidana dan Ketentraman kepada Wakil Perdana Menteri I mengenai penangkapan dan penahanan Hardjotafsir dan Soekelan, pengurus RK Ngaglik sawah Timur.
27 Oktober 1954
tembusan
4 lembar

1349 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai tindakan alat kekuasaan negara di daerah operasi di Aceh.
13 Desember 1954 - 21 Januari 1955
asli
1 sampul

1350 Berkas mengenai penahanan Gusti Alamuljakin bin Almarhum Pangeran Kartajuda.
22 Desember 1954 - 8 Agustus 1955
tembusan
1 sampul

1351 Buku daftar tamu Kementerian Kehakiman.
1955 - 1957
asli
1 buku

1352 Surat-surat mengenai penahanan anggota Sarbupri dari C.O Sumberwuni (Kalibaru).
8 Januari - 28 Maret 1955
asli
1 sampul

1353 Surat-surat mengenai penyelundupan kopi dan kopra di Kalimantan.

14 Mei 1955 - 4 Januari 1956
pertinggal
1 sampul

1354 Surat dari Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung mengenai M Isa Ansari, Ketua Masjumi wilayah Jawa Barat yang ditahan di rumah penjara Sukamiskin Bandung.
22 September 1955
tembusan
1 sampul

1355 Surat-surat mengenai penahanan Lie Kim Hok , Kepala Kantor Swapradja Amanuban.
8 Desember 1955 - 9 Januari 1956
asli
1 sampul

1356 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada KSAD mengenai permohonan pembebasan Sdr. Hadji Abdul Hamid Ketua P.S.I.I Pangkadjene.
12 Desember 1955
asli
4 lembar

1357 Surat-surat mengenai persoalan tanah di daerah Surakarta dan Pekalongan.
10 Januari - 22 Oktober 1956
tembusan
1 sampul

1358 Surat-surat mengenai sengketa tanah Keprabon di Kabupaten Bandung.
26 Maret 1956 - 25 Juli 1957
asli
1 sampul

1359 Berkas mengenai informasi dari seseorang yang menamakan dirinya "Informan yang jujur dan tegas" (surat kaleng) seputar masalah kehakiman.
26 September - 19 Oktober 1956
asli
6 lembar

1360 Surat-surat mengenai penyelesaian sengketa tanah Pamanukan dan Tjiasem Lands (PT P&T Lands) oleh pemerintah.
8 Oktober 1956 - 11 Januari 1957
salinan
9 lembar

1361 Surat dari sekretariat Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri tentang pengangkatan Hakim - Anggota Mahkamah Agung .
11 Juni - 1 Juli 1957

asli
1 sampul

1362 Surat dari Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung mengenai penangkapan anggota TII (Lampung-Sumatera Selatan).

28 Februari 1958
asli
1 sampul

1363 Berkas mengenai Rancangan PP Penguasa Perang Pusat tentang Pengadilan Tentara Daerah Pertempuran.

24 April - 29 Mei 1958
konsep
1 sampul

1364 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan dan Panitia Penampungan Korban Kekacauan Daerah mengenai Instruksi Pelaksanaan Kerja P.N.P.K.K./P.P.K.K.D. untuk dipergunakan sebagai pedoman di dalam melaksanakan usaha penampungan ex. tawanan SOB/ Gerombolan yang menverah.

24 Juli 1958
salinan
1 sampul

1365 Daftar pegawai negeri yang dituntut perkara korupsi.

2 November 1958
fotokopi
4 lembar

1366 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penahanan terhadap beberapa anggota DPR dan pengurus Masyumi Wilayah Jawa Barat.

12 November 1958
salinan
2 lembar

1367 Berkas tentang kasus Tjuju Suharso, pegawai Biro FINEK yang dipekerjakan pada *Materials Development Board* .

21 Agustus 1959 - 22 Maret 1960
tembusan
1 sampul

c. Peralatan Keamanan

1368 Surat dari Kepala Jawatan Perkebunan kepada Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai Penarikan Penjagaan Polisi dari Daerah *Onderneming-onderneming* di Daerah Cianjur.

30 Oktober 1950
tembusan

1 lembar

1369 Berkas mengenai penambahan tenaga dan alat-alat kepolisian di Kalimantan Selatan.
2 November 1950
salinan
3 lembar

1370 Maklumat Pemerintah kepada badan organisasi atau orang yang menyimpan senjata yang belum ada ijin untuk datang ke kantor-kantor kawedanan.
14 November 1950
pertinggal
1 sampul

1371 Berkas mengenai penarikan kembali pinjaman senjata api untuk pamong praja.
20 November 1950 - 29 Maret 1951
asli
1 sampul

1372 Laporan mengenai sikap Amir Fattah terhadap ma'lumat penyerahan senjata dari Residen Pekalongan Tertanggal 29 - XI - 1950.
29 November & 1 Desember 1950
asli
2 lembar

1373 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian mengenai senjata api untuk Detasemen Polisi Pamong Praja Yogyakarta, beserta lampiran.
30 November 1950
tembusan
2 lembar

1374 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada KSAD mengenai perintah untuk mengosongkan tangsi polisi di Tondano, beserta lampiran.
11 Desember 1950
asli
3 lembar

1375 Peraturan Komandan Militer Kota Besar Jakarta Raya tentang penggunaan gedung-gedung militer dalam daerah KMKB Jakarta Raya.
20 Desember 1950
tembusan
2 lembar

1376 Berkas mengenai pengadaan asrama polisi di Bogowonto Jogjakarta oleh Kepolisian Jogjakarta.
18 Januari - 12 April 1951
asli
1 sampul

1377 Maklumat Staf "K" Provinsi Sumatera Tengah tentang pendaftaran senjata api.

19 Januari - 16 Agustus 1951
asli
5 lembar

1378 Berkas mengenai pengadaan sarana dan prasarana penjagaan Nusakambangan. Nb: terdapat arsip peta.
25 Januari 1951 - 12 Januari 1952
asli
1 sampul

1379 Surat dari Kepala Kantor Perwakilan Gubernur Maluku kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pendaftaran senjata api biasa dan luar biasa , beserta lampiran.
12 Februari 1951
asli
3 lembar

1380 Peraturan Panglima Tentara dan Territorium IV/ Divisi Diponegoro No. S/T/B.3/D.III/51 tentang pengumpulan umum mengenai uang atau barang.
08 Maret 1951
tembusan
4 lembar

1381 Berkas pengangkatan mobrig dengan kapal terbang AURI.
24 Maret - 16 Mei 1951
pertinggal, salinan
8 lembar

1382 Surat Edaran Panglima Tentara dan Teritorium IV/Div.Diponegoro tentang senjata api, mesiu, bahan peledak dan obat peledak.
26 Maret 1951
asli
8 lembar

1383 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai Hayup/Tabalong Kiwa Estate Kalimantan.
3 - 10 April 1951
asli
7 lembar

1384 Peraturan Panglima Tentara dan Teritorium IV/Div. Diponegoro No.8A.K/B.3/D.III/51 tentang tambahan dan perubahan dalam peraturan senjata api teritorium IV.
19 April 1951
asli
2 lembar

1385 Berkas mengenai pengosongan asrama polisi Pekambingan Denpasar.
6 Maret - 23 Agustus 1951
asli

1 sampul

1386 Surat dari Sekretaris Staf " K" Pusat kepada Kepala Jawatan Kepolisian Negara Pusat mengenai bengkel untuk memperbaiki senjata api serta membuat mesiu.

27 Juni - 13 Desember 1951
asli
1 sampul

1387 Surat-surat mengenai pelaksanaan pembubaran asrama-penampungan di Jawa Barat oleh Staf "K" Propinsi Jawa Barat.

19 - 31 Desember 1951
asli
1 sampul

1388 Surat dari Staf "K" Pusat kepada *General Motors Overseas Corp c* abang Jakarta mengenai daftar 25 truk.

28 Agustus 1951
pertinggal
4 lembar

1389 Berkas mengenai permintaan kembali penjara-penjara dan ruangan-ruangan yang dipinjamkan kepada tentara.

19 Januari 1952
tembusan
9 lembar

1390 Instruksi Kepala Polisi Propinsi Sumatera Tengah mengenai perintah mengumpulkan senjata api gelap di Kabupaten Samudera daerah Padang Pariaman.

30 Januari 1952
salinan
2 lembar

1391 SK Menteri Pertahanan no.B/MP/110/52 tentang penugasan Letnan A.L.Mawikere ke Singapura.

2 Februari 1952
asli
4 lembar

1392 Berkas mengenai *cevrolet carrys* uburban untuk staf keamanan.

9 Februari - 11 Maret 1952
asli
1 sampul

1393 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara mengenai memasukkan *signal Rockets* dari Zurich.

12 Mei 1952
tembusan
1 lembar

1394 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai bantuan senjata dari USA untuk Kepolisian Negara.

12 Mei 1952
konsep
1 lembar

1395 Berkas mengenai gedung-gedung di atas persil erfpacht, Megamendung.

30 Agustus 1951 - 2 September 1952
asli
1 sampul

1396 Berkas mengenai permohonan kuda tunggangan.

9 April - 19 Juni 1952
salinan
5 lembar

1397 Berkas mengenai pemeriksaan/pemeliharaan jeep staf keamanan.

11 Agustus 1952
asli
3 lembar

1398 Surat Perdana Menteri kepada Menteri Pertahanan mengenai pembelian senjata.

26 Agustus 1952
tembusan
6 lembar

1399 Kumpulan Surat Keputusan Menteri Pertahanan .

2 September 1952 - 12 Desember 1952
tembusan
2 lembar

1400 Surat dari Kepala Bagian Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pesanan amunisi.

8 Desember 1952
asli
2 lembar

1401 Surat Keputusan Gubernur Sunda Kecil tentang pemberian ijin memiliki senjata api.

22 Oktober 1952
salinan
2 lembar

1402 Seri Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara mengenai impor senjata dan peluru.

28 Februari 1952 - 21 Juli 1955
tembusan
1 sampul

1403 SK Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat tentang pemasukkan senjata api dari New York.

29 Desember 1951
tembusan

2 lembar

1404 Berkas mengenai persenjataan pegawai polisi kehutanan.
2 Juni 1951 - 24 November 1952
asli
1 sampul

1405 Berkas mengenai permohonan pembelian *Centrifugaalpomp* untuk penjara Lowokwaru di Malang.
5 Desember 1952 dan 23 Desember 1952
asli
2 lembar

1406 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pinjaman revolver untuk Menteri Perekonomian.
5 Desember 1952
tembusan
2 lembar

1407 Berkas mengenai pengaduan akibat adanya UU sewa menyewa perumahan (SOB Maatregel Militair Belanda).
18 Desember 1952
tembusan
1 sampul

1408 Surat Edaran Jawatan Kepolisian Negara tentang pemakaian uang.
24 Desember 1952
asli
1 lembar

1409 Surat - surat mengenai tambahan mobil Brigade untuk menjaga keamanan Negara.
03 Februari 1953 - 22 April 1954
asli
1 sampul

1410 Nota Perdana Menteri mengenai keamanan dan ketertiban umum di seluruh Indonesia.
20 Februari - 03 Maret 1953
asli
1 sampul

1411 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Jaksa Agung mengenai senjata untuk Hakim dan Jaksa.
24 Maret 1953
asli
2 lembar

1412 Berkas mengenai gamelan *Traiding Coy* .

26 Maret 1953
asli
2 lembar

1413 Berkas mengenai pemberian revolver dan peluru untuk para pegawai pamong praja.
10 Juni 1953
tembusan
1 sampul

1414 Berkas mengenai pengiriman senjata api ke luar daerah Jakarta Raya.
25 Maret - 6 Juli 1953
asli
7 lembar

1415 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pengembalian senjata api yang dipinjam kepada polisi.
12 Agustus 1953
asli
1 sampul

1416 Berkas mengenai permohonan kembali senapan angin milik Soekarman, Djuru Rawat B.P. Kusta di Solo.
1 April 1954 - 7 Februari 1955
asli
1 sampul

1417 Surat dari Menteri Urusan Kesedjahteraan Negara kepada Menteri Pertahanan tentang penyampaian surat pengaduan mengenai pembelian kapal-kapal untuk Angkatan Laut RI di luar negeri.
9 Juli 1954
tembusan
2 lembar

1418 Surat Dari Perdana Menteri kepada Kepala Jawatan Gedung-gedung Negeri mengenai Persenjataan Polisi Perusahaan Percetakan Kebayoran N.V.
7 - 17 Oktober 1955
asli
1 sampul

1419 Berkas mengenai "Pampasan Perang Dengan Jepang"
16 - 21 Januari 1958
salinan
1 sampul

1420 Notulen Sidang Panitia Ad-hoc Dewan Menteri Urusan Barang-Barang Peninggalan Peperangan tanggal 30 April 1958.

16 Mei 1958
tembusan
1 sampul

1421 Surat Keterangan mengenai barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh Jawatan Kepolisian Negara.

24 dan 26 November 1958
asli
1 sampul

1422 Surat dari Kepala Bagian Umum Menteri Pertahanan mengenai penawaran senjata *Antromex Schaan Swiss* .

27 April 1959
pertinggal
1 sampul

d. Pertahanan

1423 Berkas Mengenai Ex. Komando Pertahanan Total.

2 Januari 1950 - 9 Maret 1951
asli
1 sampul

1424 Surat dari Sekjen Kementerian Pertahanan kepada Semua Kementerian mengenai daerah - daerah yang termasuk dalam wilayah maritim Angkatan Laut.

6 Januari 1950 - 6 September 1955
asli
4 lembar

1425 Radep Harian Bureau Administratie Techniek I.K.P. No. 167 s/d 182 dari tanggal 12 s/d 30 September 1950 sekitar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Umum.

12 - 30 September 1950
asli
1 Sampul

1426 UU Darurat No. 33 tahun 1950 untuk mencabut kembali UU No. 6 Tahun 1950 (lembaran Negara No. 7) tentang penyerahan kekuasaan dan kewajiban militer yang ada pada gubernur pada instansi sipil.

31 Oktober 1950
asli
6 lembar

1427 Instruksi PMT No. 46 Komando Tentara dan Territorium III Jawa Barat tentang pembentukan Komisi Penerimaan Pejuang.

15 November 1950
asli
3 lembar

1428 Surat dari KSAD kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pembatalan surat penetapan no.243/KSAD/PNT/50 tentang operasi "Merdeka".
22 - 30 November 1950
asli
6 lembar

1429 Surat Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat kepada Menteri Dalam Negeri mengenai kewenangan pemberian surat ijin untuk berburu.
9 Januari 1951
asli
3 lembar

1430 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf Angkatan Perang mengenai pemeliharaan keamanan terhadap partikulir.
3 Februari 1951
tembusan
3 lembar

1431 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf "K" mengenai Peraturan kekuasaan militer (Pusat).
22 Februari 1951
asli
1 sampul

1432 Instruksi Panglima Tentera dan Territorium I tentang Penertiban Lalu Lintas Tentara.
15 Maret - 24 April 1951
tembusan
7 lembar

1433 Surat dari Sekjen Kementerian Pertahanan kepada Sekretaris Kabinet Presiden mengenai keadaan di penataran angkatan laut dan untuk memperbaikinya, lampiran
17 Mei 1951
salinan
3 lembar

1434 Resolusi Rakyat Pinrang agar Brigade Hasanuddin diberikan tugas menjaga keamanan di daerah Pinrang.
19 Mei 1951
asli
6 lembar

1435 UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bjzondere Strafbepalingan*" (*Staatsblad* 1948 No. 17) & UU RI dahulu No. 8 tahun 1948.

1 September 1951
fotokopi
1 sampul

1436 Surat dari Menteri Pertahanan kepada KSAD mengenai rencana 100 bataliyon dari Angkatan Darat.
19 Oktober - 22 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

1437 Surat dari Gubernur Jawa Tengah kepada Ketua staf "K" Pusat Jakarta mengenai pembagian daerah Operasi Banteng.
12 Desember 1951
fotokopi
3 lembar

1438 Surat dari Kementerian Pertahanan Bagian V Militer mengenai daerah pertempuran di Jawa Timur , Jawa Barat dan Sumatera.
1952
asli
1 sampul

1439 Surat dari Sekretaris Staf "K" Pusat kepada semua anggota Staf "K" Pusat mengenai kesimpulan sidang Staf "K" Propinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 1951.
08 Januari 1952
tembusan
1 sampul

1440 Surat dari Ketua Staf "K" Sumatera Tengah kepada staf "K" Pusat mengenai bantuan militer.
6 Maret 1952
tembusan
1 lembar

1441 Berkas mengenai nota keamanan dari DPRDS Propinsi Jawa Barat.
14 - 24 April 1952
asli
1 sampul

1442 Berkas mengenai Operasi Merdeka Propinsi Maluku.
21 Juni 1952 - 01 Desember 1952
tembusan
1 lembar

1443 Surat undangan rapat di Kementerian Pertahanan mengenai soal-soal istimewa dan perundingan koordinasi *"intelligence* ".
03 - 08 Juli 1952
asli
2 lembar

1444 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Direktur Penataran Angkatan Laut mengenai penyampaian 5 exemplar salinan surat edaran tanggal 20 Juni 1950 Nomor: 3966/50, n.b. tidak ada lampiran.

15 - 30 Juli 1952
konsep
2 lembar

1445 Berkas mengenai Intruksi dan Peraturan Kekuasaan Militer Terr. III tentang Kewajiban Kerjasama antara Alat-alat Kekuasaan Negara dan Rakyat di Territorium III.

23 Juli 1952
salinan
1 sampul

1446 Pengumuman Sekretaris Dewan Menteri No.21 mengenai RUU tentang dasar-dasar susunan dan tugas alat perlengkapan yang diberi kewajiban menyelenggarakan pertahanan.

25 Juli 1952
tembusan
3 lembar

1447 Berkas mengenai pemasukan Kawedanan Kepulauan Tudjuh (Natuna, Anambas dan Tembelen) dari wilayah T&T I ke dalam wilayah T&T VI.

28 Juli 1952 - 23 januari 1953
salinan
1 sampul

1448 Berkas mengenai peraturan pemerintah tentang Dewan Kehormatan Militer.

11 Agustus - 11 September 1952
asli
1 sampul

1449 Berkas mengenai perundingan antara RI dengan Nederland mengenai Misi Militer Nederland di Indonesia, beserta lampiran.

13 Desember 1952 - 28 November 1953
tembusan
1 sampul

1450 Berkas mengenai pendapat PKI tentang pembangunan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Indonesia, dengan lampirannya.

23 Februari - 22 Juni 1953
pertinggal
7 lembar

1451 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai surat perintah Divisi T&T III tentang tindakan militer.

16 April - 20 Mei 1953
asli
3 lembar

1452 Surat Perintah No.122/53 Angkatan Darat Tentara dan Territorium IV Co Gerakan Banteng tentang latihan camat/lurah.

4 Juli 1953
asli
3 lembar

1453 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1953 tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian Pertahanan.

21 September - 5 November 1953
tembusan, pertinggal
1 sampul

1454 Jawaban Menteri Penerangan pada konferensi pers 22 Oktober 1953 terhadap pertanyaan wartawan masalah pertahanan dan lain sebagainya.

22 Oktober 1953
fotokopi
1 sampul

1455 Berkas mengenai Penetapan Menteri Pertahanan No. 126/M.P./1949 tanggal 10 Desember 1949 tentang Organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang RI.

31 Oktober 1953
salinan
4 lembar

1456 Ralat Peraturan Militer Nomor: 4 Plm/T.V/Perat/53. tanggal 31 Juli 1953 pada sub 1.

07 November 1953
pertinggal
1 lembar

1457 Peraturan Militer Panglima Territorium V "Brawidjaja" Nomor: 005 Plm/T.V/Perat/53 tentang pencabutan Peraturan Militer Nomor 2 Bs/Di. I - 51/Per. tanggal 2 Maret 1951.

09 November 1953
asli
1 sampul

1458 Peraturan Menteri Pertahanan No. MP/A/910/53 tanggal 24 November 1953 menetapkan peraturan tentang Kabinet Menteri Pertahanan.

1 - 7 Desember 1953
tembusan
1 sampul

1459 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota parlemen mengenai pengumuman Menteri Pertahanan mengenai penyelesaian AURI.

4 - 16 Februari 1954
asli
1 sampul

1460 Surat -surat mengenai razia militer di Karang Nunggal Jawa Barat.

25 Februari - 21 Mei 1954

asli
7 lembar

1461 Laporan Kepala Polisi Wilayah Sumbawa Besar no 3/LP.
19 April 1954
asli
4 lembar

1462 Surat dari KSAD kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian Perintah Harian KSAD Nomor 1/KSAD/PH/54 seputar penyelesaian peristiwa 17 Oktober.
26 Juli - 19 Agustus 1954
asli
6 lembar

1463 Berkas mengenai penetapan KSAD untuk anggota CTN akhir tahun 1951.
24 Februari - 20 Agustus 1955
asli
1 sampul

1464 Berkas mengenai rancangan Keppres tentang perubahan daerah Territorium III dan pembentukan Territorium VIII (Ibukota dan sekitarnya).
07 Mei 1955
asli
1 sampul

1465 Resolusi DPRDS Daerah istimewa Bulongan tentang permintaan penempatan Polisi Perairan di Tarakan.
4 Juni 1955
asli
1 sampul

1466 Surat dari Kepala Biro Keamanan kepada Bupati Kabupaten Kota Baru mengenai resolusi permintaan bantuan militer untuk Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
09 Juni - 05 Juli 1955
asli
5 lembar

1467 Surat dari KSAL kepada Perdana Menteri mengenai latihan kapal-kapal Angkatan Laut RI di perairan Bali.
13 September 1955
asli
1 sampul

1468 SK Menteri Pertahanan No MP/B/75/55 tentang Penunjukan Mayor Sugiharto mendampingi Wakil Presiden RI ke India.
17 November 1955
asli
1 sampul

1469 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai putusan pemerintah mengenai daerah SIAK dari daerah Barter menjadi daerah Ic.

12 Desember 1955
asli
3 lembar

1470 Berkas mengenai perjanjian kerjasama antara AURI dan Angkatan Udara India.

18 Februari - 9 Mei 1956
tembusan
1 sampul

1471 Surat dari Kepala Biro Keamanan kepada Menteri Pertahanan mengenai pelaksanaan bantuan militer di Aceh oleh tentara dan polisi negara.

29 Maret - 3 April 1956
tembusan
1 sampul

1472 Berkas mengenai tanggapan pemerintah atas pernyataan SOBSI tentang latihan perang negara SEATO di Laut Jawa.

2 Oktober - 25 Oktober 1956
asli
7 lembar

1473 Berita Interogasi Komando Operasi Angkatan Darat Menado terhadap Pembantu Letnan Udara I ex anggota AUREV Permesta.

26 November 1956
salinan
6 lembar

1474 Surat dari KSAD kepada Vide Daftar Distribusi mengenai penyampaian risalah rapat Finec Penguasa Militer Seluruh Indonesia, disertai lampiran

15 Juli 1957
pertinggal
1 sampul

1475 Surat dari Perdana Menteri kepada KSAD mengenai keamanan daerah Toraja.

09 Mei 1958
asli
1 lembar

1476 Surat Kementerian Pertahanan mengenai penyerahan arsip dan dokumen Sekretariat PMT (Penguasa Militer Kementerian Pertahanan).

11 Juni 1958
tembusan
2 lembar

1477 Berkas mengenai Risalah Operasi operasi militer yang dilakukan selama tahun 1958.

4 Juli - 14 Agustus 1958

asli
1 sampul

1478 Berkas mengenai Keputusan Sidang Pleno Dewan Nasional ke XI tentang masalah penyelesaian dan pemulihan keamanan untuk kewaspadaan nasional.
23 Oktober 1958
asli
5 lembar

1479 Laporan rapat Penguasa Perang Pusat dengan Penguasa Perang Daerah sehubungan dengan masa berlakunya keadaan perang.
27 Oktober 1958
asli
8 lembar

1480 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengani Konferensi Pertahanan Militer di Canbera.
19 November 1958
asli
1 lembar

1481 Surat dari Perdana Menteri kepada KSAD mengenai pencabutan peraturan Penguasa Perang Pusat daerah Swatantra II Nias.
11 Desember 1958
pertinggal
1 sampul

1482 Instruksi Kementerian Pertahanan Staf AD mengenai Organisasi, Tugas dan Tata Cara Kerja : Inspektorat Jenderal Teritorial dan Perlawanan Rakyat (ITDJENTEPE), Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakyat (ITTEPE), Pembantu Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakyat (PITTEPE), Perwira Urusan Teritorial (PUTER), Bentara Urusan Teritorial (BUTER)
14 April 1959
pertinggal
1 sampul

1483 Surat dari AD Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara kepada KSAD mengenai penyampaian rekapitulasi kebutuhan - kebutuhan dalam rangka penyelesaian/penampungan pelepur - pelepur DI/TII di derah KODAM - SST
26 September 1959
salinan
2 lembar

1484 Surat-surat mengenai kejadian yang terkait dengan penetapan Peraturan Penguasa Perang Pusat.
23 Oktober - 21 Desember 1959
asli
1 sampul

e. Anggota Kemiliteran

1485 Laporan dari Kepala Polisi Negara Detachement Brebes kepada Komandan Batalion 2.XI.III mengenai tindakan anggota tentara yang mencemarkan nama baik.

19 Mei 1950
asli
4 lembar

1486 Surat-surat mengenai pemukulan pegawai Bea dan Cukai yang sedang melakukan tugas oleh seorang anggota tentara Bangka Belitung Riau.

30 september 1950
asli
4 lembar

1487 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Perdana Menteri mengenai permohonan keputusan yang tepat tentang gerilya Apri di Sulawesi Selatan, n.b lampiran tidak ada.

12 Oktober 1950
tembusan
1 lembar

1488 Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf Angkatan Perang RI mengenai keluhan rakyat Leles akibat gangguan tentara APRIS.

16 Oktober 1950
asli
1 sampul

1489 Surat-surat mengenai keadaan *verzamelings* Kamp. V atau Batalyon VIII Bandung dan Kamp. I serta Kamp. II Cimahi.

24 Oktober 1950
salinan
9 lembar

1490 Surat dari Ketua Tata Usaha Sekretariat Perdana Menteri kepada Kepala Staf Angkatan Perang RI mengenai kelakuan anggota Batalion Maladi.

28 Oktober 1950
salinan
3 lembar

1491 Surat dari Kepala Jawatan Kepolisian Indonesia kepada Kepala Staf AP mengenai pembubaran Barisan Polisi Negara Jawa Timur.

4 November 1950
tembusan
1 lembar

1492 Surat-surat mengenai pejuang yang ingin masuk APRI, Polisi dan ARTP serta penyerahan senjata api di Jawa Timur.

5 Desember 1950 - 1 Februari 1951

asli
1 sampul

1493 Surat-surat mengenai gerilyawan Sulawesi Selatan.
7 Desember 1950
asli
8 lembar

1494 Surat-surat mengenai kecurangan yang dilakukan oleh Lettu Marzuki.
15 Desember 1950
asli
9 lembar

1495 Surat dari Pembantu Komisaris Besar Polisi Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai tindakan tentara dari Batalion Kalahitam kepada seorang pegawai Komando Polisi bernama Suwardjono.
29 Desember 1950
asli
4 lembar

1496 Berkas mengenai bundel penetapan KSAD untuk anggota CTN akhir tahun 1951.
1951
asli
1 sampul

1497 Instruksi Nomor. 05/TTK/Instr./5 Panglima Tentara dan Teritorium VI tentang tenaga sukarela yang akan menjadi tentara dan polisi.
20 Januari 1951
asli
5 lembar

1498 Surat dari Komandan Corps Polisi Militer kepada Wakil Perdana Menteri mengenai hasil dari Muktamar Muhammadiyah.
22 Januari 1951
asli
4 lembar

1499 Surat dari Markas Besar AD Corps Tjadangan Territorial kepada KSAD mengenai permintaan pemerintah tentang *nominatieve staat* anggota tentara luar formatie.
27 Januari 1951
tembusan
1 lembar

1500 Surat-surat mengenai ARTP .
6 Februari - 25 Agustus 1951
asli
1 sampul

1501 Berkas mengenai rencana mempekerjakan tenaga-tenaga bekas pejuang terutama bekas TNI (Corps Cadangan) Phase Pertama.

07 February 1951
pertinggal
1 sampul

1502 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Sekjen Kementerian Pertahanan mengenai berkas Mayor Joesoef, Kepala Depot Obat Tentara Jawa Barat di Jakarta.

3 Maret 1951
asli
5 lembar

1503 Peraturan Panglima T&T IV Divisi Diponegoro tentang larangan adanya gerombolan/perkumpulan yang menyerupai organisasi angkatan perang dan organisasi pemerintah lain yang bersenjata.

3 Maret 1951
fotokopi
1 sampul

1504 Surat Edaran dari Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung Indonesia kepada Semua Panglima T&T tentang pengusutan dan mengadili terhadap anggota *Voorlopige Nederl Militaire Missie* (V.N.M.M.) yang melanggar hukum.

2 April 1951
asli
4 lembar

1505 Surat dari Komisaris Urusan Koperasi Urusan Pejuang RI (UPRI) seluruh Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai pembentukan satu organisasi yaitu Urusan Koperasi.

09 Mei 1951
asli
3 lembar

1506 Surat Keterangan dari Panglima Territorium Sumatera mengenai data diri Sjarif Usman mantan Kepala staf P. TNI Komando Sumatera.

01 Juni 1951
fotokopi
2 lembar

1507 Laporan Bulanan (Juni-September) Komando Tentara dan Territorium VII Indonesia Timur Komando Pasukan "D".

1 Juni - September 1951
asli
4 sampul

1508 Surat dari Biro Rekonstruksi Nasional Pusat kepada Ketua Staf "K" Pusat mengenai masalah penyelesaian pemuda-pemuda yang berada di ARTP.

16 Agustus 1951 - 5 April 1952
asli
1 sampul

1509 SK Gubernur Jawa Tengah tentang orang-orang yang ditetapkan menjadi anggota *Verhoorploeg* cabang Magelang dan cabang Kebumen sebagai tenaga tambahan.
14 September 1951
asli
2 lembar

1510 Memorie sehubungan dengan penyerahan Kepolisian Propinsi Sumatera Tengah oleh Pembantu Komisaris Besar Polisi Ahmad Bestari.
21 September 1951
asli
1 sampul

1511 Surat-surat mengenai peristiwa Kepolisian Kentong.
24 September - 30 Oktober 1951
tembusan
5 lembar

1512 Surat dari Sekretaris Staf "K" Propinsi Jawa Barat kepada Staf "K" Pusat mengenai risalah rapat Staf "K" Pusat.
13 & 18 Oktober 1951
asli
8 lembar

1513 Surat-surat mengenai permohonan bantuan oleh Panitia Penyusun Tenaga & Usaha. Ex. Pejuang "Swarnadipa"
30 November 1951 & 25 Maret 1952
asli
5 lembar

1514 Surat-surat mengenai Kepala Polisi Kabupaten Sinamar Sidi Mahjudin yang melarang anggota polisi dibawahnya untuk turut serta dalam perayaan hari Angkatan Perang ke
31 Desember 1951 - 21 Agustust 1952
asli
1 sampul

1515 Surat mengenai Konggres Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata Seluruh Indonesia (PERBEPSI).
6 Februari 1952 - 6 April 1954
pertinggal
1 sampul

1516 Berkas mengenai Rancangan UU dan RPP mengenai ketentaraan.
03 Maret - 11 Agustus 1952
asli
1 sampul

1517 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai hubungan ex KNIL dan ex CTN di Sulawesi.

10 Maret 1952
asli
4 lembar

1518 Surat-surat mengenai peristiwa Kolonel Bambang Supeno.

11 April - 10 Oktober 1952
asli
9 lembar

1519 Berkas mengenai RUU tentang penetapan UU Darurat No.13 tahun 1955 tentang pencabutan & penggantian UU No.14 Tahun1953 tentang perlakuan terhadap anggota angkatan perang yang diperhentikan karena tidak memperbarui ikatan dinas.

6 Mei 1952 - 22 September 1959
asli
1 sampul

1520 RUU tentang Anggota Ketentaraan.

6 Mei 1952 - 20 Mei 1953
asli
1 sampul

1521 Surat pengantar dari Kepala Bagian Dinas Security kepada Perdana Menteri mengenai perpecahan di kalangan organisasi-organisasi bekas angkatan Perang di Sumatera Tengah.

05 Juni 1952
salinan
7 lembar

1522 Surat dari Sekretaris Staf Umum Angkatan Darat kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai penyampaian surat Staf Umum Angkatan Darat Nomor. 281/Rhs/SU/52.

19 & 22 Juli 1952
asli
3 lembar

1523 Surat dari Menteri Sosial kepada Staf "K" Pusat Jakarta mengenai rencana penyelesaian penyaluran ex-pejuang BBM dan Banteng-Kebenaran di Pager Alam, Sumatera Selatan.

25 July 1952
pertinggal
6 lembar

1524 Surat-surat mengenai beberapa tulisan tentang persoalan di sekitar Angkatan Darat.

13 Agustus 1952
asli
1 sampul

1525 Surat dari Ajudan Perdana Menteri kepada KSAD mengenai upacara timbang terima Ko.Territorial II di Palembang.

29 Agustus 1952
asli
3 lembar

1526 Surat-surat mengenai keterangan tentang Komisaris Polisi KL.I Latippa dari Sulawesi Selatan.

September 1952 - Februari 1953
asli
1 sampul

1527 Nota dari Kepala Bagian Administrasi kepada Bagian Arsip Kementerian Dalam Negeri mengenai kekuasaan CPM dalam urusan kepolisian.

15 September - 12 November 1952
asli
1 sampul

1528 Berkas mengenai usul penetapan UU Darurat Nomor.4 tahun 1950 tentang penerimaan anggota angkatan perang RIS.

22 September 1952
asli
1 sampul

1529 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai penghargaan terhadap pasukan pengejar Mobbrig Ki 516, 5113,5120 dan 5122.

30 Oktober 1952
asli
3 lembar

1530 Surat dari Kepala Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pembicaraan Komandan Batalion 105 Gajah Putih dalam resepsi hari ulang tahun angkatan perang ke VII di Padang Panjang.

22 November 1952
asli
1 sampul

1531 Laporan mengenai asal usul pegawai Jawatan Kepolisian Negara.

1 Desember 1952
asli
1 sampul

1532 Berkas preadvies mengenai persoalan penyelesaian ex. pedjuang bersendjata secara integral.

15 Februari 1953
fotokopi
5 lembar

1533 Surat dari Kepala Bagian Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pemberian *Politionele Bevoegdheid* pada Bagian Security Jawatan Imigrasi.

4 April 1953

asli
3 lembar

1534 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai penjelasan tentang diperbolehkannya atau tidak untuk menggunakan senjata api di tahanan kantor polisi.
22 Mei 1953
asli
5 lembar

1535 Surat-surat mengenai pengeluaran untuk peristiwa tentara pelajar dengan mobiele
30 Juli 1953 - 25 Januari 1955
asli
8 lembar

1536 Surat-surat mengenai *Militaire Bijstand* untuk Aceh.
21 September 1953 - 20 Maret 1954
asli
1 sampul

1537 Berkas mengenai Peristiwa AURI.
04 November 1953 - 4 Maret 1955
asli
1 sampul

1538 Surat dari Sekretaris Wakil Perdana Menteri II kepada Menteri Pertahanan mengenai permohonan bantuan Sdr. Prawiropralebdo ayah dari alm. Letkol. Slamet Riyadi.
28 & 30 November 1953
asli
2 lembar

1539 Surat dari ex. Kep. Pendjaitan Perlengkapan Angkatan Perang) Surakarta kepada Kepala Kementerian Pertahanan mengenai pemulihan anggota - anggota CTN ke dalam masyarakat.
14 Januari - 2 Agustus 1954
asli
7 lembar

1540 SK Panglima Territorium IV/Div. Diponegoro No. 9/Kpts./IV-5/54 tentang pembubaran *Doorgangskamp* Surakarta dan penyerahan segala barang-barang inventaris.
15 Januari 1954
tembusan
1 lembar

1541 Surat dari Pimpinan Pusat Bekas Pejuang Islam Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai Resolusi Kongres I BPII (Bekas Pejuang Islam Indonesia).
20 Januari 1954
asli

1 sampul

1542 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai hasil rapat pertemuan penyambutan delegasi ex. Pejuang se-Kalimantan.

02 Februari 1954
asli
2 lembar

1543 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pembentukan tambahan Mobiele Brigade.

10 Februari 1954
pertinggal
1 lembar

1544 Surat dari Sekjen Menteri Pertahanan kepada Kepala Staf AD, AL, AU mengenai rencana pengiriman anggota Anggota Perang ke luar negeri dalam tahun 1954 untuk tugas belajar.

08 Maret 1954
tembusan
3 lembar

1545 Surat-surat mengenai organisasi pelajar pejuang.

10 Mei 1954
asli
1 sampul

1546 Surat dari Sekretariat Umum Kementerian Pertahanan kepada KSAU mengenai pemberitahuan tidak dapat diterima sebagai pelajar S.P.A.U karena hasil pemeriksaan dokter yang tidak memenuhi syarat kesehatan badan.

09 Desember 1954
tembusan
1 lembar

1547 Berkas mengenai tuntutan dari Persatuan Bekas Polisi NRI Medan.

1955 - 6 Juni 1957
asli
1 sampul

1548 Surat dari Sekretaris Umum Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai dislokasi kompi-kompi Mobile Brigade di Maluku.

22 Januari 1955
asli
2 lembar

1549 Surat-surat mengenai Rancangan PP tentang Gabungan Kepala-kepala Staf.

29 Januari - 21 Februari 1955
asli
1 sampul

1550 Surat-surat mengenai penambahan keanggotaan Koordinator Keamanan Daerah (KKD) Provinsi Jawa Barat.

2 Februari & 17 Februari 1955
asli
7 lembar

1551 Berkas mengenai Rancangan PP tentang anggota angkatan perang berdasarkan ikatan dinas sukarela.

18 Juni - 11 Agustus 1956
salinan
1 sampul

1552 Berkas mengenai penyelesaian soal Angkatan Darat sejak peristiwa tanggal 17 Oktober 1952

29 Juni 1955 - 30 November 1957
asli
1 sampul

1553 Surat-surat mengenai permohonan penjelasan status Sdr.Kusna Tjakradibrata bekas Kepala Inspektorat Biro Perjuangan.

18 Juli - 21 Oktober 1955
asli
1 sampul

1554 Surat-surat mengenai rancangan SK Presiden tentang perubahan Keputusan Presiden No.69 Tahun 1955 mengenai giliran KSAD sebagai Ketua GKS.

23 Agustus 1956
asli
1 sampul

1555 Surat dari Sekjen Kementerian Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai Rencana perubahan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1954 tentang penunjukan penguasa-penguasa militer.

27 Agustus 1956
asli
1 sampul

1556 Surat-surat mengenai pengesahan pembentukan Legiun Veteran RI.

29 Januari - 16 April 1957
asli
1 sampul

1557 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai permasalahan pejuang kemerdekaan (veteran).

26 April 1957
asli
1 sampul

1558 Surat-surat mengenai Keputusan Presiden No.162 tahun 1957 tentang Pembentukan Kementerian untuk Urusan Veteran.

29 April - 25 Juli 1957
asli
1 sampul

1559 Surat-surat mengenai perubahan Keppres No.103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran RI.

Mei 1957 - 5 November 1959
asli
1 sampul

1560 Berkas mengenai Rancangan PP tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.

11 Juni 1957 - 29 Oktober 1959
asli
1 sampul

1561 Surat Gubernur Kalimantan Selatan kepada Wakil Perdana Menteri II mengenai memori tentang keadaan bekas pejuang bersenjata di Kalimantan.

17 Juni 1957
asli
9 lembar

1562 Laporan *Fact Finding Committee* mengenai tanya jawab dari Staf-staf Komando terkait masalah-masalah di Angkatan Darat dalam rangka pengumpulan bahan panitia militer Musyawarah Nasional.

12 Desember 1957
asli
1 sampul

1563 Surat dari Sekretaris Djenderal Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai Rancangan PP tentang pemberhentian anggota Angkatan Perang.

30 Desember 1957
konsep
1 sampul

1564 Surat dari Kepala Bagian Persiapan Sidang Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai RPP Pemberhentian Militer Sukarela dari dinas Militer.

11 - 13 Januari 1958
asli
8 lembar

1565 Berkas mengenai SK Perdana Menteri tentang calon veteran yang turut didalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner RI).

8 - 15 April 1958
asli
9 lembar

1566 Surat dari Kepala Bagian Sekretariat Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rencana Konferensi Dinas Kepolisian seluruh Indonesia.

27 Maret - 5 April 1958
asli
1 sampul

1567 SK Kepala Kepolisian Negara tentang penyelenggaraan pendidikan agen polisi di Tandjung Kassau (Sumatera Utara), Sukabumi dan Bandung.

2 Juni - 14 Agustus 1958
asli
7 lembar

1568 Surat-surat mengenai masalah pengangkatan Komisaris Besar Polisi Kaharoeddin menjadi Gubernur.

07 Juni 1958
asli
1 sampul

1569 Berkas mengenai RUU tentang penghapusan peraturan umum korban perang yang dahulu disebut *Algemene Oorlogsongevallen Regeling.*

3 September 1958 - 18 April 1959
asli
1 sampul

1570 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kehakiman mengenai Keputusan Perdana Menteri tentang Penunjukan dan Pengangkatan Ketua Penguasa Perang Daerah Sulawesi Utara dan Tengah.

7 November 1958
asli
1 sampul

1571 Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Perdana Menteri mengenai berita acara serah terima jabatan pada Polisi Wilayah Sumatera Utara, Aceh Besar, Aceh Tengah.

30 Desember 1958
asli
1 sampul

1572 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1959 tentang Militerisasi Kepolisian Negara.

8 April 1959
salinan
5 lembar

1573 Berkas mengenai pertemuan antara Menteri Muda Urusan Penyelesaian Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dengan para Pembantu Utama/Wakil dari Departemen dalam rangka pelaksanaan UU No.75 Tahun 1975.

28 November - 10 Desember 1959

asli
1 sampul

2. URUSAN POLITIK

a. Pemerintahan Pusat

1574 Rancangan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Panitia Negara Tetap, Panitia Irian, Panitia Bersama RI dan pengangkatan Panitia Kebudayaan.

1950
konsep
3 lembar

1575 Berkas mengenai pembentukan Pemerintahan Kabinet Natsir.

1950
asli
1 sampul

1576 Laporan politik dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 1950

13 Mei 1950
asli
1 sampul

1577 Surat-surat mengenai ratifikasi rencana UUD Negara Kesatuan.

8 Agustus 1950
asli
1 sampul

1578 Berkas mengenai nama dan lingkungan pekerjaan pada kementerian-kementerian.

19 September 1950 - 19 Maret 1951
asli
1 sampul

1579 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai memorandum dari Sekretaris Kementerian Pertanian mengenai pegawai-pegawai RI sehubungan dengan penggabungan kementerian-kementerian RIS dan RI.

23 September 1950 -14 Agustus 1951
asli
1 sampul

1580 Keputusan Perdana Menteri No.8/PM/1950 tentang pembentukan suatu panitya adhoc yang bertugas merencanakan tindakan - tindakan pemerintah dalam melaksanakan pasal 7 program kabinet natsir terkait Keresidenan Irian barat.

14 & 18 Oktober 1950
asli
2 lembar

1581 Berkas tentang pembentukan panitia Desentralisasi Interdepartemental

14 Oktober - 3 November 1950
asli

1 sampul

1582 Sumpah pengangkatan Drs. Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden RI.
25 Oktober 1950
konsep
3 lembar

1583 Berkas mengenai penggunaan bendera kebangsaan dan lambang negara.
28 Oktober 1950 - 6 Februari 1953
asli
1 sampul

1584 Berkas mengenai rencana dari usaha Biro Pedjuang Pembangunan RI.
23 Desember 1950 - 15 Februari 1952
asli
5 lembar

1585 Salinan lembaran Negara RI No 22, 1951 tentang penetapan Peraturan Pemerintah tentang Tugas Dewan dan Biro Rekonstruksi Nasional.
1951
fotokopi
2 lembar

1586 Berkas mengenai nama dan lingkungan pekerjaan kementerian.
16 Januari - 04 Oktober 1951
asli
1 sampul

1587 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1/1951 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan, dan tugas kewajiban menteri dalam negeri
22 Januari 1951
fotokopi
1 sampul

1588 Berkas hasil rapat Dewan Menteri mengenai kedudukan Sekretaris Djenderal Kementerian.
8 Februari 1951 - 1 Agustus 1952
asli
1 sampul

1589 Berkas mengenai Konferensi staf 'K' di Jogjakarta.
02 Maret 1951
asli
1 sampul

1590 Risalah mengenai peraturan pemerintah No.12 tahun 1951 tentang ketentuan tugas Dewan Nasional.

12 Maret 1951
asli
3 lembar

1591 Keputusan Perdana Menteri No.30/PM/1951 tentang penetapan peraturan sementara susunan Kantor Urusan Pegawai

07 April 1951
asli
2 lembar

1592 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Perdana Menteri mengenai usaha jawatan-jawatan tidak bertindak disipliner dan tidak melanggar batas-batas kewajiban.

24 April 1951
fotokopi
3 lembar

1593 Laporan Panitia Negara Khusus tentang peninjauan persetujuan-persetujuan seperti Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia-Nederland.

11 Mei 1951
asli
1 sampul

1594 Laporan pertanggungjawaban Menteri Dalam Negeri atas Jawatan Kepolisian.

02 Juni 1951
asli
1 sampul

1595 Surat-surat mengenai permintaan laporan politik dari Kepolisian.

20 Juni 1951
asli
8 lembar

1596 SK Presiden RI tentang pembentukan Panitia Negara untuk merancang perjanjian-perjanjian internasional biasa Indonesia dan Belanda untuk mengganti persetujuan

27 Oktober 1951
salinan
1 lembar

1597 Lembaran Negara No. 3 tahun 1952 tentang susunan dan tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional.

05 Januari 1952
fotokopi
3 lembar

1598 Berkas mengenai susunan dan tugas-tugas Biro Perantjang Negara.

7 Januari 1952 - 8 Oktober 1957

fotokopi
1 sampul

1599 Surat Keputusan Menteri Perekonomian tentang penghapusan Direktorat Planning pada Kementerian Perekonomian sehubungan dengan terbentuknya Biro Perantjang Negara.
26 Februari 1952
fotokopi
1 sampul

1600 Berkas mengenai catatan lengkap upacara timbang terima pemerintah dari Kabinet Sukiman kepada Kabinet Wilopo pada tanggal 3 April 1952.
01 April 1952
asli
1 sampul

1601 Berkas mengenai proses *verbaal* antara Dr Sukiman Wirjosandjojo dengan Mr.Wilopo dalam terkait soal-soal yang masih memerlukan keputusan dari Dewan Menteri.
05 April 1952
asli
1 sampul

1602 Berkas mengenai pembentukan Kementerian Agraria.
07 April 1952
asli
1 sampul

1603 Berkas mengenai cara-cara bekerja Dewan Menteri
07 April 1952
fotokopi
1 sampul

1604 Surat dari sekretaris staf "R" Pusat Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai laporan-laporan korupsi di instansi-instansi pemerintah.
12 Mei 1952
asli
6 lembar

1605 Surat Edaran Perdana Menteri mengenai kerjasama antara Kepala Daerah dan Kepala-kepala jawatan dan organisasi-organisasi lainnya.
31 Mei 1952
fotokopi
1 lembar

1606 Berkas mengenai tugas pekerjaan Panitia Menambah Hasil Bumi.
18 Juni 1952
asli
1 sampul

1607 Berkas mengenai ikhtisar mingguan organisasi politik, sosial, dan organisasi illegal.
23 Juni - 5 Oktober 1952
fotokopi
1 sampul

1608 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai penyampaian Rancangan Keputusan Presiden RI tentang susunan Dewan Perancang Negara.
06 Agustus 1952
asli
2 lembar

1609 Surat dari Kementerian Sosial kepada Perdana Menteri mengenai Susunan Kementerian yang perlu diseragamkan.
12 Agustus 1952
asli
1 lembar

1610 Berkas mengenai statemen PKI dalam Buletin PKI yang dianggap menghina Presiden Filipina
02 September - 24 Oktober 1952
asli
1 sampul

1611 Berkas mengenai Rancangan PP tentang nama dan lingkungan pekerjaan menteri-
24 September 1952
konsep
1 sampul

1612 Berkas mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah untuk mengatur pemerintahan kepada menteri-menteri.
Oktober 1952 - Agusus 1953
asli
1 sampul

1613 Berkas mengenai struktur dan fungsi organisasi Jawatan Sandi.
13 -27 Oktober 1952
asli
1 sampul

1614 Laporan mengenai susunan dan tugas dari Kementerian Pertanian.
13 November 1952
fotokopi
1 sampul

1615 Laporan mengenai susunan dan tugas dari Kementerian Perburuhan.
14 November 1952

fotokopi
1 sampul

1616 Laporan mengenai susunan vertikal dan jawatan-jawatan dalam 12 kementerian.
4 November 1952
fotokopi
1 sampul

1617 Laporan Interim Panitia Negara Untuk Menyelidiki Organisasi Kementerian-Kementerian.
5 November 1952
fotokopi
1 sampul

1618 Berkas mengenai Panitia "Boys-Town"Indonesia.
12 November 1952 - 3 Maret 1953
asli
1 sampul

1619 Laporan mengenai susunan dan tugas dari Kementerian Perekonomian.
14 November 1952
fotokopi
1 sampul

1620 Laporan mengenai susunan dan tugas dari kementerian Pendidikan dan Pengajaran.
18 November 1952
fotokopi
1 sampul

1621 Laporan mengenai susunan dan tugas dari Kementerian Kehakiman.
01 Desember 1952
fotokopi
1 sampul

1622 Laporan mengenai susunan dan tugas dari Kementerian Sosial.
4 Desember 1952
fotokopi
1 sampul

1623 Laporan mengenai susunan dan tugas kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
06 Desember 1952
fotokopi
1 sampul

1624 Laporan Panitia Negara untuk menyelidiki organisasi kementerian-kementerian
1952 - 1954
asli
1 sampul

1625 Laporan dari Departemen Dalam Negeri mengenai hak dan kekuasaan pamong praja.
1953
fotokopi
1 sampul

1626 Berkas mengenai reorganisasi dan rasionalisasi komisariat Agung RI di Den Haag.
28 Januari 1953
asli
1 sampul

1627 Berkas mengenai acara Sidang Dewan Menteri ke 85-93
02 April 1953
fotokopi
1 sampul

1628 Surat dari Perdana Menteri kepada semua Menteri mengenai penjelasan perbedaan kedudukan Menteri Urusan Pegawai dengan Kantor Urusan Pegawai.
02 Maret 1953
fotokopi
1 lembar

1629 Resolusi dari Pimpinan Rapat Raksasa 1 Mei 1953 di Madiun dan Banyumas mengenai tuntutan pembatalan perjanjian KMB.
01 Mei 1953
asli
2 lembar

1630 Berkas mengenai penyerahan mandat Kabinet Wilopo dan Kabinet Ali Sastroamidjojo.
3 Juni 1953 - 24 Juli 1955
asli
1 sampul

1631 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai lagu "Borneo Tanah Pusaka" yang dianggap dapat membahayakan hubungan dengan Inggris.
10 Juli 1953
asli
5 lembar

1632 Berkas dari Panitia Negara Untuk Menyelidiki Organisasi Kementerian mengenai pertelaan dewan, panitia, dana, yayasan dan sebagainya yang bekerja dalam lingkungan kementerian.
30 Juli - 20 November 1953
asli
1 sampul

1633 Laporan mengenai keterangan pemerintah atas program Kabinet Ali Sastroamidjojo.
25 Agustus 1953

fotokopi
1 sampul

1634 Berkas mengenai organisasi Dewan Pengawas Keuangan beserta pengangkatan anggota-anggotanya.

15 September 1953 - 23 Februari 1959
asli
1 sampul

1635 Keputusan Presiden RI Nomor 172 tahun 1953 tentang pengangkatan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan ad interim, Menteri Kesehatan dan Menteri PU dan Tenaga.

08 - 14 Oktober 1953
asli
1 sampul

1636 Berkas mengenai Susunan Organisasi dari Bagian Perbendaharaan pada Kementerian Keuangan

30 Desember 1953
fotokopi
1 sampul

1637 Berkas mengenai rapat Inter Kementerian (Keuangan, Luar Negeri, Perekonomian, Kehakiman, Penerangan, Pertahanan).

16 Desember 1953
fotokopi
1 sampul

1638 Berkas mengenai peristiwa pengibaran bendera nasional di luar acara kenegaraan di Jawa Timur.

2 Januari - 10 Februari 1954
asli
1 sampul

1639 Berkas mengenai usulan dari beberapa kementerian agar penerangan kepada rakyat dilakukan oleh satu kementerian.

5 Januari - 18 Maret 1954
asli
1 sampul

1640 Surat dari Perdana Menteri kepada segenap badan pemerintahan tertinggi yang termasuk dalam bagian I mengenai keputusan presiden RI No. 180/1953, lampiran tidak ada.

11 Januari 1954
asli
1 lembar

1641 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai isi pidato wakil Ketua DPD Propinsi Jawa Barat tentang kecaman terhadap pemerintah pusat.

22 Juni 1954
asli

1 sampul

1642 Berkas mengenai rencana penyelenggaraan konfrensi keamanan di Jakarta.
01 Januari 1955
asli
1 sampul

1643 Berkas mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1955 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan & Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.
25 Juni - 21 Juli 1955
asli
1 sampul

1644 Berkas mengenai hal-hal yang belum belum diselesaikan oleh kabinet Ali
12 Agustus & 14 Oktober 1955
asli
1 sampul

1645 Laporan Badan Perancang Nasional mengenai program kegiatan setiap kementerian.
1956 - 1958
asli
1 sampul

1646 Laporan Panitia negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian.
1956
fotokopi
1 sampul

1647 Surat-surat mengenai tuntutan pembubaran Kabinet Burhanudin Harahap.
Januari - September 1956
asli
1 sampul

1648 Pengumuman Pemerintah mengenai Pembubaran Uni Indonesia - Belanda dan Pembatalan Persetujuan dalam KMB.
13 - 18 Februari 1956
asli
1 sampul

1649 Nota Dinas dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai Susunan Sekretariat Dewan Menteri, beserta lampiran.
21 Februari & 7 Mei 1956
fotokopi
5 lembar

1650 Berkas mengenai penyerahan mandat Kabinet Boerhanoedin Harahap.

3 - 12 Maret 1956
asli
1 sampul

1651 Berkas mengenai putusan-putusan rapat Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-II.
21 April 1956- 2 April 1957
asli
1 sampul

1652 Risalah Stenografis upacara timbang terima pemerintah negara dari kabinet Boerhanoedin Harahap kepada Kabinet Ali Sastroamidjojo ke 2 pada tanggal 26 Maret
21 April 1956
fotokopi
1 sampul

1653 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai ralat atas putusan rapat ke-54 Kabinet Burhanudin Harahap tanggal 28 Februari 1956.
09 Mei 1956
asli
1 lembar

1654 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai Penyampaian Rancangan PP No. Tahun 1956 tentang Penetapan Dewan Ekonomi dan Perencanaan.
29 Mei 1956
asli
3 lembar

1655 Surat dari Perdana Menteri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pembentukan panitia Interdepartemental untuk menyusun peraturan-peraturan pelaksanaan ketentuan pasal 40 sub (1) UUKB 1957 tentang pemanggilan orang-orang warga negara bukan militer untuk bekerja pada APRI.
26 Agustus 1956
asli
2 lembar

1656 Berkas mengenai pembentukan Meter Lembaga Indonesia dan Kilogram Lembaga Indonesia serta Pembentukan Panitia Induk untuk Meter Kilogram.
10 September 1956 - 28 Februari 1957
asli
1 sampul

1657 Berkas mengenai rapat-rapat Panitia Koordinasi Interdepartementel.
10 Oktober 1956 - 18 Februari 1957
asli
1 sampiul

1658 Surat Keputusan Kabinet Perdana Menteri tentang pelaksanaan UU Keadaan Bahaya tahun 1957

1957
fotokopi
6 lembar

1659 *Working paper* dari beberapa kementerian untuk Musyawarah Pembangunan Nasional.

November 1957 - Desember 1958
asli
1 sampul

1660 Berkas mengenai Rancangan PP tentang Susunan Kementerian Pertahanan.

22 Januari - 5 Februari 1957
asli
1 sampul

1661 Berkas mengenai Panitia Negara Peninjau Kembali Peraturan Gaji Pegawai Negeri

29 Januari 1957 - 11 Februari 1959
asli
1 sampul

1662 Berkas mengenai Surat Keputusan Menteri penerangan tentang Tugas dan lapangan Pekerjaan Kementerian Penerangan.

16 Juli 1955 - 14 Maret 1957
asli
1 sampul

1663 Berkas mengenai Susunan dan Program Kerja Kabinet Juanda.

9 April 1957 - Juli 1959
asli
1 sampul

1664 Berkas mengenai timbang terima susunan dan tugas Kabinet Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo kepada Ir Djuanda.

10 April 1957
asli
1 sampul

1665 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai rencana Keputusan Presiden tentang susunan & lapangan Pekerjaan Kementerian Perhubungan.

16 - 27 April 1957
asli
1 sampul

1666 Berkas mengenai persoalan yang belum diselesaikan oleh kabinet-kabinet Ali Sastroamidjojo II.

17 April 1957
asli
1 sampul

1667 Surat-surat mengenai pembentukan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian

Mei - Juni 1957
asli
1 sampul

1668 Berkas mengenai pembentukan Kementerian Pelajaran.

9 -10 Mei 1957
asli
1 sampul

1669 Berkas mengenai penunjukan Menteri Agraria (Mr. Sunarjo) sebagai Menteri Agama a.i. selama Much. Ilyas menunaikan ibadah haji.

24 Mei - 3 Juli 1957
asli
3 lembar

1670 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pergantian Dr. J. Leimena kepada Muljadi Djojomartono sebagai Menteri Sosial, tidak disertai lampiran.

25 Mei 1957
asli
1 lembar

1671 Surat-surat mengenai penyerahan beberapa tugas pemerintah kepada daerah otonom.

31 Mei 1957 - 14 Januari 1958
asli
1 sampul

1672 Berkas mengenai koordinasi antara Panitia-panitia Negara/Interdepartemental.

11 Juni 1957
asli
2 lembar

1673 Surat-menyurat Direktur Kabinet Presiden dengan Sekretaris Dewan menteri mengenai penunjukan Perdana Menteri sebagai Menteri Keuangan selama Menkeu berada di luar negeri.

19 Juni - 13 Juli 1957
asli
2 lembar

1674 Berkas mengenai Peraturan Menteri Dalam negeri tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan dan Pimpinan Kementerian Dalam Negeri.

22 Juni 1957
asli
1 sampul

1675 Berkas mengenai Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Tugas dan Lapangan Pekerjaan Kementerian Sosial.
24 Juni 1957
asli
1 sampul

1676 Nota Rahasia Sekretaris Dewan Menteri mengenai pengangkatan anggota Dewan Nasional.
26 Juni 1957
asli
4 lembar

1677 Berkas mengenai pembentukan Kementerian Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk pembangunan.
3 Juli 1957
asli
1 sampul

1678 Berkas mengenai Peraturan Menteri No. 9, 10, 11, 31 tahun 1952 tentang Tugas dan Lapangan Pekerjaan Kementerian Agama.
04 Juli 1957
asli
1 sampul

1679 Risalah rapat staf pada Biro Perancang Negara mengenai organisasi (intern).
10 Juli 1957
asli
3 lembar

1680 Berkas mengenai pengusulan anggota Dewan Nasional.
16 Juli - 8 November 1957
asli
1 sampul

1681 Berkas mengenai Susunan Kementerian Pertahanan.
18 Juli 1957
asli
1 sampul

1682 Berkas mengenai pembentukan Kementerian untuk Urusan Hubungan Antar Daerah.
25 Juli 1957
asli
1 sampul

1683 Kumpulan bahan pidato Perdana Menteri.

Agustus 1957
asli
1 sampul

1684 Surat Edaran Perdana Menteri No.16/RI/1957 tanggal 28 Agustus 1957 tentang penjagaan rahasia negara.

28 Agustus 1957
fotokopi
2 lembar

1685 Surat-menyurat antara Direktur Kabinet Presiden dengan Sekretaris Dewan Menteri mengenai penunjukan Wakil Perdana Menteri I sebagai Menteri Luar Negeri a.i.

23 September - 26 Oktober 1957
asli
2 lembar

1686 Surat dari Ketua Dewan Nasional kepada Perdana Menteri mengenai pembentukan Badan Penghubung Chusus Dewan Nasional dalam hubungan dengan Pemerintah & Masyarakat.

08 Oktober 1957
asli
1 sampul

1687 Surat dari Ketua Dewan Nasional kepada Perdana Menteri mengenai usul tentang Organisasi Musyawarah Nasional Pembangunan.

30 Oktober 1957
asli
1 sampul

1688 Berkas mengenai persiapan Musyawarah Nasional Pembangunan.

11 November 1957
asli
1 sampul

1689 Laporan Dewan Nasional RI kepada Perdana Menteri mengenai Keputusan Sidang ke IX Dewan Nasional tanggal 27 - 28 Desember 1957 tentang Kewaspadaan Nasional, Otonomi dan Desentralisas dan Soal Kesulitan Beras.

28 Desember 1957
asli
1 sampul

1690 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai undangan Sidang Dewan Menteri ke-73.

04 Januari 1958
asli
3 lembar

1691 Berkas mengenai pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

3 Maret 1958 - 27 April 1959
asli
1 sampul

1692 Surat dari Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai Usul Perubahan pasal 7 pada dictum SK P.M. Tanggal 27 Januari 1958 No. 40/P.M./1958 tentang pembaharuan susunan Kabinet Perdana Menteri.

08 Maret 1958
asli
5 lembar

1693 Keputusan Presiden RI No.107 tahun 1958 tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Mei 1958
fotokopi
7 lembar

1694 Keputusan Perdana Menteri No.159/PM/1958 tentang penetapan susunan dan tugas bagian - bagian dalam Kabinet Perdana Menteri.

2 Mei 1958
salinan
1 sampul

1695 Keputusan Perdana Menteri No.251/PM/1958 tentang penetapan peraturan tentang Susunan Dewan penasehat Lembaga Administrasi Negara.

19 Juni 1958
salinan
3 lembar

1696 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai Rancangan Keputusan Presiden RI tentang lapangan pekerjaan Menteri Negara Prof. Mr. H. Muhammad Yamin dan A.M. Hanafi.

06 Agustus 1958
asli
3 lembar

1697 Surat Ketua Dewan Nasional kepada Perdana Menteri tentang missi pemerintah ke Sulawesi Tengah Utara.

15 Agustus 1958
asli
1 sampul

1698 Keputusan Perdana Menteri No.481/PM/1958 dan No.531/PM/1958 tentang mengesjahkan pembentukan panitya pembelian chusus dari LAN dan DPR.

27 September & 20 Oktober 1958

salinan
4 lembar

1699 Keputusan hasil sidang Dewan Nasional ke XII tentang Perincian golongan-golongan fungsionil dalam masyarakat Indonesia, ditinjau dari sudut Revolusi Nasional sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
21 November - 2 Desember 1958
asli
3 lembar

1700 Surat dari Kepala Jawatan Fotogrametri Sentral kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penggantian cap Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta.
24 Desember 1958
asli
1 lembar

1701 Berkas mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.
1959
asli
1 sampul

1702 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai pendapat dan usul mengenai persoalan demokrasi terpimpin.
15 Januari 1959
asli
3 lembar

1703 Berkas mengenai serah terima jabatan menteri-menteri.
25 April - 20 Juli 1959
asli
1 sampul

1704 *Progress Report* Pelaksanaan Repelita Tahun 1956-1960 Biro Perancang Negara.
04 Mei 1959
asli
1 sampul

1705 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Wakil Perdana Menteri I mengenai kebijaksanaan pemerintah dalam tahun 1960, tanpa lampiran.
01 Juli 1959
asli
1 lembar

1706 Keputusan Panitia Negara Urusan Protokol mengenai Rancangan PP tentang Bendera Kebangsaan RI, Bendera Kebangsaan Asing, Panji dan Bendera dan penggunaan Lambang Negara.
8 Juli 1959

asli
1 sampul

1707 Surat Edaran Menteri Utama No. 1/MP/RI/1959 tentang Perubahan nama dari "Kementerian - kementerian" harus diubah menjadi "DEPARTEMEN" sesuai dengan pasal 17 ayat (3) UUD 1945 terhitung mulai 1 September 1959.

26 Agustus 1959
fotokopi
2 lembar

1708 Rancangan instruksi Presiden tentang hubungan kerja vertikal dan horizontal pemerintahan negara.

September 1959
fotokopi
1 sampul

1709 Surat kuasa kepada Menteri Inti Produksi untuk mengambil tindakan terhadap Biro Depisen Perdagangan (BDP) dan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN).

01 September 1959
pertinggal
2 lembar

1710 Surat dari Wakil Dirjen Biro Perancang Negara kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai Me-reorganisasi BPN ke Jurusan Biro Bantuan Luar Negeri dan Biro Ekonomi dan Keuangan.

16 Oktober 1959
asli
4 lembar

1711 Usul perubahan Menteri Muda Perburuhan mengenai tugas Departemen Perburuhan.

21 Oktober 1959
salinan
2 lembar

1712 Laporan mengenai program politik Kabinet RI (Kabinet Halim).

tt
fotokopi
1 lembar

b. Pemerintahan Daerah

1713 Berkas mengenai status propinsi Aceh.

17 September - 22 November 1950
asli
1 sampul

1714 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian dengan hormat dari jabatannnya sebagai Kepala Daerah Bali (a.n. Anak Agoeng Gde Oka).

10 Oktober 1950
asli
4 lembar

1715 Surat dari gubernur Jawa Timur kepada Perdana Menteri mengenai pembentukan Kabupaten Trenggalek.

14 Oktober 1950
asli
2 lembar

1716 Laporan hasil peninjauan Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono ke daerah Bali dan Patih Semarang.

10 November 1950
asli
1 sampul

1717 Laporan peninjauan ke Sumatera dalam rombongan bersama Wakil Presiden RI oleh Sutan Kumala Pontas, Bupati yang diperbantukan di Kementerian Dalam Negeri.

20 November 1950
asli
1 sampul

1718 Surat Permakluman No.prop/7 dari Dewan Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan tentang pemerintahan otonomi di Sumatera.

28 November 1950
fotokopi
5 lembar

1719 Berkas mengenai pembagian daerah negara kesatuan RI dalam propinsi.

30 November 1950
asli
1 sampul

1720 Surat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh Kepala Daerah mengenai pengiriman surat-surat agar tetap ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta.

12 Desember 1950
tembusan
2 lembar

1721 Berkas mengenai usul pembagian daerah Sumatera seperti sebelum Perang Dunia II.

11 - 27 Desember 1950
salinan
1 sampul

1722 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada Perdana Menteri mengenai laporan politik bulan Desember tahun 1950 di Karesidenan Besuki.

01 Januari 1951
asli
5 lembar

1723 Surat dari kepala Bagian Politik kepada Menteri Luar Negeri mengenai mosi tidak percaya kepada pamong praja Kewedanan Lematang Ulu.

05 Januari 1951
tembusan
3 lembar

1724 Berkas mengenai permasalahan kepegawaian kasunanan Solo akibat putusan Menteri Dalam Negeri.

14 Februari - 5 Maret 1951
asli
4 lembar

1725 Surat dari Kepala Polisi Propinsi Sumatera Tengah mengenai kunjungan Sukarni (Pemimpin Partai Murba) ke Sumatera Tengah.

10 Maret 1951
tembusan
1 sampul

1726 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada DPR mengenai daftar nama-nama pembagian daerah : Ketiga Propinsi di Jawa, Ketiga Propinsi di Sumatera, Ketiga Propinsi di Kalimantan, Propinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, Propinsi Sunda Kecil.

27 Maret 1951
asli
1 sampul

1727 Berkas mengenai tuntutan dari Soeleiman Hasibuan agar Sumatera diberikan suatu pemerintahan tersendiri yang mempunyai *zelfbeschikkingsrecht* .

7 April 1951 - 25 Juni 1953
asli
1 sampul

1728 Surat dari Menteri Keuangan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai penyampaian daftar nama-nama pejabat kepala jawatan/kantor di Propinsi Sumatera Utara, disertai lampiran

09 April 1951
asli
2 lembar

1729 Laporan "observatie politik" daerah Propinsi Sumatera tengah bulan Maret - Juni.

26 April - 22 Juli 1951
asli
1 sampul

1730 Berkas mengenai pengangkatan R. Sjamsoeridzal sebagai Walikota Jakarta Raya pada tanggal 27 Juni 1951 dengan golongan/ruang VI/e.

2 Mei - 27 Juli 1951
asli
1 sampul

1731 Laporan mengenai "Pemandangan politik di sekitar daerah Pekalongan".

04 Juni 1951
asli
1 sampul

1732 Berkas mengenai Resolusi Majelis Permusyawaratan Partai Politik Indonesia daerah Jambi tentang peninjauan situasi di daerah Jambi.

12 Juni - 8 Agustus 1951
asli
6 lembar

1733 Berkas mengenai permohonan izin penggunaan lambang Kotapraja Jakarta Raya.

29 Agustus 1951
asli
3 lembar

1734 Surat dari Pemerintah Daerah Kota Kecil "SALATIGA" kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Status Kota Kecil "SALATIGA".

19 Desember 1951
asli
4 lembar

1735 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penolakan lurah-lurah desa di daerah Surakarta yang telah dibebaskan dari tawanan.

04 Maret 1953
asli
5 lembar

1736 Berkas mengenai usulan pengangkatan Sarimin Reksodihardjo sebagai Gubernur Provinsi Sunda Kecil untuk menggantikan I.G.K Katon sebagai pembantu jabatan

14 Januari 1952 - 23 Mei 1953
asli
1 sampul

1737 Berkas mengenai "Rencana Pembangunan Lima Tahun Propinsi Sunda Kecil" beserta peta.

15 Januari 1952
asli

1 sampul

1738 Surat dari Sekretaris Anggota Masyarakat Kotapraja Makasar kepada Perdana Menteri mengenai pribadi Abdul Hamid Daeng Magassing (terkait pengangkatan Walikota di Makasar).

15 Januari 1952
asli
1 lembar

1739 Berkas mengenai kekuasaan swapraja di Surakarta (hilangnya "Fonds van Eigendommen Mangkunegaran")

22 januari - 19 Juni 1952
asli
1 sampul

1740 Berkas mengenai risalah singkat pertemuan jawatan-jawatan dalam Karesidenan Bojonegoro.

19 Februari 1952
asli
1 sampul

1741 Surat dari Gubernur Sulawesi kepada Perdana Menteri mengenai surat ijin masuk Makassar.

08 April 1952
asli
3 lembar

1742 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Dewan Menteri mengenai usul perbaikan kedudukan Sdr. Suwirjo, bekas wali Kota Jakarta Raya.

10 Juni 1952
asli
1 sampul

1743 Surat dari Kepala Administrasi Kabinet Perdana Menteri kepada Gubernur Sulawesi di Makasar mengenai penghapusan pemerintah militer Palopo.

16 Juli 1952
asli
3 lembar

1744 Rancangan PP tentang pernyataan berlakunya PP no. 35/1950 mengenai sumpah dan janjia nggota Dewan Pemerintah Daerah otonomi di wilayah bekas negara Indonesia Timur.

29 Oktober 1952 - 21 Mei 1953
asli
1 sampul

1745 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai statement Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) terkait nasib pamong desa cabang Kabupaten

11 November 1952
pertinggal
4 lembar

1746 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai resolusi terhadap pemindahan M.K. Amil, Bupati Merangin (Sumatera Tengah).

05 Desember 1952
salinan
4 lembar

1747 Rancangan PP tentang pembubaran daerah Sulawesi Utara dan pembentukan daerah tersebut sebagai daerah yang bersifat kesatuan kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

23 Januari 1953
fotokopi
1 sampul

1748 Berkas mengenai kegiatan Panitia Swapraja Siak.

30 Januari - 3 Maret 1953
asli
5 lembar

1749 Berkas mengenai Sumatera dan Kalimantan Plan.

11 Maret - 16 Mei 1953
asli
1 sampul

1750 Surat dari Dewan Pemerintah Daerah Jawa Barat kepada Perdana Menteri mengenai keputusan konferensi DPD Jawa Barat ke II.

26 Maret 1953
asli
6 lembar

1751 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pemboikotan Fraksi Masjumi terhadap Sidang Pleno ke VI DPRDS Provinsi Sumatera Selatan.

25 April 1953
asli
2 lembar

1752 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai kedatangan Sidik Djoyosukarto dan Manai Sophian (Pimpinan PNI) di Surakarta.

25 April 1953
asli
2 lembar

1753 Berkas mengenai kedudukan *Rijkbestuder* pada swapraja di Solo dan Jogjakarta.

3 Juni - 13 Agustus 1953

asli
1 sampul

1754 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penduduk Kampung Kajon dan Pucuk Sawit Kecamatan Susukan yang menempati tanah bagian desa Kodasari Kecamatan Lingung.

09 Juni 1953
asli
1 sampul

1755 Surat dari Kepala Jawatan Imigrasi kepada Perdana Menteri mengenai peresmian pembukaan Kantor Imigrasi Pekanbaru.

26 Juni 1953
asli
4 lembar

1756 Rancangan PP tentang perubahan status daerah bagian Kota Manado menjadi Daerah Manado yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

03 Juli 1953
fotokopi
1 sampul

1757 Rancangan PP tentang pembubaran DPRD Minahasa dan pemilihan anggota-anggota DPR Daerah Minahasa Baru.

03 Juli 1953
fotokopi
2 lembar

1758 Surat dari Gubernur Jawa Timur kepada semua Kementerian mengenai Daftar Nama - nama Daerah Administratif Dalam Propinsi Jawa Timur Tahun 1953

01 Agustus 1953
asli
1 sampul

1759 Surat dari menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pidato-pidato ketua DPRD dan Gubernur Jawa Tengah.

17 Agustus 1953
asli
5 lembar

1760 Berkas mengenai tuntutan pemulihan kembali Swapraja Kuantan.

16 September 1953 - 11 Mei 1954
asli
1 sampul

1761 Surat dari Residen Lampung kepada Wakil Perdana Menteri I mengenai jumlah penumpang kapal laut dari Pulau Jawa ke Tanjungkarang dan sebaliknya.

28 Oktober 1953
asli
2 lembar

1762 Berkas mengenai mutasi dan pengusulan Gubernur Jawa Tengah.
16 Oktober - 21 November 1953
asli
5 lembar

1763 Surat dari Dewan Wilayah Masyumi kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai kedudukan Wali Kota Jakarta Raya.
19 Oktober 1953
asli
2 lembar

1764 Berkas mengenai pernyataan dari beberapa partai politik dan organisasi tentang ketidaksetujuan dalam pengangkatan Gubernur baru di Kalimantan yaitu Moerdjani.
30 Oktober 1953
asli
1 sampul

1765 Surat dari Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan kepada Perdana Menteri mengenai Rencana PP tentang pemilihan anggota DPRDS.
2 November 1953
tembusan
4 lembar

1766 Berkas mengenai perkembangan politik di Maluku Tenggara.
23 November 1953 - 3 Februari 1954
asli
1 sampul

1767 Berkas mengenai perkembangan-perkembangan politik di Sulawesi Utara.
15 Desember 1953 - 23 Januari 1954
asli
1 sampul

1768 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 & 2 tahun 1954 tentang Penyusunan DPRDS Sulawesi Utara dan Bolaang Mongondow.
14 Januari 1954
asli
4 lembar

1769 Laporan mengenai observasi politik Daerah Propinsi Sumatera Tengah triwulan I tahun 1954.
20 April 1954
asli
1 sampul

1770 Berkas mengenai Laporan politik bulanan Karesidenan Pekalongan periode Februari/Maret 1954.

28 Mei 1954
asli
1 sampul

1771 Berkas mengenai situasi tatapraja di Kota Makasar dan situasi politik di Minahasa.

11 Juni - 13 Juli 1954
asli
1 sampul

1772 Berkas mengenai laporan politik Kalimantan Timur bulan September 1954 & 1955.

21 September 1954 - 14 Oktober 1955
asli
1 sampul

1773 Berkas mengenai tuntutan supaya Sumatera Timur menjadi provinsi sendiri jika Aceh menjadi provinsi.

17 Februari 1955 - 13 Maret 195
asli
1 sampul

1774 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada ketua koordinasi keamanan daerah propinsi di seluruh Indonesia tentang Sekretariat KKD dan KKK.

04 Maret 1955
salinan
1sampul

1775 Surat dari Menteri Perekonomian mengenai pembangunan daerah perbatasan Maluku Utara sebagai daerah penting penghasil kopra dengan negara-negara lain.

28 Mei 1955
asli
1 sampul

1776 Surat dari Residen Kalimantan Timur kepada Gubernur Provinsi Kalimantan di Banjarmasin mengenai laporan politik di Kalimantan Timur bulan Juli 1955.

12 Agustus 1955
asli
1 sampul

1777 Berkas mengenai pembagian daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara.

1956 - 1957
asli
1 sampul

1778 Surat-surat mengenai usul dan pengangkatan Gubernur Aceh.

7 Oktober 1956 - 5 Januari 1957
asli

1 lembar

1779 Berkas mengenai rencana dan biaya pembangunan daerah Propinsi Sumatera Utara.
15 Juni 1957
asli
1 sampul

1780 Berkas mengenai pembentukan daerah otonom Maluku Utara Tk.I.
Juli - Agustus 1957
asli
1 sampul

1781 Llaporan perjalanan ke Kalimantan dalam rombongan Presiden menghadiri peresmian Ibukota daerah Otonom Tk.I Kalimantan Tengah.
20 Juli 1957
asli
1 sampul

1782 Laporan pekerjaan dari Team Biro Perancang Negara ke daerah Sumatera Selatan.
29 Juli 1957
asli
1 sampul

1783 Berkas mengenai rencana pembagian wilayah Indonesia dalam daerah - daerah tingkat I dan tingkat II.
Agustus 1957
asli
1 sampul

1784 Berkas mengenai status Pamong Praja berhubung dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
3 Agustus 1957 - 1 Juli 1958
asli
1 sampul

1785 Laporan rencana pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Barat.
10 Agustus 1957
asli
1 sampul

1786 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai laporan misi pemerintah ke Sulawesi Utara.
13 Agustus 1957
asli
1 sampul

1787 Surat Edaran No.15/RI/1957 tanggal 26 Agustus 1957 tentang pemberian informasi kepada Menteri Utama Hubungan Antar Daerah atau pejabat-pejabat dari Kementerian Urusan Hubungan Antar Daerah.

26 Agustus 1957
asli
1 lembar

1788 Surat dari Gubernur Nusa Tenggara kepada Menteri Dalam Negeri mengenai rencana pembangunan lima tahun Provinsi Nusa Tenggara.

30 Agustus 1957
asli
1 sampul

1789 Surat-surat mengenai pengangkatan Gubernur Propinsi Jambi.

24 - 26 Oktober 1957
asli
3 lembar

1790 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai pengangkatan sementara Residen Palembang sebagai Gubernur Sumatra Selatan KDT.I.

20 November 1957
pertinggal
3 lembar

1791 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pemecahan swatantra tingkat I dan II dalam wilayah Sumatera Utara

28 November 1957
asli
3 lembar

1792 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai usul pengangkatan Gubernur Jambi dan Riau.

10 Februari 1958
asli
1 sampul

1793 Surat Keputusan Menteri Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan tentang pembentukan Dewan Kerja Daerah Banten yang bertugas melaksanakan pekerjaan pembangunan rehabilitasi jalan Saketi - Malimping.

17 Maret 1958
asli
4 lembar

1794 Surat Edaran Perdana Menteri no.4/R.I./1958 tentang pungutan-pungutan extra yang dilakukan oleh daerah-daerah.

01 Mei 1958
salinan
1 sampul

1795 Laporan Panitia Adhoc Kabinet mengenai pengiriman misi ke Sumatera Barat (dalam rangka membangun kembali pemerintahan sipil di Sumatera Barat).

Mei - 3 Oktober 1958
asli
1 sampul

1796 Pidato Kepala Daerah Provinsi Aceh dalam upacara Kebangkitan Nasional di Kutaraja.

20 Mei 1958
asli
1 sampul

1797 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Wakil Perdana Menteri I RI mengenai mekanisasi Biro Tata Usaha Kepegawaian di Yogyakarta, beserta lampiran.

01 October 1958
asli
4 lembar

1798 Berkas mengenai resolusi dari DPRD Swatantra Simalungun, Pekalongan, Sidoardjo, Magelang dan Langkat tentang beberapa permasalahan di daerah.

13 November 1958
asli
1 sampul

1799 Berkas mengenai kondisi terakhir di daerah Aceh kepada pemerintah.

25 Maret - 15 April 1959
asli
1 sampul

1800 Laporan perjalanan Gubernur/Kepala daerah Istimewa Aceh ke tanah Alas dan Gayo Luas.

21 Juni 1959
asli
1 sampul

1801 Laporan Keputusan Rapat Perpepu - Perperda pada tanggal 29 s/d 30 Juni 1959.

29 - 30 Juni 1959
fotokopi
5 lembar

c. Organisasi Sosial dan Politik

1802 Berkas mengenai Putusan Sidang Partai Rakyat Indonesia (PRI) dan sikapnya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 1950.

9 Juli 1950 & 19 Agustus 1954
salinan
1 sampul

1803 Surat-menyurat antara Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai peraturan penjualan kartu infaq perjuangan Partai Masjumi.

14 Agustus 1950 - 24 Januari 1951
asli
4 lembar

1804 Berkas mengenai Organisasi Anti Indonesia (AI).
22 Agustus - 8 Januari 1951
salinan
1 sampul

1805 Laporan dari Kepala Kepolisian Indonesia mengenai kegiatan aktifitas pihak kiri yaitu PKI, SOBSI dan mantan anggota FDR.
7 September - 30 Oktober 1950
asli
5 lembar

1806 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai laporan tentang "rapat cabang PNI Jogjakarta" , "Perundingan oposisi soal kabinet baru" & "Pembentukan kabinet dengan partai kiri".
9 - 20 September 1950
asli
5 lembar

1807 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pernyataan Partai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) dalam rapatnya di Jakarta.
13 September 1950
asli
2 lembar

1808 Berkas mengenai Peraturan sementara dari Organisasi Gabungan Pemuda Bekas Angkatan Perang.
17 September 1950
asli
1 sampul

1809 Peraturan dasar Partai Rakyat Nasional "Program Politik".
30 Oktober 1950
fotokopi
1 sampul

1810 Surat dari Bagian Politik/Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai salinan resolusi-resolusi Partai Puteri Indonesia cabang Medan.
1 November - 7 Desember 1950
asli
5 lembar

1811 Berkas mengenai organisasi gelap "Banteng Wulung".

2 Novmber 1950 - 9 Januari 1951
salinan
1 sampul

1812 Surat-surat dari Kepala Jawatan Kepolisan Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai rapat-rapat PKI dan SOBSI di Surabaya, Bandung dan Serang.
15 November - 12 Desember 1950
asli
9 lembar

1813 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai laporan Konferensi PNI dan Kongres Gerilya Indonesia (KGI) di Jawa Timur.
17 November 1950
salinan
4 lembar

1814 Berkas mengenai organisasi Persatuan Anggota Gerilya Indonesia (PAGI).
20 November 1950
asli
1 sampul

1815 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai dokumentasi propaganda CC PKI berjudul "Kewajiban Kita" & "Revolusi Belum Selesai".
28 November 1950
asli
3 lembar

1816 Surat dari Komandan Corps Polisi Militer kepada Perdana Menteri mengenai naskah persatuan kaum kiri (komunis).
21 Desember 1950
asli
2 lembar

1817 Berkas mengenai keterangan Dewan Pimpinan Partai Masjumi terkait perbedaan dengan Gerakan Darul Islam.
20 Januari 1951
asli
1 sampul

1818 Berkas mengenai Kongres Rakyat Perjuangan Irian dan Makassar dengan lampiran.
20 Januari 1951
fotokopi
1 sampul

1819 Berkas mengenai resolusi PNI dan Pemuda Demokrat Indonesia Kota Bakti (Aceh) tentang pembubaran rapat oleh alat-alat kekuasaan negara.
2 Februari 1951 - 13 Oktober 1953

asli
1 sampul

1820 Resolusi Gerakan Pemuda Ansor dalam kongresnya yang pertama di Surabaya.
27 Februari 1951
asli
1 lembar

1821 Berkas mengenai resolusi dan pernyataan Partai Murba tentang Hari Ulang tahun 17 Agustus 1951 dan penolakan kerjasama dengan pihak imperialis.
11 Agustus 1951 - 10 Maret 1954
asli
1 sampul

1822 Surat pernyataan pengurus besar gabungan kepanduan Makasar mengenai pengakuan terhadap Pandu Rakyat Indonesia (PRI) sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia.
07 September 1951
asli
2 lembar

1823 Berkas mengenai "*Schaduw bestuur* " Masjumi.
20 Desember 1951 - 12 Juni 1952
tembusan
7 lembar

1824 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian mengenai daftar nama-nama bekas buruh kontrak New Caledonie yang tergabung dalam PBI (Persatuan Buruh Indonesia).
1952
pertinggal
5 lembar

1825 Mosi Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia terkait nasionalisasi perusahaan listrik dan gas Wilayah Gresik.
1952 - 1953
asli
1 sampul

1826 Surat dari Kepala Bagian Politik kepada Menteri Luar Negeri mengenai pernyataan Pemuda Rakyat ranting Delanggu terhadap penahanan mantan serdadu Belanda.
02 Januari 1952
pertinggal
2 lembar

1827 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai reaksi golongan Parkindo dan katholiek terhadap pembentukan Kantor Urusan Agama bagian Islam di daerah Timor-Kupang.
15 Januari - 28 Februari 1952

asli
2 lembar

1828 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai laporan kongres Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), beserta lampiran.

19 Januari 1952
8 lembar
salinan

1829 Berkas mengenai hasil Kongres Wanita Indonesia.

17 Februari 1952 - 5 September 1956
asli
1 sampul

1830 Surat dari SOBSI kepada Menteri Pertahanan mengenai protes terhadap tindakan Kolonel Bambang Sugeng, Panglima Divisi I Brawijaya yang sewenang-wenang.

12 Maret 1952
tembusan
2 lembar

1831 Berkas mengenai petisi *Commisie Rechtspositie Amboneze Militeiren en Schepelingen* (C.R.A.M.S)

14 Maret 1952
asli
1 sampul

1832 Berkas mengenai kegiatan politik dari orang-orang Tionghoa yang beraliran kiri di Kepulauan Riau.

22 Maret - 28 Agustus 1952
asli
5 lembar

1833 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai organisasi Sentral Gerakan Ekonomi Rakyat (Segera).

15 Mei - 27 September 1952
asli
6 lembar

1834 berkas mengenai kasus Darwis bergelar Datuk Rangkayo Basa anggota PKI dan Pemuda Rakyat di Sumatera Tengah.

28 Mei 1952
asli
1 sampul

1835 Berkas mengenai gerakan tentara "Jin" atau "gaib" di Tarakan.

05 Juni 1952
asli
1 sampul

1836 Ikhtisar mingguan mengenai kepartaian yang berdasarkan Ketuhanan.

13 - 19 Juli 1952
salinan
1 sampul

1837 Ikhtisar Mingguan mengenai organisasi-organisasi pemuda/wanita, pelajar/mahasiswa, sosial/keagamaan/kebudayaan.

14 - 20 Juli 1952
salinan
1 sampul

1838 Surat dari Ketua Panitia Penghapusan Swapraja Bonthain kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan partai-partai/organisasi di Bonthain pada 6 Juli 1952.

16 Juli 1952
asli
4 lembar

1839 Kutipan dari Berita Masjumi mengenai Panitia Pembela Proklamasi.

22 Juli 1952
salinan
1 lembar

1840 Surat dari atas nama Perdana Menteri kepada Menteri Pertahanan mengenai pernyataan PKI tentang Pakta Pasifik, beserta lampiran.

14 August 1952
asli
5 lembar

1841 Surat dari kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai *verslag* Muktamar Masjumi ke-6.

23 September 1952
asli
5 lembar

1842 Surat dari Menteri Dalam Negeri mengenai Perkumpulan "Kantong Item", beserta lampiran.

13 Oktober 1952
asli
2 lembar

1843 Surat kepada Menteri Urusan Pegawai mengenai pernyataan PB Sarbuksi mengenai tenaga asing, beserta lampiran.

15 Oktober 1952
pertinggal
3 lembar

1844 Surat selebaran markas besar satuan gerombolan di seluruh Indonesia.

24 Oktober 1952

asli
4 lembar

1845 Surat pernyataan NU mengenai keadan sulit masa kini.
22 November 1952
fotokopi
6 lembar

1846 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai kedatangan Doelsaman anggota Persatuan Rakyat Jelata di Lampung.
10 Desember 1952
pertinggal
4 lembar

1847 Surat mengenai Kesejahteraan Pelajar Sulawesi, tidak lengkap.
1953
asli
3 lembar

1848 Berkas mengenai Konfrensi Alim Ulama di Jogjakarta.
14 Januari 1953
salinan
1 sampul

1849 Berkas mengenai Resolusi-Resolusi Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) tentang permasalahan haji, pemilu, dan petani.
3 Februari 1953 - 16 Januari 1954
asli
1 sampul

1850 Surat dari Direktur Biro Rekonstruksi Nasional Pusat kepada Wakil Perdana Menteri mengenai pemberitahuan jumlah anggota "Pencak Silat" yang telah terdaftar pada 21 Oktober 1952.
04 Februari 1953
asli
1 lembar

1851 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pendirian 'Panitya Gerakan Rakjat Bebas" di Jakarta dan "Front Partyloos" di Minahasa.
15 Februari 1953 - 18 Maret 1954
asli
6 lembar

1852 Surat dari Ketua NU cabang Semarang kepada Wakil Perdana Menteri mengenai Keputusan Konferensi NU cabang Semarang.
27 Februari - 4 Maret 1953
asli
2 lembar

1853 Surat resolusi dari SOBSI mengenai pengusiran rumah-rumah penduduk di tanah-tanah partikulir.

28 Februari 1953
asli
2 lembar

1854 Berkas mengenai reaksi dari NU cabang Palembang dan DPP Serikat Buruh Gula terkait rencana pemerintah RI membuka perwakilan di Moskow.

10 & 31 Maret 1953
asli
1 sampul

1855 Laporan mingguan mengenai aktivitas Partai NU, PKI, PSI, Masjumi, Parindra, PRN, Organisasi Pemuda Rakyat, Pemuda (Locaal), Mystik.

13 Juli 1953
asli
1 sampul

1856 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pemaksaan menjadi anggota PIR di Ternate.

6 Agustus - 16 November 1953
asli
4 lembar

1857 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai "Program perjuangan Masyumi" & seruan M. Natsir kepada seluruh Anggota Masjumi mengenai kedudukannya sebagai partai oposisi.

11 September - 26 Desember 1953
asli
6 lembar

1858 Resolusi rapat umum rakyat daerah kelurahan Pasar Baru mengenai kondisi keanaman di Jakarta.

Oktober 1953
asli
2 lembar

1859 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai keterangan dari Partai Katholik Indonesia mengenai keinginan yang muncul di kalangan Umat Kristen di Indonesia.

10 Oktober - 13 November 1953
asli
2 lembar

1860 Berkas mengenai pernyataan dari beberapa organisasi sosial dan partai politik terkait pemindahan Gubernur Sumatera Utara (Abd. Hakim).

11 - 20 Oktober 1953
asli

1 sampul

1861 Berkas mengenai organisasi Gerakan Muslimin (GM).
27 Oktober 193 - 27 April 1954
asli
1 sampul

1862 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Program Partai Politik Islam Masyumi cabang Dompu.
11 November 1953 - 10 Juli 1954
asli
4 lembar

1863 Berkas mengenai Perserikatan Pemuda Malaya di Laut Tanah Air.
12 Januari 1954
asli
1 sampul

1864 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Organisasi Gerakan Pemuda Federal RI, beserta lampiran.
14 Januari 1954
asli
8 lembar

1865 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai *Katholieke Nederlanders Arbeiders* (KNAF).
16 Januari 1954
asli
4 lembar

1866 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rapat umum partai-partai di Sumedang guna menyokong kabinet Ali Wongso.
04 Februari 1954
asli
2 lembar

1867 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai peletakan Jabatan Ketua Umum Pusat Pimpinan Persatuan Islam oleh M.Isa Ashary.
13 Februari 1954
asli
4 lembar

1868 Berkas mengenai tanggapan-tanggapan dari warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan yang tergabung dalam BAPERKI dan PERWITT sehubungan dengan rencana UU Dwi Kewarganegaraan.
16 Februari 1954 - 29 Mei 1954
asli
1 sampul

1869 Surat Pernyataan Partai RI (Parindo) mengenai kondisi politik dalam negeri.
23 Februari 1954
asli
1 lembar

1870 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai kekeruhan yang terjadi antara 14 organisasi Islam dengan Kepala Jawatan Radio RI di Makassar, beserta lampiran.
26 Februari 1954
asli
4 lembar

1871 Berkas mengenai perpecahan antara anggota-anggota IPPI Daerah Jakarta Raya.
27 Februari 1954 - 1 Januari 1955
asli
1 sampul

1872 Berkas mengenai kongres BTI daerah Sumatera Selatan dan Sumatera Utara serta Resolusi BTI cabang Singosari dan Tuban.
1 Maret 1954 - 24 Juni 1958
asli
1 sampul

1873 Berkas tentang perkembangan organisasi Persatuan Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa (PERWITT) di Surabaya.
19 Maret 1954 - 17 Mei 1954
asli
4 lembar

1874 Berkas mengenai Konggres ke III Serikat Tani Indonesia "Sakti".
22 Maret 1954
asli
1 sampul

1875 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai kunjungan Mr. Roem anggota D.P. Masyumi ke Bangka.
03 April 1954
asli
3 lembar

1876 Surat dari a.n. Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai protes atas rapat Sobsi Cabang Cepu, beserta lampiran.
18 Mei 1954
asli
1 sampul

1877 Berkas mengenai Organisasi Pemuda Negara.
25 Mei 1954 - 22 Februari 1955

asli
1 sampul

1878 Surat Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai Organisasi Usaha Indonesia Dayak, beserta lampiran.

5 Juni 1954
asli
4 lembar

1879 Surat-surat mengenai resolusi bersama partai/organisasi Islam Makasar tentang bantuan Pemerintah kepada Madrasah-Madrasah.

6 Agustus - 5 Oktober 1954
asli
4 lembar

1880 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pendirian organisasi baru bernama 'Panitia - Non Partai' di Pontianank.

15 Agustus 1954 - 25 Januari 1955
asli
8 lembar

1881 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai protes PKI terhadap larangan berdirinya Partai Komunis di Pakistan.

21 Agustus 1954
asli
2 lembar

1882 Berkas mengenai Kongres Pemuda Riau.

26 Agustus 1954 & 24 November 1954
salinan
1 sampul

1883 Berkas mengenai Keputusan Sidang Dewan Partai Rakjat Nasional (PRN)

10 September 1954
asli
8 lembar

1884 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai usaha-usaha Partai PIR dalam persoalan kabinet.

22 Oktober - 18 November 1954
asli
5 lembar

1885 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai hasil Konferensi para Ulama Masyumi Jawa Timur.

03 November 1954
asli
1 lembar

1886 Berkas mengenai sikap politik Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII) terhadap Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

9 - 11 November 1954
asli
1 sampul

1887 Berkas mengenai pernyataan Partai Pantja Sila tentang oposisi Kabinet Ali dan plakat tentang Perjuangan Irian Barat.

19 November - 29 Desember 1954
asli
1 sampul

1888 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai organisasi "Badan Pembela Islam", beserta lampiran.

24 November 1954
asli
2 lembar

1889 Surat dari Kepala Polisi Provinsi Sulawesi kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai ceramah Dr. A. Sabu dari PNI di Sulawesi Utara.

27 November 1954
salinan
2 lembar

1890 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rapat akbar Masyumi di Sukabumi.

29 November 1954 - 18 Februari 1955
asli
4 lembar

1891 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai surat permohonan pengembalian pakaian Kepanduan Ansor.

3 Desember 1954
pertinggal
2 lembar

1892 Surat dari Ketua Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) kepada Perdana Menteri mengenai putusan-putusan Kongres ke V Partai PIR di Semarang.

16 Desember 1954 - 15 januari 1955
asli
1 sampul

1893 Berkas mengenai deklarasi-deklarasi para anggota Pengurus Besar Parki (Partai Kebangsaan Indonesia).

19 Januari 1955
asli
1 sampul

1894 Surat dari Sekretaris Umum Pengurus Besar Partai Adat Rakjat (PAR) kepada Perdana Menteri mengenai pengumuman PAR yang tidak mengakui Ruslan Mulhohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sumatera Tengah.

01 Februari 1955
asli
5 lembar

1895 Laporan hasil Kongres Pelajar Pejuang Seluruh Indonesia tanggal 31 Januari di Kaliurang.

2 Februari 1955
asli
1 sampul

1896 Surat Edaran Perdana Menteri tentang turut sertanya pegawai negeri dalam kehidupan politik dan partai politik.

21 Februari 1955
fotokopi
3 lembar

1897 Berkas mengenai resolusi-resolusi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) cabang Senen dan putusan Konggres I Gerwani cabang Bandung.

28 November 1954 - 27 Februari 1955
asli
1 sampul

1898 Berkas mengenai Kongres Rakyat seluruh Indonesia.

16 Agustus - 13 September 1955
asli
1 sampul

1899 Berkas mengenai resolusi Front Sosialis Kerakyatan Kebayoran tentang persoalan tanah dan pembongkaran gubuk-gubuk liar untuk membangun Kota Baru Kebayoran.

1 - 22 Mei 1956
asli
1 sampul

1900 Surat pernyataan dukungan dari Gerwani cabang Trenggalek terhadap Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan keutuhan Bangsa dan Negara Proklamasi Indonesia.

26 Februari 1958
asli
1 lembar

1901 Surat dari Sekretaris Pelajar Indonesia di Swiss kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan Pelajar Indonesia di Swiss terkait keadaan politik di Indonesia.

02 April 1958
asli
4 lembar

1902 Keterangan Politbiro CC PKI :"Kembali kepada UUD '45 harus berarti kembali kepada semangat persatuan nasional & semangat anti-kolonialisme".

27 Februari 1959
asli
1 sampul

1903 Surat dari Direktur Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang (BAPPIT) kepada Kepala Cabang di lingkungan BAPPIT mengenai larangan keanggotaan partai politik untuk pejabat pemerintah.

11 Agustus 1959
tembusan
5 lembar

d. Pemilu

1904 Surat Keputusan DPRS R.I No. 28/K/1950 tentang penetapan peraturan cara pencalonan dan pemilihan untuk dianjurkan sebagai Wakil Presiden yang pertama.

26 September 1950
asli
2 lembar

1905 Surat dari Sekretaris Menteri Kehakiman kepada Ketua Dewan Menteri RI mengenai penyampaian nota mengenai RUU Pemilihan Umum Anggota-Anggota Konstituante, beserta lampiran.

06 Januari 1951
asli
6 lembar

1906 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai hak pilih Anggota Angkatan Perang.

06 Desember 1952
asli
4 lembar

1907 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan tentang "Persatuan Partai-Partai Politik PKI-PRN-PERMAI dan SOBSI yang bertujuan untuk menjatuhkan Pemerintahan Wilopo agar dapat memperpanjang waktu Pemilihan Umum".

11 Maret 1953
asli
2 lembar

1908 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai peranan Polisi menghadapi Pemilihan Umum.

09 Juni 1953
asli
4 lembar

1909 Berkas mengenai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang daftar daerah pemilihan Provinsi Sumatera Utara, Sunda Kecil dan Sumatera Selatan. n.b.: Sumatera Utara tidak disertai lampiran.

29 Juni - 14 Juli 1953

asli
1 sampul

1910 Surat dari Sekjen Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur Walikota Jakarta Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang persediaan uang untuk ongkos kantor dan badan-badan penyelenggara pemilihan.

23 April - 1 Desember 1953
asli
1 sampul

1911 Berkas mengenai cara mengangkat sumpah (menatakan keterangan) para anggota Badan-Badan Penyelenggara Pemilihan Umum.

16 - 20 November 1953
asli
1 sampul

1912 Surat Keputusan Walikota Jakarta Raya No. 23664/BPU dan 23665/BPU tentang penunjukan Wedana-Wedana untuk menjadi panitia penyelenggara Pemilihan Umum.

10 Desember 1953
salinan
2 lembar

1913 Kumpulan berkas mengenai pembelian alat-alat pembuatan kotak suara untuk Pemilu.

12 - 28 Agustus 1954
asli
1 sampul

1914 Berkas mengenai perubahan waktu Pemilu dan reaksi dari sejumlah organisasi.

3 Juni - 9 September 1954
asli
1 sampul

1915 Berkas mengenai Rancangan PP tentang cara pencalonan keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan non - aktif/pemberhentian dan pernyataan non - aktif dan pemberhentian terhadap Anggota Angkatan Perang dan sebagainya.

26 Juli - 27 Agustus1954
asli
1 sampul

1916 Berkas mengenai persiapan-persiapan Pemilu.

30 Juli 1954 - 10 November 1955
asli
1 sampul

1917 Berkas Rancangan PP tentang tata cara pencalonan untuk keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang.

21 Juli - 20 Agustus 1954
asli
1 sampul

1918 Berkas mengenai penentangan tanda gambar "PKI dan orang yang tidak berpartai".
21 September 1954 - 22 Januari 1955
asli
1 sampul

1919 Berkas mengenai Ichtisar Pemiilihan Umum No. 2 tahun 1954.
29 September 1954
asli
1 sampul

1920 Daftar calon anggota Konstituante dan DPR dalam Pemilihan Umum di seluruh daerah pemilihan.
1955
pertinggal
1 sampul

1921 Daftar calon sementara pemilihan anggota DPR dan Konstituante daerah pemilihan Kalimantan Timur.
1955
asli
1 sampul

1922 Berkas mengenai Pemilihan Umum tahun 1955.
5 Mei - 12 Oktober 1955
asli
1 sampul

1923 Ketetapan Panitia Pemilihan Umum tanggal 31 Juli 1955 tentang daftar calon tetap pemilihan anggota DPR tahun 1954 untuk tiap-tiap daerah pemilihan.
26 Mei 1955
asli
1 sampul

1924 Berkas mengenai permohonan penambahan anggota PPI.
30 Agustus 1955 - 2 Januari 1956
asli
1 sampul

1925 Surat dari Komite Aksi Pemilihan Umum Masjumi Wilayah XIV kepada Perdana Menteri mengenai penyebaran surat-surat selebaran partai dengan menggunakan oto perintah.
27 September 1955
asli
1 lembar

1926 Pengumuman PPI No. 19 dan No. 20 tentang proses pemilihan.
27 September - 25 Oktober 1955
Fotokopi
1 sampul

1927 Berkas mengenai penjagaan keamanan pemilu Daerah Kalimantan & Makasar.
28 September - 25 Oktober 1955
asli
1 sampul

1928 Surat dari Panitia Ad Hoc Pemilihan Umum kepada Dewan Menteri mengenai pembentukan Panitia Pemeriksaan menurut pasal 104 UU Pemilihan Umum.
22 October 1955
salinan
1 lembar

1929 Berkas mengenai pemberhentian & pengangkatan anggota-anggota PPI.
21 November 1955 - 3 Februari 1958
asli
1 sampul

1930 Surat Edaran wakil Perdana Menteri tentang pelaksanaan pemilihan anggota-anggota DPRD Jakarta Raya.
19 Juni 1957
asli
1 lembar

1931 Berkas mengenai laporan peninjauan PPI tentang Pemilu yang akan datang.
13 Maret - 30 Agustus 1958
asli
1 sampul

1932 Berkas mengenai berlakunya Keputusan Perdana Menteri No.100/PM/1954 bagi Sekretaris & pembantu-pembantunya pada panitia-panitia pemilihan yang dibentuk berdasarkan UU Pemilihan Umum.
12 Desember 1958 - 14 Maret 1959
asli
1 sampul

1933 Berkas mengenai menyampaian "*Progrees report*" ke II dari Panitia Ad hoc Pemilihan Umum .
10 September 1958
asli
1 sampul

1934 Berkas mengenai rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan K. Werdojo sebagai anggota PPI dan penambahan anggota PPI.
18 September 1958 - 31 Januari 1959

asli
4 lembar

1935 Keputusan hasil sidang Dewan Nasional ke XI tanggal 22 Oktober 1958 tentang penyederhanaan kepartaian dan perubahan UU Pemilu, beserta pengantar.
22 Oktober - 3 November 1958
asli
1sampul

1936 Berkas Mengenai penyederhanaan kepartian dan perubahan UU Pemilihan Umum.
23 October 1959
Fotokopi
1 sampul

e. Irian Barat

1937 Pernyataan Partai Murba mengenai Irian Barat.
17 November 1951
asli
3 lembar

1938 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Urusan Umum mengenai pernyataan bersama para mahasiswa & pemuda pelajar Indonesia Surabaya terkait Irian Barat.
5 Januari & 13 Desember 1951
asli
2 lembar

1939 Surat-surat dari Badan Perjuangan Irian barat dan Ketua DPRD sementara provinsi Jawa Barat mengenai tuntutan kembalinya Irian Barat.
19 - 28 November 1951
asli
3 lembar

1940 Surat dari Kepala Penerangan Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai turunan kawat Kepala Information Service Indonesia (ISI) Den Haag tentang Irian Barat.
19 & 29 November 1951
asli
4 lembar

1941 Berkas kawat sandi Kementerian Luar Negeri mengenai perundingan Irian Barat di Den Haag.
2 Desember 1951 - 26 Januari 1952
salinan
1 sampul

1942 Surat dari Pimpinan Masjumi - GPII cabang Negara kepada Perdana Menteri mengenai resolusi tentang Irian Barat.
18 Desember 1951
asli

2 lembar

1943 Surat dari Ketua Panitia Rakyat Balangan kepada Perdana Menteri mengenai resolusi rapat raksasa Panitia Pembela Irian barat di Raringin.

24 - 25 Desember 1951
asli
2 lembar

1944 Surat dari Kepala Bagian Politik/Keamanan kepada Menteri Urusan Umum mengenai penyampaian salinan pernyataan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Percetakan Indonesia Cabang Surabaya tentang Irian Barat.

5 Januari 1952
asli
3 lembar

1945 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai Rancangan Keputusan Presiden RI tentang perpanjangan waktu perundingan soal Uni Indonesia-Belanda, KMB & Irian Barat.

25 Februari 1953
pertinggal
3 lembar

1946 Pidato Mr. Ali sastroamidjojo di depan panitia 4 Sidang Umum PBB mengenai sikap Indonesia terhadap laporan Belanda mengenai Irian dan keadaan sosial dan perkembangan daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri.

05 Maret 1954
pertinggal
1 sampul

1947 Berkas mengenai pernyataan berbagai organisasi politik dan sosial tentang penghapusan Uni-Indonesia Belanda dan tuntutan pengembalian Irian Barat.

12 Juli - 30 September 1954
asli
1 sampul

1948 Laporan Mr. Sudjarwo mengenai permasalahan Irian Barat di Sidang Umum IX PBB.

30 November 1954
fotokopi
1 sampul

1949 Berkas Berita Antara dan *United Press* mengenai persoalan Irian Barat di Sidang Umum PBB.

10 - 11 Desember 1954
pertinggal, salinan
8 lembar

1950 Berkas mengenai tuntutan kembalinya Irian Barat ke Wilayah RI.

22 November 1956
asli

1 sampul

1951 Berkas mengenai pernyataan DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang pembebasan Irian Barat.

14 Desember 1957
asli, fotokopi
1 sampul

1952 Memo dari Kepala Direktorat PBB dan Organisasi-organisasi Internasional kepada Kementerian Luar Negeri mengenai sikap dan tindakan-tindakan Indonesia terhadap Belanda di konferensi-konferensi internasional, dimana Belanda mewakili Irian Barat (VIDE ECAFE) .

14 & 16 Januari 1958
4 lembar
fotokopi

1953 Berkas mengenai instruksi dan keputusan tentang pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian pusat dan daerah.

05 Februari 1958
asli
1 sampul

1954 Berkas mengenai keputusan-keputusan sidang Dewan Nasional VI (soal penyempurnaan Front Nasional Pembebasan Irian Barat).

3 - 10 Juni 1958
asli
1 sampul

1955 Berkas mengenai laporan perkembangan dan neraca keuangan Dana Perjuangan Irian Barat (Dapib).

Juni - November 1958
salinan, tembusan
1 sampul

1956 Surat-surat mengenai pengangkatan Presiden/Panglima Tertinggi sebagai Ketua Kehormatan Front Nasional Pembebasan Irian Barat.

30 Juli - 23 Agustus 1958
tembusan
3 lembar

1957 Berkas mengenai perjuangan Irian Barat di forum internasional.

09 - 28 Agustus 1958
asli
1 sampul

1958 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai ucapan-ucapan Sekjen SEATO yang menyinggung-nyinggung Indonesia/Irian Barat ketika ia berkunjung ke Australia.

30 September 1958

asli
1 lembar

f. Hubungan Luar Negeri

1959 Surat dari Sekjen Kementerian Kemakmuran mengenai penyampaian salinan surat dari *Handelscommissaris* tentang kerja sama antara Kerajaan Belgia dengan Republik Indonesia Serikat (dalam bahasa Belanda).

12 Januari - 13 Februari 1950
tembusan
3 lembar

1960 Berkas mengenai ikhtisar rapat, konferensi atau kongres internasional yang diikuti oleh wakil-wakil Indonesia.

19 Januari 1950 - 17 Oktober 1955
1 sampul
fotokopi

1961 Surat-surat telegram mengenai kunjungan Prof. Schermerhorn ke Yogyakarta

3 April 1950 - 27 Juli 1950
asli
1 sampul

1962 Berkas tentang permintaan bekas Konsul di Tiongkok Nasionalis Tuan New Shu Chun tetap tinggal di Jogjakarta

15 April - 6 Mei 1950
asli
4 lembar

1963 Berkas mengenai *Security Council United Nations Commission for Indonesia (central joint board)* .

1949 - 21 April 1950
pertinggal
1 sampul

1964 Berkas mengenai kunjungan tamu agung PJM Presiden RIS dan Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru di Jogjakarta tanggal 11-13 Juni 1950.

05 Mei - 21 Juni 1950
asli
1 sampul

1965 Berkas mengenai delegasi RI ke konferensi *Rubber Study Group* ke 7 di Brussel tanggal 2-6 Mei 1950, bahasa Inggris.

15 Mei 1950
asli
1 sampul

1966 Surat dari Jawatan Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai reaksi terhadap peperangan di Korea.

08 Juli 1950
asli
1 sampul

1967 Surat kawat dari dr. Soedarsono di New Delhi kepada Soeriadarma mengenai keterangan Belanda tentang penggantian pembiayaan masyarakat India dan Australia terkait vtcla.

31 Agustus 1950
asli
1 lembar

1968 Berkas mengenai rencana hubungan resmi antara Komisaris Agung Kerajaan Belanda dengan kementerian-kementerian.

2 - 19 September 1950
salinan
1 sampul

1969 Berkas mengenai Komisi Penghubung (*contact committee*) RI-UNCI dan tentang kunjungan anggota UNCI ke seluruh Jawa.

16 September 1950 - 21 April 1951
asli
1 sampul

1970 Berkas mengenai permohonan dan perijinan kepada Duta Besar RRC untuk membuka konsulat-konsulat di Indonesia oleh beberapa organisasi kemasyarakatan Tionghoa di Sumatera Utara, Sumatera Timur dan Aceh.

2 Oktober 1950 - 27 Januari 1951
asli
1 sampul

1971 Berkas mengenai konsul bangsa Indonesia untuk New Caledonia dan pengembalian buruh Indonesia ke Indonesia.

2 Oktober 1950 - 24 Januari 1952
salinan
1 sampul

1972 Berkas mengenai pemberian imuniteit diplomatik kepada Mahkamah Arbitrasi Uni dalam Daerah Uni.

25 Oktober 1950
asli
1 sampul

1973 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pegawai pemerintah di luar negeri.

27 Oktober 1950
asli
2 lembar

1974 Berkas Kementerian Luar Negeri mengenai daftar alamat surat, alamat kawat Perwakilan RI dan daftar alamat perwakilan RI, nama pegawai diplomatik/konsuler, kanselir dan pegawai tata usaha RI di luar negeri".

30 Oktober 1950, 28 Februari 1958
salinan
1 sampul

1975 Surat-surat mengenai pekerjaan imigrasi di Penang.

1 - 22 November 1950
asli, pertinggal
3 lembar

1976 Berkas mengenai kunjungan Presiden Soekarno ke Filipina dan Singapura.

21 November 1950 - 19 November 1950
salinan
1 sampul

1977 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Presiden RI mengenai kegiatan politik dan kebudayaan orang Tionghoa sejak adanya Kedutaan Agung RRC di Indonesia.

06 Desember 1950
salinan
1 sampul

1978 Laporan kawat dari Delegasi Indonesia di Tokyo kepada Perdana Menteri mengenai perundingan antara Indonesia dan Jepang.

06 Januari 1951
asli
2 lembar

1979 Berkas tentang Konferensi Radio Administratif di Geneva.

10 Januari - 26 Oktober 1951
asli
1 sampul

1980 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri tentang *Westerling fonds* dan *finds.*

13 Januari 1951
asli
1 sampul

1981 Instruksi Kepala Jawatan Sandi tentang turunan kawat-kawat dari luar negeri yang dialamatkan kepada Kementrian Luar Negeri.

20 Januari 1951
tembusan
2 lembar

1982 Surat surat mengenai usulan penggantian Komisaris Belanda di Jawa Timur.

23 Januari 1951
asli
6 lembar

1983 Berkas panitia Negara Khusus untuk meninjau kembali persetujuan-persetujuan Indonesia dengan Belanda.

26 Januari - 23 Mei 1951
asli
1 sampul

1984 Pengumuman Dewan Menteri tentang pernyataan persetujuan keanggotaan RI pada *World Meteorological Organisation* .

30 Januari 1951
pertinggal
1 lembar

1985 Berkas mengenai keikutsertaan RI dalam konvensi-konvensi Genewa tanggal 12 Agustus 1949.

5 Februari 1951 - 9 April 1958
asli
1 sampul

1986 Nota Dinas dari KSAD mengenai pembukaan perwakilan tentara sebagai "Attache Militer" di luar negeri .

14 Februari 1951
asli
1 lembar

1987 Memori dari Kementerian Luar negeri No.10971 tentang kedudukan pegawai dari Kementerian Perdagangan yang dipekerjakan pada Perwakilan RI di luar negeri.

7 - 19 Maret 1951
Fotokopi
5 lembar

1988 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai dunia Arab di Indonesia, beserta lampiran.

8 Maret 1951
asli
8 lembar

1989 Surat dari Menteri Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai usul penunjukan utusan RI ke *Fourth World Health Assembly* di Genewa tahun 1951.

15 Maret 1951
asli
2 lembar

1990 Berkas Kementerian Luar Negeri mengenai pembukaan Konsulat-Konsulat RRC di Indonesia.

15 - 16 Maret 1951
pertinggal
1 sampul

1991 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang pengangkatan Sdr.Soejoto Dharmo sebagai Kanselir I Bagian Administrasi pada Perutusan RI di PBB New York.
16 Maret - 28 April 1951
asli
6 lembar

1992 Laporan dari *United Nations Commission for Indonesia* (UNCI) No.UNCI/226.
3 - 18 April 1951
asli
1 sampul

1993 Surat dari Komisi Penghubung Indonesia kepada Menteri Luar Negeri tentang pembubaran UNCI.
05 April 1951
asli
4 lembar

1994 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Kabinet Perdana Menteri mengenai kedatangan Perdana Menteri Pakistan, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.
13 - 14 April 1951
asli
3 lembar

1995 Berkas mengenai keanggotaan RI dalam *International Islamic Economic Organization* (IIEO).
14 April - 1 Juni 1951
asli
1 sampul

1996 Berkas mengenai rancangan perjanjian antara RI dengan Republik Hongaria.
19 April 1951 - 24 April 1952
fotokopi
1 sampul

1997 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai tata cara pengiriman kawat ke luar negeri.
23 April 1951
asli
7 lembar

1998 Berkas mengenai surat pernyataan simpati dan ucapan selamat terhadap Perdana Menteri Dr. Sukiman dari Sekretaris *World Muslim Conference*.
30 April - 08 Juni 1951

pertinggal
1 sampul

1999 Surat dari duta RI pada tahta Suci kepada Menteri Luar Negeri mengenai laporan-laporan tentang Vatikan.

19 Mei 1951
pertinggal
3 lembar

2000 SK Menteri Luar Negeri RI tentang pengangkatan Oemar Said Soerjatmaja sebagai *attache* pada Komisariat Agung RI di Denhaag.

26 Mei 1951
fotokopi
2 lembar

2001 SK Menteri Luar Negeri RI No.SP/345/Angk. tentang pengangkatan Jus Gani sebagai *attache* pada Kedutaan Besar RI di Manila.

26 Mei 1951
asli
2 lembar

2002 SK Menteri Luar Negeri RI; No.SP/351/Angk. tentang pengangkatan R. Ruslan sebagai *attache* pada Kedutaan Besar RI di Washington.

29 Mei 1951
pertinggal
4 lembar

2003 Berkas mengenai pengangkatan Achmad Shahab pegawai di Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung sebagai *public relations assistant* dengan tidak berstatus diplomatik pada Perwakilan RI di Bangkok.

29 Mei - 13 Juli 1951
pertinggal
7 lembar

2004 SK Menteri Luar Negeri RI; No.SP/354/Angk. tentang pengangkatan Sudarjo Sastrosatomo sebagai pejabat perwakilan luar negeri kelas V dengan kedudukan sebagai Counsellor pada Kedutaan Besar RI di Washington.

31 Mei 1951
kopi
4 lembar

2005 SK Menteri Luar Negeri RI; No.SP/353/Angk.tentang pengangkatan Sdr. Mr.Abdullah Sidik sebagai Counsellor pada Kedutaan Besar RI di Manila.

02 Juni 1951
Kopi
2 lembar

2006 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia tentang Partai Kuo Min Tang di Bandung yang masih menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Nasionalis Tiongkok di Taiwan.

02 Juni 1951
asli
1 lembar

2007 Berkas mengenai pedoman pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang antikumulasi menurut persetujuan Konferensi Meja Bundar.

29 Juni - 1 September 1951
salinan
4 lembar

2008 Berkas mengenai larangan untuk berhaji bagi kaum Islam Filipina.

9 Juli - 20 Juli 1951
asli
3 lembar

2009 Surat dari kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri kepada Dr. A.G.A van Linabauer mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Jerman Barat.

9 Juli 1951
asli
2 lembar

2010 Berkas mengenai Goodwill Mission RI ke Birma dan Timur Tengah.

12 Juli 1951 - 9 April 1954
asli
1 sampul

2011 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI; No.SP/380/Angk. tentang keberangkatan Achadi, Aspirant Vice Konsul Konsulat Jenderal RI ke Hongkong.

16 Juli 1951
fotokopi
4 lembar

2012 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri tentang *intervieuw* Sutan Syahrir dengan surat kabar dari Antwerpen.

19 Juli 1951
pertinggal
3 lembar

2013 Surat dari Kedutaan Besar RI di Karachi kepada Perdana Menteri mengenai laporan pertemuan antara Kuasa Usaha Kedutaan Besar RI dengan wakil *United Nation* untuk pertemuan Indonesia dan Belanda (Dr. F.Graham).

27 Juli 1951
asli
1 lembar

2014 Maklumat Duta Indonesia untuk Mesir dan Arabia tentang penunjukan Ir. R. Sanusi sebagai penyelenggara pimpinan bagian dagang kedutaan Indonesia di Cairo.

02 Agustus 1951
asli
2 lembar

2015 Seri pengumuman Sekretaris Dewan Menteri dari No.24 sampai No. 52 tentang kegiatan yang berhubungan dengan Belanda.

7 Agustus - 27 November 1951
asli
1 sampul

2016 Berkas mengenai *Colombo Exhibition* .

13 Agustus 1951 - 15 Maret 1956
asli
1 sampul

2017 Surat dari Jakasa Agung kepada Perdana Menteri mengenai berita radio dari Maskawa Rusia.

18 Agustus 1951
asli
1 lembar

2018 Surat dari Kementerian Luar Negeri tentang keikutsertaan Indonesia dalam *World Government Conference* .

18 Agustus 1951
pertinggal
2 lembar

2019 Berkas mengenai *Indo Eenheids Verbond* atau perkumpulan perhimpunan-perhimpunan di Indonesia.

1 September 1951 - 30 Januari 1952
asli
1 sampul

2020 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri mengenai permohonan mengirimkan surat kepada Perdana Menteri India dan Perdana Menteri Birma.

4 - 8 September 1951
pertinggal
5 lembar

2021 Berkas mengenai *International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering* .

21 September 1951 - 9 April 1952
asli
1 sampul

2022 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai perjanjian *Technical Assistance dan Exchange of Letter* antara Indonesia-PBB, beserta lampiran.

24 Oktober 1951 - 18 November 1954
asli
1 sampul

2023 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang perintah kepada Mr. Utoyo, Duta Besar RI di Canberra untuk kembali ke tempat kedudukannya di Canberra.

22 Oktober 1951
pertinggal
2 lembar

2024 Laporan mengenai kejadian-kejadian penting di luar negeri dalam Bulan Juli sampai Agustus 1951 dari Jawatan Kepolisian Negara.

23 Oktober 1951
tembusan
1 berkas

2025 Surat dari Kepala Kepolisian Sumatera Utara kepada Perdana Menteri mengenai *Bartergebeid* di Aceh.

05 November 1951
pertinggal
4 lembar

2026 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai akan dibukanya Perwakilan Indonesia di Siam dan Jerman Barat.

05 November 1951
asli
2 lembar

2027 Berkas mengenai pengeluaran redaktur harian Buruh Tionghoa Kung Sheng di Bangka Belitung.

7 November 1951 - 14 September 1953
asli
1 sampul

2028 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai pelarangan utusan dari Indonesia ke Konferensi Panitia Perdamaian Dunia karena dianggap pro komunis.

09 November 1951
pertinggal
3 lembar

2029 Nota Rahasia Wakil Komisaris Agung mengenai perubahan UUD Belanda.

14 November 1951
pertinggal
1 sampul

2030 Berkas mengenai Sudan dan Mesir antara lain Nota tentang gelar baru bagi Raja Farouk sebagai "Raja Mesir dan Sudan".

20 November - 31 Desember 1951
asli
1 sampul

2031 Surat dari Kedutaan Besar Indonesia di Australia kepada Menteri Luar Negeri mengenai S*eminar on Government Administration* .

23 November 1951
asli
1 sampul

2032 Berkas mengenai perutusan perundingan antara Indonesia dengan Nederland.

3 - 4 Desember 1951
pertinggal
4 lembar

2033 SK Presiden RI No. 241 tentang penunjukan delegasi *Asian Man Power Technical Conference* tanggal 12 sampai dengan 26 Desember 1951 di Bangkok, Thailand.

5 Desember 1951 - 6 Desember 1951
pertinggal
2 lembar

2034 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan keadaan di Tiongkok Baru mengenai gambaran keadaan RRC pada umumnya.

06 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

2035 Surat pernyataan Panitia Pembantu Perjuangan Mesir mengenai penyokongan terhadap perjuangan Mesir.

7 - 29 Desember 1951
salinan
3 lembur

2036 Berkas Kementerian Luar Negeri mengenai jumlah pegawai pada Perwakilan-Perwakilan RI Bulan Juli dan Agustus 1951 .

10 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

2037 Pengumuman no. 55 mengenai laporan delegasi Indonesia yang akan diutus ke Jepang untuk mengikuti perjanjian bilateral serta penetapan susunan delegasinya.

12 Desember 1951
Fotokopi
3 lembar

2038 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tentang perbandingan kekuatan Amerika Serikat dan Soviet - Rusia, beserta lampiran.

12 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

2039 Laporan rahasia mengenai pembatalan hubungan kerja sama Uni Indonesia - Belanda di bidang keuangan, n.b.: (Arsip dalam Bahasa Indonesia dan Belanda).

18 Desember 1951
asli
1 sampul

2040 Berkas mengenai Instruksi Pemerintah RI mengenai perutusan Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda di Den Haag.

18 - 24 Desember 1951
pertinggal
5 lembar

2041 Surat kawat sandi dari Kementerian Luar Negeri kepada Komisaris Agung Den Haag tentang *affaire* Blitar dan Talisse.

24 Desember 1951 - 10 Januari 1952
tembusan
5 lembar

2042 Surat kawat dari Kementerian Luar Negeri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai penunjukan Soesilowati untuk mengikuti *Women Assosiation Conferention* .

24 Desember 1951
asli
1 lembar

2043 Laporan putusan rapat DPLT PSII mengenai sikap partai terhadap pergolakan Negara-Negara di Timur Tengah.

29 December 1951
asli
4 lembar

2044 Berkas mengenai penjelasan Kementerian Luar Negeri atas *Mutual Securtiy Act* .USA.

4 Januari - 9 Februari 1952
asli
1 sampul

2045 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai mutasi Kepala-Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri.

08 Januari 1952

pertinggal
3 lembar

2046 Berkas tentang RUU mengenai perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan India, Pakistan, Burma, dan Filipina.

15 Januari - 11 Juli 1952
asli
1 sampul

2047 Berkas mengenai permohonan *Zionistenbond* organisasi untuk mengirimkan uang 2450 Pound ke Israel.

16 Januari 1952 - 4 September 1954
tembusan
1 sampul

2048 Surat dari Ketua Delegasi Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan delegasi Indonesia dalam perundingan antara dua negara di Jepang, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.

18 Januari 1952
asli
1 sampul

2049 Surat dari Kementerian Pertahanan kepada Menteri Perhubungan mengenai pengiriman delegasi ke Monaco untuk mengikuti konferensi Hidrografi.

19 Januari 1952
pertinggal
1 lembar

2050 Surat dari Kabinet Perdana Menteri Kepada Menteri Luar Negeri mengenai penempatan Pegawai Tinggi di luar negeri.

19 Januari - 15 Februari 1952
pertinggal
1 sampul

2051 Surat kawat tentang perundingan yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda mengenai delegasi Indonesia di Negeri Belanda.

24 Januari - 26 Februari 1952
asli
1 sampul

2052 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai hubungan radio antara Hoge Commissariaat Belanda dengan pemerintahnya.

7 Februari 1952
tembusan
1 lembaran

2053 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai pengumuman No. 70 tentang hasil rapat soal-soal perundingan Indonesia-Belanda dan soal penukaran surat antara Menteri Luar Negeri dan Ambasador Amerika Serikat di Jakarta mengenai MSA.

12 Februari 1952
tembusan
2 lembar

2054 Berkas mengenai pembatalan kepergian P.L.Lee Meyer menyertai Kepala Jawatan PTT ke Brussel dalam rangka kongres UPU.

21 Februari - 12 Maret 1952
tembusan
2 lembar

2055 Laporan dari Jawatan Kepolisian Indonesia mengenai kawat van Royen kepada Hoge Commissariaat der Nederlanden di Jakarta.

27 Februari 1952
pertinggal
3 lembar

2056 Berkas mengenai pertukaran perwakilan diplomatik antara Indonesia dan Finlandia serta persetujuan pengangkatan Hugo Valvane sebagi Duta Finlandia di Indonesia.

7 April 1952 - 12 Agustus 1954
asli
1 sampul

2057 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Menteri PP&K mengenai aksi politik yang tidak diinginkan di Sekolah-Sekolah Tionghoa di Singkawang.

10 April - 12 Mei 1952
pertinggal
5 lembar

2058 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pegerakan nasional di Singapura dan Malaya yang menyebabkan imigrasi ilegal ke Kepulauan Riau.

13 Mei 1952 - 26 Maret 1953
tembusan
1 sampul

2059 Berkas mengenai pengiriman delegasi ke sidang *International Labour Organization* di Genewa.

19 - 27 Mei 1952
pertinggal
1 sampul

2060 Surat-surat dari Duta Besar RI di Bangkok mengenai pemimpin gerakan perlawanan Kambodia bernama Son Ngoc Thanh.

20 Mei - 16 Juli 1952

asli
5 lembar

2061 Berkas mengenai persahabatan antara RI dengan Republik Filipina.

23 Juni 1952
asli
1 sampul

2062 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepolisian Negara mengenai *Schadevergoeding van Japan* (permintaan kerugian tentara sekutu kepada Jepang).

27 Juni - 17 Juli 1952
asli
3 lembar

2063 Surat dari Duta Besar RI di Canbera kepada Menteri Luar Negeri tentang peserta *Government Administration Seminar* di Australia.

5 Juli - 11 Agustus 1952
asli
1 sampul

2064 Berkas mengenai permintaan Pemerintah Ceylon untuk menaikkan tingkat perwakilan di Indonesia dari Konsulat Jenderal menjadi Kedutaan serta mengangkat A.E Coonesinha sebagai Duta Besar.

8 - 24 Juli 1952
pertinggal
4 lembar

2065 Berkas mengenai keadaan masyarakat Indonesia di Suriname berupa kliping tulisan majalah.

11 Juli - 29 Agustustus 1952
asli
1 sampul

2066 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pembukaan Perwakilan RI di Moskow dan Belgrado.

20 Juli 1952
tembusan
1 sampul

2067 Surat dari Ikatan Perkumpulan Tionghoa di Jakarta kepada Perdana Menteri mengenai permohonan meninjau kembali surat keterangan yang wajib diisi oleh warga Tionghoa bila hendak bepergian ke Tionghoa.

23 Juli - 14 Agustus 1952
asli
1 sampul

2068 Berkas tentang kunjungan anggota *Nederlands Malitaire Missie* ke Pekan Baru untuk mencari korban pesawat P. 15 (Mustang).

25 Juli - 4 November 1952

salinan
1 sampul

2069 Berkas mengenai pernyataan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak setuju jika Perundangan Kewarganegaraan Belanda yang dibuat oleh Pemerintah Belanda juga berlaku untuk Irian Barat.

6 Agustus - 3 Desember 1952
Konsep, pertinggal
1 sampul

2070 Berkas mengenai kedatangan Missi Ekonomi Belgia ke Indonesia.

14 Agustus - 6 November 1952
pertinggal
1 sampul

2071 Berkas mengenai kunjungan Malcolm Mac Donald ke Bali.

14 Agustus - 11 September 1952
pertinggal
1 sampul

2072 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Menteri Pertahanan RI di Jakarta mengenai keterlambatan meneruskan surat-surat yang berisi nota dari Pemerintah Canada kepada Duta Besar RI di Washington.

25 Agustus - 4 November 1952
salinan
5 lembar

2073 Berkas mengenai perjanjian berdasarkan hukum sipil dengan Drs. A. Oudt untuk menjalankan kantor akuntan di Negeri Belanda bagi keperluan Indonesia.

27 Agustus - 2 Oktober 1952
asli
1 sampul

2074 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada para menteri mengenai penempatan tenaga Bangsa Indonesia pada Sekretariat PBB.

3 September 1952 & 17 April 1953
pertinggal
3 lembar

2075 Berkas mengenai perutusan Pemerintah RI ke penobatan Ratu Inggris Elizabeth II pada 2 Juni 1953.

9 September 1952 - 16 Januari 1953
asli
1 sampul

2076 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan delegasi Indonesia yang pergi ke Peking.

17 September 1952
pertinggal
1 lembar

2077 Berkas mengenai tawaran FAO untuk mengikuti *Far Eastern Demonstration Centre* di Thailand.

17 - 23 Septembert 1952
pertinggal
6 lembar

2078 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri tentang laporan Konferensi *Commission Internationale de Police Criminelle* di Stockholm.

22 September 1952
asli
1 sampul

2079 Berkas mengenai permintaan persetujuan untuk Graaf van Bylandt sebagai Komisaris Agung Belanda di Jakarta.

24 September - 2 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

2080 Berkas mengenai tawaran pemerintah Ceylon untuk belajar dalam bidang koperasi, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.

30 September -1 Desember 1952
pertinggal
1 sampul

2081 Berkas mengenai penunjukan Drs. Hermen Kartowisastro ke sidang *Petroleum Committee* dari ILO di Scheveningen.

30 September - 10 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

2082 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan RUU tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Negara RI dan Negara India.

4 - 6 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

2083 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan RUU tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Negara RI dengan Negara Republik Filipina.

4 - 6 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

2084 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri tentang pembicaraan RI dengan Belanda mengenai Irian dan Unie.

4 - 7 Oktober 1952

pertinggal
1 sampul

2085 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan RUU tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Negara RI dan Negara Pakistan.
4 - 6 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

2086 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan RUU tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Negara RI dengan Negara Uni Birma.
06 Oktober 1952
tembusan
1 sampul

2087 Surat dari Kepala Polisi Sumatera Tengah kepada Perdana Menteri mengenai kedatangan Duta Besar Amerika Serikat bernama Merle Cohran ke Pekan Baru.
9 Oktober 1952
asli
2 lembar

2088 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian terjemahan memorandum dari Panitia Pergerakan Algier kepada Duta RI di Cairo.
09 Oktober 1952
asli
5 lembar

2089 Laporan dari Kepala Polisi Sumatera Tengah mengenai kunjungan Duta Besar Filipina ke Sumatera Tengah.
15 Oktober - 22 November 1952
salinan
1 lembar

2090 Berkas mengenai Pengesahan UU tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara RI dan Republik Suria.
28 November 1952 - 18 Juni 1953
pertinggal
1 sampul

2091 Berkas mengenai pembukaan Perwakilan RI di Australia.
29 November - 19 Desember 1952
pertinggal
1 sampul

2092 Salinan pidato dari Ketua delegasi Indonesia ke PBB (Saudara Moekarto Notowidigdo) di sidang PBB pada tanggal 10 November 1952, n.b.: arsip berbahasa Inggris.

15 Desember 1952
pertinggal
1 sampul

2093 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai nota dari Komisariat Agung Belanda mengenai pembeslahan pamflet-pamflet.
16 Desember 1952
pertinggal
3 lembar

2094 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai Konferensi Militer Kominform dari Asia di Peiping.
19 Desember 1952 - 6 Januari 1953
pertinggal
3 lembar

2095 Surat dari Kantor Pusat Jawatan Imigrasi kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai masukan dalam memberikan pendapat untuk perpanjangan visum jangka pendek.
5 Januari 1953
pertinggal
1 sampul

2096 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr.Harry Emil Poul Toyberg Frandzen sebagai Duta Besar Denmark untuk Indonesia, beserta lampiran.
10 - 15 Januari 1953
pertinggal
3 lembar

2097 Berkas mengenai Penolakan Aidit dan Nyoto dan pengusiran Sunito dan Go Gien Tjwan oleh Pemerintah Belanda.
13 Januari - 12 Maret 1953
asli
1 sampul

2098 Surat dari Duta Indonesia di Iran kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tahunan Kedutaan Teheran tahun 1952 untuk Kementerian Luar
17 Januari 1953
pertinggal
1 sampul

2099 Berkas mengenai pengiriman utusan RI ke persidangan ECAFE di Bandung.
20 Januari - 2 Juni 1953
pertinggal
1 sampul

2100 Berkas Kementerian Luar Negeri mengenai mutasi dan pengangkatan Kepala-Kepala Perwakilan RI di luar negeri.
22 Januari - 7 April 1953
asli
1 sampul

2101 SK Presiden bagi Sdr.Achmad Ali dan penetapan masa kerja yang dicapai selama tugasnya di Colombo & New Delhi.

11 Februari - 23 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

2102 Berkas mengenai permintaan pemerintah Birma untuk mengirimkan pegawai-pegawai ke Indonesia.

1 April - 4 Mei 1953
asli
9 lembar

2103 Daftar pegawai Kementerian Luar Negeri sebagai Konsellor dan Duta Besar di luar negeri.

04 Maret 1953
pertinggal
2 lembar

2104 Berkas mengenai permintaan Pemerintah Mesir untuk mengangkat Duta Mesir di Indonesia serta peningkatan status Perwakilan di Indonesia dari Kedutaan menjadi Kedutaan Besar.

3 - 26 Maret 1953
pertinggal
5 lembar

2105 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan pengangkatan Dr. Manuel Maples Arce sebagai Duta besar Mexico untuk Indonesia selain sebagai Duta Besar Jepang yang berkedudukan di Tokyo.

09 April 1953
pertinggal
1 lembar

2106 Berkas mengenai ijin warga negara dan penduduk untuk bepergian ke luar negeri khususnya RRC.

9 April - 12 September 1953
salinan
1 sampul

2107 Laporan dari Kepala Polisi Provinsi Sumatera Utara kepada Perdana Menteri mengenai kedatangan 3 orang bekas anggota Parlemen Jepang di Medan.

10 April - 5 Juni 1953
pertinggal
1 lembar

2108 Laporan dari Kepala Polisi Daerah IstimewaYogyakarta mengenai kunjungan anggota Ambasador Amerika di Yogyakarta.

14 April - 4 Mei 1953
asli

4 lembar

2109 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai Security dan Perwakilan di Moskow.

20 April & 4 Mei 1953
pertinggal
4 lembar

2110 Berkas mengenai Kongres Wanita sedunia di Denmark.

22 April 1953
asli
3 lembar

2111 Surat dari Menteri Luar Negeri mengenai *Informal request* di bawah Colombo Plan kepada New Zeland.

28 April - 27 Mei 1953
asli
3 lembar

2112 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Dr. Carlos Pedro Pito Ferreira sebagai Duta Besar Portugal di Indonesia.

15 Juni - 11 Juli 1953
pertinggal
3 lembar

2113 SK Menteri Luar Negeri tentang pembentukan Panitia Ad hoc hubungan Indonesia dan Jepang.

19 Juni 1953
tembusan
2 lembar

2114 Daftar nama-nama Pegawai Diplomatik dan Kepala-Kepala Bagian Konselerasi pada Perwakilan-Perwakilan RI di luar negeri.

Juli 1953
pertinggal
1 sampul

2115 Berkas mengenai pengiriman delegasi RI ke "*18 th Pasific Congress of Science*" di Manila dari tanggal 16 - 28 November 1953.

3 Juli 1953 - 23 November 1953
asli
1 sampul

2116 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penghapusan jaminan Nederland untuk hutang-hutang Indonesia, beserta lampiran dalam bahasa

23 Juli 1953
asli
3 lembar

2117 Berkas mengenai perutusan RI ke *Asian Regional Conference di Tokyo* .
9 Agustus - 26 September 1953
asli
1 sampul

2118 Nota dari Komisariat Agung Kerajaan Nederland mengenai larangan pengangkutan alat-alat senjata dan lain-lain barang strategis.
11 Agustus 1953
pertinggal
1 sampul

2119 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai usul untuk mengangkat Sdr. Mukarto Notowidigdo sebagai duta besar di Washington dan Mexico
19 - 31 Agustus 1953
asli
1 sampul

2120 Berkas mengenai susunan delegasi RI ke Sidang Umum VIII PBB.
21 - 25 Agustus 1953
pertinggal
1 sampul

2121 Surat-surat mengenai pengiriman kawat/berita dari Ketua Pastai Istiglal tentang kejadian terakhir di Marokko.
24 Agustus - 6 Oktober 1953
pertinggal
5 lembar

2122 Surat-surat mengenai permohonan persetujuan Pemerintah RI atas pengangkatan M. Renaud Sivan sebagai Ambasador Perancis di Indonesia.
7 - 16 September 1953
pertinggal
3 lembar

2123 Surat dari Perdana Menteri kepada Anthony Balinsky mengenai persetujuan untuk menerima Dr.Leon Baransky sebagai Penasehat Moneter dan Fiskal Biro Perancang Nasional.
22 September 1953 -13 April 1954
pertinggal
1 sampul

2124 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai plakat-plakat Tunisia tentang Asia.
24 September - 12 Oktober 1953
pertinggal
1 sampul

2125 Laporan dari Jawatan Kepolisian Negara mengenai kunjungan beberapa Wakil Asing ke Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Bali.

28 September - 14 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

2126 Laporan Polisi Negara Kantor Karesidenan Surabaya mengenai Duta Besar RI untuk RRC.

28 September - 10 Oktober 1953
asli
3 lembar

2127 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai perkunjungan Duta Italia JM Marques Pierluigi La Terza ke Medan.

28 September 1953
asli
6 lembar

2128 Surat dari Jaksa Agung kepada Menteri Luar Negeri mengenai peraturan pemerintah di Singapura tentang emigrasi.

6 Oktober 1953
asli
2 lembar

2129 Berkas mengenai perjalanan rombongan Residen Koordinator Kalimantan Barat ke Kuching Malaysia.

10 Oktober 1953 - 5 Februari 1954
asli
1 sampul

2130 Berkas mengenai misi militer Jerman Barat pengganti misi militer Belanda di Indonesia.

15 Oktober - 16 November 1953
pertinggal
1 sampul

2131 Laporan dari Sekretaris II H Pulungan pada *Indonesian Embassy* di Manila tentang observasi ketika di Jepang.

15 Oktober 1953
asli
5 lembar

2132 Berkas mengenai RUU tentang persetujuan antara RI dengan Jepang mengenai pengangkatan kapal-kapal yang tenggelam.

17 Oktober 1953 - 26 Februari 1958
pertinggal
1 sampul

2133 Berkas mengenai pengiriman kawat untuk Kuasa Usaha di Den Haag mengenai Uni Indonesia - Belanda dan KMB.

7 - 21 November 1953
asli
1 sampul

2134 Berkas mengenai permohonan persetujuan Pemerintah RI atas pengangkatan Mr. Badruddin Faiz Hasan Badruddin Tyabji sebagai Duta Besar India di Indonesia.

11 September - 17 November 1953
Kopi
3 lembar

2135 Surat-surat mengenai ijin pemasukkan senjata api dari Suriname.

18 November 1953 - 1 Februari 1954
asli
1 sampul

2136 Berkas mengenai rancangan perjanjian hydrografi Indonesia dan Belanda.

10 Desember 1953 - 4 Januari 1954
asli
1 sampul

2137 Laporan dari Panitia Koordinasi Interdepartemental mengenai Konferensi *Consultative Committee Colombo Plan* yang diadakan di New Delhi.

15 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

2138 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengiriman misi Liga Muslimin ke beberapa negara di Asia kecuali India.

22 Desember 1953
pertinggal
1 lembar

2139 Surat pernyataan Perdana Menteri untuk mengadakan pertemuan setiap tahun sekali atas usulan Perdana Menteri Ceylon dalam rangka memperkuat hubungan baik lima negara: Indonesia, India, Pakistan, Ceylon dan Birma.

12 Januari 1954
Kopi
2 lembar

2140 Laporan tentang Korea yang disusun berdasarkan tulisan-tulisan di media cetak.

22 Januari - 26 Februari 1954
asli
1 sampul

2141 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai perundingan antara RI dengan Jepang, beserta lampiran.

25 Januari 1954
pertinggal
1 sampul

2142 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Francois Nys sebagai Duta Besar Belgia di Indonesia sebagai pengganti Van der Sti Chelen.

26 - 30 Januari 1954
asli
3 lembar

2143 Surat dari Panitya Koordinasi Interdepatemental kepada Menteri Luar Negeri mengenai perpanjangan kontrak *White Engineering.*

30 Januari - 25 Mei 1954
asli
4 lembar

2144 Berkas mengenai perjanjian antara RI dengan RRC tentang Dwi Kewarganegaraan, beserta pengantar.

10 Februari 1954 - 3 Juli 1956
asli
1 sampul

2145 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan kegiatan Bagian Keamanan Perwakilan RI di Manila, beserta lampiran.

11 Februari 1954
asli
2 lembar

2146 Surat dari kedutaan Besar RI di Canada sehubungan dengan rencana perjalanan ke Eropa dan Asia termasuk Indonesia, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.

12 Februari 1954
asli
1 sampul

2147 Surat-surat mengenai permohonan keikutsertaan perwakilan Indonesia dalam s*eminar on Visual Aids in Education* di Australia.

16 - 27 Februari 1954
asli
3 lembar

2148 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian surat edaran Rahasia tentang adanya bahaya kudeta di Bangkok, beserta lampiran dalam bahasa Thailand.

18 Februari 1954
asli
3 lembar

2149 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Oswaldo Triguire Albuquerque sebagai Duta Besar Brazilia di Indonesia.

19 Februari - 14 April 1954
asli
1 sampul

2150 Berkas mengenai laporan perutusan Indonesia ke India untuk menghadiri *First Conference of the Permanent Indian National Commission,* 9 - 14 Januari 1954 di New Delhi India.

20 Februari 1954
salinan
5 lembar

2151 Berkas mengenai pengangkatan Tord Goransson sebagai Duta Besar Swedia di Indonesia.

24 Februari 1954 - 10 Maret 1959
pertinggal
4 lembar

2152 Berkas mengenai permintaan persetujuan dari Pemerintah Jerman Barat untuk mengangkat Dr.Helmut Allerdt sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari Jerman Barat di Indonesia.

3 - 25 Maret 1954
asli
4 lembar

2153 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian salinan kawat sandi dari Manila dan Rangoon sehubungan dengan kunjungan Wakil Presiden Garcia dan Perdana Menteri U Nu.

05 Maret 1954
salinan
4 lembar

2154 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian *voting Record of Indonesia - USSR - USA Political & Security Items 6th - 8th United Nations General Assembly* .

23 Maret 1954
asli
1 sampul

2155 Berkas mengenai laporan-laporan Jaksa Agung kepada Perdana Menteri tentang situasi keamanan politik di Thailand.

2 - 26 April 1954
asli
1 sampul

2156 Berkas mengenai permintaan persetujuan pemerintah Austria untuk mengangkat Arno Halusa Duta Besar Austria di Thailand merangkap sebagai Duta Besar Austria di Indonesia.

5 April - 26 Juli 1954
asli, pertinggal
1 sampul

2157 Berkas mengenai hasil konferensi para Perdana Menteri Asia-Afrika.

12 Mei - 2 Agustus 1954
tembusan
5 lembar

2158 Berkas mengenai L.H. Palmier seorang yang dianggap sebagai mata-mata dan diusulkan untuk meninggalkan negara Indonesia berdasarkan laporan dan bukti foto.

17 Mei 1954 - 21 Januari 1955
asli
1 sampul

2159 Resolusi II dari Sekretaris umum panitia 20 Mei 1957 Kabupaten Tuban kepada Perdana Menteri mengenai ganti kerugian perang antara Indonesia dan Jepang.

20 Mei 1954
fotokopi
1 lembar

2160 Berkas mengenai rencana penampungan pembayaran kerugian perang Jepang.

22 Mei -12 Juli 1954
tembusan
4 lembar

2161 Berkas mengenai usulan "*United Nation Seminar on Housing June 1955* " di Bandung.

11 Juni 1954 - Juli 1954
asli
1 sampul

2162 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Perdana Menteri mengenai keikutsertaan dalam *World Power Conference* yang diwakili oleh Kepala Direksi Tenaga Kaloris dan Kepala Direksi Tenaga Air di Rio de Janeiro.

16 Juni 1954
asli
4 lembar

2163 Berkas mengenai beberapa pokok pendapat misi Dewan Ekonomi Indonesia Pusat ke Jepang.

23 Juni - 12 Juli 1954
pertinggal
1 sampul

2164 Berkas mengenai permintaan persetujuan pengangkatan Dmitri Aleksandrovich Zhukov sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di Indonesia.

23 Juni 1954 - 3 Juli 1954
pertinggal
2 lembar

2165 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan dari Dinas Keamanan Perwakilan Hongkong, beserta lampiran.

24 Juni 1954
asli
8 lembar

2166 Berkas mengenai pernyataan dukungan terhadap politik luar negeri dan politik perekonomian pemerintah dari Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (DEIP).

26 Juni - Juli 1954
asli
7 lembar

2167 Berkas mengenai kunjungan Perdana Menteri Ceylon ke Indonesia.

29 Juni -12 Juli 1954
pertinggal
3 lembar

2168 Berkas mengenai reaksi penghapusan Uni Indonesia - Belanda.

2 Juli - 3 Agustus 1954
asli, salinan
5 lembar

2169 Surat dari Sekretariat Delegasi Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian kliping/kumpulan berita surat kabar tentang Konferensi Indonesia-

2 Juli 1954
asli
1 sampul

2170 Surat dari Kementerian Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan kunjungan ke *Royal Sanitary Institute Congress* di Scarborough, Inggris.

08 Juli 1954
asli
1 sampul

2171 Surat dari Kementerian Luar Negeri kepada Kepala Kepolisian Negara di Kalimantan mengenai pembunuhan militer Inggris di Kuching (Serawak).

09 Juli 1954
asli
1 lembar

2172 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai laporan tentang kondisi politik di Thailand dan situasi di sekitar Kongres Filipina.

9 Juli - 6 Agustus 1954
tembusan

1 sampul

2173 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Willy Stevens sebagai Duta Belgia di Indonesia.

17 Juli - 11 Agustus 1954
pertinggal
4 lembar

2174 Surat-surat mengenai permasalahan surat Komisariat Agung yang berbahasa Belanda.

24 Juli - 21 September 1954
pertinggal
1 sampul

2175 Berkas mengenai Konferensi SEATO dan ditinjau dari sudut politik.

5 Agustus - 20 Oktober 1954
asli
1 sampul

2176 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Manicksothy Saravanamuttu J.P. sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Ceylon di Indonesia.

14 - 26 Agustus 1954
salinan
2 lembar

2177 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Jose Fuentebella sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Filipina di Indonesia, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.

21 Agustus - 4 September 1954
asli
3 lembar

2178 Berkas pengesahan usul UU tentang Persetujuan Perdjanjian Persahabatan antara negara RI dan Kerajaan Thailand.

3 September - 16 Desember 1954
asli
1 sampul

2179 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai susunan delegasi Indonesia ke konferensi negara-negera yang turut serta Rencana Kolombo di Ottawa.

04 September 1954
asli
1 sampul

2180 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Dr. Augusto Rato Potier sebagai Duta Besar Portugal di Indonesia, beserta lampiran.

7 - 11 September 1954
asli

5 lembar

2181 Berkas mengenai peninjauan Perdana Menteri di India.
9 September - 1 November 1954
asli
6 lembar

2182 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Huang Chen sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RRC di Indonesia.
14 - 21 September 1954
asli
2 lembar

2183 Berkas mengenai pertukaran pengiriman wartawan dan pegawai ke Pakistan.
13 September 1954 - 17 Januari 1955
asli
6 lembar

2184 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Maharoof sebagai Duta Besar Pertama Ceylon di Indonesia.
18 September 1954
asli
1 sampul

2185 Berkas mengenai hubungan diplomatik antara RI dan Republik Rumania.
14 September 1954 - 16 Juli 1957
asli
1 sampul

2186 Berkas mengenai persetujuan perjanjian antara RI dengan Republik Hongaria.
29 - 20 September 1954
asli
1 sampul

2187 Berkas mengenai pengiriman utusan ke sidang *Governing Body International Labour Organization* (ILO) di Roma tanggal 8-20 November 1954.
5 Oktober 1954 - 19 Oktober 1954
asli
1 lembar

2188 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai rombongan peninjau ke RRC
16 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

2189 Surat pemberitahuan akan diserahkannya surat kepercayaan dari JM.Manickasathy Saravanamuttu kepada Presiden tanggal 18 Oktober 1954.

16 Oktober 1954
pertinggal
1 sampul

2190 Berkas mengenai film rencana kunjungan Perdana Menteri Ceylon ke Indonesia tanggal 1 Desember 1954.
21 Oktober - 10 Desember 1954
pertinggal
5 lembar

2191 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Janos Nagy sebagai Duta Besar Berkuasa Penuh yang pertama di Indonesia.
3 - 5 November 1954
tembusan
3 lembar

2192 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Chaudhry Khaliquzzaman sebagai Duta Besar Pakistan untuk Indonesia merangkap Duta Besar Filipina.
13 - 24 November 1954
tembusan
3 lembar

2193 Berkas mengenai RUU tentang persetujuan perjanjian kebudayaan antara negara RI dan Republik Mesir, beserta lampiran dalam bahsa Inggris dan Arab.
22 November 1954 - 4 Februari 1956
tembusan
1 sampul

2194 Berkas mengenai hubungan RI dengan Vatikan mengenai nama "Vikariat Apostolik" sehubungan dengan pembentukan pembentukan prefektur Ketapang.
30 November 1954
asli
1 sampul

2195 Laporan bulanan (November 1954) Bagian Ekonomi Kedutaan Besar RI di Inggris.
01 Desember 1954
tembusan
1 sampul

2196 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Crocker sebagai Duta Besar Australia di Indonesia.
23 - 28 Desember 1954
asli
2 lembar

2197 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Tuan Majid Mohamad Hasan Fiki sebagai Duta Saudi Arabia di Indonesia.
23 - 28 Desember 1954
asli

3 lembar

2198 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pengakuan negara-negara Indo China, beserta lampiran.

12 Januari 1955
asli
1 sampul

2199 Memorandum dari S.Sarjotjondro kepada Duta besar mengenai reaksi pers Amerika Serikat dan Inggris terhadap KAA yang akan diselenggarakan pada akhir April 1955.

25 Januari 1955
tembusan
1 sampul

2200 Surat-surat mengenai kedatangan utusan Soviet Uni, Tikhonov dan pemberian hadiah Stalin Internasional kepada Prof.Dr.Prijono.

1 Februari - 21 Mei 1955
tembusan
1 sampul

2201 Surat Panitia Pendirian Gedung Perjuangan kepada Menteri Luar Negeri mengenai permohonan bantuan kontak dengan duta-duta di luar negeri.

03 Februari 1955
tembusan
4 lembar

2202 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai keanggotaan Ceylon dalam ECOSOC, beserta lampiran dalam bahasa Inggris.

9 Februari 1955
asli
2 lembar

2203 Berkas permohonan Duta Besar Portugal kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kembali prajurit Portugis berkebangsaan Afrika yang melarikan diri kepada pemerintah RI di Timor.

19 - 26 Februari 1955
asli
2 lembar

2204 Nota-nota mengenai penyampaian laporan pers berupa kliping yang terkumpul dari Filipina dan Canberra tentang persoalan di Taiwan, London, New Delhi, Paris.

28 Februari - 5 Maret 1955
asli
1 sampul

2205 Surat dari Kuasa Usaha Sementara Duta Besar RI di Birma kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian *press conference* J.F. Dulles Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Birma.

28 Februari 1955
asli
7 lembar

2206 Surat dari Kepala Direktorat Kementerian Luar Negeri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai penyampaian perkembangan politik di Singapura dan Malaysia, beserta lampiran.

2 - 23 Maret 1955
asli
6 lembar

2207 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai kunjungan konsul RRC Lie Siauw Tsung ke Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

10 Mei 1955
asli
2 lembar

2208 Surat dari Presiden kepada Ketua DPR mengenai RUU tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Afghanistan, beserta lampiran.

17 Mei 1955
tembusan
1 sampul

2209 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) mengenai Konferensi Internasional Perumahan dan Bahan di Bandung 20 Juni -29 Juni 1955.

26 Mei 1955
pertinggal
2 lembar

2210 Surat pengantar dari Kementerian Penerangan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai kutipan berita kepergian Perdana Menteri ke Peking.

2 Juni 1955
asli
2 lembar

2211 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pemberian dekorasi "*Legion of Merit*" oleh Pemerintah AS kepada Overste Siahaan, Atase Militer RI di AS.

11 Juni 1955
asli
2 lembar

2212 Surat dari Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar RI di Cairo kepada Perdana Menteri mengenai *memoire* soal Algeria.

23 Juni 1955
asli
1 sampul

2213 Surat Kepala Kepolisian Negara mengenai daftar perjalanan Duta-Duta/Konsul Jenderal/Konsul dan orang-orang asing yang mempunyai status diplomatik pada seluruh Indonesia.

29 Juni 1955
asli
1 sampul

2214 Surat dari *Pajuda Corporation* kepada Perdana Menteri mengenai rencana pembuatan perumahan rakyat di Australia, beserta lampiran.

30 Juni 1955
asli
3 lembar

2215 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. 43780. VIII tentang peraturan pemberian paspor diplomatik, konsuler dan dinas.

1 Juli - 7 Februari 1956
asli
4 lembar

2216 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai penempatan Wakil-Wakil RI di Indo China, beserta lampiran.

13 Juli 1955
asli
2 lembar

2217 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan pidato para peninjau ke RRC.

25 Juli 1955
asli
1 sampul

2218 Berkas mengenai perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Republik Polandia.

06 September 1955
fotokopi
1 sampul

2219 Berkas mengenai pertukaran perwakilan diplomatik antara Indonesia dan Turki.

20 September - 21 November 1955
asli
1 sampul

2220 Berkas mengenai perjalanan rombongan Presiden dalam perjalanannya ke Negara-Negara Eropa, Amerika dan Asia.

20 Agustus 1956 -20 Juni 1959
salinan
1 sampul

2221 Berkas pengembalian warga negara Indonesia yang ada di Suriname ke Wilayah Indonesia.

22 Agustus - 5 Desember 1955
asli
1 sampul

2222 Berkas mengenai instruksi untuk delegasi RI ke *Consultative Committee Meeting Colombo Plan* di Singapura tanggal 15 Oktober 1955.

22 September - 12 Oktober 1955
tembusan
1 sampul

2223 Berkas mengenai susunan Delegasi RI ke sidang X PBB tahun 1955.

24 September 1955
salinan
1 sampul

2224 Memo dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai kunjungan Menteri Luar Negeri Australia ke Indonesia sebagai tamu negara.

13 Oktober 1955
asli
2 lembar

2225 Berkas mengenai kunjungan Wakil Presiden ke Ceylon.

24 Oktober - 25 November 1955
asli
2 lembar

2226 Berkas mengenai pembukaan *Information Centre* Mesir di Jakarta.

25 Oktober - 17 Desember 1955
asli
5 lembar

2227 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri mengenai pengiriman Sdr. Ngumar Said ke Konferensi Internasional *Social Security* di Mexico.

29 October 1955
fotokopi
1 lembar

2228 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri mengenai pengiriman delegasi ke Konferensi Latihan Kerja se-Asia di Rangoon (*Asian Techical Conference on Vocational Training for Industry.)*

1 November 1955
fotokopi
1 lembar

2229 Berkas mengenai rancangan dan persetujuan kebudayaan dan pengajaran antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India.

2 November 1955 - 2 April 1959
pertinggal
1 sampul

2230 Surat dari Menteri Sosial kepada Dewan Menteri mengenai mengutus Delegasi Indonesia ke *Regional Seminar on Population Problems in Asia and The Far East* di

4 November 1955
tembusan
1 sampul

2231 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan M. Jean Brionval sebagai Duta Besar Perancis di Indonesia.

5 - 21 November 1955
asli
3 lembar

2232 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai Kepala-Kepala Perwakilan RI di luar negeri.

12 November 1955
asli
2 lembar

2233 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai usul

menaikan tingkat Kedutaan RI di Thailand menjadi Kedutaan Besar, beserta lampiran.

18 - 28 November 1955
asli
3 lembar

2234 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai dokumen tentang : (1) draft instruksi delegasi RI, (2) *Set working paper* dari BI, (3) Persetujuan Pembubaran Uni Indonesia - Belanda, beserta lampiran.

22 November 1955
tembusan
1 sampul

2235 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan V.Theis Nielsen sebagai Duta Besar Denmark di Indonesia, menggantikan Toyberg Franzen yang ditarik kembali ke

19 Desember 1955 - 2 Februari 1956
asli
4 lembar

2236 Berkas mengenai pengakuan RI terhadap Republik Sudan yang telah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956.

21 Desember 1955 - 5 Januari 1956
asli
1 sampul

2237 Berkas mengenai permohonan Pemerintah Thailand kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan status kedutaannya di Indonesia menjadi Kedutaan Besar.

23 Desember 1955 - 2 Januari 1956
pertinggal
3 lembar

2238 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Abdul Rauf sebagai Duta Besar Saudi Arabia di Indonesia, menggantikan Sayid Hasan Faqi.

6 - 23 Januari 1956
asli
4 lembar

2239 Berkas mengenai rencana kunjungan tamu-tamu negara; Madame Soong Ching Ling, Raja Saudi Arabia serta Wakil Presiden India.

25 Januari - 2 Februari 1956
salinan
2 lembar

2240 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Erik Dons sebagai Duta Besar Norwegia di Indonesia.

14 - 29 Februari 1956
asli
4 lembar

2241 Berkas mengenai pengangkatan duta besar di Iran, Belgia, Uni Soviet, RRC, Mesir, Yugoslavia &Kuasa Usaha di Mexico.

24 Februari - 18 Oktober 1956
salinan
1 sampul

2242 Laporan perundingan Genewa yang diucapkan oleh Ketua Delegasi di depan sidang DPR pada tanggal 23 Februari 1956.

28 Februari - 15 Maret 1956
pertinggal
1 sampul

2243 Berkas permohonan membuat film bersama dengan Jepang kerja sama antara Perusahaan Film Nasional Indonesia dengan Toho Film Co.Ltd, Tokyo tentang

8 - 14 Maret 1956
salinan
1 sampul

2244 Berkas mengenai Kedudukan Perwakilan Belanda di Indonesia.

15 Maret - 16 April 1956
asli
5 lembar

2245 Berkas mengenai pengakuan kemerdekaan Maroko dan hubungan diplomatik dengan RI.

17 Maret - 10 April 1956
asli
6 lembar

2246 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Luang Ratanadib sebagai Duta Besar Kerajaan Thailand di Indonesia.

29 Maret - 6 April 1956
asli
3 lembar

2247 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Dr. Ildefonso sebagai Duta Besar Brazilia di Indonesia.

3 - 6 April 1956
asli
3 lembar

2248 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Jens Hendrik Peder Arnold Malling sebagai Duta Besar Swedia di Indonesia.

9 - 18 April 1956
asli
3 lembar

2249 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Dermot Francis MacDermot sebagai Duta Besar Inggris di Indonesia.

13 - 18 April 1956
asli
3 lembar

2250 Berkas mengenai kunjungan *Agricultural Science study Mission* RRC ke Indonesia.

17 April - 9 Mei 1956
asli
6 lembar

2251 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Dewan Menteri mengenai permohonan persetujuan untuk pengangkatan Senor Javier Rojo Gomez sebagai Duta Besar Mexico untuk Indonesia.

26 April 1956
asli
2 lembar

2252 Berkas mengenai pengakuan Indonesia terhadap negara Tunisia.

7 Mei - 15 Mei 1956
asli
3 lembar

2253 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr.Jan Zitek sebagai Duta Besar Cekoslovakia di Indonesia.

7 - 15 Mei 1956
asli
3 lembar

2254 Berkas mengenai pemberian ijin bekerja Prof. IR.J.G.Jansen, A.Spoelstra dan Ny. E.H.Hisschemoler - Corporaal pada Pemerintah Belanda.

9 Mei 1956 - 4 Juni 1957
asli
1 sampul

2255 Berkas mengenai kunjungan Presiden RI ke luar negeri.

9 Mei - 2 Juni 1956
asli
1 sampul

2256 Berkas mengenai pengiriman delegasi ke ILO di Genewa pada tanggal 6 - 30 Juni 1956.

14 - 19 Mei 1956
asli
1 sampul

2257 Berkas mengenai undangan kunjungan ke Indonesia sebagai tamu negara kepada Presiden dan Wakil Presiden Yugoslavia, Presiden Pakistan, Faris Al Khoury (mantan Perdana Menteri Syria dan Ketua Dewan Keamanan PBB), Abdulrahman Azzam Pasha (mantan Sekretaris - Jenderal, Liga Arab) dan R.G. Monzios (Perdana Menteri Australia).

5 Juni - 13 Juli 1956
asli
5 lembar

2258 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai adanya pengaruh komunisme di Medan dari perwakilan RRC.

15 Juni 1956
asli
2 lembar

2259 Surat Menteri Negara Urusan Perencanaan kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri mengenai kontribusi negara-negara anggota UNESCO baru.

30 Juni 1956
asli
3 lembar

2260 Berkas mengenai perjanjian antara RI dengan Filipina mengenai Imigrasi, dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

2 - 4 Juli 1956
pertinggal

1 sampul

2261 Surat-surat kunjungan duta-duta Besar ke Indonesia.

5 Juli - 20 November 1956
tembusan
3 lembar

2262 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Sunario sebagai Duta Besar Indonesia di Inggris.

26 Juli - 1 Agustus 1956
asli
2 lembar

2263 Berkas mengenai perjalanan Presiden ke Moskow beserta rombongan yang mengawal.

4 - 23 Agustus1956
asli
3 lembar

2264 Berkas mengenai keterangan pemerintah tentang masalah terusan Suez yang disampaikan Perdana Menteri dalam rapat terbuka DPR pada tanggal 13 Agustus 1956.

13 Agustus 1956
asli
1 sampul

2265 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. M. Usman Satroamidjojo sebagai Duta Besar RI untuk Argentina.

30 - 25 Oktober 1956
tembusan
3 lembar

2266 Memo perwakilan tetap RI di PBB tanggal 24 September 1956 tentang "*Joint Statement* Indonesia - USSR".

24 September - 6 Oktober 1956
asli
8 lembar

2267 Berkas mengenai hubungan resmi antara kementerian-kementerian dan perwakilan-perwakilan asing di Indonesia.

5 - 24 Oktober 1956
fotokopi
7 lembar

2268 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. A.A. Maramis sebagai Duta Besar RI untuk URSS di Moskow.

9 - 18 Oktober 1956
asli
3 lembar

2269 Berkas mengenai pernyataan bersama, keterangan, dan laporan-laporan Menteri Luar Negeri kepada DPR mengenai perjalanan Presiden ke Eropa Timur.

17 Oktober 1956
salinan
1 sampul

2270 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan L.R. Mc Intyre sebagai Duta Besar Australia di Indonesia.

22 - 30 Oktober 1956
salinan
3 lembar

2271 Berkas mengenai persiapan keikutsertaan Indonesia dalam konferensi *International Criminal Police Organization* di London.

29 - 28 Oktober 1958
asli
1 sampul

2272 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan G.Parthasarathi sebagai Duta Besar baru India di Indonesia.

7 - 11 November 1956
asli
1 sampul

2273 Surat-surat mengenai pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap Republik Mongolia.

19 November - 7 Desember 1956
asli
1 sampul

2274 Berkas mengenai *Joint Press Communique* antara Perdana Menteri Pakistan dan Indonesia serta *Joint Statement* antara Perdana Menteri Indonesia, Birma, Ceylon, dan India.

20 November 1956
fotokopi
1 sampul

2275 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan pemerintah RI atas pengangkatan Abdur Rahman Khan sebagai Duta Besar baru Pakistan di Indonesia.

3 Desember 1956
salinan
1 lembar

2276 Laporan mengenai kesimpulan Konferensi Genewa antara Menteri Luar Negeri dengan Kepala-Kepala Perwakilan RI di Eropa pada tanggal 5 dan 6 Desember 1956 tentang Irian Barat, Timur Tengah, Hongaria dan Eropa Timur.

11 Desember 1956
pertinggal

1 sampul

2277 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Janos Nagy sebagai Duta Besar Hongaria di Indonesia.

2 Januari - 16 Februari 1957
asli
5 lembar

2278 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengani usul pengangkatan Dr. Stane Pvlie Duta Besar Yugoslavia.

5 Januari 1957
asli
5 lembar

2279 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan pengangkatan John M. Allison sebagai Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia.

22 Januari 1957
pertinggal
1 lembar

2280 Berkas usulan kenaikan pangkat Mr. Moh. Razif, Kepala Direktorat Afrika/Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri menjadi Duta Besar RI.

11 - 16 Februari 1957
asli
4 lembar

2281 Berkas mengenai pemberian "*Grosse Verdienstkreuz der Bundesverdienstorde der Bundesrepublik Deutschland*" oleh pemerintah Jerman Barat kepada Mr. Utarjo Suriamihardja, mantan *councellor* kedutaan Besar RI di Bonn.

14 Februari - 4 Maret 1957
salinan
3 lembar

2282 Berkas mengenai undangan Pemerintah Inggris kepada wartawan Indonesia untuk mengunjungi Negeri Inggris selama sebulan.

11 - 23 Maret 1957
asli
3 lembar

2283 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengenai kedudukan Prof. Dr.Soepomo mantan Duta Besar RI di Inggris.

14 Maret 1957
asli
1 lembar

2284 Berkas mengenai penunjukan wakil Indonesia dalam sidang *Expert Working Party for Regional Seminar on the Protection of Human Rights in Criminal Law and Procedure* di Filipina tanggal 6-10 Mei 1957.

9 - 27 April 1957
pertinggal
4 lembar

2285 Berkas mengenai persetujuan pengiriman utusan Kepala Kepolisian Negara sebagai Kepala *National Central Burew* (N.C.B) ke *General Assembly International Criminal Police Commission* di Lisabon.

29 April - 24 Mei 1957
pertinggal
1 sampul

2286 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Marcel de Vliger sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Belgia di Indonesia.

24 - 25 Mei 1957
asli
1 sampul

2287 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Jules Koenigswarter sebagai Duta Besar Perancis di Indonesia.

28 Mei - 1 Juni 1957
salinan
4 lembar

2288 Laporan perjalanan ke Jerman Barat dari tanggal 29 April - 16 Mei 1957.

29 Mei 1957
asli
9 lembar

2289 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Taufik Kazim Kemahli sebagai Duta Besar Turki di Indonesia.

14 - 17 Juni 1957
pertinggal
3 lembar

2290 Surat dari Kepala Direktorat Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai pidato Perdana Menteri U Nu tentang *Burma Four Year Plan* yang didapat berupa laporan dari Kedutaan Besar RI di Rangoon.

04 Juli 1957
salinan
1 sampul

2291 Berkas mengenai persetujuan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah India.

15 Juli - 7 September 1957
salinan

1 sampul

2292 Berkas mengenai permohonan untuk meniadakan perjanjian tentang pengangkatan kapal-kapal antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

17 Juli - 17 Oktober 1957
asli
1 sampul

2293 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Jan Zitek sebagai Duta Besar Cekoslovakia di Indonesia.

29 Juli - 31 Juli 1957
asli
3 lembar

2294 Surat Ketua DPR mengenai pengesahan usul UU Persetujuan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Irak.

31 Juli 1957
asli
1 sampul

2295 Berkas mengenai perjalanan Dr. H.Mohammad Hatta di Jepang sebagai tamu negara karena dipandang sebagai Tokoh Nasional.

9 Agustus - 17 Oktober 1957
asli
1 sampul

2296 Berkas mengenai rampasan Jepang.

9 Agustus 1957 - 1 Desember 1959
salinan
1 sampul

2297 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai laporan triwulan pelaksanaan politik luar negeri.

12 Agustus 1957
salinan
1 sampul

2298 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengangkatan Duta Besar Malaya yang pertama untuk Indonesia

13 Agustus 1957
asli
1 lembar

2299 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Ibrahim Fadhli sebagai Duta Iraq di Indonesia.

17 Juli - 31 Juli 1957
salinan

4 lembar

2300 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Pegawai Tinggi Diperbantukan kepada Ketua PKBLN mengenai pengiriman mahasiswa ke Amerika dengan bantuan ICA.
02 September 1957
salinan
3 lembar

2301 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Adolfo Scilingo sebagai Duta Besar Argentina di Indonesia.
4 - 26 September 1957
asli
3 lembar

2302 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai *Agreement* A.A. Maramis Duta Besar RI di Moskow merangkap sebagai Duta Besar RI di Helsinki.
20 September - 28 November 1957
asli
1 sampul

2303 Berkas mengenai penyusunan keputusan Presiden RI No.218 Tahun 1957 tentang tukar menukar paket pos antara RI dengan Koloni Hongkong.
Oktober - 26 November 1957
pertinggal
1 sampul

2304 Berkas mengenai pembukaan Konsulat-Konsulat Honorair di Amerika Latin.
1 - 3 Oktober 1957
asli
2 lembar

2305 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai usul pembukaan Perwakilan Diplomatik RI di New Zealand Tingkat Kedutaan dan Pengangkatan Duta Besar RI di Australia merangkap Duta Besar RI di New Zealand.
1 & 7 Oktober 1957
asli
2 lembar

2306 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan antara Pemerintah RI atas pengangkatan Arnold Sonderegger sebagai Duta Besar Swiss di Indonesia.
3 & 5 Oktober 1957
tembusan
3 lembar

2307 Surat dari Sektretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengangkatan salah seorang Duta Besar RI di Eropa Barat merangkap Duta Besar di Spanyol.

07 Oktober 1957
tembusan
1 lembar

2308 Berkas mengenai rencana "*compilation of circulars from the protocol to foreign missions*".

1 November - 19 Desember 1957
asli
1 sampul

2309 Laporan Bulanan Kedutaan Besar RI di Paris Bag. Urusan/Hubungan Keuangan Bulan Oktober 1957.

22 November & 2 Desember 1957
asli
1 sampul

2310 Surat dari Perdana Menteri mengenai surat Menteri Luar Negeri tanggal 7 Desember 1957 tentang penutupan Perwakilan - Perwakilan Konsulat Belanda.

7 & 16 Desember 1957
fotokopi
4 lembar

2311 Berkas mengenai perjanjian kebudayaan antara Indonesia dengan Cekoslovakia.

26 Desember 1957 - 6 Juni 1958
tembusan
1 sampul

2312 Surat-menyurat Perdana Menteri dengan *University of Kentucky* mengenai pengiriman gambar aktivitas *Kentucky Contract Team* di Indonesia. n.b.: dalam bahasa Inggris

18 Januari & 18 Februari 1958
pertinggal
6 lembar

2313 Berkas mengenai persetujuan antara Republik Federasi Jerman dan Pemerintah RI tentang kerja sama ekonomi dan teknik.

20 - 25 Januari 1958
asli
1 sampul

2314 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pertukaran perwakilan diplomatik antara RI dan Yunani dan permintaan *agreement* untuk Nicholas Hadji Vassillion sebagai Duta Besar Yunani di Indonesia.

21 - 25 Januari 1958
asli
6 lembar

2315 Berkas mengenai resolusi DPR tentang protes terhadap hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pemerintah Perancis atas gadis Aljazair yang membela tanah airnya.

27 Januari - 5 Februari 1958
asli
6 lembar

2316 Surat dari Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penjelasan kontrak RI - KLM yang ditandatangani tgl 27 Februarai 1953.

29 Januari 1958
asli
2 lembar

2317 Laporan "*Regional Conference On Publik Administration* " di Saigon.

7 Februari - 8 Mei 1958
asli
2 lembar

2318 Surat dari Biro Pusat Statistik kepada Perdana Menteri mengenai laporan kunjungan ke Malaysia, beserta lampiran.

26 Maret 1958
asli
1 sampul

2319 Memo mengenai persiapan administrasi dan akomodasi untuk pegawai Biro Perancang Negara yang akan berangkat ke Jerman Barat.

27 Maret 1958
salinan
5 lembar

2320 Laporan Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai infiltrasi komunis di Thailand.

5 April - 6 Oktober 1958
asli
4 lembar

2321 Berkas mengenai pengiriman perutusan RI ke Sidang Umum *Internationale Civil Aviation Organization* (ICAO) II di Montreal, Kanada mulai tanggal 20 Mei 1958.

02 Mei 1958
asli
1 sampul

2322 Berkas mengenai pengangkatan Mr.Tjokroadisumarto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh RI di Karachi.

16 Mei 1958
asli
5 lembar

2323 Berkas mengenai pengangkatan Duta Besar RI di Jepang.

16 Mei - 6 Juni 1958
asli
5 lembar

2324 Berkas mengenai laporan-laporan situasi keamanan politik di beberapa negara Asia seperti Taiwan, Jepang, Thailand.

19 Mei - 25 Oktober 1958
asli
1 sampul

2325 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Nona Laili Rusad sebagai Duta RI di Brussel.

22 Mei - 4 Juni 1958
asli
7 lembar

2326 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai warga negara Indonesia di Suriname dan pembukaan Konsulat RI di Cayenne, beserta lampiran.

23 Mei 1958
salinan
3 lembar

2327 Berkas mengenai hubungan antara RI dan Jepang dan RRT.

3 Juni - 23 Juli 1958
tembusan
6 lembar

2328 Surat dari *Prime Minister of* Indonesia kepada *Ambassador of the USA* mengenai ucapan permintaan maaf tidak dapat menghadiri resepsi acara *Admiral Riley* pada tanggal 8 Juli.

02 - 07 Juli 1958
asli
6 lembar

2329 Berkas mengenai Rancangan PP tentang pelaksanaan perjanjian antara RI dengan RRT mengenai dwi kewarganegaraan.

7Juli - 8 Agustus 1958
tembusan
1 sampul

2330 Berkas mengenai usul Dewan Nasional tentang kegentingan internasional di Timur Tengah.

24 Juli - 10 September 1958
asli
9 lembar

2331 Berkas mengenai pengesahan protokol-protokol yang telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Indonesia dalam perundingan-perundingan dengan delegasi Cekoslovakia, beserta lampiran.

29 Juli 1958
fotokopi
1 sampul

2332 Surat dari Sekjen Kementerian Penerangan mengenai analisa sekitar Revolusi Irak.
01 Agustus 1958
asli
6 lembar

2333 Laporan perutusan RI ke Sidang *Commission Executive at de Liarson* dari *Union Postale Universelle* " yang diselenggarakan di Bern, Swiss bulan Mei 1958.
14 Agustus 1958
asli
1 sampul

2334 Pengumuman No.127 mengenai persetujuan beberapa RUU diantaranya tentang kerjasama RI dengan Cekoslovakia.
22 Agustus 1958
asli
2 lembar

2335 Laporan Delegasi RI ke *Regional Conference on Public Administration* di Manila tanggal 7 s.d 21 Juni 1958.
30 Agustus 1958
asli
1 sampul

2336 Laporan orientasi di Amerika dan Eropa sebagai hasil peninjauan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja, Jakarta Raya.
02 September 1958
asli
1 sampul

2337 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai keadaan di Jepang.
01 October 1958
asli
1 sampul

2338 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai perlombaan untuk memperoleh pengaruh antara USSR dan USA.
06 October 1958
asli
2 lembar

2339 Surat-surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai suasana dan persoalan politik di Jepang dan Tiongkok.
10 Oktober - 18 Desember 1958
asli
1 sampul

2340 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai hubungan antara Jepang dan Republik Korea Selatan.

10 October 1958
asli
2 lembar

2341 Surat-surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri.mengenai hubungan antara Jepang dengan Rusia.

11 - 27 Oktober 1958
asli
4 lembar

2342 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai kedudukan sosial-ekonomi orang Tionghoa dalam RI pada saat ini.

23 October 1958
fotokopi
3 lembar

2343 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai kudeta yang terjadi di Thailand.

28 0ktober 1958
fotokopi
1 sampul

2344 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Perdana Menteri mengenai usaha *rearmament* Jepang.

28 Oktober - 11 November 1958
asli
3 lembar

2345 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai reaksi di Thailand terkait pengakuan Aljazair oleh Indonesia.

31 October 1958
asli
3 lembar

2346 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai pengusiran 2 orang Rusia di Thailand.

03 November 1958
asli
2 lembar

2347 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai politik RRT dan Soviet terhadap Taiwan.

03 November 1958
asli
2 lembar

2348 Berkas mengenai penggunaan biaya rampasan Jepang untuk penyeberangan kapal-kapal.

5 - 18 November 1958
fotokopi
8 lembar

2349 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai Hari Nasional Tiongkok Nasionalis di Bangkok.

07 November 1958
asli
2 lembar

2350 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai latar belakang kunjungan *Chief Air Marshal Chalermkiart* ke London.

07 November 1958
asli
5 lembar

2351 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai hubungan antara Jepang dengan Taiwan

08 November 1958
asli
2 lembar

2352 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai laporan dari Bangkok tanggal 14 November 1958 terkait Partai Revolusioner di Thailand.

19 - 24 November 1958
asli
6 lembar

2353 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan *Peacefull Arrangement* atas peristiwa Alfredo Saulo

27 November 1958
asli
3 lembar

2354 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai Partai Komunis Jepang.

29 November - 18 Desember 1958
asli
1 lembar

2355 Berkas mengenai pengangkatan Baron Dietrich von Mirbach sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jerman Barat di Indonesia.

15 Desember 1958 - 8 Januari 1959
pertinggal
6 lembar

2356 Laporan Delegasi RI ke Konferensi Umum II Badan Tenaga Atom Internasional di Wiena.

22 Desember 1958
tembusan
1 sampul

2357 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengakuan rezim baru di Sudan.

24 Desember 1958
asli
1 sampul

2358 Surat dari Mahkamah Agung kepada Perdana Menteri mengenai keanggotaan Indonesia dalam *Inter-Goverment Maritim Consultative Organisation* .

3 Januari - 23 Oktober 1959
fotokopi
1 sampul

2359 Berkas mengenai penandatanganan persetujuan kebudayaan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Iran.

6 Januari - 7 April 1959
salinan
8 lembar

2360 Berkas mengenai pengangkatan Pavel Sillard sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh Rumania di Indonesia.

7 - 17 Januari 1959
asli
3 lembar

2361 Berkas mengenai pengangkatan Ditlef Knudsen sebagai Duta Norwegia di Indonesia.

26 Februari - 10 Maret 1959
asli
4 lembar

2362 Berkas mengenai persetujuan peningkatan status Kedutaan Ceylon di Jakarta menjadi kedutaan besar dan sebagai r*esiprositet* Kedutaan RI di Kolombo menjadi Kedutaan Besar.

7 - 24 April 1959
asli
3 lembar

2363 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Arne Bogh Anderson sebagai Duta Besar Denmark di Indonesia.

7 - 24 April 1959
asli
3 lembar

2364 Surat dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada Menteri Keuangan mengenai status *volunteer graduates* Bangsa Australia.

11 Mei 1959
asli
2 lembar

2365 Berkas mengenai Sdr. Achmad Ponsen sebagai *Minister Counsellor* pada Kedutaan RI di Bonn terkait dengan perkara perdata.

16 Mei - 18 Juni 1959
asli
6 lembar

2366 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Dr. Sigurd Waldemar von Numers sebagai Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Finlandia di Indonesia.

12 - 26 Juni 1959
asli
4 lembar

2367 Laporan hasil-hasil perundingan antara pihak Rusia dan Indonesia mengenai *General Condition* pada tanggal 19 Juni 1959 yang diadakan di Biro Perancang Negara.

19 Juni 1959
asli
6 lembar

2368 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Sr. Alfonso Castro Valle sebagai Duta Besar Meksiko di Indonesia.

24 Juli - 28 Agustus 1959
asli
1 sampul

2369 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Dendevyn Sarab sebagai Duta Besar Mongolia di Indonesia.

29 Juli - 28 Agustus 1959
asli
8 lembar

2370 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Luang Phinit Akson sebagai Duta Besar Thailand di Indonesia.

3 - 28 Agustus1959
asli
1 sampul

2371 Surat dari Jaksa Agung Muda kepada Perdana Menteri mengenai perundingan di Taiwan mengenai keadaan di Indonesia.

17 September 1959
asli
1 lembar

2372 Surat dari Jaksa Agung Muda kepada Perdana Menteri mengenai sidang dari *Chinese Communist Political Bereau* di Peking.

17 September 1959
asli
2 lembar

2373 Surat dari Jaksa Agung Muda kepada Perdana Menteri mengenai laporan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemberontak di Filipina.

22 September 1959
asli
1 lembar

2374 Surat dari Pegawai Biro Perancang Negara kepada Wakil Sekretaris Biro Perancang Negara mengenai permohonan ikut membantu keperluan dinas Konferensi *Colombo Plan* ke Jogjakarta.

24 September - 21 Oktober 1959
asli
4 lembar

2375 Berkas mengenai persetujuan antara Pemerintah Uni Republik Soviet Sosialis dan Pemerintah RI mengenai pengiriman dari URSS dan kontrak pembelian URSS.

22 - 23 Oktober 1959
asli
7 lembar

2376 Memo mengenai persiapan administrasi dan akomodasi untuk pegawai Biro Perancang Negara yang akan berangkat ke Jerman Barat.

26 Oktober 1959
salinan
1 sampul

2377 Surat dari Menteri Pertama kepada Presiden RI mengenai permintaan persetujuan atas pengangkatan Dr. Filippo Muzi Falconi sebagai Duta Besar Italia untuk Indonesia.

29 Oktober 1959
asli
5 lembar

2378 Berkas mengenai persetujuan pengangkatan Mr. Patrick Shaw sebagai Duta Besar Australia di Indonesia.

3 - 5 November 1959
asli
3 lembar

2379 Berkas mengenai hubungan dengan Selandia Baru sehubungan dengan kunjungan Perdana Menteri Nash sebagai tamu pemerintah dari tanggal 14 s.d 19 November 1959.

12 November1959

asli
1 sampul

2380 Laporan perutusan Menteri Urusan Khusus ke Yugoslavia dan Jepang.
18 November - 1 Desember 1959
asli
9 lembar

2381 Berkas mengenai pengesahan RUU tentang Perjanjian Persahabatan antara RI dan RRT.
30 Desember 1961
tembusan
1 sampul

2382 Berkas mengenai jawaban Iran atas nota Rusia tentang protes terhadap Iran tentang MSA yang diterima oleh Iran dari Amerika, beserta lampiran dalam bahasa Spanyol.
tt
salinan
9 lembar

f. Pengaturan Bangsa Asing

2383 Berkas mengenai penggunaan tenaga asing di Indonesia.
1950 - 1951
asli
1 sampul

2384 Berkas mengenai pembunuhan Johan Huygen (Asisten Geolog BPM Palembang).
14 Februari - 11 Juli 1950
asli
1 sampul

2385 Berkas mengenai keamanan harta benda dan jiwa warga negara asing di Indonesia.
5 Juni 1950 - 12 Desember 1951
asli
1 sampul

2386 Berkas mengenai kematian Freddie Bosch (Anggota NEFIES) di Sulawesi Selatan
10 Juni 1950 - 6 Juli 1951
asli
1 sampul

2387 Surat dari Wakil Kepala Bagian PAM Komisaris Polisi kepada Perdana Menteri mengenai nasib orang Belanda yang ingin menjadi warga negara Indonesia.
27 Juni 1950
asli
2 lembar

2388 Berkas mengenai peraturan lalu lintas manusia yang mengadakan perjalanan dari/ke Irian Barat.

29 Juni 1950 - 16 Juni 1953
asli
1 sampul

2389 Berkas mengenai penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Jawatan Imigrasi bernama Arie Breekland.

29 September - 16 Oktober 1950
asli
8 lembar

2390 Berkas mengenai penganiayaan seorang bangsa India bernama J. Selam Rafiqi oleh anggota APRI di Kupang.

10 Oktober 1950
tembusan
1 sampul

2391 Surat dari Kejaksaan Agung Indonesia kepada Wakil Perdana Menteri mengenai kesulitan dalam pengurusan visum bagi orang-orang asing ke Indonesia.

11 Desember 1950
asli
4 lembar

2392 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai pemasukan orang-orang terlantar dari luar negeri ke Indonesia.

11 Desember 1950
pertinggal
3 lembar

2393 Berkas mengenai penggeledahan terhadap warga negara Amerika.

5 Februari - 16 Mei 1951
asli
5 lembar

2394 Berkas mengenai perdeportasian AH. Boerkoel dari Indonesia ke Belanda.

8 Mei 1951 - 22 Februari 1955
asli, tembusan
1 sampul

2395 Berkas mengenai demobilisasi tentara Belanda.

18 Mei 1951 - 5 Desember 1952
tembusan
1 sampul

2396 Berkas mengenai penyerbuan pos polisi Pasrepen di Pasuruan oleh gerombolan penjahat dan pembunuhan 3 orang Tionghoa di Lumajang.

18 Mei 1951

asli
3 lembar

2397 Surat dari kepala Staf Angkatan Perang Kementerian Pertahanan mengenai kegiatan Pemerintah Belanda berhubungan dengan pembunuhan terhadap orang-orang Belanda.
19 Mei 1951
asli
1 lembar

2398 Berkas mengenai penggeledahan dan penahanan terhadap 2 orang Belanda bernama CMF Ditmars dan Dusseldorp di Sungai Dadap (Kisaran).
26 Juni - 7 Desember 1951
asli
3 lembar

2399 Berkas mengenai rumah seorang Tionghoa bernama Tjia Miauw Tjung di Pintu Kecil No. 2 A Jakarta.
17 Agustus - 5 September 1951
asli
4 lembar

2400 Berkas mengenai pencurian Bendera Amerika yang berkibar di Konsulat Amerika di Jalan Dr. Sutomo 36 Surabaya.
19 September - 5 November 1951
asli
7 lembar

2401 Berkas mengenai penggeledahan dan penyitaan buku-buku dan surat-surat di rumah para pengusaha India.
06 November 1951
asli
4 lembar

2402 Radiogram dari Kepala Polisi Provinsi Jawa Barat mengenai meninggalnya warga Belanda LC. Johan Borg.
18 Desember 1951
asli
3 lembar

2403 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri tentang penugasan untuk mengadakan inspeksi imigrasi di Singapura dan Hongkong.
27 Desember 1951
salinan
6 lembar

2404 Laporan dari Jawatan Kepolisian mengenai imigran etnis Tionghoa yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
10 Januari 1952
tembusan
1 sampul

2405 Surat dari Golongan Turunan kepada Perdana Menteri mengenai pendapat golongan kecil tentang pendaftaran Warga Negara Turunan Asing.

21 Januari 1952
asli
1 sampul

2406 Surat dari Menteri Urusan Pegawai kepada semua Kementerian mengenai kedudukan pegawai bangsa asing pada akhir tahun 1951.

04 Februari 1952
fotokopi
4 lembar

2407 Surat dari Menteri Urusan Pegawai kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai permintaan data pegawai/tenaga bangsa asing yang bekerja di kantor Kabinet Perdana Menteri.

18 April 1952
asli
1 sampul

2408 Berkas mengenai pelarian warga asing bernama Marzweiler Anton dan Garieb Raof yang segera dipulangkan.

16 Februari - 30 Mei 1952
asli
1 sampul

2409 Berkas mengenai Rev. JR. Schisler, anggota Misi Amerika yang datang ke Makasar.

19 Februari - 10 Maret 1952
asli
5 lembar

2410 Berkas mengenai pelarian bangsa Spanyol bernama Juan Martinez yang terlantar.

15 Maret - 29 Oktober 1952
asli
4 lembar

2411 Surat dari Menteri Kehakiman mengenai pemasukan orang Belanda ke Indonesia dan peraturan Jawatan Imigrasi.

10 Mei 1952
asli
1 sampul

2412 Berkas mengenai Warga Negara Filipina yang masuk ke Indonesia secara tidak sah.

19 Mei - 12 Desember 1952
asli
1 sampul

2413 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Luar Negeri mengenai imigrasi gelap di Sumatera.

12 Juni - 5 Agustus 1952

tembusan
5 lembar

2414 Berkas mengenai gerak-gerik warga Belanda di kota Makassar.
2 Juli - 23 Oktober 1952
asli
5 lembar

2415 Berkas mengenai imigran-imigran dari Serawak bernama Ng Khet Djin yang ilegal.
19 Agustus 1952
asli
6 lembar

2416 Berkas mengenai tuntutan Yayasan Garuda Putra terhadap pengurusan paspor Tjong Hoen Njie.
5 September 1952 - 3 Juni 1953
asli
8 lembar

2417 Surat dari Jaksa Agung mengenai pengusiran 138 orang Hoakiao dari Muangthai.
08 Oktober 1952
asli
2 lembar

2418 Surat-menyurat antara Ketua Gabungan Indo dengan Kesatuan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perwakilan warga negara Indonesia keturunan Eropa dalam perundingan masalah Irian.
10 November - 16 Desember 1952
tembusan
3 lembar

2419 Berkas mengenai repatriasi warga negara Indonesia dari Suriname pulang ke Indonesia.
12 November 1952 - 29 Juli 1953
asli
1 sampul

2420 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai kematian warga Inggris bernama Thomas Green yang berkelahi dengan penduduk Plaju.
26 November 1952
asli
2 lembar

2421 Berkas mengenai kematian Warga Negara Australia bernama John Doderick.
18 Januari 1953 - 5 Oktober 1953
asli
1 sampul

2422 Surat dari Kepala Polisi Karesidenan Surakarta mengenai reaksi WNI turunan Arab terhadap pemberian Kartu Tanda Warga Negara dan pemilihan anggota parlemen.
26 Januari 1953
salinan
1 lembar

2423 Berkas mengenai permohonan Khoe King Siong ke Tiongkok.
30 Januari - 1 Juni 1953
asli
1 sampul

2424 Berkas mengenai perpecahan di antara golongan Bangsa India di Surabaya.
12 Februari 1953
salinan
5 lembar

2425 Berkas mengenai imigran gelap yang datang ke Indonesia.
05 Februari & 5 April 1953
asli
4 lembar

2426 Berkas mengenai hilangnya Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia.
12 Maret 1953 - 17 April 1954
tembusan
1 sampul

2427 Berkas mengenai pemulangan Nj. Adrienne Hermine Fuhri-Mierop, Ketua Sidang Pengarang Harian *Nieuw Soerabajasch Handelsblad* yang dihukum karena menulis artikel yang menghina Presiden RI.
2 April - 2 Juli 1953
asli
2 lembar

2428 Berkas mengenai pengusiran Chen Wa Zhen dan Chen Tse Liang karena melanggar aturan imigrasi.
17 April 1953
tembusan
1 sampul

2429 Berkas mengenai penandatanganan kartu-kartu tanda kewarganegaraan Indonesia di Daerah Timor.
12 Mei 1953 - 23 Juni 1953
asli
3 lembar

2430 Berkas mengenai orang-orang Belanda yang ingin pulang ke Negeri Belanda.
21 Mei 1953 - 5 Oktober 1953
asli
1 sampul

2431 Surat dari Jaksa Agung kepada Menteri Luar Negeri mengenai pengusiran orang-orang asing dari Tiongkok komunis ke Hongkong.

03 Juni 1953
tembusan
2 lembar

2432 Surat Edaran dari Kepala Kantor Urusan Pegawai kepada para Menteri mengenai penyesuaian kedudukan / gaji pegawai bangsa asing yang memilih kewarganegaraan negara Indonesia.

15 Agustus 1953
salinan
1 lembar

2433 RUU tentang penetapan UU Darurat No 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing sebagai UU.

1954
konsep
4 lembar

2434 Berkas mengenai permasalahan Ong Swie Twan Kloedjenlor dalam mencatat nama anaknya di Kantor Pencatatan Sipil.

20 Januari - 28 April 1954
asli
7 lembar

2435 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Kementerian Luar Negeri mengenai kesukaran yang dialami dalam menghadapi kegiatan orang Tionghoa yang berkewarganegaraan ganda.

10 Februari 1954 - 17 April 1954
asli
3 lembar

2436 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Perdana Menteri mengenai permintaan visum untuk masuk ke Indonesia atas nama Go Gian Beng.

05 Desember 1954
asli
6 lembar

2437 Berkas mengenai keberadaan FH. Rofei seorang Islam Inggris di Indonesia.

12 Maret 1955
asli
1 sampul

2438 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Menteri Kehakiman mengenai permohonan *exit-reentry permitt* dan SKK atas nama JK.H.Van Steyn Van Hensbroek.

28 April - 3 September 1955
tembusan
7 lembar

2439 Berkas mengenai permohonan perpanjangan KIM a.n. M. van Heyningen.
12 Mei 1955
salinan
7 lembar

2440 Berkas mengenai permohonan ijin bekerja pada pemerintah Nederland dari para pegawai asing pensiunan.
24 Desember 1955 - 2 November 1956
asli
1 sampul

2441 Peraturan Penguasa Militer tentang pelaksanaan koordinasi pengawasan orang-orang asing yang berada di Indonesia.
1 Juli 1957
salinan
3 lembar

2442 Surat Edaran Perdana Menteri mengenai peninjauan kedudukan-kedudukan tenaga Belanda dalam sektor-sektor kegiatan ekonomi dan masyarakat.
28 Desember 1957
asli
1 sampul

2443 Usul Sidang Dewan Nasional VI tanggal 3-5 Juni 1958 mengenai kedudukan hukum orang Tionghoa dalam RI.
10 Juni 1958
asli
1 sampul

2444 Surat-surat mengenai pemberhentian imigrasi orang asing untuk menetap di Indonesia.
23 Juni 1958 - 20 Januari 1959
pertinggal
5 lembar

2445 Surat dari Ketua Dewan Nasional kepada Perdana Menteri mengenai kedudukan sosial ekonomi orang Tionghoa dalam RI pada waktu sekarang.
3 November 1958
asli
2 lembar

2446 Berkas mengenai permohonan dispensasi dari pembekuan seluruh harta benda barang tetap milik warga negara Belanda.
29 April 1959
salinan
1 sampul

2447 Surat Edaran dari Kepala kantor Urusan Pegawai kepada semua Kementerian mengenai

ijin Dewan Menteri untuk pengangkatan pertama pegawai ahli bangsa asing.

1 Juni 1959
asli
1 lembar

2448 Surat Menteri Kehakiman tanggal 18 April 1959 No.J.B.3/57/7 mengenai permohonan memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 4 UU No 62 / 1958.
26 Juni 1959
salinan
1 sampul

h. Penerbitan

2449 Surat dari kepala Jawatan Perbendaharaan dan kas-kas negeri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai penerbitan buku-buku "Himpunan peraturan-peraturan dan sebagainya tahun 1952".
5 Januari 1954
asli
1 lembar

2450 Kutipan dari edisi Tionghoa *Seng Hwe* dan *Sin Po* mengenai penduduk Tionghoa di Indonesia dan masalah Tiongkok.
25 Juli 1950
asli
1 sampul

2451 Berkas mengenai ikhtisar beberapa surat kabar mengenai pergolakan politik di Jawa Barat.
4 Agustus 1950 - 15 Desember 1954
asli
1 sampul

2452 Surat dari Mahkamah Agung Indonesia mengenai berita penting yang dimuat oleh pers di Singapura.
30 Oktober 1950
asli
6 lembar

2453 Berkas mengenai pemberitaan politik yang dikutip dari beberapa harian.
November 1950
asli
6 lembar

2454 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pemberitaan surat kabar *De Vrije Pers* mengenai rapat tertutup PKI Jakarta dan "Kedaulatan Rakyat" mengenai rapat umum PKI untuk memperingati pemberontakan 12 November 1926.
15 November 1950

asli
8 lembar

2455 Surat siaran Komisariat Dewan Harian Partai Murba Daerah Cirebon.
17 November 1950
asli
2 lembar

2456 Laporan dari Kejaksaan Agung mengenai komunisme di Asia Tenggara.
13 Desember 1950
asli
1 sampul

2457 Peraturan Panglima Tentara dan Teritorium IV/Divisi Diponegoro No.6/T/B.3/D.III/51

tentang pembatasan penyiaran dan lain-lain dari pemberitaan di Jawa Tengah.
8 Maret 1951
asli
4 lembar

2458 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Jaksa Agung mengenai brosur *1951 de Voorspelling van het nu Komende Wereldgebeuren* karangan Adarsa, *Genootschap voor occult, psychologhis en psychisch ground onderzuk, Gouverneurlaan 393 Den Haaq.*
9 April 1951
asli
3 lembar

2459 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai berita dalam surat kabar "*The Courius Mail* " reaksi pada *"murder not news line* ".
11 Juni 1951
salinan
2 lembar

2460 Surat dari Sekretariat DPR kepada Perdana Menteri mengenai buku "Menentang Negara Pancasila" yang dikarang oleh Dr.Koeslan.
8 Agustus 1951
asli
4 lembar

2461 Berkas mengenai plakat yang ditemukan di daerah Kecamatan Klepu, Jawa Tengah.
28 Desember 1951
asli
7 lembar

2462 Berkas mengenai pamflet berkepala Tung Sing.
5 Januari 1952
asli

1 sampul

2463 Surat dari Kepala Bagian Keamanan mengenai wartawan Belanda A. Van Sprang tentang buku *En Soekarno Lacht* .

14 Februari 1952
asli
1 sampul

2464 SK Perdana Menteri tanggal 21 Februari 1952 No.1016/PM/452 tentang larangan pemasukan penerbitan ke Indonesia.

21 Februari 1952
asli
4 lembar

2465 Surat-surat kepada Perdana Menteri mengenai penawaran pekerjaan percetakan dan perusahaan percetakan.

22 Februari 1952, 17 Juni 1952
asli
7 lembar

2466 Surat dari Tan Ing Lie kepada Presiden Soekarno mengenai permohonan ijin pembukaan percetakaan "Tan's" yang disegel.

10 April 1952
asli
1 lembar

2467 Surat dari Menteri Keuangan kepada Semua Kementerian mengenai pesanan barang-barang cetakan kepada Percetakan Negara.

2 Mei 1952
tembusan
2 lembar

2468 Berkas mengenai isi kitab Bugtul Mustasjidin.

14 Mei 1952
asli
1 sampul

2469 Laporan Jawatan Kepolisian Negara mengenai Suara Pers Indonesia.

1 Juli 1952, 7 Juli 1953
tembusan
1 sampul

2470 Laporan dinas mingguan 26 - 25 tahun 1952 dari Jawatan Kepolisian Negara mengenai suara-suara pers di Indonesia.

1 Juli 1952
asli
1 sampul

2471 Ikhtisar mingguan mengenai kepartaian yang berdasarkan nasionalisme, tanggal 13 - 19 Juli 1952.

21 Juli 1952
asli
1 sampul

2472 Surat dari Direktur Jajasan Lektur kepada importir-importir dan penerbit-penerbit mengenai pembatasan restitusi untuk penerbitan.

15 September 1952
asli
2 lembar

2473 Berkas mengenai protes F.M.I Pusat Makasar terhadap sejarah Bangsa Indonesia karangan Frather Amator dan A. Silsen.

26 September 1952
asli
1 sampul

2474 Surat dari Perdana Menteri kepada semua Menteri mengenai pers interview.

10 Oktober 1952
asli
5 lembar

2475 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Menteri Penerangan mengenai penyampaian salinan surat Menteri Luar Negeri tentang siaran bahasa Belanda oleh

17 Oktober - 25 Februari 1953
salinan
1 sampul

2476 Surat dari Jawatan kepolisian Negara kepada Perdana Menteri tentang buku F.J. Goedhart yang berjudul *Een Revolutie op Drift.*

3 Januari 1953
asli
1 sampul

2477 Berkas mengenai lukisan tulisan dalam "*Elseviers Weekblad*" tentang wayang wong di Jakarta.

12 Februari 1953
asli
6 lembar

2478 Surat pengantar dari Kepala Biro Penerangan kepada Kementerian Kehakiman mengenai pengiriman majalah "Angkatan Darat" Nomor 30 sebanyak 3 lembar. n.b : tidak ada lampiran.

6 Juni 1953
asli
1 lembar

2479 Surat dari Kepala Bagian Keamanan kepada Menteri Penerangan mengenai kata sambutan Bupati Pasuruan pada tanggal 17 Agustus 1953.

22 September 1953
asli
3 lembar

2480 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Perdana Menteri mengenai permintaan Jawatan Kereta Api dan Jawatan PTT untuk mencetak sendiri penanggalan tahun 1956.

12 Oktober 1953
asli
2 lembar

2481 Surat pernyataan Kolonel Kawilarang mengenai ingriteit KSAD dalam harian Pedoman tanggal l Desember 1953 untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Menteri.

10 Desember 1953
asli
3 lembar

2482 Siaran pers mengenai gerakan orang-orang Belanda.

12 Januari 1954
salinan
7 lembar

2483 Surat-surat mengenai buku sejarah gereja.

22 Mei 1954 - 5 Maret 1955
asli
1 sampul

2484 Berkas mengenai penyensoran film.

26 Agustus 1954 - 31 Maret 1958
asli
1 sampul

2485 Surat-surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai buku karangan M. Isa Anshary "Ummat Islam menghadapi Pemilihan Umum" yang dianggap membahayakan ketertiban umum.

18 September - 11 November 1954
asli
3 lembar

2486 Terjemahan dari Surat Kabar "Thien Sung Jit Po" pro K.M.T tanggal 23 Juli 1954.

24 September 1954
salinan
1 lembar

2487 Berkas mengenai ikhtisar pers rahasia.

31 Desember 1954 - 3 November 1955
asli

1 sampul

2488 Literature mengenai Analisa Modal dan Kesanggupan Nasional Wanita dan Politik Kebutuhan Dunia yang Utama dan Langkah Pertama dalam Membangun oleh Rukun Bangsa-bangsa (Good Neighbourship Among Nations).

1955 - 1956
asli
2 sampul

2489 Kliping koran mengenai pengangkatan KSAD.

6 Februari - 11 November 1955
asli
1 sampul

2490 Kutipan Surat Kabar Utusan Nasional mengenai "oposisi jang kita kenal".

16 Februari 1955
asli
1 lembar

2491 Berita Negara RI edisi Jum'at 25 Februari 1955.

25 Februari 1955
fotokopi
1 sampul

2492 Surat-surat mengenai karikatur Nabi Muhammad dalam Majalah Life.

30 Maret 1955
asli
1 sampul

2493 Kutipan dari harian Pedoman Rakyat yang terbit di Makasar tanggal 27 Mei 1955 Nomor tahun 69/IX mengenai Manifest Ex. Anggota-anggota Brigade XVI/Kelaskaran Seberang.

25 Mei 1955
salinan
2 lembar

2494 Surat dari Kepala Seksi Arsip kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian brosur sederhana tentang penyempurnaan pekerjaan penyusunan perpustakaan di Seksi Arsip.

15 Maret 1956
asli
1 sampul

2495 Surat dari Kepala Kepolisian Negara mengenai 5 (lima) pelarian-pelarian bangsa Indonesia dari Irian Barat tiba di Weda, Daerah Maluku Utara, beserta lampiran.

5 September 1956
asli
1 sampul

2496 Kutipan-kutipan dari berbagai majalah mengenai ekonomi dan keuangan di Indonesia.

1 Januari - 16 Februari 1957
salinan
1 sampul

2497 Surat Edaran Perdana Menteri No.1/RI/1957 mengenai koordinasi segala rupa pengumuman dan penyiaran yang bersifat politis.
14 Januari 1957
tembusan
1 lembar

2498 Majalah bulanan Pra Juwana diterbitkan oleh Pra Juwana Pusat Indonesia Jakarta.
April 1957
asli
2 lembar

2499 Berkas mengenai susunan Dewan Redaksi Penerbitan Buku-buku Ilmu Administrasi.
27 Agustus 1957 - 10 November 1959
asli
1 sampul

2500 Surat dari Penguasa Militer Jakarta Raya kepada Menteri Penerangan mengenai pembreidelan terhadap sejumlah surat kabar.
28 September 1957
asli
4 lembar

2501 Buletin terbitan Kedutaan Besar Uni Republik - Republik Sovjet Sosialis di RI No. 33 - 35 Bulan Juli dan Agustus 1958.
1958
asli
1 sampul

2502 Kumpulan majalah Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri Tahun 1958 & 1960.
Januari 1958 - 23 Januari 1960
asli
1 sampul

2503 Berita Pers dari Kementerian Penerangan mengenai penyelundupan devisen.
1959
asli
1 sampul

2504 Klipping mengenai kunjungan Presiden Sukarno ke Meksiko.
1959
fotokopi

1 sampul

2505 Surat dari Kepala Sekretariat Menteri Negara Urusan Transmigrasi kepada Menteri Penerangan mengenai penyampaian bahan-bahan untuk penerbitan Buku Peringatan Kabinet Karya.

10 April 1959
asli
1 sampul

2506 Surat dari Jaksa Agung kepada menteri-menteri mengenai ikhtisar Pers Tionghoa dari tanggal 5 - 19 September 1959.

06 Oktober 1959
salinan
1 sampul

2507 Surat dari Pengurus Besar "Gabungan Instalatif Seluruh Indonesia (G.I.S.I) kepada Kepala Jawatan Pemerintah Sipil/Militer mengenai Proyek - proyek pemerintah yang akan dimuat di Majalah Teknik Listrik.

7 November 1959
asli
1 sampul

2508 Bahan terbitan Mimbar Pegawai berjudul peraturan restitusi biaya pengobatan dan peraturan tentang *Rechthebbenden* .

tt
pertinggal, asli
1 sampul

2509 Route-Atlas van den Rotterdamschen Lloyd Samengesteld door G.J.J. De Jongh.

tt
asli
1 sampul

2510 Kumpulan bahan-bahan terbitan berupa koran, majalah, petunjuk telepon dan buletin.

27 Juni 1953
asli
1 sampul

i. Hari Besar

2511 Mosi Panitia Perayaan Hari Pahlawan untuk membebaskan tahanan politik dan setiap tanggal 10 November dijadikan hari libur.

10 November 1950
tembusan
1 lembar

2512 Peraturan Panglima Tentara dan Teritorium IV/Divisi Diponegoro No.4/T/B.3/D.III/51 tanggal 3 Maret 1951 tentang pembatasan mengadakan rapat dan pawai.

03 Maret 1951
salinan
8 lembar

2513 Surat-surat mengenai Hari Perayaan Pattimura.

16 Mei - 14 Agustus 1951
asli
7 lembar

2514 Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Perayaan 17 Agustus yang akan datang.

21 Juli - 15 Agustus 1951
asli
1 sampul

2515 Surat pengumuman pemerintah tentang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia

07 Agustus 1951
asli
1 lembar

2516 Laporan mengenai harapan dan kenyataan pada Pidato Presiden RI tanggal 17 Agustus 1952 (Hari Ulang Tahun ke VII Proklamasi Kemerdekaan).

1952
asli
1 sampul

2517 Berkas mengenai sumbangan dari beberapa kementerian terkait dengan bahan Pidato Presiden untuk tanggal 17 Agustus 1952.

23 - 31 Juli 1952
tembusan
1 sampul

2518 Surat dari organisasi-organisasi di Surakarta kepada Perdana Menteri tentang permohonan agar tanggal 10 November dijadikan kembali sebagai hari besar resmi nasional.

10 November 1952
asli
5 lembar

2519 Berkas mengenai peraturan hari libur.

13 November 1952
asli
1 sampul

2520 Surat Keputusan Presiden No.24 Tahun 1953 tentang hari-hari libur.

01 Januari 1953

asli
1 sampul

2521 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai rakyat Ambon yang tidak dapat mengikuti pidato Presiden.

09 Februari 1953
asli
4 lembar

2522 Berkas mengenai permintaan daftar alamat pegawai-pegawai untuk menerima surat undangan pada hari Kemerdekaan 17 Agustus 1953.

01 Juni - 23 Juli 1953
asli
4 lembar

2523 Sambutan Bagian Kesenian Jawatan Kebudayaan Kem. PP & K untuk Hari Ulang Tahun Proklamasi 17 Agustus.

16 Juli 1953
asli
1 sampul

2524 Berkas mengenai usul penetapan hari-hari bersejarah RI.

14 Oktober - 18 Desember 1953
asli
1 sampul

2525 Berkas mengenai beberapa kejadian di Balikpapan terkait penurunan gambar Presiden dan upacara bendera.

27 Oktober - 23 Desember 1953
asli
5 lembar

2526 Surat Edaran Ketua Serikat Kerja Kabinet Perdana Menteri tentang peringatan hari 1 Mei 1955.

30 April 1955
fotokopi
1 lembar

2527 Surat dari Walikota Jakarta Raya kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perayaan hari besar Islam.

27 Mei 1955
tembusan
1 lembar

2528 Surat dari Perdana Menteri kepada Presiden mengenai pemberian tanda jasa pada Hari Ulang Tahun X Proklamasi Kemerdekaan.

29 July 1955
salinan

1 sampul

2529 Surat Pengumuman No.2 panitia perayaan 17-8-1955 mengenai pendaftaran nama beserta keluarga untuk menghadiri malam pertunjukkan 20-8-1955 di SBKA

8 Agustus 1955
asli
2 lembar

2530 Surat dari Panitia Perayaan 17 Agustus 1955 dan 5 tahun Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri kepada Irman Surasa Putra mengenai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

24 Agustus 1955
asli
1 lembar

2531 Surat - surat mengenai sumbangan biaya untuk perayaan Hari Kemerdekaan.

16 & 31 Juli 1956
salinan
3 lembar

2532 Bahan terbitan menyambut Konstituante RI di Hari Sumpah Pemuda dari Dewan Pimpinan Gerakan Kumara Bhavana.

28 October 1956
asli
1 lembar

2533 Surat-surat mengenai pekan kerjabakti dalam rangka Proklamasi 17 Agustus Daerah Jakarta Raya.

16 - 19 Agustus 1957
asli
1 sampul

2534 Surat Perdana Menteri kepada para Menteri dan ABRI tentang Peringatan Setengah Abad Hari Kebangkitan Nasional.

12 Mei 1958
asli
1 sampul

2535 Surat dari Perdana Menteri kepada Direktur *Caltex Pacific Oil Company* mengenai pemberitahuan tidak dapat menghadiri Upacara Pembukaan Pelabuhan Samudera Baru di Dumai, Selat Rupat pada tanggal 15 Juli 1958.

24 Juni & 08 Juli 1958
asli
2 lembar

2536 Surat dari Perdana Menteri kepada Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pedagang Gula Indonesia (PPGI) mengenai pemberitahuan tidak dapat memenuhi undangan untuk menghadiri Resepsi memperingati Windon PPGI pada tanggal 12 Juli 1958 di Solo.

01 - 08 Juli 1958
asli
2 lembar

2537 Penetapan Menteri Agama No. 28 Tahun 1958 tentang Tanggal Hari-Hari Libur dalam Tahun 1959.

01 Juli 1958
asli
1 lembar

2538 Surat dari Perdana Menteri kepada Direktur Lembaga Pusat Penyakit Hewan mengenai pemberitahuan ketidakhadiran pada Upacara Peringatan 50 Tahun berdirinya Lembaga Pusat Penyakit Hewan pada tanggal 26 Juli 1958 di Gedung Lembaga Pusat Penyakit Hewan Bogor.

14 - 22 Juli 1958
asli
2 lembar

2539 Berkas mengenai Peringatan 30 Tahun Sumpah Pemuda.

18 Oktober - 6 November 1958
salinan
1 sampul

2540 Surat-surat mengenai Peringatan Pahlawan Antasari sebagai Pahlawan Nasional, Kemerdekaan Indonesia.

28 Oktober - 4 Desember 1958
pertinggal
1 sampul

3. URUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN
a. Bea Cukai dan Perpajakan

2541 Berkas mengenai penjelasan UU tentang Pajak Peredaran Daerah.

1950
tembusan, fotokopi
1 sampul

2542 UU Darurat No.41 Tahun 1950 tentang Kenaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi.

30 Desember 1950
fotokopi
1 sampul

2543 Surat dari Persatuan Kepala Kampung Kota "Makasar" kepada Acting Gubernur Sulawesi mengenai kenaikan pajak jalan tahun 1951.

20 Mei 1951
asli
8 lembar

2544 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Kementerian Keuangan mengenai permintaan pembebasan biaya masuk untuk barang-barang, beserta lampiran.

13 Juli 1951
salinan, pertinggal
6 lembar

2545 Berkas mengenai pengesahan UU tentang Penggantian Pajak Bumi dengan Pajak Peralihan Tahun 1944.

29 Agustus 1951
asli, salinan
1 sampul

2546 Berkas mengenai peraturan pajak rumah tangga.

3 Oktober 1951 - 8 Januari 1952
asli
1 sampul

2547 Berkas mengenai tarif pajak peralihan dan tunjangan kemahalan daerah tahun 1949 - 1952

1 Januari 1952 - 10 Januari 1953
tembusan
1 lembar

2548 SK Menteri Keuangan No.UK 1-2-6 tentang Penetapan Peraturan Panitia untuk Menetapkan Pajak Peralihan Kecil.

31 Maret 1952
pertinggal
2 lembar

2549 Laporan dari Kantor Gubernur Jawa Tengah Bagian Keuangan kepada Residen Semarang mengenai laporan mengenai kerugian pada negara/penggelapan uang pajak.

1 Juli & 22 September 1952
tembusan
1 lembar

2550 Berkas mengenai Perencanaan UU Darurat tentang Bursa.

09 Februari 1952
tembusan
1 sampul

2551 Berkas mengenai pengesahan UU Darurat No.9 1951 tentang Perpanjangan Waktu Berlakunya *Opsenten* atas Macam-Macam Cukai.

1953
tembusan
1 sampul

2552 Berkas mengenai penyampaian Rancangan PP tentang Pelaksanaan Ketentuan Khusus Nomor 6 pada Pos 159 dari Tarif Bea Masuk.

23 September 1953 - 14 Desember 1953
asli
1 sampul

2553 Surat dari Sekjen DPR kepada Perdana Menteri mengenai penetapan UU Darurat Nomor. 24 tahun 1951 tentang Perubahan Beberapa Pos Tarif Bea Masuk (lembaran Negara Nomor. 104 tahun 1951) sebagai UU.

09 Februari 1954
asli
1 sampul

2554 Berkas mengenai berita sekitar penyelundupan di Teluk Nibung dan Kabupaten Langkat (Sulawesi Utara dan Sumatera Utara).

14 Juli 1956 - 23 Februari 1957
pertinggal
1 sampul

2555 Berkas mengenai kerja sama di lapangan pabean (*Convention Establishing Customs Cooperation Council*) yang dibuat di Brussel.

26 November 1956
asli, fotokopi
1 sampul

2556 Surat dari Kepala KPPN Surabaya kepada Kementerian Keuangan Biro B.II dan sebagainya mengenai pembentukan ikhtisar daftar P.8 No.3/C.8 tanggal 5 Februari

12 Februari 1957
fotokopi
1 sampul

2557 lembaran Negara No.56 Tahun 1957 tentang Peraturan Pajak Daerah.

22 Mei 1957
fotokopi
1 sampul

2558 Daftar-daftar uang dengan atau tidak dengan surat perintah dari KPPN/Kantor Kas Padang, Surabaya, Palembang dan Tomohon. n.b.: kondisi fisik sobek.

4 Januari - 9 September 1957
asli
6 lembar

2559 Memori penjelasan mengenai RUU tentang Penetapan UU Darurat No. 14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (lembaran Negara 1952s No. 87) sebagai UU.

30 Oktober 1957

fotokopi
2 lembar

2560 Berkas mengenai Rancangan PP mengenai Penetapan Presentase dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara untuk Daerah.

18 Januari 1958
Tembusan
1 sampul

2561 Surat-surat mengenai pembebasan pembayaran TPI dan BE terhadap barang-barang bantuan luar negeri.

Februari - Juni 1958
3 lembar
tembusan, asli

2562 Surat dari Dewan Nasional kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai perhitungan bea angkutan penumpang negeri.

Maret - 19 Juli 1958
asli
1 sampul

2563 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada Ketua DPR mengenai pertanyaan anggota DPR tentang tindakan pemerintah mengenai pajak bangsa asing.

22 Oktober 1958
asli
1 sampul

2564 Surat-surat penagihan Kantor Pelayanan Pajak Bandung, Makasar, Pekanbaru, Surabaya, Manado, Jambi, Banjarmasin yang diterbitkan a/n Departemen Kepolisian.

1959
asli
1 sampul

2565 Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

21 Desember 1959
asli
1 sampul

2566 Surat mengenai barang - barang yang dibeli oleh touris - touris disalah satu souvenirshop.

Juli 1960
asli
3 lembar

2567 Laporan dari Panitia Perimbangan Keuangan mengenai beberapa RUU dan Peraturan Pemerintah tentang perimbangan keuangan, pajak, subsidi, dan tunjangan.

tt

asli
1 sampul

b. Perdagangan dan Industri

2568 Surat-surat mengenai pengawasan ekspor dan impor.
11 April 1950-23 Juni 1955
fotokopi
1 sampul

2569 Berkas mengenai pabrik mutiara Boston.
18 April 1950 - 27 Juli 1953
asli, tembusan
1 sampul

2570 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai Peraturan Dewan Perlengkapan dan Perindustrian.
13 Mei 1950 - 2 Juni 1953
pertinggal
1 sampul

2571 Berkas mengenai pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.
8 Agustus 1950 - 10 Agustus 1959
asli
1 sampul

2572 Berkas mengenai penghapusan Jawatan Distribusi.
19 Oktober - 26 Oktober 1950
asli, pertinggal
1 sampul

2573 Surat dari Vakhuismster StoomVaart Mij Nederland tertanggal 5 November 1950 mengenai peraturan pengambilan barang-barang dari gudang SMN.
5 & 9 November 1950
tembusan
1 sampul

2574 Berkas mengenai pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Majelis Perniagaan dan Perusahaan.
2 November 1950
asli
1 sampul

2575 Surat Edaran Komisariat Agung RI No.49 tentang pemindahan alamat *Laan Copes Van Cattenberg.*
15 Desember 1950
asli
1 lembar

2576 Berkas mengenai pengiriman kembali intan berlian dari Jepang ke Indonesia.
Januari 1951 & Februari 1952
asli
1 sampul

2577 Surat dari Kementerian Perekonomian mengenai pengembalian tambang minyak di Sumatra Utara.
02 Februari 1951
asli
1 lembaran

2578 Surat dari Perdana Menteri kepada Kabinet Presiden tentang penjualan gudang di Manado.
07 Februari 1951
asli
1 sampul

2579 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada Jawa Madura Veem tentang penyewaan gudang.
20 April 1951
asli
1 sampul

2580 Surat dari Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat kepada Perdana Menteri tentang penyitaan buku-buku dan surat-surat dagang dari perusahaan dan rumah para pengusaha bangsa India.
26 Agustus 1951
salinan
3 lembar

2581 Surat dari Sekretaris Vereneging van Importeurs Groothandelaren in Indonesia kepada semua importir di Kota Jakarta tentang *Congestie Tanjung Priok.*
22 November 1951 - 17 Januari 1952
asli, tembusan
1 sampul

2582 Laporan dari Kepala Jawatan Koperasi di Amerika Serikat mengenai peninjauan koperasi di Amerika Serikat.
1952
salinan
1 sampul

2583 Berkas mengenai perindustrian tekstil dan bantuan dari pemerintah.
5 Januari - 12 Maret 1952
tembusan
4 lembar

2584 Surat dari Fa. Maha Suri kepada Perdana Menteri mengenai ide-idenya di bidang kemakmuran rakyat.

25 Januari 1952
asli
4 lembar

2585 Nota Dinas dari Perwira Instricteur Demobilisasi kepada Perdana Menteri mengenai Penjualan "Sumbermas" N.V.

10 - 11 Februari 1952
fotokopi
1 sampul

2586 Berkas mengenai korek api merk "Tanah Air".

28 Februari 1952
asli, salinan
1 sampul

2587 Surat dari Dewan Pimpinan Pusat kepada Perdana Menteri mengenai anggaran dasar Yayasan Usaha Memodernisir Kekayaan Alam Indonesia.

03 Maret 1952
asli
9 lembar

2588 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai permintaan kredit Inaco.

05 Maret 1952
asli
3 lembar

2589 Surat dari Ketua Usaha Pertambangan "Pancasila" Bondowoso kepada Menteri Perekonomian mengenai hasil usaha pertambangan "Pancasila" Bondowoso.

01 Juni 1952
asli, tembusan
1 sampul

2590 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai *Sitdown Strike* SB Borsumy Tjabang Perindustrian Surabaya.

10 Juli 1952
asli, salinan
1 sampul

2591 Surat dari Direktur Jenderal Iuran Negara kepada Kepala Inspeksi Keuangan mengenai pembaharuan nilai aktiva tetap dari perusahaan, beserta lampiran.

21 Juli 1952
asli, fotokopi
1 sampul

2592 Surat dari Seketaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai penyampaian Surat Notaris R.M. Soerojo No. 986/816 tentang Persetujuan untuk mengesahkan N.V. Paka.

24 Juli 1952 - 16 Agustus 1962

asli
7 lembar

2593 Resolusi DPRDS Kabupaten Pamekasan tentang menyokong resolusi DPRDS Kabupaten Sumenep tanggal 5 Agustus 1952 dan tuntutan pendirian pabrik soda yang sudah direncanakan.

Agustus - September 1952
asli
1 sampul

2594 Berkas mengenai pembentukan yayasan kredit daerah di tiap-tiap ibukota propinsi.

22 Agustus 1952
asli, salinan
1 sampul

2595 Berkas mengenai usaha mendirikan pabrik ban mobil.

01 September 1952
tembusan
1 sampul

2596 Berkas mengenai nasionalisasi tambang minyak Sumatera Utara.

12 September 1952 - 18 Desember 1953
asli
1 sampul

2597 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai peraturan impor keperluan jawatan-jawatan/perusahaan-perusahaan melalui KAPP.

29 September 1952
asli
1 sampul

2598 Surat dari Presiden kepada Ketua DPR mengenai pengesahan UU tentang Perjanjian Pinjaman Tambahan RI dengan *eksport - import Bank Of Washington* .

1 November 1952 - 25 Juni 1953
tembusan
5 lembar

2599 Berkas mengenai protes Panitia Urusan Tionghoa terhadap ditutupnya Perusahaan SK oleh pemerintah Thai.

07 Januari 1953
pertinggal
1 sampul

2600 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada Perdana Menteri mengenai perusahaan timah di Bangka dan Belitung.

13 Februari 1953
asli
1 sampul

2601 Surat dari Sekjen Menteri Perburuhan kepada Perdana Menteri mengenai *Statuten Indische Maatschappij Voor Werkloosheidsbestrijding.*

28 Februari- 12 Desember 1953
asli
1 sampul

2602 Surat dari Dewan Pimpinan Cabang SBPI kepada Menteri Perekonomian mengenai perlindungan dan bantuan modal nasional Perusahaan "*Java Battery Factory Oei Khong Hwa*".

18 Agustus 1953
tembusan
6 lembar

2603 Berkas mengenai "*Need For Increased Electric Power Supply On Java*" oleh J.E. Stepanek, U.N. Technical Expert.

01 Desember 1953
asli
salinan

2604 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada Perdana Menteri mengenai Peraturan Pembiayaan Panitia-Panitia dan Adanya Panitia Industrialisasi.

21 September 1954
asli
3 lembar

2605 Berkas mengenai penutupan Perusahaan Philips di Surabaya.

22 Oktober 1954 - 24 Februari 1955
asli
1 sampul

2606 Surat dari Menteri Keuangan kepada Ketua DPR mengenai penutupan rumah-rumah gadai partikeler di Kota Surabaya, beserta lampiran.

14 Desember 1954
asli
1 sampul

2607 SK Menteri Perekonomian No.18.420/M tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengurus Yayasan Kopra.

29 Desember 1954
asli, salinan
1 sampul

2608 Berkas mengenai *Project Proposal and Approval Summary Foreign Operations Administration United States of America 1955 (Assistance to Private Industrial Enterprises (Spinning Mill).*

1955
salinan

2 lembar

2609 Surat-surat mengenai perdagangan kopra.
1 Februari 1955 - 6 Oktober 1958
asli
1 sampul

2610 Laporan Perutusan indonesia ke Sidang VII *Committee of Industry and Trade* di Tokyo.

15 - 24 Maret 1955
pertinggal
2 lembar

2611 Surat dari Seksi Korespondensi Biro Perancang Negara kepada Perdana Menteri tentang peta keadaan penerangan listrik di Jawa dan Madura skala 1 A¹ 500.000.
04 Juli 1955
pertinggal
6 lembar

2612 Pengumuman dalam berita negara RI menurut pasal 38 dari Buku UU Perniagaan: PERSEROAN TERBATAS
08 Juli 1955
fotokopi
6 lembar

2613 Surat dari Biro Pemerintahan Umum Pusat Kotapraja Jakarta Raya kepada semua instansi di Jakarta mengenai pembelian pada Perusahaan-Perusahaan BRN.
18 Juli 1955 & 14 Desember 1956
asli
3 lembar

2614 Surat-surat mengenai pengoperan bagian *Stuwadoring* dari *NV Kononklijke Paket Vaart Maatschappij* oleh PT *Ocean Stevedoring Company*. n.b. : arsip berbahasa Belanda
15 Oktober 1955 - 21 Desember 1957
tembusan
1 sampul

2615 Laporan Panitia Serat Bertalian dengan Proyek Nasional untuk Produksi Tekstil.
15 Oktober 1955 - 29 November 1957
salinan
2 lembar

2616 Surat dari Kepala Bagian Polisi kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai tuntutan Persatuan Saudagar Indi (PERSI) Tandjung Balai untuk menghapuskan peraturan visa internasional.
19 Juni - 29 Oktober 1956
salinan

1 lembaran

2617 Berkas mengenai persetujuan aturan Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Inggris mengenai pengolahan kapas menjadi benang dan tekstil.

2 - 10 Agustus 1956
asli, tembusan
1 sampul

2618 Surat dari Sekjen Kementerian Perekonomian kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai pemberitahuan didirikannya "Super Intending Company of Indonesia Ltd".

02 November 1956
fotokopi
1 sampul

2619 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai Sidang-Sidang Kabinet antara lain, tambang minyak Sumatera Utara.

06 November 1956
salinan
1 sampul

2620 Akte Pendirian Perseroan Terbatas NV. Perusahaan Tenun dan Perdagangan "Gunung Kidul" di Bandung. n.b.: arsip tidak lengkap.

02 Februari 1957
fotokopi
1 sampul

2621 *Progress Report* NV. Pabrik Semen Gresik Bulan Februari-Maret 1957.

01 April 1957
asli, pertinggal
1 sampul

2622 Laporan bulanan P3 NV dan Tambang Mas Cikotok Bulan Maret dan Juni 1957.

April, Agustus 1957
salinan
1 sampul

2623 SK Perdana Menteri No.189/PM/1957 tentang Pembentukan Panitia Gas Alam.

02 Juli 1957
asli
1 sampul

2624 Surat-surat mengenai pemilihan pupuk sebagai bahan yang diawasi dan diberi subsidi untuk impor.

1 Agustus 1957 - 4 Maret 1958
pertinggal
1 sampul

2625 SK Presiden RI No. 172/1957 tentang Penyerahan Urusan Statistik dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri.

1 Agustus 1957
asli
1 sampul

2626 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada Menteri Perindustrian tentang penyampaian surat Pusat Yayasan Pembangunan Pemuda Teknik Indonesia mengenai kredit.

22 Agustus 1957
pertinggal, tembusan
1 sampul

2627 Surat kepada Dirjen Biro Perancang Negara tentang rencana pembangunan pabrik semen di Prapat oleh NV.Horas.

03 September 1957
pertinggal
1 sampul

2628 SK Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang Perusahaan Perdagangan Asing.

03 September 1957
tembusan
1 sampul

2629 Surat Edaran Perdana Menteri kepada segenap instansi mengenai ketentuan dalam menjalankan impor, transfer dll, terkait dengan peraturan bukti ekspor.

3 September 1957
pertinggal
1 lembar

2630 Berkas mengenai kedatangan Nieuwenhuis (*Chemical Projects Associates)* sebagai penasihat persoalan pabrik pupuk urea.

18 November - 7 Desember 1957
asli, pertinggal
4 lembar

2631 Daftar mengenai Depot Simpanan Effek-effek dan *Alphabetische* Index Effek-effek.

31 Desember 1957
tembusan
3 lembar

2632 Buku Tahunan Statistik Industri 1958.

1958
fotokopi
1 sampul

2633 Catatan rapat Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (sidang ke I - VII).

8 Januari 1958 - 31 Desember 1959
fotokopi

1 sampul

2634 Surat-menyurat antara Perdana Menteri dengan R. Shaw, P and T Lands PT di Subang mengenai *social transfers* untuk pekerja Jerman. n.b. : arsip dalam bahasa Inggris.
22 Januari, 18 Februari 1958
asli
1 sampul

2635 Surat-menyurat Perdana Menteri dengan Panitia Negara Urusan Industri mengenai tanggapan contoh kain drill dari kapas Indonesia.
23 Januari - 26 Februari 1958
tembusan
1 sampul

2636 Surat dari Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan mengenai permintaan modal untuk melanjutkan pabrik *hard board* Sulawesi Utara.
29 Januari 1958
asli
1 sampul

2637 Surat-surat mengenai laporan Menteri Perdagangan tentang keadaan ekonomi pada umumnya.
06 Mei 1958
salinan
7 lembar

2638 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri tentang salinan surat *Lidroad Van Bestuur NV. Deli Mascapai* mengenai penjualan semua aktiva Indonesia.
17 Mei 1958
asli
1 sampul

2639 Berkas Menteri Perdagangan mengenai kebijaksanaan tentang tekstil.
21 Mei - 27 Desember 1958
asli
1 sampul

2640 Surat-surat mengenai perkembangan Badan Usaha Dagang (BUD).
20 Juni - 11 Juli 1958
asli
1 sampul

2641 Surat dari Kepala Jawatan Sandi kepada Perdana Menteri mengenai permohonan izin mengimport alat-alat mesin sandi.
25 Juni 1958
asli
1 sampul

2642 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Perindustrian mengenai pemberitahuan Politik PERMINA yang telah ditetapkan yaitu tetap menjadi perusahaan nasional seratus persen.

08 - 22 Juli 1958
pertinggal
4 lembar

2643 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai permohonan pengiriman seorang perwakilan dari *Chemical Construction Corporation* ke Indonesia.

22 Juli 1958
asli
5 lembar

2644 Surat Keputusan Perdana Menteri tentang Pengumpulan dan Perdagangan Kopra serta Suplai Barang-Barang Kebutuhan Rakyat di Sulawesi Utara & Sulawesi Tengah.

15 Oktober 1958
salinan
8 lembar

2645 Surat dari Dewan Menteri kepada Menteri Perindustrian mengenai pengangkatan Sdr. Sarju Ismunandar sebagai Presiden Direktur BAPPIT.

23 Oktober 1958
asli
1 sampul

2646 Surat dari Direktur Kabinet Prersiden kepada Menteri Pembangunan mengenai peninjauan kembali Rancangan PP tentang pembentukan Lembaga Perkembangan Tekstil Indonesia.

22 Desember 1958 - 16 Juli 1959
asli, salinan
1 sampul

2647 Rancangan PP tentang pengawasan dan penyaluran minyak bumi.

23 Desember 1958
asli
1 sampul

2648 Laporan Tahunan Panitya Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) Tahun 1959.

1959
asli
1 lembar

2649 Berkas mengenai Pabrik Semen Gresik.

04 Februari 1959
asli
1 sampul

2650 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Perdana Menteri mengenai kunjungan 3 ahli Jerman Barat guna proyek rayon industri.

28 Maret 1959
asli
1 sampul

2651 Surat dari Pusat Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya kepada semua Pimpinan Kementerian mengenai perubahan harga textiel pampasan.

01 April 1959
tembusan
7 lembar

2652 Berkas mengenai usul tentang pelabuhan bebas.

18 April - 04 Mei 1959
asli
5 lembar

2653 Surat dari KSAD mengenai status PT. Permina.

08 Juli 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2654 Surat-surat mengenai permohonan peninjauan kembali Keputusan Menteri Perdagangan tentang Izin Meneruskan Perusahaan dari Para Pedagang Kecil/Eceran.

10 Juli - 8 September 1959
asli, pertinggal
5 lembar

2655 Surat dari Departemen Perdagangan kepada Kepala Gudang Stockpiling mengenai Surat Perintah mengeluarkan barang *stockpiling* untuk diserahkan kepada Lembaga Tenaga Atom di Jakarta.

29 Desember 1959
fotokopi
8 lembar

2656 Buku telepon Seksi Peralatan dan Inventarisasi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan.

tt
fotokopi
8 lembar

c. Agraria (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan)

2657 Surat dari Pembantu Inspektur Polisi II Kantor Kepolisian Negara Kota Yogyakarta kepada Perdana Menteri mengenai permohonan kembali tanah pekarangan yang dibeli paksa Jepang.

9 Januari 1950 - 13 Maret 1950
tembusan

4 lembar

2658 Berkas mengenai laporan dari Geraktani Sumatera Timur tentang perluasan pertanian dan tuntutan kerugian dan juga bantuan.

16 Januari 1950 - 17 Juni 1952
fotokopi
1 sampul

2659 Surat dari Kementerian Pertanian tentang penyelesaian pembagian tanah consensia tembakau Sumatra Timur, beserta lampiran.

13 Februari 1950
asli
1 sampul

2660 Surat dari Ketua Persatuan Istri kepada Walikota Jakarta mengenai permohonan sebidang tanah kosong untuk Asrama Kaum Ibu.

17 Maret 1950
tembusan
1 lembar

2661 Keputusan Bersama antara Kementerian Kemakmuran RIS dan Kementerian Pertanian RI tentang Pembagian Pekerjaan antara Kementerian Kemakmuran RIS dan Kementerian Pertanian RI.

08 April 1950
tembusan
3 lembar

2662 Surat persetujuan antara SARBUPRI dan *A.L.S/Zuid en West Sumatra Syndicaat* tentang upah terendah di perusahaan perkebunan di Sumatra Selatan.

September 1950
asli
1 sampul

2663 Berkas tentang keadaan tanah P&T (Tn Parjono dan Tn Tuhari).

16 September 1950
salinan
1 sampul

2664 Surat dari Kepala Kantor Pusat Statistik kepada Perdana Menteri mengenai statistik pertanian dan perhitungan pertanian di Indonesia, beserta lampiran.

16 September 1950
asli
1 sampul

2665 Surat dari Kementerian Pertanian mengenai pengaruh politik agraria terhadap hak-hak *erfpack* , beserta lampiran.

30 September 1950
tembusan
1 sampul

2666 Surat dari Ketua *Vorstenlandse Landbouw Vereniging* kepada Perdana Menteri mengenai keadaan perusahaan-perusahaan perkebunan yang terletak di DIY.

13 November 1950
asli
1 sampul

2667 Telegram dari Perdana Menteri kepada Gubernur Jawa Barat dan PT. Sewaka mengenai penyelesaian pengembangan Perkebunan "Bantardawa" dan Birangun"di Kabupaten Ciamis kepada pemiliknya.

25 November 1950 - 24 Juli 1951
asli
2 lembar

2668 Laporan dari Panitia Persiapan Perbekalan.

17 Desember 1950
asli
2 lembar

2669 Berkas SK Menteri Pertanian tentang Cara-Cara Pembubaran (Likuidasi) *Crisis Culture Centrals.*

30 Desember 1950 - 2 Juni 1951
salinan
1 sampul

2670 Surat dari Komisi Kepala kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai salinan Resolusi Persatuan Indonesia Raya tentang pengarahan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2 Januari - 26 Februari 1951
tembusan
2 lembar

2671 Laporan dari Kejaksaan Agung mengenai sengketa tanah karet di Gunung Kupak Kecamatan Cadasari.

06 Januari 1951
asli
2 lembar

2672 Surat-surat Persatuan Perkebunan Karet Rakyat Indonesia Sumatera Utara mengenai upaya mencapai kemakmuran rakyat.

12 - 25 Januari 1951
fotokopi
1 sampul

2673 Berkas mengenai kerusakan hutan di Banyuwangi.

22 Februari 1951
pertinggal
1 sampul

2674 Berkas mengenai pengusutan tanah perkebunan Said Bin Salim Mashabi.

1 Mei - 31 Oktober 1951
tembusan
1 sampul

2675 Laporan dari Kepala Balai Perancang Tata Bumi kepada Menteri Pertanian mengenai perjalanan ke India.

7 Maret 1951
tembusan
11 lembar

2676 RUU tentang pemakaian tanah-tanah perusahaan kebun di Sumatra Timur.

20 Maret 1951
salinan
1 sampul

2677 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Pertanian tentang perkebunan karet di Gunung Kupa, Banten, beserta lampiran.

16 April 1951
pertinggal
1 sampul

2678 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Kepala Staf "K" Provinsi Jawa Barat mengenai pengembalian kebun karet Cikerenjeng Kabupaten Camis, beserta lampiran.

16 April 1951
pertinggal
1 sampul

2679 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada kepala staf "K" provinsi di seluruh Jawa mengenai peraturan mengangkut karet.

24 April 1951
pertinggal
1 sampul

2680 Surat dari Kementerian Pertanian kepada Kementerian Luar Negeri mengenai perijinan kepergian W.H. Schuster ke sidang FAO.

30 April 1951
tembusan
1 sampul

2681 Berkas mengenai reorganisasi BAMA, pembelian padi pemerintah.

Mei 1951 - Januari 1952
salinan
1 sampul

2682 Surat dari Sekertariat Dewan Menteri kepada Sekertaris Dewan Ekonomi dan Keuangan mengenai politik Pemerintah terhadap perusahaan gula.

24 Mei 1951
pertinggal

6 lembar

2683 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Perdana Menteri mengenai laporan keadaan makan/pangan di Banyuwangi Selatan selama masa paceklik.
28 Mei 1951
asli
1 sampul

2684 Berkas mengenai rekapitulasi mengenai Perkebunan Karet Rakyat Pusat Indonesia.
15 Juni 1951
tembusan
5 lembar

2685 Surat dari Direksi Yayasan G.P.B.I. kepada Wakil Prsiden RI mengenai akte pendirian Gabungan Penyelenggara Beras Indonesia.
21 Juni 1951
tembusan
2 lembar

2686 Putusan Konferensi Inspektur Kementerian Pertanian Jakarta.
24-29 Juli 1951
fotokopi
1 sampul

2687 Berkas mengenai rencana memperbesar produksi bahan makanan dengan penanaman semua tanah yang kosong dengan bahan-bahan makanan palawija.
8 September 1951 - 17 Januari 1958
tembusan
6 lembar

2688 Series SK mengenai Panitya Pembangun Wilayah Hutan dan Pertanian.
24 September 1951 - 22 April 1955
tembusan
1 sampul

2689 Laporan Kementerian Pertanian mengenai kegiatan Indonesia dalam FAO.
20 November 1951
fotokopi
1 sampul

2690 Surat dari Kepolisian Provinsi Jawa Barat tentang permohonan ijin dari pengusaha perkebunan Tiedeman dan Van Kerchem untuk membuat lapangan terbang.
19 November 1951
asli, salinan
1 sampul

2691 Berkas mengenai pembentukan Panitya Ad Hoc Perikanan dan laporan Panitya Penyelidik Perikanan Laut.

21 November 1951 - 27 April 1954
asli, tembusan
9 lembar

2692 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai status Menteri Agraria.

10 Januari 1952
pertinggal
1 sampul

2693 Berkas mengenai RUU Darurat untuk mengubah *Grondhuur Reglement* (S.1918 No.20) serta rencana mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Uang Sewa Tanah untuk Tanaman Tebu tahun 1951/1952.

16 - 28 Januari 1952
asli, tembusan
1 sampul

2694 Surat-surat mengenai masalah-masalah kesulitan di perkebunan wilayah *Algemeen Landbouw Syndicaat* dan keadaan perkebunan-perkebunan karet di Provinsi Sumatera Utara.

5 Maret 1952 - 24 Desember 1953
asli
1 sampul

2695 Berkas mengenai UU Darurat tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan.

23 April - 14 Mei 1952
pertinggal
1 sampul

2696 Rancangan PP tentang perubahan PP No. 58/1951 mengenai Opsen Bea Keluar atas Karet Rakyat.

27 Mei 1952
pertinggal
1sampul

2697 Surat-surat mengenai sengketa tanah di Kuranga Talete.

30 Mei - 23 Juni 1952
tembusan
1 sampul

2698 Berkas mengenai tanah partikelir Manukan dan Tandes Surabaya.

20 Juni - 13 November 1952
asli
1 sampul

2699 Surat-surat mengenai *Biologische Landbouw* , metode pertanian yang diungkapkan oleh Ir. V.d. Meulen. n.b. : sebagian arsip berbahasa Belanda

28 Juli - 23 Desember 1952
asli, pertinggal
1 sampul

2700 Surat dari Pimpinan Pusat Persatuan Kaum Tani (PKT) Sumatera Selatan kepada Perdana Menteri mengenai keputusan Konferensi PKT cabang Tebing Abang ke-1.

05 Agustus 1952
salinan
2 lembar

2701 Laporan bulanan (Agustus) dari Jawatan Perkebunan Jawa Tengah.

27 September 1952
salinan
3 lembar

2702 Berkas mengenai *weekrapport* 11/10-18/10-1952 Rayon Vertegenwoordiger Algemeen Landboum Syndicaat Jawa Tengah (Laporan tentang harga beras di Jawa Tengah).

Oktober 1952
asli
1 lembar

2703 Surat dari Ketua umum Persatuan Perkebunan Getah Rakyat kepada Kepala Jawatan Perdagangan Pusat mengenai permohonan izin *deviezen* meneruskan perjuangan perkembangan perekonomian nasional karet rakyat.

Oktober - November 1952
tembusan
1 sampul

2704 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Pertanian mengenai "*Kontrak Van Der Meulen* " dengan Kementerian Pertanian tentang percobaan metode botani baru.

12 Oktober 1952 - 9 Juli 1953
tembusan
1 sampul

2705 Surat-surat tentang persengketaan tanah di Palembang, Banyuwangi dan Sumatra Utara.

1953
tembusan
1 sampul

2706 Berkas mengenai persoalan hak tanah di Kurao (Negeri Nanggalo - Sumatera Tengah).

5 Januari - 28 Mei 1953
asli
1 sampul

2707 Surat dari Menteri Penerangan kepada Perdana Menteri tentang bantuan kepada daerah kopra.

20 Januari 1953 - 6 Juli 1959
asli, pertinggal
1 sampul

2708 Berkas mengenai perkembangan tanah di Sumatra Timur.

februari - Oktober 1953
asli, tembusan
1 sampul

2709 RUU tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan.

7 Februari 1953 - 17 Mei 1958
asli, tembusan
1 sampul

2710 Surat dari DPR kepada Menteri Pertanian mengenai politik Pemerintah mengenai pembelian padi yang merugikan kaum tani.

23 Mei 1953
tembusan
1 sampul

2711 Laporan delegasi Indonesia dalam rapat regional FAO untuk Asia dan Timur Jauh di India.

27 Juli - 5 Agustus 1953
fotokopi
1 sampul

2712 Surat dari Kementerian Pertanian kepada Staf K Pusat mengenai kerusakan hutan daerah Balapulang, beserta lampiran.

18 Agustus 1953
asli
1 sampul

2713 Berkas mengenai jawaban Pemerintah dalam pemandangan umum babak I soal pembuatan waduk, bangunan irigasi dan plan Murdjani.

1 September 1953
asli
1 sampul

2714 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Panitia Negara guna penyelidikan pembagian tanah di Sumatera Utara, beserta lampiran.

15 September 1953
pertinggal
1 sampul

2715 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Kehakiman mengenai permohonan dari Panitia Tuntutan Tanah untuk memberi tanah rakyat Tjisuruan, beserta lampiran.

30 September 1953
pertinggal
1 sampul

2716 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Agraria mengenai penyampaian salinan telegram dari anggota RTI Linggadja, RTI Ranting Nagarasari, Tasikmalaya tentang diadakannya UU Agraria.

05 Oktober 1953
asli, pertinggal
3 lembar

2717 Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 1953 tentang Uang Sewa Tanah untuk Tanaman Tebu musim 1954-1955.

12 Oktober 1953
fotokopi
4 lembar

2718 Surat-surat mengenai pentraktoran kebun-kebun penduduk daerah konsesinya oleh BPM Kampung Plaju.

12 Oktober 1953 - 5 Mei 1954
asli
1 sampul

2719 Surat dari Walikota Jakarta Raya kepada Menteri Dalam Negeri mengenai permohonan untuk segera memberi keputusan tentang penguasaan kembali persil Medan Merdeka Selatan 8 untuk perluasan Balai Kota.

23 Oktober 1953 - 10 Januari 1955
tembusan
1 sampul

2720 Surat dari Perdana Menteri kepada Biro Keamanan kepada Kementerian Agraria mengenai Penyelesaian Tanah Erfpacht Bukit Kaba di Tjurup oleh bekas buruh perkebunan.

25 Oktober 1953 - 14 Desember 1954
asli, tembusan
9 lembar

2721 Surat mengenai permasalahan dalam bidang pertanian, disertai surat pengantar.

27 Oktober 1953
asli
1 sampul

2722 Berkas mengenai orang-orang yang membuka tanah tanpa ijin di Cikadu.

30 Oktober 1953
pertinggal
1 sampul

2723 Surat-surat mengenai tanah persil di Kota Baru, Kebayoran dan Kudjonmanis.

30 Desember 1953 - 27 Agustus 1954
asli
1 sampul

2724 Laporan dari *World Conference Of Agricultural and Forestry Workes* di Vienna pada tanggal 24 - 28 Oktober 1953.
08 Januari 1954
asli
2 lembar

2725 Berkas mengenai usul terkait kedatangan Perdana Menteri di Serang, Pembaharuan Auto Dinas, Rencana 5 tahun Jawatan Kehewanan Karesidenan Banten (1955 s/d 1959).
27 Januari - 2 Maret 1954
salinan
7 lembar

2726 Resolusi I - VII Sidang Pleno Dewan Pusat Persatuan Tani Nasional Indonesia.
31 Januari - 10 Februari 1954
tembusan
1 sampul

2727 Berkas mengenai sengketa tanah antara Ranting BTI Klepon dengan Panitia Persiapan Desa Klepon.
15 Maret, 13 September 1954
asli
1 sampul

2728 Surat-surat mengenai sengketa atas sewa kebun kopi padang karet Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.
10 April, 13 Oktober 1954
pertinggal
1 sampul

2729 Berkas mengenai Pembantu Sekretariat Panitya Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan Sumatera Timur dan tugas-tugasnya.
12 April - 20 Juli 1954
asli
1 sampul

2730 Resolusi Rapat Umum Rakyat Tani Daerah Karawang mengenai tuntutan kepada Pemerintah untuk mendapat bantuan pinjaman uang demi kerukunan tani.
28 Juni 1954
tembusan
1 sampul

2731 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pidato S.M. Tarigan dalam Sidang Panitia Negara tentang permasalahan tanah di Sumatera Timur.

26 Juli 1954
asli, salinan
7 lembar

2732 Surat dari Mr.Ali Sastroamidjojo kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai permintaan bantuan proyek FAO Fy 1955-1956.
7 September - 22 Desember 1954
pertinggal
1 sampul

2733 Surat dari Kepala Polisi Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai penentuan status Perkebunan Tebat-Gunung Estate.
15 September 1954
salinan
2 lembar

2734 Berkas mengenai pemotretan dari udara untuk kepentingan Kementerian Pertanian.
15 September - 30 November 1954
pertinggal
6 lembar

2735 Surat dari Menteri Pertanian kepada Menteri Urusan Kesejahteraan Negara mengenai tanah partikelir Janlappa Djasinga (Bogor), beserta lampiran.
17 September 1954
tembusan
1 sampul

2736 Surat-surat mengenai pernyataan BTI mengenai pembagian tanah bekas perkebunan Mentotulakan.
14 Oktober - 18 November 1954
tembusan
5 lembar

2737 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai tuntutan Sekretariat Provinsi Comite/PKI Jawa Timur akan nasib kaum tani, beserta lampiran.
25 Oktober1954
asli
1 sampul

2738 Berkas mengenai keputusan Panitia Negara urusan pembagian tanah perkebunan Sumatra Timur.
31 Oktober 1954
salinan
1 sampul

2739 Surat dari H. Nawawieamin kepada Menteri Dalam Negeri mengenai penyesuaian sewa rumah.
04 November 1954

tembusan
1 sampul

2740 Laporan *The Economic & Social Development Plan of Indonesia Chapter 5 - Agriculture, Forestry and Fisheries* .
23 Desember 1954 - 10 Januari 1955
fotokopi
5 lembar

2741 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Perekonomian mengenai kekurangan kebutuhan bahan keperluan hidup di Sangihe dan Taulad.
28 Desember 1954 - 27 Januari 1955
asli
1 lembar

2742 Surat dari warga Dusun Selibar Pagaralam Kabupaten Palembang Ulu kepada Ketua Mahkamah Agung di Jakarta mengenai sengketa tanah pusaka Dusun Selibar.
30 Desember 1954
salinan, tembusan
3 lembar

2743 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pentraktoran terhadap tanah garapan di Desa Rawamenang Kecamatan Tjiasem oleh PT. Lands.
19 Januari 1955
3 lembar
asli, tembusan

2744 Jawaban Menteri Perekonomian Ir. Roosseno, mengenai Karet Rakyat. (jawaban atas pertanyaan anggota DPR).
7 Maret 1955
tembusan
3 lembar

2745 Surat dari M.H. Pohan kepada Bupati Tapanuli Utara mengenai permasalahan kemenyan rakyat yang diselundupkan di Tapanuli Utara dan pembentukan PBO atau Yayasan Kemenyan Rakyat.
17 Maret 1955
tembusan
3 lembar

2746 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Perekonomian mengenai Program Surplus Bahan Pertanian Amerika Serikat.
29 Maret - 3 september 1955
pertinggal
1 sampul

2747 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Negara Urusan BPBAT & BRN mengenai laporan tanah hak CTN di Prongprong.

15 November 1955
tembusan
2 lembar

2748 Surat dari Menteri Pertanian kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai Rencana PP tentang Larangan Penanaman Tembakau Sigaret dalam Wilayah Tembakau Cerutu.

3 Mei 1956 - 7 Maret 1957
asli
6 lembar

2749 Berkas mengenai penyelesain Rancangan PP tentang pernyataan berlakunya Peraturan "O*rdonnantie Aetherische Olien dan Verordering Aetherischen Olien*" untuk minyak kayu putih dan Rancangan PP tentang Urusan Minyak Kayu Putih.

21 Desember 1955 - 19 Januari 1956
konsep
1 sampul

2750 Surat dari Panitya Negara Urusan Agraria kepada Perdana Menteri mengenai laporan tri wulan.

29 Mei 1956
asli
2 lembar

2751 Surat dari Dewan Menteri Kepada Perdana Menteri mengenai kedudukan Perusahaan Perkebunan Besar.

30 Agustus 1956
asli
1 sampul

2752 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga mengenai pembelian tanah.

19 September 1956
salinan
2 lembar

2753 Berkas mengenai pengiriman delegasi ke Konferensi FAO di Bandung.

25 - 28 September 1956
asli
1 sampul

2754 Surat dari Achmad Teguh bin Mahmud kepada Menteri Agraria mengenai permohonan kebijakan pengurusan tanah hak milik Mahmud bin Kemis kepada ahli waris.

1 November 1956
tembusan
1 sampul

2755 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Agraria mengenai susunan Panitia Agraria untuk UU agraria.

14 November -10 Desember 1956
4 lembar
asli, tembusan

2756 Berkas mengenai garam (impor garam).

06 Desember 1956 - 20 Agustus 1957
pertinggal
1 sampul

2757 Berkas mengenai pembuatan garam oleh rakyat di Madura.

14 Februari - 07 Oktober 1957
asli, tembusan
1 sampul

2758 Berkas mengenai rumput laut.

31 Oktober - 30 November 1957
asli
1 lembar

2759 Surat-surat mengenai permohonan mendapatkan tanah untuk pertanian.

23 Desember 1957 - 27 Agustus 2958
pertinggal
1 sampul

2760 Daftar perkebunan-perkebunan (daftar objek-objek bagian III yang berlum selesai).

1958
konsep
1 sampul

2761 Surat Menteri Agraria mengenai peralihan tugas dan wewenang agraria, beserta lampiran

8 - 10 Januari 1958
tembusan
1 sampul

2762 Surat-surat mengenai penolakan atas *bleid* Bupati Simelungun mengenai masalah tani.

20 Maret - 5 Juli 2958
asli
1 sampul

2763 Statement Direktur Division Perikanan FAO pada Konferensi Hukum Laut di Jenewa.

16 Mei 1958
fotokopi
1 sampul

2764 Surat dari Kepala Bagian Persiapan Sidang-sidang dan Rapat-rapat kepada Perdana Menteri tentang pemecahan persoalan beras di Indonesia serta transmigrasi.

20 - 24 Juni 1958
pertinggal, salinan, asli
1 sampul

2765 Seri SK Menteri Agraria tahun 1958 tentang Pengambilalihan Hak Tanah atas Negara.

20 Juni 1958-31 Desember 1958
pertinggal, asli, tembusan
1 sampul

2766 SK Menteri Agraria tentang Pengangkatan Anggota Panitya Kerja Likuidasi Tanah-Tanah Partikelir untuk Daerah Karesidenan Bogor.

21 Juni 1958
salinan
1 lembar

2767 Surat dari Sekretaris Bagian Regional Planning kepada Kabinet Perdana Menteri tentang program investasi sektor pertanian.

Juli 1958
asli, tembusan
1 sampul

2768 Pernyataan Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia (PPSI) Cabang Kediri mengenai dukungan terhadap status Jawatan Pembangunan Usaha Tani.

24 Juli 1958
tembusan
1 lembar

2769 Surat dari Masyarakat Ampenan kepada Perdana Menteri mengenai penggunaan tanah garapan di Ampenan.

24 Agustus 1958
asli
1 sampul

2770 Pernyataan persetujuan DPRD Pekalongan atas Resolusi DPRD Probolinggo tentang Politik Agraria.

08 September 1958
pertinggal
2 lembar

2771 Resolusi DPRD Tingkat I Karawang tentang Pemberantasan Hama Padi.

8 September 1958
tembusan
1 lembar

2772 Surat dari Kepala Direktorat PBB & Organisasi-Organisasi Internasional kepada Duta Besar RI di Tokyo mengenai penunjukan delegasi dalam Konferensi Regional ke-4 FAO di Tokyo.

16 September 1958
tembusan
1 lembar

2773 Surat dari Kementerian Agraria kepada Perdana Menteri mengenai konfrensi dinas.

07 Oktober 1958
asli
1 lembar

2774 Surat dari Dewan Pemuda Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat kepada Menteri Pertanian mengenai penggundulan hutan oleh rakyat untuk dijadikan ladang.

23 Oktober 1958
1 sampul
tembusan

2775 Resolusi BTI.PKI tentang ganti rugi tanah yang digunakan Lapangan Terbang Adi Sucipto dan masalah pertanian.

2 November 1958
asli
1 sampul

2776 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Dinas Pertanian Rakyat di Semarang mengenai laporan pendirian pabrik rami di Jawa Tengah.

13 November 1958
asli
1 sampul

2777 Surat dari Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia (PII) kepada Dewan Menteri mengenai sumbangan pemikiran PII tentang masalah produksi bahan makanan, industrialisasi, dan tenaga teknik.

18 Desember 1958
asli
1 sampul

2778 Surat dari Kementerian Pertanian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Tenaga Kepada para Anggota Dewan Bahan Makanan mengenai Rencana Dewan Bahan Makanan (DBM) untuk memenuhi kebutuhan akan beras pada tahun 1959.

28 Desember 1958 & 17 Januari 1959
asli
1 sampul

2779 Surat Edaran Dirjen FAO kepada Menteri-Menteri Pertanian seluruh negara anggota FAO.

Januari - Februari 1959
tembusan
1 sampul

2780 Surat dari Kepala Biro Pusat Statistik kepada Perdana Menteri mengenai pengumpulan keterangan-keterangan tentang produksi bahan makanan utama di seluruh Indonesia dalam tahun 1955 s/d 1958.

28 Mei - 3 Juli 1959
asli
3 lembar

2781 Laporan delegasi Indonesia dalam sidang FAO *Committee on Commodity Problems* (CCP) ke-31 & sidang FAO *Council* ke-31.

10 Juli - 1 Agustus 1959
tembusan, pertinggal
1 sampul

2782 Surat dari Direktur General FAO kepada Menteri Luar Negeri mengenai *Report of the European Meeting on the Use of Ionizing Radiations for Food Preservation.*

31 Agustus 1959
tembusan
1 sampul

2783 Surat dari Koordinator Panitia HBTR Kabupaten Karo kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai sengketa tanah harta benda tawanan rakyat, beserta lampiran.

06 Oktober 1959
tembusan
1 sampul

2784 Berkas mengenai Perubahan PP No. 61 tahun 1957 tentang Perkebunan Daerah dan Pusat.

20 Oktober 1959
fotokopi
6 lembar

2785 Surat dari Kementrian Pertanian mengenai penyampaian *Report the goverment of the republic of indonesia for the food and agriculture organization of the united nations on the progress archieved inthe improvement of conditions for increasing food and agricultural production in 1952.*

tt
fotokopi
1 sampul

d. Perbankan

2786 Surat dari Menteri Keuangan tentang prosentasi jaminan uang kertas *Javasche Bank* untuk dibicarakan dalam Rapat Dewan Menteri, beserta lampiran.

13 November 1950
salinan
1 sampul

2787 Surat Edaran Kementerian Keuangan tentang penukaran obligasi.

27 November 1950 - 12 Mei 1951
tembusan
1 sampul

2788 Surat-surat mengenai penghapusan badan hukum *Algemene Volkscrediet Bank.*
14 Desember 1950 - 27 Agustus 1951
tembusan
1 sampul

2789 Surat-surat mengenai pembukaan BNI di Jeddah.
19 Desember 1950, 2 Maret 1951
asli, pertinggal
5 lembar

2790 Berkas mengenai pembukaan rekening giro pada *de Javasche Bank* 1953 laporan triwulan tahun 1950 dan susunan direksi *de Javasche Bank* tahun 1947/1948, 1948/1949.
29 Desember 1950 - 7 Maret 1953
pertinggal
2 lembar

2791 Surat dari Kepala Bagian Uang dan Kredit Bank Kementerian Keuangan kepada kantor-kantor besar tentang penyelesaian uang RI, beserta lampiran.
1951
asli
1 sampul

2792 Surat kepada Menteri Keuangan tentang penukaran mata uang Jepang.
14 Februari 1951
pertinggal
2 lembar

2793 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Sekretaris Dewan Ekonomi dan Keuangan mengenai kedudukan BNI, beserta lampiran.
16 Mei 1951
pertinggal, asli
1 sampul

2794 SK DPDS Kota Besar Surabaya Nomor 1706/DPD mengenai pemberian kepada "*Nationale Handels Bank NV*" di Surabaya mulai 1 Oktober 1950 perlulusan untuk mendirikan rumah penginapan 51 buah kamar tamu dan rumah makan.
16 Oktober 1951
turunan
2 lembar

2795 Surat dari Direktur Hotel des Indes Indonesia kepada Dr.Soeparmo dengan alamat Mr.Wahib, Dewan Menteri mengenai permohonan pemindahan rekening ke Escomtobank

22 November 1951
asli
1 lembar

2796 Notulen sidang tertutup Konferensi Pendahuluan Bank-Bank Nasional Indonesia hari ke-2, 27 Mei 1952 dan kumpulan putusan sidang Konferensi Bank-Bank.
26, 27 Mei 1952
fotokopi
1 sampul

2797 Berkas mengenai masalah BRI Jawa Barat dan Rancangan Peraturan tentang BRI.
25 Januari 1954 - 12 November 1957
asli
1 sampul

2798 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai pengiriman/penyampaian laporan BNI tahun 1952.
30 Januari 1954
pertinggal
1 sampul

2799 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Presiden mengenai pembukaan bank dengan status NV Belanda di negeri Belanda, beserta lampiran.
08 Mei 1954
pertinggal
1 sampul

2800 Surat-menyurat antara Wakil Perdana Menteri I dengan Direksi Bank Timur NV mengenai perkembangan Bank Timur NV di Semarang.
4, 15 Juni 1954
pertinggal
1 sampul

2801 Surat dari Direktur Bank Timur NV kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian teks pidato peringatan ulang tahun ke 5 tanggal 29 Mei 1954, beserta lampiran.
04 Juni 1954
asli
1 sampul

2802 Surat dari Menteri Keuangan kepada Dewan Menteri mengenai peninjauan kembali keanggotaan Dewan Pengawas dari BNI dan Bank Industri Negara.
Agustus 1954
asli
1 sampul

2803 Surat dari Sekjen Kementerian Perekonomian kepada Wakil Perdana Menteri mengenai masalah kredit NV Janeha dengan BI.

22 Januari 1955
asli
1 sampul

2804 Surat-surat kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian nota disposisi L/C dari BI.

28 September 1956 - 7 Januari 1957
asli
1 sampul

2805 Surat-surat dari BNI kepada Perdana Manteri mengenai pengiriman uang ke *Students Bookshoop,* Ltd. London atas SID No.003538.

9 Mei 1957, 16 Januari 1958
asli
3 lembar

2806 Pengumuman dari Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri BI kepada bank-bank tentang *Informational Media Guarantee Program* .

21 September 1957
fotokopi
salinan

2807 Surat dari Kepala Bagian Urusan Keuangan kepada Gubernur/Ketua staf K Provinsi Jawa Barat tentang rekening giro pada *De Javasche Bank* .

05 Februari 1958
tembusan
1 sampul

2808 Surat-surat mengenai permohonan dispensasi untuk pembuatan akte jual beli rumah H.J. Braakensiek di Jalam Djokja No.5 Jakarta oleh Bank Negara atas nama PT. Logam Mulia.

27 Mei - 8 Agustus 1958
tembusan
1 sampul

2809 Surat-surat mengenai pengesahan surat-surat tahunan BI, rekening laba rugi tahun pembukuan ke 5 dan neraca BI tahun 1958.

15, 26 Agustus 1958
pertinggal, tembusan
1 sampul

2810 Surat-surat mengenai pengusulan untuk mengangkat Gubernur pengganti dalam Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan serta mengangkat Gubernur Pengganti II BI.

29 - 30 Juni 1959
tembusan
1 sampul

2811 Surat dari Kepala Bagian Keuangan kepada segenap Instansi Bagian I tentang penetapan sisa berjenis-jenis uang berada dalam kas Bendaharawan berhubungan dengan permintaan nilai uang kertas Rp.500,- dan Rp.1000,-.

5 November - 3 Desember 1959
tembusan
1 sampul

e. Hubungan Ekonomi Luar Negeri

2812 Berkas mengenai perjanjian perhubungan dagang Negeri Belanda - Indonesia dan Jerman serta pembicaraan dagang antara *commonwealth* Australia dan RI.

26 Agustus 1950 - 14 Desember 1953
salinan
1 sampul

2813 Berkas tentang penunjukan Drs. Hermen Kartiwisastro sebagai observer ke sidang *Petroleum Comitte* .

4 Oktober 1950
tembusan
1 sampul

2814 Surat-surat mengenai pengesahan RUU tentang Pinjaman RI pada Ekspor-Impor Bank di Washington.

24 Oktober - 2 Desember 1950
1 sampul
tembusan

2815 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai PP tentang Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

1 November 1950
1 sampul
pertinggal

2816 Surat dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian kepada Perdana Menteri tentang persetujuan perdagangan Indonesia-India untuk dibicarakan dalam Rapat Dewan

26 November 1950
fotokopi
1 lembar

2817 Berkas mengenai kunjungan delegasi perindustrian Pakistan ke Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi.

18 Desember 1950 - 11 Januari 1951
asli
1 sampul

2818 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Perdagangan dan Perindustrian tentang *industrial delegation* dari Pakistan.

8 Januari 1951
pertinggal

3 lembar

2819 Berkas tentang pengesahan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan luar negeri untuk bahan Rapat Dewan Menteri.

24 Februari 1951
tembusan
1 sampul

2820 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Perdana Menteri tentang persetujuan perdagangan antara Indonesia dan Cekoslovakia untuk bahan Rapat Dewan Menteri.

3 Maret - 14 Aguatus 1951
asli
1 sampul

2821 Surat persetujuan perdagangan antara RIS dengan Jepang dalam masa pendudukan untuk dibicarakan dalam Rapat Dewan Menteri.

27 Mei 1951
fotokopi
1 sampul

2822 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai penandatangan *Torquay Protocol of Tariff Concessions* dari negara-negara yang ikut serta GATT.

22 September - 25 Oktober 1951
pertinggal
4 lembar

2823 Berkas mengenai rancangan persetujuan perdagangan antara RI dengan Pemerintah Republik Federasi Jerman untuk dibicarakan dalam Rapat Dewan Menteri.

26 September 1951
tembusan
1 sampul

2824 Berkas mengenai hubungan dagang RI dengan Australia dan India untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Menteri.

21 November 1951
pertinggal
1 sampul

2825 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Bagian Perindustrian Kementerian Perekonomian mengenai pengiriman barang-barang kerajinan Indonesia ke Belanda.

30 November1951
pertinggal, tembusan
1 sampul

2826 Berkas mengenai rancangan persetujuan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Belanda di bidang perniagaan dan keuangan.

13 Desember 1951
pertinggal

1 sampul

2827 SK Menteri Perekonomian No.955/TU tentang Pengutusan Ir. Darmawan Mangunkoesoemo untuk Mengadakan Perundingan dengan Amerika Serikat ke Washington mengenai Timah.

24 Januari 1952
salinan
1 sampul

2828 Berkas mengenai pasal 4 dari perjanjian perdagangan antara RI dengan Kerajaan Swedia.

17 Maret 1952
pertinggal
1 sampul

2829 Berkas mengenai pasal 6 dari protokol perjanjian perdagangan antara RI dengan Republik Osterreich.

2 April & 14 Mei 1952
pertinggal
1 sampul

2830 Berkas mengenai protokol perjanjian perdagangan antara RI dengan Kerajaan Norwegia untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Menteri.

18 Maret 1952
fotokopi
1 sampul

2831 Berkas mengenai protokol perjanjian perdagangan antara RI dengan Republik Perancis.

26 April 1952
fotokopi
1 sampul

2832 Berkas mengenai perjanjian perdagangan antara RI dengan Kerajaan Denmark untuk dibicarakan dalam Rapat Dewan Menteri.

28 April 1952
fotokopi
1 sampul

2833 Berkas mengenai rancangan perjanjian perdagangan antara RI dengan Republik Portugis.

28 April 1952
fotokopi
1 sampul

2834 Berkas tentang perjanjian perdagangan antara RI dengan Republik Polandia untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Menteri.

26 April 1952
pertinggal
1 sampul

2835 Laporan tentang perundingan dagang antara RI dengan Italia untuk dibicarakan dalam Rapat Dewan Menteri.

14 Mei 1952 - 1959
pertinggal
1 sampul

2836 Berkas mengenai perubahan anggaran Uni Indonesia dengan Nederland tahun 1951.

16 - 20 Mei 1952
pertinggal
1 sampul

2837 Berkas tentang hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Jepang.

28 Oktober 1952
pertinggal
1 sampul

2838 Berkas mengenai perubahan persetujuan dagang antara Indonesia dengan Swiss.

18 Desember 1952
fotokopi
1 sampul

2839 Berkas mengenai persetujuan dagang dan pembayaran antara RI dengan Hongaria.

19 Desember 1952
pertinggal
5 lembar

2840 Berkas mengenai perjanjian pencegahan pajak ganda antara RI dengan Belanda.

16 Januari 1952
pertinggal
1 sampul

2841 Berkas mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan RI dengan *Eksport Import Bank Of Washington* .

27 Januari 1953
tembusan
1 sampul

2842 Surat dari Duta Besar RI di London tentang *Policy on Foreign Investment.*

2 Mei 1953
tembusan
1 sampul

2843 Berkas mengenai perpanjangan kontrak antara RI dengan *the J.G. White Enginering Corporation.*

9 Mei 1953

pertinggal
1 sampul

2844 Pengumuman Dewan Menteri tentang persetujuan mengirim delegasi RI ke Konferensi Internasional tentang karet di Copenhagen Mei 1953.
28 April 1953
fotokopi
1 lembar

2845 Berkas mengenai persetujuan dagang antara RI dengan Norwegia untuk dibicarakan dalam Sidang Kabinet.
4 - 26 Mei 1953
pertinggal
1 sampul

2846 Pengumuman Sekretaris Perdana Menteri tentang persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Portugal dalam sidang Dewan Menteri tanggal 12 Mei 1953.
12 Mei 1953
pertinggal
1 lembar

2847 Berkas mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dan Yugoslavia beserta protokol dan daftar impor ekspor.
23 Juni - 1 Juli 1953
pertinggal
1 sampul

2848 Surat dari Menteri Perekonomian kepada Sekretaris Dewan Menteri tentang penyampaian protokol perundingan dagang antara RI dengan Perancis.
15 Juli 1953
asli
3 lembar

2849 Berkas mengenai persetujuan dagang Indonesia - RRT.
11 November 1953 - 2 Januari 1954
pertinggal
1 sampul

2850 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang Pameran International Perumahan Rakyat di New Delhi.
27 November 1953
asli
1 sampul

2851 Berkas mengenai persetujuan dagang RI dengan Jerman Barat untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Menteri.
9 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

2852 Berkas mengenai persetujuan antara pemerintah RI dan Stanvac untuk gas supply proyek pupuk Palembang.

18 Desember 1953 - 23 Februari 1959
asli
1 sampul

2853 Surat tentang persetujuan dagang Indonesia dengan India untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Menteri.

21 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

2854 Berkas mengenai hubungan kerjasama ekonomi luar negeri dengan Swedia, Jerman Barat, Swiss, Norwegia, Perancis, dan Austria.

1951 - 1952
pertinggal
1 sampul

2855 Surat dari Kepala Bagian Urusan Internasional kepada Panitia Koordinasi Interdepartemental mengenai pemasukan barang-barang yang diterima oleh Kementerian yang tidak sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah RI dengan CARE.

18 Februari 1954
tembusan
1 sampul

2856 Surat dari Kepala Direktorat II Departemen Luar Negeri kepada Perdana Menteri tentang salinan nota Kedutaan Italia di Jakarta mengenai *Fiat Assembly Plat* .

06 Maret 1954
asli
2 lembar

2857 Berkas mengenai persetujuan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda mengenai keuangan.

15 - 27 Maret 1954
pertinggal
1 sampul

2858 Berkas mengenai persetujuan dagang antara Indonesia dengan Norwegia.

22 Maret - 14 Mei 1954
pertinggal
1 sampul

2859 Surat-surat mengenai pembelian barang-barang impor melalui kredit.

8 Juni 1954 - 22 November 1958
tembusan
3 lembar

2860 Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Menteri Perekonomian mengenai penggantian jasa yang diberikan kepada para importir sebagai badan perantara dalam pembelian/pemesanan barang-barang untuk Pemerintah.

13 Juli 1954
tembusan
1 lembar

2861 Berkas mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Swedia.

29 Juli 1954 - 5 September 1955
pertinggal
7 lembar

2862 Berkas mengenai kerjasama perekonomian luar negeri antara Indonesia-Hongkong-Singapura.

Agustus - September 1954
pertinggal
1 sampul

2863 Berkas mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Republik Cekoslovakia.

1 - 19 Oktober 1954
pertinggal
6 lembar

2864 Berkas mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tionghoa.

5 - 19 Oktober 1954
pertinggal
1 sampul

2865 Berkas mengenai perjanjian dagang antara Indonesia dengan Republik Perancis.

8 - 11 Oktober 1954
pertinggal
1 sampul

2866 Berkas mengenai persetujuan dagang antara Indonesia dengan Australia.

24 Desember 1954 - 24 Januari 1955
tembusan
1 sampul

2867 Berkas mengenai perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Swiss.

14 Januari - 19 Maret 1955
tembusan
1 sampul

2868 Berkas mengenai persetujuan pembayaran dan persetujuan dagang antara Indonesia dengan Mesir.

2 Maret - 30 Juni 1955

tembusan
3 lembar

2869 Berkas mengenai perundingan dagang antara Indonesia dengan Denmark.
17 Mei - 7 Juni 1955
tembusan
1 lembar

2870 Protokol Perjanjian Dagang antara Indonesia dengan Federasi Republik Jerman.
12 - 23 September 1955
tembusan
1 sampul

2871 Surat dari Wakil Direktur Biro Perancang Negara mengenai usul peserta ECAFE *Working Party on Economie Development and Planning* di Tokyo dan Bangkok.
September 1953 - 17 Oktober 1955
asli
1 sampul

2872 Berkas mengenai perjanjian dagang antara Indonesia dengan Kerajaan Denmark.
27 Januari - 5 Maret 1954
tembusan
1 sampul

2873 Berkas mengenai pengembalian aset-aset milik Jerman.
25 Mei 1955 - 2 April 1959
salinan
1 sampul

2874 Surat dari Menteri Perekonomian kepada Dewan Menteri mengenai penyerahan urusan hubungan ekonomi luar negeri kepada Kementerian Luar Negeri.
3 November 1955
fotokopi
3 lembar

2875 Berkas mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Republik-Republik Soviet Sosialis.
12 Agustus - 13 Oktober 1956
pertinggal
4 lembar

2876 Berkas mengenai persetujuan pengolahan kapas menjadi benang tenun/tekstil antara Indonesia dan Jepang.
15 Agustus - 28 Agustus 1956
pertinggal
1 sampul

2877 Surat-surat mengenai persetujuan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Pimjaman antar RI dan Bank Ekspor Impor Washington.
9 Oktober 1956-15 November 1957
pertinggal
2 lembar

2878 Surat dari wakil *Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij* (NIAM) di Indonesia kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai perpanjangan kontrak NIAM.
22 Januari - 1 Agustus 1957
asli
1 sampul

2879 Berkas mengenai sidang ke-4 *Economic Commision for Asia and the Far East* (ECAFE) di Jogjakarta.
1 Februari - November 1957
tembusan
7 lembar

2880 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Perekonomian mengenai penyampaian surat mengenai kegiatan Perwakilan Jepang sekitar pembelian kapas dari Amerika Serikat oleh Indonesia, beserta lampiran.
23 Februari 1957
pertinggal
1 sampul

2881 Berkas mengenai Konferensi *Internasional Rubber Study Group* di Jogjakarta.
19 Juni - 29 Oktober 1957
pertinggal
1 sampul

2882 Naskah persetujuan kerjasama ekonomi dan teknik antara Indonesia dengan Jerman Barat.
03 November 1957
fotokopi
1 sampul

2883 Laporan mengenai *Fiscal Year 1958 Technical Cooperation Program* ($ 6 Million *Development*).
11 Desember 1957
fotokopi
4 lembar

2884 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan perdagangan antara Indonesia dan Hongaria.
16 Desember 1957
pertinggal
3 lembar

2885 Surat dari Menteri Luar Negeri tentang susunan delegasi untuk Sidang I *Comitte On Trade* ECFC Bangkok untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Kabinet.

17 Januari 1958
pertinggal
2 lembar

2886 Surat mengenai *Agreement on Investigation and Design of Kali Brantas Basin Project between the Government of the Republic of Indonesia and the Nipponkoei Kabushiki*
08 September 1958
asli
3 lembar

2887 Surat dari Direktur Jenderal Biro Perancang Negara kepada Perdana Menteri tentang *Completion Program for the Gresik Plant* oleh NV. Pabrik Semen Gresik yang akan dibawa ke perundingan di Amerika Serikat.
05 November 1958
asli
1 sampul

2888 Surat dari Presiden *Compagnie Intercontinentale Commerciale et Financiere* kepada Gubernur BI mengenai penyampaian proposal kerjasama ekonomi dan perdagangan. n.b.: arsip dalam bahasa Inggris.
30 Desember 1958
salinan
1 sampul

2889 Surat kepada Menteri Keuangan tentang usul perubahan pihak Belanda terhadap acara pertemuan panitia campuran urusan ekonomi dan keuangan yang diajukan oleh pihak Indonesia.
1959
asli
2 lembar

2890 Laporan Sekjen Dewan Perniagaan dan Perusahaan tentang hasil-hasil dari Konferensi Organisasi Ekonomi Negara Asia Afrika.
20 Januari 1959
tembusan
1 lembar

2891 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Wakil Perdana Menteri mengenai penyampaian surat dari Kementerian Pertanian tentang keikutsertaan Indonesia dalam *International Sugar Agreement.*
24 Juni 1959
tembusan
1 sampul

2892 Laporan Ketua Delegasi Sidang Tahunan *General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) ke XIV.
25 Juni 1959
asli

4 lembar

2893 Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga tentang penugasan pegawai ke Eropa untuk membicarakan kerjasama dalam rangka pembuatan jalan-jalan dan jembatan.

tt
asli
2 lembar

f. Bantuan Luar Negeri

2894 Berkas mengenai usul pengesahan UU tentang Pinjaman Pemerintah Indonesia pada *Bank of Washington* .

21 Desember 1950
pertinggal
2 lembar

2895 SK Menteri Perekonomian No. 5170/MR tentang Pengangkatan Ir. Anondo sebagai Ketua Biro Koordinasi Bantuan Luar Negeri.

23 Mei 1951
tembusan
2 lembar

2896 Surat dari Sekretaris Dewan Rekonstruksi Nasional kepada Kepala Jawatan Kehutanan Pusat tentang permohonan UMKAI.

20 Februari - 12 Juni 1952
pertinggal
1 sampul

2897 Surat dari Wakil Ketua Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri kepada Panitia Pertimbangan Perintah Belajar mengenai Sdr. Chien Ming Wu.

12 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

2898 Memorandum dari Menteri Keuangan kepada Sdr. Sutanto mengenai permintaan bantuan dari *United Nations* tentang kekurangan tenaga ahli dalam penyusunan anggaran belanja dan teknik.

25 - 26 Agustus 1952
tembusan
5 lembar

2899 Berkas mengenai rapat Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri.

8 September 1952 - 16 Desember 1957
fotokopi
1 sampul

2900 Berkas mengenai rencana mempersatukan Biro Perancang Negara dengan Biro Koordinasi Bantuan Luar Negeri.

17 November 1952 - 4 April 1953
asli, pertinggal
8 lembar

2901 Surat-surat mengenai bantuan luar negeri.

Januari - Juni 1953
salinan
1 sampul

2902 Berkas mengenai sumbangan RI untuk pengungsi Palestina.

1953
asli
1 sampul

2903 Berkas mengenai sumbangan RI untuk korban-korban banjir di Italia, Belanda, Inggris dan Belgia.

9 Februari - 2 Oktober 1953
asli
1 sampul

2904 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri tentang usaha-usaha penghematan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pembelanjaan dalam mata uang asing serta cara menggunakan bantuan luar negeri.

29 Maret 1953
asli
1 lembar

2905 Memorandum dari Menteri Keuangan kepada para anggota Dewan Ekonomi dan Keuangan tentang koordinasi dalam bantuan luar negeri.

22 Mei - 13 Juli 1953
asli
1 lembar

2906 Surat-surat mengenai sokongan/bantuan kepada penderita kelaparan di India.

16 Juni 1953
pertinggal, tembusan
1 sampul

2907 Surat dari Sekretaris Panitya Koordinasi Interdepartemental kepada Sekjen Kementerian tentang sumbangan Indonesia kepada *Technical Cooperation Scheme* .

18 Desember 1953
tembusan
1 sampul

2908 Berkas mengenai penyerahan stand Rusia pada Pekan Raya Ekonomi Internasional.

16 Oktober - 9 Desember 1954
pertinggal
1 sampul

2909 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Luar Negeri tentang *Informational Media Guarantes Program* .

9 Juni - 27 September 1955
pertinggal
1 sampul

2910 *Draft Scheme for Community Development Programme in Indonesia.*

30 Juli 1955
fotokopi
2 lembar

2911 Surat Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Agama tentang persetujuan permintaan bantuan teknik UNESCO.

Januari - Februari 1956
pertinggal
1 sampul

2912 Berkas mengenai bantuan-bantuan dari ICA terkait pendirian gedung *health centre* , audiovisual training dan pengadaan buku pelajaran.

16 Januari - 17 September 1957
fotokopi
1 sampul

2913 Berkas mengenai pengiriman 8 orang Pegawai Biro Perancang Negara dalam bantuan ICA ke Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Pakistan dan India.

16 Januari 1957
Konsep
1 sampul

2914 Berkas mengenai penagihan perongkosan lokal pada *expert* dalam rangka bantuan luar negeri untuk diregulasikan.

10 April 1957 - 4 September 1959
asli
1 sampul

2915 Surat dari Wakil Dirjen BPN kepada Thesauri Jenderal Kementrian Keuangan mengenai pelaksanaan dari proyek-proyek yang dibiayai dengan *Counterpart Funds* .

16 Mei 1957
tembusan
3 lembar

2916 Risalah rapat staf Penguasa Militer Pusat mengenai *clearence* barang-barang bantuan luar negeri di markas besar AD.

11 Juli 1957
fotokopi
1 sampul

2917 Surat dari Kepala Direktorat Ekonomi Antar Negara kepada Biro Perancang Negara mengenai bantuan pemerintah Inggris melalui *Colombo Plan* .

27 Agustus 1957
salinan
4 lembar

2918 Berkas mengenai hasil pekerjaan Panitia Kecil Proyek-Proyek Bantuan Luar Negeri.

31 Agustus 1957
fotokopi
1 sampul

2919 Surat dari Kementerian Luar Negeri Kepala Direktorat PBB & Organisasi-Organisasi Internasional kepada Ketua PKBLN mengenai bantuan PBB untuk tenaga-tenaga ahli.

05 September 1957
tembusan
1 lembar

2920 Surat dari Wakil Tetap PKBLN kepada Ketua Panitia Bantuan Luar Negeri mengenai kedatangan tenaga ahli *Greenstreet* untuk Balai Penyelidikan Industri dan Balai Penyelidikan Kimia.

26 - 30 September 1957
tembusan
2 lembar

2921 Surat dari Direktorat Ekonomi Antar Negara kepada Sekretaris PKBLN mengenai *Volunteer Graduate Scheme* .

30 Oktober 1957
tembusan
2 lembar

2922 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Perdana Menteri tentang daftar ikhtisar pemakaian macam-macam pinjaman dari luar negeri.

12 Februari - 16 September 1958
tembusan
tembusan , fotokopi

2923 Surat dari *President The Daiwa Bank Limited* kepada Perdana Menteri mengenai penawaran kerja sama.

16 Mei 1958
asli
3 lembar

2924 Memo dari M.Raheily kepada Kepala RTBLN mengenai laporan penjelasan pembagian tugas sementara dari pekerjaan urusan teknik dan rumah tangga BLN.

19 Agustus 1958
tembusan
1 sampul

2925 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Keuangan/Dewan Moneter mengenai kenaikan (umum) Quota IMF dan kenaikan modal *International Bank For Reconstruction and Deveplopment.*

19 Januari - 11 Februari 1959
pertinggal
1 sampul

2926 Risalah singkat rapat koordinasi ke-3 dan ke-4 Panitya Koordinasi Bantuan Luar Negeri mengenai dana yang disediakan oleh ECA untuk setengah tahun pertama dari tahun

01 Februari 1951
fotokopi
1 sampul

2928 Surat-surat mengenai penawaran kredit kepada Pemerintah Indonesia dari Perancis, Italia dan Yugoslavia.

6 Februari - 26 Mei 1959
tembusan
1 sampul

2929 Surat dari Direktur Jenderal Biro Perancang Negara kepada Presiden Direktur *The Great Indonesian Corp Ltd.* tentang permohonan bantuan USOM.

24 Maret 1959
tembusan
1 sampul

2930 Surat Biro Perancang Negara tentang pinjaman RI dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis.

23 Juni 1959
asli
1 sampul

2931 Formulir dan soal-soal interview menjadi anggota PKBLN.

tt
fotokopi
1 sampul

g. Kebijaksanaan Keuangan

2932 Keterangan Pemerintah mengenai gaji pegawai negeri.

24 Januari 1950
fotokopi
1 lembar

2933 Surat dari Seksi Pengangkutan Dewan Ekonomi Pusat kepada Dewan Menteri RI mengenai permintaan mengurangi *hot money* di Jakarta.

5 September 1950 -11 Desember 1957
tembusan
1 sampul

2934 Surat dari Menteri Perekonomian kepada Perdana Menteri mengenai dasar pidato Menteri Perekonomian dalam Kongres PNI.

21 Mei 1951
tembusan
1 sampul

2935 Surat Edaran dari Kementerian Keuangan kepada semua Kementerian dan Jawatan mengenai " Cara Mengisi Konesemen Pemerintah "

20 Juni 1951
fotokopi
1 sampul

2936 Surat dari Sekertaris Dewan Menteri kepada Menteri Keuangan tentang pendirian Pencetakan Uang Negara.

8 Agustus 1951 - 29 Oktober 1959
tembusan
1 sampul

2937 Surat-surat mengenai UU tentang penetapan UU Darurat No. 17/1951 tentang Penimbunan Barang-Barang menjadi UU.

15 Agustus 1951 - 9 Juli 1952
tembusan
1 sampul

2938 Berkas penyampaian laporan Dr. Hjalmar Schacht, ahli dari Jerman mengenai situasi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

2 November - 13 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

2939 Surat dari Menteri Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman Rancangan PP dan penjelasannya tentang penunjukkan daerah Indonesia dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah.

18 Januari 1952 - 22 Januari 1953
asli
1 sampul

2940 Surat dari Kementerian Keuangan kepada Perdana Menteri mengenai RUU untuk menetapkan UU Darurat No. 13/1951 tentang Bursa sebagai UU, beserta lampiran.

29 Januari 1952
asli
2 lembaran

2941 Berkas mengenai PP tentang Peraturan Devisen.

31 Januari 1952 - 08 Januari 1954
asli
1 sampul

2942 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Ketua Dewan Pengawas Keuangan mengenai penyampaian salinan surat tanggal 26 November 1951 Nomor: 19558/51. n.b.: lampiran tidak ada.

16 - 28 Februari 1952

pertinggal
2 lembar

2943 Keputusan Singkat Dewan Ekonomi dan Keuangan ke XVI/S - 52 tanggal 10 Maret 1952.
11 Maret 1952
tembusan
2 lembar

2944 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Perdana Menteri tentang prinsip-prinsip yang akan dipakai Pemerintah dalam menjalankan kebijaksanaan keuangan.
29 April 1952 - 23 Oktober 1959
asli
5 lembar

2945 Surat dari Menteri Perekonomian kepada Menteri Dalam Negeri mengenai Surat Edaran tentang rancangan urgensi memperbaiki persediaan kredit, beserta lampiran.
12 Agustus 1952
fotokopi, pertinggal
1 sampul

2946 Surat dari Thesaurir Jenderal Kementerian Keuangan kepada semua Kementerian (kecuali Kementerian Pertahanan) dan Jawatan Pelayaran tentang penyelesaian pengeluaran dan penerimaan strait dollar di Daerah Riau.
3 Desember 1952 - 25 Juni 1954
tembusan
1 sampul

2947 Surat-surat mengenai pengesahan RUU tentang penimbunan barang-barang menjadi
30 Desember 1952 - 17 Januari 1953
tembusan
1 sampul

2948 Surat dari Sekretaris I Presiden kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian surat protes terhadap kebijakan moneter Menteri Keuangan dari Marhaen
23 April 1953
asli
1 sampul

2949 Berkas mengenai PP No. 37 Tahun 1953 tentang Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan (beserta penjelasannya).
1 September - 20 November 1953
asli
1 sampul

2950 Surat pengumuman dari Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri kepada Bank-Bank B No:522 tentang Peraturan Indusemen tahun 1953.
12 Oktober 1953 - 21 Maret 1954
fotokopi
1 sampul

2951 Surat dari Kementerian Keuangan kepada semua Kepala Jawatan dalam lingkungan Kementerian Keuangan mengenai perubahan *Indonesische Comptabiliteitswet* dan *Indonesische Bedrijvenwet.*

23 Desember 1953 - 9 Maret 1954
fotokopi
1 sampul

2952 Surat dari Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan kepada semua Bendaharawan dalam Wilayah Kantor Pusat Perbendaharaan di Jakarta mengenai kesempatan untuk menukar uang kertas Pemerintah dari Rp.0,50,-,Rp.1,- dan Rp.2,50,- yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan.

9 Januari - 16 Februari 1954
tembusan
1 sampul

2953 SK Menteri Sosial tentang perubahan pasal 8 Surat Keputusan Menteri Sosial tanggal 31 Januari 1952 No. Kab 10-3-49/212 tentang perubahan jumlah angka Rp.5000,- dalam ayat 1 dan 2 pasal 8 dari SK Menteri Sosial RI No.Kab/10-3-49/212 menjadi jumlah angka Rp.10.000.

27 Juli - 2 September 1954
tembusan
1 sampul

2954 Surat dari Menteri Keuangan mengenai neraca pembayaran Januari-November 1954.

18 Januari 1955
tembusan
3 lembar

2955 Laporan Menteri Kesejahteraan mengenai peninjauan keuangan Kantor Inspeksi Kesehatan Sumatra Utara.

8 Juni 1955
tembusan
1 sampul

2956 Surat pengumuman bersama dari Menteri Perhubungan dan Menteri Perekonomian tentang merk-merk mobil yang boleh diimpor dan diassembleer di Indonesia dengan deviezen negara.

14 April 1955
fotokopi
1 sampul

2957 Surat dari Panitia Angket DPR atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisen kepada Sekjen Kementerian-Kementerian di Jakarta mengenai keterangan-keterangan tentang devisen.

23 April - 1 Agustus 1955
fotokopi
asli

2958 Surat dari Kementerian Perekonomian mengenai prosedur pembelian barang-barang Pemerintah.

9 Juni 1955
asli
tembusan, asli

2959 Rancangan PP tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah.

30 Juni 1955
pertinggal
1 sampul

2960 Surat kepada Menteri Perekonomian mengenai Jawatan Koperasi yang menghadapi kesulitan keuangan.

18 Juni 1955
pertinggal
6 lembar

2961 Surat-surat mengenai penyusunan Rencana PP tentang Pembentukan Dewan Ekonomi dan Perencanaan.

9 Mei - 6 Juni 1956
tembusan
1 sampul

2962 Surat dari Menteri Keuanganmengenai pemberian pinjaman kepada perusahaan-perusahaan nasional.

Januari - Juli 1957
asli, tembusan
1 sampul

2963 Surat-surat mengenai penerjemahan teks UU Fiskal peninggalan Pemerintah Kolonial ke dalam Bahasa Indonesia.

16 Mei - 21 November 1957
asli
1 sampul

2964 Surat pengantar dari Sekretaris Dewan Menteri mengenai UU No. 32/1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Daerah-Daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri serta UU No. 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

6 Juni 1957
asli
1 lembaran

2965 Surat Edaran mengenai penyederhanaan pembelian pemerintah.

26 Agustus 1957
fotokopi

1 sampul

2966 Surat dari KSAD mengenai saran-saran penyederhanaan penyaluran modal.
16 Oktober 1957
asli
1 sampul

2967 Surat-surat mengenai pemberitaan usaha-usaha untuk menormalisasi keadaan RI.
8 - 16 November 1957
pertinggal
1 sampul

2968 Surat-surat mengenai laporan dan ketetapan-ketetapan Panitia Penjaringan Transfer Invisibles untuk transfer uang oleh orang-orang asing dalam rangka paket devisen.
18 Desember 1957 - 25 Januari 1958
fotokopi
1 sampul

2969 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai daftar kumpulan gaji/tunjangan Pejabat-Pejabat Pemerintah Tertinggi dan Dewan-Dewan Agung dari negara lain.
28 Desember 1957
tembusan
2 lembar

2970 Surat kepada Ketua DPR tentang penolakan permohonan pertemuan lebaran antara Pimpinan Sekretariat dan Pegawai DPR dibebankan pada keuangan negara.
30 Desember 1957
pertinggal
1 sampul

2971 Surat-surat mengenai program penghematan pengeluaran devisen.
6 Januari - 17 Januari 1958
pertinggal
1 sampul

2973 Surat dari Kementerian Keuangan kepada semua Jawatan dan Bagian dalam lingkungan Kementerian Keuangan mengenai Susunan Organisasi dari Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan pada Kementerian Keuangan.
18 Februari 1958
tembusan
2 lembar

2974 SK Menteri Keuangan RI No. II/6/3/12/PKN tentang Pendirian Kas Negara di Samarinda mulai tanggal 16 Agustus 1958 yang langsung berada di bawah Pengawasan Kantor Pengawas Kas Negara di Banjarmasin.
28 Juli 1958
fotokopi

2 lembar

2975 SK Menteri Keuangan RI NO. VI/2/15/14/PKN tentang Perubahan SK Menteri Keuangan tanggal 19 Mei 1951 No. 105991/PKN tentang Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai Daerah Pembayaran (*Betalingsressort*) Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Padang.

26 November 1958
fotokopi
1 lembar

2976 Surat dari Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri kepada segenap Instansi Bagian I mengenai Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Harga Mata Uang Rupiah.

29 Desember 1959
tembusan
1 lembar

2977 Tinjauan dan saran mengenai modal dan perusahaan nasional dari Dewan Pimpinan Harian Pusat BAKUNA.

Maret & November 1953
tembusan
1 sampul

h. Perhubungan & Telekomunikasi

2978 Berkas mengenai pengangkatan Komisaris Indonesia pada GIA.

3 November 1950 - 14 Februari 1951
asli
1 sampul

2979 Berkas mengenai perbaikan jalan-jalan darat dan udara di Sumatera.

3 Januari - 18 Mei 1951
asli
1 sampul

2980 Surat dari Kepala Jawatan PTT kepada Wakil Perdana Menteri mengenai naskah perundingan tentang pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Telekomunikasi di Indonesia.

31 Januari 1951
salinan
1 sampul

2981 Berkas tentang pembuatan lapangan terbang sipil di Kebon Kayu Aro.

20 Februari 1951
pertinggal
1 sampul

2982 Surat dari Kementerian Perhubungan kepada Perdana Menteri mengenai Penyelenggaraan Dinas Hydrografie RI.

21 Februari 1951
asli
1 sampul

2983 SK Menteri Perhubungan Darat dan PTT tanggal 28 September 1959 tentang perubahan tarif telepon dalam peraturan-peraturan, syarat-syarat dan tarif telepon dari Jawatan
23 Februari 1951 - 28 September 1959
tembusan
1 sampul

2984 Berkas mengenai ketidakamanan pada kereta-kereta api di Pelabuhan Tanjung Priok.
April 1951
tembusan
1 sampul

2985 Berkas mengenai Rencana Peraturan tentang Dinas Pencarian Pemberi Pertolongan untuk kepentingan kapal-kapal laut dan udara yang mendapat kecelakaan.
10 April 1951
tembusan
1 sampul

2986 Berkas mengenai masalah-masalah yang keluar masuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan masalah-masalah di pelabuhan lainnya.
Juni 1951
fotokopi
1 sampul

2987 Berkas mengenai permintaan diluputkan dari sensur dan pas-pas jalan.
27 Juni - 14 September 1951
pertinggal
1 sampul

2988 Berkas mengenai perubahan penetapan lalu lintas jalan dalam negeri.
01 Juli 1951
pertinggal
1 sampul

2989 Surat menyurat antara Sekretaris Dewan Menteri RI dengan Menteri Perhubungan mengenai tenaga kerja di stasiun radio Kuala Kapuas Kalimantan Selatan.
14 Agustus - 22 November 1951
asli
1 sampul

2990 Surat dari Menteri Perhubungan mengenai keadaan perhubungan interlokal di Sulawesi Selatan.
23 Oktober 1951
pertinggal
1 sampul

2991 Berkas mengenai larangan kepada kapal-kapal Patikelir untuk menggunakan nama Pahlawan.

15 November 1951
asli
1 sampul

2992 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Wakil Perdana Menteri mengenai keterangan-keterangan tentang maskapai pelayaran asing.
11 Januari - 14 Februari 1952
asli
1 sampul

2993 Surat dari Kabinet Perdana Menteri mengenai pengawasan pelabuhan dan lautan
20 November 1952
pertinggal
1 sampul

2994 salinan tilgram huruf C C U U U mengenai kapal "TASIKMALAJA".
4 November 1952
asli
1 sampul

2995 Berkas nasionalisasi Perusahaan Kereta Api Partikelir di Jawa dan Madura.
5 Maret 1953 - 22 November 1956
salinan
1 sampul

2996 Berkas tentang tiket *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* yang bergambar Kepulauan Indonesia tanpa Daerah Irian Barat.
22 Juli - 29 Desember 1953
pertinggal
1 sampul

2997 Surat dari Sekretaris Djenderal Kementerian Perhubungan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai jawaban pemerintah soal nasionalisasi perhubungan yang vital, beserta lampiran.
1 September 1953
asli
1 sampul

2998 Berkas mengenai kesulitan-kesulitan dalam melakukan pemeriksaan di atas kapal pemerintah LCT No.206.
30 September, 28 November 1953
asli, salinan
1 sampul

2999 Nota tentang susunan baru dari pengusaha Pelabuhan Tanjung Priok.
13 April 1954
fotokopi
1 sampul

3000 Surat dari Sekretaris Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Perhubungan tentang permintaan *Managing Director Pioneer Aviation Coorporation* sehubungan dengan Nasionalisasi GIA.

21 April - 5 Mei 1954
pertinggal
1 sampul

3001 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada Kepala Jawatan Pelayaran mengenai permintaan memakai Kapal "Djadajat" buat perjalanan ke Sulawesi dan Maluku.

18 Agustus 1954
pertinggal
2 lembar

3002 Surat-surat mengenai permintaan pembuatan film di Indonesia dari luar negeri.

31 Agustus - 25 November 1954
tembusan
1 sampul

3003 Berkas mengenai keadaan Jawatan Kereta Api di Sumatera Barat.

28 Oktober - 4 November 1954
pertinggal
1 sampul

3004 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan tentang permintaan surat tangguh dengan GIA Surabaya - Banjarmasin.

9 Mei 1955
pertinggal
1 lembar

3005 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kepala Jawatan Pengawasan Pelayaran mengenai tambahan kapal-kapal pantai dan sungai untuk Kalimantan.

11 Mei - 13 Juni 1955
tembusan
2 lembar

3006 Surat-surat mengenai Rancangan PP tentang status Jawatan Angkutan Motor RI (DAMRI).

12 November - 17 Desember 1955
pertinggal
1 sampul

3007 Berkas mengenai risalah pekerjaan-pekerjaan penting Kementerian Perhubungan sejak Kabinet Ali sampai Roem-Idham.

17 Desember 1956
asli
1 sampul

3008 Berkas mengenai permohonan menaikan tarif *Koninklijke Paketvaart Maatschappij*.

11 Januari - 10 September 1957
pertinggal
1 lembar

3009 Surat dari Kepala Seksi Urusan Kesejahteraan Pegawai kepada Kepala Kantor Pas Pelabuhan Tanjung Priok tentang perpanjangan berlakunya pas Pelabuhan Tanjung
19 Februari 1957
pertinggal
1 sampul

3010 Laporan mengenai keterangan tenggelamnya KM Krim.
01 April 1957
salinan
1 sampul

3011 Berkas mengenai kontrak pembelian Pesawat-Pesawat Convair 440.
14 Mei - 5 Juni 1957
tembusan
1 lembar

3012 Surat kepada Menteri Perhubungan tentang usul R.Djafar sebagai Dirjen PTT Bandung.
02 Oktober 1957
pertinggal
1 lembar

3013 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Perhubungan tentang pemutusan kontrak antara pemerintah RI dan KLM dan keadaan GIA dewasa ini.
8 November 1957 - 10 Januari 1958
pertinggal
1 sampul

3014 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian surat Menteri Pelayaran tentang tugas kepada Pelni.
18 - 27 Desember 1957
pertinggal
1 sampul

3015 Surat Menteri Perhubungan kepada Wakil Perdana Menteri tentang perhubungan lalu lintas uang dari dan ke daratan Sumatera Tengah.
05 April 1958
asli
3 lembar

3016 Surat dari Perdana Menteri kepada KSAL mengenai permintaan pendapat untuk permohonan pengangkatan kerangka-kerangka kapal yang tenggelam oleh tenaga-tenaga bekas pejuang PT. Indonesian Salvage Ltd.
10 - 22 Juli 1958
pertinggal

1 sampul

3017 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Perhubungan mengenai pengiriman salinan kawat yang dikirimkan kepada Penguasa Perang Daerah KDMMIB di Ambon sebagai jawaban atas permohonan pembukaan kembali ijin GIA ke Ambon.

15 - 14 Juli 1958
pertinggal
1 sampul

4. URUSAN SOSIAL

a. Perburuhan, Tenaga kerja

3018 Surat Keputusan Menteri Pertahanan No.1/51 tentang Peraturan Penyelesaian Perburuhan.

13 Februari 1951
fotokopi
5 lembar

3019 Berkas mengenai *Resolution Concernat L'Organisation Des Nation Unies, Resolution Concernar L'Organisation Internationale Du Travail, Resolution International Labour Organisation*, *Resolution United Nations Organisations.*

Juli 1950
asli
5 lembar

3020 Berkas mengenai larangan mogok dalam perusahaan-perusahaan vital.

19 Juli 1950 - 13 Maret 1951
pertinggal
1 sampul

3021 Laporan situasi perburuhan dalam dan luar negeri Bulan Agustus dan Oktober 1950.

11 Agustus-13 November 1950
asli
1 sampul

3022 Berkas mengenai pemogokan Sarbupri.

20 September - 3 November 1950
asli
1 sampul

3023 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada semua Kementerian mengenai sokongan pengangguran dan pemberian pekerjaan darurat kepada kaum penganggur.

6 Oktober 1950
asli
1 sampul

3024 Surat Edaran Menteri Perburuhan tentang pemberhentian buruh secara besar-besaran (*massa ontslag*).

12 Oktober 1950

tembusan
6 lembar

3025 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Kepala Kantor Pusat Urusan Perselisihan mengenai instruksi tentang cara penyelesaian perburuhan.
20 Oktober 1950
tembusan
2 lembar

3026 Surat-surat mengenai resiko kaum majikan dalam peraturan yang sah mengenai kecelakaan.
11 November 1950
salinan
3 lembar

3027 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Perburuhan mengenai bahan untuk menyusun peraturan/perundangan perburuhan. n.b. : lampiran dalam Bahasa Belanda.
21 November 1950
tembusan
1 sampul

3028 Surat dari Kementerian Kehakiman kepada Wakil Presiden mengenai penyampaian naskah UU tentang Perdamaian Perburuhan.
21 November 1950 - 10 Februari 1951
tembusan
1 sampul

3029 Rencana Kepres RI Tahun 1950 tentang pembentukan delegasi RI ke Konferensi Komite Perkebunan (*plantation committee*) ILO di Bandung tanggal 4 dan 16
Desember 1950
asli
2 lembar

3030 Berkas mengenai pengiriman dan pemulangan tenaga kerja dari New Caledonia.
6 Desember 1950 - 20 September 1952
salinan
1 sampul

3031 Surat dari Sekretaris Umum I Pengurus Besar Serikat Buruh Bea dan Cukai kepada semua Kepala Jawatan lingkungan Kementerian Keuangan mengenai peninjauan kembali kedudukan pegawai-pegawai dalam lingkungan Kementerian Keuangan.
05 January 1951
tembusan
6 lembar

3032 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tentang Yayasan Buruh, beserta lampiran.
Maret 1951
asli

1 sampul

3033 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Jaksa Agung mengenai Resolusi Protes SOBSI Cilacap, beserta lampiran.

8 Maret - 27 Juni 1951
tembusan, konsep
3 lembar

3034 Surat-surat keputusan tentang Pemberian Bantuan Uang kepada Organisasi Buruh.

15 Maret 1951 - 22 April 1954
salinan
4 lembar

3035 Surat-surat mengenai tuntutan para buruh dan pegawai di berbagai daerah.

19 Maret 1951 - 27 November 1953
tembusan
1 sampul

3036 Laporan dari Kepala Kepolisian RI daerah Kalimantan Timur mengenai pemogokan buruh tambang arang (*OBM Oost Borneo maatschappij*) di Loa Kulu, beserta lampiran.

20 Maret 1951
asli
4 lembar

3037 Berkas mengenai permasalahan NV. Grand Hotel de Jogja.

18 Mei - 23 Juni 1951
asli
1 sampul

3038 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Perekonomian mengenai salinan Resolusi Kongres Serikat Buruh Tekstil ke-I (15-20 April 1951 di Bandung).

12 Juni 1951
pertinggal
2 lembar

3039 Berkas mengenai perselisihan antar pegawai pelabuhan dengan Kepala Jawatan Pelabuhan Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

12 Mei - 23 Oktober 1951
asli
1 sampul

3040 Surat dari Gubernur Kalimantan kepada Perdana Menteri mengenai pemogokan buruh BPM Balikpapan.

19 Juni 1951
asli
1 lembar

3041 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Urusan Pegawai dengan perantaraan KUP mengenai nasib bekas tenaga harian BTN daerah Malang, beserta lampiran.

25 Juni 1951

pertinggal
1 sampul

3042 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai RUU Darurat tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, beserta lampiran.

04 Juli 1951
pertinggal
8 lembar

3043 Surat-surat mengenai putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4).

8 Juli 1951 - 13 Juli 1957
pertinggal
1 sampul

3044 Berkas mengenai Serikat Organisasi-organisasi Buruh Seluruh Indonesia mengenai kedatangan Dr. Hjamar Schact ke Indonesia.

1 - 10 Agustus 1951
tembusan
1 sampul

3045 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja kepada Perdana Menteri mengenai pemogokan buruh gas dan listrik Indonesia di Palembang.

2 Agustus - 5 September 1951
asli
6 lembar

3046 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Sekretaris Dewan Ekonomi dan Keuangan mengenai kekurangan tenaga di Sumatera Utara, beserta lampiran.

11 Agustus 1951
pertinggal
2 lembar

3047 Surat dari Jawatan Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai pemogokan buruh pengilingan beras yang tergabung dalam *Combinati Rijstpellerijen Tjikompek.*

08 September 1951
asli
2 lembar

3048 Surat-surat mengenai permintaan M. Arif Effendi 's Gravenhage untuk membeli Warung Jawa dan diangkat sebagai penasehat bagi pekerja bangsa Indonesia di Belanda, beserta lampiran.

18 September 1951
asli
1 sampul

3049 Surat dari Sekretaris Umum Serikat Buruh Hotel/Restauran Indonesia (SBHRI) Pusat Surabaya kepada Pemerintah mengenai pernyataan SBHRI Pusat Surabaya.

20 September 1951
tembusan

2 lembar

3050 Berkas mengenai penugasan Oh Sien Hong untuk menyelidiki buruh dan kontrak dengan perusahaan penyelaman mutiara Australia.

4 Oktober 1951 - 1 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

3051 Surat Edaran pada semua pegawai kantor penyuluh tentang gerakan buruh, perselisihan, jaminan sosial/kesejahteraan buruh.

27 Oktober 1951
salinan
4 lembar

3052 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada Perdana Menteri mengenai Penyampaian Turunan Surat Cabang SOBSI Semarang tentang Penjelasan UU Darurat No.16 Tahun 1951.

29 November 1951
asli
3 lembar

3053 Surat dari Kepala Kepolisian Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai permasalahan dalam SOBSI berdasarkan Surat Kabar Keng Po.

22 November 1951
asli
4 lembar

3054 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tentang penggabungan SB Gordesius kepada SBPP. n.b. : tidak ada lampiran.

22 November 1951
asli
1 lembar

3055 Surat dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat kepada Federasi Buruh Minyak Indonesia d/a Latuk Radja Bangun Kantor BPM mengenai penyampaian Putusan P4.

01 Desember 1951
tembusan
4 lembar

3056 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai konsepsi Kementerian Perburuhan mengenai Konferensi ILO di Bangkok, beserta lampiran.

07 Desember 1951
asli
1 sampul

3057 Surat-surat mengenai permasalahan upah bagi buruh dan pegawai.

5 Januari 1952 - 1 April 1958
asli
1 sampul

3058 Surat-surat mengenai putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, beserta lampiran.

24 April - 7 Mei 1952
asli
1 sampul

3059 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai tuntutan upah minimum buruh harian pada Jawatan dan Kantor Pemerintah Pusat dan Daerah.

28 April 1952
tembusan
1 lembar

3060 Surat-surat dari Perdana Menteri kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4) mengenai pedoman dalam menghadapi perselisihan perburuhan.

10 Mei - 17 Juli 1952
asli
9 lembar

3061 Laporan mengenai pemogokan-pemogokan, tuntutan-tuntutan, perselisihan-perselisihan, dan pernyataan dari Serikat-Serikat Buruh di Indonesia.

14 Juni - 12 Juli 1952
salinan
1 sampul

3062 Laporan Mingguan dan Laporan Tengah Bulan mengenai pemogokan, tuntutan, perselisihan, dan pernyataan - pernyataan dari serikat-serikat buruh di Indonesia.

11 Agustus 1952 - 4 Oktober 1952
asli
1 sampul

3063 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai ketentuan aksi SBLGI Surabaya, beserta lampiran.

13 Agustus 1952
asli
1 sampul

3064 Surat Pernyataan anggota pers Serikat Buruh BRN tentang mendukung *statement* S.B BRN Jawa Timur tanggal 25 Agustus 1952 dan penyusulan mengenai pegawai-pegawai di BRN.

13 September 1952
fotokopi
2 lembar

3065 Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Indonesia Metal kepada Pemerintah Pusat mengenai vonis kepada Saudara Sudarmo, beserta lampiran.

1 Oktober 1952
tembusan
5 lembar

3066 Surat dari Menteri Perburuhan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai pengiriman wakil Indonesia ke Sidang *Asian Advidsory Committee* di Swiss, beserta lampiran.

3 Oktober 1952
salinan
3 lembar

3067 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai pengiriman daftar serikat-serikat buruh, beserta lampiran.

07 Oktober 1952
asli
1 sampul

3068 Surat menyurat antara Menteri Perburuhan dengan Perdana Menteri mengenai *Technical Meeting on Protection of Young Workers* di Kandi (Ceylon tanggal 1 - 10 Desember 1952.

3 - 18 November 1952
pertinggal
1 sampul

3069 Surat Pernyataan Serikat Buruh Angkatan Darat (SBAD) mengenai pembenaran terhadap tindakan SBKP Cabang Palembang dalam pengambil alihan persoalan buruh wanita di TT.II.

29 November 1952
tembusan
1 lembar

3070 Surat dari Dewan Pimpinan Serikat Buruh Gula kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan mengenai rencana massa *ontslaq* dari majikan, beserta

08 Desember 1952
tembusan
3 lembar

3071 Surat dari Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas-kas Negeri kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai istilah pegawai sementara menurut PP No.19/1952.

09 Desember 1952
tembusan
7 lembar

3072 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai usulan AVROS untuk membentuk komisi V Serikat Sekerja.

29 Januari - 20 Februari 1953
salinan
2 lembar

3073 Surat dari Perdana Menteri kepada P4 Pusat mengenai penyampaian siaran istimewa dari Federasi Buruh Minyak Indonesia (FBMI) tentang "Pensiun".

21 Februari 1953
pertinggal
2 lembar

3074 Surat dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat kepada Perdana Menteri mengenai keputusan-keputusan P4 Pusat, beserta lampiran.
30 Maret 1953
asli
1 sampul

3075 Berkas mengenai penyelesaian RUU tentang Perburuhan.
27 Maret 1953 - 12 Juni 1956
tembusan
1 sampul

3076 Surat-surat dari Jawatan Kepolisian Negara mengenai radiogram pemogokan buruh.
26 Maret - 8 April 1953
asli
7 lembar

3077 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Perburuhan mengenai perselisihan antara Persatuan Buruh Minyak (Perbum) dan *Bataafse Petroleum My* (BPM) tentang jam kerja di kapal BPM, beserta lampiran.
16 Maret 1953
pertinggal
3 lembar

3078 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Sekretaris Perdana Menteri mengenai salinan status dan pertanggungan jawab Panitia Penyelesaian Pertikaian Perburuhan
22 April 1953
asli
1 sampul

3079 Berkas mengenai permasalahan BTI Cabang Langkat Hilir Sumatera Utara.
15 Mei - 3 September 1953
pertinggal
1 sampul

3080 Surat dari Menteri Pertanian kepada Perdana Menteri mengenai tuntutan Sarbupri kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk menaikkan upah, beserta lampiran.
5 Juni 1953
asli
1 sampul

3081 Berkas mengenai penjelasan momen resolusi SBTI Cabang Dabo Singkep.
23 Juni - 25 Agustus 1953
asli
1 sampul

3082 Surat-surat mengenai rencana pemogokan kaum buruh, beserta lampiran.

12 Juli 1953
pertinggal
1 sampul

3083 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Dewan Menteri mengenai usul perbaikan nasib tenaga teknik, beserta lampiran.

22 Juli 1953
fotokopi
2 lembar

3084 Berkas mengenai tuntutan pembebasan terhadap aktivis Sarbupri.

18 Agustus 1953 - 2 November 1954
asli
1 sampul

3085 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Kepolisian Negara mengenai pernyataan protes Dewan Pimpinan Sarbupri Sumatera Utara, beserta lampiran.

12 September 1953
asli
3 lembar

3086 Surat dari Kepala Bagian Parlemen kepada Menteri Perburuhan mengenai tunjangan upah dan uang kerugian untuk kaum buruh yang menderita akibat aksi gerombolan.

15 Desember 1953
pertinggal
5 lembar

3087 Surat mengenai rapat panitia aksi bersama kepentingan buruh untuk hari raya.

16 Desember 1953
asli
2 lembar

3088 Surat-surat mengenai resolusi pada rapat ranting I DPR-BTI Kampung Timbang Langkat.

9 Januari 1954
asli
4 lembar

3089 Laporan Konferensi Internasional ke -7 Untuk Pekerjaan Sosial di Toronto (Kanada).

25 Januari 1954
asli
1 sampul

3090 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian *statement* delegasi SOBSI ke Kongres Buruh Sedunia ke-3.

31 Januari 1954
asli

4 lembar

3091 Resolusi Serikat Buruh Pekerjaan Umum dan Serikat Buruh Gula Jawa Timur mengenai hak-hak demokrasi dan tindakan pemerintah terhadap komplotan anti RI.
12 Februari - 15 April 1954
fotokopi
3 lembar

3092 Berkas mengenai keputusan Konggres Sarekat Buruh (SB) Postel VI di Semarang.
19 Februari - 13 Maret 1954
asli
1 sampul

3093 Resolusi menuntut Pencabutan Surat Edaran Perdana Menteri Wilopo tanggal 12 November 1952 No. 24326/52 terkait masalah Pembatasan Pengangkatan Pegawai.
25 April - 18 Oktober 1954
asli
2 lembar

3094 Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Kendaraan Bermotor Pemalang tentang seruan untuk menghentikan semua percobaan bom atom dan bom zat air di Pasifik dan lain tempat demi keselamatan umat manusia.
1 Mei 1954
tembusan
1 lembar

3095 Memo dari Subijakto T. Umar kepada Permadi mengenai rencana pekerjaan bagi perburuhan.
31 Mei 1954
tembusan
1 sampul

3096 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai salinan surat Kepala Kepolisian Sumatera Selatan mengenai kunjungan Mc.Voy, ahli perburuhan
16 Juni 1954
salinan
5 lembar

3097 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai pembentukan Ikatan Buruh Katolik di Semarang.
21 September 1954
asli
3 lembar

3098 Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Sekretariat Buruh Daerah Otonom (SEBDA) Kabupaten Malang kepada DPD/S Kab. Malang mengenai protes Dewan Pimpinan Cabang SEBDA tentang penolakan perundingan DPD/S Kabupaten Malang.
27 September 1954

tembusan
1 lembar

3099 Surat-surat mengenai Sidang Pleno ke-3 DPP Sarbupri dan permohonan pembentukan Sarbupri di daerah.

18 Oktober 1954, 30 Juni 1958
tembusan
3 lembar

3100 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai salinan surat Kepala Polisi Karesidenan Surabaya tentang pernyataan buruh Philips terhadap reaksi rencana penutupan perusahaan oleh Direksi Philips.

19 Oktober 1954
salinan
1 sampul

3101 Surat menyurat antara Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Kementerian Penerangan dengan Perdana Menteri mengenai Keputusan Kongres SB Kempen IV, beserta lampiran.

19 Februari - 28 Mei 1955
asli
1 sampul

3102 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Perburuhan mengenai izin mempergunakan deviezen bagi utusan SEBDA untuk mengikuti Konferensi International Pegawai dan Pekerja Pemerintah di Wina.

25 Maret 1955
asli
3 lembar

3103 Berkas mengenai RUU tentang Putusnya Hubungan Kerja.

31 Maret - 26 Mei 1955
tembusan
1 sampul

3104 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai penyampaian laporan Biro Perancang Negara No 4 Bab Sumber Tenaga Kerja.

28 Mei 1955
asli
1 sampul

3105 Surat dari Panitia Konferensi Besar ke I BP BAAPRI kepada Wakil Perdana Menteri mengenai undangan Konferensi Besar ke I BP BAAPRI seluruh Jawa, beserta lampiran.

17 Juni 1955
asli
1 sampul

3106 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai rencana aksi bersama oleh BTI dan SBG.

06 Agustus 1955

salinan
6 lembar

3107 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada Perdana Menteri mengenai pelantikan Panitia Interdepartemental yang bertugas mempelajari penutupan perusahaan oleh Perdana Menteri.

07 September 1955
asli
3 lembar

3108 Berkas mengenai RUU tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

11 - 25 Oktober 1955
fotokopi
1 sampul

3109 Surat-surat mengenai tuntutan perbaikan upah dan pembentukan Panitia Upah.

2 - 7 Januari 1956
fotokopi
5 lembar

3110 Surat-surat mengenai pengiriman delegasi RI ke Sidang Tahunan *Internasional Labour Organization* dan ke Sidang *Governing Body* di Jenewa, Bulan Juni 1957.

6 - 22 Mei 1957
pertinggal
1 sampul

3111 Surat-surat mengenai pengesahan UU Nomor 26 Tahun 1957 tentang Perubahan UU tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. n.b. : lampiran tidak lengkap.

8 Mei 1957 - 2 April 1959
asli
1 sampul

3112 Surat menyurat antara Ketua DPR dengan Menteri Pekerjaan dan Tenaga mengenai pertanyaan anggota DPR tentang keadaan jalan-jalan di Kalimantan Barat, beserta lampiran.

25 Juli 1956 - 21 Januari 1957
asli
3 lembar

3113 Surat dari Wakil Perdana Menteri I kepada Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk pembangunan mengenai rancangan anggaran negara tahun 1957.

21 Oktober 1957
pertinggal
5 lembar

3114 Resolusi Pengurus Besar Serikat Buruh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian (Serbukan) mengenai pegawai-pegawai bangsa Belanda di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

2 Desember 1957
tembusan
7 lembar

3115 Surat-surat mengenai Rancangan PP tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
10 Februari 1958 - 16 April 1958
tembusan
1 sampul

3116 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Menteri Kehakiman mengenai PP tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing.
7 Mei 1958
tembusan
1 sampul

3117 Berkas mengenai *Concention dan Recommendation* pada Konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conferense*) ke-41 di Jenewa tanggal 13 Mei 1958.
13 Mei 1958 - 17 Oktober 1959
pertinggal
1 sampul

3118 Surat dari Perdana Menteri kepada Pengurus Besar Serikat Buruh Tambang Indonesia mengenai ucapan terima kasih atas ucapan selamat penunjukkan kembali sebagai pemimpin Kabinet.
25 Juli 1958
pertinggal
2 lembar

3119 SK Menteri Sosial No.Sekr.10-38-26/59 tentang Lambang Pekerjaan Sosial Indonesia.
5 Agustus 1958
tembusan
3 lembar

3120 Berkas mengenai penambahan dan perubahan susunan Dewan Urusan Pegawai.
6 Oktober 1955 - 14 Juni 1958
pertinggal
1 sampul

3121 Surat-surat mengenai *Convention No. 107-109* dan R*ecommendation No. 104-109* yang telah diterima oleh Sidang Organisasi Perburuhan Internasional (OPI), beserta lampiran.
8 Desember 1958 - 21 September 1959
asli
1 sampul

3122 Berkas mengenai putusan Presidium Kabinet tentang pengangkatan Wakil SKKDN menjadi anggota Panitya Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri.
29 Mei 1959
pertinggal
1 sampul

3123 Berita acara timbang terima antara Menteri Produksi dan Menteri-Menteri Muda Pergerakan Tenaga Rakyat mengenai pengerahan tenaga rakyat di pusat dan di daerah berada di bawah pimpinan Menteri-Menteri Muda Pergerakan Tenaga Rakyat.

31 Juli 1959
tembusan
1 lembar

3124 Berita acara timbang terima penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban tentang urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan pengangguran DIY dan Jawa Tengah.

23 September - 6 Oktober 1958
asli
1 sampul

3125 Surat-surat mengenai perpecahan organisasi Sarbuksi dan pembentukan Persatuan Buruh Kehutanan Indonesia (PBKI) Ranting Indramayu, beserta lampiran.

07 Agustus 1953
pertinggal
5 lembar

3126 Memo dari Subijakto T. Umar kepada Permadi mengenai rencana pekerjaan bagi perburuhan.

tt
tembusan
1 lembar

b. Urusan Agama

3127 Berkas mengenai permasalahan ibadah haji.

8 Februari 1950 - 18 Juli 1955
tembusan
1 sampul

3128 Surat dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri kepada Dubes RI di Kairo mengenai perjalanan naik haji.

22 Agustus 1950
tembusan
1 lembar

3129 Berkas mengenai penghinaan terhadap Agama Islam.

12 September 1950 - 28 Januari 1956
tembusan
1 sampul

3130 Berkas mengenai tuntutan terhadap Sajid Salim bin Achmad bin Djindan atas khutbah-khutbahnya yang melukai perasaan umum.

28 September 1950 - 26 Agustus 1954
tembusan
1 sampul

3131 Berkas mengenai peraturan pernikahan termasuk pemungutan uang nikah.
1 Oktober 1950 - 18 Oktober 1956
tembusan
1 sampul

3132 Kumpulan resolusi dan mosi DPRD Mojokerto, Pasuruan, Jepara, Lamongan, Sidoarjo tentang larangan pergundikan tahun 1951 - 1952.
10 September 1951 - 21 Mei 1952
fotokopi
8 lembar

3133 Surat dari Jamaah Ahmadiyyah kepada Wakil Perdana Menteri mengenai permohonan untuk membaca buku dari Jamaah Ahmadiyyah.
05 Maret 1951 - Januari 1959
pertinggal
1 sampul

3134 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pertemuan para Alim Ulama di Indonesia.
28 November 1951
tembusan
1 sampul

3135 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai politik Pemerintah terhadap Aceh.
17 Desember 1951
salinan, tembusan
1 sampul

3136 Berkas mengenai khotbah di Masjid Jami Banjarmasin tanggal 6 Juni 1952 oleh A.Mu'izuddin yang dianggap sesat.
12 Juni - 27 September 1952
tembusan
1 sampul

3137 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai paksaan agama di Rantebala (Palopo).
09 Agustus 1952
asli
7 lembar

3138 Surat dari Kepala KUA Propinsi Sumatera Tengah kepada Kepala Jawatan Urusan Agama mengenai resolusi kongres adat rakyat.
02 September 1952
tembusan
1 sampul

3139 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai *Watch Tower Bible and Tract Society* .

19 September 1952
asli
5 lembar

3140 Berkas mengenai perbaikan keadaan jemaah haji Indoensia.
13 Oktober 1952
asli
1 sampul

3141 Surat dari Perdana Menteri kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai keputusan rapat Panitia Pemberangkatan Naik Haji Presiden.
22 Oktober 1952
pertinggal
2 lembar

3142 Surat dari Kementerian Agama kepada Ketua Panitia Negara untuk menyelidiki organisasi kementerian-kementerian mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap Agama Islam.
08 Juni 1953
tembusan
1 sampul

3143 Surat-surat mengenai pembentukan Kantor Agama Daerah Bali dan permintaan pengakuan Agama Hindu Bali. n.b. : sebagian arsip berbahasa Belanda.
26 Agustus 1953 - 7 April 1954
tembusan
1 sampul

3144 Surat-surat mengenai tanggapan dan larangan Tabligh Akbar Muhammadiyah.
15 November 1952 - 5 Oktober 1953
asli
1 sampul

3145 Surat dari Pengadilan Negeri Karesidenan Lampung kepada Perdana Menteri mengenai kedudukan Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan Agama di Karesidenan Lampung.
3 November 1953
asli
5 lembar

3146 Berkas mengenai keputusan Konferensi Alim Ulama se-Indonesia di Cipanas dan Muktamar Alim Ulama di Medan.
7 Januari - 10 Juli 1954
asli
1 sampul

3147 Berkas mengenai protes Kom. Badan Permusyawaratan Penyiaran Islam Payakumbuh atas penghinaan Werdojo Pemimpin Permai terhadap Agama Islam.
19 Januari - 26 Juli 1954
asli
8 lembar

3148 Surat dari Sekjen Kementerian Agama kepada Perdana Menteri mengenai salinan pidato Saudara Hamka pada Konferensi Kaum Buddhis ke-6 dan Upacara Chatta Sangayana di Burma.

10 Juni 1954
asli
4 lembar

3149 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai tuntutan Kepala Urusan Agama Budha Djawi/Wisnu terhadap penghinaan yang dilakukan Tohir cs. Desa Temas Batu.

08 Juli 1954
asli
3 lembar

3150 Surat-surat mengenai usul pembangunan tempat sembayang umat Islam di Indonesia.

11 Agustus 1954 - 15 Oktober 1956
asli
6 lembar

3151 Surat dari Pelaksana Gereja Pusat Protestan Maluku di Ambon kepada Perdana Menteri mengenai perselisihan paham dalam pembangunan Gereja Pusat Protestan Maluku di Ambon.

17 Agustus 1954
asli
1 sampul

3152 Surat-surat mengenai protes atas pelarangan pemakaman anggota agama Budha Djawi/Wisnu di Malang.

2 Oktober 1954 - 10 Februari 1955
asli
8 lembar

3153 Surat-surat mengenai pembangunan pasar di sebelah Gereja Protestan di Pamekasan Madura.

19 Oktober - 2 November 1954
asli
8 lembar

3154 Surat menyurat antara Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri mengenai permohonan bantuan dari Sekretariat Porpisi dalam rangka Konggres Pemuda Islam Sedunia di Karachi.

28 Desember 1954 - 25 Februari 1955
asli
5 lembar

3155 Surat-surat mengenai pengibaran umbul-umbul klaras dan pembagian kalender Agama Budha Djawi/Wisnu.

15 Januari - 26 April 1955
asli
5 lembar

3156 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri di Jakarta mengenai penyampaian salinan risalah agama Baha-i.

19 Mei 1955
asli
3 lembar

3157 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Agama mengenai Aliran Agama Machdi Akbar di Selayar.

14 Juni 1955
pertinggal
7 lembar

3158 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai permasalahan khutbah Idul Fitri oleh Sdr. Md.Ali Alhamidy.

04 Juli 1955
asli
1 sampul

3159 Surat dari Perdana Menteri mengenai tuduhan kepada Menteri Agama yang mengadu domba Agama Islam dengan Agama Masehi.

10 Agustus 1955
konsep
3 lembar

3160 Surat dari Badan Pekerja Pusat Kongres Kebatinan Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman putusan-putusan Kongres Kebatinan Indonesia.

24 Agustus 1955
fotokopi
3 lembar

3161 Surat dari Ketua DPRD Tasikmalaya kepada KUA Provinsi Jawa Barat mengenai pernyataan bersama Kementerian Agama/PHI tentang pembersihan secara besar-besar di lingkungan petugas PHI.

25 Agustus 1955
fotokopi
1 lembar

3162 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai tersiarnya agama baru di Bundung Negeri, Bukit Bombak Batu Sangkar, beserta lampiran.

21 September 1955
salinan
4 lembar

3163 Surat-surat undangan mengenai pembukaan pesta peringatan Jubileum Gereja HKBP Balige (Hoeria Kristen Batak Protestan).
26 Juni - 13 Juli 1956
pertinggal
5 lembar

3164 Surat-surat mengenai pengembalian gedung-gedung Gereja Masehi Injili Minahasa.
7 - 28 September 1956
salinan
4 lembar

3165 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri Luar Negeri mengenai Konferensi Gereja-Gereja Asia di Prapat tanggal 18-27 Maret 1957.
09 Februari 1957
asli
2 lembar

3166 Penetapan Menteri Agama No. 28/1958 tentang hari-hari libur dalam tahun 1959.
1 Juli 1958
salinan
1 lembar

3167 Surat dari Sekjen Kementerian Agama kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan tentang *The Ninth International Congress for the History of Religions* .
03 Desember 1958
asli
1 sampul

3168 Surat-surat mengenai pembelian kapal haji a.s. Lavoisier, beserta lampiran.
20 November - 1 Desember 1959
tembusan
1 sampul

c. Pendidikan, Teknologi dan Kebudayaan

3169 Notulen rapat Hari Wanita Internasional tanggal 8 Maret 1950.
08 Maret 1950
fotokopi, salinan
1 sampul

3170 Berkas mengenai perselisihan dalam kalangan PGRI Daerah Kebumen.
4 Juni 1950 - 4 Juli 1953
asli
1 sampul

3171 Surat dari Ketua Dewam Guru Besar PTIK kepada Perdana Menteri mengenai pemindahan Akademi Polisi dari gedung sekolah rakyat di Jl. Marschalk.
02 September 1950

asli
4 lembar

3172 Surat dari Sekretariat Perdana Menteri kepada Pemimpin MPP Gondomanan mengenai permohonan surat lulusan atas nama Soemardi Mangunkusumo.
23 September 1950
pertinggal
1 lembar

3173 Surat-surat mengenai Hotel Negara dan Tourisme (Honet).
13 November 1950 - 13 November 1951
tembusan
1 sampul

3174 SK Menteri PP&K mengenai penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
30 November 1950 - 21 Oktober 1953
fotokopi
1 sampul

3175 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Gubernur Jawa Barat mengenai pengajuan permintaan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak SK (Suria Kentjana) di Cipanas.
02 Januari 1951
pertinggal
3 lembar

3176 Berkas mengenai *fellowship/scholarship* dari PBB untuk tahun 1950-1951.
30 Desember 1950
asli
1 sampul

3177 Berkas mengenai pemindahan T. Stambul, Direktur Sekolah Tehnik Tinggi di Jogjakarta pada Jawatan Kepolisian Indonesia Pusat.
30 Desember 1950-31 Juni 1951
asli
1 sampul

3178 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian pengumuman tentang pendirian sentrum bagi pemuda.
24 Januari 1951
asli
3 lembar

3179 Surat dari Sekjen Kementerian Penerangan kepada Ketua Akademi Wartawan mengenai pembukaan Akademi Wartawan.
01 Maret 1951
tembusan

1 lembar

3180 Surat-surat mengenai maha guru untuk pegawai tinggi "Pancasila".
20 Maret - 17 April 1951
asli
3 lembar

3181 Peraturan Menteri Pertanian tentang Ujian Penghabisan Sekolah Pertanian Menengah untuk Tahun Pelajaran 1950/1951 dan Peraturan Menteri Pertanian tentang Ujian Penghabisan Sekolah Pertanian Menengah Atas Tahun Pelajaran 1951/1952.
1 April 1951, 1 Maret 1952
asli
1 sampul

3182 Berkas mengenai pengiriman tenaga ahli bahasa asing ke luar negeri.
16 April - 11 Juni 1951
asli
1 sampul

3183 Surat dari Sub Panitia Kebudayaan kepada Sekretaris I Panitia Negara Khusus mengenai penyampaian laporan Sub Panitia Kebudayaan.
17 April 1951
tembusan
1 sampul

3184 SK Menteri PP&K No.11007/A tentang perintah kepada Prof. Dr. Aulia, Guru Besar FK UI untuk pergi ke Amerika dan Eropa untuk mempelajari dieletik dan pengobatan alami.
24 April 1951
fotokopi
2 lembar

3185 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri PP&K mengenai hari anak-anak Internasional.
29 Mei 1951
fotokopi
1 lembar

3186 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri PP&K mengenai "*International Congress on Cancer* " di Sao Paolo tanggal 23 - 29 Juli 1954.
16 Maret 1954
pertinggal
7 lembar

3187 Berkas mengenai pembelian gedung di Merdeka Selatan 11 dari Yayasan Kopra untuk keperluan pendidikan dan kebudayaan.
16 Juli - 6 Desember 1951
pertinggal
1 sampul

3188 Berkas mengenai perintah belajar ke luar negeri bagi pegawai negeri.
13 Agustus - 15 Desember 1951
asli
1 sampul

3189 Surat-surat mengenai RUU tentang Penyerahan Urusan Penilikan Film kepada Kementerian PP&K.
7 Agustus 1951 - 30 Januari 1952
asli
1 sampul

3190 Berkas mengenai Akademi Dinas Luar Negeri.
18 Agustus - 17 Oktober 1951
salinan
1 sampul

3191 Surat menyurat antara Menteri PP&K dengan Ketua DPR mengenai jawaban Pemerintah atas pertanyaan soal sekitar peraturan perguruan tinggi partikulir.
29 Agustus - 22 Oktober 1951
tembusan
1 sampul

3192 Surat dari Menteri PP&K kepada Presiden Balai Perguruan Tinggi RI mengenai *baccalaureat* yaitu memberi pelajaran secara singkat.
07 September 1951
tembusan
1 lembar

3193 Surat Keputusan Menteri Sosial No.BB/51/509 tentang Pemberian Kuasa untuk Keperluan Penyelenggaraan Pendidikan ex. Tentara, ex. Pejuang dan Bekas Tangkapan Akibat Operasi Tentara/Polisi.
20 September 1951
fotokopi
1 lembar

3194 Surat-surat dari Menteri Penerangan kepada Menteri PP&K mengenai Jawatan Pendidikan Masyarakat, beserta lampiran.
7 November 1951
salinan
1 sampul

3195 Pengumuman Kementerian PP&K tentang Peraturan Sementera bagi Penuntun Perguruan Tinggi Partikelir.
7 November 1951
salinan
1 sampul

3196 Surat Edaran dari Menteri PP&K mengenai pemakaian singkatan Dr. dan dr.
11 November 1951

salinan
2 lembar

3197 Berkas mengenai Subsidi *Koninklijk Institut Voor de Tropen* tahun 1952 untuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perekonomian dan PP&K, beserta lampiran.

21 November 1951 - 17 September 1953
asli
1 sampul

3198 Surat Keputusan Menteri PP&K No.36660/A. tentang Pengutusan Soesilowati Sadarsan untuk mengikuti *Pan Pasifik Womens Confrence* ke-2 di New Zealand.

29 Desember 1951
asli
2 lembar

3199 Surat dari Jaksa Agung kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian surat mengenai guru-guru untuk sekolah-sekolah Hoakiao serta buku pelajarannya, beserta lampiran.

8 Januari 1952
salinan
4 lembar

3200 Surat Keputusan Menteri PP&K No. 254 B tentang Pembukaan Kursus Dagang di Medan.

18 Januari 1952
tembusan
2 lembar

3201 Surat Keputusan Menteri PP&K No.3821/hln tentang Penugasan Prof. Dr. Soetomo Tjokronegoro ke New Delhi, beserta lampiran. n.b. : kondisi arsip sobek.

31 Januari 1952
salinan
1 sampul

3202 Surat dari Wakil Presiden Universitat Indonesia kepada Menteri PP&K tentang perintah jalan bagi Drs.Bloemen ke Inggris, beserta lampiran.

19 Februari 1952
asli
6 lembar

3203 Berkas mengenai pengangkatan para Guru Besar Universitas di Indonesia tahun 1952-1957.

17 Maret 1952 - 6 Juli 1957
tembusan
1 sampul

3204 Surat dari Komisariat Senat Mahasiswa Universitas Gajah Mada cabang Hukum tentang Resolusi Begroting Gedung.

12 Maret 1953
asli

1 lembar

3205 Surat dari Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri PP&K Demisioner mengenai surat panitera pelajar dan pemuda Indonesia, beserta lampiran.

25 Maret 1952
pertinggal
8 lembar

3206 Jadwal acara peletakan batu pertama Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Baranang Siang tanggal 27 April 1952.

01 April 1952
fotokopi
1 lembar

3207 Surat dari *Museum of People and Place* kepada Perdana Menteri Wilopo mengenai permohonan foto Wilopo untuk diletakkan di museum di samping Perdana-Perdana Menteri lain di dunia. n.b.: arsip dalam Bahasa Inggris.

02 April 1952
asli
1 lembar

3208 Berkas mengenai PP tentang Pelajar Angkatan Perang.

4 April 1952 - 24 November 1954
tembusan
1 sampul

3209 Surat dari Panitia Pertimbangan Perintah Belajar kepada Menteri Luar Negeri mengenai *college d' europe* , beserta lampiran.

12 April 1952
asli
5 lembar

3210 Surat dari Sekretaris Pribadi Perdana Menteri kepada Tuan GF Van der Meulen mengenai *Biologische Landbouwmethode.* n.b. : sebagian arsip dalam Bahasa Belanda.

14 Mei 1952 - 24 April 1954
pertinggal
1 sampul

3211 Nota dari Kepala Bagian Administrasi kepada Sekretaris Kabinet Perdana Menteri mengenai kebakaran di kamar arsip bekas *Algemene Secretarie.*

21 - 24 Mei 1952
asli
6 lembar

3212 Berkas mengenai pengangkatan Inspektur pada Jawatan Pendaftaran Tanah yang diusulkan diangkat menjadi Guru Besar Biasa di Fakultet Teknik Universitas Indonesia.

21 Mei 1953
asli
1 sampul

3213 Surat menyurat antara Menteri PP&K dan Perdana Menteri mengenai pengiriman perutusan ke Konferensi di luar negeri.

9 Juni, 12 Juni 1952
asli
2 lembar

3214 Surat dari Menteri PP&K kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian Pengumuman Bersama tentang Pemberian Bea Siswa dan Pemberian Uang Tunjangan

10 Juni 1952
salinan
1 sampul

3215 Surat dari Menteri PP&K kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman utusan ke Kongres *World Organization of the Profession* di Kopenhagen.

11 Juni 1952
asli
2 lembar

3216 Surat Keputusan Menteri Pertahanan No.MP/B/467/52. tentang Pengiriman Mayor Soedarto untuk Studi ke Eropa Barat.

31 Juli 1952
salinan
1 sampul

3217 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri PP&K mengenai tugas perjalanan dinas Prof. B. Polak ke Belanda, beserta lampiran.

22 September 1952
pertinggal
7 lembar

3218 Surat-surat mengenai inisiatif untuk pembangunan *tourisme* di Indonesia, beserta lampiran.

23 Oktober 1952 - 25 Juli 1957
asli
1 sampul

3219 Laporan mengenai *International Study Conference on Child Welfare*, Bombay 5 - 12 Desember 1952 and *Sixth International Conference Of Social Work,* Madras 14 - 19 Desember 1952.

8 November 1952 - 14 Februari 1953
asli
1 sampul

3220 Surat-surat mengenai kedudukan mahasiswa PTIK.

10 November 1952 - 24 Maret 1954
asli,tembusan, pertinggal
1 sampul

3221 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Kepala Perwakilan RI di S'Gravenhage mengenai subsidi untuk *Institute voor Tropische Geneeskunde Rotterdam Leiden* dan *Koninkijk Instituut voor de Tropen* di Amsterdam.

11 November 1952
asli
2 lembar

3222 Surat dari Kementerian Agama kepada Perdana Menteri mengenai tuntutan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) supaya pemerintah mendirikan sekolah-sekolah negeri di Sumba.

20 November 1952
asli
7 lembar

3223 Surat-surat mengenai pendirian Gedung Fakultas Hukum di Surabaya cabang dari UGM Yogyakarta.

26 November 1952 - 10 Maret 1954
asli
1 sampul

3224 Berkas mengenai penyusunan UU tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia.

6 Januari 1953 - 17 Maret 1954
asli, tembusan
1 sampul

3225 Surat-surat mengenai penyelidikan pendidikan.

17 - 20 Maret 1953
asli
3 lembar

3226 Peraturan Menteri Pertanian tentang Ujian Penghabisan Sekolah Kehewanan Menengah Atas (SKMA) untuk Tahun Pelajaran 1952/1953.

15 April - 29 September 1953
asli
1 lembaran

3227 Surat-surat mengenai permohonan pengiriman Saudara Soemarjo ke *Internasional Boy Scouts Confrence* di Swiss.

15 Mei - 8 Juli 1953
asli
7 lembar

3228 Surat-surat mengenai *Seminar Youth Leaders* di Tokyo.

29 Mei - 7 Juli 1953
asli
4 lembar

3229 Surat-surat mengenai perencanaan pendidikan kader di lingkungan Kementerian-Kementerian.

1 Juni - 20 Oktober 1953
asli
5 lembar

3230 Surat-surat mengenai pengiriman atlet hoakiauw ke Peking dan atles tenis ke Wimbledon.

27 Juli 1953 - 15 Mei 1955
asli
1 sampul

3231 Surat Keputusan Menteri PP&K No.6290/Kab tentang Pembukaan Kursus di Berbagai Wilayah di Indonesia.

30 Juli 1953 - 2 Februari 1955
asli, tembusan
1 sampul

3232 Surat dari Kwartir Besar Kepanduan Ansor kepada Perdana Menteri mengenai penjelasan berita tentang permohonan kemudahan pengiriman wakil Ikatan Pandu Indonesia ke Swiss.

1 Agustus 1953
asli
1 lembar

3233 Surat-surat mengenai perlop/istirahat bagi Pegawai Negeri yang mengikuti kegiatan PON, Asian Games atau Jambore Kepanduan Nasional.

4 Agustus 1953 - 8 Agustus 1955
tembusan
1 sampul

3234 Surat dari Menteri PP&K kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman wakil PPMI dan IPPI ke Warsawa.

21 Agustus 1953
asli
1 lembar

3235 Surat dari Kejaksaan Agung kepada Menteri PP&K mengenai Usul melarang pemakaian 12 buah buku dalam Bahasa Tionghoa dalam sekolah Tionghoa, beserta

27 Agustus 1953
tembusan
4 lembar

3236 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Ikatan Pandu Indonesia mengenai pengiriman Sdr. Soemarjo, beserta lampiran.

31 Agustus 1953
tembusan
2 lembar

3237 Berkas mengenai jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Parlemen soal UU Pokok Pendidikan.

1 September 1953
asli
5 lembar

3238 Surat dari Duta Besar RI di Paris kepada Menteri PP&K mengenai dunia perguruan tinggi di Oaris dan kemungkinan belajar untuk mahasiswa Indonesia.

13 September 1953
tembusan
1 sampul

3239 Surat-surat mengenai kursus Inspektur Polisi disamakan dengan *College.*

1 Oktober 1953 - 10 Maret 1954
tembusan
1 sampul

3240 Surat menyurat antara Ketua Yayasan Usaha Pendidikan Vak dengan Perdana Menteri mengenai penjelasan usaha pendidikan vak, beserta lampiran.

5 November - 5 Desember 1953
asli
7 lembar

3241 Berkas mengenai Upacara Adat Batak.

16 November 1953 - 5 November 1954
asli
1 sampul

3242 Surat-surat mengenai penyerahan perahu di Gadon Jawa Timur.

10 Februari 1954
asli
1 sampul

3243 Surat-surat permohonan devisen untuk pembayaran kepada *Harlem Globetrotters Basketball Team* dan laporan aktivitas rombongan *basketball* yang diutus Kuo Min Tang ke Taiwan.

23 Januari - 3 Februari 1954
asli
1 sampul

3244 Surat-surat mengenai subsidi untuk *Koninklijk Instituut voor de Tropen.*

25 Januari - 19 Februari 1954
tembusan
2 lembar

3245 Surat-surat mengenai pembentukan institut untuk Dinas Khusus pada Jawatan Kepolisian Negara.

29 Januari 1954 - 17 Juli 1954
tembusan

7 lembar

3246 Berkas mengenai pembelian "*workshop equipment*" untuk Akademi Penerbangan Indonesia dari Penerbangan Sipil.

05 Maret 1954
salinan
7 lembar

3247 Resolusi IPINDA (Ikatan Pelajar Indonesia Aceh) Padang Panjang tentang Permohonan Bantuan/Pinjaman kepada Pemerintah untuk Pelajar Aceh, beserta lampiran.

18 Maret 1954 - 29 Mei 1954
asli
5 lembar

3248 Surat dari Gubernur Jateng kepada Perdana Menteri mengenai laporan Pancalomba Tritunggal tahun 1954, beserta lampiran.

09 April 1954
asli
1 sampul

3249 Berkas mengenai pemeriksaan kesehatan Saudara Z.S. Moningka guna mengikuti kursus BI Ekonomi yang diselenggarakan oleh Kementerian PP&K.

11 Juni 1954 - 27 April 1955
tembusan
1 sampul

3250 Surat Keputusan Menteri PP&K No.24453/Kab tentang perubahan peraturan ujian BI Pendidikan Kepandaian Putri.

16 Juli 1954
salinan
1 sampul

3251 Surat Keputusan Menteri PP&K No.38742/Kab tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru.

01 September 1954
asli
1 sampul

3252 Surat dari Menteri PP&K kepada Perdana Menteri mengenai resolusi yang diajukan oleh pelajar-pelajar SMA C Juridis Ekonomis yang tidak lulus ujian akhir tahun pelajaran 1953/1954.

23 September 1954
asli
6 lembar

3253 Surat dari Menteri PP&K kepada Direktur Kabinet Presiden RI mengenai penyampaian Rancangan PP No.37 tahun 1950 tentang Universitas Negeri Gadjah Mada.

24 September 1954
salinan

1 sampul

3254 Berkas mengenai *police special branch school.*
14 Oktober 1954 - 8 Februari 1955
asli
1 sampul

3255 Surat-surat mengenai Rancangan PP No.57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya.
21 Oktober - 30 Desember 1954
fotokopi
1 sampul

3256 SK Menteri Perekonomian No.11.993/M dan No.15.081/M tentang Akademi Dinas Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
22 Oktober 1954
asli
4 lembar

3257 Surat dari Menteri PP&K kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian rencana pendidikan dan pengajaran Pemerintah RI untuk Irian Barat oleh Menteri
4 - 12 November 1954
fotokopi
1 sampul

3258 Surat dari Perhimpunan Mahasiswa Universiteit Sumatera Utara kepada Menteri PP&K mengenai resolusi bersama tentang pembangunan dan penyempurnaan universiteit di Sumatera Utara, beserta lampiran.
10 November 1954
salinan
5 lembar

3259 Surat Keputusan Menteri Pertanian No.127/Um/54 tentang Pembukaan Sekolah Pengamat Kehewanan di Bogor.
16 November 1954
fotokopi
1 sampul

3260 Berkas mengenai RUU tentang Pemakaian Gelar Akuntan.
25 November 1954
tembusan
1 sampul

3261 Surat Keputusan Menteri PP&K No.56327/Kab tentang peraturan tentang Perguruan Tinggi Pertanian di Payakumbuh.
26 November 1954
salinan
6 lembar

3262 Surat Penetapan Menteri Agama No.24 Tahun 1954 tentang Peresmian Dewan Antar Perguruan-Perguruan Tinggi Islam Indonesia di Jakarta.

01 Desember 1954
salinan
2 lembar

3263 Catatan pergerakan/perjuangan bangsa Indonesia dengan periode-periodenya dari tahun 1908 sampai dengan tahun 1955.

1955
asli
3 lembar

3264 Surat dari Menteri PP&K kepada Menteri Luar Negeri mengenai persetujuan kebudayaan dengan Mesir, tidak ada lampiran.

27 Januari 1955
tembusan
1 lembar

3265 Berkas mengenai usulan Menteri PP&K untuk menarik kembali RUU yang menetapkan UU Darurat no. 7 tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi sebagai UU.

28 Januari 1955 - 10 Juli 1957
tembusan
1 sampul

3266 Surat dari Menteri Kesehatan kepada Direktur Biro Perancang Negara mengenai Panitia Penasehat Pendidikan dan Latihan Kejuruan (PPPLK).

12 Februari 1955
asli
1 lembar

3267 Surat dari Pengurus Besar IPPI kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian Laporan Diskusi besar masalah demoralisasi pelajar di Jogja tanggal 27 Februari-5 Maret 1955.

07 Maret 1955
asli
1 sampul

3268 Surat-surat mengenai pemberitahuan tidak dapat menyaksikan pertunjukan seleksi pencak silat.

21- 29 Maret 1955
fotokopi
4 lembar

3269 Surat dari Presiden Universitet Indonesia kepada Perdana Menteri mengenai resolusi tentang keadaan perguruan tinggi, beserta lampiran.

16 Mei 1955
asli
1 sampul

3270 Surat dari Walujo Djojosewojo, guru SMA Ambon kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai mengenai permohonan percepatan penyelesaian surat ijin tinggal di hotel.

18 Mei 1955
tembusan

1 lembar

3271 Laporan dari Bagian Olahraga Kabinet Perdana Menteri mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan.

17 Juni 1955
pertinggal
3 lembar

3272 Surat dari Menteri Agama RI kepada Menteri PP&K mengenai pertunjukan kebudayaan RRT yang bersifat komunis.

22 Juni 1955
tembusan
2 lembar

3273 Surat-surat mengenai penjagaan istimewa dari pesawat terbang rombongan Missi Kebudayaan RRT.

27 - 29 Juli 1955
asli
7 lembar

3274 Berkas mengenai pembangunan gedung pendidikan sentral di Solo, beserta lampiran *blue print* .

8 September 1955 - 7 Mei 1958
pertinggal
1 sampul

3275 Surat Keputusan Menteri PP&K No.56586/kab tentang Peraturan Ujian untuk Mencapai Ijazah Kursus Pegawai Administrasi Negeri.

26 September 1955
fotokopi
6 lembar

3276 Surat dari Kementerian PP&K kepada Mr. Norman Tett, *Representative British Council* mengenai *Cancellation Of United Kingdom Scholarships For Indonesian Student.* n.b.: arsip berbahasa Inggris dan Indonesia.

12 Oktober 1955
asli
2 lembar

3277 Surat dari Menteri Penerangan kepada Dewan Menteri mengenai ahli musik bangsa asing.

26 October 1955
fotokopi
2 lembar

3278 Surat-surat mengenai pengiriman pegawai-pegawai Jawatan Kooperasi untuk ikut serta dalam *Study Tour on Comm. Development* ke India Caylon, Pakistan, Afganistan dan Birma.

03 November - 31 Oktober 1955

salinan
5 lembar

3279 Surat dari Menteri PP&K kepada Dewan Menteri mengenai penyantunan pelajar Aceh dan Sulawesi Selatan akibat gangguan keamanan.

7 November 1955
salinan, fotokopi
8 lembar

3280 Surat dari Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negeri kepada Kementerian PP&K mengenai permintaan mengeluarkan pedoman bagi seluruh instansi Pemerintah mengenai ejaan dan tulisan nama orang dalam surat authentik.

14 November 1955
fotokopi
1 lembar

3281 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Mahkamah Agung mengenai tawaran *scholarships* untuk para mahasiswa. n.b. : lampiran tidak lengkap.

16 November 1955
fotokopi
2 lembar

3282 Surat Keputusan Menteri PP&K No.72270/Kab. tentang pemberian panghargaan kepada peserta yang lulus ujian penghabisan Akademi Teknik Nasional.

22 November 1955
fotokopi
1 lembar

3283 Surat-surat mengenai penugasan Prof. Drs. Soenardjo ke *International Geography Seminar* dan Prof.Ir.Wongsotjitro ke *International Congress of Photogrammetry* .

17-19 Desember 1955
pertinggal
1 sampul

3284 Surat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran Kebudayaan mengenai persetujuan kunjungan misi ilmu pengetahuan Italia ke Indonesia.

02 Februari 1956
pertinggal
7 lembar

3285 Surat Keputusan Perdana Menteri Nomor 163/P.M./1956 tentang penunjukkan Drs. Widjojo Nitisastro untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mengadakan persiapan-persiapan *Aviliation Project* antara Universitas California dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

30 April 1956
pertinggal
1 sampul

3286 Surat dari Direktur Kabinet Presiden kepada Sekretaris Presiden mengenai pengembalian form ICA *Fellowship* untuk Public Administration.

21 Juni 1956
pertinggal
8 lembar

3287 Surat dari Sekretaris Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengenai pengiriman pedoman FE UI Tahun Akademik VI.

11 Juli 1956
fotokopi
1 sampul

3288 *Extract from Common Wealth of Australia Gazette no. 39 Conditions and Syllabus of a course of training for Junior Training Officers, Third Division*. n.b.: arsip berbahasa Inggris.

19 Juli 1956
pertinggal
1 lembar

3289 Berkas mengenai Rancangan PP tentang Pendirian Universitas Hasanuddin Makassar.

10 - 22 Agustus 1956
pertinggal
1 sampul

3290 Surat dari Kementerian PP&K kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai Rancangan PP tentang Pendirian Universitas Andalas Bukittinggi.

13 Agustus 1956
pertinggal
1 sampul

3291 Surat-surat dari Jawatan Pengajaran Kementerian Pendidikan mengenai syarat penerimaan kursus pegawai administrasi tamatan SR VI tahun.

22 September - 1 November 1956
asli
4 lembar

3292 Berkas mengenai Undang-Undang Pengawasan Pengajaran Asing.

5 Oktober - 7 Maret 1959
pertinggal
1 sampul

3293 Surat dari Dewan Pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara Medan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian naskah *praedvies* sosial mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

11 Oktober 1956
fotokopi
1 sampul

3294 Keputusan Perdana Menteri Nomor 293/P.M./1956 tentang Tugas Belajar ke Amerika Serikat atas nama N. Lawalata dalam rangka *International Cooperation Administration* .

12 Oktober 1956
pertinggal
4 lembar

3295 Surat dari Menteri PP&K kepada Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Atas mengenai uang ujian untuk menempuh ujian negeri tahun 1957, n.b. : arsip robek.

12 Oktober 1956
fotokopi
1 lembar

3296 Surat-surat mengenai sumbangan Buku Daerah Istimewa Yogyakarta dan Biografi Sultan Hamengkubuwono IX kepada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah

18 Oktober 1956
tembusan
1 sampul

3297 Surat dari Badan Pelaksana Usaha Sinar Surya (BAPUSIS) kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penemuan alat penangkap sinar matahari.

23 Oktober 1956
asli
1 sampul

3298 Surat-surat mengenai kesulitan-kesulitan yang luar biasa dalam menstabilkan Universitas Indonesia.

26 November 1956 - 16 Januari 1957
asli
1 sampul

3299 Berkas mengenai Rancangan Keppres penganugerahan panji kepada Akademi Militer Nasional.

4 Desember 1956 - 8 November 1957
asli
1 sampul

3300 Surat-menyurat antar Dewan Menteri dengan Menteri PP&K mengenai usul mendirikan Perseroan Terbatas "Pers Universitas" berhubung dengan kesukaran buku-buku pelajaran.

31 Desember 1956 - 9 Februari 1957
tembusan
1 sampul

3301 Surat dari Perdana Menteri kepada Menteri PP&K mengenai pendirian University of Technology di Bandung, beserta lampiran.

02 Januari 1957
pertinggal
2 lembar

3302 Surat-surat mengenai Rancangan PP tentang Susunan Tingkat Pengajaran pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada.

03 Januari - 07 Maret 1957
pertinggal
1 sampul

3303 Berkas mengenai Panitia Koordinasi Interdepartemental mengenai Beasiswa dalam rangka bantuan ICA.

16 Januari 1957 - 26 Agustus 1957
salinan
1 sampul

3304 Surat dari Kepala Direktorat Afrika/Timur Tengah Kementerian Luar Negeri kepada Perdana Menteri mengenai Mukimin pelajar Indonesia yang terlantar di Saudi Arabia.

23 Januari 1957
asli
3 lembar

3305 Ralat SK Menteri PP&KNo. 97328/S tanggal 11 Desember 1956 tentang Panitia Perancang Otonomi untuk Perguruan Tinggi Negara.

29 Januari 1957
asli
1 lembar

3306 Surat Keputusan Menteri PP&K No. 9909/S tentang Pemberhentian Soetimboel sebagai Anggota Seksi Organisasi, Koordinasi, Perpustakaan & Hubungan Luar Negeri dalam Dewan Perpustakaan Nasional.

30 Januari 1957
salinan
3 lembar

3307 Surat-surat tentang permohonan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo untuk berhenti dari jabatannya sebagai Presiden pada Universitas Airlangga.

14 Februari - 17 Juni 1957
tembusan
1 sampul

3308 SK Menteri Perhubungan No.P 46/3/16 tentang perubahan pasal 13 dan 17 dari Reglemen Akademi Jawatan Kereta Api dari SK Menteri Perhubungan tanggal 25 November 1955 No.U II/21/14 yang telah diralat tanggal 3 Februari 1956 No.U.II/1/17

20 Februari 1957
tembusan

2 lembar

3309 Surat dari Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Sumatera Tengah kepada Presiden Universitas Andalas mengenai pemberian pelajaran Sosial Ekonomi di Fakultas Pertanian Payakumbuh.

21 Februari 1957
tembusan
5 lembar

3310 Surat dari Menteri PP&K kepada Dewan Menteri mengenai RUU tentang perubahan dan penambahan "Toezicht-ordonnantie particulare onderwijs".

05 March 1957
tembusan
2 lembar

3311 Surat dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai kedatangan Sdr.Oedojo, Penata Usaha pada Kementerian Dalam Negeri dari tugas belajar di Australia.

15 May 1957
asli
1 lembar

3312 Surat Edaran Wakil Perdana Menteri I Nomor 6/RI/1957 kepada Para Menteri tentang pengiriman para pegawai dan pelajar ke luar negeri.

31 Mei 1957
fotokopi
2 lembar

3313 SK Perdana Menteri No. 145/P.M./1952 tentang Penunjukan M. Hidajat untuk Meninjau Pengajaran Sekolah Menengah di Negeri Belanda & Denemarken.

01 Juli 1957
salinan
6 lembar

3314 SK Perdana Menteri No. 193/PM/1957 tentang Perintah Belajar untuk Sdr. Soedijono, Ahli Tata Usaha Tingkat I pada Kabinet PM ke Amerika Serikat.

9 Juli 1957
fotokopi
1 lembar

3315 Surat Edaran Wakil Perdana Menteri No.11/RI/1957 tentang Tunjangan Belajar bagi Pegawai ke Amerika Serikat.

27 Juli 1957
salinan
3 lembar

3316 Berkas mengenai rencana pendirian gedung kelas VI type P di Yogyakarta.

05 Agustus 1957

pertinggal
1 sampul

3317 Berkas mengenai tugas belajar H.S. Adnan di Amerika Serikat.
8 - 27 Agustus 1957
asli
1 sampul

3318 Surat dari Kepala Biro Hubungan Luar Negeri/UNESCO Kementerian PP&K kepada Ketua PAKIN mengenai tunjangan untuk mahasiswa Indonesia di India.
14 Agustus 1957
tembusan
3 lembar

3319 Surat dari Menteri Keuangan kepada jajaran Kabinet Perdana Menteri mengenai pembayaran tunjangan belajar kepada para *traineers* di Amerika Serikat .
04 Oktober 1957
asli
2 lembar

3320 Berkas mengenai pengundangan PP No.49 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Pemerintah terhadap Pendidikan Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan RI.
18 November 1957
asli
1 sampul

3321 Surat-surat mengenai pakaian seragam bagi murid-murid SMP/SMA dan yang sederajat.
18 November - 28 Desember 1957
tembusan
1 sampul

3322 Surat dari Menteri Pelajar kepada Perdana Menteri mengenai pernyataan Musyawarah Nasional Pelajar (16-18 November 1957), beserta lampiran.
21 November 1957
fotokopi
1 sampul

3323 Berkas mengenai usul pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Soekiman pada Universitas Gadjah Mada.
26 Agustus 1957
asli
1 sampul

3324 Surat dari Kementerian PP&K kepada Dirjen Biro Perancang Negara mengenai perumahan untuk *Deputy Head Unesco Science Cooperation Office* .
04 Desember 1957
salinan
2 lembar

3325 Surat dari Menteri PP&K kepada Kepala Seksi Bantuan Luar Negeri mengenai tenaga *Volunteer Graduate* .

07 Desember 1957
salinan
2 lembar

3326 Surat Edaran Menteri Kesehatan No.337/Keu/Pend. tentang Penetapan Mata Anggaran dari Pengeluaran Murid Ikatan Dinas dan Guru Tidak Tetap yang dibiayai Kementerian Kesehatan.

12 Desember 1957
salinan
1 lembar

3327 Berkas mengenai pencalonan tugas belajar Sdr. Muljatno Sindhudarmoko dalam rangka *International Cooperation Administration* (ICA).

24 Desember 1957-20 Juni 1958
asli
1 sampul

3328 Berkas mengenai perpanjangan waktu tugas belajar di luar negeri bagi Sdr.Rusdhi Jatim.

18 Januari 1958 - 5 Maret 1959
tembusan
1 sampul

3329 Berkas mengenai persiapan Asian Games IV tahun 1962 di Indonesia.

24 Januari 1958 - 23 Maret 1959
salinan
1 sampul

3330 Surat dari Kementerian PP&K kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai Rancangan PP tentang Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir, beserta lampiran.

07 Februari 1958
asli
1 sampul

3331 Surat-surat kepada Perdana Menteri mengenai undangan mengikuti kuliah umum dan pembukaan taman lalu lintas di Bandung.

9 - 10 Februari 1958
asli
2 lembar

3332 Surat dari Perdana Menteri kepada Direktorat Jenderal Biro Perancang Negara mengenai *management consultant* .

18 Februari 1958
tembusan
1 sampul

3333 Surat dari Sekretaris Kantor Urusan Pegawai kepada Direktur Kabinet Presiden pengangkatan Prof. Dr.Achmad Sofian sebagai Presiden Universitas Sumatera Utara.
1 Maret - 21 Juni 1958
tembusan
1 sampul

3334 Surat dari Panitia Negara kepada Menteri PP&K mengenai permohonan perlengkapan untuk Panitia Negara Pendidikan Teknik, beserta lampiran.
Mei 1958
pertinggal
1 sampul

3335 SK Perdana Menteri No.163/PM/II/1958 tentang Penetapan Drs. Marjono Danusaputro sebagai Dosen dengan Tingkat Lektor Muda (Luar biasa) pada PTIK.
12 Juni 1958
salinan
1 sampul

3336 SK Perdana Menteri No.167/PM/II/1958 tentang pemberhentian Nj.N.A.de Vries Troostwijk dari jabatannya sebagai Lektor (Luar biasa) pada PTIK.
12 Juni 1958
salinan
1 sampul

3337 Surat-surat mengenai perkembangan kebudayaan.
25 Juni - 1 Juli 1958
asli
1 sampul

3338 Surat menyurat antara Ir. K. Hadinoto dengan Perdana Menteri mengenai kiriman karangan "Rencana Pendidikan Insinyur - insinyur" sebagai sumbangan pada Kongres VI PII.
26 Juni - 08 Juli 1958
asli
1 sampul

3339 Surat dari Biro Perancang Negara kepada R. Soebignjo mengenai pendidikan yang diselenggarakan oleh Biro Perancang Negara.
12 Agustus 1958
tembusan
1 lembar

3340 Pidato Menteri Urusan Veteran dan Wakil Perdana Menteri dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga antar Kementerian tahun 1958.
24 Agustus 1958
asli

3341 Surat-menyurat Ketua DPR dengan Menteri PP&K mengenai RUU Perguruan Tinggi.
8 September & 18 September 1958
tembusan

1 sampul

3342 Surat-surat dari Biro Perancang Negara dan Jawatan Kepolisian Negara kepada Direktur Lembaga Administrasi Negara mengenai Latihan Jabatan Pengawasan Keuangan

09 September - 06 Oktober 1958
asli
1 sampul

3343 Berkas mengenai pidato Presiden Universitas Hasanuddin pada Dies Natalis II Universitas Hasanuddin tanggal 10 September 1958.

27 September 1958
asli
1 sampul

3344 Surat kepada Sekretaris Dewan Guru Besar PTIK di Jakarta mengenai pidato sambutan Wakil Perdana Menteri II pada Dies Natalis ke XI PTIK. n.b. : arsip tidak lengkap.

30 September 1958
tembusan
1 lembar

3345 Surat dari Biro Perancang Negara kepada Biro Koordinasi Perguruan Tinggi Kementerian PP&K mengenai permohonan beasiswa dalam/luar negeri.

4 Oktober & 14 Oktober 1958
salinan
2 lembar

3346 Surat Edaran Pemimpin KPAA Negeri Jakarta No.99/Pendaft/Kpa.A/58 tentang Penerimaan/Pendaftaran Murid Kelas I KPAA Negeri Jakarta.

01 Oktober 1958
salinan
6 lembar

3347 Surat dari PT. Perseroan Dagang dan Industri kepada Perdana Menteri mengenai rencana latihan sekolah penerbangan, beserta lampiran.

11 Oktober 1958
asli
1 sampul

3348 Rancangan PP tentang Wajib Pendaftaran Ijazah Dokter Baru dan Ijazah Dokter Gigi

25 Oktober 1958
asli
1 sampul

3349 SK Menteri Agraria No.Sk.330/Ka tentang Penunjukan Fakultas Pertanian UI di Bogor untuk Mengurus Berkas Tanah Partikelir Dermaga di Bogor.

30 Oktober 1958
salinan
1 lembar

3350 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Kepala Bagian Keuangan Kabinet Perdana Menteri mengenai pemberitahuan berdirinya Akademi Public Administration.

30 Oktober 1958
pertinggal
5 lembar

3351 Surat menyurat antara Pemimpin Kursus Thesauri Negara dengan Perdana Menteri mengenai pengunduran diri peserta Khursus Thesauri Negara, beserta lampiran.

15 Desember 1958 - 02 Januari 1959
pertinggal
7 lembar

3352 Surat Keputusan Menteri PP&K No.133186/A tentang Pemberian Hak Otorisasi kepada Presiden Universitas Negeri Sumatera Utara di Medan.

17 Desember 1958
salinan
1 lembar

3353 Surat dari Kementerian PP&K mengenai RPP untuk mengubah PP No. 15 tahun 1954 tentang Tunjangan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa CPNS yang Belajar di Dalam dan Luar Negeri.

2 & 13 Juni 1959
fotokopi
3 lembar

3354 Peraturan Menteri/Kepala Kepolisian Negara No.5/Prt/MK./1960 tentang Jenis dan Bentuk Anak Panji-Panji bagi Sekolah Polisi Negara Sukabumi.

30 September 1960
salinan
1 lembar

3355 Berkas mengenai pendirian Universitas Diponegoro di Semarang dan Institut Teknologi 10 November di Surabaya.

14 Maret 1961
salinan
1 sampul

d. Kesehatan

3356 SK Menteri Kesehatan tentang Penyusunan Kembali *Kellringsraad* atau Majelis Penguji Kesehatan Pegawai.

19 Juli 1950
salinan
1 lembar

3357 Surat Kementerian Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai darmasiswa Dr.Sulianti Sulaiman, beserta lampiran.

11 September 1950
asli
4 lembar

3358 Berkas mengenai persetujuan tentang penerimaan *Protocol on Narcotic Drugs* dari PBB.

14 - 18 November 1950
fotokopi
1 sampul

3359 Surat dari Jawatan Kesehatan Jawa Tegah kepada Menteri Kesehatan mengenai hasil pemeriksaaan kesehatan para pengungsi.

5 - 15 Maret 1951
tembusan
3 lembar

3360 Berkas mengenai peranan palang merah di waktu perang.

11 April - 12 November 1951
pertinggal, asli
1 sampul

3361 Berkas mengenai kepengurusan Markas Besar PMI.

14 Juni 1951 - 11 Agustus 1953
asli
1 sampul

3362 Berkas mengenai penunjukan wakil Indonesia untuk mengikuti *Dental Assosiation* untuk Timur Jauh di Manila.

31 Oktober - 24 November 1951
salinan
1 sampul

3363 Berkas mengenai pembentukan sarana kesehatan di lokasi transmigrasi.

3 Desember 1951 - 26 Oktober 1953
tembusan, asli
1 sampul

3364 Berkas mengenai bantuan Pemerintah RI kepada PMI untuk korban bencana alam.

21 Desember 1951 - 6 Februari 1952
asli, pertinggal
1 sampul

3365 Surat dari Markas Besar PMI kepada Perdana Menteri mengenai Resolusie No. 25 mengenai *Disaster Relief* pada Konferensi Internasional Palang Merah di Toronto.

31 Desember & 15 Januari 1953
asli
1 sampul

3366 Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.2205/UI tentang Penugasan Sdr.Ismail Bandi dan Sdr.R.Soedarmono untuk Mengikuti *International Statistical Confrence* di Kalkuta.

16 Januari 1952

salinan
1 lembar

3367 Surat-surat mengenai keharusan visum bagi warga negara RI untuk bepergian ke
12 Maret - 5 Desember 1952
asli
1 sampul

3368 Surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri Kesehatan tentang pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh PMI untuk Pemerintah.
29 Maret 1952
tembusan
2 lembar

3369 Berkas mengenai Kongres Palang Merah International di Toronto.
31 Mei - 25 Juli 1952
pertinggal, asli
1 sampul

3370 Berkas mengenai Penyampaian ralat atas Rancangan PP dan RUU tentang Penunjukan Rumah Sakit Partikelir untuk Merawat Orang Miskin dan Orang yang Kurang Mampu.
14 Juli - 7 Agustus 1952
salinan
1 sampul

3371 Surat dari Presiden Soekarno kepada Ketua DPR mengenai RUU tentang Pembukaan Apotek untuk dibicarakan dalam Sidang DPR, beserta lampiran.
05 September 1952
tembusan
3 lembar

3372 Surat-surat mengenai penunjukan Prof. Dr. D.G.F.R. Kostermans dan Dokter R.R. Gandasoebrata ke *Indian Congress of Science.*
22 - 24 September 1952
pertinggal, asli
4 lembar

3373 Berkas tentang kunjungan Prof. Dr. Soetopo ke *International Conggress of Dermatology* X.
16 Oktober - 22 November 1952
asli
1 sampul

3374 Surat dari Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris PM tentang pengiriman utusan ke *International Conggress of Radiology* VII di Kopenhagen, beserta lampiran.
07 November 1952
asli
2 lembar

3375 Surat dari Menteri Kesehatan kepada Jawatan Perjalanan tentang rombongan kesehatan Indonesia untuk urusan jemaah haji.

19 November 1952
tembusan
3 lembar

3376 Berkas Kementerian Kesehatan mengenai Laporan Konperensi WHO di Belanda, Geneva & Bangkok, New Delhi, Bandung.

20 November 1952 - 11 April 1957
pertinggal, asli
1 sampul

3377 Surat dari Markas Besar PMI kepada Perdana Menteri tentang *Cooperation between National Societies and Goverments* , beserta lampiran.

4 Desember 1952
asli, fotokopi
1 sampul

3378 Laporan Rapat Komite Eksekutif (Badan Pekerja) Liga Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah di Geneva.

11 Desember 1952 - 31 Oktober 1953
tembusan
1 sampul

3379 Surat-surat mengenai penunjukkan Sdr.Soeroso untuk menghadiri *Pan Pacific Tuberculosos Confrence* di Manila.

23 Desember 1952 - 24 Maret 1953
asli, pertinggal
1 sampul

3380 Bahan jawaban Pemerintah dalam pemandangan umum DPR mengenai Kementerian Kesehatan.

1953
fotokopi
1 sampul

3381 Surat dari Markas Besar PMI kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian salinan surat dari *League Of Red Cross Societies* .

16 Februari & 12 November 1953
asli
1 sampul

3382 Berkas mengenai RUU tentang Yayasan.

28 April 1953 - 11 Juli 1955
asli
1 sampul

3383 Laporan mengenai perjalanan Pemimpin Lembaga Kusta di Jakarta ke Filipina dalam rangka mempelajari Leo Prasy Control.

7 Mei - 19 Desember 1953

tembusan
1 lembar

3384 Laporan Perjalanan Markas Besar PMI ke Amerika Serikat dan Eropa untuk melakukan peninjauan mengenai organisasi Palang dan Kesejahteraan kanak-kanak.

8 Juni 1953
asli
4 lembar

3385 Berkas mengenai usul pembebasan Dokter Soegiri dari penggantian uang kepada Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta.

16 Juni 1953 - 26 Januari 1956
salinan, pertinggal, asli
1 sampul

3386 Memorandum Menteri Kesehatan tentang keadaan rumah sakit di seluruh Indonesia untuk tahun 1953 - 1957.

10 Juli 1953 & 8 Agustus 1953
pertinggal, asli
1 sampul

3387 Rancangan PP tentang Peraturan Pemungutan Biaya Pemeriksaan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Perusahaan - perusahaan.

5 Oktober - 30 November 1953
pertinggal, asli
1 sampul

3388 Surat dari Dewan Pimpinan Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) kepada Menteri Kesehatan mengenai usul Peraturan Pengambilan Ongkos Pengobatan kepada Pegawai Negeri Sipil.

2 Maret 1954
tembusan
2 lembar

3389 Surat-surat mengenai tuntutan dari Pusat Penderita Cacat Indonesia.

23 Maret 1954 - 27 April 1955
asli, tembusan
1 sampul

3390 Surat dari Menteri Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian laporan mengenai peristiwa rumah Jalan Sindanglaja 8.

27 Maret 1954
asli
1 sampul

3391 Surat dari Menteri Kesehatan kepada Menteri Perburuhan mengenai pembayaran uang muka untuk perawatan di rumah sakit bagi "*rechthebbenden*".

22 May 1954
tembusan
1 sampul

3392 Surat menyurat antara Kabinet Perdana Menteri dengan Pengurus Besar PMI mengenai Ratifikasi Konvensi Geneva.

1- 17 Juni 1954
pertinggal, asli
1 sampul

3393 Surat dari Kantor Urusan Pegawai kepada Menteri Kesehatan mengenai kedudukan Dokter Pemerintah dan Usaha Pemerintah untuk mempertinggi derajat kesejahteraan rakyat.

7 September & 4 Oktober 1954
tembusan
2 lembar

3394 Surat dari Kepala Lembaga Radiologi Kementerian Kesehatan kepada Perdana Menteri mengenai memorandum penyelidikan Radio Aktivitet dan Tenaga Atom.

13 September 1954 - 15 Mei 1956
asli, pertinggal
1 sampul

3395 Berkas mengenai Rancangan PP Tentang Pemakaian Tanda Palang Merah.

15 Maret - 18 Mei 1955
tembusan, asli
1 sampul

3396 Surat dari Persatuan Wanita Indonesia Morange (Perwin) kepada Wakil Perdana Menteri RI mengenai permohonan sumbangan untuk pembangunan rumah bersalin.

10 Juni 1955
asli
1 lembar

3397 Laporan mengenai *World Health Assembly* VIII di Mexico City Bulan Mei 1955.

13 Juli 1955
asli, salinan
1 sampul

3398 SK Menteri Kesehatan RI No.61589/KS tentang Pembatalan pasal 2 SK tanggal 22 Juni No.53969/KS & Penyusunan Kembali Anggota Majelis Penguji Kesehatan Pegawai.

15 Juli 1955
salinan
1 sampul

3399 SK Menteri Kesehatan RI No. 62762/Stat tentang Menarik Kembali Surat Keputusan *Fd. Hoofd Van den Dienst der Volksgezondheid* tanggal 15 November 1955 No. 34317/B, beserta lampiran "Klasifikasi Statistik International mengenai Penyakit-Penyakit, Luka-Luka, dan Sebab-Sebab Kematian.

19 Juli 1955
salinan
1 sampul

3400 Surat Keterangan tentang keadaan keuangan dari orang sakit.

3 Oktober 1955 - 12 Oktober 1957
asli
1 sampul

3401 Kumpulan surat dari Biro Perancang Negara kepada Majelis Penguji Kesehatan di RSUP mengenai pemeriksaan kesehatan beberapa pegawai dari Kementerian-Kementerian yang akan dikirim ke luar negeri (Birma, Ceylon, Pakistan, dan India).
29 Oktober - 14 November 1955
pertinggal
2 lembar

3402 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kesehatan mengenai Permintaan Rp. 25.000.000 untuk pendirian Rumah Sakit Umum Pusat di jalan Diponegoro,
12 Januari 1956 - 16 Maret 1956
pertinggal
1 sampul

3403 Berkas mengenai hasil-hasil yang dicapai dari mahasiswa yang mendapat beasiswa dan kegiatan di luar negeri terkait bidang kedokteran.
2 Februari - 3 Mei 1956
salinan
1 sampul

3404 Pra saran Pemberantasan Penyakit Framboesia di Indonesia dalam 6,5 tahun yang lalu dan di masa yang akan datang oleh Dr. R. Koedijat (dalam Rapat Symposium Framboesia Nasional ke-1 di Lawang tanggal 2 Juli 1956).
13 Oktober 1956
asli, salinan
1 sampul

3405 Surat-surat mengenai penunjukan dokter pengawas untuk RS. PPP.
5 Juni - 11 Juli 1957
tembusan, pertinggal, asli
1 sampul

3406 Surat-surat mengenai Konferensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan terhadap Orang Sipil dalam Keadaan Darurat/perang.
1 - 18 Desember 1957
asli, salinan
1 sampul

3407 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai pendirian rehabilitasi centrum untuk penderita orthopedi di Makasar dan Bukit Tinggi.
4 - 17 Januari 1958
salinan
1 sampul

3408 Surat-surat mengenai kelaparan di Jawa Tengah.
19 Februari - 6 Maret 1958
asli, tembusan

3 lembar

3409 SK Menteri Sosial RI No.Sekr.10-37-20/1527 tentang Pembentukan Panitia Pembina Kesejahteraan Moril (Semangat) *Moral Welfare.*

5 Agustus 1958
salinan
1 sampul

3410 Berkas mengenai pengesahan UU No. 18 Tahun 1959 tentang UU Darurat No. 5 tahun 1958 tentang Kedudukan Hukum Apotek Darurat.

15 September 1958 - 4 Juli 1959
asli
1 sampul

3411 Surat mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter.

05 April - 29 April 1960
salinan
3 lembar

e. Bantuan Sosial

3412 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai persiapan menghadapi letusan Gunung Kelud.

3 Juni 1950
tembusan
1 lembar

3413 Surat dari Wakil Sekretaris KPM kepada Menteri Sosial mengenai permohonan bantuan untuk keluarga dari 5 orang korban mati yang ditembak Belanda.

6 Juni 1950
pertinggal
2 lembar

3414 Berkas mengenai gempa bumi di Jawa Timur tahun 1950.

13 Juli 1950 - 29 Juni 1953
tembusan
4 lembar

3415 Berkas mengenai keadaan pengungsi karena gangguan keamanan di Priangan Timur, Jawa Barat.

24 Februari - 13 April 1951
tembusan
1 sampul

3416 Surat dari Sekretaris Perdana Menteri kepada Sekretaris Wakil Presiden mengenai pembuatan surat kematian pegawai yang hilang untuk dipergunakan dalam penyelesaian Peristiwa Otto Iskandardinata dan Mr. Singgih.

18 Juli - 24 Oktober 1951
pertinggal
4 lembar

3417 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan tentang bantuan Pemerintah kepada daerah-daerah guna perayaan 17 Agustus.

4 Agustus 1951 - 28 Juli 1952
tembusan
1 sampul

3418 Berkas mengenai pemberian jaminan penghidupan kepada janda dari Jendral Sudirman dan Letjen Urip Sumohardjo.

13 September 1951 - 30 Juli 1952
tembusan
9 lembar

3419 Surat kawat Pemerintah mengenai penyelenggaraan kegiatan sosial akibat kegiatan Kahar Muzakar.

15 September 1951
salinan
1 lembar

3420 Surat dari Kementerian PP&K kepada semua Kepala Jawatan mengenai daftar janda dan anak pegawai yang meninggal dunia karena menjalankan kewajibannya.

09 Oktober 1951
fotokopi
1 sampul

3421 Surat-surat mengenai sokongan kepada pelajar yang mengadakan ikatan dinas atas pertanyaan Anggota DPR,Wardi Kusnatalistra.

22 Januari - 14 Desember 1951
tembusan
3 lembar

3422 Surat-surat mengenai permohonan tambak perikanan Cilincing untuk ex. Pejuang.

27 November - 18 Desember 1951
tembusan, asli
1 sampul

3423 Surat-surat mengenai permohonan bantuan moril dan materil Yayasan Teknik Indonesia ex. Tentara Genie Pelajar.

16 Januari - 1 Mei 1952
pertinggal
1 sampul

3424 Surat-surat mengenai permohonan Komite Persatuan Bekas Pejuang sebesar Rp.150.000 kepada Biro Rekonstruksi Nasional untuk mendirikan/membuka perusahaan pengangkutan.

17 Januari - 1 Maret 1952
asli
1 sampul

3425 SK Menteri Pertahanan No:A/MP/133/52 tentang D.U.S.T.Bagian III (bantuan sosial) dari Pusat, Territorium dan Sub Territorium, dimasukkan ke dalam Dinas Pensiun Militer Direktorat Dinas-Dinas Administrasi Angkatan Darat.

14 Februari 1952
salinan
2 lembar

3426 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada Menteri Sosial mengenai permohonan bantuan dari Yayasan Dana Bantuan Sosial.
19 Februari 1952
pertinggal
1 lembar

3427 Surat dari Menteri Sosial kepada Sekretariat Staf "K" Pusat di Jakarta mengenai laporan pembubaran asrama-asrama penampungan di Jawa Barat, beserta lampiran.
5 Maret 1952
asli
1 sampul

3428 Berkas mengenai permohonan bantuan oleh Pimpinan Pusat Persatuan Pelajar Demobilisan Jogja.
7 Mei - 15 Juli 1952
asli
1 sampul

3429 Surat-surat mengenai permohonan bantuan dari Pemerintah.
22 Oktober 1952, 11 Juli 1958
asli
1 sampul

3430 Surat-surat mengenai bantuan untuk korban banjir dan kebakaran di Indonesia.
25 Januari 1953 - 23 September 1957
asli
1 sampul

3431 Surat-surat mengenai pembelian persil-persil beserta bangunannya untuk UNICEF.
3 - 28 Februari 1953
tembusan, pertinggal
1 sampul

3432 Surat-surat mengenai pemberian bantuan untuk negara yang tertimpa bencana alam seperti Jepang dan India. n.b.: Sebagian arsip berbahasa Inggris.
11 Maret - 31 Agustus 1953
pertinggal, asli
1 sampul

3433 Surat dari berbagai macam Organisasi Kemasyarakatan kepada Perdana Menteri tentang permintaan bantuan.
20 Mei 1953 - 17 September 1959
tembusan, asli
1 sampul

3434 Laporan mengenai Penyuluhan Sosial Umum oleh Kepala Kantor Sosial Daerah Karesidenan dilakukan dalam bulan-bulan terakhir ini meliputi seluruh Karesidenan Cirebon.

19 September 1953
fotokopi
1 sampul

3435 Surat Kabar Abadi No. 263 Tahun Ke-3 tentang biaya pemulangan warga Indonesia yang ada di Suriname.

16 November 1953
salinan
2 lembar

3436 Berkas mengenai permohonan bantuan guna penyelenggaraan pembangunan yang dikemudikan Sekolah Teknik Elektro & Radio (ELRA) oleh bekas pejuang & penderita cacat..

25 Januari 1954
tembusan
1 sampul

3437 Berkas mengenai bencana Gunung Merapi di Jawa Tengah Bulan Januari 1954, disertai peta dan foto.

Februari 1954 - 16 September 1955
pertinggal, asli, salinan
1 sampul

3438 Surat dari Yayasan Senopati kepada Menteri Pertahanan mengenai permohonan perhatian terhadap keluarga Ibu Pahlawan alm.Overste S.Soediarto.

28 September 1954
tembusan
1 lembar

3439 Surat-surat mengenai permohonan bantuan keluarga pegawai kapal kagean yang dibom kapal terbang Belanda di antara Pulau Kambing dan Pantai Probolinggo tanggal 4 Juli 1946.

17 Januari 1955 - Juni 1956
pertinggal, tembusan, asli
1 sampul

3440 Surat mengenai berita acara/timbang terima tentang pengoperan peraturan umum kecelakaan perang dari Kantor Urusan Pegawai kepada Kementerian Sosial, beserta lampiran.

02 Februari 1955
asli
1 sampul

3441 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Menteri Keuangan mengenai biaya untuk memperbaiki jalan, rumah sakit, jembatan dll akibat banjir di Sumatera Tengah.

29 April 1955

pertinggal
1 sampul

3442 Berkas mengenai RUU Rehabilitasi Penderita Cacat dan Rancangan PP tentang Bantuan Sosial kepada Penderita Cacat.
22 Juni 1956 & 30 Desember 1958
salinan, pertinggal
1 sampul

3443 Keputusan Perdana Menteri No.475/PM/1956 tentang Peraturan Sementara tentang Kedudukan Kepegawaian dari para Petugas Khusus Pembangunan Masyarakat Desa.
13 Desember 1956
salinan
3 lembar

3444 Berkas mengenai permohonan bantuan bagi Keluarga Sisingamangaradja.
17 Juli 1957 - 19 Juni 1959
fotokopi
1 sampul

3445 Surat-surat mengenai bahaya kelaparan di Banyumas Selatan.
27 Maret - 23 Juni 1957
tembusan, pertinggal
1 sampul

3446 Surat-surat mengenai permintaan tambahan kredit untuk urusan pengungsian tahun 1957 di dalam lingkungan kekuasaan koordinasi keamanan daerah.
5 Agustus 1957 - 15 Februari 1958
asli, pertinggal
1 sampul

3447 SK Perdana Menteri Nomor. 508.57/Keu.OT tentang Persetujuan Pemberian Kredit kepada Gubernur/Ketua Panitia Penampungan Korban Kekacauan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
06 Agustus 1957
salinan
3 lembar

3448 Surat-surat mengenai permohonan keterangan mengenai lotre.
2 & 20 September 1957
tembusan
3 lembar

3449 Berkas mengenai bantuan pada korban Peristiwa Cikini Raya.
7 - 23 Desember 1957
salinan, asli
1 sampul

3450 Surat-surat mengenai pertanyaan anggota DPR Mr. Imron Rosjadi tentang bencana banjir di Kabupaten Indramayu.

9 April - 9 Agustus 1958
tembusan, asli
1 sampul

3451 Surat dari Yayasan Kesejahteraan Rakyat Dairi Medan tentang permohonan sebidang tanah untuk perkampungan masyarakat Dairi.

01 Desember 1958
tembusan
5 lembar

3452 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Menteri Kesehatan mengenai Bantuan Uni Republik Soviet Sosialis (URSS) kepada RI dalam pemberantasan penyakit cacar.

12 Januari - 5 Maret 1959
pertinggal
1 sampul

3453 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Kementerian Sosial mengenai SK Perdana Menteri tanggal 3 Maret 1959 No. 83/P.M/1959 tentang Panitia Interdepartemental Urusan Bencana Alam Nasional, beserta lampiran.

3 Maret - 27 Mei 1959
pertinggal, salinan
1 lembar

f. Transmigrasi dan Pembangunan Masyarakat Desa

3454 Berkas mengenai status Kementerian Pembangunan Masyarakat Desa.

16 September - 16 Desember 1950
pertinggal, asli
1 sampul

3455 SK Menteri Perhubungan No. 2652/Ment tentang Pengangkatan A. Wahab sebagai Wakil dari Kementerian Perhubungan dalam Soal-Soal Transmigrasi.

14 Oktober 1950
salinan
1 lembar

3456 Surat-surat mengenai transmigrasi di Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara untuk ex. Bekas pejuang.

28 Desember 1950 - 30 Januari 1954
tembusan, asli, pertinggal
1 sampul

3457 Surat dari Wakil Perdana Menteri kepada Direktur Biro Rekonstruksi mengenai laporan penampungan untuk transmigrasi di Pulau Tujuh, beserta lampiran dan peta.

23 April 1951
pertinggal
1 sampul

3458 Surat dari Biro Rekonstruksi Nasional Pusat kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai status tanah untuk transmigrasi di Sumatera dan Kalimantan, lampiran peta.

9 Agustus 1951
tembusan
3 lembar

3459 Surat-surat mengenai transmigrasi di Kalimantan Barat.
20 September 1951 - 12 November 1953
pertinggal, tembusan
1 sampul

3460 SK Menteri Sosial No.Kab.10.6.20 dan surat Menteri Pertanian tentang transmigrasi dan menyerahkan pelaksanaan transmigrasi kepada Wakil Perdana Menteri
03 Desember 1951
salinan
1 sampul

3461 Surat-surat mengenai transmigrasi di Sulawesi.
7 November 1952 - 7 November 1953
pertinggal, asli, salinan
1 sampul

3462 Surat-surat mengenai alat-alat berat pertanian untuk transmigrasi.
22 Februari - 17 Maret 1952
asli, tembusan
1 sampul

3463 Surat-surat mengenai usul dan rencana 5 tahun transmigrasi.
29 Februari 1952 - 13 April 1959
pertinggal, asli
1 sampul

3464 Surat dari Menteri Sosial kepada Perdana Menteri Koordinator Transmigrasi mengenai uraian tentang transmigrasi (sumbangan untuk jawaban pemerintah atas pandangan umum dalam babak pertama) dari Menteri Sosial.
28 Mei 1952
asli
1 sampul

3465 Surat dari Biro Rekontruksi Nasional Pusat kepada Koordinator Transmigrasi mengenai anggaran belanja usaha transmigrasi tahun 1952, beserta lampiran.
27 Juni 1952
asli
4 lembar

3466 Daftar penyelenggaraan transmigrasi Tahun 1950 - 1952.
Januari 1953
asli
1 lembar

3467 Surat-surat mengenai keperluan tenaga kesehatan dan tenaga pamong praja di daerah transmigrasi.
2 Maret - 3 Juni 1953
pertinggal, salinan

1 sampul

3468 Nota dari Wakil Perdana Menteri selaku Koordinator Transmigrasi kepada Biro Perancang Negara mengenai pembentukan Bank-Bank Transmigrasi, beserta lampiran.

09 April 1953
pertinggal
1 sampul

3469 Surat-surat mengenai laporan Ahli Transmigrasi, Douglas Deane. n.b.: sebagian arsip berbahasa Inggris.

23 Mei - 10 September 1953
tembusan, salinan
1 sampul

3470 Berkas mengenai rapat *Working Committee* Transmigrasi.

13 Juli - 2 Desember 1953
pertinggal, asli
1 sampul

3471 Rencana jawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak ke I tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo - Wongsonegoro soal transmigrasi.

29 - 31 Agustus 1953
asli
1 sampul

3472 Surat-surat mengenai pemeriksaan kesehatan di daerah transmigrasi dan honor pemeriksaan bagi calon transmigranten.

12 September - 28 Oktober 1953
asli, tembusan
1 sampul

3473 Surat-surat mengenai transmigrasi khusus di Daerah Ceram, Maluku, beserta lampiran.

15 September 1953 - 20 Agustus 1954
asli, pertinggal
1 sampul

3474 Surat-surat mengenai pedoman transmigran Biro Rekonstruksi Negara tahun 1953.

31 Oktober 1953
asli
1 sampul

3475 Surat dari Biro Rekonstruksi Nasional Pusat kepada Menteri Keuangan mengenai permohonan otorisasi untuk biaya transmigrasi triwulan I tahun 1954, beserta lampiran.

15 Desember 1953
tembusan
1 sampul

3476 Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada Perdana Menteri mengenai pengiriman rombongan transmigrasi korban kekacauan ke Pangkulan Susu (Sumatera Utara).

30 April 1954
asli
2 lembar

3477 Surat dari Kepala Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai laporan tentang orang-orang transmigrasi (Sumatera Selatan) yang kembali ke Jawa.

11 September 1954
asli
1 lembar

3478 Surat dari Jawatan Transmigrasi Provinsi Sumatera Tengah kepada Jawatan Transmigrasi Pusat mengenai hasil pelaksanaan konsolidasi objek transmigrasi Kapar, beserta lampiran.

11 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

3479 Laporan mengenai pendapat-pendapat dari rombongan Yayasan Geografi ke Kerinci (Sumatera Tengah) Bulan Agustus - September 1955.

10 Maret 1955
salinan
1 sampul

3480 Surat-surat mengenai laporan Yayasan Pembukaan Tanah Transmigrasi.

9 Juli 1955 - 12 November 1958
asli, salinan
1 sampul

3481 Surat dari Kepolisian Negara kepada Perdana Menteri mengenai adanya transmigrasi bekas tawanan SOB di Kalimantan Timur.

31 Maret 1956
asli
1 sampul

3482 Surat dari Biro Pembangunan Masyarakat Desa kepada Kepala Jawatan Perjalanan mengenai anggaran biaya eksploitasi alat-alat pengangkutan berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI No. 506.57/Keu.OT tanggal 6 Agustus 1957.

13 Maret - 27 Desember 1957
tembusan
1 sampul

3483 Surat-surat mengenai tanah sekitar Gunung Merapi yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

17 Januari - 3 Juli 1958
asli
1 sampul

3484 Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Kedudukan Kepegawaian dari para Petugas Khusus dan Tenaga Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa beserta Akibat Keuangannya.

25 Januari 1958
salinan
2 lembar

3485 Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Urusan Perencanaan tentang Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Desa dalam Rangka Rancangan Pembangunan 5 Tahun (1956 - 1960).

12 Mei - 9 September 1958
tembusan
1 sampul

3486 Surat dari Kepala Bagian Keuangan kepada Bagian Rumah Tangga KPM mengenai profil dan kegiatan Biro Pembangunan Masyarakat Desa.

22 July 1958
salinan
1 sampul

3487 Surat dari Ketua Biro Pembangunan Masjaraakat Desa kepada Bupati Kabupaten Lebak Rangkas Bitung mengenai kepindahan Kepala Daerah Kerdja Cilangkahan.

29 Agustus 1958
tembusan
1 lembar

3488 Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Uang untuk diperhitungkan untuk Keperluan PMD atas Uang Sumbangan untuk Pembangunan Desa Provinsi Kalimantan Selatan.

01 September 1958
asli
1 sampul

3489 Surat dari Yayasan Pembebasan Tanah Transmigrasi kepada Dewan Pengurus JAPETA tentang lumsum 1958.

6 September 1958
tembusan
1 lembar

3490 Surat dari Kepala Daerah Kerja Gorontalo kepada Gubernur/Ketua Panitia Pembantu Teknis PMD Provinsi Sulawesi mengenai pergantian Kepala Daerah kerja PMD Gorontalo.

18 September 1958
tembusan
1 lembar

3491 Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tentang Penunjukan Sdr. Karim Usman Siregar sebagai Petugas Khusus Pembangunan Masyarakat Desa pada Provinsi Sumatera Utara terhitung mulai tanggal 1 November 1958.

16 Oktober 1958
salinan
1 lembar

3492 Surat-surat mengenai PP Tahun 1959 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan Transmigrasi sedaerah Transmigrasi Lokal kepada Daerah-Daerah.

16 Januari - 16 Juli 1959
pertinggal
1 sampul

3493 Surat mengenai penyampaian rencana penyebaran penduduk secara integral massal dan rasionil dalam periode 1959 sampai dengan 1968, beserta lampiran.

12 Maret 1959
pertinggal
1 sampul

3494 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa mengenai pengisian blanko ikhtisar pekerjaan di sekitar proyek-proyek pembangunan yang telah terlaksana (checklist).

Agustus - September 1959
pertinggal
1 sampul

3495 Surat dari Kepala Daerah Gorontalo kepada Gubernur/Ketua Panitia Pembantu Teknis Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi mengenai permohonan tindasan SK Perdana Menteri No.93.58/Keu.O.T.

12 Desember 1959
tembusan
2 lembar

5. URUSAN PARLEMEN

a. Penyelesaian Perundang-undangan

3496 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian RUU Darurat tentang Memasukkan Pulau Weh ke Dalam Daerah Pabean dengan penjelasannya.

29 Agustus - 12 September 1950
asli
1 sampul

3497 Berkas mengenai penyelesaian RUU tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung, beserta lampiran.

2 Oktober 1950 - 11 Januari 1951
asli
1 sampul

3498 Surat Keputusan DPR No.38/K/1950, No.39/K/1950, No.17/K/1951, No.18/K/1951,

No.2/K/1957, No.3/K/1957, No.4/K/1957, No.5/K/1957, No.33/K/1952, No.35/K/1952

12 Oktober 1950 - 11 Agustus 1952

tembusan
1 sampul

3499 Berkas mengenai proses pengesahan UU tentang Penetapan UU Darurat tentang Hak Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai-Pegawai RIS (UU Darurat No.25 dan No.34 Tahun 1950).

25 Oktober 1950 - 01 Februari 1951
asli, fotokopi
1 sampul

3500 Berkas mengenai RUU penetapan UU Darurat No. 33 tahun 1950 tentang Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota sebagai UU.

31 Oktober 1950 - 14 September 1954
tembusan
1 sampul

3501 Surat dari Presiden kepada Ketua DPR mengenai penyampaian RUU tentang Peraturan Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Putusan dan Surat-Surat Pemeriksaan

27 November 1950
tembusan
3 lembar

3502 Daftar RUU.

1951 - 1956
fotokopi
2 lembar

3503 Surat dari Presiden Soekarno kepada Ketua DPR tentang penetapan UU (UU Darurat No.12/1950 dan No.38/1950).

11 Januari 1951
tembusan
2 lembar

3504 Berkas mengenai RUU Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan-Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sebagai UU.

13 Januari 1951 - 28 Maret 1953
tembusan
1 sampul

3505 Berkas mengenai RUU tentang Anggaran Belanja Negara untuk Tahun 1950 dan 1951.

6 Februari - 16 Maret 1951
tembusan
1 sampul

3506 Berkas mengenai usul UU tentang Perjanjian mengenai Syarat-Syarat Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan.

22 Februari 1951 - 22 Mei 1954
tembusan

1 sampul

3507 Berkas mengenai rancangan dan penjelasan UU tentang Usulan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

03 Maret 1951
asli
1 sampul

3508 Berkas mengenai RUU usul inisiatif DPR tentang Hak Khusus Hukum Acara Pidana untuk Anggota DPR dan perubahan Kitab Hukum Pidana pasal 333 dan 334.

07 Maret 1951 - 03 Februari 1954
tembusan
1 sampul

3509 Berkas mengenai Penetapan UU Darurat No.14 Tahun 1952 tentang Perubahan dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan sebagai UU.

10 Juli 1951 - 29 Januari 1955
tembusan
1 sampul

3510 Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua DPR mengenai cara mendapatkan pengumuman, peraturan-peraturan pemerintah atau penetapan penetapan menteri secara berlangganan.

14 Agustus - 21 September 1951
pertinggal
4 lembar

3511 Berkas mengenai perubahan perundang-undangan No.15/50 tentang Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adi Kerto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi 1 Kabupaten dengan nama Kulon Progo.

16 Agustus - 24 September 1951
tembusan
1 sampul

3512 Surat dari Kementerian Urusan Pegawai kepada Direktur Kabinet Presiden mengenai RUU tentang Larangan Merangkap Keanggotaan DPR.

24 Oktober - 17 November 1951
tembusan
1 sampul

3513 Berkas penyusunan RUU tentang mengubah UU No 9 tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas anggota DPR.

7 November 1951 - 5 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

3514 Berkas mengenai RUU tentang Perikanan Laut Indonesia.

10 November - 14 Desember 1951
tembusan
1 sampul

3515 Berkas mengenai penetapan UU Darurat No.3 tahun 1952 tentang mengadakan bea keluar tambahan sementara.

4 - 27 Februari 1952
tembusan
1 sampul

3516 Berkas mengenai penyusunan UU tentang penetapan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pengadaan Pajak Peredaran 1950 dan UU Darurat Nomor 38 Tahun 1950 tentang Tambahan dan Perubahan UU Pajak Peredaran 1950.

30 April 1952 - 19 Desember 1953
tembusan
1 sampul

3517 Berkas mengenai RUU tentang lapangan ketentaraan.

13 Mei 1952 - 29 Januari 1953
tembusan
1 sampul

3518 Berkas mengenai RUU dan penetapan UU Darurat No.7 Tahun 1950 (lembaran Negara No.9 Tahun 1950) tentang Perguruan Tinggi.

14 Juli 1952 - 13 Februari 1956
tembusan
1 sampul

3519 Berkas mengenai RUU Darurat tentang Penentuan Harga Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada *De Javasche Bank* dengan penjelasannya.

11 Juli 1952 - 21 April 1953
tembusan
1 sampul

3520 Berkas mengenai RUU tentang Daftar Pemilih.

22 Juli 1952 - 10 Oktober 1953
tembusan
1 sampul

3521 Surat dari Wakil Ketua I DPR Kepada Perdana Menteri mengenai pembaharuan amanat Presiden terkait proses pengajuan RUU.

24 Juli & 31 Juli 1952
fotokopi
2 lembar

3522 Berkas mengenai RUU tentang Pengisian Lowongan DPR dan RUU Penggantian Anggota DPR.

30 Juli 1952 - 29 Desember 1953
tembusan
1 sampul

3523 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada Ketua DPR mengenai memori jawaban atas laporan Bagian DPR mengenai RUU tentang Penimbunan Barang-Barang.
13 September 1952
tembusan
1 sampul

3524 Berkas penyusunan RUU tentang Kependudukan Orang Asing.
28 September 1952 - 16 Maret 1955
tembusan
1 sampul

3525 Berkas mengenai Rancangan UU tentang Hak Angket DPR.
04 Oktober 1952 - 09 Februari 1954
asli
1 sampul

3526 Berkas mengenai RUU tentang Perjanjian Pos Sedunia.
21 Oktober 1952 - 31 Juli 1954
asli
1 sampul

3527 Berkas mengenai RUU tentang pemilihan anggota DPR dan Konstituante.
22 November 1952 - 13 Mei 1954
tembusan
1 sampul

3528 Surat dari Ketua DPR kepada Menteri Kesehatan mengenai RUU tentang Pembukaan Apotek.
23 Desember 1952
tembusan
1 sampul

3529 Berkas mengenai RUU tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah.
1953
tembusan
1 sampul

3530 Berkas mengenai RUU tentang Pengembalian Tanah-Tanah Partikelir menjadi Tanah Negara.
Januari 1953 - Maret 1957
tembusan
1 sampul

3531 Berkas mengenai RUU tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan.
14 Januari 1953
tembusan
1 sampul

3532 Berkas mengenai pengesahan usul UU Darurat No. 3 Tahun 1954 tentang *Indonesische Bedrijvenwet* sebagai UU.

19 Januari 1953 - 31 Desember 1959
tembusan
1 sampul

3533 Berkas mengenai RUU untuk mengganti UU No. 22/48 tentang Pokok Pemerintahan Daerah.

22 Januari - 18 November 1953
asli
1 sampul

3534 Berkas tentang penyusunan RUU tentang Pengadaan Rumah Penjara Tentara di Padang dan Makassar.

27 Januari - 17 November 1953
tembusan
1 sampul

3535 Ikhtisar pekerjaan di lapangan perundang-undangan dari Kementerian Keuangan dalam Bulan Januari 1953.

12 Februari 1953
asli
2 lembar

3536 Berkas mengenai RUU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Acara Pengadilan Sipil.

19 Maret 1953 - 21 Juli 1954
tembusan
1 sampul

3537 Surat dari Menteri Perhubungan kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai RUU Darurat tentang Pembelian, Penyimpanan, Persediaan dan Pengangkutan Kawat Tembaga.

21 Maret 1953
asli
2 lembar

3538 Berkas mengenai RUU tentang Peraturan Penagihan Penghasilan Lebih yang Terhutang kepada Negara.

18 April 1953 - 24 Mei 1954
tembusan
1 sampul

3539 Berkas mengenai pertanyaan Seksi-Seksi dari DPR terkait RUU Anggaran RI untuk tahun dinas 1952/1953.

18 Mei 1953 - 05 April 1954
asli
1 sampul

3540 Laporan Bagian-Bagian DPR Tahun Sidang 1953 mengenai RUU penetapan UU Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan sebagai UU.

22 Mei - 01 Juni 1953
fotokopi
1 sampul

3541 Berkas mengenai RUU untuk mengubah "*Indonesiche Comptabiliteitswet*" atau Peraturan tentang Keuangan di Indonesia (Stbl.1425 no.488) dan *"Indonesische Bedrijvenswet"* atau Peraturan tentang Perusahaan-Perusahaan di Indonesia (Stbl.1927 no.419).

27 Mei 1953
tembusan
1 sampul

3542 Laporan mengenai pertemuan Ketua dan Wakil Ketua I DPR dengan Perdana Menteri Demisioner tanggal 4 Juli 1953 mengenai Perundang-undangan di masa Kabinet Demisioner.

2 - 7 Juli 1953
asli
1 sampul

3543 Berkas mengenai RUU tentang Usul Inisiatif DPR tentang Hak Angket.

21 Juli 1953
salinan
1 sampul

3544 Berkas mengenai RUU tentang Pencabutan Ordonansi *Uitveerverbod Plantenmateriaal* Negara Sumatera Timur 1949.

27 Agustus 1953 - 27 Februari 1954
tembusan
1 sampul

3545 Berkas mengenai RUU tentang Larangan Pemakaian Tanah oleh Pihak yang Tidak Berhak.

1 Oktober 1953 - 2 Desember 1954
tembusan
1 sampul

3546 Berkas mengenai RUU tentang Gerombolan-Gerombolan Bersenjata yang Ditetapkan sebagai Perkumpulan Terlarang.

10 Oktober 1953 - 05 Februari 1954
fotokopi
1 sampul

3547 Berkas mengenai RUU Nomor 6 tahun 1950 (lembaran Negara 1950 Nomor 53) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara.

17 Oktober - 14 November 1953
tembusan
1 sampul

3548 Berkas mengenai penetapan UU Darurat No 1 tahun 1954 tentang mempersatukan *opsenten* yang berlaku dalam pokoknya, kenaikan bea atas alkohol sulingan dalam negeri dan bir dan kenaikan bea masuk atas bir sebagai UU.
20 Oktober 1953 - 12 April 1954
tembusan
1 sampul

3549 Berkas mengenai usul-usul perubahan Pemerintah atas RUU Usul Inisiatif DPR tentang Hak Khusus Hukum Acara Pidana untuk Anggota DPR dan Perubahan Kitab Hukum Pidana pasal 333 dan 334.
03 November 1953 - 08 Januari 1954
asli
1 sampul

3550 Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua DPR mengenai penyelesaian perundang-undangan dalam lapangan kepegawaian dan peraturan devisen, beserta lampiran.
25 November - 22 Desember 1953
pertinggal
4 lembar

3551 Berkas mengenai RUU tentang Pengadaan *Opsenten* atas Cukai Kerosen, Bensin, Gula dan Saccharin dan sebagainya.
9 Desember 1953 - 12 April1954
tembusan
1 sampul

3552 Laporan mengenai RUU tentang Kewarganegaraaan Indonesia pada Tahun Sidang 1954
fotokopi
1 sampul

3553 Berkas mengenai penyusunan RUU tentang Penetapan Anggaran Belanja 1954.
1954
asli
1 sampul

3554 Berkas mengenai pembahasan RUU tentang Penyelesaian Darurat Palitan oleh DPR.
1954 - 1956
tembusan
1 sampul

3555 Berkas mengenai penyusunan UU tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

5 Januari - 13 November 1954
tembusan
1 sampul

3556 Berkas mengenai penyusunan RUU tentang Pemilihan Anggota-Anggota DPR Daerah Sementara.

13 Januari - 26 Agustus 1954
tembusan
1 sampul

3557 Berkas mengenai penyusunan UU tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

5 Februari - 28 Oktober 1954
tembusan
1 sampul

3558 Laporan Bagian - bagian DPR Tahun Sidang 1954 mengenai penetapan UU Darurat Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing sebagai UU.

06 - 17 Februari 1954
asli
1 sampul

3559 Berkas mengenai RUU tentang Undian.

10 Februari - 13 April 1954
tembusan
1 sampul

3560 Surat-surat mengenai pengesahan usul UU tentang Pencabutan *Persbreidel-Ordonantie.*

5 April - 12 Juli 1954
tembusan
1 sampul

3561 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang Biaya Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.

6 April 1954 - 13 April 1955
tembusan
1 sampul

3562 RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Pencegahan Pajak Ganda antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda serta Memorandum Kementerian Keuangan.

8 Juni 1954 - 26 November 1955
salinan, fotokopi
1 sampul

3563 Surat dari Wakil Perdana Menteri II kepada Dewan Menteri mengenai prioritas pembicaraan rencana UU dalam rapat DPR-RI.

16 Juli 1954
asli

1 sampul

3564 RUU tentang Protokol Pembubaran Uni Indonesia Belanda.

16 Agustus 1954
tembusan
1 sampul

3565 Berkas mengenai penetapan UU Darurat Nomor. 3 tahun 1954 tentang mengubah "*Indonesische Comptabiliteitswet*" (Staatsblad 1925 Nomor. 448) dan "*Indonesische Bedrijvenwet*" (Staatsblad 1927 Nomor. 419) sebagi UU.

08 September 1954
tembusan
1 sampul

3566 Berkas mengenai RUU tentang Perubahan Aturan Bea Meterai 1921 (*Zegel Verordening* 1921).

2 November 1954 - 26 Desember 1956
tembusan
1 sampul

3567 Berkas mengenai RUU tentang Pengesahan Persetujuan Pinjaman Tambahan RI dengan Eksport-Import *Bank of Washington* pada tanggal 3 Desember 1954.

6 Desember 1954
tembusan
1 sampul

3568 RUU Darurat tentang Peradilan Pidana Khusus dan Penilikan Harta Benda.

1955
Konsep, fotokopi
1 sampul

3569 Pokok-pokok RUU tentang Penyelesaian Perburuhan.

1955
fotokopi
3 lembar

3570 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

1955
fotokopi
1 sampul

3571 Rancangan Undang-undang tentang Bintang Jasa Militer untuk Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

1955
fotokopi
1 sampul

3572 RUU tentang Mengubah Kitab UU Hukum Pidana.

1955
konsep
2 lembar

3573 Berkas mengenai RUU tentang Pembayaran Istimewa.

19 Januari - 16 Maret 1955
asli
1 sampul

3574 Berkas mengenai RUU No. 9 Tahun 1953 tentang Tunjangan Pensiun kepada Bekas Anggota DPR.

19 Januari - 31 Maret 1955
tembusan
1 sampul

3575 Berkas mengenai laporan-laporan bagian RUU tentang persetujuan-persetujuan yang dapat disahkan dengan tidak perlu disetujui dengan UU

29 Januari - 3 Maret 1955
tembusan
1 sampul

3576 Berkas mengenai RUU Darurat tentang Perubahan UU Pemilihan Umum (UU No.7 Tahun 1953).

31 Januari 1955 - 7 Februari 1956
tembusan
1 sampul

3577 Surat dari Ketua DPR kepada Menteri Pertahanan mengenai RUU tentang Pengadaan Rumah Penjara Tentara di Padang dan Makassar (P.23/1954).

3 Februari 1955
tembusan
2 lembar

3578 Berkas mengenai RUU Darurat tentang larangan untuk mengumpulkan mata uang logam yang sah dan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah.

11 Februari 1955 - 1 September 1956
tembusan
1 sampul

3579 Berkas mengenai RUU tentang Pertambangan dan Minyak.

1 Maret 1955 - 27 April 1959
tembusan
1 sampul

3580 Berkas mengenai RUU tentang Oktroi.

15 Maret - 15 Juli 1955
tembusan
1 sampul

3581 Berkas mengenai pengesahan usul UU tentang Perubahan dan Tambahan *Indische Tariefwet* .

31 Maret 1955 - 8 September 1956
tembusan
1 sampul

3582 Berkas mengenai penetapan RUU Darurat Nomor 8 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi sebagai UU.

16 Mei - Agustus 1955
konsep
1 sampul

3583 UU Darurat No.11 Tahun 1955 tentang perubahan UU darurat tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil.

06 Juni 1955
fotokopi
1 lembar

3584 Berkas mengenai RUU tentang pengubahan peraturan tentang cara pendaftaran dan pemindahan tanah-tanah milik agraris (*agrarisch eigendom*) dan pendaftaran hipotik atas tanah-tanah milik agraris itu.

19 Juli 1955 - 29 September 1956
tembusan
1 sampul

3585 Berkas mengenai RUU tentang Penetapan UU Darurat mengenai Kependudukan Orang Asing sebagai UU.

21 Juli 1955
konsep
1 sampul

3586 Berkas mengenai penyusunan Rencana UU tentang Dewan Perancang Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Tertib Dewan Perancang Nasional.

4 September-19 Agustus 1959
asli
1 sampul

3587 Berkas mengenai penetapan UU Darurat No. 15 tahun 1950 tentang penyelesaian urusan pemulihan hak sebagai UU.

11 Oktober - 19 Desember 1955
tembusan
1 sampul

3588 Berkas mengenai UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (lembaran Negara 1954 No.146).

15 Oktober 1955
fotokopi
4 lembar

3589 Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agraria mengenai Undang-Undang Agraria.

26 October 1955
salinan, fotokopi
1 lembar

3590 Berkas mengenai RUU Darurat tentang jangka waktu masa kerja anggota DPRD.

7 Januari - 19 Maret 1956
tembusan
1 sampul

3591 Berkas mengenai RUU tentang persetujuan Konferensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98.

4 Februari - 21 Agustus 1956
tembusan
1 sampul

3592 Berkas mengenai RUU tentang pemilihan anggota DPR Daerah.

9 Februari - 28 November 1956
tembusan
1 sampul

3593 Surat dari DPR kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan usul UU mengenai daerah otonom kota besar di Sumatera Tengah.

27 Februari 1956
asli
1 sampul

3594 Daftar RUU yang telah mendapat persetujuan kabinet-kabinet yang lampau tetapi belum diajukan kepada DPR (disusun sampai tanggal 23 Maret 1957).

24 Maret 1956 - 9 April 1957
fotokopi
1 sampul

3595 Berkas mengenai usul UU tentang pembentukan propinsi Irian Barat.

15 Mei - 23 Agustus 1956
asli
1 sampul

3596 Surat dari DPR kepada Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan tentang RUU Pendidikan Masyarakat.

01 Juni 1956

tembusan
2 lembar

3597 Berkas mengenai RUU tentang veteran.
16 Agustus 1956 - 23 November 1957
asli
1 sampul

3598 Berkas mengenai RUU usul Inisiatif DPR tentang Pertanggungan Jawab Kepidanaan Menteri.
29 September 1956 - 9 Februari 1957
asli
1 sampul

3599 Berkas mengenai RUU tentang Pimpinan Kepolisian, Kehakiman & Kedudukan Jaksa Agung.
26 Oktober 1956 - 29 Juni 1957
tembusan
1 sampul

3600 Berkas mengenai UU Nomor 23 tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante.
29 November 1956 - 11 Januari 1957
tembusan
1 sampul

3601 Berkas mengenai RUU tentang Pemasukan dan Berlakunya Anggaran Belanja Negara.
15 Desember 1956 - 11 Maret 1957
asli
1 sampul

3602 Berkas mengenai RUU tentang Mengubah dan Menambah UU Penetapan Bagian I dari Anggaran RI untuk tahun dinas 1957.
1957
konsep
1 sampul

3603 RUU tentang Penetapan UU Darurat mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante (UU Darurat Nomor 15 tahun 1957, lembaran Negara Nomor 62 tahun 1957), sebagai UU.
1957
konsep
5 lembar

3604 Tambahan lembaran-lembaran Negara RI Nomor 7 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan dan Nomor 2 Thun 1958 tentang Panitia-panitia Kerja Likuidasi Tanah Partikular.
1957-1958

asli
1 sampul

3605 Berkas mengenai RUU tentang mengubah peraturan tuntutan ganti rugi.
12 Februari 1957
asli
1 sampul

3606 Surat dari DPR kepada Perdana Menteri mengenai pengesahan usul UU tentangi Rancangan Anggaran Tambahan untuk tahun dinas 1953.
13 Februari 957
tembusan
1 sampul

3607 Surat-surat mengenai RUU tentang rencana pembangunan lima tahun (1956-1960).
2 Maret 1957 - 30 Mei 1958
salinan
1 lembar

3608 Surat dari DPR kepada Perdana Menteri mengenai usul UU tentang Perimbangan Keuangan Negara dan Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
13 April 1957
asli
1 sampul

3609 Surat dari Sekjen DPR kepada Perdana Menteri mengenai RUU yang belum dibicarakan DPR (Disusun sampai akhir sidang I DPR tanggal 23-3-1957).
08 Mei 1957
asli
1 sampul

3610 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Perdana Menteri mengenai penyelesaian RUU Keadaan Darurat, Keadaan Bahaya dan Militer Sukarela.
24 Mei 1957
asli
1 sampul

3611 Rancangan Peraturan Penguasa Perang Pusat/KSAD tentang Beberapa hal mengenai kewarganegaraan.
14 Agustus 1957 - 15 April 1958
asli
1 sampul

3612 Surat dari DPR kepada Perdana Menteri mengenai usul resolusi Achmad Dara Sjahruddin dkk untuk menyelesaikan kebijakan pemerintah tentang UU Darurat.
21 Agustus 1957
asli
1 sampul

3613 Berkas mengenai RUU Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Luar dan di Hadapan Pengadilan.

1 - 2 November 1957
konsep
1 sampul

3614 Berkas mengenai Penetapan UU Darurat No.09 Tahun 1954 (lembaran Negara No.66)

tentang pengubahan nama propinsi Sumatra Kecil menjadi Nusa Tenggara sebagai UU.

14 Desember 1957
tembusan
1 sampul

3615 Jawaban Pemerintah mengenai Pemandangan Umum Babak Kedua, tentang RUU Pembangunan Lima Tahun 1956 - 1960, dihadapan Sidang Pleno DPR, tanggal 23 September 1958.

1958
fotokopi
1 sampul

3616 Surat Menteri Agama kepada Sekretaris Dewan Menteri mengenai soal-soal yang belum diselesaikan oleh Kabinet-kabinet yang lampau (amandemen atas RUU Pernikahan Umat Islam).

31 Januari 1958
asli
1 sampul

3617 Berkas mengenai RUU Darurat tentang peraturan UU Mata Uang 1953.

27 Maret -9 September 1958
tembusan
1 sampul

3618 Berkas mengenai RUU tentang Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita.

07 Mei 1958
salinan
1 sampul

3619 Berkas mengenai RUU tentang Keadaan Bahaya.

27 Juni - 1 Desember 1958
tembusan
1 sampul

3620 Berkas mengenai RUU tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR.

01 July 1958
asli
1 sampul

3621 Berkas mengenai RUU tentang perubahan dan tambahan UU Lalu Lintas Djalan.
6 Agustus - 15 Oktober 1958
tembusan
1 sampul

3622 Laporan gabungan DPR tentang UU Darurat tentang pembatalan Hak-hak pertambangan.
04 September 1958
tembusan
1 sampul

3623 Berkas mengenai RUU tentang Badan Koordinasi Intelegence.
17 September 1958
konsep
1 sampul

3624 RUU tentang penetapan UU Daroerat tentang Pindjaman Darurat menjadi UU.
1959
konsep
1 sampul

3625 Berkas mengenai Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.
1959
fotokopi
1 sampul

3626 Surat dari Panitia Interdepartemental wajib latih/P3R kepada Perdana Menteri mengenai RUU wajib Latih & RUU P3R.
02 Juli 1959
asli
1 sampul

3627 Berkas jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Babak I DPR mengenai RUU Tambahan Anggaran Belanja 1958 - 1960.
1960
fotokopi
1 sampul

3628 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada Presiden mengenai perubahan tambahan UU Darurat No.3 Tahun 1959 tentang pinjaman obligasi berhadiah tahun 1959.
14 April - 29 April 1960
pertinggal
1 sampul

b. Mosi & Interpelasi

3629 Surat dari Ketua DPRS kepada Perdana Menteri mengenai penyampaian Keputusan DPRS RI No.27/K/1950 tanggal 25 September 1950 tentang Mosi menentukan upah terendah sementara dan menetapkan peraturan-peraturan kerja.

26 September 1950
asli
3 lembar

3630 Berkas mengenai jadwal pemberian jawaban dalam pemandangan umum DPR babak II tentang program kabinet.

16 - 21 Oktober 1950
asli
2 lembar

3631 Mosi DPRDS Kota Probolinggo supaya Negara RI terusun dalam tiga tingkatan: propinsi, kabupaten/kota dan desa.

28 November 1950
salinan
2 lembar

3632 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR, Ny. Rangkayo Rascena Said mengenai penahanan beberapa warga negera Belanda dan penangkapan Walikota Manado.

12 Desember 1950 - 2 Juni 1951
tembusan
1 sampul

3633 Surat dari Ketua DPR kepada Menteri Tenaga Pekerjaan Umum tentang pertanyaan anggota DPR Sdr.Kobarsjih mengenai kenaikan tarif listrik.

9 Desembar 1950
tembusan
2 lembar

3634 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR, R.Soerjoningprojo tentang RUU Perguruan Tinggi.

29 Desember 1950
tembusan
1 sampul

3635 Surat-surat jawaban pemerintah atas pemandangan DPR babak I mengenai masalah Irian Barat, dengan lampiran.

3 Januari - 12 Maret 1951
asli
1 sampul

3636 Berkas mengenai interpelasi Mr. Moh. Daljono dkk, mengenai peristiwa Madiun 1948.

12 Februari 1951 - 31 Juli 1952
asli
1 sampul

3637 Surat dari Ketua DPR kepada Menteri Pertanian dan Perindustrian mengenai pertanyaan-pertanyaan anggota DPR tentang Kementerian Pertanian dan Perdagangan & Perindustrian.

10 April 1951
tembusan
2 lembar

3638 Mosi DPRDS Kota Besar Bandung tentang peninjuan kembali lisensi-lisensi pertenunan dan perindustrian tenun di Bandung.

21 April - 24 Oktober 1951
salinan
2 lembar

3639 Resolusi DPRDS kota besar Bogor tentang pemungutan pajak pemotongan dan Mosi tentang Keuangan.

12 Juni 1951
salinan
1 sampul

3640 Berkas mengenai peninjauan dan pertanyaan-pertanyaan Seksi Keamanan Dalam Negeri DPR.

25 Juli 1951
asli
1 sampul

3641 Surat dari Wk.Ketua DPR kepada Menteri Pertanian mengenai Pertanjaan anggota DPR S.Oetarjo tentang rawa - rawa daerah Bekasi yang disewakan kepada perseorangan.

12 Agustus & 16 September 1951
tembusan
3 lembar

3642 Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga kepada Ketua DPR mengenai jawaban dari pernyataan seksi PUT DPR terkait likuidasi dan peleburan CSW ke dalam Jawatan Perumahan Rakyat.

20 Agustus 1951 - 16 Juni 1952
tembusan
3 lembar

3643 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pemandangan DPR dalam babak II terhadap masalah yang berpokok pada isi surat Kol. Bambang Soepeno, 10 Oktober 1952.

25 Agustus 1951 - 27 Oktober 1952
asli
1 sampul

3644 Berkas mengenai usul interpelasi Amelz dan W.Wondoamiseno cs terkait masalah penundaan keberangkatan jamaah haji dan penetapan Hari Raya Idul Fitri.

01 September 1951
tembusan
1 sampul

3645 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. F.A.P. Pitoi mengenai *Coprafonds* dan demontrasi beras di kota Menado.

10 September - 16 Oktober 1951
tembusan
1 sampul

3646 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR I.G.G. Raka tentang kekeruhan disekitar pemerintahan swapraja-swapraja; Bima, Dompu, Sumbawa.

07 September - Desember 1951
tembusan
1 sampul

3647 Surat dari Kementerian Perekonomian kepada DPR mengenai status dan pekerjaan *Kapok Centrale* .

26 September 1951
tembusan
3 lembar

3648 Surat dari Menteri Kehakiman kepada Ketua DPR mengenai jawaban atas pertanyaan Seksi Kehakiman DPR tentang RUU Anggaran Negara RI tahun 50/51.

25 Oktober 1951
tembusan
1 sampul

3649 Berkas mengenai MOSI No. 17 dari DPRDS Jawa Barat tentang penyamaan susunan (formasi) pegawai dari semua kantor/jawatan.

01 November 1951
salinan
1 sampul

3650 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai mosi Sunardi dan Interpelasi Tan Po Gan dkk. tentang penangkapan pada Agustus 1951.

14-21 November 1951
asli
1 sampul

3651 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR S.Djojoprajitno tentang larangan pengibaran panji "Banteng".

23 November 1951
tembusan
1 sampul

3652 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR tentang 6 orang bupati di Sumatera timur, masalah tebu rakyat di Malang dan perfilman.

14 Desember 1951
salinan
1 lembar

3653 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR, Abdullah Yusuf tentang penahanan 100 orang di Padang Sidempuan.

17 Desember 1951
tembusan
1 sampul

3654 Berkas tentang pertanyaan anggota DPR K.Werdoyo mengenai sensus yang telah dijalankan terhadap surat-surat SOBSI.

22 Desember 1951
tembusan
1 sampul

3655 Berkas mengenai rencana jawaban pemerintah atas Laporan Gabungan DPR tentang RUU Penganti Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950, beserta lampiran.

11 Januari - 14 Januari 1952
asli
1 sampul

3656 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR tentang surat dari panitia pembentukan front persatuan tani di Makassar yang disensur

18 Januari - 9 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

3657 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR, AMJ Rasjidi tentang berlakunya SOB dan pemerintahan militer di Bangka Belitung.

14 Februari 1952
tembusan
4 lembar

3658 Berkas mengenai Mosi DPRDS Jawa Barat tentang pekerjaan pembangunan yang ditawarkan kepada pemborong.

20 Maret- 12 Agustus 1952
tembusan
1 sampul

3659 Surat dari Dewan Pemerintahan Daerah Jawa Barat kepada Perdana Menteri mengenai mosi tentang Perindustrian Nasional.

26 April 1952
asli
4 lembar

3660 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai mosi I.J. Kasimo cs tentang kesempatan kepada pemerintah untuk melanjutkan pekerjaannya.

20 Juni 1952
asli
2 lembar

3661 Berkas mengenai pertanyaan-pertanyaan para anggota DPR kepada Pemerintah tentang beberapa masalah

19 Januari 1951 - 31 Juli 1952
tembusan
1 sampul

3662 Surat pernyataan SBGLI cabang Lampung mengenai resolusi DPRDS tentang Residen Lampung.

11 November 1952
asli
2 lembar

3663 Surat dari menteri Kehakiman kepada Ketua DPR tentang perlakukan CPM Cirebon terhadap Kho Kwar Thay.

04 Desember 1952
asli
1 lembar

3664 Daftar pertanyaan anggota DPR yang belum terjawab selama beberapa kabinet.

1953
asli
1 sampul

3665 Surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Dewan Menteri mengenai jawaban pemerintah tentang RUU Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR.

23 Januari 1953
fotokopi
1 sampul

3666 Surat dari Ketua DPR kepada menteri Penerangan mengenai pidato tentang Pancasila di RRI oleh Jawatan Penerangan Jawa Barat..

27 Februari 1953
tembusan
4 lembar

3667 Daftar pertanyaan anggota DPR tentang keterangan pemerintah mengenai soal-soal sekitar peristiwa 17 Oktober 1952 untuk dibicarakan dalam sidang kabinet.

03 Maret 1953
fotokopi
5 lembar

3668 Surat dari DPR kepada anggota DPR H.Sirajudin Abbas mengenai jawaban pemerintah tentang masalah kedutaan di Jeddah..

27 Maret 1953
tembusan
2 lembar

3669 Surat dari sekretariat DPR kepada anggota DPR Moh. Yamin mengenai yayasan pemerintah.

07 April 1953
tembusan
1 sampul

3670 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai mosi D.Rondonuwu dkk tentang pembukaan perwakilaan RI di Uni Soviet.

18 April 1953
asli
3 lembar

3671 Surat dari Jawatan Kepolisian Negara kepada Kabinet Perdana Menteri tentang mosi kesatuan mata uang Indonesia.

15 Mei 1953
fotokopi
2 lembar

3672 Surat dari Kementerian Perburuhan kepada Ketua DPR (DPR) RI tentang pernyataan protes Serikat Buruh Perkebunan RI (Surbupri) tentang usaha mencegah masa *onstlag* .

12 Agustus 1953
tembusan
3 lembar

3673 Berkas mengenai jawaban Pemerintah Kabinet Ali Sastroamidjojo terhadap Pemandangan Umum babak ke I dan ke II DPR tentang pembentukkan Kementerian Agraria.

19 Agustus - 6 Oktober 1953
asli
1 sampul

3674 Surat-surat dari Kementerian Agama RI kepada Perdana Menteri mengenai rancangan jawaban pemerintah dalam sidang pemandangan umum DRP RI babak I soal Susunan Kementerian Agama.

29 Agustus - 1 September 1953
asli
4 lembar

3675 Mosi Ketua DPRD bagian Bolaang Mongondow tentang status daerah bagian Bolaang Mongondow.

16 Desember 1950 & 16 September 1953

salinan
1 sampul

3676 Surat dari menteri Keuangan kepada Perdana Menteri tentang pertanyaan seksi-seksi DPR Urusan Perekonomian.

28 Oktober 1953
asli
1 sampul

3677 Notulen rapat anggota DPR mengenai usul mosi Mr. Tan Po Guan dkk tentang surat jaksa Agung tanggal 10 Oktober kepada PWI Jakarta.

01 November 1953
fotokopi
1 sampul

3678 Surat dari panitia pembahasan DPRDS/DPDS kepada Perdana Menteri mengenai mosi tidak percaya kepada walikota oleh DPRD kota besar Cirebon.

01 Desember 1953
asli
1 sampul

3679 Surat dari Ketua DPR kepada menteri Kehakiman mengenai pertanyaan tentang penyumpahan anggota-anggota Panitia Pemilihan Indonesia.

05 Desember 1953
tembusan
1 sampul

3680 Berkas mengenai interpelasi DPR tentang kehidupan, gaji dan kedudukan pegawai negeri.

28 April 1954 - 31 Juli 1954
asli
1 sampul

3681 Berkas mengenai mosi dari Jusuf Wibisono dkk tentang ketidakpercayaan kepada Kabinet Ali Sastroamodjojo.

11 November - 14 Desember 1954
asli
1 sampul

3682 Berkas mengenai mosi dari Amelz dkk tentang tanda gambar PKI dan orang tak berpartai.

24 - 31 Januari 1955
tembusan
1 sampul

3683 Surat dari menteri Kehakiman kepada Ketua DPR tentang pernyataan anggota DPR Mr. Tjoa Sie Hwie mengenai *Parisjache Conventie*, UU mengenai *Octrooi, voorrangsrechen, wederkerigheiddsverklaring* dengan Jerman.

25 Agustus 1955
tembusan
4 lembar

3684 Mosi tidak percaya dari PNI cabang Sumba barat terhadap Dewan Pemerintah Daerah Sumba.

31 Maret 1956
tembusan
5 lembar

3685 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Siauw Giok Tjhan tentang 3 orang keturunan bangsa Arab yang telah menjadi WNI diperlakukan seperti orang Asia.

12 Juni 1956 - 21 Juni 1957
pertinggal
9 lembar

3686 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR tentang berita pembelian kembali Pulau Tudjuh di Ceram Utara oleh pemerintah & tentang tanah-tanah konsesi di Sumatera Utara.

25 Juli 1956 - 25 Februari 1957
asli
1 sampul

3687 Bekas mengenai pertanyaan anggota DPR Ma'rifat Mardjani mengenai tuntutan rakyat Riau untuk dijadikan daerah Provinsi Otonom.

2 Oktober 1956 - 21 Juni 1958
asli
8 lembar

3688 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Doedi Soemawidjaja tentang petugas-petugas belajar Jawatan Pendidikan Masyarakat.

1 Desember 1956 - 15 Januari 1957
asli
6 lembar

3689 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR Dr. Syeh Hadji Djalaluddin tentang pembeslahan kain sutera

15 Oktober 1956 - 9 Agustus 1958
tembusan
1 sampul

3690 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR tentang masalah kelaparan di pedalaman Mahakam dan Jawa Tengah.

18 Desember 1956 - 31 Januari 1958
asli
1 sampul

3691 Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Babak II DPR mengenai keterangan Pemerintah tentang usaha menormalisasi keadaan RI dan terkait kejadian di Sumatera.
1957
salinan
1 sampul

3692 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR M.O. Bafadal tentang kehebohan pengangkatan anggota-anggota Parlemen dari golongan Minoritet.
2 Januari - 19 Februari 1957
pertinggal
9 lembar

3693 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Ang Tjiang Liat tentang adanya kegelisahan akibat plakat gelap dan sentimen kesukuan di Lombok.
19 Februari - 20 November 1957
pertinggal
1 sampul

3694 Berkas mengenai pernyataan anggota-anggota DPR yang belum mendapat jawaban pemerintah.
9 April - 24 September 1957
asli
1 sampul

3695 Surat kepada DPR mengenai pertanyaan anggota DPR tentang kegelisan di daerah Kalimantan selatan.
15 Juni 1957
pertinggal
1 sampul

3696 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas laporan (Panitia ad.hoc) DPR tentang pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1957.
18 Juni - 3 Desember 1957
asli
1 sampul

3697 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai pertanyaan anggota DPR tentang pengiriman pelajar dan pegawai dengan tugas belajar ke luar negeri.
21 Juni 1957
salinan
3 lembar

3698 Berkas mengenai daftar pertanyaan anggota DPR, I.S. Handokowijojo tentang larangan beredarnya "Suluh Indonesia" di Manado dan tentang kenaikan cukai atas beberapa macam barang.
25 Juni - 24 Juli 1957
pertinggal
1 sampul

3699 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR WL. Tambing tentang pembentukan DPRD peralihan swatantra Tana Toraja dan Luwu.

10 Juli - 29 Agustus 1957
asli
7 lembar

3700 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR K. Werdjo tentang pengusiran Ong Hui jang oleh pemerintah Nederland.

10 Juli - 13 Agustus 1957
pertinggal
3 lembar

3701 Berkas mengenai pernyataan anggota DPR Asrarudin tentang pendaratan pesawat GIA di lapangan terbang Sorong (Irian Barat)

26 Juli - 7 September 1957
asli
4 lembar

3702 Berkas mengenai usul resolusi Ahmad Dara Sjahruddin cs. tentang penjelasan terhadap tindakan pemerintah mengenai pengeluaran UU Darurat.

20 Agustus 1957
fotokopi
2 lembar

3703 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR tentang penolakan Wedana Sumpjuh terkait pemilihan kepala desa wanita.

5 September - 1 November 1957
tembusan
6 lembar

3704 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR H. Achmad Sjaichu tentang usaha merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

7 - 13 September 1957
asli
1 sampul

3705 Berkas mengenai jawaban pemerintah atas pertanyaan anggota DPR H. Masjur Rifai tentang kepailitan PT Inaco.

10 Oktober - 9 November 1957
asli
6 lembar

3706 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR M. Anwar Zain sekitar perjalanan Presiden ke luar negeri.

25 Oktober - 2 November 1957
pertinggal
7 lembar

3707 Berkas mengenai pertanyaan DPR SJ. Sutan Mangkuto tentang warga negara keturunan asing.

5 - 7 November 1957
asli
4 lembar

3708 Surat dari Menteri Pertahanan kepada Ketua DPR mengenai pertanyaan anggota DPR Ch. Salawati tentang keadaan para anggota TKR.

16 Desember 1957
tembusan
1 lembar

3709 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR R. Suhardjo al. Bedjo tentang 'Ilmu Sejati' tidak/belum termasuk dalam daftar aliran kepercayaan.

1 Februari - 5 Mei 1958
pertinggal
1 sampul

3710 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR R.M.S Soeryaning Prodjo tentang tenaga tamatan dari Akademi Polisi tidak melakukan kewajibannya karena merasa diperlakukan kurang adil.

05 February 1958
tembusan
1 sampul

3711 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Sutomo tentang pembocoran pembicaraan Dwitunggal.

18 Maret 1958
asli
5 lembar

3712 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR Siswojo tentang larangan kepala Polisi Hulu sungai selatan terhadap ceramah PKI.

21 March 1958
pertinggal
1 sampul

3713 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Asrarudin tentang berita penambahan anggota DPD untuk daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah.

27 Maret - 24 Mei 1958
asli
5 lembar

3714 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR E.Z. Muttaqien tentang perumahan kepala daerah.

1 April - 21 Agustus 1958
asli

1 sampul

3715 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR sdr. Mr. Imron Rosyadi tentang bencana banjir di kabupaten Indramayu

16 April 1958
tembusan
1 sampul

3716 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR sdr. Thajib Abdullah tentang gerakan yang disebut " Agama Sutji " di Jawa Timur

05 May 1958
tembusan
1 sampul

3717 Mosi DPRD Peralihan Kabupaten Lampung Utara Kotabumi tentang persengketaan rakyat Tani di Talang Sapa Kira.

21 Mei 1958
tembusan
1 lembar

3718 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR Abdulrahman Martalogowo tentang percobaan bom di Eniwetok.

02 August 1958
tembusan
1 sampul

3719 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Mr. Memet Tabunidjaja dan Moh. Basah tentang kenikan pangkat posthuum anggota kepolisian

18 Juni - 4 Oktober 1958
pertinggal
1 sampul

3720 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR H.A Chamid Widjaja tentang kesulitan dan kenaikkan harga gula.

14 July 1958
tembusan
1 sampul

3721 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR tentang tambang minyak cepu yang tidak lagi diusahakan oleh BPM.

29 Juli - 23 Agustus 1958
tembusan
1 sampul

3722 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR Anwar harjono tentang berita persiapan pemilu yang tidak lancar di daerah-daerah.

23 Agustus - 4 Oktober 1958
tembusan

1 sampul

3723 Surat dari DPRD Kotapraja Palembang kepada Dewan menteri mengenai sokongan mosi DPRD kabupaten Magetan terkait ketersedian pupuk dengan harga semurah-murahnya.

26 Agustus 1958
asli
1 lembar

3724 Surat dari Menteri Penerangan kepada Ketua DPR mengenai pertanyaan anggota DPR Sdr. Soelardi tentang tulisan oplaagh harian-harian, majalah dsb.

10 September - 2 Oktober 1958
tembusan
2 lembar

3725 Berkas mengenai pertanyaan Anggota DPR sdr. Mutlik tentang pejabat-pejabat pemerintah di luar negeri yang berkhianat kepada negara.

19 September 1958
tembusan
1 sampul

3726 Berkas mengenai pertanyaan anggota DPR M.H Lukman tentang pembunuhan secara massal oleh PRRI terhadap ratusan tawanan di situdjuh dan Suliki.

24 September 1958
tembusan
1 sampul

3727 Laporan mengenai jawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak II DPR mengenai Dewan Perancang Nasional.

28 September 1958
fotokopi
1 sampul

d. Risalah DPR & Konstituante

3728 Surat Keputusan Menteri Luar Negeri No.SP/214/Del tanggal 27 Oktober 1950 tentang pengiriman misi parlemen ke Amsterdam.

27 Oktober 1950
salinan
2 lembar

3729 Berkas mengenai rancangan peraturan tata tertib DPRS dan DPR.

21 November 1950 & 04 Februari - 21 Agustus 1958
salinan
1 sampul

3730 Laporan peninjauan Seksi Dalam Negeri DPR ke Daerah bekas Negara Indonesia Timur.

03 Desember 1950

fotokopi
1 sampul

3731 Risalah pembicaraan dengan Ketua DPR mengenai perbaikan rapat kerja antara kementerian dengan seksi-seksi perlemen.

19 Januari 1951
fotokopi
1 sampul

3732 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai laporan dan penetapan rencana acara masa sidang babakan IV.

07 Februari 1951
asli
4 lembar

3733 Surat dari Perdana Menteri kepada Ketua DPR mengenai pidato Ketua DPR dalam pembukaan sidang ke V DPR.

22 Mei 1951
konsep
2 lembar

3734 Laporan mengenai rapat Panitia Permusyawaratan Pembahasan Anggaran Belanja, UU, Mosi dan Interpelasi.

19 Juli 1951
pertinggal
1 lembar

3735 Berkas mengenai pertemuan berkala antara pemerintah dan fraksi-fraksi pemerintah dari DPR.

02 Agustus 1951
fotokopi
1 sampul

3736 Surat dari sekretariat DPR kepada Perdana Menteri mengenai perubahan acara untuk rapat pleno tanggal 1 November 1951.

30 Oktober 1951
asli
6 lembar

3737 Berkas mengenai undangan dan daftar acara sidang, pleno, rapat kerja.

26 Januari 1952 - 28 Januari 1954
asli
1 sampul

3738 Laporan singkat dari bagian I seksi G DPR tentang surat-surat masuk sampai tanggal 31 Desember 1952 (terkait Kementerian Dalam Negeri).

08 Februari 1952
asli

3 lembar

3739 Risalah rapat pleno terbuka DPR ke 15 tanggal 28 Februari 1952 tentang usul resolusi mengenai sistem penunjukan pembantu kabinet.

28 Februari 1952
tembusan
1 sampul

3740 Surat dari Wakil Ketua DPR kepada Menteri Luar Negeri mengenai penolakan terhadap Mr. Moh Rasjid mewakili menteri Luar Negeri dalam sidang DPR.

21 Juli 1952
tembusan
1 lembar

3741 Surat dari Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai tata tertib DPR.

25 Agustus 1952
asli
1 sampul

3742 Berkas mengenai surat undangan rapat dan susunan acara Sidang ke III DPR tahun 1952 dan tahun1954.

17 September 1952 - 13 Juli 1954
asli
1 sampul

3743 Surat dari wakil Ketua DPR kepada Perdana Menteri mengenai protokol dalam pertemuan-pertemuan resmi yang disertai oleh anggota-anggota DPR.

15 Oktober 1952
asli
3 lembar

3744 Berkas mengenai daftar rancangan undang-undang dan mosi-mosi resolusi dan interpelasi-interpelasi yang belum selesai dibicarakan dalam sidang DPR.

26 November 1952
asli
1 sampul

3745 Risalah rapat pleno terbuka mengenai pengumuman sekretariat dan pemandangan umum babak I tentang RUU pemilihan anggota konstituante dan anggota DPR.

14 Januari 1953
fotokopi
1 sampul

3746 Risalah rapat pleno tertutup DPR tentang tanya jawab mengenai soal-soal di lapangan keamanan untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Menteri.

09 Maret 1953
fotokopi
1 sampul

3747 Berkas mengenai laporan komisi peninjauan masalah pembagian tanah di Sumatra Utara dalam rapat pleno DPR.

18 May 1953
fotokopi
1 sampul

3748 Laporan keterangan pemerintah mengenai hasil pembicaraan dalam sidang parlemen pada 21 Mei 1953 antara lain tentang persoalan tanah.

01 Juni 1953
fotokopi
1 sampul

3749 Berkas mengenai bahan pidato Presiden dalam rapat pleno DPR pada tanggal 16 Agustus 1953.

10 Agustus 1953
salinan
1 sampul

3750 Berkas mengenai Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum DPR Babak Kedua tentang keterangan dan program Kabinet Ali Sastroamidjojo.

15 Agustus - 10 September 1953
salinan
1 sampul

3751 Surat dari Sekretaris Dewan Menteri kepada para Menteri di Jakarta mengenai pembagian pekerjaan para Menteri dalam menghadapi pemandangan umum DPR tentang keterangan pemerintah.

29 Agustus 1953
pertinggal
3 lembar

3752 Berkas mengenai Keputusan DPR No. 3/K/1955 tentang mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara menggunakan devisen.

8 Februari - 8 Maret 1955
asli
1 sampul

3753 Berkas mengenai laporan Seksi C (Pertanian dan Agraria) DPR dan undangan rapat pleno.

15 Februari 1955 & 16 September 1958
tembusan
1 sampul

3754 Surat dari Ketua Fraksi PNI kepada Dewan Menteri mengenai pernyataan sikap fraksi PNI terkait votum terhadap kabinet Burhanuddin Harahap.

14 November 1955
asli

2 lembar

3755 Berkas mengenai perjalanan misi parlemen ke luar negeri.

1956
fotokopi
1 sampul

3756 Surat dari Ketua DPR kepada menteri Kehakiman mengenai perubahan acara rapat DPR sidang ke I tahun 1956 susunan ke IV beserta lampiran.

18 Februari 1956
tembusan
1 sampul

3757 Surat dari Panitia Interdepartemental Urusan Konstituante kepada Perdana Menteri mengenai laporan dan usul-usul panitia.

14 March 1956
asli
2 lembar

3758 Berkas mengenai persiapan Sidang Konstituante

Mei - September 1956
asli
1 sampul

3759 Laporan mengenai rapat Ketua DPR dengan para penghubung dari kementerian-kementerian pada tanggal 16 Juni 1956.

16 Juni 1956
fotokopi
1 sampul

3760 Laporan singkat mengenai masalah beras dan kopra di Sulawesi oleh seksi Perekonomian DPR

29 Juli - 6 November 1956
tembusan
1 sampul

3761 Notulen rapat pertemuan antara Ketua DPR dengan para penghubung kementerian-kementerian pada hari kamis tanggal 30 Agustus 1956.

30 Agustus 1956
fotokopi
1 sampul

3762 Berkas mengenai upacara pelantikan Konstituante di Bandung pada 10 November 1956.

06 September 1956
asli
1 sampul

3763 Berkas mengenai rancangan Peraturan Tata Tertib Konstituante.

15 September 1956 - 24 April 1957
konsep
1 sampul

3764 Surat dari kepala bagian inspeksi Thesauri Negara kepada Direktur Kabinet Perdana Menteri mengenai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan persiapan sidang Konstituante.

09 Oktober 1956
asli
7 lembar

3765 Berkas mengenai rancangan keterangan pemerintah tentang peraturan KSAD tanggal 14-9-1956 dalam dalam rapat terbuka DPR.

29 October 1956
asli
1 sampul

3766 Notulen rapat DPR mengenai pengeluaran pemerintah untuk keamanan.

1957
asli
1 sampul

3767 Daftar pimpinan bagian-bagian DPR untuk masa sidang ke 4 tahun 1957.

1957
fotokopi
2 lembar

3768 Notulen rapat DPR mengenai laporan komisi *Facts Finding* ke Sumatera Tengah.

14 Januari 1957
konsep
4 lembar

3769 Daftar fraksi-fraksi dalam DPR beserta jumlah anggotanya.

21 Januari 1957
fotokopi
1 sampul

3770 Risalah sementara DPR rapat ke 29 antara lain penyelesaian RUU perselisihan buruh dan penunjukan pelabuhan Palembang menjadi perusahan negara.

13 Maret 1957
fotokopi
1 sampul

3771 Risalah sementara DPR rapat ke 30 antara lain mengenai kondisi politik dan situasi umum.

15 Maret 1957
fotokopi

1 sampul

3772 Laporan Panitia Persipan Konstitusi tentang Peraturan Pembentukan dan Cara kerja Komisi-Komisi Konstitusi dan Surat Keputusan tentang penetapan waktu dan rapat pleno Konstituante untuk sidang II tahun 1957.

27 Maret 1957
salinan
1 sampul

3773 Surat dari Ketua Konstituante kepada Perdana Menteri mengenai kesediaan untuk mengadakan pembicaraan dengan Panitia ad hoc yang bertugas membicarakan tafsiran pasal 13 UUDS.

20 Juli 1957
asli
1 lembar

3774 Keterangan Pemerintah mengenai usaha-usaha menormalisasi keadaan RI (khususnya tentang penyelesaian peristiwa di Sumatera Utara, penahanan tokoh-tokoh nasional dari Jawa Barat dan tentang Musyawarah Nasional Pembangunan)

November 1957
salinan
1 sampul

3775 Risalah Rapat Pleno Terbuka DPR ke-112 sampai dengan 123 NB: risalah ke-114 tidak ada.

13 - 20 November 1957
fotokopi
1 sampul

3776 Surat dari Perdana Menteri kepada Kepala Urusan Keuangan Konstituante mengenai permintaan kredit untuk keperluan sidang.

13 November 1957
pertinggal
4 lembar

3777 Surat dari Direktur Kabinet Perdana Menteri kepada kepala Kepolisian Negara mengenai pembatalan rapat kerja seksi H DPR.

04 Desember 1957
pertinggal
7 lembar

3778 Jawaban Pemerintah mengenai Bagian I dari Anggaran Belanja tahun 1957 yaitu tentang Pemerintah Agung/Badan - badan Pemerintah Tertinggi.

1958
fotokopi
3 lembar

3779 Risalah sementara DPR rapat gabungan seksi-seksi tentang keterangan tambahan pada nota keuangan 1958 (P.235) serta penyelesaian situasi ekonomi dan keuangan dewasa ini.

06 Februari 1958
fotokopi
1 sampul

3780 Risalah perundingan DPR mengenai keterangan pemerintah terkait masalah Irian Barat.

28 Februari 1958
fotokopi
2 lembar

3781 Berkas surat pengantar dari Sekjen Konstituante kepada Kabinet Perdana Menteri mengenai penyampaian surat keputusan dari Ketua Konstituante.

16 April 1958 - 22 Juli 1958
asli
6 lembar

3782 Laporan Singkat mengenai rapat Panitia Permusyawaratan DPR untuk acara rapat-rapat DPR.

01 September 1958
pertinggal
8 lembar

3783 Risalah rapat pleno terbuka mengenai pembentukan Dewan Perancang Nasional.

16 September 1958
fotokopi
1 sampul

3784 Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama DPR tentang Rancangan Anggaran Belanja tahun 1959.

23 September - 22 November 1958
asli
1 sampul

3785 Risalah sementara DPR rapat ke 149

20 Oktober 1958
fotokopi
1 sampul

3786 Jawaban tertulis Pemerintah tentang Putusan Dewan Menteri perihal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.

03 - 25 Maret 1959
pertinggal
1 sampul

3787 Surat dari Ketua Konstituante kepada Presiden mengenai amanat Presiden dimuka rapat pleno konstituante.

17 Maret - 14 April 1959
tembusan
1 sampul

3788 Berkas mengenai amanat Presiden kepada Konstituante tentang anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945.

April 1959
asli
1 sampul

3789 Berkas mengenai pidato Ketua DPR pada pembukaan sidang II tahun 1959.

22 April 1959
asli
1 sampul

3790 Risalah sementara DPR tentang rancangan anggaran negara tahun 1958-1959.

Agustus - November 1959
fotokopi
1 sampul

3791 Berkas mengenai acara rapat DPR sidang ke I tahun 1959, dan sidang pleno konstituante ke II tahun 1958.

Juli - September 1958, Oktober 1959
tembusan
1 sampul

3792 Naskah Keterangan Pemerintah tentang "Pembentukan dan Program Kabinet Kerja" yang diucapkan oleh Presiden Soekarno dalam rapat pleno terbuka DPR.

24 Juli 1959
fotokopi
1 sampul

Amerika 95

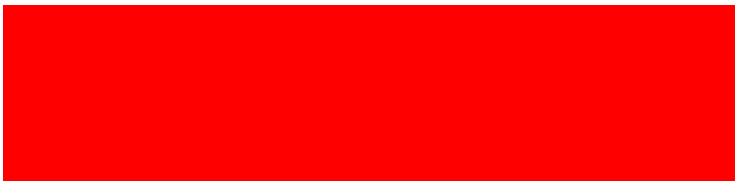

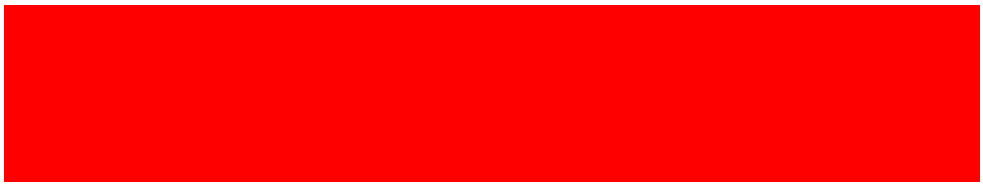

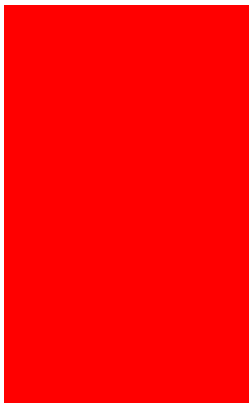

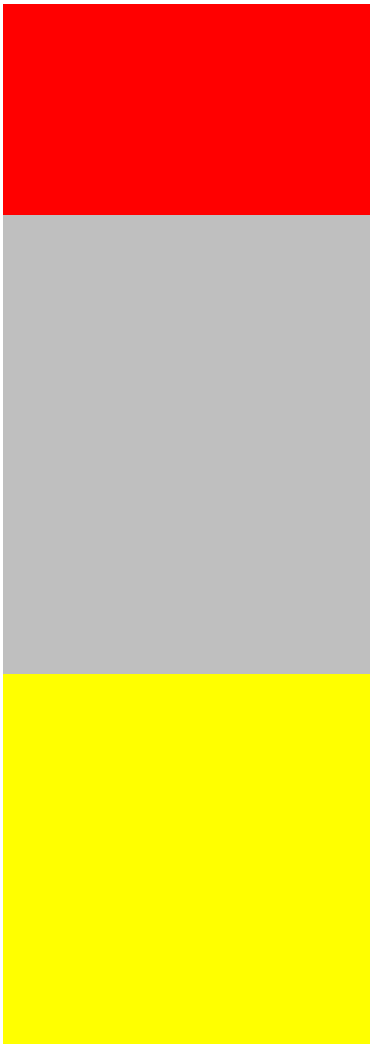

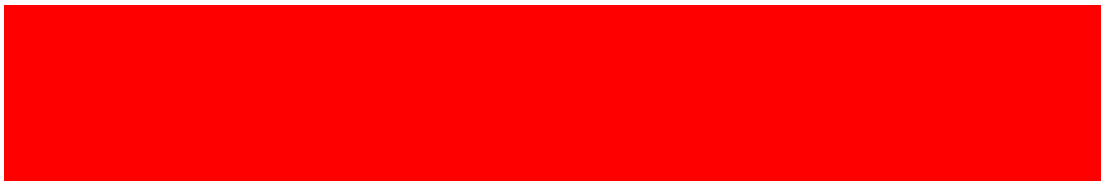

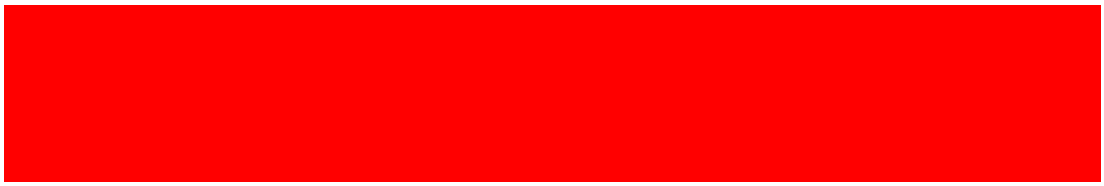

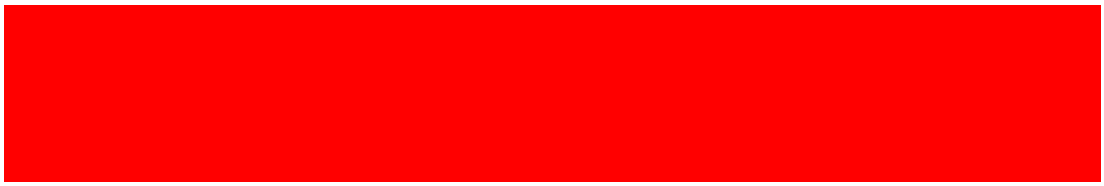

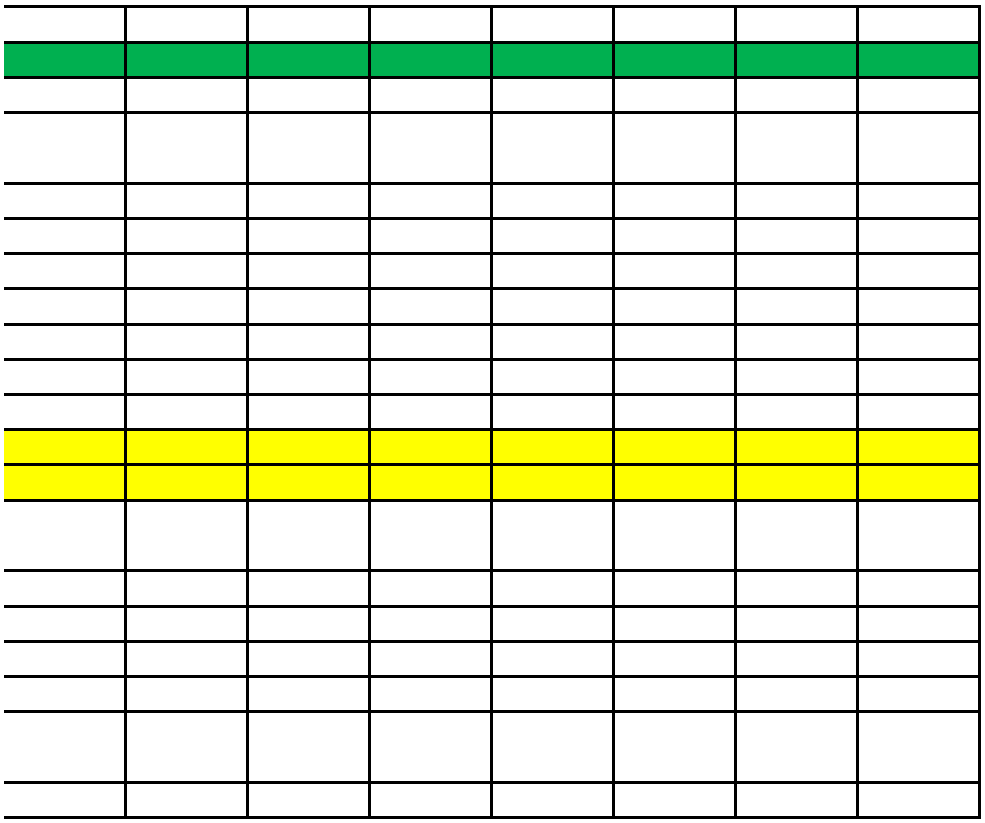

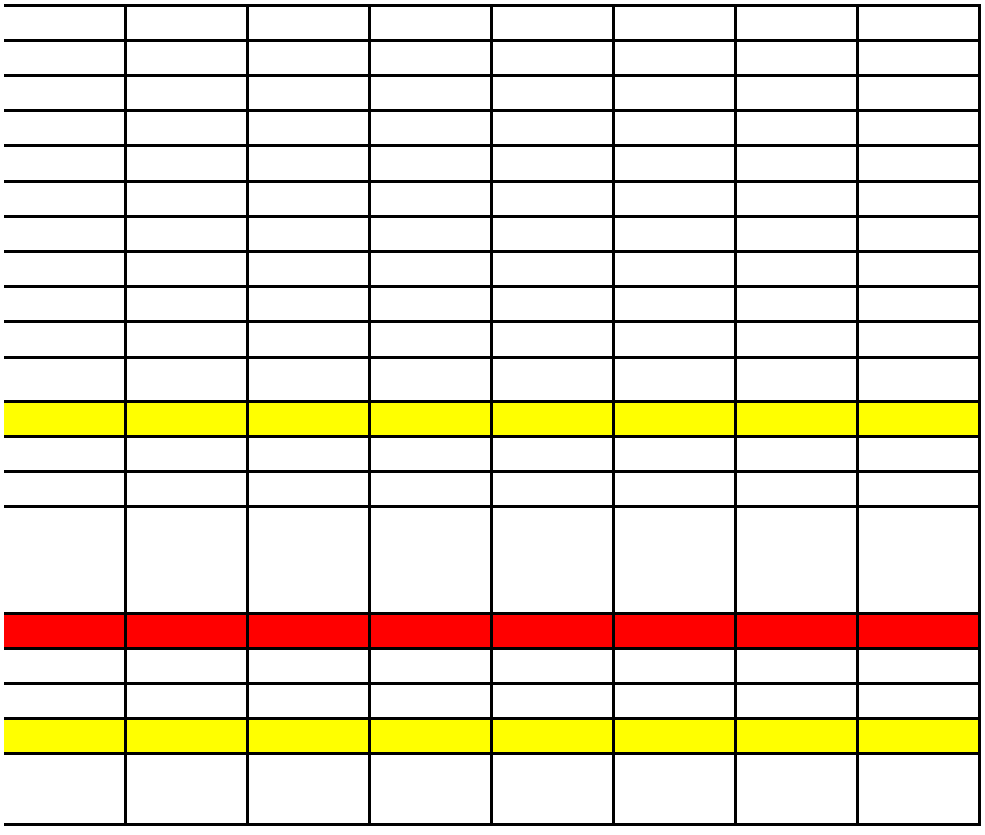

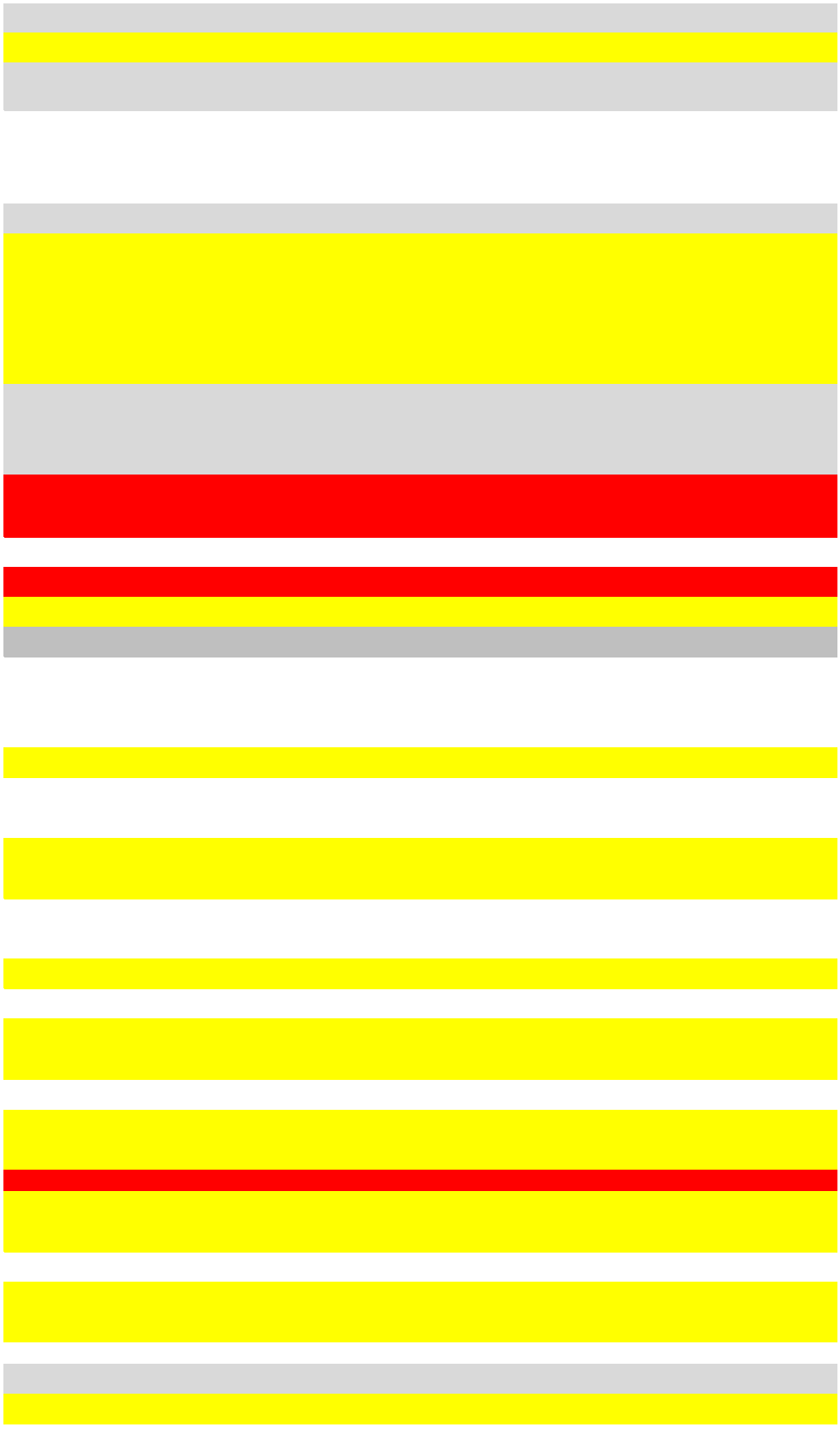

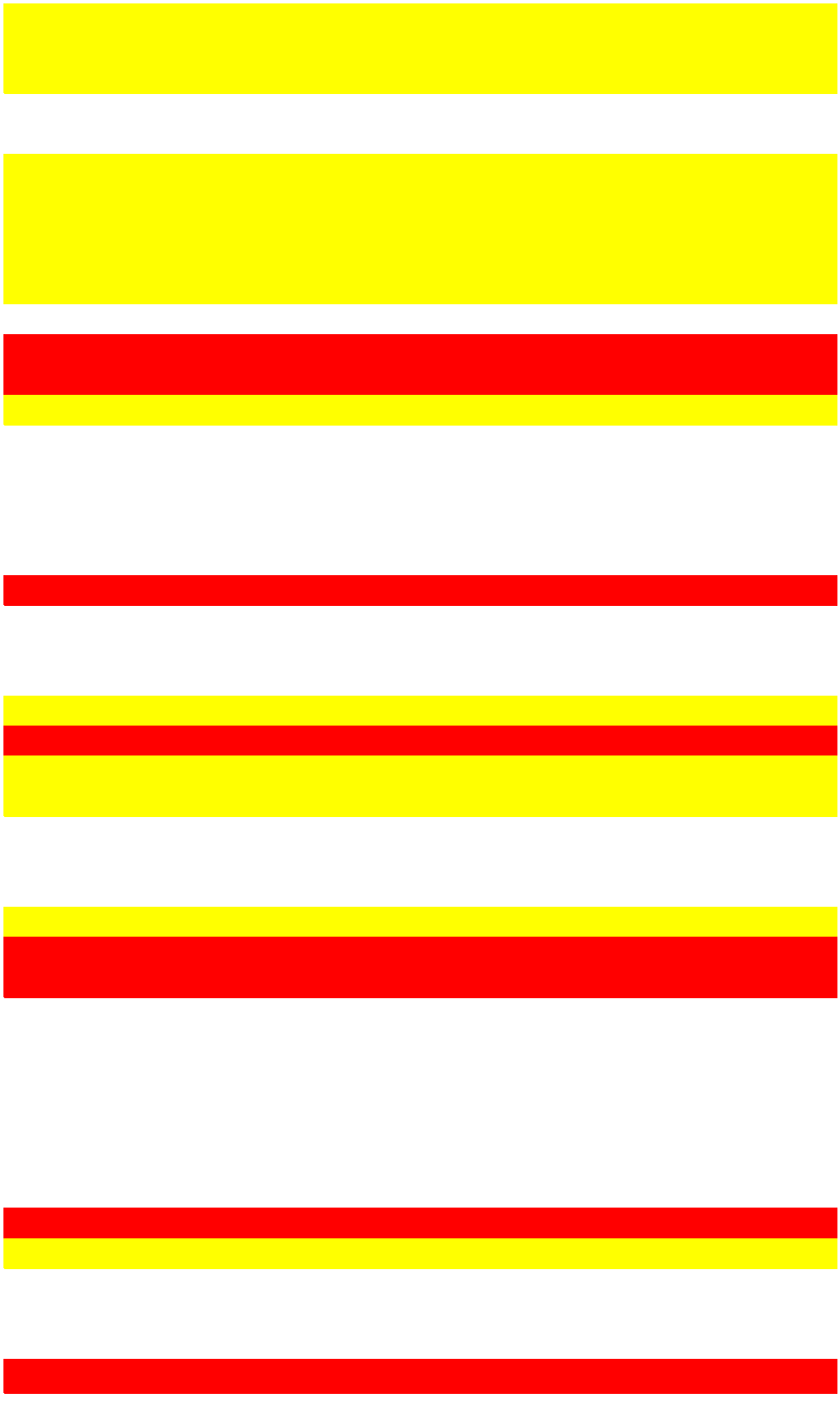

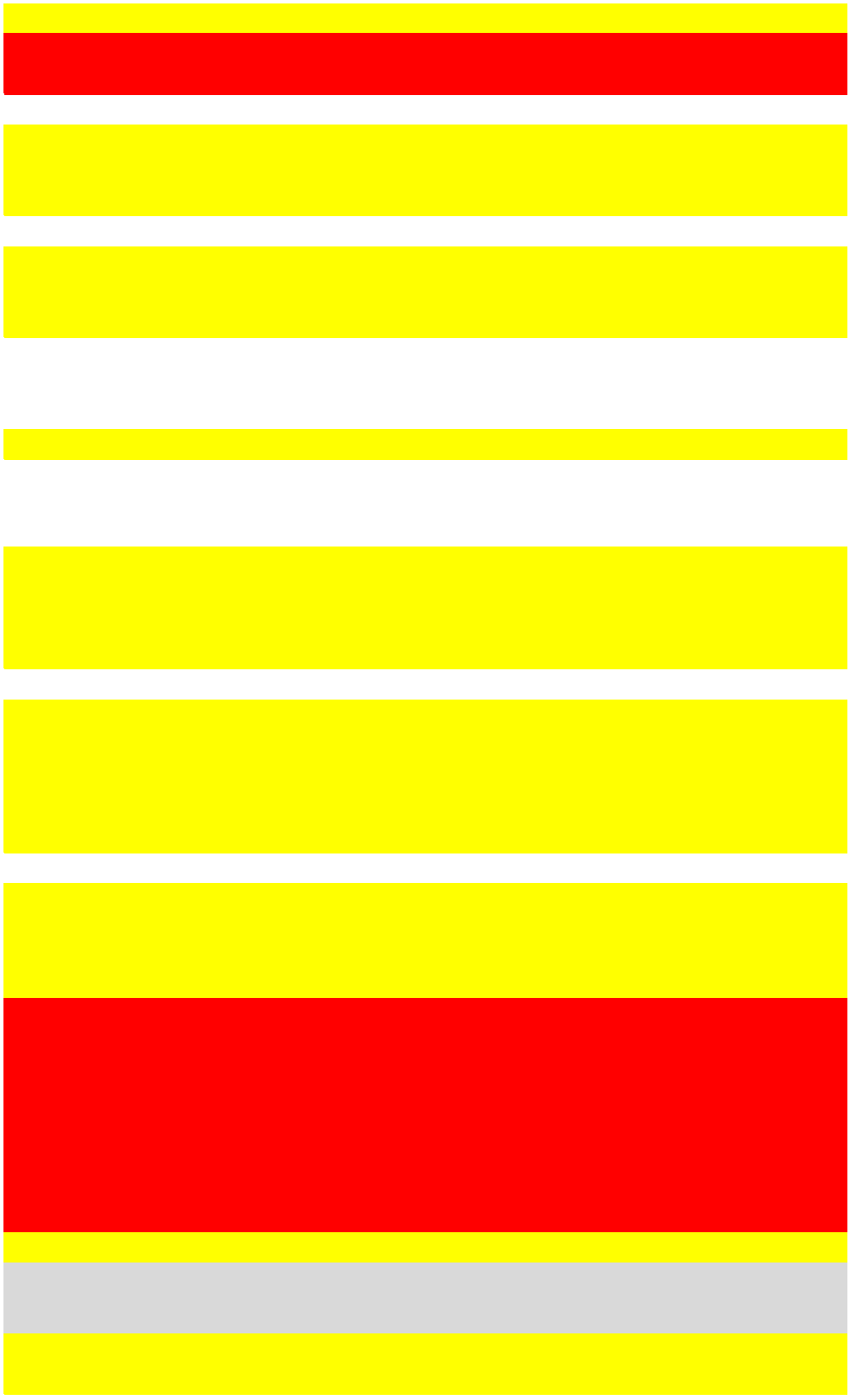

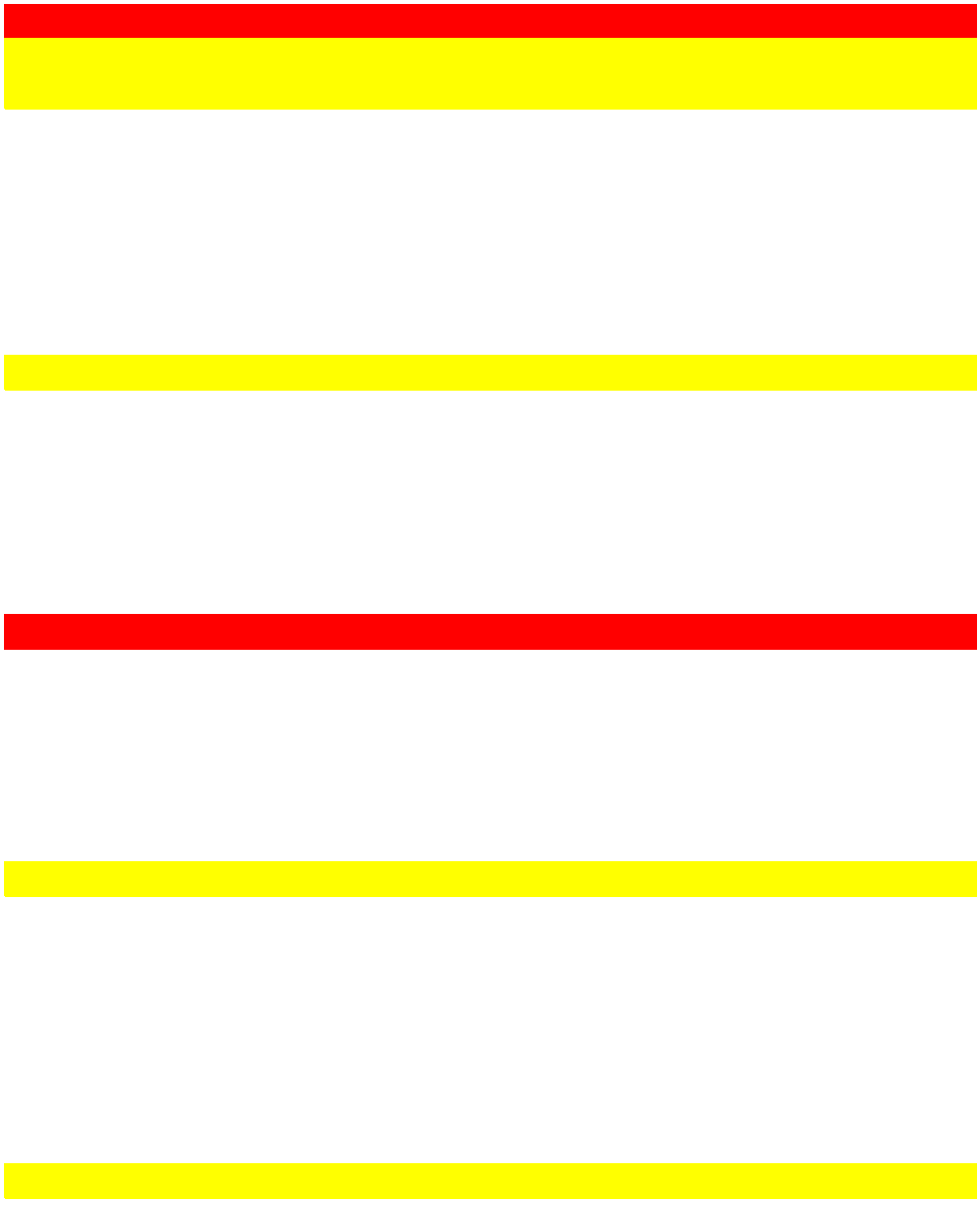

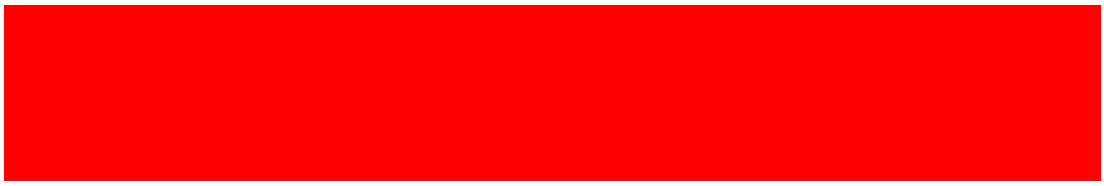

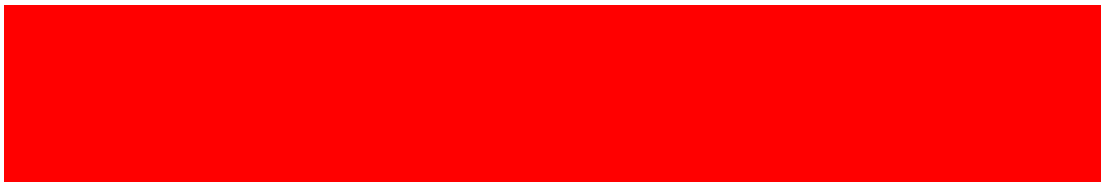

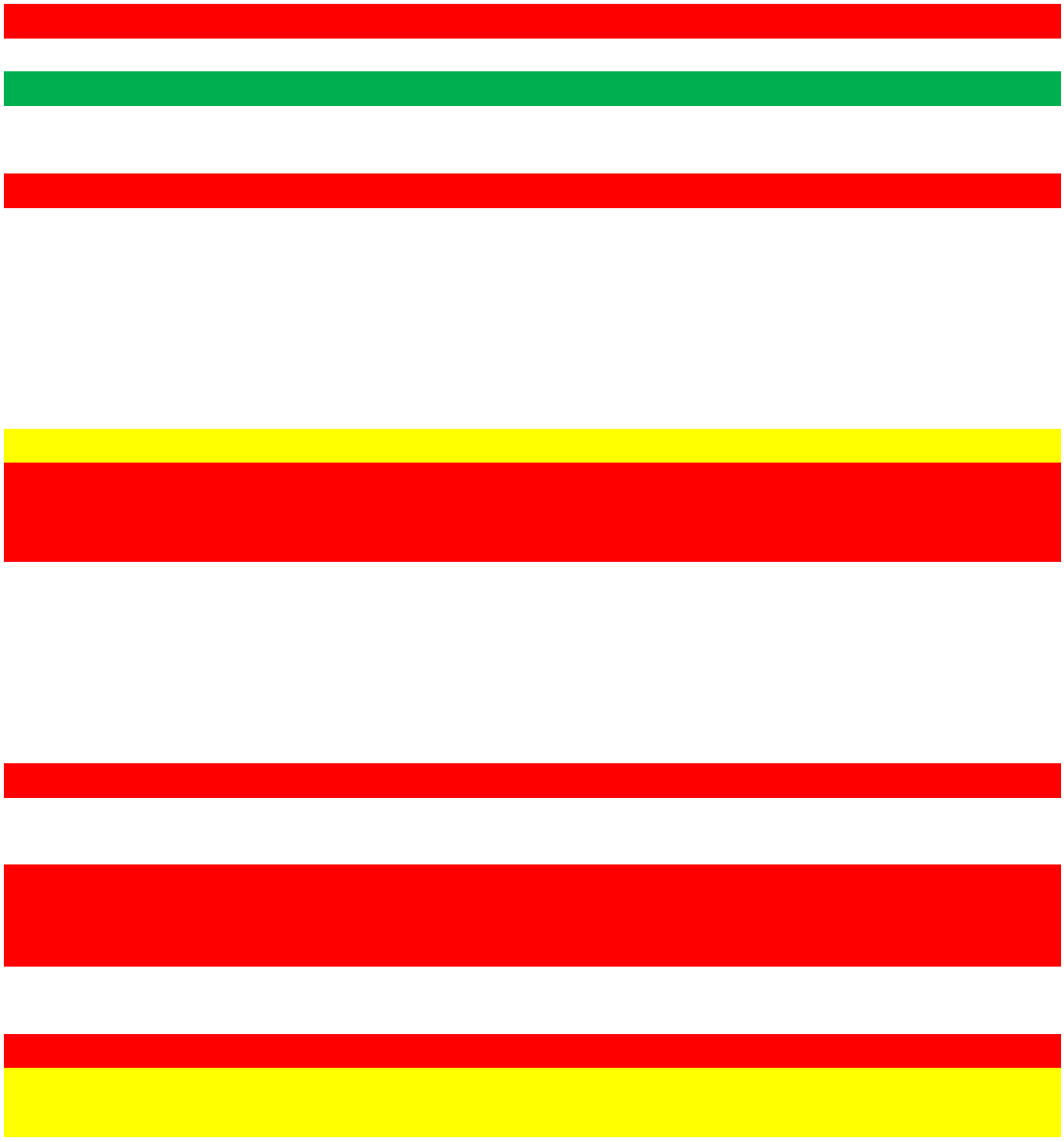

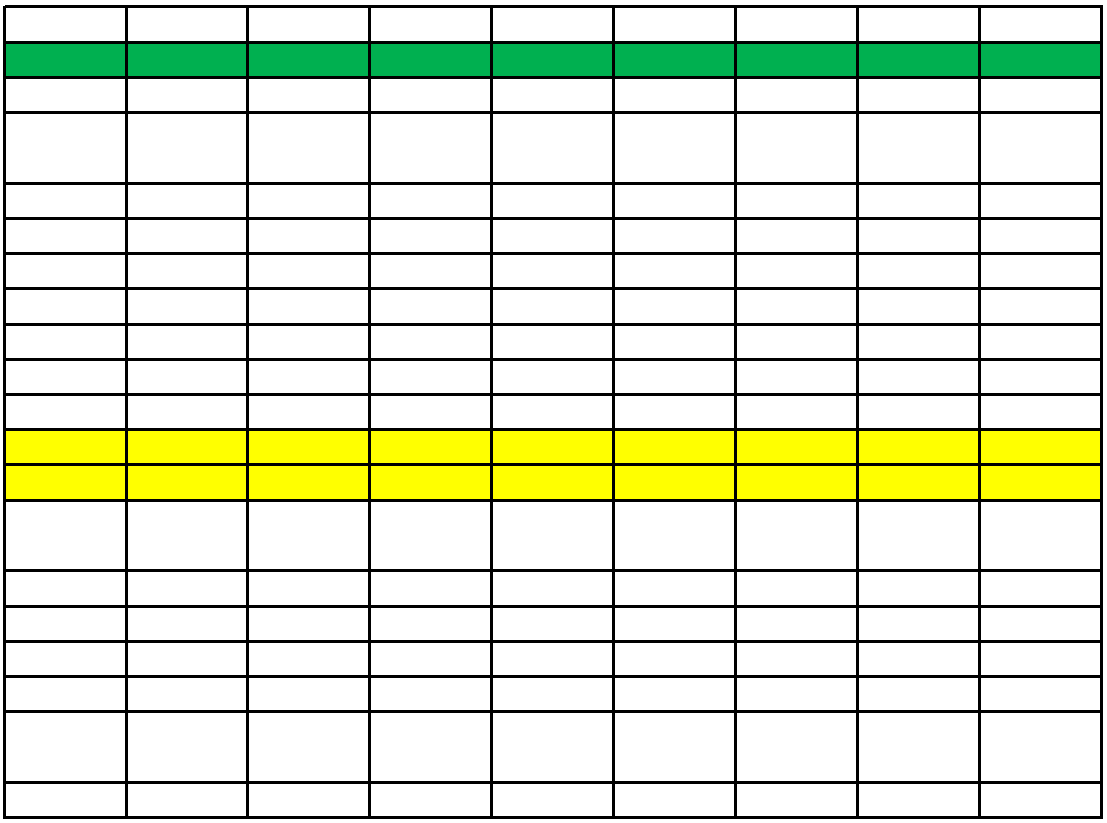

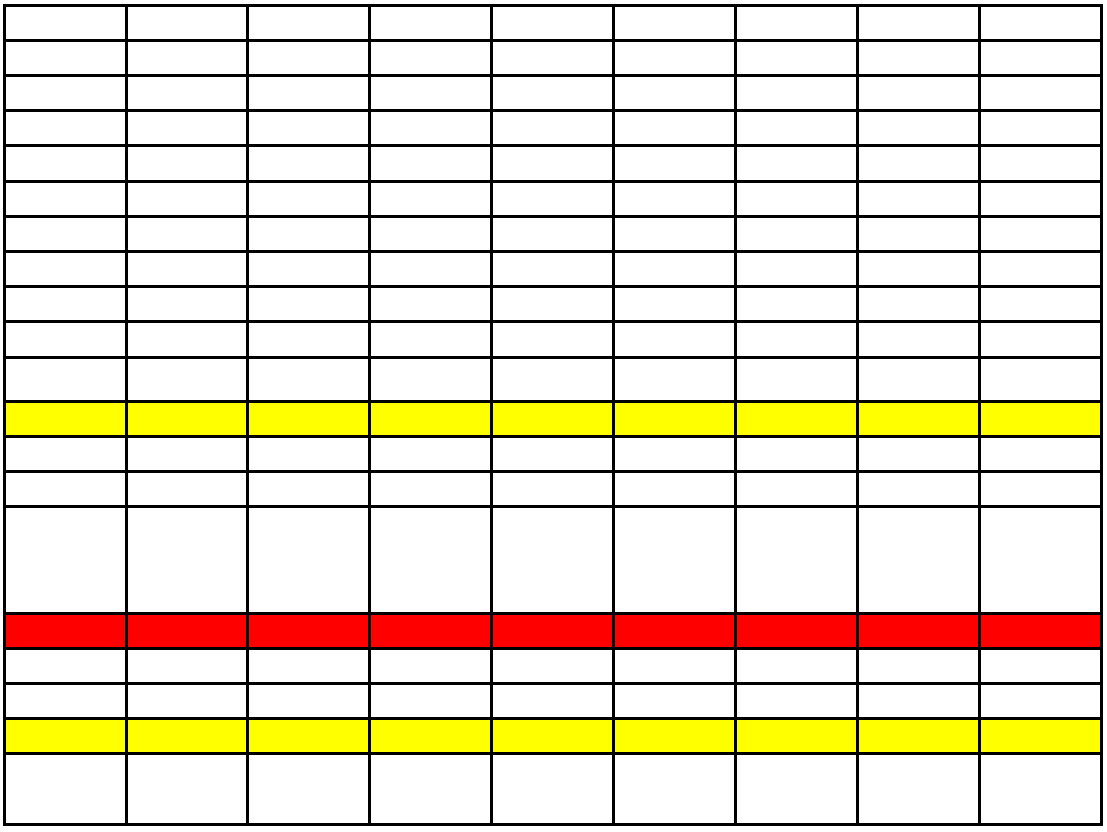

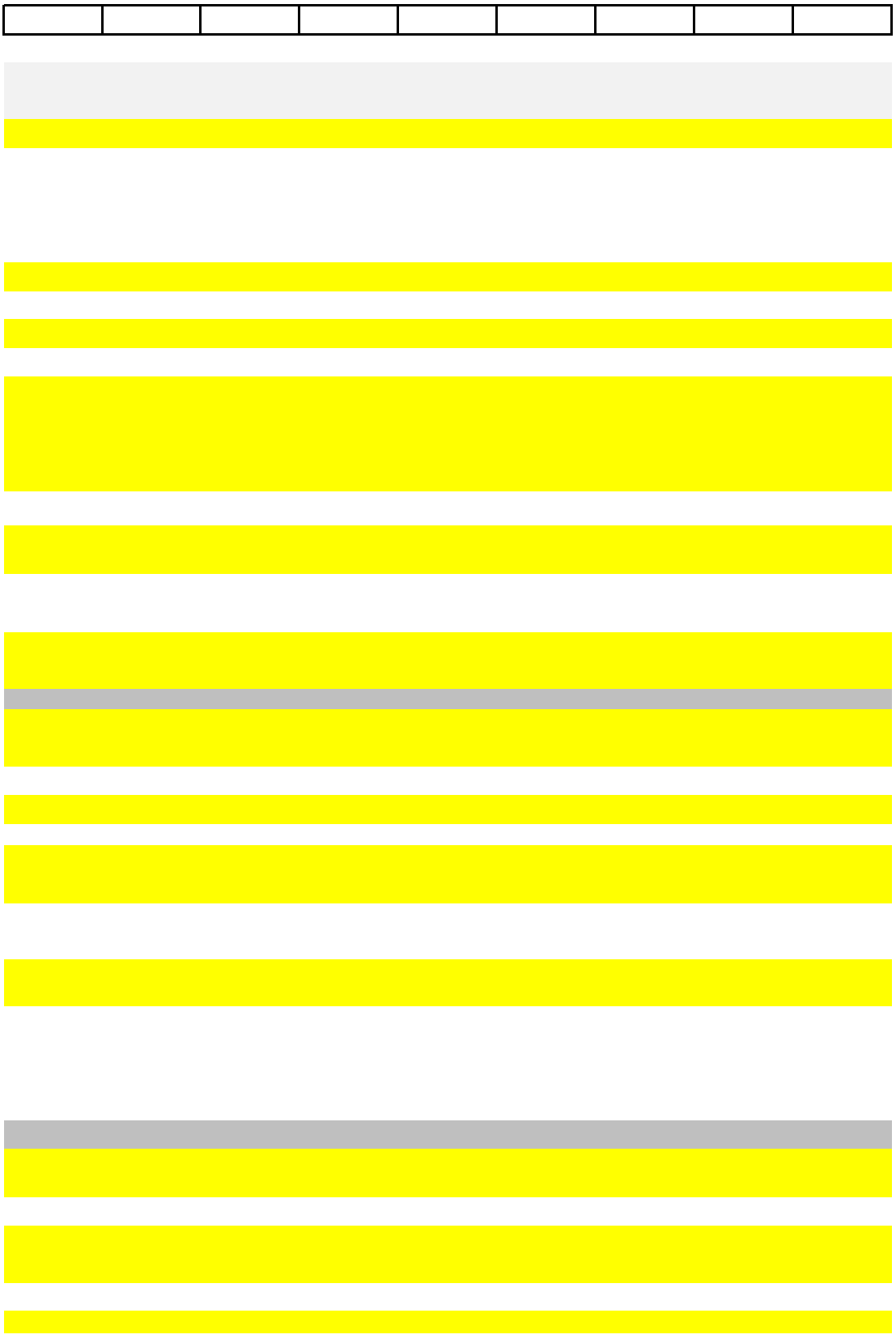

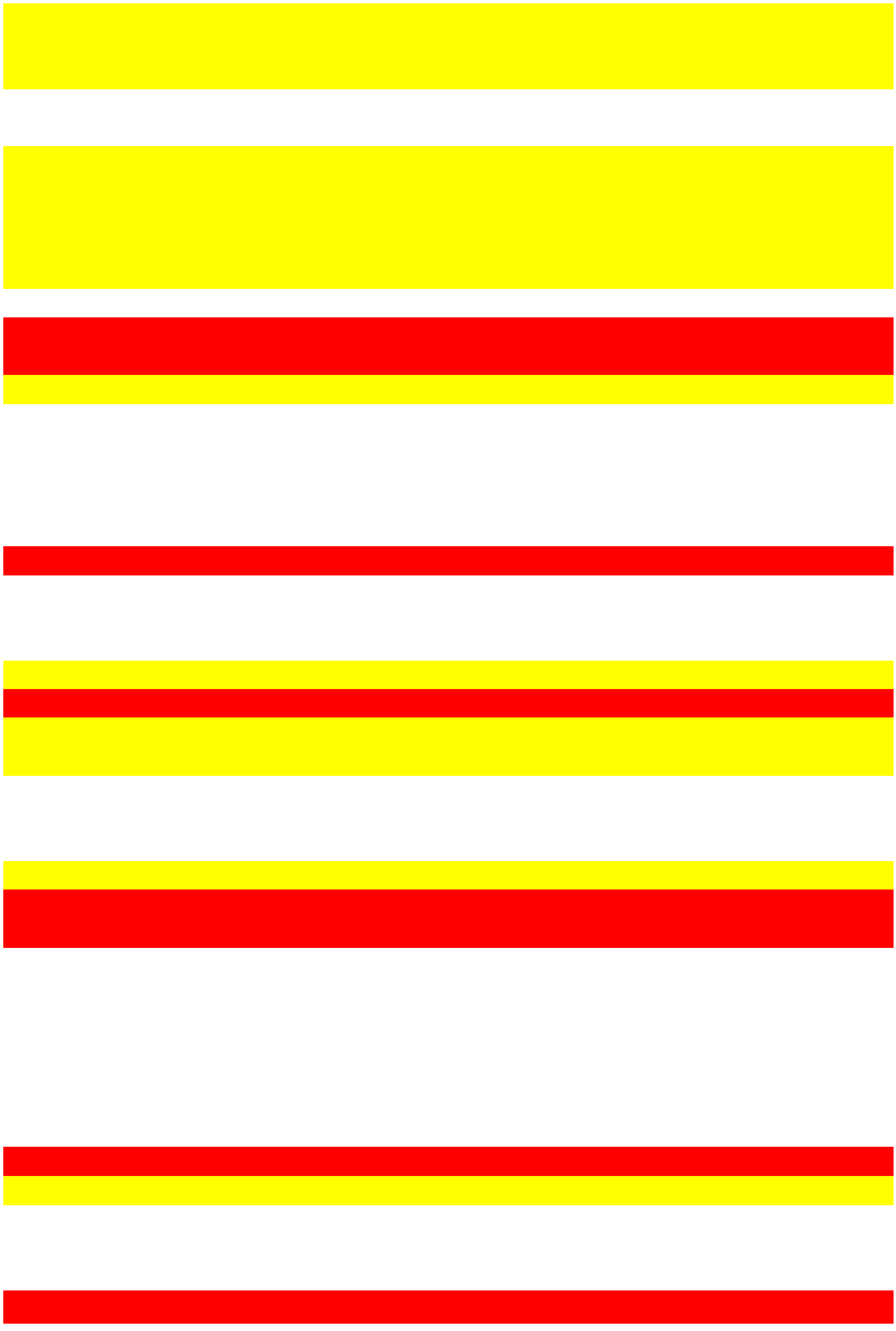

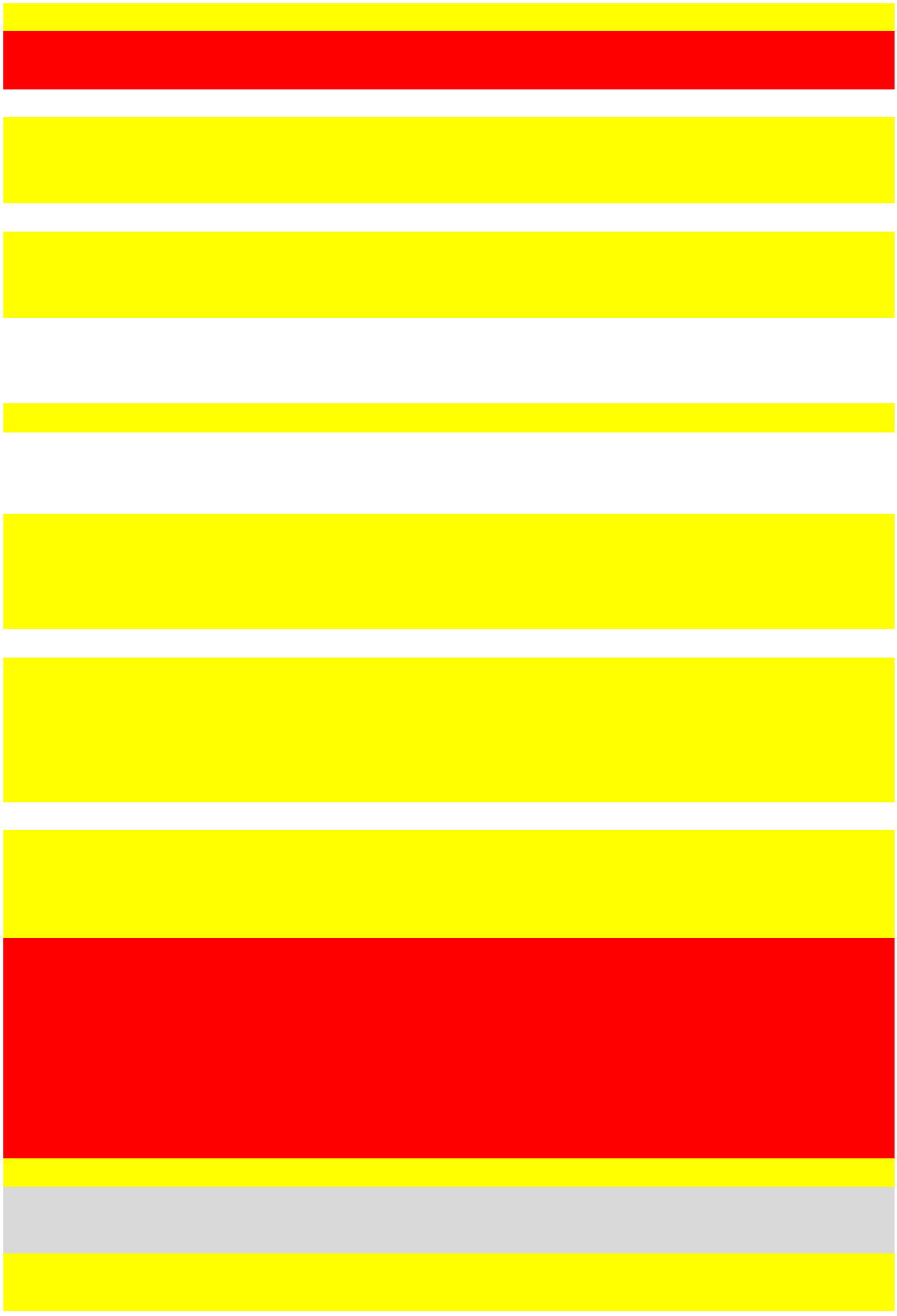

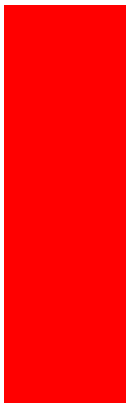

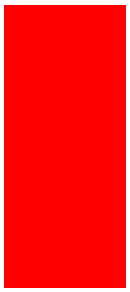

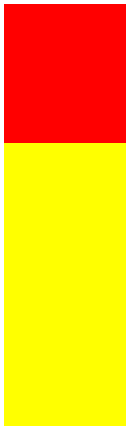

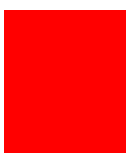

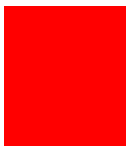

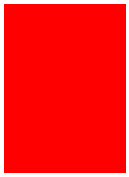

DAFTAR SINGKATAN

ABP	: Anggaran Belanja Pegawai
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ABT	: Anggaran Belanja Tambahan
AD	: Angkatan Darat
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
ASEAN	: *Association of Southeast Asian Nations*
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
AVROS	: *Algemeene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra*
BAPERKI	: Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BAPPIT	: Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-Perusahaan Industri dan Tambang
BAPUSIS	: Badan Pelaksana Usaha Sinar Surya
BKBLN	: Biro Koordinasi Bantuan Luar Negeri.
BNI	: Bank Nasional Indonesia
BPBAT	: Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara
BPII	: Bekas Pejuang Islam Indonesia
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BPM	: *Bataafsche Petroleum Maatschappij*
BPMD	: Biro Pembangunan Masyarakat Desa
BPN	: Biro Perantjang Negara
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BRN	: Biro Rekonstruksi Nasional
BTI	: Barisan Tani Indonesia
BUD	: Badan Usaha Dagang
BUTER	: Bentara Urusan Teritorial
CARE	: *Cooperative for American Remittances to Europe*
CPM	: Corps Polisi Militer
CTN	: Corps Tjadangan Nasional
DAMRI	: Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia
DDP	: Djawatan Dana Pensiun
DEIP	: Dewan Ekonomi Indonesia Pusat
DI	: Darul Islam
DJAPPP	: Djawatan Pusat Pembelian Pemerintah
DOP	: Daftar Ongkos Perjalanan
DPD	: Dewan Pemerintah Daerah
DPDS	: Dewan Pemerintah Daerah Sementara
DPKN	: Dinas Pengawasan Keselamatan Negara
DPPP	: Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
ECAFE	: *Economic Commision for Asia and the Far East*
ECOSOC	: *The Economic and Social Council*
FAO	: *Food and Agriculture Organization*

FBMI : Federasi Buruh Minyak Indonesia
FDR : Front Demokrasi Rakyat
FKUI : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
GATT : *General Agreement on Tarrifs and Trade*
GERWANI : Gerakan Wanita Indonesia
GIA : *Garuda Indonesia Airways*
GISI : Gabungan Instalatif Seluruh Indonesia
GKS : Gabungan Kepala Staf
GPII : Gerakan Pemuda Islam Indonesia
HKBP : Hoeria Kristen Batak Protestan
IBRD : *International Bank for Reconstruction and Development*
IBW : *Indonesische Bedrijven Wet*
ICA : *International Cooperation Administration*
ICW : *Indische Comtabiliteits Wet*
IIEO : *International Islamic Economic Organization*
IIH : Igama Iman Hak
ILO : Interntional Labour Organization
IMF : *International Monetary Fund*
INI : Industri Nasional Indonesia
IPINDA : Ikatan Pelajar Indonesia Aceh
IPNR : Ikatan Pegawai Negeri Rendah
IPPI : Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia
ITTEPE : Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakyat
JABAR : Jawa Barat
JATENG : Jawa Tengah
JPUPT : Juru Penerima Uang Pendapatan Tertentu
KAA : Konferensi Asia Afrika
KKD : Koordinator Keamanan Daerah
KKKD : Kantor Koordinasi Keamanan Daerah
KKP : Kesatuan Kaum Pensiunan
KLM : *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij*
KMB : Konferensi Meja Bundar
KNAF : *Katholieke Nederlanders Arbeiders*
KNIL : *Koninklijk Nederlandsche Indische Leger*
KNIP : Komite Nasional Indonesia Pusat
KODAM : Komando Daerah Militer
KPM : Kabinet Perdana Menteri
KPPN : Kantor Pusat Perbendaharaan Negara
KSAD : Kepala Staf Angkatan Darat
KSAL : Kepala Staf Angkatan Laut
KSAP : Kepala Staf Angkatan Perang
KSUAD : Kepala Staf Umum Angkatan Darat
KUA : Kantor Urusan Agama
KUP : Kantor Urusan Perumahan
LAAPLN : Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri
LAN : Lembaga Administrasi Negara
MMC : Merapi - Merbabu Complex
MOBBRIG : Mobile Brigade

MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUNAS	:	Musyawarah Nasional
NIAM	:	*Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij*
NII	:	Negara Islam Indonesia
NU	:	Nahdlatul Ulama
NV		*Naamlodze Vennotschap*
P3R	:	Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakyat
P4 Pusat	:	Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
PAKIN	:	Panitia Koordinasi Interdepartementel
PAM	:	Pengawas Aliran Masyarakat
Panglima T &	:	Panglima Tentara & Teritorium
PANUP	:	Panitia Negara Urusan Protokol
PAR	:	Partai Adat Rakjat
PARINDO	:	Partai Republik Indonesia
PARINDRA	:	Partai Indonesia Raya
PARKI	:	Partai Kebangsaan Indonesia
PARKINDO	:	Partai Kristen Indonesia
PBB	:	Perserikatan Bangsa - Bangsa
PBI	:	Persatuan Buruh Indonesia
PBKI	:	persatuan buruh kehutanan Indonesia
PEMILU	:	Pemilihan Umum
PEPERPU	:	Peraturan Penguasa Perang Pusat
PERBEPSI	:	Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata seluruh Indonesia
PERBUM	:	Persatuan Buruh Minyak
PERMAI	:	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia
PERMESTA	:	Perdjuangan Rakjat Semesta
PERMINA	:	Perusahaan Minyak Nasional
PERPU	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERWIN	:	Persatuan Wanita Indonesia
PERWITT	:	Persatuan Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa
PESARRA	:	Pesawat Saluran Radio Rakyat
PGPN	:	Peraturan Gaji Pegawai Negeri
PII	:	Persatuan Insinyur Indonesia
PIR	:	Persatuan Indonesia Raya
PITTEPE	:	Pembantu Inspektorat Teritorial dan Perlawanan Rakyat
PKBLN	:	Panitya Koordinasi Bantuan Luar Negeri
PKI	:	Partai Komunis Indonesia
PMD	:	Pembangunan Masyarakat Desa
PMI	:	Palang Merah Indonesia
PMRI	:	Perdana Menteri Republik Indonesia
PN	:	Pengadilan Negeri
PNC	:	Panitia Negara Chusus
PNI	:	Partai Nasional Indonesia
PNPKK	:	Panitia Negara Penampungan Korban Kekacauan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PON	:	Pekan Olahraga Nasional
PORAK	:	Pekan Olahraga Antar Kementerian

PP : Peraturan Pemerintah
PP&K : Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
PPDI : Persatuan Pamong Desa Indonesia
PPGI : Persatuan Pedagang Gula Indonesia
PPI : Partai Putri Indonesia
PPI : Panitia Pemilihan Indonesia
PPKKD : Panitia Penampungan Korban Kekacauan Daerah
PPLN : Pejabat Perwakilan Luar Negeri
PPPLK : Panitia Penasehat Pendidikan dan Latihan Kejuruan
PPSI : Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia
PRI : Partai Rakyat Indonesia
PRN : Partai Rakjat Nasional
PRRI : Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PRRI : Pemuda Republik Rakyat Indonesia
PSI : Partai Sosialis Indonesia
PSII : Partai Sjarikat Islam Indonesia
PTIK : Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
PTT : Pos Telekomunikasi dan Telegraf
PUPB : Persatuan Usaha Pengendara Betja
PUT : Pekerjaan Umum dan Tenaga
PUTER : Perwira Urusan Teritorial
PWI : Persatuan Wartawan Indonesia
RAB : Rencana Anggaran Belanja
REPELITA : Rencana Pembangunan Lima Tahun
RIS : Republik Indonesia Serikat
RMS : Republik Maluku Selatan
RPP : Rantjangan Peraturan Pemerintah
RRC : Republik Rakyat Cina
RRT : Republik Rakyat Tiongkok
RUU : Rencana Undang Undang
SARBUPRI : Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SBAD : Serikat Buruh Angkatan Darat
SBGLI : Serikat Buruh Gas dan Listrik Indonesia
SBKA : Serikat Buruh Kereta Api
SE : Surat Edaran
SEATO : *Southeast Asia Treaty Organization*
SEGERA : Sentral Gerakan Ekonomi Rakyat
SERBUKAN : Serikat Buruh Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian
SGSS : Satuan Gerilya Sumatera Selatan
SK : Surat Keputusan
SKMA : Sekolah Kehewanan Menengah Atas
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SOBSI : Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPAU : Sekolah Penerbang Angkatan Udara
SPD : Surat Penyediaan Dana
SPMU : Surat Perintah Membayar Uang
SSKDN : Serikat Sekerja Kementrian Dalam Negeri

SSPKN	:	Serikat Sekerdja Perbendaharaan dan Kas Negara
Staf 'K'	:	Staf Keamanan
Stbl	:	*Staatsblad*
SUAD	:	Staf Umum Angkatan Darat
TII	:	Tentara Islam Indonesia
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UI		Universitas Indonesia
UMKAI	:	Usaha Memordenisir Kekayaan Alam Indonesia
UNCI	:	*United Nations Commission for Indonesia*
UNDIP	:	Universitas Diponegoro
UNESCO	:	*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*
UNICEF	:	*The United Nations Children's Fund*
UPRI	:	Urusan Pejuang Republik Indonesia
USA	:	*United State of America*
USOM	:	*United States of America Operations Missions*
UU	:	Undang-Undang
UU PKB	:	Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
UU SOB	:	*De Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg*
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UUDP	:	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan
UUDS	:	Undang - Undang Dasar Sementara
UUKB	:	Undang - Undang Keadaan Bahaya
VIGI	:	*Vereniging van Importeurs Groot Handelaren in Indonesia*
WHO	:	*World Health Organization*
WNI	:	Warga Negara Indonesia

ʒ

INDEKS WILAYAH

A

Aceh : 246, 278, 957, 1059, 1072, 1190, 1198, 1199, 1210, 1349, 1471, 1536, 1571, 1713, 1773, 1778, 1796, 1799, 1800, 1819, 1970, 2025, 3135, 3247, 3279

Ambon : 562, 1070, 2521, 3017, 3151, 3270

Amerika : 95, 113, 114, 129, 134, 150, 153, 161, 250, 583, 646, 2038, 2053, 2087, 2108, 2199, 2205, 2220, 2279, 2291, 2300, 2304, 2336, 2382, 2393, 2400, 2409, 2582, 2746, 2827, 2880, 2887, 2913, 3184

Argentina : 2265, 2301

Australia : 112, 125, 1958, 1967, 2031, 2063, 2091, 2147, 2196, 2214, 2224, 2257, 2270, 2305, 2364, 2378, 2421, 2812, 2824, 2866, 3050, 3288, 3311

Austria : 2156, 2854

B

Bali : 35, 154, 282, 298, 932, 1467, 1714, 1716, 2071, 2125, 3143

Balikpapan : 2525, 3040

Bandung : 124, 152, 562, 584, 588, 601, 709, 782, 874, 1036, 1252, 1271, 1326, 1337, 1338, 1340, 1354, 1358, 1489, 1567, 1745, 1812, 1897, 2006, 2099, 2161, 2209, 2230, 2564, 2620, 2753, 3012, 3029, 3038, 3301, 3331, 3376, 3638, 3762

Bangka Belitung : 1486, 1875, 2027, 2600, 3657

Banjarmasin : 132, 1030, 1040, 1302, 1776, 2564, 2974, 3004, 3136

Banten : 581, 952, 1128, 1437, 1452, 1523, 1793, 1811, 2677, 2725

Banyumas : 1023, 1086, 1122, 1136, 1138, 1629, 3445

Banyuwangi : 990, 2673, 2683, 2705

Batang : 993, 1272

Belanda : 95, 100, 102, 128, 133, 141, 217, 470, 526, 535, 767, 853, 898, 932, 961, 997, 1014, 1028, 1039, 1056, 1121, 1186, 1232, 1239,1243, 1312, 1318, 1340, 1407, 1596, 1648, 1826, 1945, 1946, 1947, 1952, 1967, 1968, 1982, 1983, 2013, 2015, 2029, 2039, 2040, 2051, 2052, 2053, 2069, 2073, 2079, 2048, 2093, 2097, 2130, 2133, 2136, 2168, 2169, 2234, 2244, 2254, 2310, 2387, 2394, 2395, 2397, 2398, 2402, 2414, 2463, 2482, 2571, 2799, 2812, 2825, 2826, 2840, 2857, 2889, 2903, 3048, 3114, 3217, 3313, 3367, 3376, 3413, 3439, 3562, 3564, 3632

Belgia : 906, 1959, 2070, 2142, 2173, 2241, 2286, 2903

Bima : 3646

Birma : 2010, 2020, 2086, 2102, 2139, 2205, 2274, 3278, 3401, 2046

Blitar : 2041

Bogor : 655, 871, 924, 979, 1021, 1075, 2538, 2735, 2766, 3259, 3349, 3639

Bojonegoro : 1740

Boyolali : 984, 987, 1020, 1272

Bukittinggi : 493, 702, 1250, 3290, 3407

C

California : 1155, 3285
Canbera : 109, 1480, 2063
Ceylon : 100, 2064, 2080, 2139, 2167, 2176, 2184, 2190, 2202
Cilacap : 1022, 1046, 1134, 1281, 3033
Cirebon : 1149, 1345, 2455, 3434, 3663, 3678
Colombo : 107, 2016, 2101, 2362

D
Denmark : 2096, 2110, 2235, 2363, 2832, 2869, 2872

E
Eropa : 2146, 2220, 2269, 2276, 2307, 2336, 2893, 3184, 3216, 3384

F
Filipina : 112, 1610, 2284, 1094, 1225, 1976, 2008, 2046, 2061, 2083, 2089, 2172, 2177, 2192, 2204, 2260, 2373, 2412, 3383
Finlandia : 2056, 2366

G
Gorontalo : 623, 1197, 3490, 3495

H
Hongaria : 1996, 2185, 2276, 2277, 2839, 2884
Hongkong : 2011, 2165, 2303, 2403, 2431, 2862

I
India : 100, 111, 848, 933, 1468, 1470, 1964, 1967, 2020, 2046, 2082, 2134, 2138, 2139, 2150, 2181, 2229, 2239, 2272, 2274, 2291, 2390, 2401, 2424, 2580, 2675, 2711, 2816, 2824, 285, 2906, 2913, 3278, 3318, 3401, 3432
Inggris : 100, 122, 1295, 1631, 2075, 2170, 2171, 2195, 2249, 2262, 2282, 2283, 2420 2437, 2617, 2903, 2913, 2917, 3202
Italia : 890, 911, 1088, 2127, 2377, 2835, 2856, 2903, 2928

J

Jakarta : 3, 51, 84, 203, 210, 213, 216, 237, 274, 311, 318, 367, 371, 374, 435, 450, 487, 520, 529, 605, 610, 630, 643, 663, 684, 698, 721, 736, 835, 837, 861, 863, 936, 942, 961, 980, 991, 1161, 1215, 1230, 1302, 1307, 1334, 1344, 1348, 1375, 1388, 1414, 1437, 1502, 1523, 1642, 1730, 1733, 1742, 1763, 1807, 1851, 1858 1871, 1910, 1912, 1930, 2053, 2055, 2067, 2072, 2079, 2226, 2336, 2362, 2399, 2454, 2477, 2498, 2500 2527, 2533, 2581, 2613, 2651, 2655, 2660, 2686, 2719, 2742, 2808, 2856, 2933, 2952, 2957, 3156, 3262, 3344, 3346, 3383, 3402, 3427, 3677, 3751

Jambi : 344, 1732, 1789, 1792, 2564

Jawa Barat : 126, 248, 274, 505, 555, 630, 724, 929, 951, 954, 966, 980, 988, 1013, 1015, 1031, 1033, 1035, 1057, 1065, 1074, 1093, 1124, 1203, 1226, 1247, 1256, 1262, 1275, 1310, 1354, 1366, 1387, 1427, 1438, 1441, 1460, 1502, 1512, 1550, 1641, 1750, 1939, 2402, 2451, 2677, 2678, 2690, 2774, 2797, 2807, 3161, 3175, 3415, 3427, 3649, 3658, 3659, 3666, 3774

Jawa Tengah : 277, 347, 477, 543, 628, 676, 999, 1017, 1019, 1020, 1074, 1077, 1082, 1087, 1092, 1106, 1109, 1120, 1124, 1127, 1129, 1135, 1137, 1139, 1142, 1143, 1144, 1148, 1152, 1159, 1165, 1212, 1263, 1279, 1290, 1297, 1304, 1307, 1310, 1347, 1509, 1759, 1762, 2457, 2461, 2459, 2701, 2702, 2766, 3124, 3408, 3437, 3690, 3713

Jawa Timur : 204, 303, 436, 495, 556, 788, 969, 975, 992, 1009, 1014, 1090, 1126, 1156, 1121, 1310, 1325, 1331, 1339, 1438, 1491, 1492, 1638, 1715, 1722, 1758, 1813, 1885, 1982, 2737, 3064, 3091, 3242, 3414, 3484, 3716

Jepang : 369, 491, 1066, 1158, 1419, 1978, 2037, 2048, 2062, 2105, 2107, 2113, 2131, 2132, 2141, 2159, 2160, 2163, 2243, 2292, 2295, 2296, 2323, 2324, 2327, 2337, 2339, 2341, 2344, 2348, 2351, 2354, 2380, 2576, 2657, 2792, 2821, 2837, 2876, 2880, 3432

Jerman : 133, 900, 2009, 2026, 2130, 2152, 2281, 2288, 2313, 2319, 2355, 2376, 2634, 2650, 2812, 2823, 2851, 2854, 2870, 2873, 2882, 2913, 2938, 3683

K

Kalimantan Barat : 294, 1119, 1785, 2129, 3112, 3459

Kalimantan Selatan : 302, 1007, 1369, 1466, 1561, 2898, 3488, 3695

Kalimantan Tengah : 287, 1781, 3447

Kalimantan Timur : 836, 931, 1194, 1224, 1772, 1776, 1921, 3036, 3481

Kamboja : 2060

Karachi : 2322, 3154

Korea : 1966, 2140, 2340

L

Lampung : 1300, 1362, 1761, 1846, 3145, 3456, 3662, 3717

Lisabon : 2285

London : 2204, 2271, 2350, 2805, 2842

M

Madiun : 983, 1206, 1629, 3636
Magelang : 1137, 1147, 1509, 1798
Makassar : 274, 562, 1741, 1818, 1870, 3289, 3534, 3656, 1039, 1081, 1117, 1192, 1738, 1743, 1771, 1822, 1879, 1927, 2409, 2414, 2473, 2493, 2543, 2564, 3407
Malaysia : 910, 2129, 2206, 2318
Maluku : 274, 479, 1124, 1232, 1379, 1442, 1548, 1726, 1766, 1775, 1780, 2495, 3001, 3151, 3473
Manado : 1756, 2564, 3632, 3698
Manila : 2001, 2005, 2115, 2131, 2145, 2153, 2335
Maroko : 2245
Meksiko : 2504
Mesir : 335, 2014, 2030, 2035, 2104, 2193, 2226, 2241, 2868, 3264
Monaco : 2049
Mongolia : 2273, 2369
Moskow : 1854, 2066, 2263, 2268, 2302

N

New Delhi : 104, 488, 848, 1967, 2101, 2137, 2150, 2204, 2850, 3201, 3376
New Zeland : 2111, 2305
Norwegia : 2240, 2361, 2830, 2845, 2854, 2858
Nusa Tenggara : 230, 417, 1777, 1788, 3614

P

Padang : 203, 439, 562, 879, 1064, 1390, 1530, 2558, 2975, 3247, 3534, 3653
Pakistan : 888, 1881, 1994, 2046, 2085, 2139, 2183, 2192, 2257, 2274, 2275, 2817, 2818, 2913, 3278, 3401
Palembang : 213, 464, 562, 1001, 1056, 1233, 1344, 1525, 1790, 1854, 2384, 2558, 2705, 2742, 2852, 3045, 3069, 3723
Pasuruan : 1051, 1188, 1331, 2396, 2479, 3132
Pekalongan : 207, 1034, 1092, 1127, 1129, 1164, 1289, 1357, 1372, 1731, 1770, 1798, 2770
Pekanbaru : 1091, 1755, 2564
Perancis : 100, 133, 2122, 2231, 2287, 2315, 2831, 2848, 2854, 2865, 2928
Pontianak : 562, 629
Portugal : 2112, 2180
Probolinggo : 983, 992, 1195, 2770, 3439, 3631

R

Rangoon : 2153, 2228, 2290
Riau : 976, 1095, 1486, 1792, 1832, 1882, 2058, 2207, 2946
Rumania : 2185, 2360
Rusia : 238, 2017, 2038, 2346, 2367, 2367, 2382, 2908

S

Semarang : 184, 460, 497, 562, 878, 1082, 1097, 1103, 1120, 1133, 1135, 1157, 1716, 1852, 1892, 2549, 2776, 2800, 3052, 3092, 3097, 3355
Singapura : 118, 239, 1193, 1295, 1391, 2058, 2222, 2403, 2452, 1227, 1241, 1976, 2128, 2206, 2862
Stockholm : 2078
Sudan : 2030, 2236, 2357
Sulawesi Selatan : 388, 940, 1045, 1124, 1201, 1483, 1487, 1493, 1526, 2386, 2990, 3279

Sulawesi Tengah : 1158, 1242, 1697, 2644
Sulawesi Utara : 265, 1570, 1747, 1767, 1768, 1786, 1889, 2554, 2636, 2644
Sumatera Barat : 192, 265, 1795, 2125, 2975, 3003
Sumatera Selatan : 213, 252, 256, 876, 1102, 1333, 1362, 1439, 1523, 1718, 1751, 1782, 1872, 1909, 2700, 2728, 2733, 3096, 3456, 3477, 3570
Sumatera Utara : 233, 622, 645, 714, 1066, 1198, 1278, 1317, 1327, 1567, 1571, 1728, 1779, 1791, 1860, 1872, 1909, 1951, 1970, 2025, 2107, 2125, 2554, 2596, 2616, 2619, 2672, 2694, 2714, 2783, 3046, 3079, 3085, 3258, 3293, 3333, 3352, 3456, 3476, 3491, 3686, 3774
Surabaya : 245, 556, 562, 602, 625, 636, 930, 933, 983, 985, 1189, 1812, 1820, 1873, 1938, 1944, 2126,
2400, 2424, 2556, 2558, 2564, 2590, 2605, 2606, 2698, 2794, 3004, 3049, 3063, 3100, 3223, 3255, 3355
Suria : 2090, 2281, 3175
Suriname : 2065, 2135, 2221, 2326, 2419, 3435
Swedia : 2151, 2248, 2828, 2854, 2861
Swiss : 102, 1422, 1901, 2306, 2333, 2838, 2854, 2867, 3066, 3227, 3232

T

Taiwan : 2006, 2204, 2324, 2347, 2351, 2371, 3243
Teheran : 2098
Tokyo : 1978, 2105, 2117, 2243, 2610, 2772, 2871
Tunisia : 2252, 2124
Turki : 2219, 2289

W

Washington : 114, 496, 2002, 2004, 2072, 2119, 2598, 2814, 2827, 2841, 2877, 2894, 3567

Y

Yogyakarta : 339, 420, 444, 540, 541, 578, 562, 578, 772, 790, 871, 959, 1116, 1043, 1232, 1373, 1589, 1720, 1753, 1797, 1806, 1848, 1910, 1961, 1962, 1964, 2108, 2657, 2666, 2670, 3223, 3296, 3316, 2374, 2879, 2881, 3177, 3511
:

INDEKS NAMA

A

Abbas, H.Sirajudin : 3668
Abdullah, Thajib : 3716
Ahmadiyyah : 3133
Aidit, D.N. : 1347, 2097
Akademi Penerbangan Indonesia : 3246
Akson, Luang Phinit : 2370
Al Khoury, Faris : 2257
Alamuljakin, Gusti : 1350
Albuquerque, Mr. Oswaldo Triguire : 2149
Algemene Landbouw Syndicaat : 1108
Algemene Oorlogsongevallen Regeling : 1569
Algemene Secretarie : 3211
Algemene Volkscrediet Bank : 2788
Alimin : 901
Allerdt, Dr.Helmut : 2152
Allison, John M. : 2279
American Christian Missionary : 1085
Amirudin, K.Achmadi : 1339
Anak Agoeng Gde Oka : 1714
Anak Agung Gede Agung : 897
Anderson, Mr. Arne Bogh : 2363
Ang Tjiang Liat : 3693
Ansor : 1820, 3232
Antasari, Pahlawan : 2540
APRA : 949, 1153
APRIS : 1488, 1528
Arce, Dr. Manuel Maples : 2105
Asian Games : 3233, 3329
Asraroedin : 499
Asrarudin : 3713
Atmosudigdo, Sakidjan : 496
AURI : 1381, 1459, 1470, 1537
Azis, Andi : 940

B

Bafadal, M.O. : 3692
Bank Indonesia (BI) : 435, 529, 613, 2806, 2809, 2888, 3249
Basah, Moh. : 3719
Bataafse Petroleum My (BPM) : 3077
Batalyon Munawar : 964
Bekas Pejuang Islam Indonesia (BPII) : 1541
Bencana alam : 3364, 3432, 3437, 3450, 3453, 3715

Beureuh, Daud : 1071, 1327
Bintang Jasa : 899, 3571
Biologische Landbouw : 2699
Bisanz, Prof. Dr. R.H.J : 152
Bloemen, Drs. : 3202
BNI : 705, 883, 2789, 2793, 2798, 2802, 2805
BRI : 2797
Brigade Hasanuddin : 1434
Brionval, M. Jean : 2231
British Overseas Airways Co : 956
Broto, Ahmad : 1290
BTI : 1321, 1872, 2727, 2736, 2775, 3079, 3081, 3088, 3106
Budiardjo, Ali : 82

C

Caltex : 1091, 2535
Cohran, Merle : 2087
Colombo Plan : 107, 2111, 2137, 2179, 2222, 2374, 2917
Coonesinha, A.E : 2064
Corputty, A. : 898
Crocker, Mr. : 2196

D

Daerah otonom : 170, 789, 1224, 1671, 1689, 1718, 1744, 1780, 1780, 1781, 3098, 3305, 3531, 3540, 3570, 3593, 3687
Dandawijaya, R. Moch. Mochsin : 937
De Javasche Bank : 2790, 2807, 3519
De Meel, Drs. H. : 48
de Vliger, Marcel : 2286
Demonstrasi : 1096, 1169, 3645
Dewan Bahan Makanan : 2778
Dewan Kehormatan Militer : 1448
Dewan Nasional : 232, 260, 1218, 1478, 1590, 1676, 1680, 1686, 1687, 1689, 1697, 1699, 1935, 1954, 2330, 2443, 2445, 2562
Dewan Perancang Nasional : 466, 3586, 3727, 3783
Dhofir, K.H. : 1342

DI / TII / NII : 944, 951, 966, 977, 988, 995, 1002, 1015, 1017, 1022, 1024, 1042, 1057, 1061, 1075, 1089, 1159, 1163, 1170, 1172, 1180, 1209, 1226, 1228, 1274, 1362, 1483, 1817
Dinata, Oto Iskandar : 894
Dirjoatmojo, R.S. : 106
Djalaluddin, Dr. Syeh Hadji : 3689
Djojoprajitno, S. : 3651
Djuanda : 172, 239, 910, 926, 927, 928, 1217, 1663, 1664
Dons, Erik : 2240
Doorgangskamp : 1255, 1302, 1540
Dulles, J.F. : 2205

E
Elizabeth II, Ratu Inggris : 2075
Escomtobank : 2795
Evenhuis, E. : 1325

F
Fact Finding Committee (FFC) : 440, 1562, 3768
Falconi, Dr. Filippo Muzi : 2377
FAO : 110, 2077, 2680, 2689, 2711, 2732, 2753, 2763, 2772, 2779, 2781, 2782
Faqi, Sayid Hasan : 2238
Fattah, Amir : 1372
FDR : 1805
Ferreira, Dr. Carlos Pedro Pito : 2112
Festing, General Sir Fancis : 925
Fiki, Tuan Majid Mohamad Hasan : 2197
Frandzen, Mr.Harry Emil Poul Toyberg : 2096
Franzen, Toyberg : 2235
Frederiks, F. : 1318
Front Nasional : 649, 931, 1953, 1954, 1956
Front Partyloos : 1851
Front Persatuan Tani : 3656
Fuentebella, Jose : 2177

G
Gabungan Instalatif Seluruh Indonesia (G.I.S.I) : 2507
General Assembly International Criminal Police Commission : 2285
Gerakan Gerilya Nederland : 1180
Gerakan Igama Imam Hak (IIH) atau Hidup Betul (HB) : 967

Gerakan Muslimin : 1861
Gerakan Penentang Kolonialisme Indonesia (GPKI) 1208
Gerombolan bersenjata : 981, 1052, 1084, 1121, 1143, 1154, 1185, 3546
Gerombolan pengacau : 953, 1020, 1051, 1086, 1129, 1136, 1191, 1346
Gerwani : 1897, 1900
Ghozali, K.H.Mohd : 1286
GIA : 264, 2978, 3000, 3004, 3013, 3017, 3701
Gomez, Senor Javier Rojo : 2251
Goodwill Mission : 2010
Goransson, Tord : 2151

H
Haarstert, F.V. : 1318
Hadinegoro, G.P.P.H : 112
Hadinoto, Mr. Suyono : 114
Hadji Abdul Hamid : 1356
Halim, Dr. : 201, 1712
Halusa, Arno : 2156
Hamengkubuwono, Sultan : 201, 889, 1716, 3296
Hamid, Hadji Abdul : 1356
Hanafi, A.M. : 39, 1696
Handokowijojo , I.S. : 3698
Harahap, Abdul Djalil : 906
Harahap, Burhanudin : 1647, 1650, 1652, 3754
Hardjotafsir : 1348
Harjono, Anwar : 3722
Harjoto : 164
Harsono Tjokroaminoto : 530
Hasan, Moh. : 1248
Hatta, Moh. : 759, 1582, 2295
Helmi, Dr. Alfian Yusuf : 71
Huang Chen, Mr. : 2182
Huizenbow : 1069
Hukum Pidana : 1348, 3508, 3549, 3572

I
ICA : 2300, 2912, 2913, 3286, 3294, 3303, 3327
Ichsan, Mr. : 109
Ikatan Pandu Indonesia : 3232, 3236
Ikatan Pelajar Indonesia Aceh (IPINDA) : 3247
Ildefonso, Dr. : 2247
ILO : 2081, 2187, 2256, 3117, 3029, 3056

Indian Congress of Science : 3372
Indonesische Bedrijvenwet : 2951, 3532, 3565
Industrieele Bond : 918
Institut Teknologi 10 November : 3355
Institut Teknologi Bandung : 3301
Institute voor Tropische Geneeskunde Rotterdam Leiden : 3221

J
Jajasan Geografi : 3479
Jambore Kepanduan Nasional : 3233
Josotaruno, Ichsannoer : 1223
Jusuf Wibisono : 3681

K
KAA : 2199
Kabinet Kerja : 3792
Kartosuwirjo, SM. : 1153, 1170
Kawilarang, Kolonel : 2481
Kejaksaan Agung : 937, 1025, 1049, 1225, 1235, 1254, 1332, 1504, 1977, 2003, 2057, 2344, 2391, 2456, 2671, 2683, 2992, 3235
Kelaparan : 2906, 3408, 3445, 3690
Kemahli, Taufik Kazim : 2289
Khaliquzzaman, Mr. Chaudhry : 2192
Khan, Abdur Rahman : 2275
KMB : 757, 1593, 1596, 1629, 1648, 1945, 2007, 2133
KNIL : 1006, 1100, 1517
Kobarsjih : 3633
Koenigswarter, Jules : 2287
Komunis : 1207, 1816, 1881, 2028, 2258, 2320, 2354, 2431, 2456, 3272
Konferensi Alim Ulama : 1848, 3146
Konferensi Badan Tenaga Atom Internasional : 2356
Konferensi Bank-Bank : 2796
Konferensi *Commission Internationale de Police Criminelle* : 2078
Konferensi Dinas Kepolisian : 1566
Konferensi Genewa : 2276, 3406
Konferensi Gereja-Gereja : 3165
Konferensi Hidrografi : 2049
Konferensi Hukum Laut : 2763
Konferensi Indonesia-Belanda : 2169
Konferensi Internasional Palang Merah : 3365
Konferensi Kaum Buddhis : 3148

Konferensi Keamanan : 1642
Konferensi Komite Perkebunan : 3029
Konferensi Militer : 2094
Konferensi Panitia Perdamaian Dunia : 2028
Konferensi Para Perdana Menteri Asia-Afrika : 2157
Konferensi Radio Administratif : 1979
Konferensi *Rubber Study Group* : 1965
Konferensi Staf 'K' : 1589
Kongres Gerilya Indonesia : 954
Kongres Rakyat Perjuangan Irian dan Makassar : 1818
Kongres Wanita Indonesia : 1829
Koninklijk Instituut voor de tropen : 3197, 3221, 3244
Konstituante : 92, 348, 519, 571, 573, 582, 641, 710, 774, 785, 1905, 1915, 1917, 1920, 1921, 2532, 3527, 3600, 3603, 3665, 3745, 3757, 3758, 3762, 3763, 3764, 3772, 3773, 3776, 3781, 3787, 3788, 3791
Korupsi : 1237, 1293, 1306, 1365, 1604
Kudeta : 2148, 2343
Kuo Min Tang : 2006, 3243
Kusnatalistra, Wardi : 3421
Kusnowardojo, R.S. : 168
Kusuma, Ir. Adnan : 152

L
LAN : 613, 1698
Lie Kim Hok : 1355
Lie Sing Kiem, Dr. : 156
Lubis, Sjakirin : 1336

M
M. Isa Anshary : 1354, 2485
MacDermot, Mr. Dermot Francis : 2249
Maharoof, Mr. : 2184
Maladi : 121, 1490
Malling, Mr. Jens Hendrik Peder Arnold : 2248
Malusetasi, Raja Areng : 940
Mangkunegaran : 1739
Mangoenkoesoemo, Mr. RMT. Soemardi : 47
Mangunkusumo, R.M.I. Soemardi : 51
Maramis, AA : 2268, 2302
Mardjani, Ma'rifat : 3687
Martadinata, Komodor : 911
Martalogowo, Abdulrahman : 3718

Masyumi : 1022, 1354, 1366, 1751, 1763, 1803, 1817, 1823, 1839, 1841, 1855, 1857, 1862, 1875, 1885, 1890, 1925, 1942
Matthieu, F.J. : 117
Mawikere, Letnan A.L. : 1391
Mc Intyre, L.R. : 2270
Merapi-Merbabu Complex : 984, 987, 998, 1153
Militaire Bijstand : 1536
Militer Sukarela : 1564, 3610
Misi Militer : 853, 1449, 2130
Moenardjo, Kapten : 163
Monzios, R.G. : 2257
Muchtar : 1345
Muhammadiyah : 1498, 3144
Musyawarah Nasional : 445, 1562, 1687, 1688, 3322, 3774

Muttaqien, E.Z. : 3714
Mutual Security Act (MSA) : 2044, 2053
Muzakkar, Kahar : 358, 939, 1178, 1182, 3419

N
Nabi Muhammad SAW : 1323
Nagy, Janos : 2277, 2191
Nasionalisasi : 288, 526, 1825, 2571, 2596, 2995, 2997, 3000
Natsir, N. : 847, 915, 1575, 1580, 1857
Nielsen, V.Theis : 2235
Nieuw Soerabajasch Handelsblad : 2427
Nieuwenhuis : 2630
Notohatyanto, Mr. R.P. : 130
Notowidigdo, Mukarto : 2119
NU : 1345, 1845, 1852, 1854, 1855
Nyoto : 2097
Nys, Francois : 2142

O
Oetarjo, S. : 3641
Onderneming : 1065, 1368
Ong Hui : 3700
Ong Hwa Pok : 906
Operasi Banteng : 1437
Operasi Merdeka : 349, 626, 998, 1428, 1442
Oposisi : 1806, 1857, 1887, 2490

P

Pampasan perang : 1419, 2296, 2348
Pandu Rakyat Indonesia (PRI) : 1822
Panitia - Non Partai : 1880
Panitia "Boys-Town"Indonesia : 1618
Panitia Ad Hoc Perikanan : 2691
Panitia Anggaran DPR : 481
Panitia Angket DPR : 2957
Panitia Desentralisasi Interdepartemental : 1581
Panitia Gas Alam : 2623
Panitia Gerakan Rakjat Bebas : 1851
Panitia Induk untuk Meter Kilogram : 1656
Panitia Industrialisasi : 390
Panitia Interdepartemental Urusan Bencana Alam Nasional : 3453
Panitia Interdepartemental Urusan Konstituante : 3757
Panitia Kebudayaan : 1574, 3183
Panitia Kecil Proyek-Proyek Bantuan Luar Negeri : 2918
Panitia Kerja Likuidasi Tanah Partikular : 3604
Panitia Kerja Likuidasi Tanah-tanah Partikelir : 2766
Panitia Koordinasi Bantuan Luar Negeri (PKBLN) : 2926, 2899, 2920
Panitia Koordinasi Interdepartemental (PAKIN) : 1657, 1672, 2143, 2137, 2855, 2907, 3107, 3303, 3318, 3626,
Panitia Menambah Hasil Bumi : 1606
Panitia Negara Khusus tentang Peninjauan Persetujuan-Persetujuan : 1596, 1983
Panitia Negara Pendidikan Teknik : 3334
Panitia Negara Pertimbangan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas : 288
Panitia Negara Untuk Menyelidiki Organisasi Kementerian-Kementerian : 1617, 1624, 1632, 1646, 3142
Panitia Negara Urusan Agraria : 2750
Panitia Negara Urusan Industri dan Pertanian Tekstil (Panitex) : 2633, 2635, 2648
Panitia Negara Urusan Pembagian Tanah Perkebunan : 2729, 2731
Panitia Negara Urusan Protokol : 922, 1706
Panitia Pembagi Tenaga Listrik : 866
Panitia Pembangun Wilayah Hutan dan : 2688
Panitia Pembantu Perjuangan Mesir : 2035
Panitia Pembantu Technis Pembangunan Masyarakat Desa : 444, 3490, 3495
Panitia Pembela Irian barat : 1943
Panitia Pembela Proklamasi : 1839

Panitia Pemberangkatan Naik Haji Presiden : 3141
Panitia Pembina Kesejahteraan Moril : 3409
Panitia Pemerintah Indonesia : 1241
Panitia Pemilihan : 392, 477, 736, 1912, 1923, 1932, 1933, 3679
Panitia Penampungan Korban Kekacauan Daerah : 1364, 3447
Panitia Penasehat Pendidikan dan Latihan Kejuruan (PPPLK) : 3266
Panitia Penyaringan Transfer Invisibles : 2968, 2972
Panitia Penyelesaian Hutang Negara : 486
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4) : 3043, 3055, 3058, 3060, 3070, 3073, 3074, 3078
Panitia Penyelidiki perikanan laut. : 2691
Panitia Perancang Otonomi untuk Perguruan Tinggi Negara : 3305
Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai : 512, 3122
Panitia Perencana Usaha Keamanan : 1083
Panitia Pergerakan Algier : 2088
Panitia Permusyawaratan DPR : 3782
Panitia Permusyawaratan Pembahasan Anggaran Belanja, UU, Mosi dan Interpelasi : 3734
Panitia Persiapan Konstitusi : 3772
Panitia Persiapan Perbekalan : 2668
Panitia Pertimbangan Perintah Belajar : 2897, 3209
Panitia Perumahan Kabinet Perdana Menteri : 886, 887
Panitia Teknis Irian : 334, 1574
Panitia Umum Pegawai : 31
Panitia Upah : 3109
Panitia Urusan Tionghoa : 2599
Panitya Pembangun Wilayah Hutan dan : 2688
Parki (Partai Kebangsaan Indonesia) : 1893
Parkindo : 1827
Partai Murba : 1328, 1821, 1937, 2455
Partai Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) : 1807, 1907, 3147
Parthasarathi, G. : 2272
Pasha, Abdulrahman Azzam : 2257
Pattimura, Pahlawan : 2513
Paus Jouannes XXIII : 907
Pawindo, Haji Daeng : 1242
PBB : 164, 1946, 1948, 1949, 1952, 1991, 2022, 2074, 2092, 2120, 2223, 2257, 2266, 2772, 2919, 3096, 3176, 3358
Pedoman Rakyat, harian : 2493
Pembajakan : 1032, 1094

Pemberontakan : 940, 964, 964, 1222, 1297, 1565, 2454.
Pemogokan : 3022, 3036, 3040, 3045, 3047, 3061, 3062, 3076, 3082
Pemuda Demokrat Indonesia : 1819
Pemuda Rakyat : 1064, 1826, 1834, 1855
Penyelundupan : 1070, 1073, 1102, 1118, 1186, 1193, 1204, 1207, 1225, 1353, 2503, 2554
Perampokan : 948, 960, 983, 993, 1036, 1038, 1043, 1044, 1062, 1111, 1114, 1128, 1132, 1142
Perbatasan : 950, 1775
Perhimpunan Rakyat Indonesia Kemanusiaan : 1034
Perintis Pergerakan Kemerdekaan : 901
Peristiwa 17 Oktober 1952 : 1462, 1552, 3667
Peristiwa Amurang : 971
Peristiwa Cikini : 1214, 3449
Permesta : 1223, 1227, 1228, 1473
Persatuan Anggota Gerilya Indonesia (PAGI) : 1814
Persatuan Bekas Pejuang Bersenjata Seluruh Indonesia (PERBEPSI). : 1515
Persatuan Bekas Polisi : 1547
Persatuan Buruh Indonesia (PBI) : 1824
Persatuan Buruh Kehutanan Indonesia (PBKI) : 3125
Persatuan Buruh Minyak (Perbum) : 3077
Persatuan Insinyur Indonesia : 2777, 3338
Persatuan Islam : 1867
Persatuan Istri : 2660
Persatuan Kaum Tani (PKT) : 2700
Persatuan Korban Rasionalisasi : 935
Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI) : 1301, 1745
Persatuan Pedagang Gula Indonesia (PPGI) : 2536
Persatuan Pelajar Demobilisan : 3428
Persatuan Pemuda Pegawai Kabinet Perdana Menteri : 834
Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia (PPSI) : 2768
Persatuan Perkebunan Getah Rakyat : 2703
Persatuan Perkebunan Karet Rakyat Indonesia : 2672
Persatuan Rakyat Jelata : 1846
Persatuan Saudagar Indi (PERSI) : 2616
Persatuan Serikat Sekerja : 196
Persatuan Tani Nasional Indonesia : 2726
Persatuan Wanita Indonesia Morange (Perwin) : 3396
Persatuan Warganegara Indonesia Turunan Tionghoa : 1873
Pertambangan : 2589, 2656, 3579, 3622

PIR : 1856, 1884, 1892, 1905, 2670
Pirngadi, Let. Kol. R. : 142
Pitoi, F.A.P. : 3645
PKI : 1151, 1312, 1450, 1610, 1805, 1812, 1815, 1834, 1840, 1855, 1881, 1902, 1907, 1918, 2454, 2737, 2775, 3682, 3712
PMI : 3361, 3364, 3365, 3368, 3377, 3381, 3384, 3392
PNI : 1242, 1289, 1752, 1806, 1813, 1819, 1889, 2934, 3684, 3754.
PON : 3233
Potier, Dr. Augusto Rato : 2180
Prijono, Prof.Dr. : 910
Pringgodigdo, Mr. A.G. : 3307
Priyodiharjo, M Suharno : 110
Prodjo, R.M.S Soeryaning : 3710
Proklamasi : 951, 1699, 1900, 2516, 2523, 2528, 2533
PRRI : 192, 1222, 1223, 1227, 1565, 3726

PSI : 1855
PSSI : 1356, 1866, 2043
PT. Inaco : 3705
PT. Permina : 2642, 2653
Purwasudirjo : 115
Pvlie, Dr. Stane : 2278
PWI : 1063, 3677

R

Raka, I.G.G. : 3646
Raniwiharjo, A. Dachlan : 108
Rasjid, Soetan Moh. : 71, 3740
Rasjidi, AMJ : 3657
Ratanadib, Luang : 2246
Ratmoko, Mr. : 153
Rauf, Abdul : 2238
Razia Agustus : 1303
Razif, Mr. Moh. : 2280
Rifai, H. Masjur : 3705
Riyadi, Letkol. Slamet : 1538
RMS : 1269
Roem, Mr. : 219, 1875, 3007
Roosseno, Ir. : 2744
Rosjadi, Mr. Imron : 3450

S

Said, Rangkayo Rascena : 3632
Salawati, Ch. : 3708

Salim, Ferdi : 125
Santoso, Mr. M.Ulfah : 47
Sanusi, H.M. : 1345
Sarab, Dendevyn : 2369
Saravanamuttu J.P, Manicksothy : 2176
SARBUPRI : 1352, 2662, 3022, 3080, 3084, 3085, 3099, 3672
Sarjotjondro, S. : 2199
Sartola, Ahmad : 1293
Sastroamidjojo, Ali : 71, 172, 826, 1630, 1633, 1644, 1651, 1652, 1664, 1666, 1866, 1886, 1946, 2732, 3471, 3763, 3750
Satroamidjojo, Mr. M. Usman : 2265
Satuan Garong Sumatra Selatan : 1053
Schaper, H. : 117
Schermerhorn, Prof. : 1961
Scilingo, Adolfo : 2301
SEATO : 1472, 1958, 2175
Semen Gresik : 2621, 2649, 2887
Shaw, Mr. Patrick : 2378
Siauw Giok Tjhan : 3685
Simbolon, Kolonel : 1215
Sinaga, Dr. Hadrianus : 161
Siregar, Bonjol Humala : 110
Siswojo : 3712
Sjaichu, H. Achmad : 3704
SOB : 307, 1279, 1284, 1287, 1299, 1301, 1308, 1310, 1364, 3657
SOBSI : 1472, 1805, 1812, 1830, 1853, 1876, 1907, 3033, 3052, 3053, 3090, 3654
Soebijakto, Mr. : 165
Soedjono, Mr. : 910
Soehartono : 1031
Soekarno, Ir. : 1172, 1214, 1976, 2463, 2466, 2504, 3371, 3503, 3792
Soekelan : 1348
Soelardi : 3724
Soemarjan : 124
Soemarno, R.M.S. Soeryo : 106
Soemawidjaja, Doedi : 3688
Soenardjo, Prof. Drs. : 3283
Soepeni, Nj. : 910
Soepomo, Prof. Dr. : 2283
Soeriaatmaja, R.I. : 149
Soeriawinata, Elia : 115
Soerjoningprojo, R. : 3634

Soetikno, Mr. : 134
Soewirjo : 210
Son Ngoc Thanh : 2060
SS Luckonbach : 991
Sudirman, Jenderal : 3418
Sugeng, Bambang : 907, 1830
Suhardjo, R. : 3709
Suharto : 892
Sukarto, Letkol Imam : 912
Sukiman : 917, 1600, 1601, 1998
Sumatera dan Kalimantan Plan : 1749
Sumbada : 1324
Sumohardjo, Letjen Urip : 3418
Supeno, Kolonel Bambang : 1518
Sutan Syahrir : 2012
Sutomo : 3711
Swapraja : 819, 1739, 1748, 1753, 1760, 1838

T

Tabunidjaja, Mr. Memet : 3719
Tambang Mas Cikotok : 2622
Tambing, WL. : 3699
Tan Po Guan, Mr. : 3677
Tanah partikelir : 2698, 2735, 2766, 3349, 3530,
Tauran, Letkol C.B : 911
Tejokusumo, Holland : 110
Tengkorak Hitam : 968
Terusan Suez : 2264
The Blue Funnel Line : 1003
Tjakradibrata, Kusna : 1553
Tjambo, Andi : 1341
Tjiong Joe Lian, Dr. : 646
Tjoa Sie Hwie, Mr. : 3683
Tjokroadisumarto, Mr. : 2322
Tjokronegoro, Prof. Dr. Soetomo : 3201
Tyabji, Mr. Badruddin Faiz Hasan Badruddin : 2134

U

U nu : 2153, 2290
Umar, Hasan : 115
UNCI : 1963, 1969, 1992, 1993
UNESCO : 2259, 2911, 3318, 3324
UNICEF : 3431
Universitas Airlangga : 3255, 3307
Universitas Andalas : 3290, 3309
Universitas California : 3285
Universitas Diponegoro : 3355

Universitas Gadjah Mada : 3204, 3253, 3296, 3302, 3323
Universitas Hasanuddin : 3289, 3343
Universitas Indonesia : 1196, 3206, 3212, 3285, 3287, 3298
Universitas Islam Sumatera Utara : 3293
Universitas Sumatera Utara : 3333, 3352
Usman, Sjarif : 1506
Utoyo, Mr. : 2023

V
Valle, Sr. Alfonso Castro : 2368
van Beem, Ir.N.E. : 133
Van der Sti Chelen : 2142
van Royen : 2055
Vassillion, Nicholas Hadji : 2314
Veteran : 40, 697, 895, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1565, 1573, 3320, 3340, 3597
von Mirbach, Baron Dietrich : 2355
Voorlopige Nederl Militaire Missie : 1504
Vorstenlandse Landbouw Vereniging : 2666

W
Weikopf, Ir.J.J.A : 106
Werdjo, K. : 3700
Werdoyo, K. : 3654
Westerling : 937, 1980
Widjaja, H.A Chamid : 3720
Wilopo : 1600, 1601, 1630, 1907, 3093, 3207
Wiranatakusuma, Rd. Male : 1326
Wongsonegoro : 186, 1866, 3471
World Health Assembly : 1989, 3397
World Meteorological Organisation : 1984

Y
Yamin, Muhammad. : 1696, 3669
Yusuf, Abdullah : 3653

Z
Zain, M. Anwar : 3706
Zhukov, Dmitri Aleksandrovich : 2164
Zionistenbond : 2047
Zitek, Jan : 2253, 2293

CONCORDAN

Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama
4	1	188	65	113	115
5	2	193	74	112	116
7	4	194	75	131	117
564	5	196	76	98	118
10	6	827	78	130	120
11	7	198	80	127	121
17	8	3357	81	126	122
18	9	171	82	125	123
19	10	74	83	123	125
30	11	176	86	122	126
167	21	177	87	121	127
147	22	526	89	120	129
174	23	183	93	119	130
157	24	96	94	118	131
162	27	530	97	129	133
2407	30	531	99	111	134
440	31	100	101	133	135
591	33	104	102	134	136
599	34	105	103	137	137
51	36	106	104	143	139
73	37	107	107	148	140
83	43	108	109	149	141
508	47	109	110	430	142
518	48	110	111	154	145
524	50	116	112	3428	153
199	62	115	113	214	154
187	63	114	114	358	155

Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama

232	162	648	641	749	696
219	177	643	644	720	697
289	209	1571	648	1381	698
317	211	299	651	726	699
294	212	642	652	728	700
276	213	302	653	732	701
236	261	644	654	734	702
1469	308	650	655	2529	703
426	353	1700	656	741	704
420	379	459	657	837	705
428	389	1422	669	841	706
427	400	616	676	846	707
3352	426	645	677	3004	711
552	543	724	680	768	712
243	546	2990	681	770	713
263	567	666	682	771	714
566	588	662	683	245	715
565	589	683	685	866	717
567	597	696	686	867	718
570	599	692	687	775	720
2876	602	697	688	3009	721
608	616	698	689	868	723
629	620	699	690	784	724
648	641	700	691	776	725
643	644	693	692	786	726
608	616	703	693	787	727
629	620	717	695	305	729

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**

881	730	958	774	3632	804
885	731	1511	775	1494	805
312	732	1486	776	955	806
793	734	934	777	956	807
886	735	945	778	966	808
790	738	930	779	1032	809
794	739	936	780	971	810
797	740	937	781	965	811
801	741	1488	782	1498	812
800	742	938	784	963	813
802	743	962	785	1507	814
803	744	942	786	972	815
804	745	949	789	970	816
810	746	1490	790	974	817
814	749	941	791	975	818
807	750	943	792	976	819
808	751	950	793	977	820
813	752	969	794	978	821
816	754	946	795	979	822
817	755	947	796	973	823
828	765	1495	797	982	824
834	767	948	798	983	825
1485	769	951	799	985	826
940	770	952	800	986	827
929	771	1493	801	988	828
957	772	954	802	989	829
931	773	953	803	980	830

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
981	831	1031	862	1069	890

991	832	1034	863	1072	891
995	833	1033	864	2043	892
998	834	1039	865	1293	893
999	836	1040	866	1073	894
1001	838	1045	867	1098	895
1002	839	1047	868	1077	896
1003	840	1048	869	1078	897
1004	841	1732	870	1079	898
1005	842	1050	871	1081	899
1009	843	1051	872	1082	900
1010	844	1053	873	1083	901
1011	845	1076	874	1084	902
1014	846	1056	875	1085	903
2984	848	1265	876	1086	904
1016	849	1055	877	1087	905
1018	850	1058	878	1088	906
1019	851	1059	879	1097	907
1015	852	1060	880	1090	908
1020	853	1061	881	1091	909
1021	854	3636	882	1094	910
1023	855	1065	884	1095	911
1024	856	1063	885	1099	912
1026	857	2991	886	1103	913
1028	858	1066	887	1101	914
1029	859	1067	888	1100	915
1030	861	1068	889	1107	916

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
1106	917	1134	945	1238	972
1109	919	1135	946	1239	973

1093	920	1137	947	1240	974
1111	921	1136	948	1245	975
1113	922	1138	949	1243	976
1114	923	1140	950	1248	977
1115	924	1150	951	1247	979
1119	925	1143	952	1254	980
1122	926	1144	953	1261	981
1123	927	1149	954	1264	982
1120	928	1229	955	1255	983
1168	929	1152	956	1262	984
1121	930	1153	957	1249	985
1124	931	1154	958	1258	987
1125	932	1155	959	1275	988
1518	933	1450	960	1286	989
1438	934	1158	961	1266	990
1147	935	1156	962	1252	991
1126	936	1159	963	1269	993
960	937	1160	964	1270	994
1127	938	1162	965	1271	995
1128	939	1534	966	1274	996
1129	940	1199	967	1277	998
1130	941	1234	968	1273	1000
1133	942	1231	969	1278	1001
1131	943	1256	970	1279	1002
1132	944	1236	971	1292	1003

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
1280	1004	1393	1052	1499	1080
1287	1007	1394	1053	1502	1081
1289	1008	1395	1054	1504	1082

1290	1009	1396	1055	1509	1083
1284	1010	1397	1056	1526	1084
1298	1011	1398	1057	1528	1085
1295	1014	1401	1058	1529	1086
1296	1015	1403	1060	1533	1087
1294	1017	1404	1061	1074	1088
1300	1024	1406	1062	2663	1091
1303	1025	1400	1063	1716	1092
825	1026	1407	1064	1717	1093
1305	1026	1408	1065	3177	1095
1309	1027	1411	1066	1429	1097
1310	1030	1412	1067	2980	1098
1354	1037	1413	1068	2981	1099
1369	1038	1414	1069	2673	1100
1373	1039	1415	1070	1589	1101
1371	1040	1427	1071	1725	1102
1375	1041	1430	1072	2985	1103
1374	1042	1431	1073	1432	1104
1382	1044	1440	1074	1259	1105
1376	1045	1448	1075	1594	1106
1383	1046	3190	1076	1595	1108
1384	1047	1451	1077	2988	1110
1385	1048	1452	1078	1510	1112
1389	1049	1497	1079	2690	1113

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
2993	1114	1735	1146	1684	1180
3651	1115	1848	1147	1808	1186
2586	1119	3072	1148	1814	1187
1741	1121	1618	1149	935	1188

1102	1122	1748	1150	1813	1189
1104	1123	2521	1151	1805	1190
1105	1124	1157	1152	1491	1193
1112	1125	1164	1155	1804	1196
2590	1126	2102	1156	1811	1198
190	1127	1752	1157	939	1199
1447	1128	3671	1158	961	1200
1445	1129	2706	1159	1163	1201
3137	1130	1908	1160	944	1202
3063	1131	1631	1161	968	1203
1525	1132	1754	1162	959	1204
1117	1133	2996	1163	1820	1205
1306	1134	2479	1164	1503	1206
1610	1135	2998	1167	1000	1207
1308	1136	1763	1168	3036	1208
3139	1137	1642	1169	1017	1209
3141	1138	1774	1171	1027	1210
719	1139	1922	1173	3018	1212
1745	1140	1204	1174	3419	1215
1313	1141	1950	1175	1818	1217
1145	1142	1658	1176	1297	1218
1530	1144	1215	1177	1830	1221
1151	1145	517	1179	1834	1222

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
3082	1224	1203	1274	2018	1309
1835	1225	1962	1276	1979	1311
3136	1227	1968	1277	2024	1313
1824	1229	1990	1278	2025	1314
1839	1233	2662	1279	2027	1315

1304	1236	1969	1280	2026	1316
3138	1238	1973	1281	2031	1317
1841	1239	1972	1282	2041	1319
3067	1241	3358	1284	3056	1320
1842	1242	1975	1285	2042	1321
1843	1243	1977	1286	2016	1322
1311	1244	1981	1288	2049	1324
1844	1245	1987	1290	2047	1325
1146	1246	1988	1291	2021	1326
3144	1248	1991	1292	2052	1327
1845	1249	1992	1294	2055	1328
3069	1250	1993	1295	2051	1329
3070	1251	1997	1299	2057	1333
1853	1253	2000	1300	2058	1335
3170	1260	2001	1301	2062	1338
3081	1261	2002	1302	2046	1339
3076	1262	2004	1303	2066	1340
1170	1265	2005	1304	2060	1341
1321	1266	2006	1305	2063	1342
1825	1267	2003	1306	2071	1343
1169	1268	2011	1307	2068	1344
1174	1272	2012	1308	2078	1345

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
2087	1346	2386	1382	2416	1418
2081	1348	2390	1383	2419	1419
2089	1350	2389	1384	2420	1420
2093	1351	2388	1386	1148	1423
2091	1352	2391	1387	2599	1424
2094	1354	2392	1388	2422	1425

2099	1356	2393	1392	2421	1427
2110	1358	2397	1393	2423	1428
2107	1359	2396	1394	2424	1429
2108	1360	2400	1395	2428	1430
2120	1362	2395	1396	2425	1431
2117	1363	2398	1397	1161	1432
2075	1364	2401	1398	2431	1434
2106	1365	2399	1399	1166	1435
2122	1366	2402	1400	2171	1438
2126	1368	2403	1401	2436	1439
2127	1369	2404	1403	1966	1440
2124	1370	2414	1404	2450	1441
2131	1371	2409	1406	2452	1442
2137	1372	2408	1407	2455	1443
2134	1374	2410	1409	2456	1444
2133	1375	2411	1411	2453	1445
2125	1376	2412	1412	1980	1446
2111	1377	2413	1414	2457	1447
2385	1379	2415	1416	2458	1448
2384	1381	2417	1417	2035	1449

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
2461	1450	2551	1479	2659	1527
2462	1451	2557	1480	2671	1528
1080	1452	2560	1481	2674	1529
2463	1453	2573	1482	2698	1530
2464	1454	2574	1483	2693	1531
2468	1455	2575	1484	2715	1534
2470	1456	2577	1486	2722	1535

2473	1457	2578	1487	2708	1536
2474	1458	2579	1488	2752	1538
2495	1459	2580	1492	2773	1539
2476	1460	3514	1497	2705	1541
2477	1461	2584	1500	2665	1542
2492	1462	2587	1501	2668	1543
2481	1463	2588	1502	2675	1544
2503	1464	2589	1507	2689	1546
2504	1465	2591	1508	2677	1548
2512	1468	2594	1509	2678	1549
2519	1469	2595	1511	2679	1550
2526	1470	2582	1512	2680	1551
2530	1471	2600	1513	2684	1552
2541	1472	2602	1515	2676	1557
2544	1474	2605	1518	2681	1558
2545	1475	2596	1521	2696	1560
2546	1476	2604	1522	2700	1561
2550	1477	2623	1524	2786	1572
2548	1478	2647	1525	2894	1574

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
2792	1576	2843	1618	3025	1659
2791	1577	2845	1620	3021	1660
2873	1585	2848	1622	3026	1661
2812	1587	2850	1623	3027	1662
2813	1588	2851	1624	3032	1663
2815	1589	2853	1626	3030	1664
2816	1590	2629	1628	3020	1665
2818	1592	2893	1629	3041	1666

2819	1593	2885	1630	3049	1669
2820	1594	2889	1631	1944	1670
2835	1595	2895	1633	3050	1674
2821	1596	3209	1636	3058	1675
2823	1597	2897	1638	3065	1676
2824	1600	2899	1639	3066	1677
2827	1601	2902	1642	3068	1678
2828	1602	2906	1644	3128	1683
2830	1603	2927	1647	3132	1684
2829	1604	2937	1648	3140	1686
2832	1606	2940	1649	90	1689
2831	1607	2945	1650	2121	1692
2833	1608	2947	1651	3145	1693
2834	1609	619	1652	3166	1696
2837	1611	2948	1653	3171	1697
2838	1613	2964	1654	3176	1698
2839	1614	2625	1655	3178	1699
2840	1616	3023	1657	3179	1700
2842	1617	3024	1658	3180	1701

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
3183	1702	3312	1750	3642	1785
3185	1703	3314	1751	3523	1786
3192	1705	3315	1752	3643	1789
3194	1707	3328	1753	3503	1790
3195	1708	3356	1755	2515	1792
3198	1709	3366	1750	3191	1796
3199	1710	3364	1751	3648	1798
3200	1711	3368	1752	3642	1807
3214	1712	3371	1753	3523	1808

3205	1714	3372	1755	3643	1809
3213	1717	3373	1757	2084	1810
3216	1720	3374	1758	3528	1811
3217	1723	3375	1760	3529	1812
3221	1725	3377	1761	3665	1813
3222	1727	3363	1763	3536	1814
3225	1731	3361	1768	3748	1815
3227	1732	3379	1769	3631	1838
3228	1734	3383	1770	3633	1839
3232	1735	3453	1771	3634	1840
3234	1737	3630	1772	3640	1844
3236	1738	3498	1773	3644	1845
3238	1739	3635	1775	3646	1847
3174	1741	3503	1776	3647	1848
3240	1742	2515	1777	3638	1850
3260	1746	3191	1778	3652	1853
3271	1748	3648	1783	3653	1854

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
3654	1855	3738	1892	3783	1928
3657	1857	3739	1893	3785	1929
3659	1858	3740	1894	3790	1930
3660	1860	3741	1895	1575	1931
3661	1861	3743	1896	655	1933
3662	1863	3527	1900	656	1934
3663	1864	3745	1902	185	1935
3667	1865	3746	1903	657	1936
3666	1867	3749	1905	1719	1937
3543	1868	3756	1907	1715	1938
3656	1869	3759	1908	1581	1939

3668	1871	3760	1909	1713	1941
3669	1872	3761	1910	1426	1942
3670	1873	3764	1913	1718	1943
3683	1876	3755	1914	1720	1944
3676	1877	3768	1915	1721	1946
3677	1878	3769	1916	1587	1947
3679	1879	1930	1917	1590	1948
3678	1880	3770	1918	207	1950
3702	1882	3771	1919	840	1951
3711	1883	3774	1921	667	1953
3728	1885	3766	1922	663	1954
3730	1886	3776	1923	670	1955
3732	1887	3777	1924	3511	1956
3733	1888	3767	1925	843	1957
3735	1889	3780	1926	665	1960
3736	1890	3779	1927	3187	1961

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
671	1962	1664	2005	36	19
664	1965	1787	2006	36	18
672	1966	1705	2008	3244	1744
3517	1968	1285	1006	3244	1745
819	1969	1285	1022	3369	1765
124	1970	1257	1012	3369	1766
1613	1972	1318	1021	3512	1797
2518	1975	1318	1028	3512	1891
1746	1976	1392	1050	3512	1899
1747	1977	1392	1051	3675	1837
3531	1978	1402	1059	3675	1990

1744	1979	1402	1076	3639	1842
1626	1980	88	1117	3639	1843
1625	1981	88	88	3645	1846
1750	1983	88	67	3645	1849
3142	1984	1799	1181	3650	1851
1753	1985	1799	1182	3650	1852
1759	1986	33	12	3672	1874
3533	1987	33	41	3672	1875
1612	1988	2787	1573	3664	1881
1632	1989	2787	1579	3664	1870
2524	1991	2903	1646	3737	1904
1765	1992	2903	1635	3737	1906
1911	1993	3044	1667	3762	1911
1912	1994	3044	1668	1272	1016
1640	1997	36	17	3762	1912
1646	2002	36	15	1739	1959

Baru	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**
1739	1964	70	92	822	761
1739	1971	69	52	822	763
1520	196	69	39	822	764
180	28	69	42	1489	788
180	25	189	64	1489	787
41	29	189	61	996	835
41	1998	1272	1018	996	837
41	2004	189	728	3037	847
50	38	845	709	3037	860
50	40	845	708	1089	883
70	53	820	722	1089	918
70	57	820	759	1268	992

70	59	806	747	1268	986
70	55	806	922	1272	999
70	44	822	762	1272	1005
70	56	822	763	1272	1013
70	60	822	760	1272	1032